indosat

MAKING CHANGES

2009

LAPORAN TAHUNAN

MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA DINAMIS DENGAN MENEMPATKAN BISNIS KAMI UNTUK HASIL YANG MEMUASKAN DALAM JANGKA PANJANG

DAFTAR ISI

NILAI DAN STRATEGI KAMI	Visi & Misi	2
	Nilai-Nilai & Pencapaian Kami	4
	Inisiatif Utama 2009	6
IKHTISAR UTAMA	Ikhtisar Keuangan	8
	Ikhtisar Operasional	10
	Ikhtisar Saham & Obligasi	12
	Penghargaan Bergengsi 2009	16
	Peristiwa Penting 2009	18
PERUSAHAAN	Struktur Organisasi	20
	Sekilas indosat	22
	Produk & Merek Kami	24
LAPORAN	Sambutan Dewan Komisaris	28
	Laporan Direksi	36
	Informasi Tentang Perusahaan	43
	Laporan Tata Kelola Perusahaan	82
	Making a Difference	106
	Faktor-Faktor Risiko	109
	Analisis & Pembahasan Manajemen	127
	Pertanggungjawaban Direksi atas Laporan Keuangan Konsolidasi 2009	158
	Laporan Keuangan	159
	Rekonsiliasi PSAK terhadap IFRS	272
	Pertanggungjawaban terhadap Laporan Tahunan 2009	278
	Laporan Tahunan dalam Format 20-F	279
	International Financial Reporting Standard (IFRS)	419
	Informasi Bagi Pemegang Saham	A-1

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini adalah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan disajikan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 dan X.K.7. Format 20-F dalam Laporan Tahunan ini diambil dari Laporan Tahunan dalam Format 20-F yang telah kami sampaikan kepada US-SEC.

Dalam Laporan Tahunan ini, kata "Indosat", "Perusahaan", dan "kami" merujuk kepada PT Indosat Tbk dan anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Sedangkan kata "Indonesia" merujuk kepada Republik Indonesia. "Pemerintah" adalah Pemerintah Indonesia. "Amerika Serikat" atau "AS" adalah Amerika Serikat. "Rupiah" atau "Rp" adalah mata uang resmi Indonesia dan "Dolar AS" atau "US$" adalah mata uang resmi Amerika Serikat. Beberapa angka tertentu (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk mempermudah, sehingga angka, perhitungan, persentase dan rasio yang diberikan dengan yang sesungguhnya dapat berbeda. Kecuali jika disebutkan, semua informasi keuangan yang berhubungan dengan kami, disajikan dalam Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan ini mencantumkan beberapa informasi keuangan dan hasil-hasil usaha tertentu, serta mungkin juga mencantumkan beberapa proyeksi, rencana, strategi dan tujuan tertentu dari Indosat, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis, yang akan dianggap sebagai pernyataan pandangan ke depan dalam batasan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan ke depan bergantung kepada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kejadian-kejadian nyata dan hasil-hasil masa depan Indosat yang secara material berbeda dengan yang diharapkan atau ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan yang demikian. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi, atau ditunjukkan oleh setiap pernyataan yang bersifat pandangan ke depan, akan dicapai.

Tidak ada informasi apapun yang terdapat di dalamnya yang boleh direproduksi tanpa izin tertulis dari Perusahaan.

Untuk informasi termutakhir, silahkan hubungi Group Investor Relations, Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta 10110, Indonesia. Tel. (62-21) 3000 3001, 3869 615, Fax. (62-21) 3000 3757 atau E-mail: investor@indosat.com.

Kami berkomitmen untuk berkomunikasi secara terbuka dengan setiap *Stakeholder*. *Stakeholder* kami dapat melihat situs kami di www.indosat.com untuk informasi lebih lanjut mengenai Indosat. Versi online dari dokumen ini juga tersedia di www.indosat.com.

Strategi kami pada 2009 makin mendekatkan kami pada pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Dengan mempertajam potensi Perusahaan saat ini serta dukungan dari pemegang saham utama kami yang baru, Qatar Telecom (Qtel), Indosat memulai langkah peralihan strategi di tahun 2009 untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan. Walaupun berlangsung secara terbatas, perubahan yang kami lakukan telah menandai sebuah proses transformasi internal dalam pendekatan Indosat terhadap bisnis Perusahaan. Kami mengantisipasi hasil dari peralihan ini akan terus berlanjut dalam jangka panjang saat Indosat melakukan pembaharuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

TENTANG KAMI

VISI & **MISI**

Visi

Menjadi perusahaan pilihan penyedia solusi informasi dan komunikasi di Indonesia dengan:

- Menawarkan produk, layanan, solusi informasi dan komunikasi yang lengkap serta berkualitas
- Menjadi pilihan utama pelanggan dalam menyediakan produk, layanan serta solusi informasi dan komunikasi
- Menyediakan produk dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam wilayah operasional kami

Misi

- Menyediakan dan mengembangkan produk, layanan dan solusi inovatif dan berkualitas untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pelanggan
- Meningkatkan *shareholder value* secara terus menerus
- Mewujudkan kualitas kehidupan *stakeholder* yang lebih baik

NILAI-NILAI & **PENCAPAIAN KAMI**

Berlandaskan nilai-nilai Insan Gemilang, Indosat adalah operator selular terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia.

- Kami menawarkan layanan jasa terlengkap dibandingkan dengan penyedia jasa telekomunikasi lainnya di Indonesia.
- Indosat memiliki 33,1 juta pelanggan selular dan 16.353 BTS.
- Memiliki merek (*brand equity*) yang kuat dan reputasi keunggulan yang tinggi.

Budaya perusahaan kami yang terangkum dalam Nilai-Nilai Insan Gemilang, menjadi pedoman bagi perilaku kami, yakni:

INTEGRITAS	KERJASAMA	KEUNGGULAN	KEMITRAAN	FOKUS PADA PELANGGAN
Mematuhi standar etika tertinggi dalam semua aspek kerja berdasarkan prinsip-prinsip loyalitas, tanggung-jawab dan dedikasi terhadap Perusahaan.	Bekerja dalam tim dengan kinerja yang baik, memanfaatkan keahlian dan pengalaman dari kolega dan mitra kami dalam suasana yang saling percaya.	Bertekad untuk menghasilkan yang terbaik dalam hal apapun yang dilakukan dan berupaya untuk menciptakan hasil yang melebihi harapan.	Bertekad untuk menjadi mitra yang baik, menjalin hubungan kolaboratif, produktif, dan saling menguntungkan.	Berfokus pada upaya untuk melebihi harapan pelanggan dalam hal apapun yang kami lakukan.

NILAI DAN STRATEGI KAMI

INISIATIF **UTAMA 2009**

Dalam upaya membuat diferensiasi sekaligus memperkokoh keunggulan kami, Indosat melaksanakan serangkaian perubahan di tahun 2009. Tujuan kami adalah untuk bertransformasi menjadi organisasi yang lebih fokus pada pelanggan, untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Value strategy Berbasis Tiga Pilar untuk mengelola perubahan, sebagai berikut:

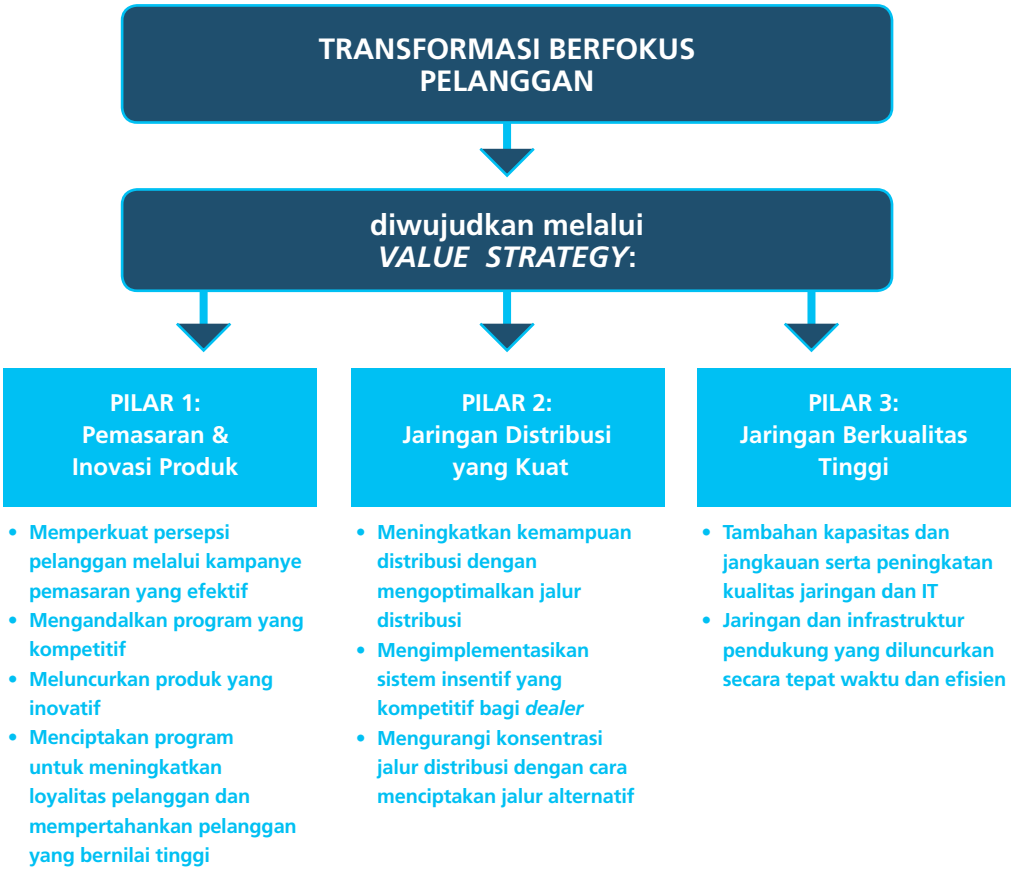
TRANSFORMASI BERFOKUS PELANGGAN
diwujudkan melalui VALUE STRATEGY:
PILAR 1: Pemasaran & Inovasi Produk
• Memperkuat persepsi pelanggan melalui kampanye pemasaran yang efektif
• Mengandalkan program yang kompetitif
• Meluncurkan produk yang inovatif
• Menciptakan program untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang bernilai tinggi
PILAR 2: Jaringan Distribusi yang Kuat
• Meningkatkan kemampuan distribusi dengan mengoptimalkan jalur distribusi
• Mengimplementasikan sistem insentif yang kompetitif bagi dealer
• Mengurangi konsentrasi jalur distribusi dengan cara menciptakan jalur alternatif
PILAR 3: Jaringan Berkualitas Tinggi
• Tambahan kapasitas dan jangkauan serta peningkatan kualitas jaringan dan IT
• Jaringan dan infrastruktur pendukung yang diluncurkan secara tepat waktu dan efisien

Didukung dengan penciptaan *Strategic Business Units* (SBU) berdasarkan jenis pelanggan: *Consumer Wireless, Consumer Broadband, Corporate Solutions, Wholesale and Infrastructure*

Inisiatif yang mulai diterapkan pada semester pertama, telah menunjukkan hasil nyata pada semester kedua tahun 2009, berupa pertumbuhan dari triwulan ke triwulan.

IKHTISAR UTAMA

IKHTISAR KEUANGAN

(dalam Miliar Rupiah)	2009	2008	2007	2006	2005
LAPORAN LABA RUGI					
Pendapatan Usaha	18.393,0	18.659,1	16.488,5	12.239,4	11.589,8
Beban Usaha	15.180,0	13.925,9	11.968,9	8.840,7	7.937,9
Laba Usaha	3.213,0	4.733,3	4.519,6	3.398,7	3.651,9
Penghasilan (Beban) Lain - Bersih	(981,0)	(2.408,2)	(1.590,0)	(1.375,8)	(1.299,2)
Bagian Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Asosiasi	0,0	0,0	0,0	(0,2)	0,1
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.232,0	2.325,1	2.929,6	2.022,7	2.352,8
Beban Pajak Penghasilan Bersih	(677,3)	(419,8)	(859,5)	(576,1)	(697,9)
Laba Sebelum Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan	1.554,7	1.905,3	2.070,1	1.446,6	1.654,9
Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan	(56,5)	(26,8)	(28,1)	(36,5)	(31,4)
Laba Bersih	1.498,2	1.878,5	2.042,0	1.410,1	1.623,5
Jumlah Saham Beredar (dalam jutaan lembar saham)	5.433,9	5.433,9	5.433,9	5.433,9	5.356,2
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah)	275,7	345,7	375,8	260,9	309,0
EBITDA	8.774,4	9.289,2	8.682,8	7.051,9	6.732,1
NERACA					
Jumlah Aset	55.041,5	51.693,3	45.305,1	34.228,7	32.787,1
Aset Tetap - Bersih	44.428,8	38.394,1	30.572,8	24.918,6	21.564,8
Modal Kerja	(5.928,5)	(983,5)	(832,5)	(1.137,8)	2.095,6
Jumlah Kewajiban	36.753,2	33.994,8	28.463,0	18.826,3	18.296,1
Hak Minoritas	330,6	288,9	297,4	200,6	175,7
Jumlah Ekuitas	17.957,7	17.409,6	16.544,7	15.201,8	14.315,3
RASIO USAHA (%)					
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha	17,47	25,37	27,41	27,77	31,51
Laba Usaha terhadap Ekuitas	17,89	27,19	27,32	22,36	25,51
Laba Usaha terhadap Jumlah Aset	5,84	9,16	9,98	9,93	11,14
Marjin EBITDA	47,71	49,78	52,66	57,62	58,09
Marjin Laba bersih	8,15	10,07	12,38	11,52	14,01
Pengembalian Modal	8,34	10,79	12,34	9,28	11,34
Pengembalian Aset	2,72	3,63	4,51	4,12	4,95
RASIO KEUANGAN (%)					
Rasio Lancar	54,63	90,79	92,86	83,28	138,58
Rasio Hutang terhadap Ekuitas	141,14	124,69	99,84	75,13	87,34
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aset	66,77	65,76	62,83	55,00	55,80
DIVIDEN PER SAHAM (RP)					
Final	172,85	187,90	129,75	149,32	154,23
Tanggal Pembayaran	22/7/2009	15/7/2008	13/7/2007	8/8/2006	15/7/2005

IKHTISAR UTAMA

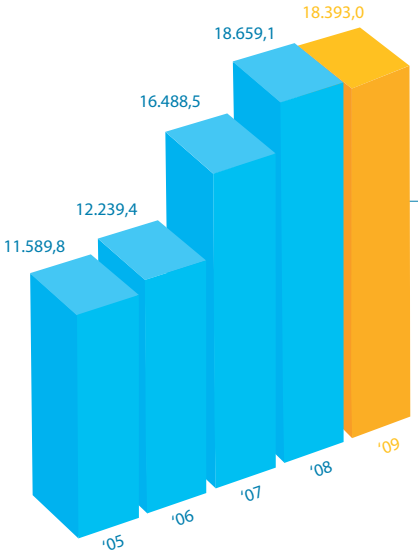

PENDAPATAN USAHA
(dalam Miliar Rupiah)

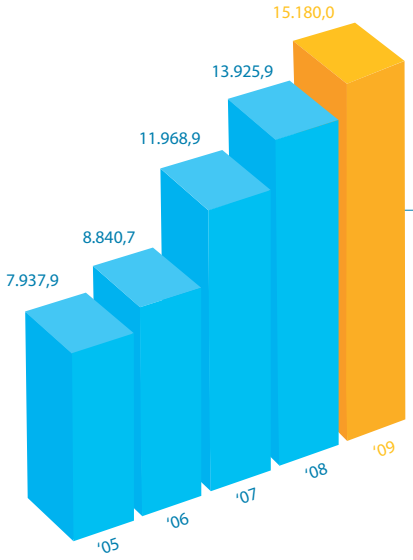

BEBAN USAHA
(dalam Miliar Rupiah)

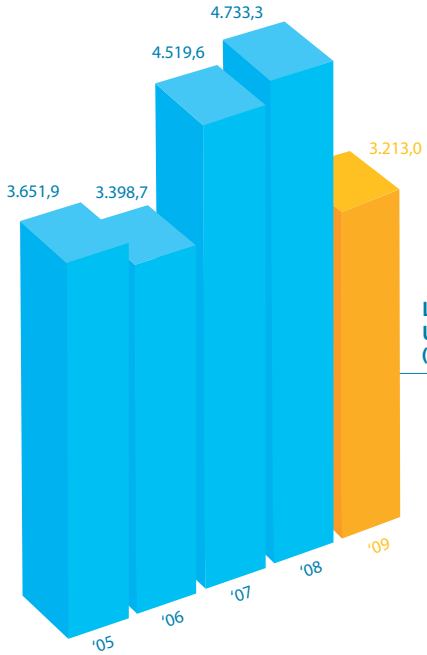

LABA USAHA
(dalam Miliar Rupiah)

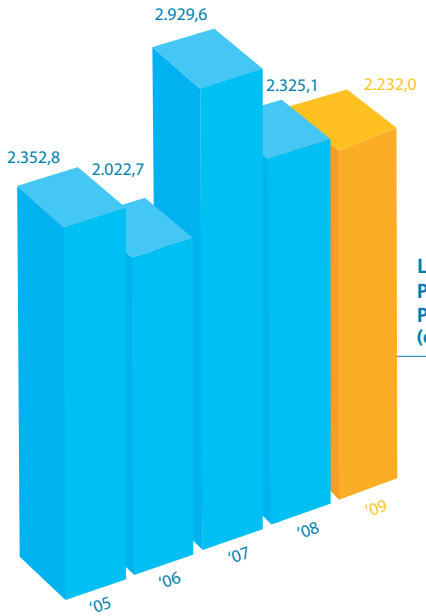

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
(dalam Miliar Rupiah)

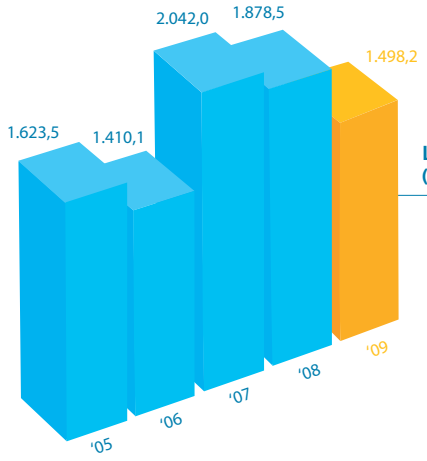

LABA BERSIH
(dalam Miliar Rupiah)

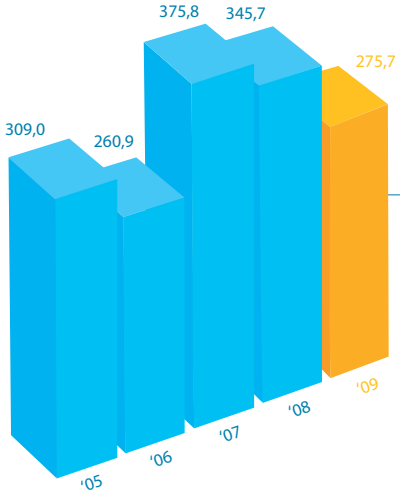

LABA PER SAHAM DASAR
(dalam Rupiah)

IKHTISAR UTAMA

IKHTISAR OPERASIONAL

	Satuan	2009	2008	% Perubahan
SELULAR				
Pelanggan Pra-bayar	pelanggan	31.333.173	35.591.033	-12,0
Pelanggan Pasca bayar	pelanggan	1.803.342	919.213	96,2
Total Pelanggan	pelanggan	33.136.515	36.510.246	-9,2
ARPU Pra-bayar	Rp	33.138	34.610	-4,3
ARPU Pasca bayar	Rp	175.327	189.710	-7,6
ARPU Gabungan	Rp	37.330	38.639	-3,4
TELEPON TETAP NIRKABEL				
Pelanggan Pra-bayar	pelanggan	525.391	681.362	-22,9
Pelanggan Pasca bayar	pelanggan	68.742	80.227	-14,3
Total Pelanggan	pelanggan	594.133	761.589	-22,0
ARPU Pra-bayar	Rp	23.207	17.955	29,3
ARPU Pasca bayar	Rp	69.160	94.555	-26,9
ARPU Gabungan	Rp	28.402	22.858	24,3
SLI				
Trafik *Outgoing*	menit	502.032.713	473.991.957	5,9
Trafik *Incoming*	menit	1.486.213.187	1.484.450.321	0,1
Total Trafik	menit	1.988.244.900	1.958.442.278	1,5
Rasio *Incoming/Outgoing*	-	3,0	-3,1	-196,8
MIDI				
Wholesale				
Sirkit Sewa Internasional Kecepatan Tinggi	sirkit/64kbps	80.048	45.594	75,6
Sirkit Sewa Domestik Kecepatan Tinggi	sirkit/64kbps	170.844	129.315	32,1
Frame Relay	port	356	494	-27,9
IPVPN	sirkit/64kbps	16.476	18.114	-9,0
Lintasarta				
Sirkit Sewa Kecepatan Tinggi	sambungan	752	906	-17,0
Frame Relay	akses	4.046	4.431	-8,7
VSAT	terminal	3.075	2.564	19,9
IPVPN	sambungan	7.308	6.182	18,2
IM2				
Internet *Dial Up*	pelanggan	9.291	13.142	-29,3
Internet *Dedicated*	sambungan	884	1665	-46,9
IPVPN	sambungan	447	562	-20,5
Karyawan (Tetap dan Tidak tetap termasuk karyawan anak perusahaan)	orang	7.126	7.700	-7,5
Galeri Indosat	Service centre	171	162	43,2
Griya Indosat	Service centre	61	163	-62,6

TOTAL PELANGGAN SELULAR
(Juta)

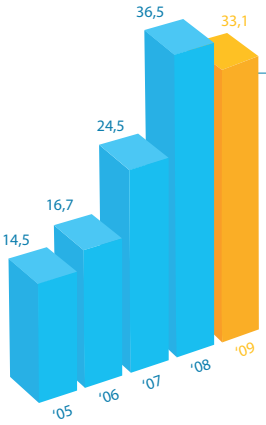

KOMPOSISI PELANGGAN SELULAR
(Juta)

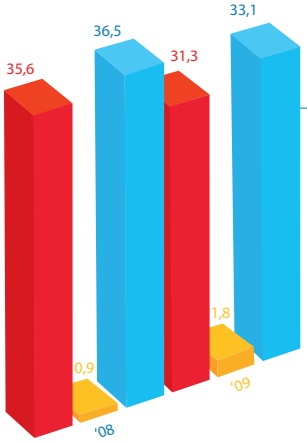

ARPU-GABUNGAN* SELULAR
(Ribuan Rupiah)
*ARPU-Gabungan: Pendapatan rata-rata pelanggan

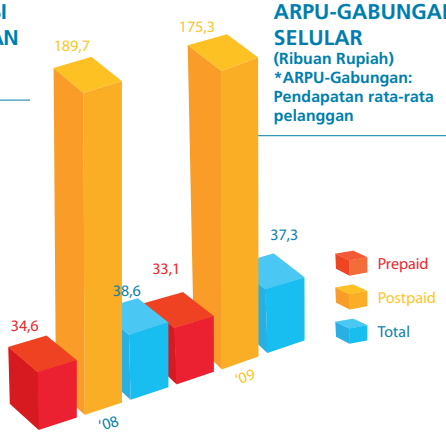

TOTAL PELANGGAN TELEPON TETAP NIRKABEL

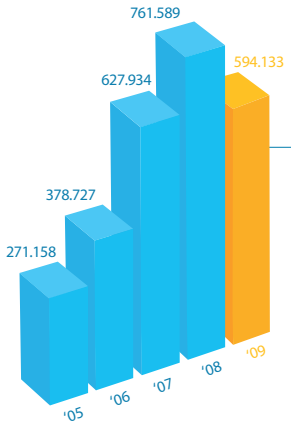

KOMPOSISI TELEPON TETAP NIRKABEL

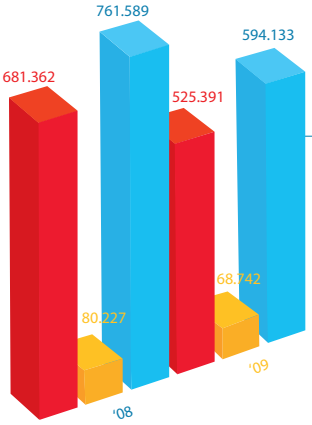

ARPU-GABUNGAN* TELEPON TETAP NIRKABEL
(Ribuan Rupiah)
*ARPU-Gabungan: Pendapatan rata-rata per pelanggan

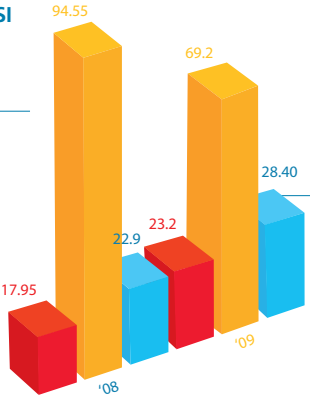

RASIO SLI *INCOMING/ OUTGOING*

TRAFIK SLI
(Juta Menit)

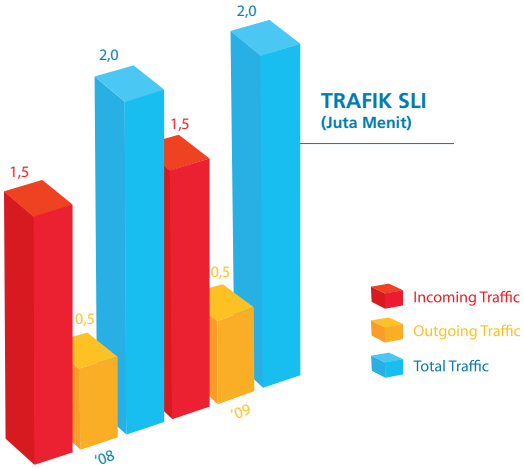

IKHTISAR UTAMA

IKHTISAR SAHAM & OBLIGASI

IKHTISAR SAHAM

Kinerja Saham

	New York Stock Exchange (AS$/ADR)		Bursa Efek Indonesia (Rp/Saham)	
	2009	2008	2009	2008
Tertinggi	30,37	47,01	5.950	8.750
Terendah	16,74	16,00	4.200	3.950
Di Akhir Tahun	25,11	25,85	4.725	5.750
Laba Bersih per ADR/Saham	1,47	1,58	275,72	345,7
Dividen per Saham	-	0,92	-	172,85
Rasio Dividen yang Dibayarkan (%)	-	50,00	-	50,00
(%) *Dividen Yield* Dividen per ADR/Saham Harga ADR/Saham di Akhir Tahun	-	3,56	-	3,01
Rasio P/E Harga ADR/Saham Akhir Tahun Laba Bersih per ADR/Saham	17,08x	16,36x	17,13x	16,63x

Harga Saham per Triwulan di NYSE (US$/ADR)

	2009		2008		Volume 2009 (LOT)	
Periode	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
Triwulan Pertama	26,25	16,74	47,01	32,72	228.721	2.374
Triwulan Kedua	26,65	20,99	38,91	29,20	121.100	5.300
Triwulan Ketiga	28,35	24,29	37,45	29,86	292.254	500
Triwulan Keempat	30,37	24,28	31,80	19,00	252.192	935

Harga Saham per Triwulan di BEI (Rp)

	2009		2008		Volume 2009 (ADS)	
Period	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
Triwulan Pertama	5.900	4.200	8.750	5.850	88.855	1.015
Triwulan Kedua	5.950	4.850	7.000	5.300	78.074	1.845
Triwulan Ketiga	5.700	5.050	6.750	5.800	58.314	1.740
Triwulan Keempat	5.700	4.600	5.750	3.950	25.283	633

Kronologi Pencatatan Saham

Tanggal	Keterangan	Bursa Efek	Modal Dasar	Jumlah Saham Yang Ditempatkan	Nilai Nominal per saham
18 Oktober 1994	Penawaran Umum Perdana	New York Stock Exchange dalam bentuk *American Depository Shares* (ADS)	1 saham Seri A*) 3.999.999.999 saham Seri B	1 saham Seri A*) 1.035.499.999 saham Seri B (termasuk 25.012.300 ADS)	1 ADS setara dengan 10 lembar saham seri B
19 Oktober 1994		Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya			Rp 500 per saham
Maret 2004	Pemecahan Nilai Nominal Saham	Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya dan New York Stock Exchange	1 saham Seri A*) 19.999.999.999 saham Seri B	1 saham Seri A*) 5.177.499.999 saham Seri B (termasuk 7.043.313 ADS)	Rp 100 per saham 1 ADS setara dengan 50 lembar saham seri B
1 Agustus 2004 – 1 Agustus 2005	Pelaksanaan ESOP I	Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya		178.674.500 saham Seri B	Rp 100 per saham
31 Desember 2005	Jumlah saham setelah penutupan ESOP I	Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya dan New York Stock Exchange	1 saham Seri A*) 19.999.999.999 saham Seri B	1 saham Seri A*) 5.356.174.499 saham Seri B (termasuk 9.534.636 ADS)	Rp 100 per saham 1 ADS setara dengan 50 lembar saham seri B
1 Agustus 2004 – 1 Agustus 2006	Pelaksanaan ESOP II	Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya		77.759.000 saham Seri B	Rp 100 per saham
31 Desember 2006	Jumlah saham setelah penutupan ESOP II	Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya dan New York Stock Exchange	1 saham Seri A*) 19.999.999.999 saham Seri B	1 saham Seri A*) 5.433.933.499 saham Seri B (termasuk 6.288.502 ADS)	Rp 100 per saham 1 ADS setara dengan 50 lembar saham seri B
31 Desember 2009		Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange	1 saham Seri A*) 19.999.999.999 saham Seri B	1 saham Seri A*) 5.433.933.499 saham Seri B (termasuk 16.351.213 ADS)	Rp 100 per saham 1 ADS setara dengan 50 lembar saham seri B

*) Saham Seri A dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

KINERJA SAHAM

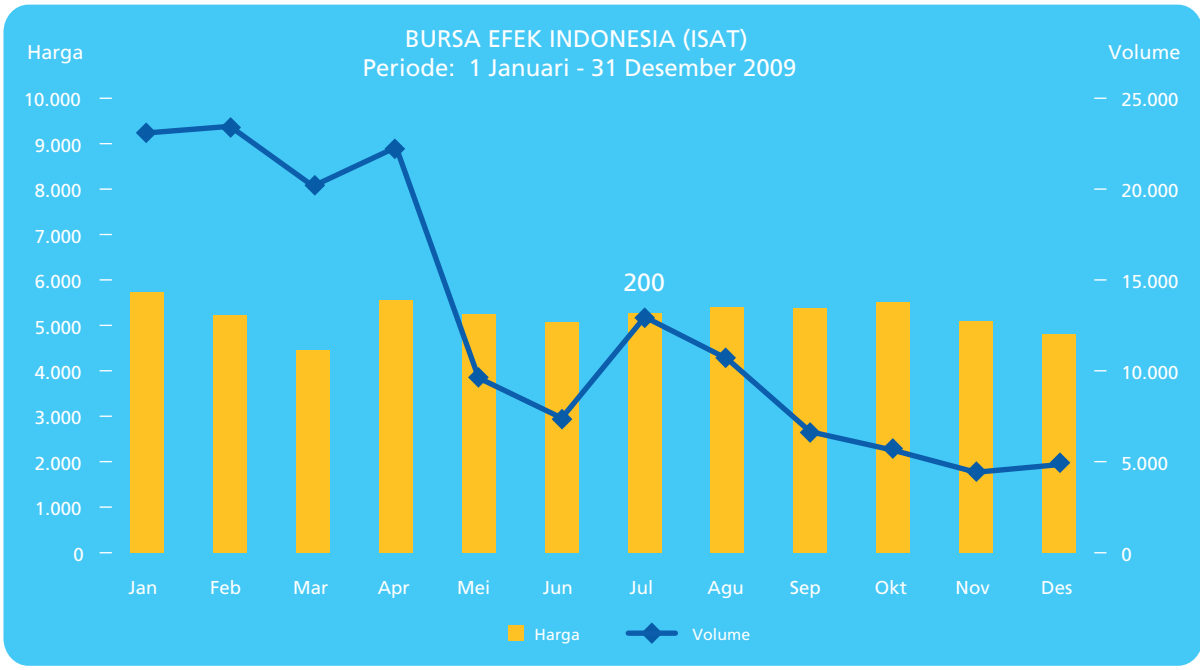

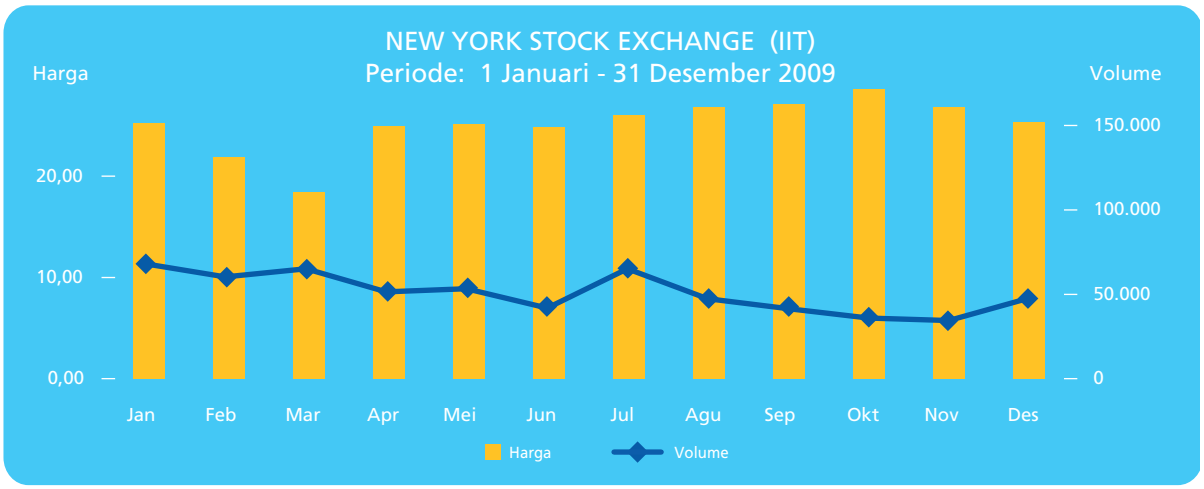

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

per 31 Desember 2009

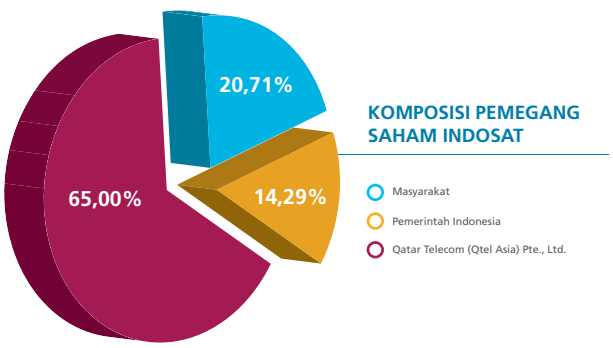

IKHTISAR UTAMA

IKHTISAR OBLIGASI

Kronologi Pencatatan Obligasi

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Bursa Efek	Jumlah	Suku Bunga / Cicilan Imbalan Ijarah	Jatuh Tempo
Obligasi Indosat Kedua	6 November 2002	Bursa Efek Surabaya*	Seri B : Rp200,0 miliar	16,0% per tahun	6 November 2032
Obligasi Indosat Ketiga	22 Oktober 2003	Bursa Efek Surabaya*	Seri B : Rp640,0 miliar	12,875% per tahun	22 Oktober 2010
Obligasi Indosat Keempat	21 Juni 2005	Bursa Efek Surabaya*	Rp815,0 miliar	12% per tahun	21 Juni 2011
Obligasi Indosat Kelima	29 Mei 2007	Bursa Efek Surabaya*	Seri A : Rp1.230,0 miliar	10,20% per tahun	29 Mei 2014
			Seri B : Rp1.370,0 miliar	10,65% per tahun	29 Mei 2017
Obligasi Indosat Keenam	9 April 2008	Bursa Efek Indonesia	Seri A : Rp760,0 miliar	10,25% per tahun	9 April 2013
			Seri B : Rp320,0 miliar	10,80% per tahun	9 April 2015
Obligasi Indosat Ketujuh	8 Desember 2009	Bursa Efek Indonesia	Seri A : Rp700,0 miliar	11,25% per tahun	8 Desember 2014
			Seri B : Rp600,0 miliar	11,75% per tahun	8 Desember 2016
Obligasi Syariah Ijarah	21 Juni 2005	Bursa Efek Surabaya*	Rp285,0 miliar	Rp34,20 miliar per tahun	21 Juni 2011
Sukuk Ijarah Indosat Kedua	29 Mei 2007	Bursa Efek Surabaya*	Rp400,0 miliar	Rp40,80 miliar per tahun	29 Mei 2014
Sukuk Ijarah Indosat Ketiga	9 April 2008	Bursa Efek Indonesia	Rp570,0 miliar	Rp58,43 miliar per tahun	9 April 2013
Sukuk Ijarah Indosat Keempat	8 Desember 2009	Bursa Efek Indonesia	Seri A : Rp28,0 miliar	Rp3,15 miliar per tahun	8 Desember 2014
			Seri B : Rp172,0 miliar	Rp20,21 miliar per tahun	8 Desember 2016
Guaranteed Notes jatuh tempo 2010	5 November 2003	Luxembourg Stock Exchange dan Singapore Exchange Securities Trading Limited	US$234,7 juta	7,75% per tahun	5 November 2010
Guaranteed Notes jatuh tempo 2012	22 Juni 2005	Singapore Exchange Securities Trading Limited	US$109,4 juta	7,125% per tahun	22 Juni 2012

* Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya bergabung ke Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia

Peringkat Kredit (per 31 Desember 2009)

Obligasi	Peringkat	Tanggal Laporan Peringkat Diumumkan	Lembaga Pemeringkat
1. Obligasi Indosat Kedua Seri B Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap	$_{id}$AA+ (Negative Outlook)	November 2009	PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”).
2. Obligasi Indosat Ketiga Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap	$_{id}$AA+ (Negative Outlook)	November 2009	Pefindo
3. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010	BB (Stable Outlook)	Desember 2009	Standard & Poor’s (“S&P”)
	Ba1 (Stable Outlook)	September 2009	Moody’s Investors Service
4. Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap	$_{id}$AA+ (Negative Outlook)	November 2009	Pefindo
5. Obligasi Syariah Ijarah	$_{id}$AA$_{(sy)}$+ (Negative Oulook)	November 2009	Pefindo
6. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012	BB (Stable Outlook)	Desember 2009	S&P
	Ba1 (Stable Outlook)	September 2009	Moody’s Investors Service
7. Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap	$_{id}$AA+ (Negative Outlook)	November 2009	Pefindo
8. Sukuk Ijarah Indosat II di Tahun 2007	$_{id}$AA$_{(sy)}$+ (Negative Oulook)	November 2009	Pefindo
9. Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap	$_{id}$AA+ (Negative Outlook)	November 2009	Pefindo
10. Sukuk Ijarah Indosat III di Tahun 2008	$_{id}$AA$_{(sy)}$+ (Negative Oulook)	November 2009	Pefindo
11. Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 dengan Tingkat Bunga Tetap	$_{id}$AA+ (Negative Outlook)	November 2009	Pefindo
12. Sukuk Ijarah Indosat IV di Tahun 2009	$_{id}$AA$_{(sy)}$+ (Negative Outlook)	November 2009	Pefindo

ANAK PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2009

PT APLIKANUSA LINTASARTA ("LINTASARTA")

Indosat memiliki 72,36% saham Lintasarta yang bergerak di bidang jasa komunikasi data kecepatan tinggi dan jaringan korporat.

Alamat:
Gedung Menara Thamrin Lt.12
Jl. M.H. Thamrin Kav.3
Jakarta 10250
Tel : (62-21) 230 2345
Fax : (62-21) 230 3883
Website : http://www.lintasarta.net
Kontak : Lista Dewi Soegiharto,
General Manager Corporate Secretary
Tel : (62-21) 2302345
Email : lista.dewi@lintasarta.co.id

PT INDOSAT MEGA MEDIA ("IMM")

Indosat memiliki 99,85% dari saham IMM yang bergerak di bidang jasa multimedia dan internet termasuk jasa IP-based multimedia, Internet, dan IP-based LAN dan WAN.

Alamat :
Jl. Kebagusan Raya, No. 36
Pasar Minggu
Jakarta 12550
Kontak : Andri Aslan
Head of Corporate Secretary
Tel : (62) 855-1082101, (62-21) 7854-6969, ext. 103.
Email : andri.aslan@indosatm2.com

INDOSAT FINANCE COMPANY B.V. ("IFB")

IFB didirikan di Amsterdam, Belanda pada Oktober 2003. IFB bergerak di bidang keuangan. Indosat memiliki saham di IFB sebesar 100%. Pada tahun 2003, IFB menerbitkan guaranteed notes yang jatuh tempo tahun 2010.

Alamat :
Netherlands Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam, The Netherlands
Tel : (31) 20 521 4777
Fax : (31) 20 521 4888
Pos : P.O. Box 990
1000 AZ Amsterdam, The Netherlands
Kontak : Gert Jan van Nieuwpoort, Financial Account Manager
Tel : (31) 20 521 4830
Fax : (31) 20 521 4825
Email : gertjan.van.nieuwpoort@intertrustgroup.com

INDOSAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY B.V. ("IIFB")

IIFB didirikan di Amsterdam, Belanda pada April 2005. IIFB bergerak di bidang keuangan. Indosat memiliki saham di IIFB sebesar 100%. Pada tahun 2005, IIFB menerbitkan guaranteed notes yang jatuh tempo tahun 2012.

Alamat :
Netherlands Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam, The Netherlands
Tel : (31) 20 521 4777
Fax : (31) 20 521 4888
P.O. Box 990, 1000 AZ Amsterdam, The Netherlands
Kontak : Gert Jan van Nieuwpoort
Financial Account Manager
Tel : (31) 20 521 4830
Fax : (31) 20 521 4825
Email : gertjan.van.nieuwpoort@intertrustgroup.com

INDOSAT SINGAPORE PTE. LTD. ("ISP")

ISP didirikan di Singapura pada 21 Desember 2005. ISP adalah anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Indosat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Indosat memiliki saham di ISP sebesar 100%.

Alamat :
8 Temasek Boulevard, Suntec City Tower 3, #15-05
Singapore 038988
Tel : (65) 62355155
Fax : (65) 63374838
Kontak : Asrul Ardianto
Email : info@indosat.com.sg

PT STAR ONE MITRA TELEKOMUNIKASI ("SMT")

SMT didirikan pada 15 Juni 2006 untuk mendukung usaha konstruksi dan operasi jaringan akses tetap nirkabel dengan menggunakan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) 2000-1x di Jawa Tengah dan sekitarnya. Indosat memiliki saham di SMT sebesar 72,54%.

Alamat :
Gd. Grinatha Lt. 1
Jl. Pemuda No. 142
Semarang 50132
Tel : (62-21) 62355155
Fax : (62-24) 3560806
Kontak : M. Farid Baay
Email : m.faridbaay@indosat.com

IKHTISAR UTAMA

PENGHARGAAN BERGENGSI 2009

Pada tahun 2009, Indosat meraih 22 penghargaan, termasuk sejumlah penghargaan bergengsi untuk keunggulan dalam berbagai kategori, terutama untuk:

KEUNGGULAN PRODUK

INDONESIA CELLULAR AWARD
Operator Terbaik GSM, VAS, Layanan Blackberry Terbaik

TOP BRAND AWARD
untuk Mentari, IM3 & Matrix dari Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing

INDONESIA TELECOM AWARD
Penyedia Layanan Data Mobile dari Frost & Sullivan

KINERJA PERUSAHAAN/GCG

TOP 10 INDONESIA'S MOST ADMIRED COMPANIES
dari Wall Street Journal Asia – Singapore untuk Inovasi, Reputasi Perusahaan

ANNUAL REPORT AWARD
Peringkat ke-3 Kategori Perusahaan Swasta Non-Finansial Terdaftar dari Annual Report Award

INDONESIA'S MOST TRUSTED COMPANIES
berdasarkan Survei Asesmen Para Investor dan Analis dari Majalah SWA

ISLAMIC FINANCE AWARD & CUP (IFAC)
Penerbit Sukuk Terbesar dari Karim Business Consulting

PR PEOPLE OF THE YEAR
Versi pilihan wartawan dari Majalah Marketing MIX

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

INDONESIA CELLULAR AWARD
Program CSR Terbaik

METRO TV MDGs AWARD 2009
untuk Pengurangan Kematian Anak di Indonesia

PR PROGRAM OF THE YEAR
Silver category (kegiatan CSR IWIC) dari Majalah Marketing MIX

5th INDONESIA SUSTAINABILITY REPORT AWARD
Runner Up 2 dan Runner Up 1 untuk Situs Terbaik dari National Center untuk Laporan Keberlanjutan

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HR EXCELLENCE AWARD 2009
Peringkat ke-4 untuk *Overall Talent Management* dari Universitas Indonesia dan Majalah SWA

LAYANAN PELANGGAN

BEST CONTACT CENTER INDONESIA 2009
dari Indonesia Contact Center Association (ICCA)

CALL CENTER AWARD 2009/ SERVICE QUALITY AWARD 2009
dari Carre-CCSL dan Majalah Marketing

IKHTISAR UTAMA

PERISTIWA PENTING 2009

16 JANUARI
Peluncuran program MENTARI "Gratis Ribuan Kali Nelpon Seharian" termasuk kartu perdana dan desain logo Mentari baru.

<<

23 FEBRUARI
Peluncuran Indosat IM3 Groov3 di Jakarta.

5 MARET
Indosat memperluas layanan StarOne hingga menjangkau 55 kota di seluruh Indonesia.

>>

9 MARET
Peluncuran program CSR "Indonesia Sehat" dan "Indonesia Belajar" di Papua

21 JULI
Indosat menjadi operator pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon dan SMS *in-flight* melalui layanan AeroMobile.

<<

31 JULI
Pelanggan BlackBerry Indosat menikmati akses yang lebih baik dengan peningkatan kapasitas hingga 150%.

31 AGUSTUS
Peluncuran satelit PALAPA-D Indosat di Xichang, China memperkuat *backbone* Indosat dan menunjang layanan jasa Indosat lainnya seperti seluler, telepon tetap dan data tetap.

8 SEPTEMBER
Indosat memperoleh tambahan frekwensi 3G berdasarkan KepMen Kominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, serta alokasi tambahan pada frekuensi radio band 2,1 GHz yang memungkinkan Indosat meningkatkan kapasitas, kualitas dan cakupan.

19 SEPTEMBER
Moody menaikkan peringkat Indosat dari obligasi mata uang asing yang tidak dijamin menjadi Ba1 dan Ba2, serta mengukuhkan peringkat korporasi mata uang lokal Indosat menjadi "*stable outlook*."

>>

6 OKTOBER
Indosat memberikan donasi senilai lebih dari Rp 2 miliar kepada para korban gempa bumi di Sumatera Barat, melalui PMI dan Tim Penanggulangan Bencana Sumatera Barat.

3 NOVEMBER
21 finalis Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) 2009 terpilih dari sekitar 300 peserta lomba.

<<

17 NOVEMBER
Indosat secara resmi meluncurkan *backbone* transmisi telekomunikasi terbaru, yaitu Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) JAKABARE, dan Satelit PALAPA-D.

21 DESEMBER
Indosat mempersembahkan *BlackBerry Enterprise Service on Demand* (BES on Demand) pertama di dunia untuk kartu yang dapat diaktifkan melalui kartu pascabayar (Matrix) serta kartu prabayar (Mentari & IM3).

PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGANISASI

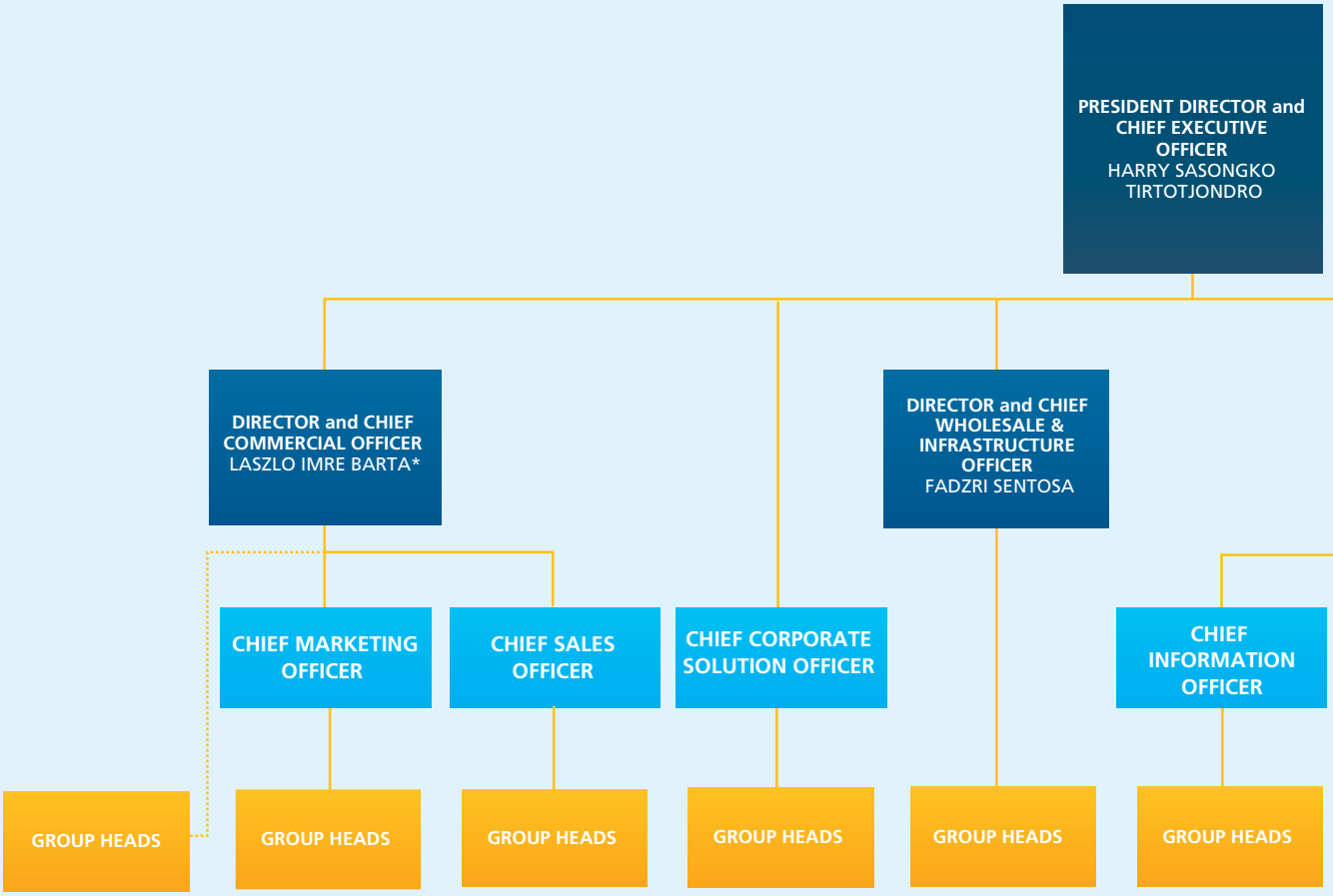

* Menggantikan Kaizad B. Heerjee efektif pada tanggal 1 Mei 2010

Sebagai bagian dari program transformasi di tahun 2009 jumlah Direktur telah dikurangi dari 9 menjadi 5

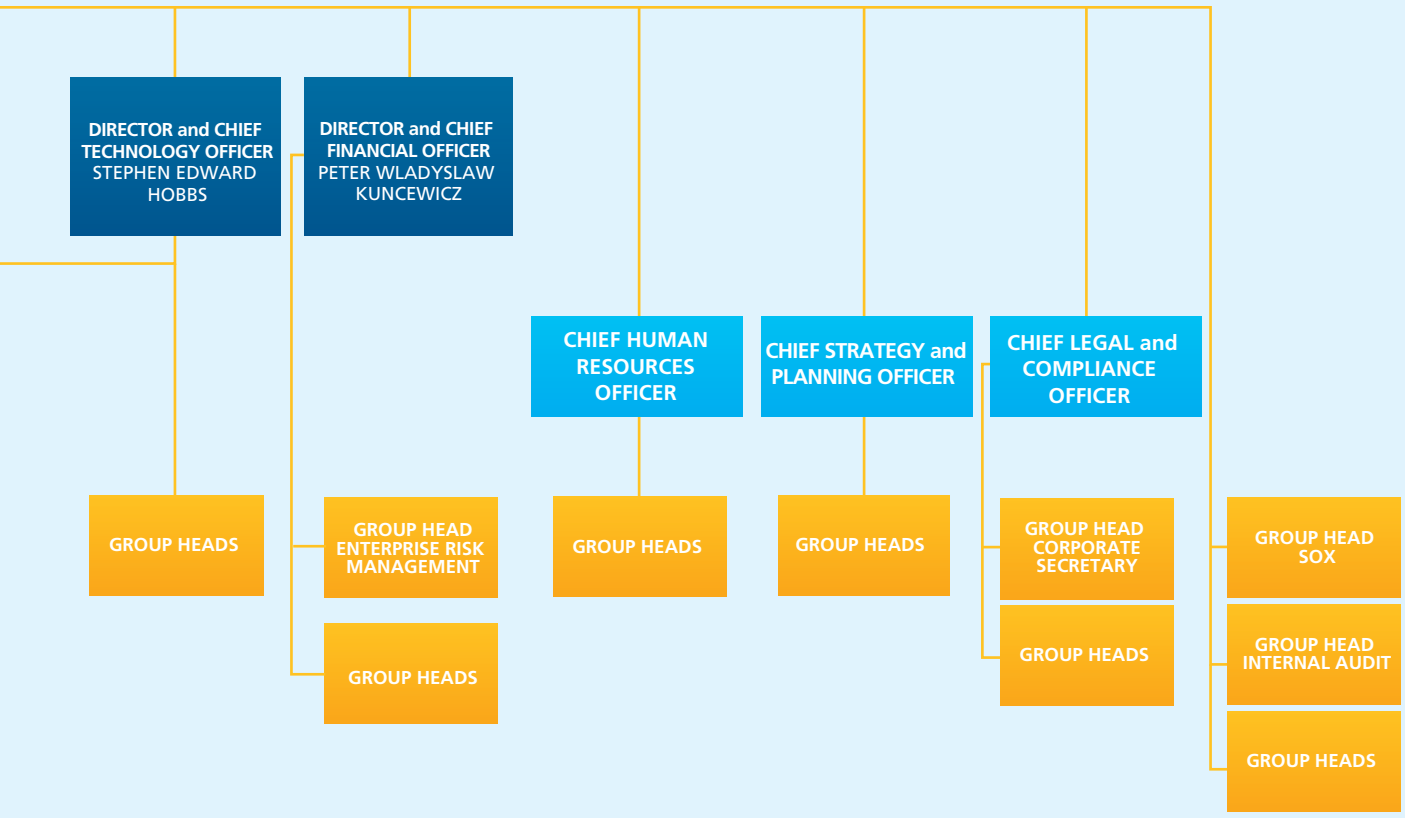

PERUSAHAAN

SEKILAS **INDOSAT**

1967

Indosat didirikan pada 1967 sebagai Perusahaan Modal Asing di Indonesia.

1980

Menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

1994

Menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan *New York Stock Exchange*.

2001

Mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3), pelopor layanan GPRS dan multimedia di Indonesia.

2002

Pemerintah Indonesia menjual 41,9% sahamnya kepada Singapore Technologies Telemedia Pte, Ltd (STT). Pada tahun yang sama memperkenalkan obligasi syariah, sebagai pelopor pembiayaan syariah di Indonesia.

Sepanjang sejarah, PT Indosat Tbk dikenal sebagai perusahaan pelopor dan inovatif yang terus menerus berkembang dan melakukan perubahan untuk beradaptasi terhadap perkembangan pasar yang kompetitif

2003

Melakukan penggabungan usaha dengan tiga anak perusahaannya, Satelindo, IM3 dan Bimagraha sehingga menjadi salah satu operator selular utama di Indonesia.

2006

Memperoleh lisensi 3G dan memperkenalkan layanan 3,5G di Jakarta dan Surabaya.

2008

Saham Indosat dimiliki oleh Qatar Telecom Q.S.C. (Qtel) secara tidak langsung melalui Indonesia Communications Limited (ICLM) dan Indonesia Communications Pte. Ltd (ICLS) sebesar 40,81%, sementara pemerintah Indonesia dan publik memiliki masing-masing 14,29% dan 44,90%.

2009

- Qtel mengakuisisi 24,19% saham seri B dari publik, sehingga menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 65%. Dengan demikian, Indosat dimiliki oleh Qatar Telecom Q.S.C. (Qtel) melalui Qtel Asia, pemerintah Indonesia, dan publik.
- Indosat memperoleh tambahan frekuensi 3G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan anak perusahaan IM2 sekaligus menjadi pemenang tender lisensi WIMAX dari pemerintah.

PERUSAHAAN

PRODUK & **MEREK KAMI**

Mempertahankan basis Keunggulan

Indosat dikenal sebagai perusahaan inovatif dan selalu menjadi pelopor. Didukung oleh kemampuan kami yang menyeluruh, kami menciptakan program dan layanan baru yang menarik bagi para pelanggan.

MENCIPTAKAN *VALUE* – MENYEDIAKAN PRODUK YANG TEPAT BAGI SEMUA PELANGGAN

Selular dan 3.5G *Broadband*

Produk & Merek	Keterangan	Manfaat bagi Pelanggan
	Layanan selular pra-bayar yang terjangkau ditujukan bagi segmen kaum muda	Waktu bicara lebih lama dan jumlah sms yang lebih banyak
	Layanan selular pra-bayar untuk pengguna regular	Perhitungan tarif yang sederhana dan hemat
	Layanan selular premium GSM pascabayar	Layanan premium untuk mobilitas yang tinggi, dengan jangkauan internasional paling luas

Matrix auto pascabayar bisa diisi ulang	Varian produk Matrix yang menawarkan layanan selular pascabayar yang dapat diisi-ulang	Fleksibilitas mengontrol pemakaian. Menggabungkan manfaat dari layanan pascabayar dan pra-bayar
star one	Fixed Wireless Access (FWA) dengan mobilitas terbatas di wilayah/kode area tertentu	Layanan komunikasi suara, SMS dan akses internet yang hemat
BlackBerry	Layanan selular pascabayar/pra-bayar dan *push-mail* global	Paket *bundling* yang menarik untuk layanan *e-mail* dan telepon *mobile*
indosat 3.5G	Akses internet *mobile*/layanan data dengan teknologi 3,5G *broadband* berkecepatan tinggi (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSPA+)	Kecepatan akses yang tinggi hingga 21 Mbps
nada sapa, i-ring 808 · i-go one for all · Imeny 123# · i-Guard	Layanan nilai tambah untuk pengguna layanan selular	Memberikan pilihan fitur, konten dan game untuk hiburan

IKHTISAR UTAMA

Telekomunikasi Tetap

Produk & Merek	Keterangan	Manfaat bagi Pelanggan
INDOSAT FlatCall 01016 GLOBAL SAVE *	Layanan *Voice Over Internet Protocol* (VOIP) domestik dan internasional	Tarif internasional yang terjangkau, kartu telepon VoIP untuk jarak jauh, biaya telepon yang terkontrol
INDOSAT SLI 001 008 IDD	Sambungan Langsung Internasional	Telepon SLI yang jernih dan berkualitas, menjangkau mitra bicara di seluruh dunia

*TIDAK LAGI TERSEDIA SEJAK MARET 2010

Jasa MIDI (Multimedia, Komunikasi Data dan Internet)

Produk & Merek	Keterangan	Manfaat bagi Pelanggan
IPLC (INTERNATIONAL PRIVATE LEASED CIRCUIT)	Layanan komunikasi Data: Produk dan jasa yang kami tawarkan dalam segmen bisnis ini meliputi layanan digital leased line *broadband* and narrowband berbasis point-to-point domestik dan internasional yang berkecepatan tinggi, layanan packet-switching berkinerja tinggi dan penyewaan transponder satelit dan jasa penyiaran.	Koneksi sirkuit private *point-to-point*
DPLC (DOMESTIC PRIVATE LEASED CIRCUIT)		
FRAME RELAY & ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE (ATM)		Fleksibilitas untuk trafik yang beragam
INTERNET NETWORK PROVIDER (INP)		Akses internet global
INDOSAT DEDICATED INTERNET ACCESS (IDIA)		Mampu membuat jaringan pribadi melalui paket data nasional
INDOSAT NATIONAL INTERNET EXCHANGE (INIX)		
MULTI-PROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS)-BASED SERVICES		Solusi layanan *broadcast* untuk nasional dan internasional
LAYANAN SATELIT		
DISASTER RECOVERY CENTER (DRC)		Layanan keamanan data

SAMBUTAN **DEWAN KOMISARIS**

Kami telah berkomitmen untuk menempuh jalur perubahan, memperbaharui strategi dan menyempurnakan modus operasional kami, untuk mewujudkan nilai-tambah yang berjangka-panjang bagi pemegang saham.

PERUBAHAN YANG BERTUJUAN. TRANSFORMASI YANG BERNILAI.

Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya mengawali tinjauan kinerja Indosat tahun 2009. Bagi saya, tinjauan ini bermakna penting, karena memaparkan berbagai kemajuan yang dicapai bersama di tahun pertama Indosat menjadi bagian dari satu keluarga--"Keluarga Qtel." Walaupun menghadapi kondisi ekonomi yang penuh tantangan sekali pun, saya bangga karena komitmen kami untuk berbagi pengetahuan, keahlian dan sumber daya di seluruh lini perusahaan, telah membuat Indosat membuat kemajuan strategis yang signifikan tahun ini.

Kemajuan tersebut terutama bersumber pada perubahan. Kami telah memilih untuk berubah, bukan karena terpengaruh oleh keadaan, namun karena kami melihat manfaat yang nyata dari penajaman kembali strategi kami dan penyempurnaan operasionalnya.

Perubahan yang telah kami mulai di tahun ini, dimulai tepat di intinya yaitu di visi kami dan di jajaran pimpinan kami, untuk memastikan bahwa semua upaya dicurahkan langsung pada satu tujuan utama, yaitu transformasi dari kekuatan posisi operasional kami menuju ke nilai jangka panjang bagi pemegang saham kami.

Nilai merupakan masa depan bagi Indosat dan masih banyak nilai yang hendak diwujudkan. Sebagai sebuah organisasi, kami yakin bahwa keberhasilan usaha jangka panjang di Indonesia hanya dapat dicapai melalui fokus pada pelanggan "bernilai". Konsumen di Indonesia selalu mengharapkan layanan yang lebih inovatif seiring dengan pesatnya perubahan ekonomi dan teknologi, baik di dalam maupun luar negeri, yang memberikan teknologi terbaru serta kesempatan berkomunikasi. Indosat telah lama memahami dinamika pelanggan ini. Misi kami adalah untuk terus memberikan nilai-tambah bagi pelanggan dan memberikan nilai bagi pemegang saham kami. Merupakan kebahagiaan bagi saya untuk melaporkan bahwa kami mengalami kemajuan yang berarti dalam kedua aspek nilai tersebut.

LANGKAH PASTI, MEWUJUDKAN HASIL

Kami telah memastikan langkah untuk berubah menuju strategi berbasis-nilai. Diperlukan cukup waktu dan energi untuk menuju ke arah itu. Namun masih lebih banyak waktu dan energi yang diperlukan untuk

Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani
Komisaris Utama

merealisasikannya hingga tuntas. Bagaimana pun juga, hasil awal dari perubahan tersebut menunjukkan bahwa kami telah mengambil langkah yang tepat.

Hal tersebut terbukti pada kinerja kami di triwulan tiga dan empat - enam bulan pertama saat perubahan strategi telah diimplementasikan sepenuhnya - dan selanjutnya hasil dari perubahan "volume kepada nilai" kami tersebut semakin nyata. Selama jangka waktu tersebut, pendapatan selular kami telah meraih pertumbuhan 12% dan pendapatan data naik 16% secara triwulanan. Kami juga berhasil menambah 4,4 juta pelanggan selama periode ini. Hal ini tidak hanya mengembalikan tren menurun yang dialami selama enam bulan pertama tahun 2009 ketika pertama kali kami mengambil langkah untuk mengkaji-ulang dan menyelaraskan basis pelanggan, namun juga menambah jumlah pelanggan "bernilai" yang menyambut baik layanan baru kami yang dinamis, sehingga meningkatkan ARPU selular kami sebesar 24%. Keduanya merupakan bukti yang signifikan bahwa perubahan yang tepat, yang diterapkan secara tepat akan mampu mewujudkan hasil yang tepat pula.

Kami hanya akan mampu menciptakan nilai apabila kami memahami sumber nilai tersebut dalam bisnis kami. Untuk meraihnya, kami telah mengelompokkan bidang operasi kami menjadi sebagai berikut : *Consumer Wireless, Consumer Broadband, Corporate Solutions and Wholesale & Infrastructure*. Dengan demikian kami mampu fokus pada ragam pelanggan yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kami memiliki tim yang memahami cara memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Dan tentu saja, ketika kami memberikannya kepada pelanggan, pada akhirnya pemegang saham kami akan menikmati manfaatnya juga.

Hal tersebut memerlukan waktu untuk mewujudkannya menjadi peningkatan keuntungan. Namun kami yakin bahwa peningkatan tersebut akan segera terwujud. Dari perhitungan per tahun, EBITDA tahun ini telah terkena pengaruh akibat fokus restrukturisasi kami – menurun tipis dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp8,77 miliar. Bagaimana pun juga, kami telah bekerja keras untuk mengurangi dampak perubahan terhadap marjin EBITDA. Kami yakin bahwa kami telah memiliki basis yang kokoh untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan di tahun mendatang.

Pada akhirnya, kami telah meningkatkan kekuatan kepemimpinan jajaran manajemen senior kami, dengan mendatangkan keahlian baru dalam Perusahaan dan memastikan keahlian yang tepat telah diterapkan secara internal pada bidang-bidang yang sangat diperlukan. Saya berharap untuk melanjutkan kerjasama dengan Pak Harry dan jajarannya di tahun mendatang seiring dengan peningkatan visi nilai kami ke depan.

MENJALANKAN PERAN KAMI

Walaupun tahun ini kami telah berkomitmen untuk melakukan perubahan, ada satu elemen dari model bisnis Indosat yang tetap kami pertahankan, yaitu komitmen kami untuk mencapai standar yang tertinggi dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Selama tahun berjalan kami mencermati dengan seksama Struktur Tatakelola Perusahaan yang ada, seraya mengambil langkah-langkah untuk mempertajam sasaran maupun efektivitasnya. Kami berupaya tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari berbagai bursa dan badan regulasi, tetapi juga melampaui persyaratan tersebut dan menetapkan sebuah standar baru untuk dapat menjadi model bagi perusahaan Indonesia lainnya. Hal itu juga berarti suatu komitmen untuk berinvestasi di dalam komunitas yang telah berkontribusi bagi keberhasilan kami. Indosat telah lama menyelenggarakan program-program dalam meningkatkan standar pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Indonesia, tanpa terkecuali untuk tahun ini.

Tahun ini, Indonesia telah mengalami salah satu tantangan alam terbesar selama ini. Pada bulan Oktober gempa bumi dahsyat memporak-porandakan kawasan Indonesia barat yang memicu tanah longsor, menjebak ribuan manusia di bawah reruntuhan gedung dan memisahkan sebagian komunitas dari dunia luar. Sebagaimana halnya konsep keluarga itu penting bagi organisasi kami, hal tersebut juga menjadi nilai utama dari bangsa Qatar, yang berbesar hati untuk membantu Indonesia pada saat diperlukan. Tim khusus Angkatan Bersenjata Qatar yang beranggotakan 20 orang ditempatkan di daerah bencana, berbarengan dengan sejumlah besar bantuan, bekerjasama dengan mitra Indonesia untuk menjamin tersampaikannya bantuan secepat mungkin di kawasan yang sangat

membutuhkan. Seperti halnya Group Qtel memegang teguh komitmen untuk mempertahankan pertumbuhan di seluruh perusahaan-perusahaan anggotanya, pemerintah Qatar juga akan senantiasa mengulurkan tangan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia yang benar-benar memerlukannya. Masyarakat Indonesia dapat senantiasa yakin akan dukungan Qatar.

MENGHARGAI DUKUNGAN ANDA

Berbicara tentang perubahan itu mudah. Untuk menghasilkan perubahan nyata yang bernilai, bagaimana pun juga, memerlukan dukungan, upaya dan komitmen dari banyak orang dari berbagai kalangan. Atas nama rekan-rekan baik di jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Anda, pemegang saham Indosat, atas dukungan yang Anda berikan bagi agenda transformasi kami selama tahun yang lalu. Dukungan tersebut telah memperkuat usaha dan meningkatkan derap laju perubahan yang telah berhasil kami raih.

Apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh karyawan Indosat, yang masing-masing telah membawa kami menuju visi masa depan dengan penuh semangat dan tujuan. Rekan-rekan saya dan saya, juga berterima kasih kepada semua pihak, pemangku kepentingan dan lain-lain yang telah menjalin kerjasama dengan kami sepanjang tahun 2009 untuk menunjang dan melaksanakan program perubahan yang telah kami tetapkan.

MELANGKAH KE DEPAN

Rekan-rekan Komisaris dan saya sungguh berbangga atas organisasi ini berikut potensinya. Indosat tetap menjadi organisasi yang memberi keuntungan tinggi, dengan posisi pasar yang kokoh, berfokus pada peluang pertumbuhan yang nyata dan pasti. Indosat juga terus menunjukkan keunggulannya sebagai penyedia layanan lengkap: suatu hal yang sangat penting dalam era dimana tuntutan konsumen maupun bisnis menjadi semakin kompleks. Semua hal tersebut mendukung optimisme saya bahwa – dengan dukungan rekan-rekan Komisaris, para Direktur, rekan kerja dan Anda, pemegang saham kami – Indosat akan terus menempati posisi terbaik sehingga mampu mengungguli tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai oleh industri dalam jangka yang panjang di Indonesia.

Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani
Komisaris Utama

LAPORAN -
SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

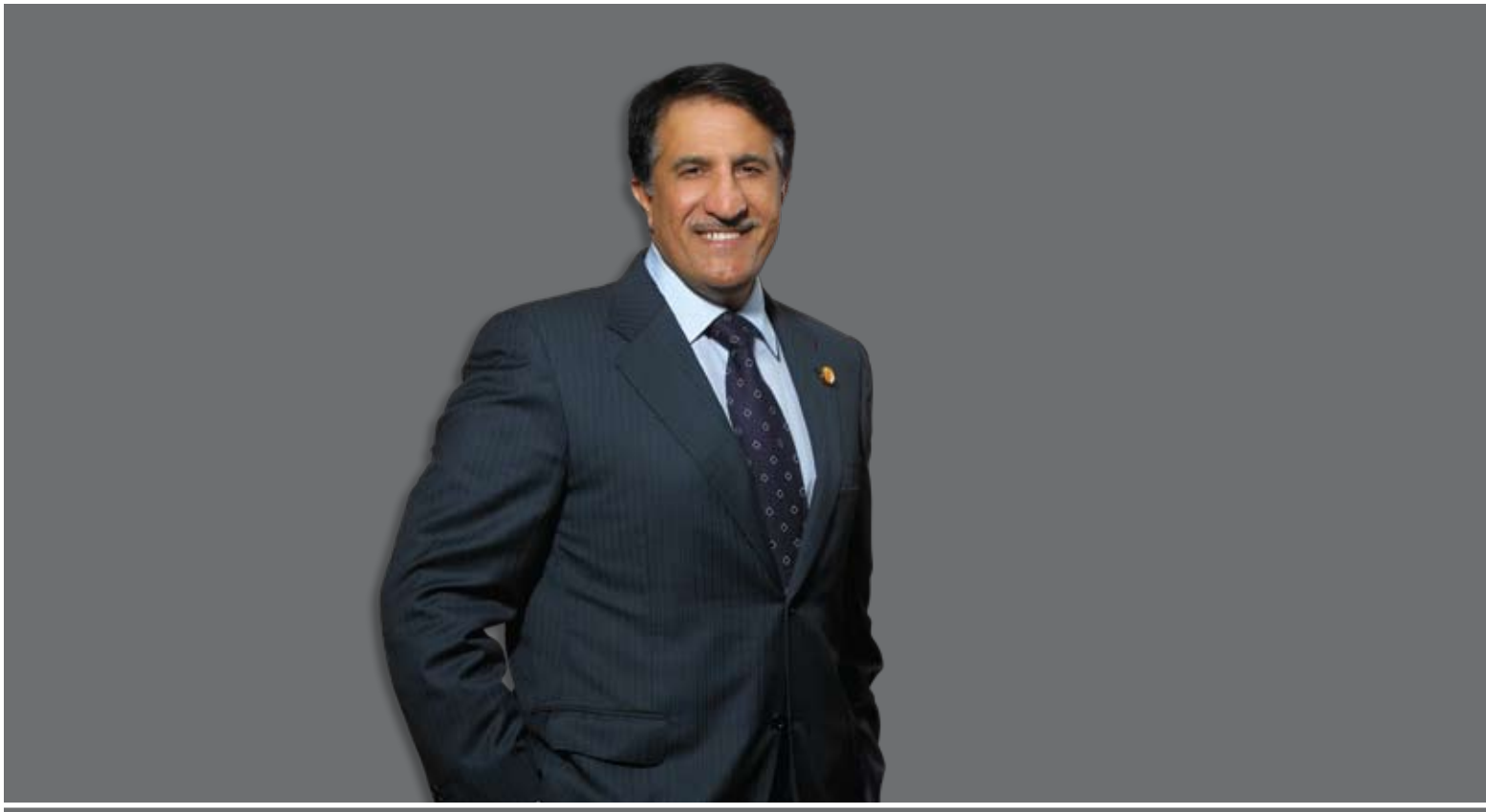

SHEIKH ABDULLA MOHAMMED S.A. AL THANI
Komisaris Utama

DR. NASSER MOHAMMED MARAFIH
Komisaris

RICHARD FARNSWORTH SENEY
Komisaris

RACHMAT GOBEL
Komisaris

RIONALD SILABAN
Komisaris

JARMAN
Komisaris

SOEPRAPTO S.I.P
Komisaris Independen

GEORGE THIA PENG HEOK
Komisaris Independen

CHRIS KANTER*
Komisaris Independen

ALEXANDER RUSLI*
Komisaris Independen

* Chris Kanter dan Alexander Rusli diangkat sebagai Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Januari 2010 yang langsung berlaku efektif. Mereka menggantikan Michael F. Latimer dan Setyanto Prawira Santosa yang diberhentikan dengan hormat pada hari yang sama.

LAPORAN -
SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

PROFIL **DEWAN KOMISARIS**

Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani

Sheikh Abdulla Mohammed S.A Al Thani telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak bulan Agustus 2008. Saat ini, Sheikh Abdulla adalah Chairman of the Board of Directors Qtel. Dalam kapasitasnya sebagai Chairman, beliau telah mengembangkan sistem corporate governance Qtel untuk menjamin Qtel dikelola sesuai dengan praktek yang berlaku secara internasional. Sheikh Abdulla telah juga melakukan restrukturisasi dan pengembangan usaha Qtel di regional. Setelah akuisisi Qtel atas Wataniya, sebagai perusahaan yang berbasis di Kuwait, dan merupakan transaksi telekomunikasi terbesar di wilayah Arab, Sheikh Abdulla ditunjuk sebagai Chairman Wataniya. Sheikh Abdulla juga merupakan anggota dari Qatari Planning Council dan Chief dari Royal Court (Amiri Diwan) sejak tahun 2002 hingga 2005. Sheikh Abdulla memiliki latar belakang yang beragam baik dalam bidang militer maupun penerbangan dan merupakan penerbang bersertifikat (instruktur) dari British Royal Air Force.

Dr. Nasser Mohammed Marafih

Dr. Nasser Mohammed Marafih telah menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Agustus 2008 dan juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Anggaran kami. Dr. Marafih memulai karirnya di Qtel pada tahun 1992 sebagai penasihat ahli dari Universitas Qatar dan selanjutnya ditunjuk sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan (Director of Strategic Planning and Development) pada tahun 1994 dan sebagai Chief Executive Officer (CEO) pada tahun 2002. Beliau sukses membawa Qtel melewati program transformasi dan restrukturisasi dari unit bisnis dan corporate centers-nya. Beliau memainkan peran penting dalam akuisisi Qtel atas Wataniya, suatu perusahaan yang berbasis di Kuwait pada tahun 2007, suatu transaksi strategis dengan AT&T untuk memperoleh kepemilikan di NavLink. Dr. Marafih memiliki gelar Bachelor of Science di bidang Electrical Engineering, Master of Science dan Ph.D. dalam bidang Communication Engineering, semuanya dari George Washington University, di Amerika Serikat. Dr. Marafih tergabung dalam berbagai Komite pemerintahan tingkat tinggi di Qatar dan sebagai anggota Direksi dari anak-anak perusahaan Qtel. Dr. Marafih juga menjabat sebagai dosen dan asisten profesor di bidang Electrical Engineering di Universitas Qatar. Beliau adalah anggota dari the Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. selama lebih dari sepuluh tahun.

Richard Farnsworth Seney

Richard Farnsworth Seney telah menjabat menjadi Komisaris sejak bulan Juni 2009. Beliau telah menjabat sebagai Chief Operating Officer di Qtel International (QI) sejak tahun 2007 hingga sekarang, President and Chief Executive Officer di MCT Corp (termasuk para pendahulunya) dari tahun 1992 hingga tahun 2007, Executive Vice President and General Manager dari MCT Investors, L.P sejak tahun 1987 hingga tahun 2002, dan Executive Vice President and Chief Financial Officer dari Charisma Communications Corporation, Perusahaan yang bergerak di bidang Komunikasi sejak tahun 1985 hingga tahun 1992. Beliau memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce dari University of Virgina McIntire School of Commerce.

Rachmat Gobel

Rachmat Gobel telah menjadi Komisaris sejak bulan Agustus 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Pimpinan dari Grup Gobel yang bergerak di bidang pengolahan, perdagangan, jasa, manajemen logistik terintegrasi seperti makanan dan obat-obatan, termasuk industri katering. Grup Gobel adalah partner joint venture dari Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., suatu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang elektronik dan barang-barang elektronik yang dipasarkan dengan merek Panasonic. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Perdagangan Internasional dari Universitas Chuo, Tokyo, pada tahun 1987,dan dianugerahi gelar Honorary Doctorate dari Universitas Takushoku, Tokyo, Jepang, pada tahun 2002. Pada tahun 2009, Beliau telah menerima "Distinguished Engineering Award in Manufacturing Technology", gelar yang bergengsi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beliau juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, termasuk Komite Olimpiade Indonesia dan Palang Merah Indonesia.

Rionald Silaban

Rionald Silaban menjabat sebagai Komisaris sejak Juni 2008 dan ditunjuk sebagai anggota dari Komite Manajemen Risiko pada tahun yang sama. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Departemen Keuangan. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi termasuk sebagai Direktur Manajemen Risiko Fiskal Departemen Keuangan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, Penasehat Senior di World Bank di Washington D.C., Amerika Serikat sejak tahun 2004 hingga tahun 2006, Kepala Divisi Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, Kepala Divisi Pengawasan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional sejak tahun 2000 hingga tahun 2002, Kepala Divisi Jasa Keuangan di Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, Wakil Direktur untuk Direktorat Privatisasi untuk Direktorat Umum Badan Usaha Milik Negara Departemen Keuangan sejak tahun 1997 hingga tahun 1998, Kepala Seksi Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997 dan Kepala Sekretariat Komite Privatisasi Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar LL.M.dari Georgetown University Law Center, Washington D.C., Amerika Serikat pada tahun 1993.

Jarman

Jarman telah menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Juni 2008. Saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara urusan Usaha Energi dan Industri namun sebelumnya beliau pernah memegang berbagai jabatan, termasuk Komisaris Utama dari PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sejak Maret 2004 hingga Mei 2008, Komisaris PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sejak April 2003 hingga Maret 2004, Asisten Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara urusan Usaha Industri Strategis dan Telekomunikasi sejak Januari 2002 hingga Februari 2006 dan Komisaris dari PT Industri Sandang Nusantara (Persero) sejak Desember 2002 hingga sekarang. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1981 dan Master of Science dari Rensselaer Polytechnic Institute, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Soeprapto S.I.P

Soeprapto S.I.P telah menjabat sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit sejak bulan Juni 2005. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan, seperti Asisten Pribadi dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2001 dan Komisaris PT Nusariau Kencana Coal dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Selain itu, beliau telah menjabat sebagai Komisaris PT Mentari Abdi Pertiwi sejak tahun 2004. Beliau memperoleh gelar sarjana ilmu politik dari Universitas Terbuka, Jakarta dan pernah mengikuti pelatihan Lembaga Pertahanan Nasional.

George Thia Peng Heok

George Thia Peng Heok menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Juni 2008 dan ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit Perusahaan pada tahun yang sama. Beliau kemudian menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan pada bulan Agustus 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur/Konsultan di Asiainc Private Limited. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi, termasuk sebagai Konsultan bagi Singapore Exchange sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, Konsultan/Direktur Strategic Advisory Private Limited sejak tahun 2003 hingga tahun 2006, Executive Chairman MediaStream Limited sejak tahun 1999 hingga tahun 2003, Direktur/Konsultan Phoenix Capital Private Limited sejak tahun 1995 hingga tahun 1998, Executive Chairman Asia Matrix Limited sejak tahun 1993 hingga tahun 1995, Managing Director Lum Chang Securities Private Limited sejak tahun 1991 hingga tahun 1993, Managing Director Sun Hung Kai Securities Private Limited sejak tahun 1989 hingga tahun 1991, Managing Director Merrill Lynch International Bank Limited sejak tahun 1987 hingga tahun 1989, Executive Director/Partner Kay Hian Private Limited sejak tahun 1985 hingga tahun 1987 dan Managing Director Morgan Grenfell (Asia) limited sejak tahun 1975 hingga tahun 1985. Beliau adalah seorang Certified Public Accountant dan fellow member dari Chartered Association of Certified Accountants (Inggris) dan Singapore Institute of Directors.

Chris Kanter

Chris Kanter telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua dan Pendiri dari Sigma Sembada Group, sebuah kontraktor alat berat untuk perangkat transportasi dan logistik. Beliau telah menjabat sebagai Wakil Presiden untuk Investasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi, Transportasi dan Kepariwisataan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) sejak tahun 1994. Baru-baru ini beliau ditunjuk kembali untuk jangka waktu lima tahun berikutnya sampai dengan tahun 2013 untuk jabatan Investasi dan Transportasi. Beliau juga menjabat posisi sebagai Ketua Dewan Eksekutif KADIN, Komite Khusus dalam bidang Investasi dan Pembangunan Perdagangan Internasional dan Ketua dari Dewan Pendiri Swiss German University. Beliau juga menjabat beberapa peran di pemerintahan Indonesia dan telah terlibat langsung dalam Paket Kebijakan untuk Mengembangkan Iklim Investasi di Indonesia dan juga bertindak sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan 2002. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Teknik, Universitas Trisakti, Indonesia.

Alexander Rusli

Alexander Rusli telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010 dan saat ini menjabat sebagai anggota dari Komite Remunerasi Perusahaan. Saat ini Beliau menjabat sebagai komisaris dari PT Krakatau Steel (Persero), Badan usaha yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara yang memproduksi produk baja-karbon. Beliau pernah menjabat sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan pengawasan kepada 140 Badan Usaha Milik Negara dan lebih dari 500 anak perusahaan. Sebelumnya, beliau menjabat pula sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, dimana beliau terlibat dalam perumusan kebijakan dan peraturan dan dalam mengawasi proyek-proyek nasional infrastruktur ICT negara. Posisi ini beliau jabat selama dua masa kabinet kementrian. Beliau juga bertindak sebagai Konsultan bagi Pricewaterhouse Coopers. Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy, Sistem Informasi, Curtin University of Technology, Australia.

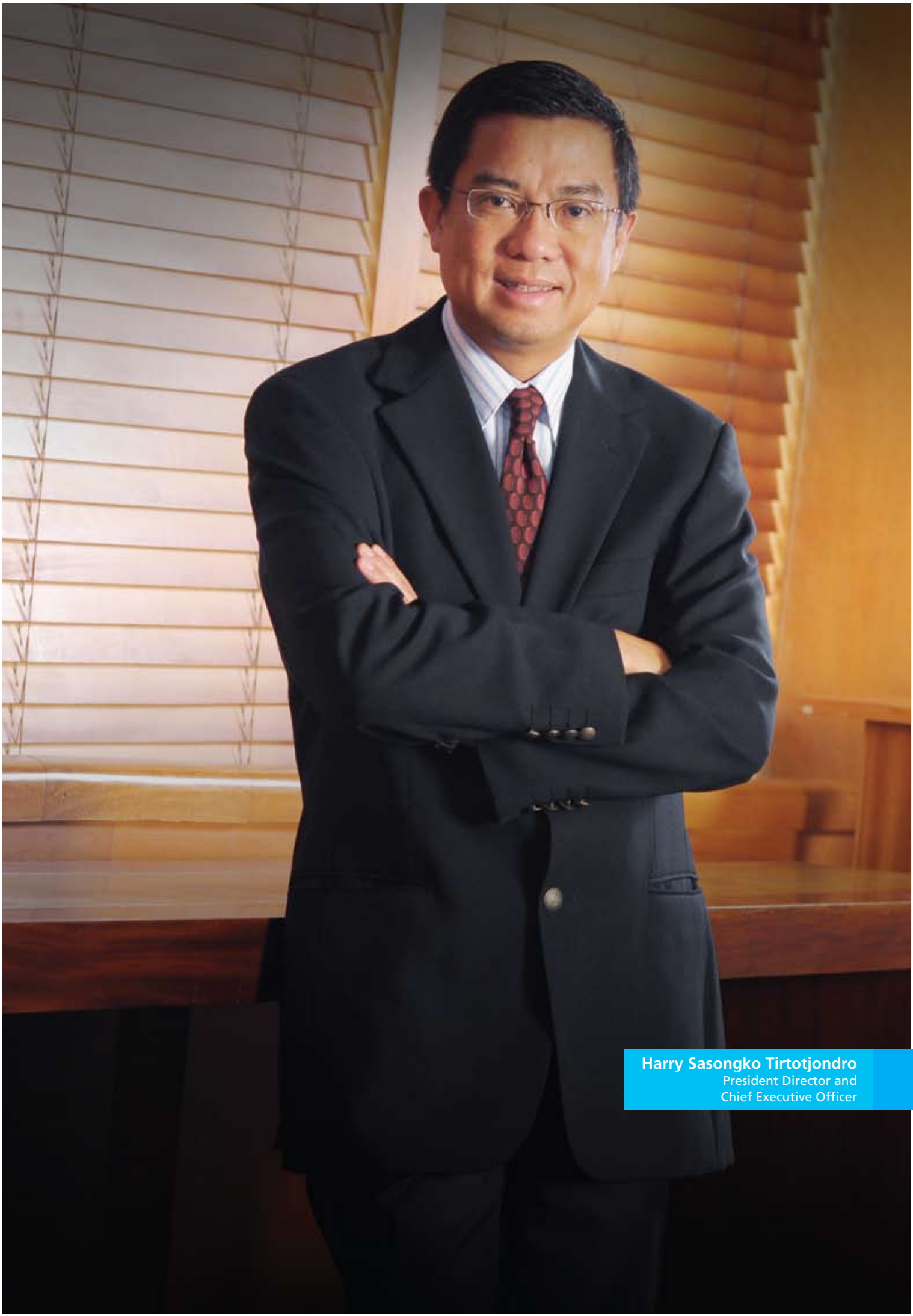

Harry Sasongko Tirtotjondro
President Director and
Chief Executive Officer

LAPORAN DIREKSI

2009 menandai proses transformasi dalam strategi dan implementasi bisnis Indosat yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produk dan layanan kami bagi pelanggan. Seperti tercermin dalam hasil-hasil yang makin menguat, kami menyadari bahwa kami berada di jalur yang tepat menuju peningkatan nilai bagi pemegang saham.

LANGKAH PASTI UNTUK MENINGKATKAN NILAI

Sepanjang empat puluh dua tahun sejarah Indosat, perubahan telah menjadi sebuah tema yang terus menerus ditanamkan, seiring dengan kesigapan dan dinamika Perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Kami menghadapi tantangan industri yang makin kompetitif dan fluktuasi perekonomian global, tidak terkecuali di tahun 2009. Di saat industri telekomunikasi Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhannya secara keseluruhan, kendati pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun 2008, seluruh perusahaan penyedia jasa telekomunikasi mengalami pertumbuhan cukup rendah atau penurunan keuntungan di tengah persaingan untuk meraih loyalitas pelanggan. Dengan latar belakang tersebut, Indosat melaksanakan langkah perubahan yang pasti untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan nilai Perusahaan terhadap pelanggan, dan pada akhirnya, para pemegang saham.

Dengan dukungan pemegang saham utama kami yang baru – Qatar Telecom (Qtel), dan memanfaatkan pengalaman global yang luas dan sumber daya yang kuat dari Qtel, pada awal tahun 2009 kami berkomitmen untuk melakukan transformasi fokus bisnis Indosat, yang semula ditekankan pada volume menjadi strategi berbasis-nilai yang berfokus pada pelanggan. Perubahan tersebut penting untuk dapat memenangkan ketatnya persaingan di pasar saat ini yang ditandai dengan kenaikan harga dan penurunan keuntungan, serta untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Dengan strategi yang berfokus pada pelanggan, kami menciptakan nilai berdasarkan pemetaan pelanggan. Kami melakukan reorganisasi perusahaan berdasarkan tipe konsumen yang menjadi sumber pendapatan, membangun empat SBU (Strategic Business Unit) yang masing-masing berkonsentrasi untuk memaksimalkan keuntungan di tiap SBU : Consumer Wireless, Consumer *Broadband*, Corporate Solution, dan Wholesale & Infrastructure. Segmentasi tersebut memungkinkan kami untuk lebih fokus memberikan solusi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang beragam, dan meningkatkan nilai yang diberikan Indosat bagi pelanggan. Selain itu, struktur ini meningkatkan fokus organisasi SBU tersebut, yang akan bersinergi dengan sumber daya Indosat secara keseluruhan.

Menunjang upaya SBU-SBU tersebut, telah ditetapkan Value Strategy berbasis tiga-pilar yang mulai dijalankan sejak awal 2009. Secara khusus, ketiga pilar Value Strategy kami adalah: 1) inovasi pemasaran dan produk, 2) jaringan distribusi yang kuat, dan 3) jaringan berkualitas tinggi.

Pilar pertama adalah inovasi pemasaran dan produk untuk meningkatkan potensi dan citra kepeloporan Indosat. Kami meningkatkan program loyalitas khususnya bagi pelanggan yang paling "bernilai", menghadirkan paket-paket produk unggulan dan kompetitif, dan terus mengkomunikasikannya kepada pelanggan dan masyarakat. Kami juga memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan layanan data, yang kami prediksi akan tumbuh pesat di masa mendatang.

Pilar kedua adalah memperkuat jaringan distribusi kami yang mencakup peningkatan tim penjualan, proses seleksi dealer, menciptakan alternatif jalur distribusi produk, dan mengoptimalkan jalur distribusi yang sudah ada. Pada saat yang sama, kami mendorong peningkatan penjualan melalui strategi pengelolaan jalur distribusi antara lain program penjualan yang tepat sasaran melalui kerjasama dengan mitra penjualan lain seperti perbankan, serta program bundling yang bersifat strategis.

Pilar ketiga adalah peningkatan kualitas jaringan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menambah kapasitas dan memperluas jangkauan, khususnya di wilayah potensial, dengan tetap mempertahankan kualitas jaringan di wilayah lainnya. Inisiatif utama dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan kami di antaranya adalah dengan meningkatkan jumlah BTS menjadi 16.353, meluncurkan Satelit Palapa-D kami, dan mengoperasikan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) JAKABARE sepanjang 1.300 km yang menghubungkan pulau Jawa, Kalimantan, Batam dan Singapura.

Seperti proses transformasi pada umumnya, perubahan-perubahan yang dilakukan memerlukan waktu penyesuaian dan pengukuran indikator kinerja sehingga di tahun 2009 kami mengalami penurunan dibanding tahun 2008. Pada semester kedua tahun 2009, hasil dari perubahan strategi mulai terlihat khususnya di triwulan ketiga, dan berlanjut dengan pertumbuhan yang cukup signifikan di triwulan keempat. Oleh sebab itu kami optimis bahwa Perusahaan telah berada di jalur yang tepat, sehingga memberikan manfaat bagi para pemegang saham serta pelanggan.

HASIL DAN KINERJA KAMI

Selama dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2009, Perusahaan mencatat penurunan 1,4% dalam pendapatan usaha konsolidasi menjadi Rp18,39 triliun, dengan marjin EBITDA sebesar 48%. Bisnis selular, komunikasi data tetap (MIDI) dan telepon tetap Indosat masing-masing berkontribusi sebesar 76%, 15% dan 9% terhadap pendapatan usaha konsolidasi Perusahaan.

Dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, pendapatan selular menurun 1,8% menjadi Rp13,93 triliun sebagai akibat dari penghapusan pelanggan pra-bayar pada semester pertama 2009. Pendapatan komunikasi data-tetap turun 0,5%, sedangkan pendapatan telepon-tetap menurun 0,1%. Sementara itu, beban usaha meningkat 9,0% selama 12 bulan yang berakhir 31 Desember 2009 sebagai dampak dari kenaikan beban penghapusan dan amortisasi, pajak dan retribusi pemerintah serta biaya sewa.

Kinerja yang menurun pada semester pertama saat kami menerapkan strategi berbasis-nilai tersebut, diakibatkan oleh perubahan strategi dan penghapusan pelanggan non-potensial. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil pada semester kedua sehingga kami menutup tahun dengan sejumlah pencapaian, antara lain pendapatan selular meningkat 5,6% pada triwulan ketiga dan meningkat 12,2% pada triwulan keempat, sedangkan pendapatan komunikasi data tetap pada triwulan keempat naik lebih tinggi sebesar 16,2%.

Peningkatan pendapatan selular pada semester kedua tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah dan profitabilitas dari pelanggan. Sedangkan kenaikan pendapatan komunikasi data tetap (MIDI) didorong oleh meningkatkan permintaan akan komunikasi data korporat (Multi Protocol Label Switching/MPLS), layanan aplikasi, layanan internet, layanan satelit dan jaringan data digital dari pelanggan korporat, yang kami proyeksikan akan makin meningkat di masa mendatang. Pendapatan telepon-tetap secara umum mengalami pertumbuhan yang lambat, sebagian disebabkan apresiasi Rupiah terhadap Dolar AS karena pendapatan dari telepon masuk (incoming call) menggunakan mata uang Dolar AS. Kami terus mengembangkan layanan telepon tetap nirkabel (fixed wireless), hingga menjangkau 82 kota pada akhir tahun

dan menempatkan segmen ini siap meraih pertumbuhan pendapatan di tahun 2010.

Secara operasional, kami berhasil memenuhi target tahun 2009 di hampir semua lini bisnis, seperti dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif dalam Key Performance Indicators dari masing-masing unit bisnis , termasuk setiap SBU yang baru. Kualitas jaringan kami yang diukur berdasarkan berbagai indikator seperti Call Success Rates, Attached Success Rate, dan SMS Delivery Rates menunjukkan peningkatan yang berarti. Salah satu pencapaian utama adalah keberhasilan memperoleh tambahan frekuensi 3G (second carrier), sejalan dengan strategi kami untuk memperkuat posisi kepemimpinan pasar dalam wireless *broadband*.

Mengingat pentingnya upaya menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, maka Indosat memelopori peluncuran berbagai produk inovatif pada 2009, termasuk layanan data nirkabel 21 Mbps pertama di Indonesia, peluncuran BlackBerry Enterprise Service On Demand pertama di dunia, dan layanan AeroMobile kami, yang menyediakan layanan selular dan SMS pada beberapa perusahaan penerbangan terpilih. Sejumlah prakarsa tersebut didukung oleh program loyalitas yang disesuaikan kebutuhan pelanggan serta paket-paket bundling yang menarik.

Untuk membiayai prakarsa-prakarsa tersebut secara bertanggung jawab sekaligus mempertahankan likuiditas, kami mengupayakan penambahan pinjaman sebesar 17,1%, hingga pinjaman total berjumlah Rp25.474,4 miliar. Dua penerbitan obligasi dilaksanakan untuk meningkatkan dana tunai: penerbitan obligasi Indosat VII senilai Rp1,3 triliun dan obligasi syariah yaitu Sukuk Ijarah Indosat berjumlah Rp200 miliar. Obligasi kami memperoleh peringkat tinggi idAA+ dan idAA(sy) dari Lembaga Pemeringkat Pefindo, dan selanjutnya Moody juga meningkatkan peringkat obligasi mata uang asing tanpa garansi, yang mencerminkan kekuatan posisi keuangan dan potensi operasional perusahaan secara menyeluruh.

Pencapaian prestasi kami di tahun 2009 telah diakui dan memperoleh 22 penghargaan utama di tahun 2009. Di antaranya, Indosat meraih predikat the Best GSM Operator in 2009 dalam Indonesia Cellular Awards (ICA) 2009, Best Mobile Data Service Provider oleh Frost and Sullivan, sedangkan brand Matrix, Mentari dan IM3 memenangkan penghargaan Top Brand Awards. Kami terpilih menjadi salah satu dari Top 10 Most Admired Companies di Indonesia, untuk kategori Inovasi dan Reputasi Korporat oleh the Wall Street Journal Asia 200 survey. Kami juga memenangkan penghargaan untuk penerbitan obligasi perusahaan, penghargan untuk Laporan Tahunan 2008 dan Laporan Keberlanjutan 2008 kami, penghargaan atas program-program SDM, program-program Public Relations dan Call Centers, serta untuk berbagai macam produk dan layanan perusahaan. Semua penghargaan tersebut merupakan pengakuan dari pihak eksternal bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk memperkuat organisasi sekaligus memberikan nilai-tambah bagi para pelanggan.

MENCIPTAKAN NILAI KEBERLANJUTAN MELALUI PRAKTIK TERBAIK

Pada 2009, kami menyempurnakan dan memperkuat praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam laporan ini. Kami juga mematuhi berbagai ketentuan Undang-Undang dan peraturan dalam negeri maupun internasional, seperti ketentuan Bapepam-LK, dan pasal 404 dari U.S. Sarbanes –Oxley Act, sebagai Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia maupun New York Stock Exchange. Sebagai pengakuan atas kualitas laporan kami, Laporan Tahunan 2008 Indosat meraih peringkat ketiga, dalam lomba Laporan Tahunan Bapepam, untuk kategori Perusahaan Swasta Listed Non-Keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut, kami terus meningkatkan dan memperluas program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sudah dilaksanakan selama ini. Kegiatan CSR tersebut mencakup berbagai macam program, terutama program bidang kesehatan dan pendidikan. Pada 2009, kami mengalokasikan dana sebesar Rp13,4 miliar untuk kegiatan kepedulian bagi masyarakat dan lingkungan. Saya bangga dapat menyampaikan bahwa berkat kesungguhan upaya-upaya kepedulian sosial kami, Indosat berhasil memenangkan Penghargaan CSR Terbaik dalam Indonesia Cellular Awards (ICA) 2009 dan penghargaan-penghargaan lain dari berbagai lembaga yang kredibel.

PROSPEK MASA DEPAN

Tahun ini proses transformasi dan perubahan telah berlangsung di Indosat. *Review* atas kinerja kami menunjukkan bahwa Perusahaan semakin kokoh dan dinamis berkat langkah perubahan strategi, perubahan organisasi dan fokus usaha.

Di 2010, kami berharap pertumbuhan makro ekonomi akan meningkat sehingga menciptakan suasana kondusif bagi industri telekomunikasi, walau tekanan harga akan makin meningkat. Strategi kami adalah memperkuat sekaligus memposisikan Perusahaan untuk meraih pertumbuhan secara jangka panjang melalui inovasi serta meningkatkan solusi dan produk bagi para pelanggan kami.

Ke depan, kami terus memproyeksikan peluang pertumbuhan besar di industri telekomunikasi Indonesia, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya penghasilan masyarakat serta tingkat penetrasi selular yang masih di bawah rata-rata negara di kawasan ASEAN. Lebih dari itu, segmen komunikasi data masih memiliki prospek besar untuk diserap, di antaranya didorong oleh antusiasme masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi melalui jejaring sosial serta tidak kalah pentingnya kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang relatif stabil saat ini. Kami memandang industri telekomunikasi di Indonesia sebagai industri yang masih terus tumbuh dalam jangka panjang, dan Indosat bertekad untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pasar tersebut dengan menciptakan produk-produk baru, meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan bisnis selular dan telepon tetap, serta menumbuhkan layanan komunikasi data nirkabel ke seluruh penjuru Indonesia. Sebagai operator telekomunikasi yang terintegrasi, kami memegang teguh kepercayaan pada kokohnya bisnis, sumber daya, dan kemampuan kami untuk melampaui pertumbuhan industri, meningkatkan ragam maupun kualitas layanan kami seiring dengan tuntutan pelanggan yang semakin meningkat akan solusi yang lengkap dan menyeluruh.

Sebagai penutup, kami optimis akan berhasil melaksanakan proses perubahan ini, untuk mewujudkan sebuah perusahaan yang lebih kuat dan mampu bersaing serta memberikan hasil lebih baik, sebagai penghargaan kami terhadap para pemangku kepentingan serta mewujudkan visi global dari perusahaan induk kami – Qtel. Dengan mengoptimalkan kekuatan dan keunggulan produk, kami ingin menjadikan Indosat sebagai perusahaan terdepan.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pemegang saham kami atas dukungan mereka selama tahun 2009. Kami berharap hubungan ini akan terus berlanjut dan berkembang di tahun-tahun mendatang seiring dengan pertumbuhan Perusahaan. Kami sangat menghargai dukungan dan umpan balik Anda selama ini, yang telah membantu kami untuk berkembang dan menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi menjadi operator penyedia solusi dan informasi pilihan di Indonesia. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan atas kontribusi mereka terhadap Perusahaan.

Mewakili Direksi, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada para pemegang saham atas dukungannya terus berlanjut selama ini. Secara khusus, kami menyambut baik kepercayaan Qtel seperti yang telah dinyatakan dalam keputusannya untuk menjadi pemegang saham mayoritas yang baru.

Kami semakin menyadari bahwa keberhasilan kami tidak mungkin terwujud tanpa kontribusi dari para kolega dan karyawan, dukungan mitra strategis kami, dan kepercayaan penuh dari pelanggan.

Terima kasih atas kepercayaan dan komitmen Anda. Kami menghargai amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami. Dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berharap untuk dapat terus melangkah maju di tahun depan untuk meraih hasil yang memuaskan bagi kita semua.

Harry Sasongko Tirtotjondro
President Director and
Chief Executive Officer

HARRY SASONGKO TIRTOTJONDRO
President Director and
Chief Executive Officer

PETER WLADYSLAW KUNCEWICZ
Director and Chief Financial Officer

FADZRI SENTOSA
Director and Chief Wholesale and
Infrastructure Officer

LASZLO IMRE BARTA*
Director and Chief Commercial Officer

STEPHEN EDWARD HOBBS
Director and Chief Technology Officer

* Laszlo Imre Barta telah diangkat sebagai anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Januari 2010 yang efektif pada 1 Mei 2010. Beliau menggantikan Kaizad Bomi Heerjee yang efektif diberhentikan pada tanggal 30 April 2010.

PROFIL **DIREKSI**

Harry Sasongko Tirtotjondro

Harry Sasongko Tirtotjondro telah menjabat sebagai President Director and Chief Executive Officer sejak bulan Agustus 2009. Sebelumnya beliau telah memegang beberapa jabatan sebagai Presiden Direktur dan CEO dari GE Consumer Finance sejak tahun 2005 sampai 2009, dimana beliau diakui sebagai salah satu dari 10 CEO terbaik di Indonesia pada tahun 2008 oleh the SWA Magazine & Synovate awards. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2005, beliau merupakan anggota Lippo Group dimana Beliau sempat menjabat sebagai Managing Director dari Matahari Retail & Lippo Bank. Beliau pernah menjabat sebagai Managing Director of Consumer Banking di PT Bank Tiara Asia pada tahun 1995 sampai dengan 1998, dan sebelumnya sebagai Direktur di PT Citicorp Finance dan Citibank, N.A. pada tahun 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia, gelar Master of Science dari the Ohio State University, Amerika Serikat, dan merupakan Chartered Financial Consultant (ChFC), gelar yang diperoleh dari Singapore College of Insurance/American College di Amerika Serikat.

Peter Wladyslaw Kuncewicz

Peter Wladyslaw Kuncewicz telah menjabat sebagai Director and Chief Financial Officer sejak bulan September 2009. Beliau memiliki pengalaman selama 30 tahun di bidang keuangan di berbagai pasar keuangan internasional, 10 di antaranya bergerak di bidang telekomunikasi. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2009, Beliau memegang jabatan sebagai Chief Financial Officer di Telenor Pakistan, memegang urutan ke-2 terbaik dalam urutan lima pasar keuangan teraktif di Pakistan. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2006, beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer di Star Foods SA, sebuah perusahaan FMCG, dan sejak tahun 1996 sampai dengan 1997 beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di United Biscuits Poland. Beliau juga bekerja di bidang pengadaan keuangan dan IT di Batelco, Bahrain sejak tahun 1996 sampai dengan 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Biologi dari University of Sussex, Inggris, dan Master of Science di bidang Business Planning dan Finance dari University of Salford, Inggris. Beliau juga merupakan anggota dari Chartered Institute of Management Accountants di Inggris.

Fadzri Sentosa

Fadzri Sentosa telah menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juni 2007 dan sebagai Director and Chief Wholesale and Infrastructure Officer sejak bulan Juni 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Aplikanusa Lintasarta. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan di Perusahaan, termasuk sebagai anggota dari Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, Group Head National Card dan Channel Management sejak tahun 2006 sampai dengan 2007, Senior Vice President bidang Commerce, daerah Jabotabek sejak tahun 2005 sampai dengan 2006 dan Senior Vice President bidang Penjualan Selular sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, anggota dari Direksi Satelindo pada tahun 2003 dan anggota dari Dewan Direksi dari IM3 dari tahun 2002 sampai 2003. Beliau memperoleh gelar Master di bidang International Business Management dari University of Technology, Sydney pada tahun 2001 dan gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986.

Laszlo Imre Barta

Laszlo Imre Barta telah menjabat sebagai Director and Chief Commercial Officer sejak tanggal 1 Mei 2010. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputy Chief Marketing Officer di Grameenphone di Bangladesh. Beliau menghabiskan lebih dari empat tahun di Grameenphone di Bangladesh, dimana beliau mengembangkan diri dan memimpin peluncuran strategi bisnis pasar, mendirikan dan memimpin departemen UKM, dan menjabat sebagai Direktur Penjualan. Sebelum diperbantukan untuk Grameenphone oleh Grup Telenor, beliau bekerja untuk Pannon GSM di Hungaria, dimana beliau mengepalai departemen Corporate Client. Sebelum Pannon, beliau bekerja untuk Ericsson Hungaria dimana beliau memimpin penjualan handset dan aksesori untuk operator selular lokal Hungaria. Beliau bergabung dengan Ericsson dari Phillip Morris, dimana beliau memulai karirnya dalam bidang Penjualan. Beliau memiliki gelar di bidang Akuntansi dan Landscape Architecture & Engineering dari universitas-universitas di Hungaria.

Stephen Edward Hobbs

Stephen Edward Hobbs telah menjabat sebagai Director and Chief Technology Officer sejak bulan Juni 2009. Beliau menduduki jabatan sebagai CTO Asiacell di Irak selama sembilan bulan pertama bisnisnya dijalankan, setelah memperoleh izin CPA antara tahun 2003 dan tahun 2004. Sebelumnya beliau juga telah berkecimpung dalam praktek konsultan mandiri, membantu klien-klien penting seperti Virgin Management, Inggris, C&W, Inggris, Wataniya Telecom (Kuwait) and Sapient (Inggris dan Amerika Serikat), membantu di bidang teknologi, pembangunan dan strategi. Beliau memiliki pengalaman sebagai Chief Engineer C&W Mobile, CTO Asia, CTO Global Mobile, Vice President Mobile dan ASP services (C&W Global) sampai tahun 2001, sebagai pelopor dalam sistem satelit antena kecil dan ahli dalam program keamanan dalam bidang nirkabel. Beliau memiliki pengalaman manajemen internasional selama lebih dari tiga dekade dalam industri telekomunikasi dan teknologi industri di seluruh Eropa dan Asia. Beliau merupakan Petty Officer Radio Electrician (Royal Navy) pada Cable & Wireless Telecommunication.

INFORMASI TENTANG **PERUSAHAAN**

Informasi yang terkandung dalam bagian ini diambil dari Laporan Tahunan Perusahaan 2009 dalam bentuk Format 20-F.

LAPORAN -
INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

PT Indosat Tbk didirikan pada tanggal 10 November 1967 oleh Pemerintah, sebagai perusahaan penanaman modal asing untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1969 untuk membangun, mentransfer dan mengoperasikan stasiun bumi International Telecommunications Satellite Organization atau Intelsat, di Indonesia untuk mengakses satelit-satelit di wilayah Samudera Hindia milik Intelsat untuk jangka waktu selama 20 tahun. Pada tahun 2001, sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah untuk merestrukturisasi industri telekomunikasi, kami mengadakan suatu perjanjian dengan Telkom yang bertujuan untuk menghapus kepemilikan silang kami masing-masing di beberapa anak-anak perusahaan, yaitu:

- pembelian 22,5% kepemilikan saham Telkom di Satelindo oleh Perusahaan (pada saat tersebut merupakan operator selular terbesar kedua di Indonesia);
- pembelian 35,0% kepemilikan saham kami di Telkomsel oleh Telkom; dan
- pembelian 37,2% kepemilikan saham Telkom di Lintasarta oleh Perusahaan dan pembelian obligasi konversi Lintasarta yang dipegang oleh Telkom.

Setelah diadakan perjanjian dengan Telkom, kami menyelesaikan proses akuisisi sisa saham minoritas di Satelindo pada bulan Juni 2002. Sejak memasuki pasar selular Indonesia melalui pembelian Satelindo dan pendirian IM3 dan integrasi lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2003, layanan selular telah menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan usaha kami.

Pada bulan Agustus 2002, kami memasuki sektor jasa telekomunikasi tetap domestik setelah memperoleh ijin penyelenggaraan jasa jaringan tetap lokal di wilayah Jakarta dan Surabaya.

Pada tahun 2002, Pemerintah melakukan divestasi secara dua tahap atas 517,5 juta sahamnya, yaitu sekitar 50,0% dari saham Seri B Perusahaan pada saat itu. Pada bulan Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan di Perusahaan melalui tender global yang dipercepat. Pada bulan Desember 2002, Pemerintah menjual 41,9% dari saham Seri B di Perusahaan kepada (bekas) anak perusahaan dari STT Communication Ltd, atau STT.

Pada bulan Juni 2008, Qtel melakukan akuisisi atas saham kami di STT, dan menimbulkan kewajiban penawaran tender oleh Qtel untuk membeli sampai dengan 1.314.466.775 saham Seri B, yang merupakan 24,19% saham Seri B kami yang telah ditempatkan dan disetor, dengan harga pembelian dalam mata uang Dolar AS yang setara dengan Rp369.400 per ADS dan Rp7.388 per saham Seri B. Qtel adalah sebuah perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara Qatar dan entitas terkaitnya. Qtel beroperasi berdasarkan hukum negara Qtar dengan saham yang terdaftar pada *Doha Securities Market*, serta *Abu Dhabi Securities Market*, dan *Global Depository Receipts* dan diperdagangkan di *London Stock Exchange*. Qtel adalah penyelenggara telekomunikasi eksklusif Qatar dan salah satu perusahaan publik terbesar di negara tersebut dan menyediakan banyak pilihan produk telekomunikasi, termasuk, di antara lain, layanan mobile GSM nasional dan internasional, Internet dan televisi kabel.

Per Desember 2009, Pemerintah memiliki 14,29% dari saham disetor kami, termasuk 1 saham Seri A, dan Qtel Asia memiliki kurang lebih 65,0% saham Seri B ditempatkan kami. Qtel Asia dimiliki oleh Qtel. Sisa 20,71% dari saham Seri B ditempatkan kami dimiliki oleh pemegang saham publik per tanggal 31 Desember 2009.

Untuk penjelasan mengenai pengeluaran barang modal pokok kami sejak 1 Januari 2007 dan pengeluaran barang modal pokok kami yang sedang dijalankan saat ini, termasuk jumlah yang diinvestasikan dan metode pembiayaan, lihat bab analisa dan pembahasan manajemen.

Kantor kami berlokasi di Gedung Indosat, jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Republik Indonesia dan nomor telepon kami adalah +62 (21) 3869615. *Website* perusahaan kami dapat diakses melalui URL **http://www.indosat.com.** Informasi yang ada dalam *website* kami bukan merupakan bagian dari laporan tahunan ini dan tidak dijadikan sebagai referensi dalam laporan tahunan ini. *Service Agent* kami di Amerika Serikat sehubungan dengan ADS adalah Bank of New York Mellon, Divisi Depository Receipt, 101 Barclay Street, New York, New York 10286, U.S.A.

TINJAUAN USAHA

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan kami menawarkan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Kami adalah operator selular terbesar kedua, berdasarkan jumlah pelanggan selular, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Kami juga menyediakan layanan MIDI kepada para pelanggan korporat dan retail Indonesia dan regional. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, total pendapatan usaha kami masing-masing adalah sebesar Rp18.948,4 miliar dan Rp18.629,5 miliar (US$1.981,9 juta).

Produk dan jasa utama kami meliputi:

- *Jasa selular*. Kami menyediakan jasa selular GSM 900 dan 1800 dan 3G kepada sekitar 33,1 juta pelanggan selular (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) di seluruh Indonesia, per tanggal 31 Desember 2009. Kami juga menyediakan layanan *broadband* nirkabel menggunakan platform 3G kami pada tahun 2006 dan pada tanggal 31 Desember 2009, telah memiliki kurang lebih 721.127 pelanggan.
- *Layanan MIDI*. Kami menyediakan layanan MIDI *broadband* dan *narrowband*, termasuk layanan VSAT, sirkuit sewa, layanan *frame relay,* dan layanan Internet secara langsung dan melalui anak perusahaan kami, Lintasarta dan IM2. Kami menawarkan paket produk dan layanan ini khususnya kepada pelanggan korporasi dan ritel dan *wholesaler* kami sebagai usaha untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi yang lengkap.
- *Jasa telekomunikasi tetap (telepon tetap).* Kami adalah salah satu penyelenggara jasa sambungan langsung jarak jauh internasional terkemuka di Indonesia, berdasarkan jumlah menit sambungan masuk dan keluar untuk tahun 2009. Untuk mendukung jasa selular kami dan meningkatkan akses kami ke pelanggan jasa sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional, kami juga meluncurkan jasa telepon tetap nirkabel menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Kami juga menyediakan jasa SLJJ sejak tahun 2003 dan jasa teleponi tetap lokal sejak 2002.

Bisnis kami tidak mengalami perubahan *trend* permintaan yang signifikan.

Pemegang saham utama kami adalah Qtel Asia, dengan kepemilikan saham sekitar 65,0% dari saham biasa kami, dan Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham sebesar 14,29% dari saham biasa kami, termasuk satu saham Seri A, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009. Qtel Asia adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Qtel.
Tabel di bawah ini menyajikan detai mengenai pendapatan usaha untuk tiap periode yang ditunjukkan dan persentase kontribusi dari tiap layanan kami terhadap pendapatan usaha:

	Per dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2007[7]	2008	2009
	(tidak diaudit)		
Data operasional usaha:			
Selular: [1]			
Jumlah pelanggan selular (tidak termasuk *broadband* nirkabel):			
Prabayar	23.945.431	35.591.033	31.333.173
Pasca bayar	569.801	661.213	1.082.215
Total pelanggan selular	24.515.232	36.252.246	32.415.388
Jumlah pelanggan *broadband* nirkabel:[2]			
Prabayar	–	116.341	610.446
Pasca bayar	30.190	141.659	110.681
Total pelanggan *broadband* nirkabel	30.190	258.000	721.127
Total pelanggan selular:	24.545.422	36.510.246	33.136.515
ARPU (Rp)[3]	–	38.639	37.330
Menit pemakaian[4]	70	98	102

LAPORAN -
INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

	Per dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2007(7)	2008	2009
	(tidak diaudit)		
ARPM (Rp)(5)	–	287	220
Jumlah *Base Station Sites* (6)	10.124	13.662	16.353
Jumlah *Base Station Controllers*(6)	226	265	315
Jumlah pusat *mobile switching* (6)	56	73	95
MIDI:			
International High Speed Leased Circuit ('000's)	19	46	80
Domestic High Speed Leased Circuit ('000's)	51	129	171
Telekomunikasi tetap:			
Panggilan masuk (dalam juta menit)	1.237	1.484	1.486
Panggilan keluar (dalam juta menit)	297	474	502
Rasio panggilan masuk/keluar	4,2	3,1	3,0

(1) Dikarenakan perubahan dalam metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar kami, jumlah pelanggan selular, menit pemakaian untuk setiap pelanggar selular dan ARPU yang dijelaskan dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat bab Faktor-faktor risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu.

(2) Jumlah pelanggan *wireless broadband* hanya memasukkan mereka yang berlangganan layanan *wireless broadband* kami dan tidak termasuk mereka yang menggunakan layanan "*broadband on demand*."

(3) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan selular, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan selular prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular kami, ARPU kami yang tercantum dalam lamporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat bab Faktor-faktor risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu.

(4) Menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan selular prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan dalam metode untuk menghitung jumlah pelanggan prabayar kami, maka jumlah menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular yang tertera dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara beberapa periode. Lihat "bab Faktor-faktor risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu.

(5) ARPM (dalam Rupiah) dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit pemakaian untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.

(6) Sebelum triwulan pertama 2010, *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* yang baru dibangun atau baru dibeli tetapi belum dioperasikan dimasukkan dalam jumlah *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* yang dilaporkan oleh Perusahaan ("perhitungan lama"). Pada awal triwulan pertama 2010, seperti yang diungkapkan disini Perusahaan memasukkan *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya pada saat *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* tersebut dioperasikan. Berdasarkan perhitungan lama, Perusahaan akan melaporkan bahwa Perusahaan memiliki 10.760, 14.162 dan 16.804 *base station sites*, 226, 279 dan 315 *base station controllers* dan 56, 73 dan 96 *mobile switching centers* masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009.

(7) Sehubungan dengan pengecualian transisi yang diberikan oleh U.S. SEC terkait dengan penerapan pertama IFRS, kami telah mengecualikan data pendapatan usaha untuk tahun 2007.

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember(1),			
	2008		2009	
	Rp	%	Rp	%
	(dalam miliar Rp, kecuali persentase)			
Jasa selular	14.185,4	74,9	13.959,7	74,9
Telekomunikasi tetap	2.029,6	10,7	1.957,2	10,5
MIDI	2.733,4	14,4	2.712,6	14,6
Total pendapatan usaha	18.948,4	100,0	18.629,5	100,0

(1) Menurut pembebasan transisi yang diberikan oleh U.S.SEC sehubungan dengan adopsi IFRS yang pertama kali, kami tidak mencatumkan data tahun 2007.

JASA SELULAR

Jasa selular telah membukukan pendapatan sebesar Rp13.959,7 miliar (US$1,485.1 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang merupakan 74,9% dari total pendapatan usaha konsolidasi Perusahaan di tahun 2009. Perusahaan adalah penyelenggara jasa selular terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular, yaitu 33,1 juta pelanggan (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) per tanggal 31 Desember 2009. Untuk tahun 2009, kami menguasai sekitar 22,7% dari pangsa pasar, berdasarkan estimasi dengan menggunakan data pasar yang tersedia. Jaringan selular kami saat ini menyediakan cakupan jaringan di semua kota besar dan pusat kependudukan di seluruh Indonesia. Kami menyediakan jasa selular dengan teknologi GSM 900 dan GSM 1800 dan, untuk platform 3G kami, teknologi IMT-2000. Kami juga merupakan salah satu penyelenggara terdepan dalam layanan *broadband* nirkabel prabayar dan pasca bayar di Indonesia. Per 31 Desember 2009, kami memiliki kurang lebih 721.127 pelanggan *broadband* nirkabel prabayar dan pasca bayar.

Layanan-layanan

Layanan selular utama kami merupakan jasa penyediaan transfer suara dan data, yang kami jual melalui program pra-bayar dan pasca bayar. Pelanggan prabayar dan pasca bayar kami dapat menerima dan melakukan panggilan suara "on-net" ke dan dari pelanggan Indosat lainnya (termasuk pelanggan Matrix, Mentari dan IM3 kami) pada jaringan telekomunikasi kami, serta panggilan suara "off-net" ke dan dari pelanggan dari operator telekomunikasi lain pada jaringan telekomunikasi selular dan tetap mereka.

Kami menawarkan program pra-bayar dengan merek "Mentari" dan "IM3". Kedua produk memiliki tingkat pengakuan merek yang tinggi, sehingga memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar yang bersaing. Kami membedakan dua merek pra-bayar kami berdasarkan segmen pasar. Pemisahan tersebut membuat kami dapat menetapkan target pemakaian dan pola pengeluaran dari segmen-segmen pelanggan yang berbeda melalui rencana promosi kami. Merek Mentari dipasarkan untuk pasar yang lebih dewasa, dimana tarif telepon dipromosikan dengan harga yang bersaing. Merek IM3 dipasarkan untuk generasi muda. dengan paket-paket suara, SMS dan data yang sangat menarik. Kami terus mengembangkan merek "Mentari" dan "IM3", menawarkan promosi dan membuat iklan yang disesuaikan untuk segmen pasar khusus tersebut. Frontier Consulting Group dan Marketing Magazine menganugerahi kami dengan "Top Brand Award" pada tahun 2008, 2009 dan 2010 kepada merk Mentari dan IM3 untuk pencapaian dalam membangun kesadaran merek dan pangsa pasar.

Kami menawarkan program pasca bayar, didesain untuk pengguna *high-end*, di bawah merek "Matrix." Matrix adalah paket layanan dasar dengan program pembayaran pasca bayar yang mencakup roaming nasional gratis. Kami menawarkan berbagai paket "Matrix" dengan fitur-fitur berbeda dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Merek Matrix kami menerima "Top Brand Award" pada tahun 2010 dari Frontier Consulting Group dan Marketing Magazine.

Para pelanggan pasca bayar dan pra-bayar memiliki akses ke sambungan telepon lokal, SLJJ dan sambungan langsung jarak jauh internasional. Selain itu, kami menawarkan berbagai layanan, fungsi dan fitur dan nilai tambah untuk para pelanggan kami. Layanan-layanan, fungsi, dan fitur tersebut, yang, pada kasus-kasus tertentu, gratis, dapat dibeli secara terpisah, atau dikemas sesuai dengan paket yang dipilih, yang mencakup:

- *SMS:* para pelanggan dapat mengirimkan teks pesan pendek ke layar selular milik pengguna lainnya;
- *MMS:* para pelanggan jasa GSM dapat mengirimkan gambar, teks dan suara dalam satu paket pesan;
- *Voice SMS:* para pelanggan dapat mengirim pesan suara;
- *Ring-back tone:* para pelanggan dapat memilih lagu favorit mereka sebagai nada panggil yang dapat didengar oleh penelpon untuk telepon yang masuk;
- *GPRS:* menyediakan komunikasi mobile data dengan teknologi berbasis GSM, yaitu mobile Internet, data transfer dan push e-mail (layanan Blackberry™);
- *Layanan mobile data dan faksimili:* para pelanggan dapat mengunduh *content* olah raga, berita, horoskop, film, musik dan keuangan ke telepon genggam mereka dan mengirim serta menerima faks;
- *Voicemail:* penelepon dapat merekam pesan suara

mereka yang kemudian akan didengar oleh pelanggan;
- *Caller identification:* menampilkan nomor telepon yang masuk pada layar telepon genggam pelanggan;
- *Call holding:* para pelanggan dapat menahan telepon masuk atau keluar ketika sedang melakukan sambungan atau menerima telepon lainnya;
- *Call waiting:* sinyal bagi pelanggan bahwa ada telepon masuk ketika telepon sedang digunakan. Setelah mendengar sinyal tersebut, pelanggan dapat menerima telepon kedua yang masuk sambil tetap menahan telepon pertama yang masuk;
- *Call forwarding:* para pelanggan dapat mengalihkan telepon yang masuk ke nomor selular atau telepon tetap;
- *Tagihan terperinci:* memberikan tagihan yang terperinci kepada pelanggan yang menunjukkan durasi dan biaya telepon yang dilakukan ke dan dari telepon selular tertentu;
- *Pembayaran debit langsung:* memberikan opsi pembayaran yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank atau kartu kredit pelanggan;
- *Isi ulang via SMS dan automatic teller machines:* pelanggan dapat mengisi ulang program pra-bayar mereka via SMS dan *automatic teller machines* yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank milik pelanggan; dan
- *International roaming:* baik pelanggan pra-bayar maupun pasca bayar dapat menerima layanan SMS dan telepon ketika *roaming* di jaringan selular luar negeri.

Layanan faksimili, tagihan terperinci dan pembayaran debit-langsung hanya tersedia untuk para pelanggan pasca bayar. Sejak tahun 2009, pelanggan pasca bayar telah mampu meminta pengiriman tagihan atau pernyataan tagihan tercetak melalui e-mail, yang meminimalisir kemungkinan tagihan tidak diterima dan memaksimalkan kenyamanan pelanggan. Kami menawarkan sejumlah layanan gratis, seperti *caller identification*, *call holding*, *call waiting* dan *call forwarding*; sementara layanan lainnya, seperti SMS, *mobile data* dan faksimili dan tagihan terperinci dikenakan biaya tambahan. Kami menyediakan layanan SMS kepada pelanggan selular pra-bayar dan pasca bayar. Tingkat pemakaian telah meningkat dari rata-rata kurang lebih 90,4 juta pesan teks (tidak termasuk layanan SMS tambahan, misalnya SMS terkait promosi oleh *content providers* dan *advertisers*) per hari di bulan Desember 2008 hingga rata-rata perhari kurang lebih masing-masing 326,3 juta dan 450,2 juta pesan teks (tidak termasuk SMS bernilai tambah) pada bulan Desember 2009 dan Maret 2010. Kami mengharapkan SMS untuk terus berkontribusi pada bagian substansial dari pendapatan yang berasal dan layanan dan fitur selular yang bernilai tambah, namun mengantisipasi peningkatan pendapatan dari GPRS, BlackBerry™ dan layanan data mobile lainnya di masa yang akan datang.

Kami telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi Indonesia lainnya agar jaringan selular kami dapat melakukan interkoneksi dengan PSTN yang dioperasikan oleh Telkom, *gateway* internasional kami dan jaringan pada masing-masing operator nirkabel selular dan tetap Indonesia, dan oleh karenanya pelanggan selular kami dapat berkomunikasi dengan pelanggan dari penyelenggara layanan telekomunikasi lainnya.

Kami menawarkan layanan *roaming* internasional kepada pelanggan selular kami sehingga mereka dapat melakukan dan menerima panggilan dan mengirim serta menerima pesan SMS ketika berada di luar Indonesia. Kami telah mengadakan perjanjian *roaming* dengan operator jaringan selular GSM di Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan dan Asia. Per tanggal 31 Desember 2009, pelanggan selular pasca bayar kami dapat melakukan *roaming* internasional pada 350 jaringan, yang dimiliki oleh 264 operator di 129 negara, dan pelanggan selular prabayar kami dapat melakukan *roaming* internasional pada 13 jaringan di sembilan negara.

Pada tanggal 12 Desember 2006, kami menjadi anggota perkumpulan operator telekomunikasi internasional terbesar di Asia, CONEXUS yang didirikan untuk meningkatkan nilai saing dari setiap anggotanya dalam memberikan layanan telekomunikasi internasional di negara mereka masing-masing dan di seluruh wilayah Asia- Pasifik. Untuk mendukung layanan *roaming* saat ini melalui GSM, GPRS dan *wideband code division multiple access* atau WCDMA, para anggota aliansi bekerja sama dalam menyediakan *roaming* dengan teknologi HSDPA. Aliansi ini telah memperluas cakupan layanannya kepada lebih dari 150 juta pelanggan di sembilan negara, termasuk Indonesia. Untuk anggota CONEXUS,

kami menawarkan *flat rate* sebesar US$18 per hari untuk penggunaan data yang tidak terbatas.

JASA MOBILE DATA

Kami meluncurkan portofolio layanan *mobile data* kami pada tahun 2000. Layanan *mobile data* dapat diakses melalui, antara lain, SMS, sambungan langsung *dial-up* ke WAP *server* atau *broadband* nirkabel, di mana pelanggan dapat mengakses berbagai informasi, termasuk daftar film, *stock quote*, nilai tukar valuta asing, berita olahraga dan bisnis dan ramalan bintang, serta mengisi ulang kartu SMS prabayar mereka. Selain itu, pelanggan dapat mengirim dan menerima email dan menikmati layanan *mobile banking* dengan beberapa bank-bank terkemuka melalui telepon genggam mereka.

Kami menyajikan layanan GPRS dengan teknologi EDGE di sebagian besar kota-kota besar di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kami adalah penyelenggara telekomunikasi pertama yang meluncurkan layanan BlackBerry™ di Indonesia. Bekerjasama dengan StarHum dan Research-In-Motion ("RIM"), kami memperkenalkan layanan BlackBerry™ Enterprise untuk pelanggan perusahaan kami pada bulan Desember 2004 dan layanan BlackBerry™ untuk pelanggan pribadi pada bulan Maret 2005. Pada bulan Juni 2008, untuk membedakan Perusahaan dari operator layanan BlackBerry™ lainnya, kami meluncurkan aplikasi I-GPS dan I-Stock yang membuat pelanggan BlackBerry™ dapat melakukan akses ke sistem navigasi dan harga saham *real-time*. Pada bulan Januari 2009, kami meningkatkan kapasitas sambungan ke RIM dari 10 Mbps menjadi 20 Mbps, sehingga memberikan akses yang lebih cepat bagi pelanggan BlackBerry™ kami. Dengan peningkatan ini berarti kami memiliki kapasitas sambungan ke RIM yang terbesar di Indonesia. Kami memiliki kurang lebih 200.000 pelanggan BlackBerry™ per tanggal 31 Desember 2009. Indonesia adalah pasar dengan pertumbuhan terbesar kedua di dunia untuk BlackBerry™.

Pada tanggal 8 Februari 2006, Pemerintah mengadakan tender terbuka untuk ijin spektrum 3G dan, setelah berakhirnya proses tender, kami memperoleh satu ijin spektrum 3G untuk frekuensi 5 MHz dari spektrum yang ditenderkan. Pada penawaran yang sama, Telkomsel dan XL diberikan izin spektrum 3G. Pada tahun 2007, kami mulai menawarkan layanan *broadband* 3G yang ditingkatkan ("3.5G") menggunakan teknologi HSDPA, sebuah layanan telekomunikasi bergerak nirkabel dengan teknologi 3G yang lebih maju. Pada bulan Agustus 2009, kami memperoleh spektrum tambahan berdasarkan izin yang telah kami miliki, sehingga kami dapat menggandakan kapasitas jaringan kami untuk melayani pelanggan *broadband* kami. Pada tahun 2009, kami mulai nmenyebarkan jaringan 3.5G yang baru dengan menggunakan teknologi HSPA+, dengan kecepatan *downlink* hingga 42Mbps dan kecepatan *uplink* hingga 5,6Mbps, dan kami mulai memberikan layanan tersebut pada tahun 2010.

Pada tahun 2007, kami mulai menawarkan layanan 3.5G *broadband*, suatu layanan telekomunikasi bergerak nirkabel dengan tekhnologi 3.5G. Pada bulan Agustus 2009, kami memperoleh spektrum tambahan untuk *carrier* 3.5G, yang kami yakini dapat memungkinkan kami untuk menggandakan kapasitas jaringan kami untuk melayani pelanggan *broadband* kami. Kami telah mulai menggelar jaringan HSPA+ 3.5G yang baru, dengan kecepatan *downlink* hingga 42Mbps dan kecepatan *uplink* hingga 5,6Mbs. Kami telah mengatur kembali portfolio *broadband* kami untuk lebih memfokuskan diri kepada segmen sasaran. Sejak bulan September 2009, layanan *pure data* / *broadband* Internet, yang dipergunakan pada komputer pribadi (data saja/ layar besar), telah dikelola dan dijual oleh IM2. Layanan *broadband* nirkabel untuk telepon genggam (untuk penggunaan layar kecil) disediakan melalui Matrix, Mentari dan IM3. Pada bulan Desember 2009, kami berhasil meluncurkan program "*Broadband-On-Request*" kami yang diaktivasi oleh pelanggan sendiri, untuk pemakai Mentari dan IM3, dengan pilihan paket harian, mingguan dan bulanan, dengan kuota yang dialokasikan untuk periode berlangganan masing-masing. Kami berharap untuk mulai menawarkan layanan "*Broadband-On-Request*" kepada pelanggan pasca bayar suatu saat pada tahun 2010.

Para Pelanggan dan Pemasaran

Kami membagi penduduk Indonesia berdasarkan lokasi, pendapatan dan faktor lainnya yang kami percaya menunjukkan keinginan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk membeli produk dan layanan kami. Kemudian kami menargetkan wilayah

LAPORAN -
INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

yang umumnya lebih makmur karena daerah ini cenderung menghasilkan kepadatan yang lebih tinggi untuk pelanggan selular yang potensial. Melalui pendekatan ini, kami berhasil mendapatkan pelanggan selular tersebar di seluruh pusat-pusat populasi besar di Indonesia. Kami menerapkan strategi ini untuk beradaptasi dalam rangka kompetisi dengan pendatang baru dan tekanan harga di kota-kota besar.

Jumlah pelanggan pra-bayar kami telah tumbuh secara signifikan pada tiga tahun terakhir relatif dengan jumlah pelanggan pasca bayar. Per tanggal 31 Desember 2007 pelanggan seluler pasca bayar kami sebanyak 569.801 dan pelanggan prabayar sebanyak 23.945.431 Per tanggal 31 Desember 2008, kami memiliki 616.213 pelanggan selular pasca bayar dan 35.591.033 pelanggan selular prabayar. Per 31 Desember 2009 pelanggan kami berkembang menjadi 1.082.215 pelanggan selular pasca bayar dan 31.333.173 pelanggan selular prabayar. Kami melakukan aktivitas pemasaran dan promosi secara nasional untuk mempertahankan pelanggan selular kami yang telah ada dan untuk mendapatkan pelanggan selular baru. Kami percaya bahwa pelanggan selular Indonesia cenderung mendukung kenyamanan, kemudahan aktivasi, menghindari komitmen tetap dan mengurangi pemeriksaan kredit terkait dengan program selular prabayar. Dengan demikian, basis fokus kami yaitu pada pelanggan tertentu dalam upaya pemasaran.

Tabel di bawah ini menunjukan informasi tentang basis pelanggan selular kami, ARPU, penggunaan menit, dan ARPM per tanggal yang dinyatakan di bawah ini:

	Per tahun atau untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2007[7]	2008	2009
Jumlah pelanggan selular (tidak termasuk wireless *broadband*)[1][2]:			
Prabayar	23.945.431	35.591.033	31.333.173
Pascabayar	569.801	661.213	1.082.215
Jumlah pelanggan selular	24.515.232	36.252.246	32.415.388
Jumlah pelanggan *broadband* nirkabel[3]:			
Prabayar	–	116.341	610.446
Pascabayar	30.190	141.659	110.681
Jumlah pelanggan *broadband* nirkabel	30.190	258.000	721.127
Jumlah pelanggan selular:	24.545.422	36.510.246	33.136.515
ARPU (Rp)[4]	-	38.639	37.330
Penggunaan Menit[5]	70	98	102
Pendapatan rata-rata per Menit (Rp)[6]	-	287	220

(1) Dikarenakan perubahan dalam metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar kami, jumlah pelanggan selular, menit pemakaian untuk setiap pelanggar selular dan ARPU yang dijelaskan dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat bab faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(2) Jumlah pelanggan *wireless broadband* hanya memasukkan mereka yang berlangganan layanan *wireless broadband* kami dan tidak termasuk mereka yang menggunakan layanan "*broadband on demand*."

(3) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan selular, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan selular prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular kami, ARPU kami yang tercantum dalam lamporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat bab Faktor-faktor risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu.

(4) Menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan selular prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan dalam metode untuk menghitung jumlah pelanggan prabayar kami, maka jumlah menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular yang tertera dalam

laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara beberapa periode. Lihat Lihat bab Faktor-faktor risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu.

(5) ARPM (dalam Rupiah) dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit pemakaian untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.

(6) Sebelum triwulan pertama 2010, base station sites, base station controllers atau mobile switching centers yang baru dibangun atau baru dibeli tetapi belum dioperasikan dimasukkan dalam jumlah base station sites, base station controllers atau mobile switching centers yang dilaporkan oleh Perusahaan ("perhitungan lama"). Pada awal triwulan pertama 2010, seperti yang diungkapkan disini Perusahaan memasukkan base station sites, base station controllers atau mobile switching centers yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya pada saat base station sites, base station controllers atau mobile switching centers tersebut dioperasikan. Berdasarkan perhitungan lama, Perusahaan akan melaporkan bahwa Perusahaan memiliki 10.760, 14.162 dan 16.804 base station sites, 226, 279 dan 315 base station controllers dan 56, 73 dan 96 mobile switching centers masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009.

(7) Sehubungan dengan pengecualian transisi yang diberikan oleh U.S. SEC terkait dengan penerapan pertama IFRS, kami telah mengecualikan data pendapatan usaha untuk tahun 2007.

Per tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki kurang lebih 33.136.515 pelanggan, termasuk kurang lebih 721.127 pelanggan bagi layanan broadband nirkabel kami.

Untuk mengkonsolidasi saluran pemasaran kami untuk layanan selular, kami telah membuka pusat *walk-in* terintegrasi, dengan nama "Galeri Indosat," yang kami operasikan, dan "Griya Indosat," yang dioperasikan oleh distributor eksklusif kami. Pusat *walk-in* ini berfungsi sebagai oultet penjualan dan menyajikan layanan pelanggan dan informasi produk kepada pelanggan selular lama dan potensial. Kami juga mempunyai tim karyawan yang berdedikasi untuk mengkoordinasi penjualan dan layanan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Untuk melengkapi jalur pemasaran langsung kami, kami mempertahankan jaringan sebanyak kira-kira 52 dealer independen, kepada siapa kami menawarkan berbagai insentif untuk promosi dan penjualan layanan-layanan kami. Dealer independen regional dan multi regional ini memiliki jalur distribusi di seluruh Indonesia dan promosi layanan selular kami, terutama untuk individu. Dealer ini termasuk distributor besar perangkat mobile headset dan umumnya memiliki jaringan retail sendiri, penjualan langsung dan sub dealer di Indonesia. Outlet ini tersedia sebagai tambahan outlet untuk kami dan menawarkan jangkauan luas untuk layanan, termasuk produk dan informasi layanan, layanan pelanggan dan proses pembayaran tagihan. Pelanggan lama dan baru dapat mengaktivasi dan mendaftar serta membayar untuk seluruh layanan selular prabayar pada outlet tersebut. Kami tetap menjaga hubungan kami dengan dealer kami untuk meningkatkan volume penjualan melalui penempatan produk yang lebih baik, menjadi satu kesatuan jaringan dealer dan loyalitas dealer.

Struktur Tarif dan Pendapatan Usaha Jasa Selular

Menkominfo menetapkan formula harga yang menentukan jumlah yang dapat ditagihkan oleh operator untuk layanan selular prabayar dan pascabayar namun demikian juga memperbolehkan penyedia layanan selular untuk menawarkan program promosi yang menawarkan harga lebih rendah dari tarif tertinggi. Saat ini kami menentukan harga layanan selular dengan variasi program promosi dimana kami menawarkan berbagai macam insentif untuk menarik pelanggan baru, mendorong permintaan dan meningkatkan posisi kompetisi kami. Kami dapat membebankan tarif yang berbeda untuk layanan selular prabayar dan pascabayar tergantung pada berbagai faktor yang berlaku untuk tipe tertentu. Misalnya biaya penagihan kami kenakan untuk melayani pelanggan pasca bayar yang lebih tinggi dan sesuai dengan itu, tarif kami untuk layanan selular pascabayar cenderung lebih tinggi dibanding layanan selular prabayar.

Pasar telekomunikasi selular Indonesia menggunakan sistem pihak yang menelpon yang membayar dimana

mensyaratkan pihak yang menelpon untuk membayar biaya telepon. Jika pelanggan kami melakukan panggilan pada jaringan yang berbeda, kami membebankan biaya interkoneksi. SMS menggunakan basis "*sender keeps all*", yang berarti kami memperoleh pendapatan ketika pelanggan selular kami mengirimkan SMS, tetapi tidak pada saat pelanggan operator telekomunikasi lainnya mengirimkan SMS kepada pelanggan selular kami. Untuk layanan GPRS, kami membebankan pelanggan selular Rp1 per kilobyte untuk data yang di-*download*. Kami menerima *roaming* dari operator telekomunikasi asing ketika pelanggan selular mereka berada pada jaringan kami. Untuk layanan *broadband* nirkabel, kami menawarkan berbagai paket harga tergantung cara pembayaran (prabayar atau pascabayar), kecepatan transmisi dan kuota *download* bulanan.

Biaya aktivasi dan biaya bulanan. Biaya aktivasi menunjukkan biaya koneksi awal yang dibebankan pada pelanggan prabayar baru ketika mulai berlangganan jaringan selular. Biaya bulanan menunjukkan jumlah tetap yang dibebankan hanya untuk pelanggan pasca bayar, terutama Layanan Korporasi Blackberry yang mensyaratkan perangkat lunak Blackberry. Sejak 1998 kami tidak pernah membebankan pelanggan pasca bayar kami biaya aktivasi dan kami mulai membebankan biaya aktivasi untuk pelanggan pra bayar kami. Kami menawarkan beberapa program untuk pelanggan pasca bayar termasuk minimal penggunaan bulanan sebesar Rp 25.000, paket yang dinamakan "*Matrix Strong*" sebesar Rp 50.000 dan program promosi lainnya.

*Biaya penggunaan. T*erdapat 3 tipe panggilan: lokal, domestik jarak jauh dan panggilan internasional. Panggilan dibebankan untuk basis per detik. Panggilan dapat diterminasi pada selular, jaringan tetap atau jaringan satelit. Untuk panggilan *on-net,* pelanggan kami dibebankan tarif yang menguntungkan karena kemampuan kami untuk menawarkan berbagai produk seperti selular dan layanan panggilan internasional jarak jauh. Untuk panggilan *off-net,* biaya penggunaan oleh pelanggan lebih menguntungkan karena interkoneksi, panggilan domestik jarak jauh dan panggilan internasional jarak jauh.

Layanan Nilai tambah. Sebelum tahun 2008, tarif untuk layanan nilai tambah tidak diatur oleh pemerintah. Sejak April 2008, Menkominfo bertanggung jawab untuk mengatur formula layanan nilai tambah termasuk SMS. Sebagaimana layanan suara, kami menawarkan diskon promosi untuk SMS dan layanan *mobile* data untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.

Interkoneksi

Biaya penggunaan interkoneksi dibebankan untuk layanan selular prabayar dan pascabayar seperti yang dihitung dengan mempertimbangkan 3 biaya interkoneksi: asal, transit dan biaya terminasi.

Sejak Januari 2007, Menkominfo telah mengatur formula tarif untuk layanan interkoneksi. Menkominfo mengatur formula tarif berdasarkan basis biaya, berdasarkan DPI yang disampaikan oleh penyedia layanan yang dominan di Indonesia, termasuk kami. Menkominfo menyetujui DPI yang kami sampaikan pada tahun 2007 dan 2008 yang masih belum disesuaikan untuk tahun 2009 dan 2010. Kami mencantumkan biaya dalam DPI kami untuk perjanjian interkoneksi yang kami miliki dengan operator lain. Biaya berdasarkan DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan kami memperkirakan kelanjutan penurunan ini.

Kami saat ini berinterkoneksi dengan jaringan telepon tetap dan selular yang dioperasikan oleh semua operator jaringan di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Untuk meminimalisasi biaya interkoneksi kami, kami menggunakan fasilitas transmisi *backbone* kami sendiri bilamana dimungkinkan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Misalnya, untuk *routing* sambungan langsung jarak jauh dari seorang pelanggan di Surabaya ke pelanggan yang dituju di Jakarta dilakukan melalui saluran transmisi serat optik atau *microwave* milik kami sendiri sehingga kami dapat menghindari penggunaan jaringan milik operator lainnya dan dengan demikian mengurangi biaya interkoneksi yang terkait dengan *routing* intra-jaringan kami.

Aktivasi, Tagihan dan Perolehan Pembayaran

Pelanggan selular prabayar dapat membeli paket baru dari penjualan kami dan poin distribusi atau melalui berbagai dealer independen kami. Untuk aktivasi layanan, pelanggan selular prabayar baru harus mendaftar pada kami dan mengikuti instruksi yang dikirimkan pada pelanggan melalui SMS. Pelanggan pascabayar potensial dapat mendaftar untuk layanan selular kami pada tempat penjualan dan distribusi atau

melalui dealer independen kami. Banyak dari dealer independen kami yang hanya dapat memperoleh aplikasi baru untuk layanan pelanggan pascabayar yang mana akan diteruskan kepada kami untuk diproses. Pelanggan potensial untuk layanan pascabayar kami disyaratkan untuk memberikan bukti bahwa pelanggan tersebut memenuhi persyaratan minimum kredit. Jika pelanggan potensial tidak dapat memenuhi persyaratan pascabayar kami, perwakilan tempat penjualan kami akan merekomendasikan layanan prabayar kami. Saat disetujui, kartu SIM untuk layanan pascabayar akan diaktivasi dalam waktu 24 jam.

Kami akan menagih para pelanggan pasca bayar kami setiap bulannya melalui divisi penagihan kami yang terpusat. Dalam hal para pelanggan layanan prabayar, sistem tagihan nirkabel akan otomatis mengurangi nilai rekening pelanggan prabayar ketika biaya awal, transit dan terminasi dikenakan. Para pelanggan pasca bayar kami memiliki berbagai pilihan cara pembayaran untuk melunasi tagihan bulanan mereka. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan kartu kredit terkemuka melalui galeri Indosat, *teller* bank atau cabang kantor pos. Selain itu, para pelanggan dapat juga melakukan pembayaran dengan cara debit otomatis melalui bank atau kartu kredit, transfer bank, *Automatic Teller Machines, Electronic Data Capture, mobile banking, Internet banking,* dan *phone banking*. Jatuh tempo pembayaran adalah 20 hari sejak tanggal surat tagihan. Setelah 27 hari sejak tanggal surat tagihan, kami akan mengingatkan pelanggan yang belum membayar tagihannya dan memblokir sambungan telepon keluar mereka. Kami memblokir sambungan telepon masuk atau keluar pelanggan 40 hari setelah tanggal pernyataan apabila pelanggan belum membayar tagihan mereka. Kami akan menangguhkan layanan untuk rekening yang tagihannya telah melewati jatuh tempo lebih dari 50 hari dan menghapus data pelanggan tersebut dari jaringan kami serta memutuskan secara permanen nomor dan kartu SIM pelanggan setelah 120 hari sejak tanggal surat tagihan.

Kami telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan meminimalisasi kerugian. Kami mengirimkan *voucher* prabayar kepada para dealer independen kami hanya berdasarkan pembayaran tunai pada saat diserahkan dan kami tidak menerima pembayaran layanan kami dari para pelanggan selular melalui dealer independen kami. Selain itu, tergantung pada tingkat penggunaan, kami dapat mewajibkan pemberian uang jaminan yang dapat dikembalikan kepada para pelanggan. Kami akan mengkaji secara berkala rekening dari para pelanggan yang tingkat penggunaannya tinggi untuk memastikan agar uang jaminan mereka tetap memadai jumlahnya.

Kompetisi

Dalam beberapa tahun ini, bisnis layanan selular di Indonesia menjadi sangat kompetitif. Kompetisi pada industri komunikasi selular utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Berdasarkan estimasi internal kami, tiga penyelenggara jasa nirkabel di Indonesia, Telkomsel (yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Telkom), kami dan XL (yang secara tidak langsung mayoritas sahamnya dimiliki oleh Axiata Bhd dari Malaysia), secara bersama-sama menguasai sekitar 80% pangsa pasar jasa nirkabel di Indonesia pada tahun 2009.

Kami juga bersaing dengan operator layanan akses nirkabel tetap lainnya. Pada bulan Mei 2003, Telkom memperkenalkan produk TelkomFlexi, suatu layanan CDMA 2000-1X di wilayah Jakarta. Saat ini, Telkom menyediakan layanan ini secara nasional. Telkom menyediakan layanan ini sebagai jasa akses telepon tetap nirkabel, akan tetapi layanan ini telah berkembang baik mobilitas maupun fitur nilai tambahnya sehingga menyerupai jasa selular. Setelah menerima permohonan dari asosiasi industri, Menkominfo mengeluarkan sebuah Keputusan Menteri yang menyatakan bahwa wilayah layanan untuk akses jaringan tetap nirkabel hanya terbatas pada wilayah yang sama dengan kode area dari layanan jaringan telepon tetap lokal. Dengan demikian, operator layanan akses telepon tetap nirkabel dilarang memperluas layanan *roaming*nya ke kode area yang berbeda, namun operator CDMA tetap memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang sama dengan memberikan nomor baru kepada pelanggan ketika mereka pindah ke kota-kota lain. Selain TelkomFlexi, operator telekomunikasi lainnya menawarkan layanan yang serupa misalnya Bakrie Telecom dan Mobile-8 (Hepi), yang menawarkan layanan mereka secara nasional.

Dari waktu ke waktu, operator telekomunikasi Indonesia yang melaksanakan program perolehan pelanggan secara agresif dengan target meningkatkan pangsa pasar mereka masing-masing. Dengan menawarkan potongan harga, bonus dan tarif khusus, para operator berupaya membedakan layanannya dari layanan operator lainnya, terutama berdasarkan tarifnya. Persaingan ini mengakibatkan tarif menurun, dan dengan demikian kami yakin bahwa ARPU pelanggan selular terus mengalami penurunan untuk sebagian besar operator telekomunikasi Indonesia.

Kami yakin bahwa persaingan layanan 3G akan semakin ketat karena para operator telekomunikasi mulai memindahkan jaringannya ke pusat-pusat berpenduduk banyak. Saat ini, ada lima operator telekomunikasi yang memegang ijin layanan 3G, yaitu: Telkomsel, Hutchison, Natrindo, XL dan Perusahaan. Kami menyediakan layanan *broadband* nirkabel menggunakan platform 3G kami pada tahun 2009, dan per tanggal 31 Desember 2009, kami telah menyediakan layanan 3G di 34 kota di seluruh Indonesia.

Kompetitor utama kami untuk layanan *broadband* nirkabel adalah Telkomsel dengan layanan "Flash" dan XL dengan layanan "XL unlimited", keduanya menggunakan teknologi 3.5G W-CDMA. Operator lainnya seperti Smart Telecom dan Mobile 8 juga menyediakan layanan wireless *broadband* dengan teknologi EVDO-CDMA.

Kami yakin bahwa rintangan untuk masuk ke industri jasa selular dan akses telepon tetap nirkabel Indonesia saat ini cukup tinggi mengingat terbatasnya spektrum frekuensi yang tersedia, iklim permodalan yang tinggi, sulitnya memperoleh lahan menara untuk perluasan jaringan dan sudah terbentuknya pasar dari tiga pemain yang ada, yaitu kami, Telkomsel dan XL. Namun demikian, kami mengantisipasi adanya peningkatan persaingan di dalam industri layanan selular dan akses telepon tetap nirkabel secara umum. Dalam menanggapi hal ini, kami bermaksud memfokuskan sebagian besar pengeluaran barang modal di masa mendatang untuk bisnis selular kami dalam upaya meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan dan menyediakan berbagai layanan nilai tambah.

JASA MIDI

Produk dan jasa yang kami tawarkan dalam segmen bisnis ini meliputi layanan digital *leased line broadband and narrowband* berbasis *point-to-point* domestik dan internasional yang berkecepatan tinggi, layanan *packet-switching* berkinerja tinggi dan penyewaan transponder satelit dan jasa penyiaran. Mengingat potensi pertumbuhan yang signifikan atas layanan data dan layanan jaringan lainnya—termasuk layanan berbasis Internet—dan keperluannya yang meningkat terhadap keseluruhan strategi bisnis kami, kami telah memberikan perhatian yang cukup pada segmen usaha ini. Pertumbuhan ditekankan pada transmisi data yang *reliable* dan interkoneksitas pelanggan korporat kami, terutama mereka yang memiliki berbagai cabang atau lokasi, sehingga memberikan kesempatan yang sangat baik bagi kami. Jasa layanan MIDI memberikan pendapatan sebesar Rp2.721,0 miliar (US$289,5 juta) atau 14,8% dari total pendapatan usaha konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

	Per dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2007	2008	2009
MIDI:			
Sirkuit Disewakan Berkecepatan Tinggi Internasional ('000s)	19	46	80
Sirkuit Disewakan Berkecepatan Tinggi Nasional ('000s)	51	129	171

Layanan-Layanan

World Link, Direct Link dan Domestic Link. World Link adalah IPLC yang menyewakan jasa *leased line* antara lain sambungan internasional untuk sirkit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* dan memberikan sambungan berkecepatan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2Mbps untuk *narrowband* atau 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. *Direct Link* adalah jasa *leased line* melalui satelit yang menyediakan sirkuit data digital berkecapatan tinggi berbasis *point-to-multipoint* dan memberikan kecepatan sambungan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband*. *Domestic Link* adalah jasa *leased line* domestik berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point*, dan memberikan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. Sebagian besar pelanggan *broadband World Link* adalah para penyelenggara telekomunikasi yang membutuhkan *dedicated broadband international data links*, dan pelanggan *narrowband World Link* kami sebagian besar terdiri dari para pengguna perusahaan yang berlangganan jasa *World Link* untuk keperluan internal mereka. Koneksi VSAT digunakan untuk *World Link* dan pengguna *leased line* lainnya yang berlokasi di daerah yang tidak sepenuhnya dilewati jaringan domestik. Pelanggan *National Link broadband* kami di pasar domestik meliputi penyedia jasa telekomunikasi yang memerlukan sambungan data *broadband* domestik yang berdedikasi dan pelanggan *narrowband Domestic Link* kami terutama terdiri dari pelanggan korporasi yang memakai untuk kepentingan sendiri. Kami mencatat pendapatan usaha sebesar Rp394,2 miliar (US$41.9 juta), dari usaha *World Link*, *Direct Link* dan *Domestic Link* mewakili 14,5% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

IP VPN. Kami menyediakan jasa IP VPN yang memberikan kepada para pelanggan konektivitas yang bersifat *multipoint*, interkoneksi LAN dan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu aplikasi perhitungan yang rumit. Per 31 Desember 2009, layanan IP VPN domestik Indosat dan Lintasarta tersedia di 68 kota besar di Indonesia, dan layanan IP VPN internasional Indosat memiliki kehadiran yang kuat di Asia Tenggara, dengan cakupan sampai ke Asia Utara, Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, bekerjasama dengan beberapa operator layanan global seperti AT&T, C&W, dan NTT. Kami mencatat pendapatan usaha sebesar Rp566,1 miliar (US$60,2 juta) dari usaha IP VPN, mewakili 20,8% dari pendapatan usaha layanan MIDI konsolidasi kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

MPLS dan Metro Ethernet. MPLS dan Metro Ethernet adalah layanan *leased line* domestik berdasarkan *Internet protocol*. MPLS menyediakan sirkit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* dan multipoint memberikan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45Mbps dan 155Mbps untuk *broadband*. Metro Ethernet memberikan *bandwidth* berkecepatan tinggi, dan kecepatan *line port* sebesar 10Mbps, 100Mbps dan 1Gbps dan basis Ethernet dengan kenaikan *bandwidth* sebesar 1Mbps yang dijamin.

Frame Relay dan ATM. Kami menyediakan jasa *frame relay* dan ATM, baik internasional maupun domestik, suatu teknologi *leased packet* berkecepatan tinggi, terutama melalui Indosat dan Lintasarta, yang memberikan para pelanggannya konektivitas yang bersifat multilateral, interkoneksi LAN dan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu aplikasi perhitungan yang rumit.

Kami menawarkan berbagai layanan konektivitas data – *World Link*, *Direct Link*, *Domestic Link*, IP VPN, MPLS dan *Metro Ethernet* serta *Frame Relay* dan ATM – kepada berbagai pelanggan perusahaan kami, termasuk perusahaan multinasional, dibuat untuk menyesuaikan parameter harga, ketentuan kecepatan, dan pertimbangan keamanan mereka yang spesifik.

Layanan Satelit. Kami menyewakan kapasitas *transponder* satelit Palapa-D kami yang berada di orbital slot yang terletak di wilyah Asia-Pasifik bagi perusahaan penyiaran dan operator telekomunikasi. Indonesia memiliki pasar televisi yang besar dimana sejumlah perusahaan penyiaran domestik swasta dan *programer* internasional bersaing dengan perusahaan penyiaran milik negara dan banyak perusahaan penyiaran baik domestik dan internasional menyewa kapasitas *transponder* satelit kami. Kami mengadakan perjanjian sewa *transponder* satelit Palapa-D kami yang berbeda-beda jangka waktunya, akan tetapi umumnya berakhir dalam waktu dua sampai dengan lima tahun

sejak tanggal berlakunya sewa. Sewa *transponder* dapat diakhiri karena adanya pelanggaran perjanjian sewa dan sebagian besar dari perjanjian sewa mengatur bahwa pihak penyewa dapat mengakhiri sewa dengan pemberitahuan (umumnya enam sampai dengan 12 bulan) dengan memberikan pembayaran pengakhiran perjanjian oleh penyewa yang besarnya sama dengan persentase dari uang sewa yang seharusnya dibayarkan apabila sewa *transponder* tidak diakhiri. Terlepas dari pemakaian oleh kami sendiri, kami juga menyewakan kapasitas transponder pada satelit Palapa-C2 kami, dengan jangka waktu penyewaan maksimal empat tahun, kepada operator telekomunikasi lainnya.

Kami juga menyediakan berbagai jasa satelit tambahan lainnya, termasuk penggunaan sesekali atas jasa TV, Indosat TV link, jasa jaringan privat, akses Internet dan multimedia dan *video conferencing*. Kami perkirakan permintaan atas jasa satelit akan terus meningkat, terutama disebabkan oleh semakin berkembangnya jasa derivatif satelit. Tekanan tariff diperkirakan akan melunak sebagai konsekuensi dari meningkatnya permintaan. Jasa satelit menghasilkan Rp113,1 miliar (US$12.0 juta) atau 4,2% dari pendapatan usaha jasa MIDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Layanan Internet. Kami menyediakan jasa *Internet Network Provider* bagi perusahaan ISP dan jasa akses Internet bagi para pelanggan pengguna akhir dan perusahaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, kami mengoperasikan tiga ISP yang mengkontribusi pendapatan sebesar Rp677,4 miliar (US$72,1 juta). IM2 menyediakan jasa *Internet dedicated* dan *dial-up*, dan per tanggal 31 Desember 2009, IMM memiliki 1.903 pelanggan korporasi dan usaha kecil hingga menengah dan 675.026 pelanggan retail. Dalam mengantisipasi meningkatnya persaingan di segmen bisnis Internet, IM2 telah mengembangkan strategi untuk memperluas bisnisnya dengan cara membangun *Internet protocol backbone* di wilayah-wilayah yang berpotensi berkembang, menempatkan jasa *public hotspot*, mendirikan pusat layanan pelanggan, mengembangkan jaringannya melalui investasi bersama dengan menggunakan teknologi *hybrid fiber* dan *coaxial* serta memperbaiki proses bisnisnya.

Lintasarta menawarkan kepada para pelanggan Internetnya layanan "IdOLA" untuk penggunaan perorangan dan layanan "LintasartaNet" untuk pelanggan korporat. Dengan IdOLA dan LintasartaNet, para pelanggan dapat mengakses informasi dari berbagai penyelenggara konten di Indonesia dan di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan LintasartaNet untuk promosi Internet, alokasi software dan komputer, kerjasama usaha atau transaksi perdagangan domestik dan internasional. Kami membukukan 25% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami dari jasa Internet untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

VSAT Net/IP dan *VSAT Link*. Layanan *VSAT Net/IP* dan *VSAT Link* Lintasarta merupakan sistem data *networking* berbasis satelit. VSAT Net/IP menghubungkan dan mengendalikan trafik data antar lokasi yang berjauhan, yang dapat membangun data secara cepat untuk para pelanggan jaringan yang trafiknya rendah sampai dengan menengah, seperti di sektor jasa keuangan, transportasi, perdagangan dan distribusi. VSAT Link menyediakan transmisi digital berbasis *point-to-point* untuk lokasi yang jauh oleh perusahaan dengan trafik menengah sampai padat seperti pabrik, pertambangan dan industri jasa keuangan.

Pelanggan dan Pemasaran

Pelanggan layanan MIDI kami terutama adalah pelanggan korporat dan SME, walaupun kami juga memiliki pelanggan ritel untuk layanan-layanan tertentu, seperti jasa Internet. Kegiatan pemasaran untuk layanan MIDI meliputi presentasi kelompok, pengiriman pos langsung, promosi dengan mitra, program mempertahankan pelanggan dan iklan di publikasi dan media cetak. Masing-masing unit usaha berupaya mempertahankan hubungan pelanggan melalui kegiatan seperti forum pengguna, seminar pelatihan, kunjungan dan pertemuan informal dengan para pelanggan. Lintasarta berfokus pada perluasan pangsa pasarnya di segmen industri di luar kompetensi utamanya yaitu di bidang perbankan dan keuangan, mengingat kemungkinan adanya konsolidasi dan restrukturisasi industri-industri tersebut di Indonesia. Selain itu, Lintasarta telah semakin berfokus pada upaya penjualan dan pemasarannya pada perusahaan berskala kecil sampai menengah atau UKM, dengan mengemas ulang produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Lintasarta sedang memperluas cakupan geografis produk dan jasanya yang sudah ada dalam rangka menghadapi permintaan yang meningkat atas infrastruktur telekomunikasi di wilayah

terpencil sebagai dampak dari perkembangan politik Indonesia, di antaranya pertumbuhan otonomi daerah.

Kami mendukung para pelanggan kami melalui staf lokal, *24-hour help desk* dan manajemen jaringan *realtime* terpadu. Pada bulan April 2000, Lintasarta memperoleh sertifikasi ISO 9002 untuk layanan *frame relay*, *digital data network* dan VSAT. Pada bulan Januari 2002, kami memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk layanan *frame relay*, *digital data network* VSAT, yang membuktikan komitmen kami terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, Frontier dan majalah Marketing memberikan penghargaan "Top Brand Award" untuk kategori ISP untuk tahun 2005 hingga 2010 dan "Best Contact Center Award" untuk tahun 2007, 2008 dan 2009.

Struktur Tarif dan Harga

Para pelanggan berbagai layanan MIDI kami dikenakan biaya berdasarkan jenis produk dan jasa yang disediakan dan kapasitas yang disewakan kepada mereka, sektor industri mereka, lokasi geografis dan lamanya kontrak jasa mereka dengan Perusahaan (yang umumnya berkisar satu sampai tiga tahun). Tarif layanan ini biasanya meliputi komponen-komponen sebagai berikut: biaya instalasi awal; biaya bulanan (berdasarkan lokasi dan kecepatan akses); biaya per transaksi (berdasarkan volume, waktu dan/atau jarak yang dilalui untuk trafik jaringan); dan biaya-biaya jasa lainnya, seperti konsultasi atau manajemen proyek.

Tarif sewa *transponder* satelit untuk penyewa internasional dinegosiasikan secara sendiri-sendiri dengan pelanggan dan bergantung pada persediaan dan permintaan jasa di wilayah yang dicakup oleh satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami. Sewa untuk luar negeri kami rata-rata mencapai US$1,2 juta per tahun untuk *transponder* yang penuh. Hampir semua pembayaran sewa untuk luar negeri dilakukan setiap tiga bulan di muka dalam mata uang Dolar AS dan mata uang lainnya yang lazim digunakan.

Persaingan

Para penyelenggara jasa komunikasi data di Indonesia terutama bersaing dalam hal harga, ragam jasa yang disediakan dan kualitas jasa pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan di antara para penyelenggara jasa komunikasi data semakin meningkat terutama karena dikeluarkannya ijin-ijin baru sebagai dampak dari deregulasi di sektor industri telekomunikasi Indonesia. Kami perkirakan persaingan akan terus semakin ketat. Menurut kami pesaing utama kami adalah Primacom dan Citra Sari Makmur untuk jasa VSAT, dan Citra Sari Makmur, Telkom, XL dan Indonesia Comnet Plus (Icon+) untuk jasa *leased line*. Pemerintah menyatakan Telkom sebagai operator dominan untuk penyewaan sirkuit pada 2007. Sebagai hasil dari deklarasi ini, kami percaya bahwa Telkom akan memerlukan persetujuan ketika kami dapat mengajukan tarif baru tanpa persyaratan untuk persetujuan pemerintah.

ISP di Indonesia bersaing pada dasar kualitas jaringan, harga dan jangkauan jaringan. Sehubungan dengan layanan nilai tambah sehubungan dengan Internet, kami bersaing dengan Telkom dan ISP yang telah ada seperti First Media, Biznet, CBN, Berca dan Indonet. Kami juga menghadapi kompetisi yang signifikan dari ISP baru yang izinnya disetujui oleh Menkominfo.

Dengan adanya permintaan pasar perusahaan yang lebih cepat dengan harga terjangkau, banyak dari pemasok *bandwidth* sudah mulai melakukan investasi secara signifikan menuju pembangunan, infrastruktur superior dengan teknologi baru, seperti "Dense Wavelength Division Multiplexing" dan teknologi DWDM. Teknologi DWDM merupakan ancaman yang kompetitif karena infrastruktur memungkinkan pemasok kapasitas *bandwidth* untuk menawarkan lebih banyak *bandwidth* dengan efisiensi biaya yang lebih baik. Industri *bandwidth* telah menghadapi menghadapi tantangan baru dari munculnya operator baru, seperti Moratel dan Matrix Cable System, yang mengatur kabel internasional yang menghubungkan Indonesia dan Singapura pada tahun 2008.

Perusahaan-perusahaan di sektor bisnis satelit terutama bersaing dalam hal kekuatan transponder, penawaran produk dan tarif. Umumnya, tarif layanan bergantung pada kombinasi dari kekuatan dan cakupan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, persaingan di sektor bisnis satelit di wilayah Asia-Pasifik semakin meningkat. Pengoperasian satelit terutama meliputi sewa *transponder* untuk perusahaan penyiaran dan operator layanan VSAT, selular dan SLI dan ISP. Kami menghadapi persaingan dari penyelenggara jasa domestik dan asing di masing-masing bidang ini. Dalam menyewakan *transponder* kami di satelit

Palapa-D, kami bersaing sangat ketat di Indonesia dengan PT Pasifik Satelit Nusantara atau Pasifik Satelit Nusantara, dan Telkom. Pasifik Satelit Nusantara juga memiliki *transponder* pada Mabuhay Philippines Satellite. Telkom saat ini mengoperasikan satelitnya sendiri (Telkom-1 dan Telkom-2) dan stasiun bumi, terutama untuk menyediakan hubungan transmisi *backbone* untuk jaringannya. Telkom juga menyewakan kapasitas transponder satelit dan menyediakan layanan stasiun bumi satelit *uplinking* dan *downlinking* kepada para pengguna domestik dan internasional. Satelit swasta lainnya yang ada dalam pasar penyiaran dalam wilayah cakupan satelit Palapa adalah AsiaSat-2, AsiaSat-4, AsiaSat-3S, Apstar-2R, Apstar-5, Apstar-6, ThaiCom 3, Measat-2, Measat-3, Measat-3a, PanAmSat-4 dan PanAmSat-7. Measat Sdn. Bhd, yang mengoperasikan satelit-satelit Measat, APT Satellite yang mengoperasikan satelit-satelit Apstar, dan Shin Satellite PCL yang mengoperasikan satelit-satelit ThaiCom, juga bersaing secara langsung dengan kami di dalam pasar regional Asia.

Selain itu, dengan meningkatnya popularitas televisi *Direct-To-Home* atau DTH, bisnis satelit kami akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan diluncurkannya satelit-satelit regional yang baru dan berkemampuan tinggi. DTH adalah penerimaan program satelit dengan piringan satelit/*dish* tersendiri yang ditempatkan pada masing-masing rumah. Perusahaan penyiaran nasional berupaya memperoleh ijin DTH agar dapat menyediakan jasa penyiaran yang berskala nasional di Indonesia. Televisi DTH akan memungkinkan para perusahaan penyiaran untuk menyalurkan isi program mereka tanpa menggunakan dukungan jaringan telekomunikasi kami. Selain itu, karena popularitas DTH yang semakin bertambah, kami menghadapi kemungkinan hilangnya pelanggan karena DTH menggunakan platform satelit yang tidak kami sediakan.

JASA-JASA TELEKOMUNIKASI TETAP

Jasa telekomunikasi tetap kami meliputi layanan sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional serta jasa akses telepon tetap nirkabel. Untuk 31 Desember 2009, kami mencatat pendapatan operasional sebesar Rp1.743,4 miliar (US$185,5 juta) dari jasa telekomunikasi tetap, yang mewakili 9,4% dari total pendapatan usaha konsolidasi kami. Kecuali yang berhubungan dengan pembayaran selular, pelanggan nirkabel tetap dan pelanggan *fixed line*, kami tidak menerima pembayaran langsung dari pengguna akhir jasa sambungan jarak jauh internasional. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 3,2% dari pendapatan usaha telekomunikasi tetap dihasilkan dari jumlah yang dibayarkan atau terhutang kepada Telkom dan penyedia layanan telekomunikasi domestik lainnya untuk panggilan keluar, 6,8% dari pendapatan tersebut dihasilkan dari jumlah yang dibayarkan atau terhutang kepada penyedia layanan selular dan 70,3% dari pendapatan tersebut dihasilkan dari pendapatan bersih dengan penyedia layanan telekomunikasi luar negeri untuk panggilan keluar dan panggilan masuk. Sisa 19,5% dari pendapatan operasional jasa telekomunikasi tetap berasal dari tagihan langsung untuk jasa-jasa spesifik, seperti *calling card* dan pelanggan *fixed-line* untuk periode yang sama.

Layanan-Layanan

Jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh Internasional. Kami menyediakan berbagai jasa telekomunikasi suara internasional dan jasa telekomunikasi internasional baik *switched* maupun *non-switched*. Layanan *switched* memerlukan interkoneksi dengan PSTN atau fasilitas milik operator selular lainnya; sedangkan layanan *nonswitched* dapat dilakukan melalui fasilitas transmisi kami tanpa perlu interkoneksi.

Melalui layanan "001" dan "008", saat ini Perusahaan menguasai kurang lebih 25% bisnis SLI di Indonesia. Demi meningkatkan kompetisi yang bersumber dari deregulasi industri, kami meluncurkan "FlatCall 016" pada bulan Maret 2005 dan memasarkannya sebagai produk baru yang ditujukan kepada konsumen pada segmen pasar yang paling sensitif harga. Mulai bulan Januari 2007, dalam rangka mematuhi keputusan dari Pemerintah, kami mengubah kode akses menjadi lima digit dan menamakannya "FlatCall 01016." Produk "FlatCall 01016" menawarkan tingkat tarif bersaing untuk beberapa negara tujuan sembari menawarkan tingkat tarif VoIP regular untuk negara-negara lain.

Sambungan keluar internasional jarak jauh kami disalurkan melalui salah satu dari empat *international gateway* kami. Dari *gateway* ini, layanan sambungan langsung jarak jauh internasional akan ditransfer via satelit atau kabel laut berdasarkan program routing yang telah

ditetapkan, yang dikembangkan berdasarkan kolaborasi dengan para operator telekomunikasi asing. Operator asing yang menerima panggilan melalui *international gateway* bertanggung jawab untuk mengakhiri panggilan kepada penerima panggilan. Demikian pula, panggilan internasional jarak jauh yang diterima oleh *gateway* kami dialihkan dari *gateway* menuju tujuan mereka di dalam negeri melalui jaringan lokal Telkom, jaringan selular, jaringan tetap lokal atau operator selular lainnya dimana kami memiliki perjanjian interkoneksinya.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, pendapatan kami yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional adalah masing-masing sebesar Rp1.362,7 milliar (US$145,0 juta).

Tabel berikut ini memuat data operasional tertentu dari jasa layanan sambungan internasional langsung untuk periode berikut:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
	2007		2008		2009	
	Jumlah Menit	% Perubahan	Jumlah Menit	%Perubahan	Jumlah Menit	% Perubahan
	(dalam ribuan, kecuali persentase)					
Jumlah Menit Masuk yang dibayarkan	1.236,6	26.1	1.484,4	20,0	1.482,8	-0,5
Jumlah Menit Keluar yang dibayarkan	296,9	93.0	474,0	59,7	442,0	6,3
Jumlah Menit Masuk dan Keluar yang dibayarkan	1.533,4	35.2	1.958,4	27,7	1.924,8	0,9
Rasio Lalu Lintas masuk dan keluar	4,2	—	3,1	—	3,2	—

Selama tahun 2008 dan 2009, sambungan keluar internasional kami yang diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan meningkat sebesar 59,7% dan 6,3%, masing-masing, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan panggilan masuk internasional yang diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan meningkat sebesar 20,0% dan menurun sebesar 0,5% untuk periode yang sama. Panggilan masuk dan keluar yang dikombinasikan, juga diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan, masing-masing meningkat sebesar 27,7% dan 0,9% selama tahun 2008 dan 2009. Kami percaya pertumbuhan yang lebih kuat di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh strategi bisnis agresif kami yang menekankan volume penjualan berbasis volume. Kami percaya bahwa meningkatnya kompetisi dari Telkom dan operator VoIP, beberapa di antaranya, tidak mempunyai izin, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami di masa depan.

Layanan Akses Telepon Tetap Nirkabel. Kami meluncurkan jasa akses telepon nirkabel tetap kami di tahun 2004 untuk mengembangkan bisnis telekomunikasi tetap kami dan untuk memperluas layanan selular kami. Dengan menggunakan teknologi CDMA 2000 1x, jasa telepon tetap nirkabel kami menawarkan alternatif yang lebih ekonomis bagi pelanggan yang memerlukan pergerakan terbatas. Per tanggal 31 Desember 2009, layanan akses telepon tetap nirkabel kami, "StarOne," memiliki total basis pelanggan sebanyak 594.133 dengan 68.742 pelanggan pasca bayar dan 525.391 pelanggan prabayar. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, pendapatan yang berasal dari layanan akses telepon tetap nirkabel sebesar Rp 249,9 milliar (US$ 26,6 juta). Pada tanggal 12 Desember 2006, Pemerintah memberikan ijin untuk dua kanal layanan akses telepon tetap nirkabel berskala nasional pada frekuensi 800MHz. Ijin ini menggantikan ijin akses telepon tetap nirkabel 1900MHz kami yang lama dan pada akhir tahun 2007 kami melakukan migrasi frekuensi CDMA dari 1900MHz ke frekuensi baru 800MHz di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami memperluas layanan StarOne ke 82 kota pada bulan Desember 2009.

Sambungan Lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh Domestik. Kami telah meluncurkan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik dari titik akses Indosat seperti "StarOne" dan "INDOSAT phone" di bulan Oktober 2005. Kami saat ini telah memiliki cakupan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik di 82 kota besar di Indonesia.

LAPORAN -
INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

Pelanggan dan Pemasaran

Pelanggan utama dari jasa telekomunikasi tetap kami adalah pelanggan korporat, selular, pelanggan telekomunikasi tetap dan pelanggan akses telepon tetap nirkabel kami, serta pelanggan dari operator telekomunikasi lainnya.

Kami mempekerjakan tim penjualan yang kuat, yaitu kelompok penjual yang memfokuskan pada 500 pelanggan terbesar kami, termasuk hotel, pelanggan korporat besar, kantor pemerintahan dan kedutaan. Kami juga mengimplementasikan program loyalitas pelanggan, yang memberikan insentif kepada pelanggan reguler. Selain itu, kami berusaha untuk memperluas basis pelanggan kami dengan melakukan kerjasama promosi dengan perusahaan telekomunikasi internasional lainnya untuk mempromosikan layanan kami. Kami berusaha untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi yang dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan.

Kami telah melakukan berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan layanan untuk pelanggan telekomunikasi tetap kami. Strategi pemasaran kami berfokus pada: (i) memperkuat strategi *price-tiering* dengan mengimplementasikan "FlatCall 01016" untuk menyaingi layanan VoIP; (ii) memperluas pangsa pasar sementara tetap mempertahankan pelanggan kami melalui inisiatif *bundling*, (iii) menetapkan komitmen volume untuk lalu lintas masuk dari operator telekomunikasi asing; (iv) memperluas cakupan layanan akses tetap nirkabel kami. Kami selalu melakukan kampanye iklan nasional melalui media televisi, surat kabar, majalah, *website* dan radio untuk meningkatkan kesadaran merek diantara pelanggan bisnis dan ritel. Kami juga mengoperasikan 8 lokasi kantor penjualan regional di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2009, sebesar kurang lebih 37% dari jumlah menit sambungan keluar internasional jarak jauh (termasuk panggilan yang ditempatkan melalui "Flatcall 01016") sebagian besar berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, diikuti oleh Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara, yang jika dihitung secara bersama-sama adalah sebesar 63% dari jumlah menit sambungan keluar internasional jarak jauh kami.

Kami memiliki database informasi pelanggan, sehingga kami dapat menganalisa preferensi konsumen dan pola penggunaan dan merancang pola pemasaran dan produk. Kami melakukan riset pasar sendiri dan juga bekerja sama dengan konsultan untuk melakukan riset yang lebih luas pada perilaku dan kebutuhan pelanggan.

Struktur Tarif, Kewajiban Pelayanan Universal dan Harga

Tarif. Sebelum tahun 2008, Menkominfo menetapkan tarif untuk jasa telekomunikasi tetap, yang berdasarkan pada pembagian untuk seluruh tujuan ke dalam enam zona. Pada tanggal 30 April 2008, Menkominfo menetapkan rumusan tarif untuk layanan-layanan dasar pada jaringan tetap dan mengharuskan operator untuk menghitung harga menggunakan rumus berbasis-biaya, yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah untuk memperoleh persetujuan. Namun, tarif jarak jauh internasional kami tidak mengalami perubahan, dan dengan demikian kami berniat untuk tetap memakai tarif jarak-jauh internasional berdasarkan peraturan sebelumnya yang mendasarkan tarif pada enam zona untuk tujuan panggilan.

Penyediaan layanan sambungan jarak jauh di antara dua negara biasanya diadakan antara para *carrier* telekomunikasi secara bilateral. Kami biasanya menerapkan sistem harga berbasis tingkat terminasi pasar, yaitu kami setuju untuk menggunakan tarif harga asimetris untuk panggilan masuk dan keluar. Kami memiliki sambungan langsung dengan 64 operator telekomunikasi asing di 40 negara. Perjanjian kami dengan para *carrier* ini menetapkan ketentuan pembayaran dari kami kepada operator telekomunikasi asing dalam rangka penggunaaan fasilitas mereka dalam menghubungkan layanan jarak jauh internasional yang ditagih di Indonesia dan oleh operator telekomunikasi asing kepada kami dalam rangka penggunaan fasilitas (dan jaringan lokal Indonesia) sehubungan dengan layanan internasional jarak jauh yang akan ditagih di luar negeri. Praktek diantara *carrier* telekomunikasi ini adalah untuk tagihan yang telah jatuh tempo sehubungan dengan penggunaan jaringan luar negeri akan dicatat, ditagihkan dan diteruskan oleh *carrier* operator telekomunikasi dari negara dimana panggilan tersebut ditagih. Berdasarkan harga yang dinegosiasikan dengan setiap operator telekomunikasi asing, kami melakukan pembayaran kepada *carrier* lalu lintas panggilan keluar yang ditagih di Indonesia, dan kami menerima pembayaran dari *carrier* tersebut

untuk lalu lintas panggilan masuk yang ditagih di luar wilayah Indonesia. Penyelesaian pembayaran diantara penyelenggara biasanya dilakukan secara triwulan dengan metode net-basis. koresponden carrier terbesar kami berlokasi di Malaysia, Singapura, Taiwan, Timur Tengah dan Hong Kong.

Para penyelenggara layanan VoIP dapat menentukan biaya penagihan mereka sendiri, dan masing-masing penyelenggara harus bernegosiasi dengan penyelenggara jaringan yang terkait untuk biaya interkoneksi. Kami telah menandatangani perjanjian dengan Telkom untuk menjadi penyedia jaringan kami untuk sambungan VoIP.

Interkoneksi dengan Jaringan Domestik. Meskipun kami menyediakan *international gateway* untuk sambungan telepon keluar dari dan telepon masuk ke Indonesia, semua layanan sambungan langsung jarak jauh internasional harus berakhir pada salah satu jaringan telepon tetap domestik atau selular. Menkominfo telah menetapkan biaya interkoneksi layanan sambungan langsung jarak jauh internasional yang melewati jaringan telepon tetap domestik dan akses jaringan tetap nirkabel. Kami memiliki perjanjian interkoneksi terpisah, yang mencerminkan tarif-tarif ini, dengan para penyelenggara yang berinterkoneksi secara langsung dengan *international gateway* kami.

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations). Pemerintah menetapkan tarif Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligations*, atau USO), yang sejak tahun 2005 hingga 2009 adalah 0,75% dari pendapatan kotor tahunan dikurangi dari biaya interkoneksi yang dibayarkan kepada *carrier* telekomunikasi lainnya dan piutang ragu-ragu. Pada bulan Januari 2009, Pemerintah meningkatkan tarif USO dari 0,75% dari pendapatan kotor tahunan menjadi 1,25% dari pendapatan kotor tahunan.

Tagihan Pelanggan dan Biaya Interkoneksi

Para operator domestik melakukan proses *billing* dan penagihan dari panggilan internasional jarak jauh yang dilakukan melalui jaringan domestik. Operator domestik akan memotong biaya interkoneksi yang terhutang kepadanya dari jumlah uang yang diperoleh dan membayar sisanya (tanpa bunga) dalam mata uang Rupiah kepada kami dalam waktu paling lambat 25 hari setelah perolehan pembayaran dari pelanggan di Indonesia. Siklus perolehan pembayaran untuk sebagian besar operator domestik adalah sekitar 30 hari. Kami bertanggung jawab atas penerbitan dan pengiriman informasi tagihan kepada para operator domestik, melalui modul yang dikenal sebagai layanan *System Online Clearing Interconnection*, pada tanggal 12 setiap bulannya, yang kemudian ditagihkan oleh operator domestik kira-kira lima hari setelah penerimaan dari kami, hal ini menjadikan siklus perolehan pembayaran kami menjadi kurang lebih 50 sampai dengan 80 hari. Untuk keperluan laporan keuangan, kami membukukan pendapatan per bulanan berdasarkan catatan trafik kami sendiri. Kami melakukan penagihan kepada operator selular dalam negeri pada pertengahan bulan berikutnya dan mewajibkan pembayaran pada akhir bulan. Oleh sebab itu, siklus penagihan yang normal untuk operator selular domestik kami adalah kurang lebih 20 sampai dengan 60 hari.

Kami mengirimkan tagihan interkoneksi kepada operator yang relevan untuk panggilan yang masuk pada jaringan domestik. Kami umumnya menagih biaya tersebut dalam waktu 20 sampai dengan 60 hari dengan melakukan off-set terhadap piutang dari panggilan keluar. Pembayaran dari operator telekomunikasi asing biasanya dilakukan dalam mata uang U.S dollar, yang akan didepositokan di Indonesia, dan jumlah yang mewakili pembayaran interkoneksi yang dibayarkan kepada kami melalui jaringan operator domestik dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

Pemakaian pelanggan atas layanan akses nirkabel dan sambungan domestik jarak jauh dihitung dari awal sampai dengan akhir bulan. Penagihan kepada pelanggan dilakukan dari awal sampai dengan akhir bulan. Penagihan kepada pelanggan dilakukan dari awal bulan berikutnya dan diselesaikan pada tanggal kelima dari bulan yang bersangkutan. Laporan tagihan diterima oleh pelanggan tidak lebih dari tanggal sepuluh tiap bulannya dan pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal dua puluh setiap bulannya. Untuk layanan akses tetap nirkabel, kami memblokir pelanggan untuk melakukan panggilan apabila mereka belum melakukan pembayaran dari tagihan yang jatuh tempo pada tanggal dua puluh setiap bulannya. Kami memblokir pelanggan untuk menerima panggilan selama empat puluh hari setelah tanggal penagihan

apabila mereka belum melunasi tagihannya. Kami akan memutuskan layanan dan menghapuskan akun secara permanen untuk pelanggan dengan tagihan yang telah melewati enam puluh hari sejak hari pertama diterbitkannya tagihan. Untuk layanan domestik jarak jauh, kami akan memblokir pelanggan untuk melakukan panggilan di akhir bulan apabila mereka belum membayar tagihannya. Untuk pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo di bulan kedua, kami akan memblokir pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan. Kami akan memutuskan layanan dan menghapuskan akun secara opermanen untuk pelanggan dengan tagihan yang telah melewati sembilan puluh hari dari hari pertama diterbitkannya tagihan.

Persaingan

Kami bukan lagi satu-satunya penyedia resmi jasa sambungan SLI tradisional (i.e., non VoIP) di Indonesia. Menkominfo telah memberikan izin operasional untuk menyediakan jasa sambungan SLI kepada Telkom, termasuk hak untuk menggunakan kode akses SLI "007" untuk memasuki pasar sambungan internasional jarak-jauh, dan Bakrie Telecom. Pemerintah juga menerbitkan izin-izin baru untuk penggunaan layanan SLI untuk operator telekomunikasi lain, yang akan meningkatkan persaingan. Selain itu, Telkom tidak lagi melakukan monopoli untuk jasa layanan SLJJ. Pasar SLI tradisional telah menjadi semakin kompetitif dengan adanya kenaikan penggunakan teknologi VoIP. Bisnis VoIP kami telah meningkat secara signifikan dari 201,9 juta menit di tahun 2007 menjadi 442,4 juta menit di tahun 2009.

Pada bulan April 2008, kami dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari pelanggan kami masing-masing di Balikpapan, dimana pelanggan jaringan tetap Telkom menggunakan "011" untuk mengakses jaringan SLJJ kami sementara pelanggan jaringan tetap lokal kami dapat menggunakan "017" untuk mengakses jaringan Telkom. Selain itu, pada tahun 2008, Bakrie Telecom telah memperoleh izin baru sebagai penyelenggara SLJJ. Pembukaan akses SLJJ diantara para kompetitor dan dimulainya kegiatan usaha oleh dari penyelenggara SLJJ baru diharapkan dapat meningkatkan persaingan dengan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pelanggan untuk layanan SLJJ.

Kami juga menghadapi persaingan dari penyedia layanan akses tetap nirkabel lainnya. Saat ini, Telkom, merupakan operator akses tetap nirkabel terbesar, menawarkan TelkomFlexi, sebuah layanan CDMA 2000 1x, di lebih dari 250 kota di Indonesia. Bakrie Telecom, yang menawarkan layanan di lebih dari 30 kota di Indonesia, dan Mobile-8, juga telah diberikan izin baru untuk layanan akses tetap nirkabel secara nasional, yang meningkatkan persaingan lebih lanjut di dalam segmen ini.

FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR

Berikut ini adalah pembahasan mengenai jaringan selular, jaringan telekomunikasi tetap (termasuk jaringan SLI), serta fasilitas dan infrastruktur komunikasi lainnya milik kami, termasuk milik anak perusahaan utama kami yang beroperasi.

Jaringan Selular

Komponen-komponen utama dari jaringan selular kami adalah sebagai berikut:

- *base transceiver/Node B stations*: terdiri dari *transmitter* dan *receiver* dan berfungsi sebagai jembatan antara para pengguna selular dalam satu *cell* dan *mobile switching centers* melalui *base station controllers* dan *radio network controllers*;
- *base station controllers/radio network controllers*: merupakan alat untuk menghubungkan ke dan mengendalikan *base station* dalam setiap *cell site*;
- *mobile switching centers*: pusat yang mengendalikan *base station controllers* dan yang melakukan *routing* sambungan telepon; dan
- *transmission lines*: sambungan yang menghubungkan *mobile switching centers, base station controllers, base stations* dan PSTN.

Jaringan selular kami saat ini beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 10 MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 900 GSM, *bandwidth* frekuensi 20MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 1800 DCS dan 5MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum IMT-2000. Berikut adalah tabel yang memuat beberapa informasi mengenai jaringan selular kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per 31 Desember,		
	2007	2008	2009
Base transceiver stations(1)	9.324	12.237	14.385
Node B Stations (3G BTS) (1)	800	1.425	1.968
Jumlah BTS (termasuk 2G dan 3G) (1)	10.124	13.662	16.353
Base Station Controllers(1)	226	265	315
Mobile Switching Center (1)	56	73	95
Radio Network Controllers (1)	12	14	20
Media Gateway (1)	24	40	73

(1) Sebelum masa triwulan pertama di tahun 2010, *base transceiver station*, stasiun node B, BTS, *base station controller*, pusat *mobile switching,* dan pengendali jaringan radio atau *gateway* media yang baru dibangun atau baru dibeli dan belum beroperasi dimasukkan dalam laporan Perusahaan. Awal dari triwulan pertama di tahun 2010, sebagaimana diungkapkan di sini, Perusahaan berniat untuk memasukkan *base transceiver station*, stasiun node B, BTS, *base station controller*, pusat *mobile switching,* dan pengendali jaringan radio atau *media gateway* yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya ketika mereka telah beroperasi. Berdasarkan Perhitungan Awal, Perusahaan telah memiliki angka-angka berikut:

	Per tanggal December 31,		
	20087	2008	2009
Base transceiver stations	9.960	12.677	14.621
Node B Stations (3G BTS)	800	1.485	2.183
Jumlah BTS (termasuk 2G dan 3G)	10.760	14.162	16.804
Base Station Controllers	226	279	315
Mobile Switching Center	56	73	96
Radio Network Controllers	12	16	21
Media Gateway	24	54	80

Kami membeli peralatan telekomunikasi selular kami terutama dari pemasok Eropa dan Cina. Jaringan kami adalah sebuah sistem terintegrasi yang menggunakan peralatan *switching*, *cell site*, dan jaringan transmisi *point-to-point microwave* radio. Sebagian besar dari *cell site* dan basis stasiun radio kami berlokasi di atau pada gedung atau di lahan kosong, yang kami miliki, atau yang sewanya telah dinegosiasikan oleh kami dengan jangka waktu yang bervariasi dari lima hingga 20 tahun.

Sebagai hasil pengoperasian tiga jaringan lama yang menggunakan peralatan dari berbagai *supplier*, pengeluaran barang modal kami secara historis pernah lebih tinggi dibandingkan apabila kami mengoperasikan suatu jaringan dengan pemasok yang lebih sedikit. Sejak tahun 2009, sebagai bagian dari strategi pengaturan fungsional kami, kami mulai merasionalisasikan pengeluaran barang modal dan rencana pengadaan kami melalui komite investasi kami yang baru dibentuk. Kami telah memfokuskan pengadaan kami jumlah pemasok yang lebih sedikit dan telah mengadopsi sebuah pendekatan perjanjian utama (*framework agreement*) dengan para pemasok tersebut, yang kami percaya akan meningkatkan efisiensi program pengeluaran barang modal kami secara signifikan.

Kami mempertimbangkan berbagai pilihan sehubungan dengan operasional, kepemilikan, dan penggunaan dari aset-aset menara kami yang kami percaya dapat mengoptimalkan nilai dari aset-aset tersebut.

Jaringan Telepon Tetap

Kami telah membangun jaringan telekomunikasi telepon tetap yang terdiri dari enam *international gateway* yang didukung oleh sirkit satelit, kabel laut dan transmisi *microwave*. Pada akhir tahun 2009, kami menyediakan jasa telepon tetap nirkabel di 82 kota di Indonesia.

International Gateways. Untuk bisnis sambungan langsung jarak jauh internasional, kami mengoperasikannya dengan menggunakan enam *gateway*, tiga *gateway* di Jakarta, dan masing-masing satu *gateway* di Surabaya, Medan dan Batam, yang menyediakan seluruh koneksi untuk layanan kami ke jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami. Kami membeli perangkat *gateway-switching* dari Lucent Technologies, Inc. (yang telah bergabung dengan Alcatel) dan Siemens.

Per tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki kapasitas *bandwidth* internasional sebesar 1.390,66 Mbps untuk suara dan 14.969,64 Mbps untuk transmisi data. Seluruh

tujuan kami terkoneksi secara digital. *Bandwidth* yang tersedia untuk kami jauh lebih banyak dari kapasitas yang digunakan sehingga dapat mengakomodasi pertumbuhan trafik di masa mendatang. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan rata-rata penggunaan kurang dari 80% dari kapasitas untuk dapat mengakomodasi peningkatan penggunaan pada jam sibuk.

Setiap *international gateway* berhubungan dengan *international gateway* lainnya, sehingga setiap sambungan telepon mempunyai beberapa pilihan *routing* dan menyediakan sistem dengan kemampuan *back-up* apabila terjadi kerusakan perangkat atau kesibukan yang luar biasa pada salah satu *gateway*. Kami telah menempatkan perangkat interkoneksi di beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Telkom dan beberapa operator selular lainnya untuk menghubungkan jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami ke jaringan telekomunikasi domestik.

Transmisi suara dan data secara internasional antar *international gateway* terjadi melalui sirkit satelit atau kabel laut. Sirkit satelit tidak terpengaruh oleh jarak dan menyediakan jasa penyiaran yang membuatnya bersifat fleksibel sehubungan dengan tujuan sambungan telepon. Kabel laut, terutama kabel serat optik digital, dapat memberikan layanan berkualitas tinggi yang lebih murah. Akan tetapi, biaya kabel akan meningkat seiring dengan jauhnya jarak dan tujuannya harus tetap. Sirkit satelit dapat terpengaruh oleh kondisi atmosfir, sedangkan kabel laut dapat rusak akibat ulah manusia atau alam. Secara umum, kami menggunakan kabel laut dengan *cable-to-cable back-up* untuk sambungan jarak menengah di Asia dan *satellite links backup* untuk transmisi yang berjarak lebih jauh. Kami menggunakan *link microwave* dan serat optik untuk koneksi antara *gateway* dan stasiun bumi, dan untuk *gateway* Batam yang memiliki *microwave links* ke Singapura. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan 100% *redundancy* untuk semua sambungan jarak jauh internasional kami (yang mungkin membutuhkan *routing* melalui negara ketiga) dalam upaya memberikan layanan berkualitas tinggi kepada para pelanggan kami.

Kabel laut. Kami memiliki hak kepemilikan di dalam dan akses ke kapasitas kabel laut yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik, Afrika Utara dan Eropa, dan yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik dengan Amerika Utara. Tabel berikut ini memuat cakupan geografis, umur dan kapasitas yang dialokasikan dari jaringan kabel kami, per tanggal 31 Desember 2009:

Jaringan Kabel Bawah Laut	Cakupan Geografis	**Kapasitas** (dalam Mbps)
APCN	Australia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Philipina, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, Vietnam dan Thailand	1.328,19
APCN-2	China, Jepang, Malaysia, Philipina, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan	310,00
SEA-ME-WE 3	Australia, Austria, Belgia, Brunei, Kanada, China, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong, India, Iran, Italia, Jepang, Macau, Malaysia, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Oman, Pakistan, Portugal, Arab Saudi, Qatar, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turki, United Emirat Arab, Amerika Serikat dan Inggris	9.649,28
Jakabare	Singapura	2.296,19
China-US	China, Taiwan, Philipina, Korea Selatan dan Amerika Serikat	1.414,00
TPC-5	Jepang dan Amerika Serikat	118,00
Asia America Gateway	Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, Hong Kong, Philipina, dan Amerika Serikat	1.244,00
Jakabare	Jawa, Kalimantan, Batam (Indonesia)	6.376,32
Jakasusi	Jawa, Kalimantan, Sulawesi (Indonesia)	6.998,40
Jasutra	Jawa, Sumatera (Indonesia)	11.197,44
Jakarta - Surabaya	Jawa (Indonesia)	15.396,48
Total		56.328,30

Untuk mendukung pengoperasian *gateway* kami di Surabaya, kami telah mengoperasikan kabel laut serat optik yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya sejak bulan Januari 1997. *Link* ini meningkatkan keandalan jaringan dan kualitas layanan kami di wilayah Surabaya.

Sirkit Microwave Internasional. Kami mengoperasikan sistem transmisi *microwave* antara *gateway* Batam kami dan Singapura. Sistem ini memiliki kapasitas gabungan sebesar 300 Mbps untuk suara dan data, dan berfungsi sebagai stasiun relay untuk melakukan routing trafik ke wilayah yang tidak memiliki koneksi kabel serat optik.

Sirkit Satelit Internasional. Per tanggal 31 Desember 2009, *bandwidth* satelit kami yang tersedia adalah 3,84 Mbps untuk suara dan 0,64 Mbps untuk sirkit data melalui stasiun bumi di gerbang kami di Jakarta. Kapasitas satelit kami saat ini diperoleh terutama dari Intelsat dan, sebagian kecil, dari satelit Palapa D. Sejak tanggal 31 Desember 2002, kami telah memindahkan trafik dari transmisi satelit menjadi kabel laut oleh karena kualitasnya yang lebih baik, ketersediaan yang lebih banyak dan biaya yang lebih hemat dengan penggunaan kabel laut.

Jaringan akses tetap nirkabel kami saat ini beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 5MHz pada spektrum 800MHz. Tabel berikut ini memuat beberapa informasi tentang jaringan akses tetap nirkabel kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember,		
	2007	2008	2009
Base Transceiver Stations(1)	1.079	1.454	1.421
Base Station Controllers(1)	27	34	31
Mobile Switching Center(1)	9	9	8
Media Gateways(1)	17	17	25

(1) Sebelum kuartal pertama 2010, *base transceiver station*, pengendali stasiun base, pusat *mobile switching*, dan *gateway* media yang baru dibangun atau baru dibeli dan belum beroperasi dimasukkan dalam laporan Perusahaan. Dimulai sejak kuartal pertama 2010, sebagaimana diungkapkan di sini, Perusahaan berniat untuk memasukkan *base transceiver station*, pengendali stasiun base, pusat *mobile switching*, dan *gateway* media yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya ketika mereka telah beroperasi. Berdasarkan Perhitungan Awal, Perusahaan telah memiliki angka-angka berikut:

	Per tanggal 31 Desember,		
	2007	2008	2009
Base Transceiver Stations	1.079	1.454	1.505
Base Station Controllers	27	34	34
Mobile Switching Center	9	9	9
Media Gateways	17	17	17

FASILITAS KOMUNIKASI LAINNYA

Sistem komunikasi Satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami dan serat optik kami terhubung ke pusat perdagangan utama di wilayah Jakarta serta wilayah terpencil di Indonesia dan digunakan untuk menyediakan layanan MIDI Perusahaan dan untuk *backhaul* selular.

Sistem Komunikasi Satelit. Satelit komunikasi digunakan untuk berbagai hal bergantung pada fitur seperti jelajah, atau cakupan wilayah; kekuatan *transponder* (biasanya dinyatakan dalam dBW); dan *bandwidth transponder*. *Bandwidth transponder*, yang dinyatakan dalam megahertz, berbeda antara *C-band* dan *Ku-band transponder*. *C-band* digunakan di seluruh dunia sebagai standar komunikasi satelit untuk mengirim sinyal dengan gangguan atmosfir yang minim. *C-band* memberikan cakupan yang sangat luas meliputi sebagian besar benua Asia, yang membuatnya menjadi sangat populer untuk diaplikasikan seperti untuk penyiaran televisi. Sedangkan *Ku-band transponder* beroperasi dengan frekuensi berkisar 11-14 gigahertz. Meskipun frekuensi Ku-band lebih rentan terhadap gangguan kelembaban dan pengikisan oleh hujan daripada frekuensi *C-band*, *Ku-band* lebih cocok untuk aplikasi antena kecil. *Ku-band* umumnya digunakan untuk tujuan yang sama seperti halnya dengan *C-band*, dan juga untuk *satellite news gathering* (*truck-mounted antennas*) dan beberapa aplikasi VSAT. *Ku-band* terutama digunakan di wilayah yang banyak memakai sistem *ground-based microwave*.

Untuk mengkompensasi atas hilangnya kekuatan sinyal akibat gangguan kelembaban dan pengikisan oleh hujan, pemancar *Ku-band* umumnya mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan transponder *C-band* dan cakupan layanan yang lebih kecil.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, kami meluncurkan satelit baru, Palapa-D, untuk menggantikan Palapa-C2 pada orbital slot 113E, yand secara signifikan akan meningkatkan kapasitas transponder kami dan memberikan cakupan satelit yang lebih luas. Setelah transfer trafik yang berhasil dilakukan dari Palapa-C2 ke Palapa-D pada awal bulan November 2009, Palapa-C2 dipindahkan ke orbital slot 150.5E dan akan beroperasi pada *inclined orbit* hingga kira-kira tahun 2014 untuk melakukan *cellular backhaul* kami. Ketika satelit Palapa-D kami beroperasi, kami secara signifikan meningkatkan kapasitas transponder kami, yang memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan transponder satelit kami sendiri, sebagai tambahan dari kebutuhan pelanggan yang menyewa kapasitas transponder dari kami. Oleh sebab itu, kira-kira 60% dari kapasitas standar *C-band transponder* Palapa-D kami saat ini dipakai untuk disewakan kepada pihak ketiga sementara 40% sisanya dipakai untuk kebutuhan kami. Kami berharap untuk mengalihkan sumber dari kebutuhan satelit kami dari Palapa-D ke Palapa-C2, sehingga menghasilkan kira-kira 40% dari kapasitas transponder C-band standar Palapa-D, sebagai tambahan bagi 11 *extended C-Band transponder* untuk Palapa-D yang baru ditambahkan, yang tersedia untuk penyewaan kepada pihak ketiga.

Satelit Palapa-D memiliki sebelas *extended C-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz, serta 24 standar *C-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz dan lima *Ku-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz yang sepenuhnya dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum dari masing-masing *C-band* dan *Ku-band transponder* adalah 43 dan 53 dBW. Satelit Palapa-D menyediakan cakupan *C-band* ke hampir seluruh wilayah Asia yang membentang dari Arabian Peninsula sampai Jepang dan dari Cina sampai Selandia Baru, termasuk Australia bagian tengah dan timur. Tingkat dBW-nya berkisar dari *beam edge* sebesar 32 dBW sampai dengan *beam center* sebesar 43 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-D mampu memberikan layanan *uplink* dan *downlink* dari manapun dalam cakupan layanan satelit. Lima *Ku-band transponder* mencakup wilayah Indonesia dan beberapa negara ASEAN dengan kekuatan *transponder* tertinggi sebesar 53 dBW.

Satelit Palapa-C2 memiliki enam *extended C-band transponder* 36-megahertz milik Pasifik Satelit Nusantara, dan dua puluh empat transponder C-band standar 36-megahertz serta empat Ku-band transponder 72-megahertz yang dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum pada setiap transponder C-band adalah 40 dBW. Karena lokasi baru Palapa-C2 dekat dengan satelit lain dengan rencana frekuensi Ku-band yang sama, kami, konsisten dengan peraturan dari International Telecommunication Union dan izin kami, tidak mengoperasikan transponder Ku-band untuk menghindari benturan berbahaya dari satelit lain. Satelit Palapa-C2 menyediakan cakupan C-band secara substansial di seluruh Asia, dengan jarak yang membentang dari Asia Tengah ke Jepang dan dari Cina bagian selatan ke Selandia Baru, termasuk beberapa bagian Australia. Tingkat dBW berkisar dari tepi 32 dBW ke pusat 40 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-C2 memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa *uplink* dan *downlink* dari lokasi manapun dalam jarak bentangan satelit.

Fiber Optic and Microwave Terrestrial Links. Backbone serat optik kami yang baru yang berbasis DWDM telah menghubungkan semua kota di propinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. *Backbone* serat optik menyediakan 40-60 *gigabits* per detik untuk lalu lintas selular di dalam maupun antar kota-kota dan juga menyediakan *physical layer* untuk peningkatan *broadband* internet kami secara progresif saat ini melalui 3.5 HSDPA dan akses *wireless broadband* tetap. Oleh karena pertimbangan kapasitas dan teknologi, sistem *terestria microwave* yang lama telah dipindahkan untuk mencakup *remote spur route areas*. Per tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki *fiber optic* dan *microwave terrestrial link* ke lebih dari 25 kota besar. Jaringan ini pada prinsipnya digunakan untuk layanan jasa Internet dan MIDI kepada pelanggan perusahaan.

Pada bulan Februari 2008, kami telah menandatangani kontrak dengan NEC, Jepang untuk pembuatan sistem kabel bawah laut, JAKABARE, yang baru yang diharapkan dapat menghubungkan Jawa, Kalimantan, Batam dan Singapura dan menyediakan kapasitas *bandwidth* yang

tinggi untuk antar pulau dan kebutuhan *bandwidth* internasional dari/ke Indonesia untuk layanan selular dan MIDI. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk kapasitas *bandwidth* internasional dari/ke Singapura, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan sistem kabel internasional kami. Sistem ini akan sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan dan dirancang untuk dapat beroperasi selama 25 tahun. Sistem ini akan dilengkapi dengan kapasitas 160 *gigabits* per detik dengan kapasitas optimalnya yaitu 1,2 terrabits per detik. Pembangunan sistem kabel ini adalah proyek jangka panjang dan telah diluncurkan pada tanggal 17 November 2009. Sistem ini diperkirakan dapat mengakomodasi kebutuhan *bandwidth* kami sampai dengan tahun 2012. Sampai dengan akhir 2010, kami berencana untuk membelanjakan sekitar US$1,2 juta untuk pengeluaran barang modal yang akan digunakan untuk pembangunan gedung, *backhaul* dan infrastruktur pendukung lainnya dari sistem kabel ini.

IP/MPLS Backbone dan *Metro Ethernet Network*. Per tanggal 31 Desember 2009, kami telah menyelesaikan proyek pemasangan jaringan Metro Ethernet di lebih dari 157 *point of presence* di Indonesia. Melalui jaringan ini, kami menyediakan leased line virtual yang menawarkan akses *point-to-point Ethernet*, jasa virtual private LAN yang menawarkan akses multipoint-to-multipoint Ethernet dan jaringan *virtual private routed* yang menawarkan IP VPN dan Internet yang terhubung secara lokal. Kami juga memakai Jaringan Metro Ethernet kami untuk melakukan *backhauling* terhadap trafik selular 2G dan 3G kami. *Dual redundant boxes IP-MPLS Core* di 10 kota telah ditempatkan dan dihubungkan melalui *backbone* serat optik. Jaringan Metro Ethernet juga telah ditempatkan di 9 kota besar untuk memberikan akses *broadband* bagi pasar korporasi di gedung-gedung pencakar langit dan backhaul selular untuk layanan 3.5 HSDPA. Layanan yang digunakan oleh para pelanggan kami, di antaranya adalah akses Internet, jasa penyiaran dan sambungan pusat data.

Karena teknologi saat ini bergerak ke arah "all IP" dan permintaan layanan berbasis IP meningkat akibat keuntungan atas jaringan lama, kami berniat untuk menempatkan jaringan di masa yang akan datang sehingga layanan-layanan berbasis IP tersedia secara luas di wilayah tersebut. Pada tahun 2008, kami merampungkan pembangunan *Disaster Recovery Center* ("DRC"), di Jatiluhur untuk pelanggan perusahaan agar mereka memeiliki pusat *back-up* data untuk mengamankan dan melindungi informasi bisnis mereka.

STRUKTUR ORGANISASI

Bagan berikut ini merupakan ringkas Perusahaan per 31 Desember 2009, termasuk kepemilikan langsung dan tidak langsung pada anak perusahaan penting kami dan yurisdiksi pendirian masing-masing anak perusahaan tersebut. Daftar lengkap mengenai anak-anak perusahaan kami dan investasi-investasi kami di perusahaan-perusahaan afiliasi yang bersifat signifikan, dan kepemilikan persentase saham kami di dalam masing-masing perusahaan, pada tanggal 31 Desember 2009 dimuat dalam Catatan 1d dari laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini.

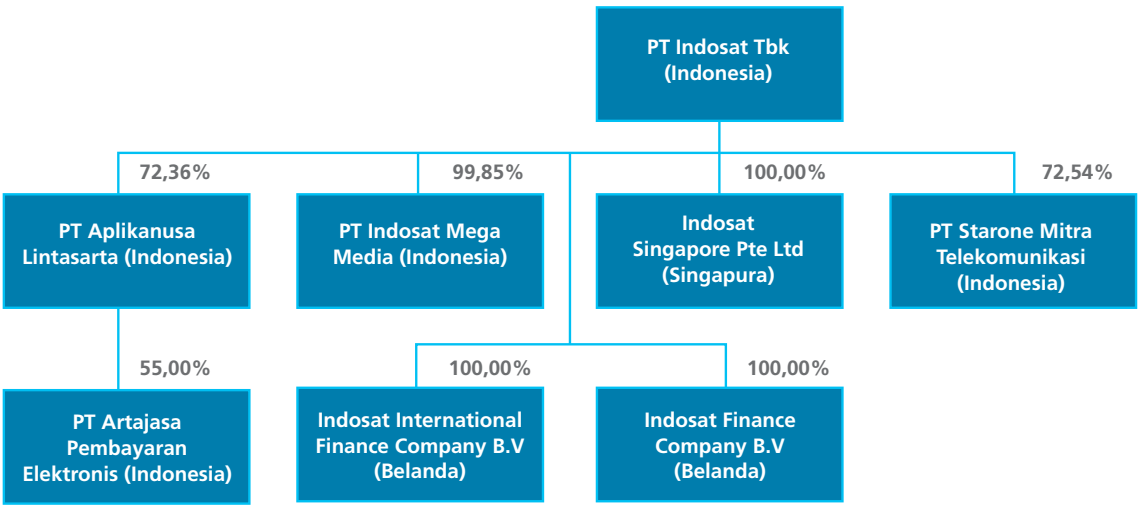

LAPORAN -
INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

Lintasarta didirikan pada tahun 1988. Berdasarkan anggaran dasarnya, Lintasarta bergerak dalam usaha penyediaan layanan telekomunikasi sistem data dan teknologi informasi, serta aplikasi jaringan, yang mencakup penyediaan infrastruktur fisik dan aplikasi perangkat lunak dan layanan konsultasi pada sistem komunikasi dan informasi data untuk perbankan, keuangan dan industri lainnya.

PT Indosat Mega Media ("IM2"), didirikan pada tahun 1996 untuk bergerak dalam usaha penyediaan layanan Internet dan televisi.

PT Starone Mitra Telekomunikasi ("SMT"), didirikan pada tahun 2006 untuk menyediakan layanan telekomunikasi dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi, termasuk multimedia.

PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("Artajasa"), didirikan pada tahun 2000 untuk menyediakan layanan perdagangan umum dan aplikasi untuk industri, terutama industri perbankan, konsultasi teknologi informasi dan jasa telekomunikasi.

ASURANSI

Per tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan telah mengasuransikan tanah/bangunan dan perangkat (kecuali kabel laut dan hak atas tanah), termasuk asuransi terhadap risiko gangguan bisnis. Selama tahun 2009, kami tidak memiliki asuransi terhadap risiko kerugian yang terkait dengan barang yang diasuransikan. Secara umum, kami tidak mengalami kesulitan dalam memperpanjang polis asuransi dan kami yakin asuransi kami adalah wajar dan sesuai dengan standar industri.

Kami memiliki asuransi *in-orbit* di satelit Palapa-C2 dan Palapa-D dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan praktik industri. Pada tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki cakupan polis asuransi dengan total pertanggungan sebesar US$216,3 juta, untuk kerugian total dan sebagian dari satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami.

Sehubungan dengan Satelit Palapa-D baru kami, kami telah mengasuransikan satelit tersebut dengan total pertanggungan sebesar US$206,1 juta untuk kerugian total dan sebagian.

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perusahaan telah mendaftarkan merek dagang dan hak cipta untuk nama, logo dan beberapa jasa dari Perusahaan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Kami yakin bahwa merek dagang kami adalah penting untuk keberhasilan kami. Kami tidak pernah melakukan pembelaan terhadap salah satu dari merek dagang kami, akan tetapi kami akan melakukannya secara sungguh-sungguh, bilamana diperlukan.

ASET TETAP

Kecuali hak milik yang diberikan kepada perorangan di Indonesia, hak atas tanah dimiliki oleh Negara Indonesia berdasarkan Hukum Agraria No. 5/1960. Penggunaan tanah dapat dilakukan dengan hak atas tanah dimana pemegang hak atas tanah dapat menggunakan tanah sepenuhnya untuk jangka waktu yang ditentukan, yang mana dapat diperbaharui dan diperpanjang. Dalam banyak hal, hak atas tanah bebas diperjualbelikan dan dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman.

Aktiva tetap kami yang terpenting berada di Jakarta (sekitar 12.045 m^2 digunakan sebagai *international gateway* dan kantor pusat), Ancol (sekitar 11.889 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut dan digunakan sebagai pusat *switching*), Tanjung Pakis, Karawang (sekitar 1.850 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Daan Mogot (sekitar 130.000 m^2 digunakan sebagai kompleks stasiun bumi), Medan (sekitar 6.780 m^2 digunakan sebagai *international gateway*), Jatiluhur (sekitar 135.850 m^2 digunakan sebagai kompleks stasiun bumi), Pantai Cermin (sekitar 68.228 m^2 digunakan sebagai stasiun bumi dan stasiun kabel laut), Batam (sekitar 2.000 m^2 digunakan sebagai *international gateway* dan stasiun bumi), Tanjung Bemban (sekitar 3.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Surabaya (sekitar 11.246 m^2 digunakan sebagai kantor regional) dan Banyu Urip-Gresik (sekitar 141.905 m^2 digunakan sebagai stasiun bumi dan *international gateway* dan stasiun kabel laut), Takisung – Banjarmasin (sekitar 1.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Aeng Batu-batu-Makasar (sekitar 2.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut) dan Sei Kakap Pontianak (sekitar 5.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut). Kecuali untuk Aset tetap kami di Daan Mogot, yang kami sewa dari

Telkom, kami memegang hak atas tanah atas sebagian besar Aset tetap kami untuk jangka waktu awal berkisar antara 20 sampai dengan 30 tahun. Kami perkirakan hak atas tanah kami akan diperbaharui dengan biaya nominal di kemudian hari. Tidak ada satupun dari aktiva tetap kami yang dibebankan dengan hak tanggungan atau dibebankan dengan cara lain.

ALAMAT KANTOR-KANTOR UTAMA

Kantor Pusat:	Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 3001, 3869 999 Fax: (62-21) 3000 3754, 3000 3757
Kantor Regional Jabotabek & Banten	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 7001 Fax: (62-21) 3000 5702
Kantor Regional Sumatera Utara	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39 Medan 20236, Indonesia Tel: (62-61) 4567 001 Fax: (62-61) 4537 372
Kantor Regional Sumatera Selatan	Jl. Angkatan 45 No. 222 Palembang 30137, Indonesia Tel: (62-711) 605 9999 Fax: (62-711) 9966, 605 9977
Kantor Regional Jawa Tengah & DI Yogyakarta	Jl. Pandanaran No. 131 Semarang 50134, Indonesia Tel: (62-24) 8447 186/3300 2000 Fax: (62-24) 8447 187/3300 1001
Kantor Regional Jawa Barat	Jl. Asia Afrika No. 141-147 Bandung 40111, Indonesia Tel: (62-22) 3000 0900 Fax: (62-22) 4200 001
Kantor Regional Jawa Timur & Bali Nusra	Jl. Kayoon No. 72 Surabaya 60271, Indonesia Tel: (62-31) 5455 001 Fax: (62-31) 5322 982, 5464 414
Kantor Wilayah Sulampapua	Jl. Slamet Riyadi No. 4 Makassar 90111, Indonesia Tel: (62-411) 326 808 Fax: (62-411) 326 828
Kantor Regional Kalimantan	Jl. MT Haryono No. 69 Balikpapan 76114, Indonesia Tel: (62-542) 741 001, 3030 001 Fax: (62-542) 7514 001, 7206 750

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Latar Belakang

Sejak tahun 1961, jasa telekomunikasi di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi merupakan hal yang penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara umum. Selain itu, banyaknya penduduk dan meningkatnya perekonomian Indonesia telah menyebabkan meningkatnya permintaan atas jasa telekomunikasi.

Pada tahun 2008, Indonesia memiliki penduduk sekitar 227,35 juta orang, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia berdasarkan perkiraan International Telecommunications Union. *Gross Domestic Product* atau GDP Indonesia telah meningkat secara signifikan dari US$208,3 miliar di tahun 2003 menjadi US$514,4 miliar di tahun 2008 dalam mata uang Dolar AS saat ini menurut data Bank Dunia, yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 6,1%. Tingkat pertumbuhan ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan GDP sekitar 2,6% dan sekitar 4,5% yang dialami oleh Thailand dan Malaysia dalam periode yang sama. Menurut Bank Dunia, GDP per kapita pada tingkat daya beli juga telah meningkat dari US$2.823 di tahun 2003 menjadi US$3.975 di tahun 2008.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan untuk mengatur dan memiliki kendali pengawasan yang besar atas sektor telekomunikasi. Meskipun Pemerintah secara historis telah mempertahankan praktek monopoli di sektor jasa telekomunikasi di Indonesia, reformasi hukum baru-baru ini yang sebagian besar sudah berlaku sejak tanggal 8 September 2000 telah berupaya untuk membuat kerangka hukum yang mendukung persaingan usaha dan mempercepat investasi infrastruktur pada fasilitas-fasilitas telekomunikasi.

Di Indonesia, sebagian besar jasa telepon tetap diselenggarakan oleh Telkom, yaitu badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, yang memiliki dan menyelenggarakan PSTN dan titik akses telepon tetap nirkabel. Sebelum pelaksanaan peraturan interkoneksi yang baru, operator telekomunikasi terinterkoneksi dengan jaringan Telkom guna mengakses semua pengguna telepon tetap dan selular. Monopoli telepon tetap lokal Telkom berakhir pada tanggal 1 Agustus 2002, dan kami sejak saat itu mulai membangun jaringan tetap tersendiri. Menurut peraturan interkoneksi yang baru, para operator telekomunikasi dapat mengadakan perjanjian bilateral yang memungkinkan mereka untuk melakukan interkoneksi secara langsung dengan operator telekomunikasi lainnya.

Meskipun laju penetrasi selular relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, berdasarkan estimasi International Telecommunications Union, laju penetrasi selular Indonesia telah meningkat dari sekitar 21,4% di tahun 2005 menjadi sekitar 61,8% di tahun 2008, dengan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 44,17%. Profil pertumbuhan GDP dan laju penetrasi yang relatif rendah menunjukkan adanya potensi peningkatan pelanggan selular di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2008, jumlah telepon tetap, termasuk akses telepon tetap nirkabel, adalah sekitar 30,4 juta, yang mencerminkan penetrasi telepon tetap sebanyak 13,36%, yaitu salah satu yang terendah di wilayah Asia dan sebagai akibatnya hal ini mengakibatkan pertumbuhan telepon tetap yang stagnan berdasarkan sistem peraturan yang lama. Tabel di bawah ini merupakan rangkuman beberapa informasi mengenai laju penetrasi selular dan telepon tetap di Indonesia dan wilayah Asia pada tahun 2008:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008			
	Penduduk[1]	Penetrasi Telepon Tetap[1]	Penetrasi Selular[1][2]	GDP per kapita[3]
	(Juta)			(US$)
Hong Kong	6,98	58,9%	163%	43.922
Singapura	4,62	40,2%	138%	49.288
Korea Selatan	48,15	44,3%	94,7%	27.939
Malaysia	27,01	15,9%	100,4%	14.215
Thailand	67,39	10,4%	92%	7.703

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008			
	Penduduk[1]	Penetrasi Telepon Tetap[1]	Penetrasi Selular[1][2]	GDP per kapita[3]
	(Juta)			(US$)
Philipina	90,35	4,3%	75,4%	3.510
China	1.337,41	27,3 %	47,4%	5.962
India	1.181,41	3,2%	29,4%	2.972
Indonesia	227,35	13,4%	61,8%	3.975

(1) *Sumber*: International Telecommunications Union World Telecommunication / ICT Indicators Database & World Bank estimates, ICT Statistics 2008.
(2) Penetrasi selular adalah persentase jumlah pelanggan selular dan populasi penduduk.
(3) *Sumber*: World Bank 2008.

Pasar Jasa Selular

Industri telekomunikasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhanyangsignifikandisektorjasatelekomunikasi selular beberapa tahun terakhir ini. International Telecommunications Union memperkirakan jumlah keseluruhan pelanggan selular di Indonesia meningkat dari sekitar 47,0 juta per tanggal 31 Desember 2005 menjadi sekitar 141,0 juta per tanggal 31 Desember 2008, yang merupakan peningkatan laju penetrasi selular dari sekitar 21,4% menjadi sekitar 61,8%. Terlepas dari tingkat pertumbuhan yang cepat ini, laju penetrasi selular sebesar 61,8% per tanggal 31 Desember 2008 relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia.

Tabel berikut ini memuat informasi berkenaan dengan industri telekomunikasi di Indonesia untuk periode yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember,				
	2005	2006	2007	2008	Tingkat pertumbuhan keseluruhan dari tahun 2005 – 2008
	(dalam juta, kecuali persentase)				
Penduduk Indonesia[1]	219	222	225	227	1,22%
Pelanggan Selular[1]	47	64	93	141	44,17%
Penetrasi Selular[2]	21,4%	28,7%	41,6%	61,8%	42,43%

(1) *Sumber*: International Telecommunications Union World Telecommunication / ICT Indicators Database ICT Statistics 2008, tidak termasuk jasa nirkabel telepon tetap.
(2) Penetrasi selular merupakan jumlah pelanggan selular yang dinyatakan dalam persentase penduduk Indonesia.

Pasar nirkabel di Indonesia saat ini telah didominasi oleh tiga operator GSM terbesar: Telkomsel, kami dan XL. Sejak tahun 2002, Pemerintah telah mengeluarkan ijin penyelenggaraan jasa selular yang baru dengan menggunakan teknologi CDMA kepada Mobile-8 dan ijin penyelenggaraan jasa akses telepon tetap nirkabel dengan menggunakan teknologi CDMA kepada Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Per 31 Desember 2009, berdasarkan perkiraan kami, para operator GSM berskala nasional ini secara bersama-sama telah menguasai sekitar 80% dari pangsa pasar nirkabel Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2009, Telkomsel merupakan penyelenggara jasa selular nasional terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggannya berkisar 81,6 juta dan menguasai lebih dari sekitar 50,0% dari pangsa pasar GSM. Kami adalah penyelenggara jasa selular terbesar kedua dengan jumlah pelanggan berkisar 33,1 juta dan menguasai sekitar 23,0% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. XL, penyelenggara terbesar ketiga, memiliki sekitar 31,4 juta pelanggan dan menguasai

sekitar 21,0% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. Sedangkan jasa akses telepon tetap nirkabel didominasi oleh Telkom dengan merek Flexi dengan jumlah pelanggannya sekitar 15,1 juta, berdasarkan laporan triwulanan Telkom pada Desember 31, 2009. Penyelenggara terbesar kedua adalah Bakrie Telecom dengan merek Esia dengan jumlah pelanggan sebesar 10,6 juta pelanggan, berdasarkan laporan manajemen tahunan tahun 2009. Kami merupakan penyelenggara terbesar ke-tiga dengan jumlah pelanggan sebanyak 594.133 dengan merek StarOne. Terdapat juga beberapa pemain lainnya dengan skala lebih kecil dalam pasar nirkabel Indonesia seperti HCPT, NTS, Mobile-8, Smart Telecom dan STI.

Pertumbuhan jumlah pelanggan nirkabel di Indonesia sebagian dipacu oleh sistem "*calling party pays*", peluncuran jasa pra-bayar, serta diperkenalkannya layanan SMS. Sistem "*calling party pays*" mengharuskan pihak asal sambungan telepon membayar tarif telepon. Berdasarkan pengalaman di lingkungan internasional, negara-negara yang menjalankan sistem "*calling party pays*" umumnya mengalami laju penetrasi telepon nirkabel yang lebih tinggi karena para pelanggan telepon nirkabel lebih besar kemungkinannya untuk memberikan nomor teleponnya dan tetap membiarkan telepon genggamnya dalam keadaan hidup.

Sejak peluncurannya di tahun 1998, layanan pra-bayar telah populer di Indonesia, sebagaimana yang terjadi juga di negara-negara lainnya di Asia karena layanan pra-bayar ini memungkinkan para pelanggannya untuk berlangganan telepon nirkabel tanpa perlu melewati prosedur pemeriksaaan atas sejarah kredit mereka. Layanan pra-bayar juga memberikan lebih banyak kontrol pada para pelanggan atas pengeluaran bulanan mereka. SMS telah terbukti populer di Indonesia, terutama pada layanan pra-bayar karena memberikan alternatif lain yang nyaman dan hemat biaya daripada komunikasi suara dan e-mail. Persaingan di industri layanan nirkabel Indonesia terutama terjadi dalam hal kualitas layanan, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur nilai tambah seperti voice mail dan SMS.

Pasar Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional

Penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional di Indonesia memperoleh pendapatan dari trafik jarak jauh internasional baik ke dalam maupun ke luar negeri. Tiga penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional adalah Telkom yang memberikan layanan "007", Bakrie Telecom dengan kode akses "009" dan kami dengan kode akses "001" dan "008". Tarif ke luar negeri ditetapkan oleh Menkominfo, sedangkan tarif ke dalam negeri dihitung berdasarkan *accounting rate* yang berlaku. Trafik ke luar negeri berasal dari pelanggan telepon tetap dan selular dan dikirimkan ke tiga penyelenggara layanan internasional secara langsung melalui *international gateway* atau secara tidak langsung melalui PSTN Telkom. Trafik sambungan internasional ke dalam negeri diterima di *international gateway* dan diarahkan ke tujuan yang dimaksud dari *international gateway* atau melalui jaringan PSTN Telkom yang pada akhirnya dialihkan ke tujuan yang dimaksud.

Di Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara yang pasarnya yang mulai berkembang, trafik komunikasi ke dalam negeri melebihi trafik komunikasi ke luar negeri dimana banyak negara-negara maju memperoleh penghasilan dari trafik sambungan jarak jauh internasional yang tidak berimbang.

Secara historis, trafik antar-operator diselesaikan berdasarkan konsep *accounting rate* yaitu metode kompensasi penyelenggara asal dan akhir. Umumnya, penyelenggara sambungan jarak jauh internasional melakukan negosiasi *accounting rate* per menit atas dasar *route-by-route* dengan menggunakan satu tarif yang dipakai oleh semua penyelenggara di *route* tersebut. Pada tahun 2003, kami mulai mengganti sistem *accounting rate* dengan sistem berbasis tarif terminasi pasar dengan beberapa pihak penyelenggara telekomunikasi asing, dimana kami menyetujui tarif asimetris untuk sambungan ke dalam maupun ke luar negeri. Berdasarkan sistem berbasis tarif terminasi pasar, kami dapat mengurangi tarif yang kami harus bayar

untuk sambungan ke banyak tujuan internasional dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif sambungan dari tujuan tersebut ke Indonesia. Meskipun sistem tarif ini mengurangi tarif yang kami terima untuk sambungan ke dalam negeri, kami yakin bahwa secara keseluruhan hal ini dapat meningkatkan marjin kami untuk jasa sambungan jarak jauh internasional, terutama sambungan ke luar negeri.

Persaingan antar para penyelenggara VoIP yang menawarkan layanan seperti telepon hemat, yaitu "01017" yang ditawarkan Telkom dan "FlatCall 01016" yang ditawarkan oleh kami, dan kartu telepon pra-bayar telah mulai dan diperkirakan akan berdampak negatif pada pendapatan yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional yang telah ada.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur komunikasi data di Indonesia, permintaan atas layanan VoIP meningkat. VoIP menggunakan koneksi komunikasi data untuk memindahkan trafik suara ke Internet, yang biasanya menghemat banyak biaya bagi para pelanggan.

Meskipun Pemerintah telah memberlakukan sistem perijinan untuk membatasi jumlah operator VoIP di Indonesia, Pemerintah saat ini tidak lagi mengendalikan tarif yang dikenakan kepada para pengguna akhir dari layanan VoIP. Akan tetapi, Pemerintah telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk mengatur tarif tersebut di kemudian hari, dan diperkirakan peraturan tersebut akan membatasi tarif VoIP menjadi setara dengan tarif diskon maksimum pada kisaran 40,0% dari tarif PSTN yang berlaku saat ini.

Pasar Komunikasi Data

Secara historis, layanan data di Indonesia terutama terdiri dari layanan *narrow bandwidth leased line*, layanan x.25, layanan jaringan data digital dan layanan jaringan digital terpadu. Layanan jaringan data digital merupakan layanan *digital leased line* untuk transmisi data. Layanan jaringan digital terpadu merupakan protokol yang memberikan akses *dial-in* berkapasitas tinggi untuk jaringan publik. Jenis protokol ini dapat menangani trafik suara dan data dalam bentuk digital secara bersamaan pada sambungan digital yang sama melalui *integrated switches* melewati jaringan publik. Layanan x.25 merupakan protokol *open standard packet switching* yang dapat membuat terminal berkecepatan rendah sampai menengah memperoleh akses *dial-in* atau permanen ke jaringan dari tempat pengguna dan beroperasi pada jaringan. Tarif untuk layanan-layanan ini menurun pada beberapa tahun terakhir ini.

Meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya aplikasi multimedia diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas layanan data *broadband* yang canggih. Para operator di Indonesia tengah mempergunakan jaringan *broadband* tingkat lanjut agar dapat memberikan jasa *high-end* data, seperti jasa *frame relay*, *asynchronous transfer mode* dan *Internet protocol*. Secara khusus, layanan virtual *private network*, yang menggunakan ATM dan teknologi *Internet protocol*, dapat mengambil bagian yang lebih besar dari pangsa pasar karena layanan ini memberikan alternatif lain yang dapat diandalkan dan hemat biaya bagi jaringan privat yang bergantung pada *dedicated leased lines*.

Pasar Jasa Layanan Satelit

Beberapa tahun terakhir ini, persaingan yang semakin ketat terjadi di pasar satelit Asia-Pasifik. Perusahaan-perusahaan di bisnis ini bersaing terutama dalam hal kemampuan cakupan, penawaran produk dan harga. Pada tanggal 6 September 2005, melalui KM 13/2005 Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua operator telekomunikasi yang menggunakan satelit dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk memiliki ijin penyelenggaraan stasiun bumi dan stasiun luar angkasa. Ijin-ijin ini hanya diberikan kepada operator telekomunikasi yang memiliki *landing right* dan dengan ketentuan bahwa spektrum frekuensi yang digunakannya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap para operator yang ada. Satelit asing diperkenankan untuk beroperasi di Indonesia apabila operator telekomunikasi Indonesia memiliki hak penyelenggaraan yang bersifat timbal balik di negara asal satelit tersebut.

Trend Industri

Kami meyakini bahwa trend industri telekomunikasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Jasa Nirkabel

- Pertumbuhan yang terus berlanjut di sektor telekomunikasi nirkabel. Kami memperkirakan industri telekomunikasi nirkabel dan permintaan atas layanan telekomunikasi nirkabel akan terus tumbuh seiring dengan semakin berkembang dan semakin modernnya Indonesia.
- Migrasi trafik suara dan data ke nirkabel. Kami mengantisipasi bahwa layanan nirkabel akan semakin populer oleh karena meluasnya daerah cakupan dan meningkatnya kualitas jaringan nirkabel, menurunnya tarif telepon genggam dan semakin banyaknya layanan pra-bayar.
- Pertumbuhan yang signifikan pada tingkat penetrasi nirkabel di wilayah luar Jawa. Tingkat penetrasi nirkabel yang relatif rendah di luar Jawa memberikan potensi besar untuk para penyelenggara layanan nirkabel di Indonesia karena penduduk yang tinggal di luar Jawa semakin makmur.
- Pertumbuhan penggunaan jasa nilai tambah. Pertumbuhan tingkat penggunaan jasa nilai tambah, seperti SMS, *content* dan akses internet diharapkan meningkat di tahun-tahun mendatang, oleh karenanya akan membantu menstabilkan penurunan tingkat penggunaan dan ARPU untuk layanan suara.
- Meningkatnya persaingan dengan masuknya para operator nirkabel yang baru ke dalam pasar.

Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional

- Meningkatnya persaingan di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Kami memperkirakan akan terjadi deregulasi Pemerintah dan peningkatan kualitas layanan VoIP untuk meningkatkan persaingan dengan jasa sambungan jarak jauh internasional.
- Pertumbuhan jumlah sambungan telepon yang cukup. Kami yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan akan mendorong peningkatan jumlah layanan sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pertumbuhan layanan VoIP juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas jasa sambungan jarak jauh internasional.

Jasa MIDI

- Meningkatnya permintaan atas layanan komunikasi data tingkat lanjut. Kami yakin bahwa meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya pasar untuk aplikasi multimedia dapat meningkatkan permintaan atas layanan komunikasi data yang canggih.
- Semakin ketatnya persaingan di pasar ISP. Sebagai dampak dari liberalisasi pasar dan terus diterbitkannya ijin-ijin baru, kami mengantisipasi bahwa persaingan di pasar ISP akan meningkat. Kami yakin persaingan akan terjadi terutama dalam hal harga, kualitas layanan dan cakupan jaringan.
- Meningkatnya permintaan atas layanan *broadband*. Kami yakin akan terjadi peningkatan preferensi dan permintaan pelanggan atas akses Internet berkecepatan tinggi yang mana akan mendorong pertumbuhan layanan *broadband* dalam negeri.

PERATURAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menkominfo, memiliki kewenangan dan memegang kendali regulasi dan melaksanakan kebijakan yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Kerangka hukum industri telekomunikasi didasarkan pada beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri dan direktorat jenderal yang diberlakukan dan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Sebelum bulan Maret 1998, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah instansi yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Setelah pemilihan umum tahun 1999 dan pergantian Pemerintahan di tahun 2001, Departemen Perhubungan mengambil alih tanggung jawab pengaturan industri telekomunikasi. Pada bulan Februari 2005, kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi dialihkan dari Departemen Perhubungan ke Departemen Komunikasi dan Informatika.

Melalui Menkominfo, Pemerintah mengatur penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Selain itu, Menkoninfo mengatur alokasi spektrum frekuensi radio untuk semua operator telekomunikasi, yang diwajibkan untuk memperoleh ijin dari DJPT, untuk setiap layanan yang menggunakan spektrum frekuensi. Selain tarif spektrum frekuensi radio, Pemerintah mewajibkan semua operator telekomunikasi untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) sebesar 0,5% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan penyisihan untuk piutang macet, untuk setiap tahun buku, yang harus dibayar dengan cicilan setiap triwulanan.

Kebijakan reformasi telekomunikasi Pemerintah diformulasi dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi" tanggal 17 September 1999. Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah untuk:

- meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi;
- meliberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur persaingan melalui penghapusan praktek monopoli;
- meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kerangka peraturan;
- menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan mitra asing; dan
- menciptakan peluang bisnis untuk usaha berskala kecil dan menengah dan memfasilitasi peluang kerja yang baru.

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia baru-baru ini didasarkan pada Undang-Undang Telekomunikasi.

Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2000 dan mengatur pedoman penting untuk reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, kemudahan bagi para pemain baru dan mendorong persaingan. Pemerintah menetapkan pedoman melalui peraturan pemerintah, keputusan atau peraturan menteri dan keputusan-keputusan dari instansi pemerintah. Undang-Undang Telekomunikasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan, untuk membuat kebijakan dan untuk mengatur, mengawasi dan melakukan kontrol atas industri telekomunikasi. Sampai pada tahun 2005, Menteri Perhubungan adalah badan pembuat peraturan untuk industri telekomunikasi, yang memiliki wewenang atas sektor telekomunikasi di Indonesia dan dapat mengeluarkan peraturan melalui keputusan menteri, membuat kebijakan dan menerbitkan izin serta membuat formulasi tarif.

Peraturan Pemerintah No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi") dan Peraturan Pemerintah No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit diberlakukan sebagai peraturan-peraturan pelaksana pertama dari Undang-Undang Telekomunikasi. Departemen Perhubungan juga mengeluarkan berbagai keputusan, yaitu: (i) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/2001, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010, tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Peraturan Jaringan Telekomunikasi"), (ii) Peraturan Menteri Perhubungan No. 21/2001, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008, tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ("Peraturan Jasa Telekomunikasi"), dan (iii) Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 yang selanjutnya dibatalkan dengan Keputusan Menkominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/2008 dan selanjutnya diubah dengan Keputusan Menkominfo No. 31/PER/M.KONINFO/8/2009 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi").

Pada tanggal 11 Juli 2003, Menteri Perhubungan mengeluarkan Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi, berdasarkan mana Menteri Perhubungan mendelegasikan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi di Indonesia kepada BRTI, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk

membuat kebijakan untuk industri telekomunikasi. BRTI pertama kali dibentuk pada bulan Januari 2004, yang terdiri dari tujuh anggota, termasuk jabatan ketua yang dipegang oleh DJPT, dari DJPT, dan Komite Regulasi dan Informatika. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi diangkat oleh Menkominfo. Seluruh anggota Komite Regulasi Telekomunikasi: (i) harus berwarga negara Indonesia; (ii) memiliki keahlian profesional di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, ekonomi, hukum atau ilmu sosial; (iii) tidak memiliki kepentingan apapun di salah satu operator telekomunikasi; dan (iv) tidak diangkat sebagai direktur atau komisaris di salah satu operator telekomunikasi.

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 67 tahun 2003 mengatur hubungan antara Menteri Perhubungan (dan selanjutnya Menkominfo) dan BRTI. Dalam menjalankan fungsi pengaturan, BRTI diberikan kewenangan untuk: (i) melakukan pemberian ijin untuk jaringan dan jasa telekomunikasi sesuai dengan kebijakan Menkominfo dan (ii) mengusulkan kepada Menkominfo standar pelaksanaan operasional, jasa, biaya interkoneksi dan peralatan untuk jaringan dan jasa telekomunikasi. BRTI diberikan kewenangan untuk mengawasi dan diminta untuk melaporkan kepada Menkominfo atas: (i) pelaksanaan standar operasional, (ii) persaingan antara operator jaringan dan jasa, dan (iii) pemenuhan standar penggunaan peralatan telekomunikasi. Dalam menjalankan fungsi pengendalian, BRTI juga diminta untuk melaporkan kepada Menkominfo atas: (i) perkembangan penyelesaian sengketa diantara operator jaringan dan jasa, (ii) mengawasi penggunaan peralatan telekomunikasi, dan (iii) pelaksanaan standar kualitas jasa.

Penggolongan Penyelenggara Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi menggolongkan penyelenggara telekomunikasi menjadi: (i) penyelenggara jaringan telekomunikasi, (ii) penyelenggara jasa telekomunikasi, dan (iii) penyelenggara telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan Telekomunikasi lebih lanjut digolongkan ke dalam: (i) penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap dan (ii) penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak selular. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, untuk setiap kategori penyelenggara telekomunikasi diperlukan ijin. Penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan ijin untuk memiliki dan/atau menyelenggarakan jaringan telekomunikasi. Sebaliknya, pemilik ijin penylenggara jasa telekomunikasi diberikan izin untuk menyelenggarakan jasa, tetapi tidak diharuskan untuk memiliki jaringan sendiri. Ijin telekomunikasi khusus diperlukan untuk para penyelenggara jasa telekomunikasi privat atau untuk keperluan yang berkaitan dengan penyiaran dan keperluan keamanan nasional. Peraturan Jaringan Telekomunikasi mengatur bahwa ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dikeluarkan oleh Menkominfo. Peraturan Jasa Telekomunikasi membedakan ijin penyelenggaraan jasa telepon dasar yang dikeluarkan oleh Menkominfo dan ijin penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon dan multimedia yang dikeluarkan oleh DJPT.

Pengakhiran Hak Eksklusifitas

Pada tahun 1995, Telkom diberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon tetap lokal sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dan layanan SLJJ sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Sementara Indosat dan Satelindo (yang selanjutnya bergabung dengan Indosat) diberikan hak duopoli untuk secara eksklusif menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon dasar internasional sampai dengan tahun 2004.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Telekomunikasi dan Keputusan Menkominfo No. 21 (2001), Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Telkom dan hak duopoli yang sebelumnya diberikan kepada Indosat dan Satelindo. Pemerintah mengadopsi kebijakan duopoli agar kami dan Telkom bersaing sebagai penyelenggara jasa dan jaringan terpadu.

Pasar untuk penyediaan layanan SLI telah dibebaskan pada bulan Agustus 2003 dengan diakhirinya hak eksklusif Indosat dan Satelindo. Kami mulai

menyediakan jasa telepon tetap sejak tahun 2002 dan jasa telepon nirkabel serta SLJJ pada tahun 2003, setelah menerima izin SLJJ kami. Telkom telah menerima izin layanan SLI dan mulai menawarkan layanan SLI dengan kode akses internasional "007" pada tahun 2004 yang bersaing langsung dengan kami.

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan sambungan SLJJ. Pada tanggal 1 April 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan bahwa Menkominfo akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada tanggal 3 Desember 2007, Menkominfo mengundangkan Keputusan Menteri No. 43/P/M.KOMINFO/12/2007, yang mengundurkan tanggal pelaksanaan kode akses SLJJ menjadi tanggal 3 April 2008 dan juga menetapkan jadwal pelaksanaan akses sambungan jarak jauh "01X". Pada bulan Januari 2007, Pemerintah telah menetapkan peraturan baru mengenai interkoneksi dan sistem akses kode lima angka untuk jasa VoIP. Pada April 2008, kode akses tersebut telah digunakan di Balikpapan. Penduduk Balikpapan dapat memilih menggunakan "0", "01016" atau "01017" pada saat mereka melakukan telepon jarak jauhnya. Apakah kode akses SLJJ akan dilaksanakan di kota-kota lain akan tergantung pada studi yang dilakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atas pelanggan jasa telepon tetap Indosat dan Telkom.

Tarif Jasa Jaringan Tetap dan Selular

Menkominfo bertanggung jawab untuk mengatur dan menyesuaikan formula tarif. Pada tahun 2006, Menkominfo mengeluarkan keputusan-keputusan kementerian seperti: (i) No. 8/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang interkoneksi berbasis biaya, (ii) No. 2/PER/M.KOMINFO/1/2006, (iii) No. 4/PER/M.KOMINFO/1/2006, No. 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2006 tentang Ketentuan Jasa 3G, (iii) No. 5/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Warung Telekomunikasi, (iv) No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006 sebagaimana diubah dengan No. 12/PER/M.KOMNFO/4/2008 tentang Tarif Telekomunikasi Telepon Tetap, (v) No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Penyadapan Sah, (vi) No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 yang digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tarif Selular, dan (vii) No. 102/Kep/M.KOMINFO/10/2006 tentang 2G dan 3G Ijin Jaringan Selular sebagaimana diubah dengan keputusan Mekominfo No. 181/2006 tentang Migrasi Jaringan FWA menuju Frekuensi Alokasi 800MHz. Pada tahun 2007, Menkominfo mengeluarkan keputusan-keputusan Menteri, termasuk No. 162/2007 tentang alokasi aliran frekuensi radio 800 MHz untuk pengoperasian FWA-CDMA dan selular (perubahan keputusan Menteri No. 181/2006), Peraturan Menkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang petunjuk pelaksanaan tarif pada kontribusi USO, No. 3/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang sewa jaringan, No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 (sekarang No. 38/2007) yang mengatur pelaksanaan pengembangan infrastruktur menggunakan dana USO dan Peraturan Menkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/12/2007 tentang penggantian keempat FTPs (Rencana Teknis Dasar/Fundamental Technical Plans) – 2000 yang mengganti tanggal pelaksanaan dari kode akses jarak jauh di Balikpapan menjadi tanggal 3 April 2008. Pada bulan April 2008, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri No. 9/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang penentuan tarif untuk jasa selular, yang menentukan tarif untuk tipe dan struktur retail selular berdasarkan formula dan Peraturan Menteri No. 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 yang mengatur mengenai tarif baru layanan selular termasuk layanan teleponi dasar melalui jaringan tetap. Jenis tarif tersebut terdiri dari jasa layanan telepon dasar, layanan roaming dan multimedia struktur tarif terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan layanan tambah nilai. Tarif tertinggi untuk layanan selular retail tiap operator

akan berbeda sebagai akibat dari perbedaan metode perhitungan antar operator. Berdasarkan peraturan baru tersebut, tarif untuk jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap dan SMS sebagai fasilitas tambahan harus diperhitungkan oleh operator dengan menggunakan formula berbasis biaya dengan hasil penghitungan yang dinyatakan sebagai batas maksimum tarif. Pemerintah diharapkan untuk mengubah tarif formula untuk telekomunikasi tetap di kemudian hari. Pemerintah mengatur formula tarif untuk sewa jaringan berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007.

Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Telekomunikasi, masing-masing penyelenggara harus memenuhi tingkat pelayanan tertentu. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas kerugian kepada penyelenggara telekomunikasi.

Peraturan Menkominfo tentang standar penyediaan layanan dapat ditemukan di: (i) Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Tetap Lokal, (ii) Peraturan Menkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Bergerak Selular, dan (iii) Peraturan Menkominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Tetap dengan mobilitas terbatas.

Telepon Umum

Berdasarkan izin telekomunikasi tetap untuk jasa teleponi dasar yang kami miliki, kami mempunyai kewajiban untuk menyediakan telepon umum sejumlah 3,0% dari total kapasitas jaringan yang dipasang untuk jaringan telekomunikasi tetap yang telah kami bangun.

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations)

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, semua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal ("USO"), yang mengharuskan semua penyelenggara untuk ikut serta dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai wilayah USO oleh Menkominfo. USO dimaksudkan untuk menyediakan akses telekomunikasi dan/atau jasa di area-area yang sebelumnya belum ada akses atau jaringan.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 28/2005 dan Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/9/2005, Pemerintah mengumumkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembayaran USO dan mengubah tarif USO dari Rp750 untuk setiap telepon internasional keluar atau masuk menjadi 0,75% dari jumlah pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi yang telah dibayar kepada penyelenggara telekomunikasi dan piutang tidak lancar. Perdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7/2009, Pemerintah meningkatkan tarif USO dari 0,75% menjadi 1,25%.

Pada bulan Maret 2004, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No. 34/Tahun 2004 yang memuat spesifikasi pelaksanaan program dan zona USO, persyaratan teknis, pengoperasian, pendanaan dan monitor ("KM 34/2004"). KM 34/2004 digantikan dengan Peraturan Menteri No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri No. 38/PER/M.KOMINFO/09/2007 yang mengatur prosedur penggunaan dana USO untuk keperluan pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi di wilayah dimana tidak ada jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2008 (sebagaimana diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/02/2010) yang menggantikan Peraturan Menteri No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007. Berdasarkan peraturan ini, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memenangkan tender untuk menyediakan jasa telekomunikasi di daerah yang belum ada jaringan telekomunikasi ("Daerah USO") akan menggunakan dana yang dikumpulkan dari tarif USO untuk menyediakan akses dan layanan telekomunikasi, termasuk layanan teleponi, SMS, dan akses internet. Dalam menyediakan layanan telekomunikasi di Daerah

USO, penyelenggara telekomunikasi memiliki hak untuk: (i) menggunakan teknologi, (ii) menandatangani perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, dan (iii) menggunakan frekuensi spektrum 2.390 – 2400 MHz.

Pengaturan Interkoneksi

Sesuai dengan larangan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan para penyelenggara jaringan untuk memperbolehkan para pengguna dari satu jaringan mengakses para pengguna atau layanan pada jaringan lainnya dengan membayar tarif yang disepakati oleh setiap penyelenggara jaringan. Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur bahwa tarif interkoneksi antara dua atau lebih penyelenggara jaringan harus bersifat transparan, disepakati bersama dan adil.

Pada tanggal 8 Februari 2006, melalui Peraturan Mekominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/02/2006, Pemerintah mengeluarkan peraturan interkoneksi yang baru yang merupakan peraturan interkoneksi berbasis biaya untuk menggantikan peraturan interkoneksi berbasis bagi hasil yang berlaku sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan baru, Pemerintah menetapkan suatu rumusan guna menghitung biaya interkoneksi dari setiap penyelenggara. Hasil perhitungan akan dievaluasi oleh Pemerintah dan digunakan oleh Pemerintah sebagai rujukan.

Penyelenggara harus memasukkan hasil penghitungan dari formula Pemerintah ke dalam usulan DPI, bersama dengan usulan-usulan untuk skenario panggilan, penyaluran trafik, titik interkoneksi, tata cara permohonan dan pemberian interkoneksi, dan lain-lain. DPI juga harus mengungkapkan jenis jasa interkoneksi dan tarif yang dikenakan untuk tiap jasa yang ditawarkan. Penyedia akses interkoneksi harus memberlakukan sistem antri atas dasar *First-In–First-Serve*. Selain itu, mekanisme interkoneksi juga harus transparan dan tanpa diskriminasi.

Para penyelenggara telekomunikasi SLI yang dominan seperti Perusahaan dan para penyelenggara non-dominan mengajukan DPI pada bulan September 2006. DPI dari penyelenggara dominan disetujui oleh Pemerintah pada bulan Oktober 2006 dan pelaksanaan peraturan baru dimulai pada bulan Januari 2007 melalui perjanjian bilateral antar para penyelenggara. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, DPI akan diubah setiap tahun. Pada tanggal 11 April 2008, Pemerintah menyetujui DPI dari penyelenggara dominan untuk mengganti DPI sebelumnya.

Rencana Teknis Dasar Nasional Pemerintah mengatur persyaratan teknis seperti rencana routing, penomoran, dan aspek teknis untuk interkoneksi antar jaringan-jaringan dari berbagai penyelenggara telekomunikasi, yang dapat membuat semua penyelenggara jaringan berinterkoneksi secara langsung tanpa harus melalui PSTN.

Peraturan mengenai Biaya

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan sejalan dengan peraturan-peraturan lainnya, setiap penyelenggara telekomunikasi diwajibkan membayar kepada Pemerintah biaya hak penggunaan (BHP), biaya frekuensi dan biaya orbit satelit, sebagaimana yang berlaku. BHP untuk masing-masing penyelenggara telekomunikasi adalah sekitar 0,5% dari pendapatan kotor, yang meliputi hal-hal seperti pendapatan dari sewa jaringan, tarif interkoneksi, biaya aktivasi pelanggan baru, tarif penggunaan, tarif roaming dan kartu SIM. Sebagai tambahan, Pemerintah juga mewajibkan seluruh penyelenggara telekomunikasi untuk membayar tarif USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan hutang macet setiap tahunnya, yang dibayarkan secara triwulanan. Tarif frekuensi untuk jaringan GSM 900, DCS 1800 dan FWA dihitung berdasarkan suatu rumus yang pada intinya didasarkan pada jumlah pengendali BTS yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Untuk layanan 3G, penyelenggara harus membayar tarif frekuensi berdasarkan *bandwidth allocated frequency*. Selain itu, para pengguna harus melakukan pembayaran satu kali di muka untuk biaya koneksi orbit satelit ketika satelit dioperasikan.

Pendaftaran Pengguna Selular Pra-bayar

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah mulai mewajibkan para penyelenggara telekomunikasi untuk mengadakan pendaftaran para pengguna selular pra-bayar. Peraturan ini menyatakan bahwa proses pendaftaran tersebut wajib diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 28 April 2006, dimana kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2006. Kami telah merancang prosedur agar kewajiban pendaftaran dapat dilakukan pada titik awal penjualan dan kami telah menyelesaikan kewajiban pendaftaran pengguna selular pra-bayar pada bulan September 2006, dengan membatalkan rekening sekitar 1,3 juta pelanggan yang tidak mendaftar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No 23/PER/M.KOMINFO/10/2005, semua penyelenggara akan terus mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan setiap pelanggan baru selular prabayar mereka.

Peraturan tentang Satelit

Industri satelit internasional merupakan industri yang diatur secara ketat. Selain perijinan dan peraturan di dalam negeri, penempatan dan pengoperasian satelit kami harus didaftarkan pada Biro Komunikasi Radio. Setelah diadakannya Konferensi Radiokomunikasi Dunia/ World Radiocommunication Conference (WRC) yang diadakan pada tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 16 November 2007, beberapa karakteristik satelit Indonesia yang berada pada slot 113E dan 150,5E telah dinyatakan kembali pada International Telecommunication Union. Untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit 150,5E, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan Peraturan No. 79/DIRJEN/2009 pada tanggal 12 Maret 2009, mengenai pembentukan kelompok kerja yang terdiri atas DJPT, Telkom dan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 16 Maret 2009, Menkominfo telah mengeluarkan Surat No. 110/M. KOMINFO/03/2009 mengenai persetujuan untuk kerjasama dengan Perusahaan dan Telkom untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit tersebut secara cepat.

Frekuensi Fixed Wireless Access-CDMA

Melalui Peraturan Menkominfo No. 181/2006, Pemerintah melakukan realokasi frekuensi 800MHz kepada penyelenggaran FWA sebagai bagian dari ijin frekuensi untuk layanan 3G (IMT-2000) kepada Bakrie Telecom, Telkom, Mobile-8 dan Perusahaan. Perusahaan sebelumnya telah diberikan ijin 5MHz pada frekuensi *uplink* dan *downlink* di frekuensi berikut: *uplink* frekuensi 1.880-1.885MHz dan *downlink* 1.960-1.965MHz di Jakarta, Banten dan Jawa Barat dan frekuensi *uplink* dan *downlink* di frekuensi 830-835MHz dan *downlink* 875-880MHz untuk wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Berdasarkan peraturan baru di atas, Perusahaan diberikan ijin untuk frekuensi 2x1.23MHz (*uplink* 842.055-843.285MHz dan *downlink* 887.055-888.285MHz) di Jakarta, Banten dan Jawa Barat (*uplink* 843.285-844.515MHz dan *downlink* 888.285-889.515). Migrasi frekuensi telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2007.

Kewajiban Tower Bersama

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Peraturan Menara"). Berdasarkan Peraturan Menara, pembangunan menara telekomunikasi memerlukan ijin dari institusi pemerintah terkait, sementara pemerintah daerah menentukan penempatan dan lokasi dimana menara telekomunikasi dapat dibangun. Selain itu, penyedia telekomunikasi yang memiliki menara telekomunikasi dan pemilik menara diwajibkan untuk mengijinkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasi mereka (selain dari menara yang digunakan untuk jaringan utama), tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menkominfo serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengeluarkan Peraturan Bersama No. 19/PER/M.

KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama") yang mewajibkan adanya ijin pendirian menara untuk setiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi yang harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Namun demikian, melalui pembuatan Peraturan Bersama ini, Peraturan Menara tetap berlaku sepanjang ketentuan yang didalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bersama.

Selain dari Peraturan Bersama dan Peraturan Menara, beberapa pemerintah daerah telah membuat peraturan-peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mewajibkan operator untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama.

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan landasan bagi operasional kami. Kami terus berupaya untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku sekaligus meningkatkan etika dan perilaku yang bertanggung-jawab.

MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Indosat terus melanjutkan peningkatan dan pengembangan rekam jejaknya sepanjang 2009 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pada hakekatnya, kami telah memenuhi kewajiban hukum sebagai perusahaan publik yang terdaftar di dua bursa yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek New York (2009), dengan mematuhi sepenuhnya peraturan pasar modal yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, oleh BEI dan Bursa Efek New York, dan oleh United States Securities and Exchange Commission (US-SEC). Bahkan, kami telah berhasil memenuhi ketentuan Pasal 404 Sarbanes Oxley Act (SOX) selama empat tahun berturut-turut, seperti yang dikuatkan oleh laporan auditor independen yang tercantum dalam Laporan Tahunan Format 20-F tahun 2009 yang dilaporkan ke US-SEC. SOX Act mewajibkan pelaporan keuangan yang akurat dan keterbukaan informasi material secara menyeluruh oleh Perusahaan. Secara umum, kami juga terus berusaha untuk menegakkan perilaku etis dan bertanggung jawab, seperti yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip praktik Tata Kelola Perusahaan yang Terbaik.

Kode Etik

Indosat pada tahun 2004 menerbitkan buku pedoman Kode Etik yang senantiasa diperbaharui secara berkala. Pedoman ini merupakan acuan bagi seluruh karyawan dan manajemen termasuk para anggota Direksi. Kode Etik menguraikan rincian prinsip-prinsip perilaku bertanggungjawab yang menjadi acuan kepatuhan seluruh karyawan.

Berdasarkan Kode Etik, setiap kegiatan usaha harus dijalankan dengan penuh integritas dan sesuai dengan

ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Kode Etik secara ketat melarang tindakan yang mengandung unsur benturan kepentingan, perilaku melanggar hukum dan tidak etis, transaksi orang dalam dan tindakan-tindakan lain yang merugikan Perusahaan dan para pemegang saham.

Semua karyawan diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka telah membaca dan memahami Kode Etik tersebut. Seluruh anggota Direksi dan karyawan Indosat diharapkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan kebijakan yang tercantum dalam Kode Etik. Setiap Direktur atau karyawan yang melanggar Kode Etik akan dikenakan tindakan berupa sanksi disiplin, sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Rincian Uraian Kode Etik Perusahaan dapat diakses di: http://www.indosat.com/Investor/Investor_Relations/Corporate_Governance

1. TRANSPARANSI

Penyajian Prosedur dan Pengendalian

Indosat memiliki kebijakan "Penyajian Prosedur dan Pengendalian" untuk menjamin bahwa seluruh informasi material telah dikomunikasikan dengan baik oleh Perusahaan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang diungkapkan oleh Perusahaan bersifat akurat, serta disusun, diproses dan dilaporkan secara tepat waktu. Prosedur Pengawasan dan Keterbukaan Informasi secara berkala dikaji dan diperbaharui oleh Komite Keterbukaan Informasi sesuai dengan kebutuhannya.

Komite Keterbukaan Informasi bertanggung jawab kepada Direksi. Anggotanya termasuk Group Head Corporate Secretary dan para Group Head yang bertanggung jawab dalam bidang Akuntansi, Controlling, Treasury, Internal Audit, Pengendalian Internal, Legal, dan Manajemen Risiko.

KERANGKA KERJA TATA KELOLA PERUSAHAAN

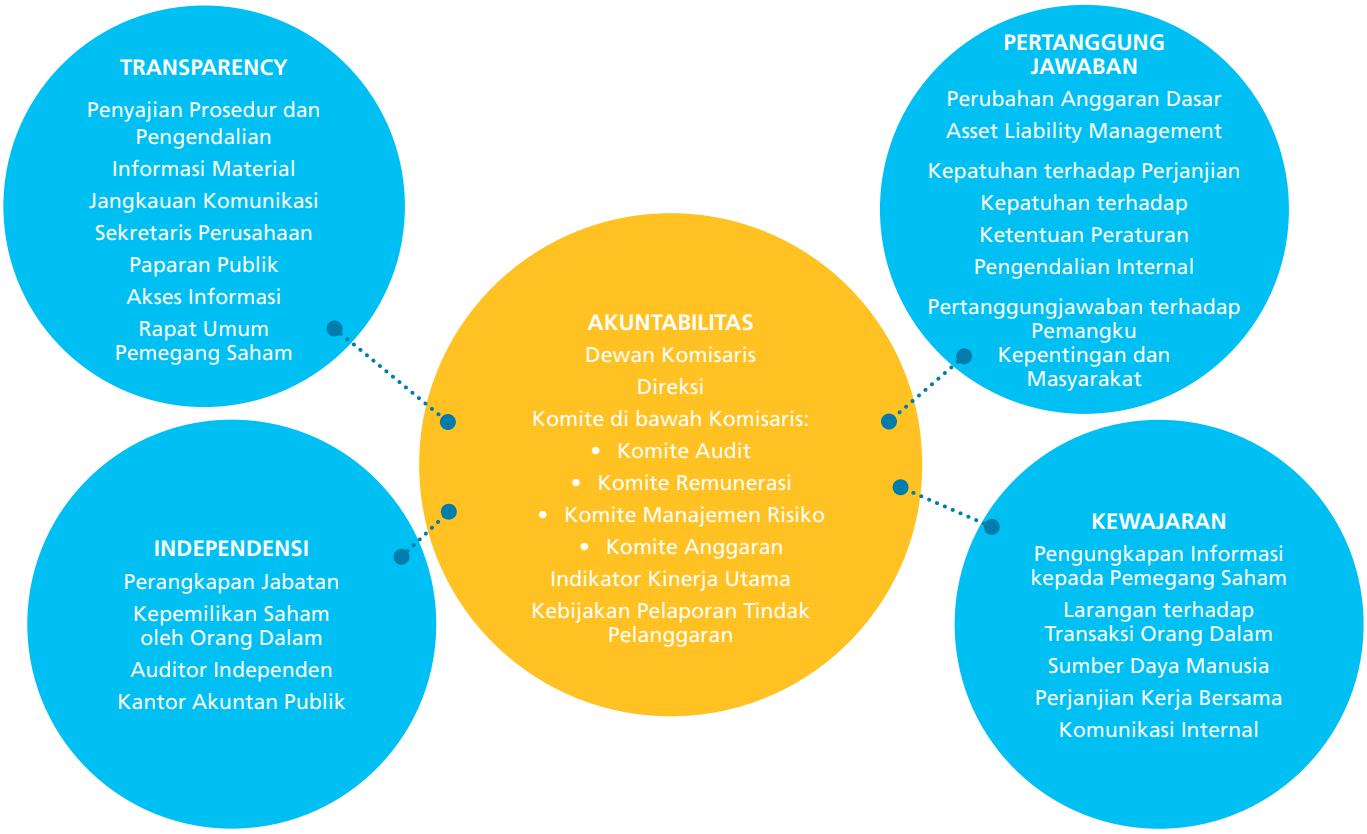

LAPORAN -
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Di tahun 2009, Komite Keterbukaan Informasi telah melaksanakan 4 rapat dan 32 diskusi secara elektronik.

No.	Rapat
1.	Laporan Tahunan 2008 dalam Format 20-F
2.	Laporan Keuangan Konsolidasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2009, tidak diaudit, 23 Oktober 2009
3.	Umpan-balik dari kuesioner KKI
4.	Pengendalian dan Prosedur KKI dengan Penasihat Hukum
No.	**Diskusi Secara Elektronik**
1.	Schedule 14D-9
2.	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2008
3.	Info Memo Tahunan Tahun 2008
4.	Pembahasan ATSI
5.	Pengumuman Consent Solicitation
6.	Ikhtisar Penting Triwulan Pertama 2009
7.	Laporan Keuangan Triwulan Pertama 2009
8.	Pengumuman Hasil Triwulan Pertama 2009
9.	Info Memo Triwulan Pertama 2009
10.	Surat Tanggapan kepada US-SEC
11.	Pengumuman Fasilitas EKN
12.	Pengumuman Hasil Semester Pertama 2009
13.	Info Memo Semester Pertama 2009
14.	Pengumuman Peringkat untuk Obligasi Rupiah dari Pefindo
15.	Pengumuman Hasil Book Building dari Obligasi Rupiah yang baru
16.	Laporan Keuangan Semester Pertama 2009
17.	Pengumuman Peringkat untuk Obligasi Rupiah dari Pefindo
18.	Pengumuman Peringkat oleh Moody
19.	Informasi tentang Bencana Gempa Bumi Padang
20.	Draft Laporan Keuangan
21.	Penerbitan kembali laporan Juni 2009 untuk 3,5 tahun
22.	Ikhtisar Utama untuk periode 9 bulan yang berakhir tanggal 30 September 2009
23.	Laporan Keungan Konsolidasi periode 9 bulan yang berakhir tanggal 30 September 2008 dan 2009
24.	Pengumuman: Indosat menyampaikan hasil kinerja keuangan yang tidak diaudit untuk periode 9 bulan yang berakhir tanggal 30 September 2009
25.	Info Memo: hasil untuk periode 9 bulan yang berakhir tanggal 30 September
26.	Pengumuman material: Lisensi Telepon Tetap
27.	Prospektus Awal terkait Obligasi Rupiah VII 2009
28.	Prospektus Obligasi Indosat VII tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV tahun 2009
29.	Paparan Publik: Presentasi Investor untuk Obligasi Indosat VII 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV 2009
30.	Siaran Pers: Obligasi Indosat VII 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV 2009
31.	Pengumuman Material: Nota Efektif dari Bapepam
32.	Siaran Pers: Pernyataan efektif terhadap Obligasi Indosat VII 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV 2009

INFORMASI MATERIAL

Sepanjang tahun 2009, Perusahaan telah menerbitkan informasi material sebanyak 41 item , yang meliputi 3 laporan tahunan, 4 laporan keuangan, 19 siaran pers, 9 pengumuman, dan 6 informasi lainnya. Uraian secara terinci tercantum dalam tabel berikut ini:

No	Informasi Material	Tanggal diumumkan
Laporan Tahunan 2008		
1.	Laporan Tahunan 2008	15 April
2.	Laporan Keberlanjutan 2008	16 April
3.	Laporan Tahunan 2008	15 Mei
Laporan Keuangan		
1.	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006, 2007, 2008	26 Februari
2.	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi beserta Laporan Review Akuntan Independen untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2009	20 Mei
3.	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009, berikut angka perbandingan tahun 2008	27 Agustus
4.	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan 2008 (tidak diaudit)	28 Oktober
Siaran Pers		
1.	Schedule 14D-9 sebagai Tanggapan atas Penawaran Tender oleh Qtel atas saham-saham Indosat Tertentu	21 Januari
2.	Indosat berencana untuk meminta persetujuan dari para pemegang obligasi dan sukuk Rupiah; Perubahan Dukungan Kreditur	18 Maret
3.	Moody's, S&P dan Pefindo menetapkan kembali peringkat Indosat	23 Maret
4.	Indosat mendapatkan persetujuan untuk mengubah batasan pinjaman atau ekuitas	25 Maret
5.	Indosat menyampaikan Pedoman Perusahaan tahun Fiskal 2009	30 Maret
6.	PT Indosat Tbk. Ikhtisar Penting Triwulan Pertama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009	21 April
7.	Laporan Tahunan Indosat tahun 2008 dan Laporan Tahunan Indosat tahun 2008 dalam format 20-F telah tersedia di situs Perusahaan	15 Mei
8.	Laporan Keuangan konsolidasi beserta Laporan Review Akuntan Independen untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan 2009	20 Mei
9.	RUPS Indosat Setujui Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	11 Juni
10.	Investor Memo Triwulan Pertama Tahun 2009	19 Juni
11.	Ikhtisar Penting semester I untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2009	18 Agustus
12.	Indosat menandatangani perjanjian fasilitas EKN senilai US$ 315 juta	19 Agustus
13.	Indosat menyerahkan Laporan Keuangan semester I tahun 2009 yang diaudit dan Investor Memo Hasil Kinerja periode 6 bulan tahun 2009	27 Agustus
14.	Moody's menaikkan peringkat Obligasi senior valuta asing yang tidak dijamin yang diterbitkan oleh Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance B.V. menjadi Ba1	17 September
15.	Pefindo menegaskan kembali peringkat Indosat AA+	17 September
16.	Indosat menyerahkan Laporan Keuangan untuk periode sembilan bulan tahun 2009 yang tidak diaudit dan Memo Investor Hasil Kinerja periode sembilan bulan tahun 2009	29 Oktober
17.	Indosat merencanakan penerbitan Obligasi Indosat VII tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap dan sukuk Ijarah Indosat IV tahun 2009	11 November
18.	Indosat menerima surat dari Bapepam untuk penawaran obligasi lokal senilai Rp1,5 triliun	2 Desember
19.	Obligasi Indosat VII Tahun 2009 dan Sukuk IV Tahun 2009 telah dicatat di Bursa Efek Indonesia	10 Desember

LAPORAN -
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

No	Informasi Material	Tanggal diumumkan
Pengumuman		
1.	Pengumuman bahwa Indosat telah menyampaikan Schedule 14D-9 kepada US-SEC	21 Januari 2009
2.	Pengumuman rencana RUPST dan RUPSLB Indosat	4 Mei
3.	Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB Indosat	13 Mei
4.	Panggilan RUPST dan RUPSLB Indosat tanggal 11 Juni 2009	27 Mei
5.	Pengumuman hasil RUPST dan RUPSLB Indosat 2009	15 Juni
6.	Pengumuman neraca konsolidasi Laporan Perubahan Ekuitas konsolidasi dan Laporan L/R konsolidasi PT Indosat dan anak perusahaan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009, berikut angka perbandingan tahun 2008	31 Agustus
7.	Pemberitahuan hasil Pemeringkat atas Efek bersifat utang PT Indosat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia	15 September
8.	Pengumuman pemeringkatan obligasi dan sukuk indosat	16 September
9.	Pengumuman prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum obligasi Indosat VII tahun 2009 dan sukuk ijarah Indosat IV tahun 2009	9 November
Lain-lain		
1.	Terjemahan Pernyataan Usulan/Rekomendasi dalam bentuk Schedule 14D-9	21 Januari
2.	Penyampaian Dokumen Tambahan Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan dengan Kalimat yang tidak lengkap.	27 Februari
3.	Penyampaian bukti iklan pemeringkat obligasi dan sukuk Indosat periode tahun 2009	23 Maret
4.	Laporan data hutang atau kewajiban perusahaan dalam valuta asing	7 April
5.	Jadwal pembagian dividen tunai final	17 Juni
6.	Laporan Bulanan registrasi pemegang efek	17 Juli

Aktivitas Komunikasi

Indosat secara aktif menyebar-luaskan informasi pada tahun 2009 melalui berbagai media guna menjangkau para pemangku kepentingan kami. Untuk memastikan bahwa para investor, pemangku kepentingan, dan publik senantiasa memperoleh informasi yang memadai tentang kinerja dan kegiatan Perusahaan, maka informasi disebar-luaskan melalui berbagai saluran, termasuk situs kami www.indosat.com, lembar fakta, buletin investor triwulanan, siaran perusahaan, surat-menyurat, telepon langsung, pertemuan interaktif, dan konferensi pers.

Group Hubungan Investor kami, yang bertanggungjawab kepada Director and Chief Financial Officer secara proaktif senantiasa menjalin komunikasi dengan komunitas finansial, untuk mempertahankan reputasi kami dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi. Setelah menyerahkan laporan keuangan kuartalan rutin ke Bapepam-LK dan US-SEC, kami menyelenggarakan telepon konferensi (conference call) dengan para analis, investor, dan pihak lain untuk membahas kinerja Perusahaan dan industri pada umumnya, yang diikuti dengan sesi tanya-jawab yang intensif. Pembicaraan telepon ini selanjutnya direkam dan disajikan dalam situs Perusahaan, sehingga mudah diakses oleh para pemegang saham dan investor yang tidak berkesempatan hadir.

Pada tahun 2009, kami menyelenggarakan konferensi via telepon setiap triwulan, 8 roadshow non-deal, dan 4 konferensi komunitas finansial di Singapura, Hong Kong, Barcelona, London, dan Praha. Kami pun menyambut baik semua pertanyaan, baik yang disampaikan melalui telepon dan surat elektronik, maupun kunjungan dan telepon dari para investor dan analis. Kami juga memantau dan menyampaikan peringkat kredit dan korporasi kami kepada para investor dan publik secara berkala dengan mempublikasikannya lewat suratkabar dan situs kami. Silakan merujuk ke Bab Modal Saham

dalam Laporan Tahunan ini untuk mengetahui peringkat kami per 31 Desember 2009.

Kami senantiasa berupaya mengumpulkan umpan-balik dan kritik yang bersifat membangun. Upaya nyata yang kami lakukan dalam mewujudkan tujuan transparansi kami meliputi peningkatan Laporan Tahunan ini dan komunikasi secara berkesinambungan dengan semua unit kerja di Indosat, guna memastikan semua materi informasi dapat disalurkan ke pihak-pihak yang relevan.

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN

Paparan Publik Tahunan Indosat telah dilaksanakan pada 10 November 2009 sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan BEI No. 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi di Ballroom IC, Lantai 4 The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, bersamaan dengan pelaksanaan Investor Summit tahun 2009. Pelaksanaan Paparan Publik Tahunan tersebut telah berjalan dengan baik serta dihadiri oleh 273 peserta yang mencakup masyarakat umum serta perwakilan dari perusahaan sekuritas.

CORPORATE SECRETARY

Indosat bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan secara transparan dan tepat waktu kepada publik, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan badan pengawas, serta prosedur keterbukaan informasi yang telah kami tetapkan.

Group Head Corporate Secretary, yang sejak Juli 2009 bertanggungjawab kepada Chief Legal and Compliance Officer, di bawah fungsi kordinasi President Director and CEO, memainkan peran utama dalam menyampaikan informasi material demi kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga transparansi Perusahaan.

Sejak Maret 2004, Group Head Corporate Secretary dijabat oleh Strasfiatri Auliana.

Strasfiatri Auliana memulai kariernya di Indosat pada tahun 1987. Insinyur Teknik Elektro lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini dipercaya menjabat Group Head Corporate Secretary Indosat sejak tahun 2004. Dalam rentang perjalanan kariernya selama lebih dari 20 tahun, beliau dipercaya memegang beberapa posisi penting, di antaranya Senior Vice President Corporate Communications Indosat antara tahun 2002-2004. Pada periode yang sama, beliau juga ditugaskan menjadi staf ahli Ketua di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Akses Informasi

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan, dipersilakan menghubungi:

Group Corporate Communications
PT Indosat Tbk
Telp : 62-21-3869614
Fax : 62-21-30003754
E-mail : publicrelations@indosat.com

Group Investor Relations
PT Indosat Tbk
Telp : 62-21-3869 615
Fax : 62-21 300 3757
E-mail : investor@indosat.com

atau kunjungi situs kami di www.indosat.com

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2009, Indosat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor pusat Indosat di Jakarta tanggal 11 Juni 2009. Rapat ini dicatat dan hasilnya disebarkan di dalam dan di luar Perusahaan.

Pengumuman	Undangan	RUPS / RUPSLB Waktu Penyelenggaraan
12 Mei 2009 di dua suratkabar berbahasa Indonesia 13 Mei 2009 di satu suratkabar berbahasa Inggris	27 Mei 2009 melalui dua surat kabar harian berbahasa Indonesia serta satu suratkabar harian berbahasa Inggris	11 Juni 2009

LAPORAN -
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

AGENDA RUPS TAHUNAN

Agenda Pertama

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sekaligus pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 selama tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Agenda Kedua

Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk dana cadangan, dividen dan lain-lain, serta persetujuan atas jumlah, waktu dan tata cara pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Agenda Ketiga

Persetujuan penetapan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2009.

Agenda Keempat

Persetujuan penunjukan Auditor Independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Agenda Kelima

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan.

AGENDA RUPS LUAR BIASA

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

2. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas merupakan landasan dari kerangka kerja yang menjadi acuan Perusahaan. Norma tersebut bermakna penting bagi penerapan kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik. Lebih lanjut, akuntabilitas merupakan kunci dari kinerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan, karena di dalamnya terdapat sejumlah tolok-ukur yang jelas guna mengukur kemajuan kami.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI)

Sebagai bagian dari perubahan organisasi yang mendasar pada tahun 2009, Indosat meninjau sistem manajemen kinerja dengan memperbarui Indikator Kinerja Utama (KPI) SBU dan unit-unit organisasi, agar selaras dengan tujuan dan scorecard Perusahaan. KPI ini kemudian di-elaborasi di tingkat individual sebagai cerminan akuntabilitas para karyawan, serta kontribusi mereka terhadap sasaran perusahaan. Seiring dengan hal tersebut, insentif dan bonus karyawan diselaraskan dengan ukuran kinerja yang berdasarkan KPI, untuk memastikan bahwa mereka memiliki insentif yang sesuai sekaligus mendapat imbalan yang sepadan dengan kontribusi mereka terhadap target Perusahaan.

KPI tersebut dikembangkan melalui proses kajian dan perencanaan secara rinci, dengan masukan dari penasihat independen dan ahli sumber daya manusia termasuk Komite Remunerasi. Secara spesifik, pada tahun 2009 kami telah meningkatkan standar kualitas KPI dan kinerja jaringan berdasarkan kombinasi praktik terbaik yang berlaku dalam industri maupun standar internasional.

Kebijakan Penanganan Pengaduan

Kebijakan penanganan pengaduan (whistle-blower policy) kami melindungi pihak eksternal maupun internal perusahaan yang menyampaikan masalah atau keluhan kepada Komite Audit berkenaan dengan ketidaksesuaian atau ketidakcermatan dalam laporan keuangan Perusahaan, kode etik, siaran pers dan keterbukaan informasi, akuntansi, pengendalian internal serta masalah-masalah audit lainnya.

Tata cara pengaduan secara lengkap disajikan dan dapat diakses melalui situs Perusahaan di www.indosat.com dan dapat dikirimkan ke email: auditcom@indosat.com atau infoGCG@indosat.com.

Struktur Manajemen Organisasi

Indosat dipimpin Direksi dengan hak dan tanggung jawab seperti tercantum dalam Anggaran Dasar serta ketentuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi diawasi oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

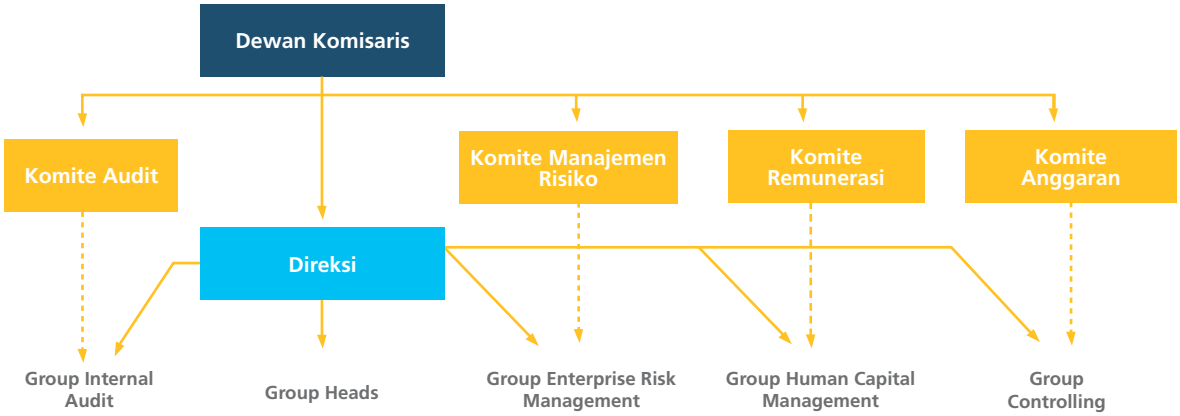

DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap manajemen Perusahaan. Lingkup pengawasan mencakup rencana pengembangan bisnis Perusahaan, penerapan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, penerapan peran dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan , hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, serta ketentuan hukum dan peraturan. Dalam melaksanakan peran dan pengawasan yang telah disebutkan sebelumnya, Dewan Komisaris mewakili kepentingan terbaik dari Perusahaan dan melaporkannya ke Rapat Umum Pemegang Saham.

Saat ini Dewan Komisaris Indosat terdiri atas 10 anggota, empat di antaranya adalah Komisaris Independen. Komposisi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Komisaris Independen. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 11 Juni 2009, Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani diberhentikan dengan hormat dari posisinya sebagai Komisaris. Penggantinya, Richard Farnsworth Seney, dipilih sebagai Komisaris dalam RUPST pada hari yang sama. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 Januari 2010, Michael Francis Latimer dan Setyanto Prawira Santosa, digantikan oleh Chris Kanter dan Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen. Dewan Komisaris mengadakan rapat minimal sekali dalam tiga bulan.

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan tujuh kali rapat sepanjang tahun 2009. Matriks partisipasi dan kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun disajikan dalam tabel berikut:

DAFTAR HADIRAN DEWAN KOMISARIS UNTUK RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2009

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani	Ketua	7
Dr. Nasser Mohammed Marafih	Anggota	7
Rachmat Gobel	Anggota	7
Jarman	Anggota	7

LAPORAN -
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Rionald Silaban	Anggota	7
George Thia Peng Heok	Anggota	7
Soeprapto S.I.P	Anggota	7
Michael F. Latimer[2]	Anggota	6
Setyanto P. Santosa[2]	Anggota	7
Mohamed Bin Suhaim Hamad Al Thani[1]	Anggota	0
Richard Farnsworth Seney[1]	Anggota	3

Catatan:
[1] Mohamed Bin Suhaim Hamad Al Thani diberhentikan dengan hormat pada RUPS 11 Juni 2009 dan digantikan oleh Richard Farnsworth Seney.
[2] Michael F. Latimer mengundurkan diri efektif sejak 28 Januari 2010 dan Setyanto P. Santosa diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 28 Januari 2010. Pada tanggal yang sama, posisinya masing-masing diganti oleh Chris Kanter dan Alexander Rusli.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan hasil keputusan rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah menjalankan serangkaian kegiatan utama selama tahun fiskal 2009 sebagai berikut:

1. Meninjau dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2009 yang diusulkan oleh Direksi;
2. Memantau dan memberi saran terhadap kinerja Direksi dalam menerapkan RKAP tahun 2009 yang telah disetujui;
3. Meninjau dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2010 yang diusulkan oleh Direksi;
4. Meninjau dan menyetujui rencana pembiayaan hutang Perusahaan;
5. Meninjau dan menyetujui remunerasi Direksi untuk tahun 2009 berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi;
6. Memberikan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penunjukan akuntan publik untuk memeriksa kondisi keuangan untuk dilaporkan kepada pemegang saham Perusahaan; dan
7. Meninjau dan menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan dan format F-20 Perusahaan untuk disampaikan kepada otoritas pasar modal dan bursa saham yang terkait, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi: Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 11 Juni 2009 sebesar Rp 28.487.500.000, yang dibagikan sesuai dengan ragam peran dan tanggung jawab setiap anggota.

Komisaris Utama: Rp 1.136.762.004 (total kas)

Komisaris: Rp 1.070.463.276 (rata-rata total kas)

Rincian remunerasi dalam bentuk tunai setelah pajak penghasilan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2009 disajikan dalam tabel berikut ini:

	Semester I	Semester II	Total
Honorarium	2.928.934.465	2.873.265.020	5.802.199.485
Tunjangan Aktivitas Komisaris dan Tunjangan Lain-lain	3.020.282.000	1.396.400.000	4.416.682.000
Kompensasi Akhir Layanan	552.050.004	-	552.050.004
Total	6.501.266.469	4.269.665.020	10.770.931.489

DIREKSI

Direksi secara kolegial bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnis Perusahaan dan memimpin Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan, mengelola Perusahaan , dan mengawasi kegiatan bisnis sehari-hari.

Dalam rangka menjalankan prinsip tata kelola usaha yang baik, Direksi Indosat harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut:

a. membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal;
b. mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
c. membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aktiva tetap atau aktiva lain milik Perusahaan (termasuk seluruh kepentingan yang ada);
d. tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari pembukuan serta persediaan barang;
e. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) atau dengan cara apapun sehingga Perusahaan menjadi bertanggungjawab terhadap hutang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambil-alih hutang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka atau pinjaman untuk membayar lunas hutang pihak lain;
f. menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah/panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku);
g. melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
h. menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham;
i. mengusulkan pengeluaran saham baru Perusahaan;
j. memberikan "indemnity" (ganti kerugian) kepada atau memberikan jaminan atas kewajiban suatu pihak;
k. menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perusahaan;
l. membuat rencana bisnis baru atau mengubah rencana bisnis;
m. mengubah praktek dan sistem akuntansi, keuangan atau pajak di Perusahaan atau anak perusahaannya;
n. mengubah nama Perusahaan;
o. menyetujui laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dalam RUPS;
p. menentukan anggaran tahunan Perusahaan dan anggaran tahunan anak perusahaannya;
q. melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal;
r. mendirikan anak perusahaan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap anak perusahaan atau mengambilalih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain;
s. melakukan setiap tindakan korporasi atau investasi terkait dengan anak perusahaan Perusahaan;
t. menggunakan hak sebagai pemegang saham pada anak perusahaan Perusahaan, atau pada perusahaan lain dimana Perusahaan mempunyai penyertaan saham;
u. menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perusahaan atau mengubah struktur remunerasi karyawan;
v. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
w. menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan kewajiban pembayaran (asset liability management) Perusahaan;
x. menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan komitmen-komitmen lainnya;

y. mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan, atau 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar Perusahaan yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menetapkan batasan nilai berkaitan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, huruf j dan huruf u. Pasal ini dan berhak untuk mengubah batasan nilai tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan-tindakan tersebut masih tercakup dalam batasan nilai, maka persetujuan dari Dewan Komisaris tidak diperlukan.

Setelah RUPS 11 Juni 2009 Direksi Indosat terdiri dari lima orang anggota, di mana setiap anggota memiliki keahlian khusus untuk menangani berbagai kepentingan bisnis. Kami juga telah mendefinisikan wewenang Direksi dalam berbagai kebijakan yang relevan seperti pengadaan barang dan jasa serta wewenang keuangan. Kami meyakini, dengan pembagian wewenang yang jelas akan tercipta akuntabilitas serta tingkat komitmen yang tinggi dari masing-masing anggota Direksi dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Uraian yang lebih lengkap tersaji dalam struktur organisasi Indosat per 31 Desember 2009 yang tertera pada halaman 22.

Direksi mengadakan rapat rutin tiap minggu dan setiap kali dianggap perlu oleh Direktur Utama atau atas usulan sedikitnya dari lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota Direksi. Selama tahun 2009, Direksi Indosat telah melakukan rapat sebanyak 57 kali. Daftar kehadiran masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

DAFTAR HADIR DIREKTUR UNTUK RAPAT DIREKTUR TAHUN 2009

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Periode sebelum 11 Juni 2009		
Johnny Swandi Sjam[1]	Direktur Utama	26
Kaizad Bomi Heerjee[2]	Wakil Direktur Utama	22
Wong Heang Tuck[3]	Direktur Keuangan	24
Fadzri Sentosa[6]	Direktur Jabotabek dan Penjualan Korporasi	20
Syakieb Ahmad Sungkar[4]	Direktur Penjualan Regional	20
Guntur S. Siboro[4]	Direktur Pemasaran	22
Wahyu Wijayadi[4]	Direktur Layanan Korporasi	25
Raymond Tan Kim[4]	Direktur Jaringan	23
Roy Kannan[4]	Direktur Teknologi Informasi	25
Periode setelah 11 Juni 2009		
Harry Sasongko Tirtotjondro	President Director and Chief Executive Officer	21
Kaizad Bomi Heerjee[2]	Director and Chief Commercial Officer	26
Peter Wladyslaw Kuncewicz	Director and Chief Financial Officer	24
Fadzri Sentosa[6]	Director and Chief Wholesale & Infrastructure Officer	29
Stephen Edward Hobbs[5]	Director and Chief Technology Officer	27

Catatan:
- Ketidakhadiran anggota Direksi dikarenakan dinas atau sakit.

1 Berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2009, pejabat tersebut diganti oleh Bapak Harry Sasongko Tirtotjondro sebagai President Director and Chief Executive Officer, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2009.
2 Berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2009, jabatan dari Wakil Direktur Utama berubah menjadi Director and Chief Commercial Officer, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2009. Pada RUPSLB tanggal 28 Januari 2010, pejabat tersebut diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal 30 April 2010 dan posisinya digantikan oleh Bapak Laszlo Imre Barta terhitung sejak tanggal 1 Mei 2010.
3 Berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2009, pejabat tersebut diganti oleh Bapak Peter Wladyslaw Kuncewicz sebagai Director and Chief Financial Officer, terhitung sejak 1 September 2009.
4 Berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2009, pejabat tersebut diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal 11 Juni 2009.
5 Berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2009, pejabat tersebut diangkat sebagai Director and Chief Technology Officer, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2009.
6 Berdasarkan RUPS tanggal 11 Juni 2009, jabatan pejabat tersebut berubah menjadi Director and Chief Wholesale & Infrastructure Officer, terhitung tanggal sejak 11 Juni 2009.

Kegiatan dan Berbagi Pengetahuan pada tahun 2009: Para anggota Direksi, selain melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap Perusahaan, juga diharapkan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka demi kemajuan Perusahaan. Mereka memperoleh pelatihan rutin dan terstruktur serta arahan dari para instruktur senior di bidang yang terkait. Mereka juga dapat mengikuti kursus eksekutif eksternal. Selain itu, para Direktur memperoleh briefing secara berkala tentang peraturan baru, perkembangan dalam praktik tata kelola perusahaan yang terbaik, teknologi informasi, isu-isu yang berkembang di bidang manajemen risiko, serta perubahan dalam standar akuntansi. Sepanjang tahun 2009, Direksi Indosat melakukan berbagai kegiatan berbagi pengetahuan termasuk menghadiri Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol.

Remunerasi: Jumlah remunerasi Direksi untuk tahun 2009 yang diusulkan dan disetujui dalam rapat Komite Remunerasi pada tanggal 14 Agustus 2009 adalah sebesar Rp 66.018.448.758 yang dibagikan sesuai dengan ragam peran dan tanggung jawab masing-masing Direksi.

Direktur Utama: Rp 8.502.863.030 (total tunai)

Direktur: Rp 4.936.743.786 (rata-rata total tunai)

Remunerasi Direksi

Rincian remunerasi dalam bentuk tunai setelah pajak penghasilan yang dibayarkan kepada Direksi untuk tahun 2009 disajikan dalam tabel berikut ini:

	Semester I	Semester II	Total
Gaji Pokok	6.128.699.981	6.112.903.226	12.241.603.207
Tunjangan Tetap	4.846.880.271	4.989.754.578	9.836.634.849
Layanan Awal	-	1.980.000.000	1.980.000.000
Layanan Akhir	-	9.360.000.000	9.360.000.000
Insentif Jangka Pendek/Tantiem 2008	8.347.620.000	-	8.347.620.000
Insentif Jangka Panjang 2007	-	534.918.780	534.918.780
Total	19.323.200.252	22.977.576.584	42.300.776.836

Seiring dengan kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan dan upaya kami untuk menjadi perusahaan yang Transparan dan dapat Dipertanggungjawabkan seperti diamanatkan dalam kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kepemilikan saham Indosat oleh Direksi telah diungkapkan.

3. PERTANGGUNGJAWABAN

Indosat berkomitmen untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, seperti halnya kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan pada umumnya.

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, yang mengharuskan perusahaan publik untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, kami telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan pada tanggal 11 Juni 2009.

Perubahan dasar yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan berkaitan dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha, Rapat Umum Pemegang Saham, jumlah anggota yang hadir untuk rapat, tugas dan wewenang Direksi, konflik kepentingan, penggabungan usaha (merjer), konsolidasi, pengambilalihan dan pemisahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, kepailitan dan likuidasi.

Pada tanggal 28 Januari 2010, Perusahaan telah mengubah Anggaran Dasar, antara lain maksud, tujuan, dan kegiatan usaha, kuorum rapat, dan benturan kepentingan.

Asset Liability Management

Kami menerapkan kebijakan Asset Liability Management (ALM) sebagai acuan untuk memastikan berlangsungnya kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketertiban serta efisiensi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja pengawasan bagi Manajemen sehubungan dengan manajemen likuiditas kas, risiko keuangan dan risiko hutang atau pinjaman serta pendanaan. Kami juga melakukan program lindung-nilai dalam upaya untuk meminimalkan risiko yang timbul dari volatilitas nilai tukar valuta asing, yaitu dengan membuat posisi lindung-nilai yang netral. Program lindung-nilai tidak dirancang untuk mencapai keuntungan dan spekulasi tertentu, juga tidak dimaksudkan untuk mengunci pada nilai tukar pada nilai yang tetap. Penentuan transaksi yang akan dilaksanakan dalam program lindung-nilai didasarkan pada pertimbangan yang seimbang antara biaya dan risiko.

Kepatuhan Terhadap Batasan (Covenant)

Berdasarkan perjanjian kredit, perjanjian pinjaman dan/atau perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas.

Kami menyetujui batasan-batasan tertentu berkaitan dengan penerbitan Obligasi Rupiah Indosat, termasuk, tetapi tidak terbatas, pada kesepakatan untuk mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp 5.000 miliar; rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5:1, seperti dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan; rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 2,5:1, seperti dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi triwulanan; serta rasio EBITDA terhadap beban bunga, seperti dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan paling sedikit 3,0:1.

Kepatuhan terhadap Regulasi

Sebagai perusahaan telekomunikasi, kami juga senantiasa mematuhi Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang lain yang terkait seperti UU ITE, UU PNBP, UU Persaingan Usaha dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan atau oleh Departemen lainnya.

Perusahaan menetapkan syarat kepatuhan, sejak awal Perusahaan didirikan 42 tahun yang lalu, kepatuhan artinya kewajiban untuk secara konsisten mematuhi peraturan yang berlaku, merupakan praktek bisnis yang penting. Sebagai pengakuan atas kepatuhan Perusahaan, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menganugerahkan kepada Indosat Best Achivement Award pada tanggal 10 November 2008 untuk kategori penyedia jaringan bergerak selular. Penghargaan ini tidak diselenggarakan oleh BRTI pada tahun 2009.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab Perusahaan dan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan sehingga dapat menangkis berbagai isu negatif yang mungkin berkembang dari waktu ke waktu yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan.

Sebagai salah satu contoh, terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999, terkait dengan SMS Kartel, dimana Indosat dan beberapa operator lainnya menjadi terdakwa, namun pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU mengumumkan bahwa Indosat dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999.

Untuk informasi yang lebih rinci terkait dengan Legal Proceedings, silahkan melihat Item 8: Informasi Keuangan terkait dengan Legal Proceedings dalam Format 20-F.

Seluruh pelaporan yang diwajibkan oleh hukum penyelenggara telekomunikasi seperti RFR (*Regulatory Financial Report*), QoS (*Quality of Service*), LKO (Lembar Kinerja Operasional) telah disampaikan sesuai dengan parameter dan waktu yang telah ditentukan. Begitu juga dengan pendaftaran Ijin Radio untuk seluruh sistem radio yang digunakan oleh Indosat, telah dilakukan untuk mendukung jaringan operasional 16.353 BTS yang dimiliki Indosat. Pada tanggal 14 Desember 2009, Dirjen Postel dan konsultan yang ditunjuk oleh "Surveyor Indonesia" telah menyampaikan hasil verifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) pada pengeluaran barang modal seluruh penyelenggara 3G di Indonesia untuk tahun 2008, dimana Indosat mencapai 39,84% dari nilai minimum 30% yang diwajibkan bagi penyelenggara 3G.

Pengendalian Internal

- Enterprise Risk Management Group
  Sejak tahun 2006 Group Enterprise Risk Management

(ERM) dibentuk dengan tugas untuk melakukan penilaian, analisis, dan pemetaan risiko terhadap seluruh kegiatan Perusahaan berdasarkan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Panduan dan peta risiko dimaksudkan untuk mengarahkan unit rentan risiko dalam menerapkan manajemen risiko di dalam operasi Perusahaan. Group ERM mendukung Direksi dalam mengkomunikasikan kepada unit bisnis untuk menjamin pemahaman yang sama terhadap manajemen risiko di Perusahaan. Kelompok ini terdiri atas 4 divisi yang menangani risiko operasi, keuangan, strategi, serta komersial dan pengembangan.

Perusahaan menghasilkan profil risiko entitas dan menyelenggarakan penilaian rutin. Direksi melaporkan penilaian tentang risiko kepada Komite Manajemen Risiko setiap kuartal. Hingga akhir tahun 2009, Perusahaan mengidentifikasi adanya risiko material terkait dengan faktor strategi, operasi dan eksternal.

Profil risiko dimanfaatkan sebagai acuan bagi Group Internal Audit untuk merencanakan dan melaksanakan program-program audit.

- Internal Audit Group
  Group Audit Internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik telah berfungsi dan dilaksanakan secara memadai oleh Perusahaan, serta melaporkan kegiatannya kepada Direksi dan Komite Audit. Group Internal Audit juga berkoordinasi dengan Group ERM untuk memfasilitasi identifikasi risiko, memberikan keyakinan bahwa risiko dievaluasi secara layak dan mengevaluasi pelaporan risiko kunci. Audit internal memberi rekomendasi pada Group ERM untuk perbaikan proses manajemen risiko. Group ERM memberi nilai tambah pada pengembangan rencana audit berbasis risiko kepada Group Internal Audit. Sinergi antara Group Audit Internal dan Group ERM menjadikan pengendalian internal Perusahaan semakin efektif.

  Group Audit Internal diorganisasikan berdasarkan struktur sebagai berikut:
  1. Divisi Audit Sistem Keuangan dan Pendukung
  2. Divisi Audit Niaga
  3. Divisi Audit Teknis & Operasional
  4. Divisi Audit Regional (Jabodetabek, Sumatra, Jawa Barat & Tengah, Jawa Timur & Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, Maluku & Papua)
  5. Fungsi Pelanggaran (*Fraud*) dan Investigasi.

  Pada tahun 2009, Group Audit Internal telah melaksanakan 66 audit, menggunakan pendekatan berbasis risiko

- Group SOX
  Dengan pencatatan saham Indosat di Bursa Efek New York (NYSE), maka Indosat diwajibkan untuk mematuhi Sarbanes Oxley Act (SOA), khususnya ketentuan pasal 404 dan 302. Undang-Undang tersebut mewajibkan manajemen untuk melakukan penilaian, pengujian, pendokumentasian dan pelaporan atas efektivitas dari pengendalian internal Perusahaan terhadap pelaporan keuangan (ICFR). Lebih lanjut, manajemen Indosat diharuskan melaporkan setiap kelemahan material. Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO) diwajibkan untuk memberikan pengesahan atas laporan pengendalian internal.

  Group SOX bertanggung jawab dalam membantu CEO dan CFO menjalankan proses kepatuhan Perusahaan terhadap SOX. Group SOX mengembangkan dan mendokumentasikan pengidentifikasian dari risiko salah saji atas laporan keuangan, pengukuran dan penilaian pengendalian Risiko Pelaporan Keuangan. Grup melakukan koordinasi dengan unit-unit bisnis, Group Enterprise Risk Management dan Group Audit Internal dalam pelaksanaan tugas yang terkait. Di samping itu, Group SOX melaksanakan Uji Efektivitas (TOE) atas sejumlah pengendalian utama yang diidentifikasi dapat mengurangi risiko salah saji atas laporan keuangan. Group SOX berkoordinasi dengan unit-unit bisnis dalam upaya penyempurnaan terhadap defisiensi-defisiensi yang ditemukan.

  Proses kepatuhan dan pendokumentasian SOX telah dilaksanakan pada posisi 31 Desember 2009. Tidak ada kelemahan material dalam Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICFR) yang perlu dilaporkan.

Tanggung Jawab terhadap Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Makna dari tanggung jawab kami mencakup upaya berbagi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk tumbuh berkembang dan mendapat manfaat dari keberuntungan kami. Pada tahun 2008 kami membentuk Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk memperkuat perwujudan tanggung jawab kami. Pembentukan Komite ini bertujuan untuk memandu dan memfokuskan upaya CSR kami secara lebih konsisten dan terfokus. Pada tahun 2009 kami meluncurkan kampanye CSR bertema "Satukan Cinta Negeri", seraya meningkatkan pembangunan dan pengembangan upaya CSR kami dari tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan program CSR kami adalah membantu Perusahaan berkembang menjadi sebuah perusahaan yang bukan saja taat-hukum, melainkan juga secara proaktif melayani dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan lingkungan kami. Untuk mencapai tujuan tersebut, serangkaian prakarsa CSR dan GCG Indosat dipusatkan pada lima aspek utama, yakni Tata Kelola Organisasi (*Organizational Governance*), Isu Konsumen (*Consumer Issues*), Praktik Tenaga Kerja (*Labor Issues*), Lingkungan (*Environment*), dan Keterlibatan dengan Masyarakat (*Community Involvement*).

Informasi lebih lanjut tentang kontribusi CSR Perusahaan pada tahun 2009 disajikan di laporan "Laporan Keberlanjutan 2009: *Making a Difference*".

4. INDEPENDENSI

Kami memaknai independensi sebagai kemampuan untuk berkontribusi dan memimpin Perusahaan tanpa kemungkinan dipengaruhi oleh unsur benturan kepentingan. Kami secara aktif berupaya untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan dengan menetapkan pedoman kebijakan seperti berikut ini.

Perangkapan Jabatan

Demi kepentingan mempertahankan prinsip independensi dan mencegah terjadinya benturan kepentingan, maka para anggota Direksi diminta menginformasikan kepada Perusahaan mengenai peran kepemimpinan utama dan jabatan-jabatan di perusahaan atau organisasi yang lain. Namun demikian, diharapkan bahwa perangkapan jabatan anggota Direksi di luar Indosat tidak akan menghambat atau membebani pelaksanaan tugas-tugas mereka untuk Perusahaan.

Kepemilikan Saham oleh Orang Dalam

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Indosat dianjurkan untuk mengungkapkan dan mengkonfirmasikan kepemilikan saham mereka di Indosat, serta kepemilikan saham di perusahaan lain. Hal ini termasuk kepemilikan saham di Indosat oleh para anggota keluarga langsung. Pengungkapan ini dicatat dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

Rincian kepemilikan saham Indosat pada tahun 2009 berdasarkan konfirmasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi disajikan dalam tabel berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	%
Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani	Komisaris Utama	-	-
Dr. Nasser Mohammed Marafih	Komisaris	-	-
Rachmat Gobel	Komisaris	-	-
Rionald Silaban	Komisaris	-	-
Jarman	Komisaris	-	-
Richard Farnsworth Seney	Komisaris	-	-
Soeprapto S.I.P	Komisaris Independen	-	-
Setyanto P. Santosa	Komisaris Independen	-	-
George Thia Peng Heok	Komisaris Independen	-	-
Michael F. Latimer	Komisaris Independen	-	-
Harry Sasongko Tirtotjondro	President Director and Chief Executive Officer	-	-

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	%
Laszlo Imre Barta	Director and Chief Commercial Officer	-	-
Fadzri Sentosa	Director and Chief Wholesale and Infrastructure Officer	10.000	0,0002%
Stephen Edward Hobbs	Director and Chief Technology Officer	-	-
Peter Wladyslaw Kuncewicz	Director and Chief Financial Officer	-	-

Auditor Independen

Auditor Independen ditunjuk oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS), berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada RUPS tanggal 11 Juni 2009, pemegang saham setuju untuk menunjuk Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (anggota Ernst & Young Global) sebagai Auditor Independen Indosat untuk tahun 2009. Pemegang saham selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan syarat dan ketentuan penunjukkan.

Untuk menjaga independensi Auditor Eksternal yang ditunjuk, kebijakan Indosat melarang memeperkerjakan karyawan, kerabat dekat atau mantan karyawan Auditor Eksternal sebagai karyawan Indosat. Penyediaan jasa non-audit oleh Auditor Independen kepada Indosat juga diatur. Selain itu, kebijakan perekrutan untuk mantan karyawan perusahaan audit independen menetapkan suatu "*cooling off period*" atau "*window period*" sebelum mereka berhak untuk bekerja di Indosat, terutama untuk posisi tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi peraturan Bapepam-LK No. VIII A.2 dan Pasal 206 Sarbanes-Oxley Act.

Tabel berikut ini memuat rangkuman biaya jasa yang dibayar kepada Purwantono, Sarwoko & Sandjaja anggota Ernst & Young Global, auditor eksternal independen Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009.

	2007 (US$)	2008 (US$)	2009 (US$)
Biaya audit[1]	2.132.600	1.963.307	2.330.298
Biaya terkait audit[2]	1.557.200	953.962	1.279.708
Biaya pajak[3]	-	-	-
Biaya yang lainnya[4]	-	-	-
Total	3.689.800	2.917.269	3.610.006

(1) Biaya audit merupakan biaya jasa profesional audit keuangan terhadap laporan keuangan kami dan anak perusahaan kami, PT Indosat Mega Media, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Starone Mitra Telekomunikasi dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dan Audit pengendalian internal dan jasa atestasi untuk memenuhi pasal 404 dari Sarbanes-Oxley Act of 2002.
(2) Biaya terkait audit pada tahun 2008 dan 2009 terutama terdiri dari biaya untuk melaksanakan penelaahan terbatas interim atas laporan keuangan konsolidasi kami, termasuk laporan keuangan anak perusahaan kami, dan untuk penerbitan obligasi pada tahun 2008 dan 2009.
(3) Biaya jasa pajak merupakan biaya jasa profesional yang terkait dengan kepatuhan terhadap pajak dan konsultasi perencanaan/nasihat tentang perpajakan.
(3) Semua biaya lainnya merupakan biaya jasa profesional untuk layanan-layanan yang tidak secara langsung mendukung audit laporan keuangan.

Kantor Akuntan Publik

Dewan Komisaris diberi wewenang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik serta pilihan alternatif jika Kantor Akuntan Publik yang semula ditunjuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta untuk menetapkan rincian persyaratan dan kondisi atas penunjukan tersebut.

5. KESETARAAN

Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami juga memberikan kesempatan yang sama dalam proses penerimaan karyawan dan kesempatan berkarir bagi seluruh karyawan Indosat.

LAPORAN -
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kesetaraan Informasi Bagi Pemegang Saham

Kami memperlakukan semua pemegang saham secara sama, memberikan akses yang sama untuk memperbaharui pengungkapan dan informasi material secara tepat waktu. Untuk menghindari pengungkapan informasi secara selektif, kami menempatkan seluruh informasi yang telah kami ungkapkan ke publik dalam situs kami http:// www.indosat.com.

Untuk menjamin seluruh pemegang saham menerima informasi yang sama, selain Laporan Tahunan, sejak tahun 2007 kami telah memuat pula laporan tahunan dalam Format 20-F yang kami sampaikan kepada US-SEC dalam laporan tahunan Perusahaan. Kedua buah laporan tahunan juga kami sampaikan secara bersamaan kepada otoritas pasar modal, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Larangan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Demi menghindari terjadinya transaksi orang dalam, kami menerapkan kebijakan trading window setiap triwulanan. Kebijakan ini didasarkan pada konsep bahwa suatu periode setelah pengungkapan laba perusahaan triwulanan merupakan masa aman bagi orang dalam untuk melakukan transaksi jual (atau beli) saham Perusahaan. Periode trading window dibuka dua hari kerja setelah pengumuman hasil pencapaian kinerja triwulanan Perusahaan dan berakhir 10 (sepuluh) hari setelahnya. Waktu dua hari dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pasar untuk bereaksi terhadap pengumuman triwulanan Perusahaan, serta kesempatan bagi pasar untuk mencerna informasi tersebut.

Sumber Daya Manusia

Kami di Indosat bangga akan keanekaragaman dan potensi kreatif staf kami, yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan. Guna memastikan semua staf menerima perlakuan dan kesempatan yang setara dalam pengembangan dan peningkatan karier, kami menerapkan budaya 'peluang setara' bagi karyawan kami, dalam seluruh kegiatan.

Setiap dua tahun sekali, Perusahaan menyelenggarakan survei kepuasan kerja, untuk mengukur tingkat kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Selama tiga tahun terakhir, tingkat *turnover* karyawan tercatat sebesar 2% per tahun, atau jauh lebih rendah dibandingkan standar industri telekomunikasi yang berkisar pada angka 6% per tahun. Kenyataan tersebut menegaskan reputasi kami sebagai perusahaan yang menjadi pilihan utama.

Kami percaya bahwa karyawan dan sumber daya manusia adalah aset utama bagi Indosat, sehingga kami senantiasa mendukung pengembangan dan keterampilan mereka. Kami sangat memprioritaskan terciptanya lingkungan yang mendukung pembelajaran, dan terus berusaha meningkatkan pelatihan staf. Bahwa jumlah hari pelatihan merupakan bagian dari evaluasi kinerja staf, membuktikan keseriusan kami terhadap hal ini. Di tahun 2009, jumlah hari pelatihan rata-rata setiap karyawan adalah 8,75 hari.

Di samping program pelatihan dan pengembangan, kami pun berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat bagi para karyawan. Kami menyediakan berbagai fasilitas pendukung dan rekreasi antara lain kantin untuk staf, ruang pengasuhan anak, klinik pengobatan dan fasilitas olahraga. Kami pun menjalin kerjasama kemitraan dengan sejumlah rumah sakit untuk menyediakan manfaat perawatan kesehatan bagi seluruh karyawan kami.

Pada tahun 2009, kami tetap menggunakan sistem penilaian jasa (*merit*) dalam program remunerasi, yang terkait dengan kinerja Perusahaan. Kami juga melakukan pengembangan sistem informasi Sumber Daya Manusia yang memungkinkan pemberian persetujuan secara *on-line* untuk perjalanan dinas, pengeluaran, klaim penggantian biaya perawatan kesehatan serta pembelajaran secara *on-line* melalui program "Mylearning".

Selanjutnya, untuk menunjang tercapainya standar kehidupan yang baik bagi para karyawan setelah masa purna bakti, kami telah menerapkan skema perencanaan masa pensiun karyawan melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK.

Perjanjian Kerja Bersama

Pada tanggal 25 Agustus 1999, karyawan kami membentuk suatu serikat pekerja yang dinamakan Serikat Pekerja Indosat/SPI. Pada tanggal 5 Juni 2008,

manajemen kami dan SPI telah menandatangani suatu perjanjian kerja bersama yang memuat ketentuan-ketentuan kerja umum, meliputi jam kerja, gaji, pengembangan dan kompetensi karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, tata tertib karyawan dan tata cara penyelesaian perselisihan. Sejumlah karyawan kami berhak atas pensiun berdasarkan program tunjangan yang telah ditetapkan, dimana mereka memperoleh pembayaran sekaligus dan tunjangan bulanan melalui program asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Komunikasi Internal

Kami berupaya menerapkan pendekatan manajemen terbuka di dalam organisasi Indosat.

Struktur organisasi Perusahaan tersusun sebagai berikut: Direksi membawahi Group dan setiap Group membawahi Divisi. Masing-masing Group mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas kegiatan operasional dalam masing-masing Group. Pada tingkatan yang lebih luas, diselenggarakan rapat Direktorat yang dipimpin oleh masing-masing Direktur dan dihadiri oleh pejabat senior dalam Direktorat tersebut. Sedangkan rapat manajemen yang melibatkan seluruh pimpinan group dan divisi diadakan minimal tiga bulan sekali. Selain itu, sekali dalam satu tahun, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Dinas yang dihadiri oleh seluruh pimpinan group dan divisi untuk membahas rencara kerja tahunan perusahaan.

Perusahaan juga menyelenggarakan acara rutin temu muka antara karyawan dan Direksi untuk menginformasikan berbagai hal penting dan diselenggarakan setiap triwulanan. Temu muka ini juga dapat diikuti secara aktif oleh seluruh karyawan di wilayah-wilayah melalui sarana *video conference*. Selain itu, Direksi juga melakukan perjalanan rutin secara bergantian ke wilayah-wilayah operasional Indosat, untuk memberikan motivasi, menyampaikan target-target Perusahaan, serta menyampaikan secara langsung informasi-informasi penting tentang Perusahaan kepada karyawan. Inisiatif ini juga sekaligus sebagai wahana bagi karyawan di berbagai wilayah untuk dapat berdialog langsung dengan manajemen, serta sekaligus memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi Perusahaan.

Semua informasi, kebijakan dan kegiatan Perusahaan juga dapat diakses secara *on-line* oleh karyawan melalui portal "MyIndosat". Berbagai menu dan aplikasi dapat dilihat dan dipergunakan karyawan melalui portal ini, seperti "I-Policy", suatu data bank elektronik yang menyimpan seluruh kebijakan Perusahaan serta berbagai menu lainnya terkait dengan Peraturan Telekomunikasi, Pengetahuan Produk, dan "MyValues", sebuah fitur yang membantu karyawan untuk mengingat kembali pengetahuan mereka tentang nilai-nilai Perusahaan. Berita terkait dengan Perusahaan dan penyedia jasa telekomunikasi lain juga bisa dilihat pada portal ini.

Selain itu, kami juga memiliki aplikasi MyInfo yang memuat data pribadi dari masing-masing karyawan yang mencakup di antaranya curriculum vitae, cuti tahunan, dan akses ke sistem penilaian elektronik. Untuk tujuan tersebut, kami mewujudkan komitmen untuk menerapkan standar tertinggi dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagai manajemen perusahaan, Dewan Komisaris didukung empat Komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Anggaran.

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi dan melalui pendelegasian ke Komite terkait.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam meninjau laporan keuangan Perusahaan sebelum diserahkan ke otoritas pasar modal dan bursa efek yang relevan, serta meninjau laporan penilaian pengawasan internal Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan yang menyangkut penilaian dan manajemen risiko Perusahaan. Komite ini juga meninjau kelayakan, kelengkapan, dan efektivitas penerapan prosedur manajemen risiko Perusahaan, serta merekomendasikan perbaikan jika diperlukan.

Komite Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat tentang remunerasi, bonus, dan manfaat untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Anggaran membantu Dewan Komisaris dalam kaitan dengan rencana strategis Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (juga mencakup Rencana Belanja Modal).

Dewan Komisaris menyelenggarakan tujuh rapat sepanjang tahun 2009. Matriks partisipasi dan kehadiran para Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun silam dapat dilihat di halaman 89.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan rapat umum pemegang saham, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan-kegiatan utama berikut sepanjang tahun finansial 2009.

1. Meninjau dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan untuk tahun 2009 yang diajukan Direksi;
2. Memantau dan memberi nasihat tentang kinerja Direksi dalam menerapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui untuk tahun 2009;
3. Meninjau dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan untuk tahun 2010 yang diajukan Direksi;
4. Meninjau dan menyetujui rencana pembiayaan hutang Perusahaan ;
5. Meninjau dan menyetujui remunerasi Direksi untuk tahun 2009 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi;
6. Memberi rekomendasi dalam rapat umum pemegang saham tentang penunjukan akuntan publik guna memeriksa kondisi keuangan Perusahaan untuk kepentingan pelaporan kepada para pemegang saham Perusahaan ; serta
7. Meninjau dan menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan Format 20-F dari Perusahaan untuk diserahkan ke otoritas pasar modal dan bursa efek yang relevan berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

LAPORAN KOMITE AUDIT

Latar Belakang

Komite Audit (Komite) PT Indosat Tbk (Perusahaan) beroperasi sesuai Charter (Piagam)tertulis yang telah disetujui Dewan Komisaris pada 31 Mei 2003, yang ditinjau secara berkala dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan pada 20 Oktober 2009.

Charter tersebut dibuat berdasarkan peraturan yang diterbitkan Pasar Modal Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), US-Securities and Exchange Commission (US SEC), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bursa Efek New York (NYSE).

Sesuai Charter tersebut, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan karena itu bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. Fungsi utamanya adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab kepengawasannya terhadap kepatuhan Peraturan dengan ketentuan Pasar Modal lokal maupun di Amerika Serikat. Secara khusus, Komite bertanggung jawab mengawasi penyajian laporan keuangan secara wajar , pengendalian proses pelaporan keuangan, proses audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berhubungan erat dengan Manajemen Perusahaan yang meliputi Direksi (BOD), Group Manajemen Risiko khususnya tim penerapan Sarbanes Oxley (tim SOX), Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Selama tahun 2009 Anggota Komite Audit terdiri atas:

George Thia Peng Heok	Komisaris Independen dan Ketua
Soeprapto S.I.P	Komisaris Independen dan Anggota
Michael F. Latimer	Komisaris Independen dan Anggota
Kanaka Puradiredja	Anggota Ahli Independen
USM Tampubolon	Anggota Ahli Independen

Selanjutnya terjadi perubahan anggota Komite Audit. Pada tanggal 28 Januari 2010 Bapak Michael F. Latimer mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Bapak Chris Kanter.

Sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK dan NYSE, George Thia Peng Heok dan Kanaka Puradiredja bertindak sebagai tenaga ahli keuangan.

Sepanjang tahun, Komite Audit menyelenggarakan 7 kali rapat, dengan kehadiran anggota sebagai berikut:

	Kehadiran
George Thia Peng Heok	7
Soeprapto S.I.P	7
Michael F. Latimer	5
Kanaka Puradiredja	7
USM Tampubolon	6

Selanjutnya, seperti ketentuan Charter Komite Audit, dalam rangka mendukung kegiatannya Komite telah membentuk Kelompok Kerja Komite Audit (ACWG) untuk membahas bebagai masalah yang berkaitan dengan tugas Komite.

ACWG terdiri atas 2 (dua) anggota Komite independen dan 2 (dua) penasihat independen. Sepanjang 2009 kelompok kerja ini menyelenggarakan 29 rapat.

Setelah melaksanakan kegiatannya dan melakukan peninjauan terhadap surat-surat pernyataan dari Manajemen dan Audit Eksternal , Komite menyimpulkan laporan berikut ini.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasi tahun 2009, seperti dimuat dalam Laporan Tahunan 2009, diaudit oleh Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, (PSS), anggota Ernst & Young Global yang pada laporannya tertanggal 18 Februari 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi Perusahan tahun 2009 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Umum yang berlaku di Indonesia (Indonesian GAAP).

Guna memenuhi persyaratan pelaporan US SEC, mulai tahun 2009, Perusahaan memutuskan bahwa seperangkat laporan keuangan yang terpisah dalam IFRS akan diterbitkan sebagai pengganti penyajian pengungkapan rekonsiliasi US GAAP dalam laporan keuangan INA GAAP. Komite memantau secara ketat proses transisi dari penerapan US GAAP ke IFRS yang dilakukan oleh Manajemen.

Komite telah meninjau laporan keuangan konsolidasi tahun 2009 yang telah diaudit bersama Manajemen dan PSS termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Sarbanes Oxley Act 2002 pasal 204, yaitu kebijakan akuntansi penting, perkiraan dan pertimbangan signifikan, perlakuan akuntansi alternatif, risiko dalam pelaporan keuangan dan penyesuaian audit yang signifikan.

Komite tidak menjumpai adanya salah saji material dalam laporan keuangan konsolidasi yang disebutkan di atas dan merasa puas bahwa semua penyesuaian audit material yang diajukan PSS telah dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2009.

1. Merujuk kepada informasi di dalam sistem penanganan pengaduan (*whistle blower*) yang dibuat Komite dan pemeriksaan kepada Manajemen Perseroan, tidak ada penyimpangan yang dijumpai Komite yang dapat memengaruhi penyajian laporan keuangan konsolidasi tahun 2009 secara wajar.

Pengawasan Internal

2. Proses penilaian pengendalian terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan Manajemen sesuai dengan persyaratan SOX 404 telah dipantau secara ketat oleh Komite Audit yang menyimpulkan bahwa Perusahaan, dari seluruh aspek material, telah melakukan pengawasan internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan.

   Ada kelemahan tertentu yang diperhatikan oleh PSS selama menjalankan audit dan Komite telah memantau prakarsa-prakarsa perbaikan dari Manajemen terhadap hasil temuan tersebut.

Auditor Eksternal

3. Komite telah meninjau independensi PSS, auditor eksternal Perusahaan, dan menyimpulkan bahwa PSS telah melakukan proses auditnya terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 secara independen.

   PSS tidak terlibat dalam penugasan apa pun yang termasuk dalam kategori terlarang, seperti yang dijabarkan oleh Bapepam-LK dan US SEC.

Auditor Internal

4. Terkait dengan Auditor Internal, Komite memerhatikan upaya berkesinambungan dari Manajemen untuk meningkatkan kegiatannya, dan untuk itu Komite telah menyediakan panduan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja mereka. Upaya signifikan terkini adalah perekrutan Kepala Auditor Internal yang baru pada bulan Januari 2010.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku

5. Komite Audit telah meminta keterangan dari Manajemen Perusahaan maupun PSS mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Keduanya menyatakan bahwa mereka tidak menjumpai adanya ketidakpatuhan sehingga Komite menyatakan bahwa sepengetahuannya, tidak ada penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Paket Remunerasi

6. Meninjau paket remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tanggung jawab Komite. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan PSS, sesuai instruksi Komite Audit, disimpulkan bahwa paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2009, masing-masing telah diterapkan sejalan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 11 Juni 2009 dan keputusan rapat Komite Remunerasi pada tanggal 14 Agustus 2009, yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini.

LAPORAN KOMITE REMUNERASI

Komite Remunerasi bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris tentang remunerasi, bonus, dan manfaat bagi para Komisaris, Direktur, dan karyawan lain di Perusahaan serta struktur, persyaratan, dan penerapan insentif jangka panjang bagi Direksi.

Para anggota Komite Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari antara anggotanya dan memiliki sekurang-kurangnya tiga anggota.

Keanggotaan Komite Remunerasi sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 28 Januari 2010 terdiri atas Dr. Nasser Marafih sebagai Ketua, dan Michael F. Latimer dan Soeprapto S.I.P sebagai Anggota. Sehubungan dengan pengunduran diri Michael F. Latimer, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menetapkan Alexander Rusli sebagai Anggota pada 29 Januari 2010. Komite Remunerasi memiliki akses terhadap saran pakar profesional eksternal yang tepat untuk memberi perspektif tambahan tentang praktik-praktik manajemen bakat dan remunerasi, sesuai dengan keperluannya.

Komite Remunerasi telah menggelar tujuh kali rapat sepanjang 2009. Tabel partisipasi dan kehadiran para Komisaris dalam rapat-rapat Komite Remunerasi sepanjang tahun silam dapat dilihat di bawah ini:

Komisaris	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Dr. Nasser Mohammed Marafih	7
Michael F. Latimer	6
Soeprapto S.I.P	6

Kegiatan

Komite Remunerasi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai kerangka peraturannya.
Kegiatan utama yang dilakukan Komite pada 2009 sebagai berikut:

1. Meninjau dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris tentang struktur remunerasi dan paket bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2009;
2. Meninjau dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris tentang struktur remunerasi dan paket (mencakup tinjauan gaji, bonus, dan insentif jangka panjang) bagi Direksi untuk tahun 2009;
3. Meninjau dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris tentang Bonus Kinerja bagi Direksi untuk tahun 2008; serta
4. Berdasarkan pendelegasian dari Dewan Komisaris, meninjau dan merekomendasikan struktur organisasi yang baru.

LAPORAN KOMITE ANGGARAN

Komite Anggaran membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat, dengan cara meninjau dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan terkait rencana strategis Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (yang mencakup rencana Pengeluaran barang modal).

Sampai tanggal 20 November 2009, Komite Anggaran terdiri atas Dr. Nasser Mohammed Marafih (Ketua), Michael Latimer, Setyanto P. Santosa, George Thia Peng Heok, dan Jarman. Sejak tanggal tersebut, Richard Farnsworth Seney diangkat menjadi anggota Komite Anggaran.

Sejak 28 Januari 2010, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di mana para pemegang saham menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris, Michael F. Latimer dan Setyanto P. Santosa tidak lagi menjadi anggota Komite Anggaran.

Komite Anggaran menyelenggarakan lima kali rapat pada tahun 2009. Tabel partisipasi dan kehadiran para Komisaris dalam rapat Komite Anggaran yang dilaksanakan sepanjang tahun adalah sebagai berikut:

Komisaris	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Dr. Nasser Mohammed Marafih	5
Michael Latimer	4
Setyanto P. Santosa	3
George Thia Peng Heok	5
Jarman	5

Kegiatan

Komite Anggaran melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kegiatan utama yang dilakukan Komite Anggaran adalah:

1. Meninjau dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2009 yang diajukan Direksi; serta
2. Mengawasi Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2009 yang telah disetujui. Rencana strategis yang dibahas meliputi 3G Second Carrier, BWA WiMax, Bisnis Tower, Bisnis Satelit, Pemasaran dan Distribusi.

LAPORAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam membuat kebijakan yang tepat menyangkut penilaian risiko dan manajemen risiko, di samping meninjau kelayakan, kelengkapan, dan efektivitas penerapan proses manajemen risiko Perusahaan , serta merekomendasikan kepada para Komisaris perbaikan yang dianggap perlu.

Komite Manajemen Risiko ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari antara para anggotanya dan terdiri atas empat orang anggota.

Komposisi para anggota Komite Manajemen Risiko saat ini tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu Rachmat Gobel (Ketua), Jarman, Rionald Silaban, dan George Thia Peng Heok.

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan empat kali rapat pada tahun 2009. Tabel partisipasi dan kehadiran para Komisaris dalam rapat-rapat Komite yang dilaksanakan sepanjang tahun silam sebagai berikut:

Komisaris	Jumlah Rapat yang Dihadiri
Rachmat Gobel	4
Jarman	4
Rionald Silaban	4
George Thia Peng Heok	4

Kegiatan

Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kegiatan utama yang dilakukan Komite adalah:

1. Meninjau dan memantau Rencana Kerja dan jadwal Enterprise Risk Management
2. Meninjau, mengesahkan, dan memantau Profil Risiko Utama Perusahaan tahun 2009 serta tindakan mitigasi setiap risiko utama yang diambil Manajemen di bidang Teknologi Informasi, Jaringan, Keuangan, dan Pemasaran; serta
3. Meninjau dan mendukung Profil Risiko baru tahun 2010 dan senantiasa memantau perkembangan terkini dan tindakan mitigasi risiko material yang diambil oleh Manajemen.

LAPORAN -
MAKING A DIFFERENCE

MAKING A **DIFFERENCE**

Percaya bahwa apa yang baik bagi masyarakat dan planet kami juga baik bagi masa depan jangka panjang bisnis kami, Indosat berkomitmen untuk membuat perbedaan di dunia kita melalui perubahan positif dan kontribusi yang bertanggung jawab bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan CSR: Indosat untuk bertumbuh, mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta peduli kepada masyarakat.

Pada bulan April 2008, Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kami menetapkan untuk memfokuskan tindakan ke lima pilar, yakni Tata Kelola Organisasi, Praktik Kerja, Isu Pelanggan, Lingkungan, serta Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas.

Pilar-pilar ini juga mencakup keinginan kami untuk melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk para pelanggan, karyawan, dan komunitas, dan juga pihak ketiga seperti para distributor dan pemasok/ vendor. Selain itu, lima pilar Indosat merujuk ke sepuluh prinsip perjanjian Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pelayanan Kesehatan Gratis

Energi Alternatif Bio-diesel

Pemenang IWIC di Ajang Internasional

LAPORAN -
MAKING A DIFFERENCE

PENDEKATAN MULTI-JALUR YANG KOMPREHENSIF MENUJU MASYARAKAT DAN DIRI KITA YANG LEBIH BAIK

Praktik Tata Kelola Perusahaan + Program CSR
Fokus inisiatif dalam area-area berikut:

5 Inisiatif CSR Indosat

Dampak Positif Komperehensif pada:
Pelanggan, Komunitas, Distributor & Pemasok/Vendor,
Karyawan, Lingkungan, Pemegang Saham, Pemegang Kepentingan Lainnya

Kampanye 2009: "Satukan Cinta Negeri"

Kampanye CSR tahun 2009 kami "Satukan Cinta Negeri" berlangsung sepanjang tahun. Pada 2009 kami mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR sebesar Rp13,4 miliar untuk pengembangan masyarakat. Melalui program Indonesia Belajar, kami melakukan berbagai kegiatan pendidikan seperti menyelenggarakan Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) untuk keempat kali berturut-turut dengan tujuan mendukung innovasi. Kami juga mendukung pendidikan matematika dan sains, mengembangkan sekolah di Aceh dan memberikan program bantuan beasiswa.

Di bidang kesehatan, program Indonesia Sehat tetap mengadakan Mobil Klinik Sehat Keliling Indosat dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan komunitas, dengan fokus khusus ke para wanita hamil, ibu, dan anak.

Kami tetap mengadakan program Berbagi Bersama yang mengajak para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam membantu perbaikan bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat dan juga membantu para korban bencana seperti gempa bumi di Padang dengan mengirim donasi melalui SMS.

Sedangkan program penanggulangan bencana Indosat Peduli membantu para korban di area terkena bencana alam dengan cara mengirim bantuan ke area bencana serta menyalurkan menyalurkan donasi untuk mendukung kebutuhan dan kegiatan komunitas.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang berbagai kegiatan kami selama setahun, silakan merujuk ke Laporan Keberlanjutan tahun 2009, "Membuat Perbedaan."

Mendukung Global Compact PBB

Sebagai refleksi komitmen kami menuju Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan keinginan kami untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, Indosat menandatangani Global Compact PBB pada 2006. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk pada 1999 untuk mendorong dunia usaha dan industri bekerja sama mencapai tujuan-tujuan sosial. Perusahaan-perusahaan yang menandatangani Global Compact berkomitmen melakukan penerapan sepuluh prinsip Global Compact PBB termasuk prinsip HAM, standar pekerja, lingkungan dan perlawanan terhadap korupsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang Global Compact PBB, silakan kunjungi www.unglobalcompact.org atau lihat Laporan Keberlanjutan kami tahun 2009.

FAKTOR-FAKTOR **RISIKO**

Informasi yang terkandung dalam bagian ini diambil dari Laporan Tahunan Perusahaan 2009 dalam bentuk Format 20-F.

RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INDONESIA

Kami didirikan di Indonesia dan sebagian besar bisnis, aset dan pelanggan kami berada di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin, atau mungkin tidak diambil atau diadopsi oleh Pemerintah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi Indonesia, antara lain, terjadinya depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi bisnis di Indonesia, termasuk memberikan dampak yang negatif bagi kualitas dan pertumbuhan basis pelanggan dan pemberian layanan kami, yang bergantung pada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, krisis ekonomi telah mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Banyak perusahaan Indonesia yang masih belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi, dan masih dalam proses restrukturisasi hutang mereka atau terlibat dalam sengketa yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi atas kewajiban hutang tersebut. Krisis keuangan global yang sebagian dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Krisis ini mengakibatkan kegagalan pada beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek, dan rontoknya harga pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari melemahnya ekonomi dunia telah mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi karena hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya risiko akibat ketidakpastian ekonomi dunia. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak negatif pada bisnis dan konsumen Indonesia, dan dapat berakibat pada menurunnya permintaan jasa telekomunikasi.

Gejolak harga minyak dan kemungkinan berkurangnya persediaan makanan dapat pula menyebabkan penurunan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan tingkat perekonomian Indonesia dapat pula menyebabkan timbulnya wanprestasi oleh

para debitur-debitur Indonesia dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kegiatan bisnis, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasional dan prospek kami. Pemerintah terus mengalami defisit fiskal dalam jumlah besar dan hutang luar negeri yang tinggi. Cadangan mata uang asing Pemerintah dalam jumlah yang rendah dan melemahnya sektor perbankan yang diakibatkan oleh tingginya kredit macet. Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia juga dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan yang dibelanjakan oleh konsumen atau menyebabkan berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan untuk jasa telekomunikasi, termasuk jasa kami.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan di pasar yang sedang berkembang dan juga pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk memburuknya keadaan ekonomi global, dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada pasar uang Indonesia dan penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat atau pertumbuhan yang menurun atau negatif dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Ketidakstabilan politik dan sosial dapat memberikan dampak negatif bagi Perusahaan

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan tatanan demokrasi yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa politik dan sosial yang menimbulkan ketidakpastian pada kerangka politik Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga beberapa kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara demokrasi yang masih cukup baru, Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah sosiopolitik dan dari waktu ke waktu telah mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial politik.

Sejak tahun 2000, ribuan rakyat Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia lainnya baik untuk mendukung maupun melawan Mantan Presiden Wahid, Mantan Presiden Megawati, dan Presiden Yudhoyono, serta untuk menanggapi berbagai isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi minyak, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti-korupsi, *bail-out* PT Bank Century pada tahun 2008, desentralisasi dan otonomi daerah dan kampanye militer Amerika di Afghanistan dan Irak.

Pada bulan Juni 2001, rangkaian demonstrasi dan mogok kerja mewarnai sekurang- kurangnya 19 kota setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 30,0%. Demonstrasi serupa juga terjadi pada bulan Januari 2003 ketika Pemerintah kembali berupaya menaikkan harga bahan bakar, tarif listrik dan tarif telepon. Di dalam kedua peristiwa ini, Pemerintah terpaksa menangguhkan atau benar-benar menurunkan tingkat kenaikan tarif yang direncanakan. Pada bulan Maret 2005, Pemerintah memberlakukan kenaikan harga minyak sebesar sekitar 29,0%. Pada bulan Oktober 2005, Pemerintah memberhentikan subsidi minyak pada jenis premium dan minyak tanah serta mengurangi subsidi pada solar, yang mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar. Sebagai tanggapan, beberapa protes massa dilakukan untuk melawan kenaikan harga minyak domestik tersebut, dan tekanan politik akibat dari keputusan Pemerintah. Pada bulan Mei 2008, Pemerintah kembali mengurangi subsidi minyak kepada masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya demonstrasi. Walaupun demonstrasi-demonstrasi ini pada dasarnya dilakukan secara damai, beberapa berakhir dengan kekerasan. Kami tidak dapat memastikan bahwa situasi ini tidak akan berlanjut pada instabilitas politik dan sosial.

Ketidakstabilan politik regional dan pertikaian antara kelompok agama dan etnis tetap menjadi masalah. Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama dan etnis telah berakibat pada keresahan sosial dan sipil di beberapa tempat di Indonesia. Di provinsi Aceh dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi bentrokan antara pendukung gerakan separatis dan satuan militer Indonesia, walaupun hanya ada sedikit konflik di Aceh sejak ditandatanganinya Memo Kesepakatan pada bulan Agustus 2005. Pada bulan April 2006 beratus-ratus orang terlibat dalam aksi protes yang berujung pada kekerasan terhadap pengoperasian tambang emas Freeport di propinsi Papua. Dalam tahun-tahun terakhir, ketidakstabilan politik di Maluku dan Poso, sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, telah meningkat dan bentrokan-bentrokan antara kelompok-kelompok agama di daerah-daerah ini telah menyebabkan ribuan korban dan hilangnya orang-orang di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah pada

beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah tidak membuat banyak kemajuan dalam negosiasi dengan daerah-daerah bermasalah ini, kecuali di Provinsi Aceh di mana pemilihan daerah yang damai telah dilaksanakan yang berujung dengan kelompok separatis memenangkan pemilihan dan menjadi Gubernur provinsi tersebut.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemilihan Umum dengan daftar calon terbuka. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, rakyat Indonesia telah mulai memilih secara langsung kepala daerahnya sendiri. Pada tahun 2009, pemilihan umum kembali diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Aktifitas politik yang lebih tinggi dapat terjadi di Indonesia. Walaupun pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009 telah dilakukan dengan damai, kampanye politik di Indonesia dapat menyebabkan ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu, dan kami tidak dapat memastikan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa yang akan datang dan dalam skala yang lebih besar atau bahwa gangguan tersebut tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Indonesia terletak pada zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan kerugian secara ekonomi

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan vulkanik dan musim kemarau, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya di luar kendali Perusahaan. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia (selain tsunami Asia pada tahun 2004), termasuk tsunami di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006, gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 2006 serta semburan dan banjir lumpur panas di Jawa Timur pada tahun 2006 dan beberapa gempa bumi di Papua, Jawa Barat, Sulawesi, dan Sumatra pada tahun 2009. Indonesia juga mengalami banjir besar di Jakarta pada bulan Februari 2007 dan Solo, Jawa Tengah pada bulan Januari 2008. Pada bulan Januari 2009, hujan lebat telah mengakibatkan jebolnya bendungan di luar Jakarta, menenggelamkan rumah-rumah di daerah berpenduduk padat, dan mengakibatkan kematian atas kira-kira 100 orang. Banjir melanda ratusan rumah dan menyebabkan beberapa orang dilaporkan hilang.

Sebagai akibat dari bencana-bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk bantuan keadaan darurat dan penempatan kembali. Sebagian besar dari biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah negara lain dan organisasi bantuan internasional. Kami tidak dapat menjamin bahwa bantuan tersebut akan terus diberikan, atau bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada para penerimanya pada waktunya. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan asing tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut pada waktunya, keresahan sosial dan politik dapat terjadi. Sebagai tambahan, upaya perbaikan dan bantuan tersebut kemungkinan akan terus membebani keuangan Pemerintah, dan dapat berakibat pada kemampuannya untuk memenuhi kewajibanya berdasarkan hutang Pemerintah. Kegagalan Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya tersebut, atau pernyataan Pemerintah atau adanya moratorium atas hutang negara, dapat menimbulkan wanprestasi atas pinjaman pihak swasta termasuk pinjaman Perusahaan, sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap kegiatan usaham keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kami tidak dapat menjamin bahwa asuransi kami akan cukup untuk melindungi kami dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam tersebut dan hal-hal lain yang terjadi diluar kendali kami. Sebagai tambahan, kami tidak dapat menjamin bahwa premi yang dibayarkan untuk polis asuransi-asuransi tersebut pada saat perpanjangan jumlahnya tidak akan meningkat secara substansial, sehingga dapat secara material mengakibatkan dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil dari kegiatan operasional kami. Kami juga tidak dapat menjamin bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian

Indonesia. Gempa bumi, kerusakan geologis atau bencana alam di kota-kota yang memiliki populasi yang besar atau merupakan pusat keuangan di Indonesia dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan investor, sehingga menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kegiatan terorisme di Indonesia dapat membuat Negara tidak stabil, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Beberapa insiden pengeboman telah terjadi di Indonesia, terutama pada bulan Oktober 2002 di Bali, suatu wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tempat yang aman dari kerusuhan-kerusuhan yang mempengaruhi bagian-bagian lain dari negeri ini. Selain itu, beberapa insiden pengeboman, walaupun dalam skala yang lebih kecil, juga telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk di tempat perbelanjaan dan tempat ibadah. Pada bulan April 2003, sebuah bom meledak di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, dan sebuah bom meledak di depan terminal domestik di Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Pada bulan Agustus 2003, sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott di Jakarta, dan pada bulan September 2004, sebuah bom meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta. Pada bulan Mei 2005, sebuah bom meledak di Sulawesi Tengah yang menyebabkan korban meninggal sebanyak 21 orang dan korban luka-luka sekurang-kurangnya 60 orang. Pada bulan Oktober 2005, terjadi ledakan bom di Bali, yang menewaskan sekurang-kurangnya 23 orang dan melukai sekurang-kurangnya 101 orang lainnya. Pejabat Pemerintah Indonesia, Australia dan AS mengindikasikan bahwa pengeboman ini kemungkinan terkait dengan organisasi teroris internasional. Beberapa demonstrasi juga terjadi di Indonesia sebagai reaksi atas rencana aksi militer dan penambahan pasukan AS, Inggris dan Australia di Irak. Pada Januari 2007, kelompok teroris sektarian melakukan beberapa pengeboman di Poso. Pada bulan Juli 2009, ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton Jakarta menewaskan 6 orang dan melukai sekurang-kurangnya 50 orang. Tindakan teroris lain mungkin saja terjadi di masa mendatang dan ditargetkan pada warga negara asing di Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari, dan mengarah pada, ketidakstabilan dan kerusuhan ini dapat menggoyahkan Indonesia dan Pemerintah dan telah, dan dapat terus memberikan dampak negatif yang material bagi investasi dan kepercayaan pada, serta kinerja perekonomian Indonesia, dan dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Usaha kami dapat dipengaruhi oleh menyebarnya virus Severe Acute Respiratory Syndrome ("SARS"), flu burung, flu babi (H1N1) atau epidemik lainnya

Pada tahun 2003, beberapa Negara di Asia, termasuk Indonesia, Cina, Vietnam, Thailand dan Kamboja, mengalami penyebaran SARS, *atypical pneumonia* yang sangat menular, yang menyebabkan gangguan serius pada aktivitas ekonomi di, dan penurunan permintaan pada, negara-negara yang terjangkit.

Selama tiga tahun terakhir, sebagian besar Asia mengalami penyebaran baru dari flu burung. Per tanggal 2 Juni 2009, *World Health Organization*, atau WHO menyatakan bahwa total terdapat 262 kematian pada total 433 kasus yang dilaporkan kepada WHO, yang hanya mencakup pelaporan laboratorium atas kasus flu burung. Dari jumlah ini, Kementrian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO bahwa terdapat 115 kematian dari jumlah total 141 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, pada bulan Juni 2006 WHO mengumumkan bahwa transmisi antara manusia akibat flu burung terjadi di Sumatra, Indonesia. Menurut *United Nations Food and Agricultural Organization*, virus flu burung berasal dari 31 propinsi dari 33 propinsi di Indonesia dan usaha untuk menahan penyebarannya telah gagal di Indonesia, hal mana meningkatkan kemungkinan virus tersebut untuk berubah menjadi bentuk yang lebih mematikan. Tidak ada vaksin efektif terhadap flu burung yang telah berhasil dikembangkan dan vaksin tersebut mungkin tidak akan ditemukan tepat waktu untuk mencegah pandemi virus flu burung.

Pada bulan April 2009, terjadi penyebaran virus Influenza A (H1N1), yang berasal dari Meksiko namun telah menyebar secara global, termasuk di wilayah Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura dan daerah lain di Asia. Virus Influenza A (H1N1) dipercaya bersifat sangat menular dan penyebarannya sulit dicegah.

Penyebaran virus SARS, flu burung, Influenza A (H1N1) atau epidemik yang serupa, atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari Negara-negara yang terjangkit, termasuk Indonesia, untuk melawan penyebaran tersebut, dapat berdampak bagi ekonomi Indonesia dan Negara lain dan mengurangi kepercayaan investor, dan oleh sebab itu akan memberikan dampak negatif secara material terhadap keadaan keuangan atau hasil usaha kami.

Gerakan dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Liberalisasi peraturan yang mengijinkan pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan keadaan perekonomian yang lemah, telah menyebabkan, dan akan menyebabkan berlanjutnya keresahan dan aktivitas tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan peraturan ketenagakerjaan yang mengijinkan tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pengusaha. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah mengeluarkan undang-undang tenaga kerja, UU No. 13/2003 ("UU Tenaga Kerja"), yang, antara lain, meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi pada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan mengharuskan forum bipartite yang diikuti oleh pemberi kerja dan pekerja untuk perusahaan yang memiliki 50 atau lebih pekerja. Untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan tersebut, keanggotaan serikat pekerja harus lebih dari 50,0% dari jumlah total pekerja di perusahaan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap keberatan atas keabsahan UU Tenaga Kerja tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Tenaga Kerja adalah sah, kecuali untuk beberapa ketentuan. Pemerintah mengusulkan untuk mengubah UU Tenaga Kerja dengan cara dimana, menurut pandangan aktivis tenaga kerja, dapat berakibat pada menurunnya manfaat pensiun, peningkatan pemakaian tenaga kerja *outsourcing* dan larangan serikat tenaga kerja untuk melakukan mogok kerja. Rancangan perubahan undang-undang tersebut telah ditunda pembahasannya dan peraturan Pemerintah mengenai pemutusan hubungan kerja belum berlaku efektif. Kerusuhan dan gerakan buruh dapat mengganggu bisnis kami dan dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Negara lainnya, yang mana hal ini dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Depresiasi nilai rupiah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha, dan prospek Perusahaan

Salah satu dari penyebab yang paling utama atas terjadinya krisis ekonomi yang dimulai di Indonesia di pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan ketidakstabilan nilai tukar Rupiah, sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar AS. Walaupun Rupiah telah menguat secara tajam dari titik terendah sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, mata uang Rupiah dapat saja kembali mengalami ketidakstabilan di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2009, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS bervariasi dari titik terendah Rp12.400 per Dolar AS hingga mencapai titik tertinggi, yaitu Rp9.051 per Dolar AS. Sebagai akibatnya, kami mencatat kerugian-bersih akibat nilai tukar mata uang asing masing-masing sebesar Rp885,7 miliar pada tahun 2008, dan keuntungan sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009. Kami tidak dapat memastikan bahwa depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing, termasuk Dolar AS tidak akan terjadi lagi. Apabila Rupiah melemah lebih jauh dari nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2009, kewajiban kami atas hutang dagang, hutang pengadaan dan hutang pinjaman serta obligasi kami dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah. Depresiasi lebih lanjut atas Rupiah dapat berakibat pada bertambahnya kerugian pada nilai tukar valuta asing dan akan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan lain-lain dan pendapatan bersih kami.

Sebagai tambahan, walaupun Rupiah secara umum bebas dikonversi dan ditransfer (kecuali bank-bank Indonesia dapat menolak melakukan transfer Rupiah kepada pihak-pihak di luar Indonesia yang tidak mempuyai tujuan perdagangan atau investasi yang jelas), Bank Indonesia, dari waktu ke waktu, telah melakukan intervensi dalam pasar uang dalam rangka melanjutkan kebijakannya, baik dengan

cara menjual Rupiah atau membeli Rupiah dengan menggunakan cadangan mata uang asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan nilai tukar mengambang dari Bank Indonesia tidak akan berubah, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lain untuk menstabilkan, mempertahankan atau menguatkan nilai Rupiah, ataupun bahwa salah satu tindakan-tindakan ini, apabila dilakukan, dapat membuahkan hasil yang baik. Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang dapat berakibat pada sangat meningginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas, diawasinya permodalan atau pertukaran valuta atau tidak diberikannya bantuan dana tambahan oleh para kreditur multinasional. Hal ini dapat berakibat menurunnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, terjadinya cidera janji dalam pembayaran hutang atau berkurangnya penggunaan oleh pelanggan kami, dan sebagai dampaknya, kami juga akan mengalami kesulitan dalam membiayai pengeluaran barang modal dan dalam menjalankan strategi bisnis kami. Salah satu dari konsekuensi-konsekuensi tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Sejak tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat hutang pemerintah (*sovereign rating*) Indonesia dan peringkat hutang dari berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan lainnya di Indonesia. Pada tanggal laporan tahunan ini, hutang jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat "Ba2 stable" oleh Moody's, "BB- positif" oleh Standard & Poor's dan "BB+ stable" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar hutangnya dan kesanggupan dan kemauannya untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo.

Kami tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat hutang Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan. Setiap penurunan peringkat tersebut dapat memiliki dampak negatif bagi likuiditas di pasar uang Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan kami, untuk memperoleh pendanaan tambahan serta tingkat suku bunga serta ketentuan-ketentua komersial lainnya dimana pendanaan tambahan tersedia. Tingkat suku bunga mengambang atas hutang dalam mata uang Rupiah kemungkinan juga akan naik. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional dan prospek kami.

Kami tunduk pada keterbukaan perusahaan dan persyaratan pelaporan yang berbeda dengan negara lain

Sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek New York, kami tunduk pada good corporate governance atau tata penyelenggaraan perusahaan dan persyaratan pelaporan di Indonesia dan Amerika Serikat yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek dari yang berlaku untuk perusahaan yang ada di negara lain. Jumlah informasi yang disediakan untuk umum oleh emiten di Indonesia mungkin lebih sedikit dibanding dengan yang disediakan untuk umum oleh perusahaan sejenis di beberapa negara maju, dan informasi statistik dan keuangan dari tipe tertentu yang disediakan oleh perusahaan di beberapa negara maju mungkin tidak tersedia. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses pada tingkat dan tipe yang sama yang disediakan di negara lain, dan perbandingan dengan perusahaan lain di negara lainnya mungkin tidak dimungkinkan dalam semua aspek.

Kami didirikan di Indonesia, dan investor mungkin tidak dapat melakukan tindakan hukum atau melaksanakan keputusan, terhadap kami di Amerika Serikat, atau untuk memberlakukan putusan pengadilan asing terhadap kami di Indonesia

Kami adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, menjalankan usaha dalam kerangka hukum Indonesia dengan status sebagai perusahaan modal asing, dan hampir semua aktiva kami berada di Indonesia. Selain itu, beberapa Komisaris kami dan

hampir seluruh Direksi kami bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian besar aktiva dari pihak-pihak tersebut berada di luar Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, investor mungkin akan kesulitan dalam melakukan tindakan hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan, terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat, atau memberlakukan putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat.

Penasihat hukum Indonesia kami telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan Amerika Serikat, termasuk putusan-putusan mengenai ketentuan kewajiban perdata dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat, tidak dapat diberlakukan di pengadilan Indonesia, meskipun putusan tersebut dapat dijadikan bukti yang tidak bersifat final dalam pemeriksaan perkara yang diajukan di pengadilan Indonesia. Tidak dapat dipastikan apakah pengadilan Indonesia akan mengeluarkan putusan berdasarkan gugatan asli yang diajukan di hadapannya, yang mana hanya didasarkan pada ketentuan kewajiban perdata (*civil liability*) dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak penggugat harus mengajukan gugatan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di pengadilan Indonesia.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERUSAHAAN

Kami menjalankan usaha di dalam keadaan dimana hukum dan perundang-undangan sedang mengalami reformasi. Reformasi ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang dapat mengakibatkan, antara lain, berkurangnya marjin dan pendapatan usaha, yang semua ini dapat memberikan dampak material yang negatif bagi kami

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1999 telah mendorong liberalisasi industri telekomunikasi sampai pada titik tertentu, termasuk di antaranya kemudahan bagi para pemain baru untuk masuk ke sektor industri telekomunikasi dan perubahan struktur persaingan industri telekomunikasi. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan peraturan tersebut menjadi sedemikian banyak dan rumit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, seiring dengan terus berlangsungnya reformasi di sektor telekomunikasi Indonesia, para pesaing dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari kami mulai memasuki sektor telekomunikasi Indonesia dan bersaing dengan kami dalam menyediakan layanan telekomunikasi.

Sebagai contoh, sejak Januari 2007, Pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Informasi ("Menkominfo"), telah bertanggung jawab untuk menetapkan tarif untuk layanan interkoneksi. Lihat Bab Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko "Risiko-Risiko Terkait Bisnis Kami—Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami." Menkominfo menetapkan tarif interkoneksi untuk penyelenggara telekomunikasi dominan berdasarkan "biaya", berdasarkan Daftar Penawaran Interkoneksi ("DPI") yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi dominan, termasuk kami. Sebaliknya, penyelenggara telekomunikasi yang tidak masuk dalam klasifikasi penyelenggara dominan dapat hanya memberitahukan kepada Menkominfo mengenai tarif mereka dan menerapkan tarif tersebut kepada pelanggan tanpa persetujuan Menkominfo. Perbedaan perlakuan terhadap penyelenggara telekomunikasi dominan dan non-dominan dapat menciptakan peluang bagi pemain baru di bidang indutri telekomunikasi, memperbesar keleluasan bagi mereka dalam menetapkan tarif yang rendah dan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya. Sebagai tambahan, tarif DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan kami memperkirakan penurunan ini akan berlanjut. Penurunan biaya interkoneksi ini dapat menurunkan pendapatan kami dan juga biaya trafik antar-operator.

Baru-baru ini, pada tanggal 25 Januari 2010, Menkominfo menerbitkan peraturan baru dimana penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah diberikan alokasi frekuensi dan kode akses untuk menyediakan jaringan tertentu dikecualikan dari proses seleksi berikutnya apabila penyelenggara tersebut bermaksud untuk mendapatkan ijin jaringan baru dengan kode akses yang lain. Hal ini diharapkan memungkinkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk melakukan ekspansi bisnisnya dengan lebih mudah.

Di masa mendatang, Pemerintah akan mengumumkan atau memberlakukan perubahan peraturan lainnya, seperti perubahan kebijakan interkoneksi atau tarif yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis atau ijin yang kami miliki saat ini. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan berhasil bersaing dengan para penyelenggara telekomunikasi dalam negeri maupun asing atau bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau di kemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami mungkin tidak mampu untuk membiayai pengeluaran barang modal yang dibutuhkan untuk tetap bersikap kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia.

Penyelenggaraan layanan telekomunikasi bersifat padat modal. Agar dapat bersaing, kami harus terus melakukan perluasan, modernisasi dan pembaharuan teknologi infrastruktur telekomunikasi kami, yang memerlukan investasi modal dalam jumlah yang besar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, total pengeluaran modal konsolidasi aktual kami mencapai masing-masing Rp12.285,2 miliar dan Rp11.567,4 miliar (US$1.230,6 juta). Pada tahun 2010, kami berencana untuk mengalokasikan US$550 juta hingga US$700 juta untuk pengeluaran barang modal baru, yang, bersama-sama dengan prakiraan pengeluaran barang modal aktual yang dikeluarkan pada tahun 2010 untuk komitmen pengeluaran barang modal pada periode-periode sebelumnya, diperkirakan akan bernilai kurang lebih US$1.000 juta hingga US$1.200 juta total pengeluaran barang modal aktual untuk tahun 2010. Kemampuan kami untuk membiayai pengeluaran barang modal di masa yang akan datang akan bergantung pada kinerja operasi kami di masa yang akan datang, yang bergantung pada keadaan ekonomi, tingkat suku bunga dan faktor keuangan, bisnis dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kekuasaan kami, dan juga terhadap kemampuan kami untuk memperoleh tambahan pendanaan eksternal. Kami tidak dapat memastikan bahwa pendanaan tambahan akan tersedia, atau apabila ada, dapat diterima secara komersial. Sebagai tambahan kami dapat mendapatkan pendanaan tambahan sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang kami. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat memastikan bahwa kami akan memiliki sumber dana yang mencukupi untuk meningkatkan atau memperluas teknologi infrastruktur telekomunikasi atau memperbaharui teknologi kami yang lainnya yang diperlukan agar dapat tetap bersaing di pasar telekomunikasi Indonesia. Kegagalan kami untuk melakukan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami

Kami bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami dan infrastruktur terkait agar pengoperasian bisnis Perusahaan berhasil. Apabila terjadi perselisihan mengenai interkoneksi, baik yang disebabkan kegagalan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban kontraktual atau karena alasan lainnya, maka satu satu atau lebih layanan kami dapat terhambat, terganggu atau berhenti sama sekali, kualitas layanan kami dapat menurun, *churn* pelanggan kami dapat meningkat atau tarif interkoneksi kami dapat naik. Perselisihan yang melibatkan perjanjian interkoneksi kami saat ini, dan juga kegagalan kami untuk menandatangani atau memperbaharui perjanjian interkoneksi dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami dapat menjadi subyek pembatasan kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 ("Peraturan Presiden"), menetapkan jenis industri dan bidang usaha dalam mana investasi asing dilarang, dibatasi atau harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur oleh institusi Pemerintah yang terkait atau Daftar Negatif Investasi. Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi, dan oleh karena itu investasi asing dalam industri telekomunikasi Indonesia terpengaruh oleh pembatasan dan ketentuan yang berlaku. Daftar Negatif Investasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal, atau BKPM. Pembatasan yang berlaku bagi industri telekomunikasi bergantung pada jenis usaha telekomunikasi yang dilakukan. Pembatasan yang berbeda berlaku tergantung pada apakah usaha tersebut terkait dengan jaringan atau layanan telekomunikasi. Batasan terhadap kepemilikan saham oleh asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang usaha jaringan telekomunikasi berkisar dari 49,0% sampai dengan 65,0%, dan batasan pada kepemilikan saham oleh asing pada perusahaan Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa multimedia (termasuk komunikasi data seperti jasa *wireless broadband*), berkisar dari 49,0% sampai dengan 95,0%. Berdasarkan Pasal 5 dari Peraturan Presiden, pembatasan yang diatur dalam Peraturan tersebut tidak berlaku bagi investasi yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Presiden; dengan ketentuan bahwa investasi tersebut ditetapkan oleh suatu surat persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh BKPM. Dengan demikian, pembatasan yang diatur dalam Peraturan Presiden tidak berlaku pada persetujuan investasi yang telah kami peroleh sebelum berlakunya Peraturan Presiden.

Pada tanggal 22 Juni 2008, Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. ("Qtel"), melalui anak perusahaannya, Qatar South East Asia Holding S.P.C. membeli seluruh saham yang diterbitkan dan yang beredar dari masing-masing Indonesia Communications Limited ("ICLM"), dan Indonesia Communications Ptd. Ltd. ("ICLS") dari Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. ("AMH"), sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura. Setelah akuisisi ini, perubahan pengendalian terjadi di Perusahaan dan mewajibkan Qtel untuk melakukan penawaran tender. Sehubungan dengan penawaran tender, pada tanggal 23 Desember 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia ("Bapepam-LK"), mengeluarkan surat (i) menyatakan bahwa Bapepam-LK telah menerima surat dari BKPM tertanggal 19 Desember 2008, dimana BKPM mengkonfirmasikan bahwa jumlah maksimal kepemilikan saham asing di Perusahaan adalah 65,0%, dan bahwa Perusahaan masih tetap dapat melakukan kegiatan operasional jaringan selularnya dan usaha jaringan tetap lokal dan (ii) memberikan ijin kepada Qtel untuk melakukan penawaran tender. Menyusul keluarnya surat tersebut, Qtel melakukan penawaran tender untuk membeli hingga 1.314.466.775 Saham Seri B, mewakili kira-kira 24,19% dari total Saham Seri B yang telah diterbitkan dan telah beredar (termasuk Saham Seri B dalam bentuk ADS).

Sebagai perseroan terbuka, kami percaya bahwa Daftar Negatif Investasi tidak berlaku bagi kami. Selain itu, kami mengetahui bahwa BKPM saat ini sedang memikirkan untuk mengubah Peraturan Presiden suatu waktu di tahun 2010. Terdapat kesepakatan di antara pejabat pemerintah bahwa perubahan dapat membatasi kemampuan investor asing untuk memiliki saham mayoritas di perusahaan-perusahaan terdaftar yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang dibatasi.

Apabila pihak regulator yang berwenang hendak memberlakukan Daftar Negatif Investasi terhadap Perusahaan, terlepas dari status Perusahaan sebagai perseroan terbuka, pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham asing lain kami dapat diminta untuk mengurangi kepemilikan sahamnya pada Perusahaan, hal mana dapat mempengaruhi penurunan harga perdagangan saham Perusahaan dan dapat memiliki pengaruh negatif yang material terhadap usaha, kondisi keuangan, dan prospek kami. Kami juga dapat diharuskan untuk memisahkan bidang usaha kami menjadi dua bagian, jaringan bergerak atau selular dan jaringan tetap atau jaringan tertutup tetap, agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemisahan bidang usaha kami ke dalam dua sektor dapat dilakukan melalui pengalihan kegiatan jaringan tetap atau jaringan bergerak atau selular kami kepada anak Perusahaan atau pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami secara material dan dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan usaha kami. Sebagai tambahan, apabila pihak regulator yang berwenang menetapkan bahwa kepemilikan asing di Perusahaan masih melebihi batasan yang ditetapkan dalam Daftar Negatif Investasi, regulator yang berwenang mungkin melarang kami untuk mengikuti tender atau untuk memperoleh izin lain atau spektrum tambahan. Apabila hal ini terjadi, usaha, peluang, kondisi keuangan dan hasil usaha kami menjadi terpengaruh.

Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, gateway menuju jaringan kami atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Untuk menyediakan layanan kami, Perusahaan sangat bergantung pada lancarnya pengoperasian jaringan. Misalnya, Perusahaan bergantung pada akses ke PSTN untuk terminasi dan sumber panggilan selular ke dan dari telepon dengan jaringan tetap, dan sebagian besar dari trafik sambungan selular dan sambungan jarak jauh internasional Perusahaan disalurkan melalui PSTN. Terbatasnya fasilitas interkoneksi PSTN yang tersedia untuk Perusahaan telah memberikan dampak negatif bagi bisnis kami pada masa lalu dan dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami di masa mendatang.

Oleh karena hambatan kapasitas interkoneksi, para pelanggan selular kami sesekali mengalami kesulitan dalam melakukan panggilan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa fasilitas interkoneksi ini akan ditingkatkan atau dipertahankan pada level saat ini.

Perusahaan juga bergantung pada beberapa sistem informasi manajemen atau sistem lainnya yang canggih dalam hal teknologi, seperti sistem tagihan pelanggan yang membuat kami dapat menjalankan bisnis. Selain itu, kami cukup bergantung pada interkoneksi ke jaringan operator telekomunikasi lainnya yang menghubungkan sambungan telepon para pelanggan kami ke para pelanggan operator telepon jaringan tetap dan para operator selular lainnya baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jaringan kami, yang meliputi sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur, dan jaringan para operator lainnya dengan mana para pelanggan kami berinterkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan dan gangguan operasi akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, putusnya aliran listrik, tidak berfungsinya perangkat, cacat pada *software* jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa-peristiwa yang serupa. Misalnya, pusat pengendali telekomunikasi dan fasilitas *back-up* teknologi informasi kami sangat berkonsentrasi di kantor pusat dan *principal operating and tape back-up storage facilities* di dua tempat di Jakarta. Setiap kegagalan yang mengakibatkan gangguan pada operasional kami atau penyediaan salah satu layanan, baik akibat gangguan operasional, bencana alam atau lainnya, dapat menghambat kami dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, yang mana hal ini dapat menyebabkan para pelanggan menjadi sangat tidak puas dan memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Industri telekomunikasi terbentuk dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Kami dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari segi teknologi yang saat ini sedang dikembangkan atau yang mungkin dikembangkan di kemudian hari. Perkembangan atau penerapan teknologi, layanan atau standar baru atau alternatif di masa mendatang memerlukan perubahan besar terhadap model bisnis Perusahaan, pengembangan produk baru, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, perkembangan teknologi konvergensi telepon tetap-selular yang dapat membuat sambungan telepon yang berasal dari selular tidak melalui jaringan selular, tetapi sebaliknya melalui jaringan telepon tetap, dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis Perusahaan. Pengembangan produk dan layanan baru membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat mengakibatkan lahirnya pesaing baru di pasar. Kami tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perubahan teknologi yang baru muncul dan yang akan ada di kemudian hari dapat mempengaruhi operasional atau daya saing layanan kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa teknologi kami tidak akan menjadi usang, atau tidak akan mendapat persaingan dengan teknologi baru di masa mendatang, atau bahwa kami akan dapat memperoleh teknologi baru yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, agar dapat bersaing di situasi yang telah berubah. Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami secara merugikan.

Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dari para pesaing utama kami, yaitu Telkom dan Telkomsel. Pemerintah dapat memberikan prioritas pada bisnis Telkom dan Telkomsel daripada Perusahaan

Per tanggal 31 Desember 2009, Pemerintah memiliki saham sebanyak 14,29% di Perusahaan, termasuk satu saham Seri A, yang memiliki hak suara istimewa dan hak veto atas beberapa hal strategis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk

keputusan untuk pembubaran, likuidasi dan mengajukan kepailitan dan memperbolehkan Pemerintah untuk menominasikan satu Direktur dari Direksi dan satu Komisaris dari Dewan Komisaris.

Per tanggal 31 Desember 2009, Pemerintah juga memiliki saham sebanyak 52,47% di Telkom, yang merupakan pesaing utama kami di sektor jasa telepon tetap SLI. Per tanggal yang sama, Telkom memiliki saham sebanyak 65,0% di Telkomsel, salah satu pesaing utama kami dalam penyelenggaraan jasa selular. Persentase kepemilikan saham Pemerintah di Telkom jauh lebih besar dibandingkan di Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana Pemerintah akan banyak mendukung bisnis Perusahaan atau bahwa Pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada Telkom dan Telkomsel serta Perusahaan ketika memberlakukan keputusan-keputusan di kemudian hari, atau ketika menggunakan wewenang regulasinya terhadap industri telekomunikasi Indonesia. Jika Pemerintah memberikan prioritas kepada kegiatan usaha Telkom atau Telkomsel daripada Perusahaan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek perusahaan kami.

Kepentingan para pemegang saham pengendali kami dapat berbeda dengan kepentingan para pemegang saham lainnya

Per tanggal 31 Desember 2009, Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. ("Qtel Asia"), memiliki sekitar 65% saham yang telah ditempatkan dan disetor kami. Qtel Asia saat ini seluruhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Qtel, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Qatar dan pihak terkaitnya. Qtel Asia dan pemegang saham pengendalinya dapat menggunakan kendalinya atas bisnis Perusahaan dan dapat membuat kami mengambil tindakan-tindakan yang tidak berhubungan dengan, atau dapat berbenturan dengan, kepentingan terbaik kami ataupun para pemegang saham lainnya dari Perusahaan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan kebijakan kami. Meskipun orang-orang yang ditunjuk oleh Qtel Asia memegang jabatan baik di dalam Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pemegang saham pengendali kami akan menunjuk direksi dan komisaris atau untuk dapat mempengaruhi usaha kami dengan cara yang menguntungkan para pemegang saham lainnya.

Kami mengandalkan personil manajemen inti, dan bisnis kami dapat terkena dampak negatif apabila tidak mampu mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti

Kami yakin bahwa tim manajemen kami saat ini telah memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian yang besar dalam mengelola bisnis Perusahaan. Keberhasilan bisnis kami dan kemampuan kami dalam melaksanakan strategi-strategi bisnis kami di masa mendatang sangat bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh personil inti kami. Personil yang terampil di sektor industri telekomunikasi di Indonesia tidak banyak jumlahnya dan kelangkaan ini mungkin akan terus terjadi. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan personil ahli tertentu menjadi semakin tinggi. Selain itu, seiring dengan masuknya para pemain baru di pasar yang mulai menjalankan atau memperluas bisnisnya di Indonesia, beberapa karyawan inti kami dapat meninggalkan jabatannya saat ini. Ketidakmampuan kami dalam mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti dapat memberikan dampak negatif yang material bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa kami terbukti bersalah melakukan penetapan harga dan gugatan class action, kami dapat dikenakan sanksi yang cukup besar sehingga dapat menurunkan pendapatan kami dan berdampak pada bisnis, reputasi dan keuntungan kami

Pada tanggal 1 November 2007, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"), telah mengeluarkan putusan mengenai pemeriksaan awal terhadap kami dan delapan perusahaan telekomunikasi lainnya dengan tuduhan penetapan harga SMS dan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli ("Undang-Undang No. 5/1999"). Pada 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa Telkom, Telkomsel, XL Axiata Tbk ("XL"), PT Bakrie Telecom ("Bakrie Telekom"), PT Mobile-8 Telecom Tbk ("Mobile 8"), dan PT Smart Telecom ("Smart Telecom") secara bersama-sama telah melanggar Pasal 5 UU No.

5/1999. Mobile-8 mengajukan keberatan atas putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Telkomsel, XL, Telkom, Indosat, PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison"), Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Selular ("Natrindo") dipanggil untuk menghadap sebagai turut termohon dalam perkara ini, sedangkan Telkomsel mengajukan keberatan terhadap putusan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun KPPU memutuskan bahwa kami tidak bersalah terhadap tuduhan penetapan harga SMS, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pengadilan Negeri akan menguatkan putusan KPPU. Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan keberatan terhadap putusan KPPU berdasarkan pemeriksaan kembali atas putusan KPPU dan dokumen kasus yang diserahkan kepada KPPU. Jika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan kepentingan kami, kami dapat diharuskan untuk membayar denda, yang jumlahnya akan berada sepenuhnya pada keputusan Pengadilan Negeri, hal mana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Sebagai tambahan, selama tahun 2007 dan 2008 beberapa gugatan *class action* telah ditujukan kepada Perusahaan dan Telkomsel di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, berkaitan dengan kepemilikan silang Temasek sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh telah mengakibatkan pengaturan harga telekomunikasi sehingga merugikan masyarakat. Penggugat telah menarik kembali gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi. Pada tanggal 27 Januari 2010, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima karena para penggugat menolak untuk membuktikan kewenangan mereka dan bahwa dua anggota penggugat tidak memenuhi syarat sebagai perwakilan dari *class action*. Karena jangka waktu mengajukan banding telah berakhir pada tanggal 18 Maret 2010, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2010 menjadi mengikat.

Perkara class action Tangerang dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 2010, dimana tergugat memasukkan eksepsi dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2010 majelis hakim memutuskan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima karena ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatan dan penggugat juga gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai perwakilan dari class action. Walaupun gugatan class action tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang serta gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi telah ditarik kembali, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pelanggan tidak akan mengajukan gugatan yang serupa di kemudian hari. Jika terdapat gugatan *class action* baru dan Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang menguntungkan para penggugat, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Kami terekspos dengan risiko tingkat bunga

Hutang kami mencakup pinjaman-pinjaman bank untuk membiayai usaha kami. Apabila memungkinkan, kami berusaha meminimalisir eksposur risiko tingkat bunga kami dengan mengadakan kontrak *swap* untuk mengubah tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap selama jangka waktu tertentu bagi pinjaman-pinjaman kami. Bagaimanapun, kebijakan lindung nilai kami tidak dapat secara cukup menutupi risiko kami terhadap fluktuasi tingkat bunga dan hal ini dapat berakibat pada beban bunga yang besar dan dapat mempengaruhi bisnis, keadaan keuangan dan hasil usaha kami secara negatif.

Kami terekspos dengan risiko counter-party

Kami dapat mengadakan beberapa transaksi dari waktu ke waktu yang dapat mengekspos kami kepada kredit para *counterparty* kami dan kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak mereka dengan kami. Sebagai contohnya, kami dapat menandatangani kesepakatan *swap*, yang mengekspos kami pada risiko di mana para *counterparty* dapat melakukan wanprestasi dalam kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang relevan. Apabila *counterparty*, termasuk institusi keuangan, dinyatakan pailit atau menjadi insolven, hal ini dapat berakibat pada penundaan dalam mendapatkan dana atau Perusahaan harus melakukan likuidasi terhadap posisi kami, yang dapat mengakibatkan kerugian.

Kami mungkin tidak dapat tidak dapat mengelola risiko pertukaran valuta asing kami secara sukses

Perubahan nilai tukar mata uang telah mempengaruhi dan mungkin terus mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha kami. Sebagian besar dari kewajiban pembayaran hutang kami adalah dalam Rupiah dan sebagian besar pengeluaran barang modal kami adalah dalam mata uang Dolar AS. Sebagian besar pendapatan kami adalah dalam mata uang Rupiah namun sebagian pendapatan usaha kami adalah dalam Dolar AS atau yang terkait dengan Dolar AS. Kami juga mungkin akan memiliki hutang jangka panjang lainnya dalam mata uang selain dari Rupiah, termasuk Dolar AS, untuk membiayai pengeluaran barang modal tambahan.

Kami saat ini melakukan lindung nilai atas sebagian kewajiban kami dalam mata uang asing terutama karena pendapatan usaha tahunan kami dalam mata uang Dolar AS lebih kecil dari seluruh biaya operasi kami dalam mata uang Dolar AS, seperti beban usaha kami dalam Dolar AS dan pembayaran hutang pokok dan bunga dalam mata uang Dolar AS. Pada tahun 2005, dalam rangka upaya mengelola eksposur valuta asing kami dan menurunkan biaya pendanaan kami secara keseluruhan, kami mengadakan kontrak swap valuta asing dengan tiga lembaga keuangan internasional yang berbeda. Dari tahun 2006 sampai tahun 2009, kami mengadakan beberapa kontrak swap valuta asing dengan tujuh lembaga keuangan internasional sebagai usaha untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing kami. Untuk kontrak-kontrak ini, kami membayar biaya di muka atau suku bunga premi tetap. Kami tidak dapat memastikan bahwa kami dapat berhasil mengelola risiko valuta asing di masa yang akan datang atau bahwa bisnis, keadaan keuangan atau hasil usaha kami tidak akan terkena dampak negatif dengan adanya eksposur terhadap risiko nilai tukar tersebut. Lihat "Diskusi Manajemen dan Analisa Keadaan Keuangan dan Hasil Usaha – Pengungkapan Kuantitatif dan kualitatif mengenai Risiko Pasar".

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN BISNIS JASA SELULAR PERUSAHAAN

Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa selular Perusahaan

Persaingan di industri jasa selular sangat tinggi. Persaingan di antara para penyedia jasa selular di Indonesia didasarkan pada berbagai faktor seperti harga, kualitas dan cakupan jaringan, ragam layanan, fitur yang ditawarkan serta pelayanan pelanggan. Bisnis jasa selular kami bersaing terutama dengan Telkomsel dan XL. Beberapa penyelenggara GSM dan CDMA kecil lainnya juga menyediakan jasa selular di Indonesia, termasuk Hutchison, Natrindo dan Smart Telecom. Selain para penyelenggara jasa selular yang ada, Menkominfo dapat kembali memberikan ijin penyelenggaraan jasa selular di kemudian hari, dan pemain baru tersebut akan bersaing dengan kami.

Kami memperkirakan persaingan dalam usaha jasa selular akan semakin ketat. Penyedia jasa selular yang baru maupun yang telah ada dapat menawarkan paket produk dan jasa yang lebih menarik atau teknologi baru atau konvergensi dari beberapa layanan telekomunikasi, dan mengakibatkan *churn rates* yang lebih tinggi, ARPU yang lebih rendah atau pengurangan, atau lambatnya pertumbuhan jumlah pelanggan selular kami. Pada tahun 2009, persaingan yang berlanjut pada pemain lama dan pemain baru dalam pasar jasa selular berakibat pada kampanye harga yang agresif oleh penyelenggara jasa selular. Penurunan harga penggunaan selular juga berakibat pada peningkatan jumlah pelanggan dan pada trafik jaringan, berakibat pada peningkatan kepadatan jaringan antara operator, yang mengharuskan kami untuk melakukan penambahan pengeluaran barang modal untuk terus memperluas jaringan kami. Sebagai tambahan, teknologi yang digunakan oleh operator CDMA dan jaringan bergerak tetap bersifat kurang padat modal, sehingga memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan operator GSM.

Lahan persaingan dalam bisnis jasa selular juga dapat dipengaruhi oleh konsolidasi industri. Pada bulan Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian kerja sama untuk memakai logo dan merek yang sama di bawah nama "smartfren." Penyelenggara jasa selular lainnya mungkin akan melakukan konsolidasi yang sama di masa yang akan datang.

Persaingan dari para operator yang menggunakan teknologi baru, serta dengan operator baru, operator lama dan konsolidasi antar operator dapat menimbulkan dampak merugikan bagi posisi, bisnis jasa selular, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Banyaknya jaringan selular dan terbatasnya ketersediaan spektrum dapat menghambat peningkatan jumlah pelanggan selular kami dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan selular Perusahaan

Kami berniat untuk meneruskan rencana promosi kami untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pemakaian jaringan kami oleh pelanggan selular kami. Kami juga berniat untuk terus mempromosikan layanan data kami termasuk jasa BlackBerry™ dan layanan *wireless broadband* kami. Sebagai akibatnya, kami mungkin akan mengalami peningkatan kepadatan jaringan, yang dapat mempengaruhi performa jaringan kami dan merusak reputasi kami di mata pelanggan. Selain itu, pemakaian selular yang lebih tinggi di area perkotaan yang padat mungkin menuntut kami untuk menggunakan teknik rekayasa frekuensi radio, yang meliputi rancangan selular makro, mikro dan *indoor*, untuk mempertahankan kualitas jaringan selular kami walaupun terjadi gangguan frekuensi radio dan pola pemakaian ulang radio frekuensi yang lebih ketat. Meskipun demikian, apabila jumlah pengguna selular kami atau penggunaan layanan suara dan data kami bertumbuh secara signifikan di area-area dengan kepadatan yang tinggi, kami tidak dapat menjamin bahwa usaha-usaha ini akan cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk mendukung permintaan tambahan bagi jaringan kami, kami mungkin dituntut untuk melakukan pengeluaran barang modal yang signifikan untuk memperbaiki cakupan jaringan kami. Pengeluaran barang modal tambahan tersebut, bersama dengan kemungkinan penurunan jasa selular kami, dapat berdampak buruk bagi posisi persaingan kami, bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Terlepas dari dikeluarkannya dana yang besar untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami, jumlah pelanggan selular meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan usaha kami

Kami telah menggunakan sumber dana yang cukup banyak untuk mengembangkan dan memperluas jaringan selular kami serta untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami. Namun demikian, ketidakpastian atas situasi ekonomi di Indonesia dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli pelanggan selular kami. Terlebih lagi, terus menurunnya tarif efektif untuk penggunaan telepon sebagai dampak kampanye "free-talk" dan promosi diskon tarif baru-baru ini, peningkatan pemakaian SMS, usaha kami untuk membersihkan pelanggan kami dan penetrasi selular yang lebih tinggi pada segmen pasar berpenghasilan rendah telah mengakibatkan penurunan ARPU dan penurunan jumlah pelanggan selular kami pada tahun 2009. Jumlah pelanggan selular kami (termasuk pelanggan *wireless broadband*) meningkat kurang lebih 24,5 juta per tanggal 31 Desember 2007 menjadi kurang lebih 36,5 juta per tanggal 31 Desember 2008, dan kurang lebih 33,1 juta per tanggal 31 Desember 2009. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, ARPU kami masing-masing adalah sebesar 38.639, dan Rp37.330. Walaupun kami bermaksud untuk terus menggunakan sumber pendanaan yang signifikan untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami dan untuk memperluas jaringan selular kami untuk mendukung permintaan dari penambahan jumlah pelanggan selular, kami tidak dapat menjamin bahwa pengeluaran tersebut akan diikuti dengan peningkatan ARPU atau pendapatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, biaya akuisisi pelanggan kami dan pengeluaran barang modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas jaringan kami dapat mengalami peningkatan tanpa mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pendapatan atau laba kami, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha kami dan prospek kami.

Kami mengalami churn rate yang tinggi

Kami mengalami *churn rate* yang tinggi, sebagaimana umumnya dialami oleh operator telekomunikasi Indonesia yang menyelenggarakan jasa selular prabayar. Kami percaya bahwa *churn rate* kami yang tinggi disebabkan oleh fakta bahwa banyak pelanggan prabayar kami yang memiliki lebih dari satu kartu SIM dari berbagai operator selular, yang memungkinkan mereka untuk memilih paket yang termurah. Kami yakin bahwa *high churn* kami juga sebagai dampak atas usaha kami, selama sembilan bulan pertama tahun 2009, untuk membersihkan basis pelanggan kami dengan cara menekan perilaku "*calling card*" dan memfokuskan diri kepada loyalitas konsumen. Kami percaya bahwa pelanggan-pelanggan tersebut merupakan pelanggan-

pelanggan jangka pendek yang kemungkinan tidak mengisi ulang kartu SIM tersebut. Tingginya *churn rates* kami dapat berakibat pada menurunnya pendapatan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha kami.

Kami bergantung pada ketersediaan infrastuktur menara telekomunikasi

Kami sangat tergantung pada menara telekomunikasi kami dan yang lainnya, untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi seperti selular GSM, FWA dan 3G dan jasa telekomunikasi bergerak selular dengan memasang pemancar dan antena penerima dan fasilitas pendukung BTS lainnya pada menara tersebut. Ketersediaan dan pemasangan menara telekomunikasi tersebut memerlukan izin dari instansi berwenang di pusat dan daerah. Baru-baru ini, beberapa instansi berwenang di daerah telah memberlakukan peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mensyaratkan kewajiban berbagi penggunaan menara di antara berbagai operator telekomunikasi. Selain itu, pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo telah mengeluarkan Peraturan tentang penggunaan menara bersama telekomunikasi. Lihat Bab Informasi tentang Perusahaan - Peraturan mengenai Industri Telekomunikasi di Indonesia – Kewajiban Menara telekomunikasi bersama . Berdasarkan peraturan tersebut, pendirian menara telekomunikasi memerlukan izin dari Pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah berhak menentukan wilayah penempatan dan lokasi dapat dibangunnya menara telekomunikasi tersebut. Suatu peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo, serta BKPM pada 30 Maret 2009, juga mewajibkan tiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi harus memperoleh ijin mendirikan menara untuk menunjukkan kepatuhan pada beberapa spesifikasi teknis. Apabila suatu menara tidak memperoleh ijin tersebut, maka pihak berwenang di daerah berhak untuk menentukan denda yang diberikan kepada pemilik menara. Selanjutnya, suatu penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi wajib memperbolehkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menaranya (selain menara yang digunakan sebagai jaringan utamanya), tanpa diskriminasi apapun.

Peraturan baru ini mewajibkan kami untuk menyesuaikan rencana pembangunan menara telekomunikasi kami, dan rencana menyewakan, melakukan relokasi menara telekomunikasi yang sudah ada dan memperbolehkan operator lainnya untuk menggunakan menara kami serta melakukan hal-hal lain yang dapat berdampak pada meningkatnya biaya pendirian menara telekomunikasi, keterlambatan dalam konstruksi menara dan gangguan terhadap layanan untuk pelanggan kami. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban ini atau memenuhi target kapasitas jaringan untuk menara telekomunikasi kami, kami mungkin dapat memperoleh hambatan dalam mengembangkan dan menyediakan jasa GSM selular, FWA dan 3G. Ketergantungan kami terhadap menara telekomunikasi, digabungkan dengan beban penggunaan menara telekomunikasi bersama, dapat menyebabkan dampak negatif terhadap daya saing kepada operator lain. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kapasitas jaringan kami, reputasi, bisnis, kegiatan usaha, hasil penyelenggaraan serta prospek Perusahaan.

Kemampuan kami untuk memelihara dan memperluas jaringan selular atau menjalankan usaha kami dapat dipengaruhi oleh gangguan pemasokan dan layanan dari para pemasok utama kami

Perusahaan bergantung pada beberapa pemasok utama untuk menyediakan sebagian besar perangkat yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperluas jaringan selular, termasuk *microwave backbone*, dan pada beberapa pemasok lainnya berkenaan dengan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha kami. Perusahaan mengandalkan perangkat dan barang dan jasa lainnya dari para pemasok tersebut untuk memelihara dan mengganti komponen utama dari jaringan selular dan untuk menjalankan usaha kami. Apabila kami tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mencukupi secara tepat waktu atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, atau apabila terjadi kenaikan harga yang tajam atas barang atau jasa tersebut, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kami untuk dapat memelihara dan memperluas jaringan selular dan hasil keuangan, usaha serta prospek Perusahaan.

Kami bergantung pada ijin-ijin yang kami miliki untuk menyelenggarakan jasa selular, dan ijin-ijin ini dapat dibatalkan apabila kami tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin tersebut

Kami bergantung pada ijin yang dikeluarkan oleh Menkominfo untuk penyelenggaraan jasa selular serta penggunaan alokasi spektrum frekuensi. Menkominfo, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengubah ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atas kebijakannya sendiri. Apabila kami melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin-ijin tersebut atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka ijin-ijin kami dapat dicabut. Apabila terjadi pencabutan atau perubahan yang tidak menguntungkan terhadap ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atau kami tidak dapat memperbaharui ijin-ijin tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang serupa, maka hal ini dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Data pelanggan kami terkait dengan operasi kami tidak dapat dibandingkan antar periode

Kami mendefinisikan "pelanggan selular aktif" sebagai pelanggan selular prabayar yangmelakukan pengisian ulang kartu SIM segera dalam 33-hari masa "tenggang waktu" setelah masa kartu SIM berakhir dengan cara menambah jumlah minimal pulsa ke dalam kartu SIM.

Kami telah dari waktu ke waktu mengurangi masa tenggang waktu yang berlaku untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar untuk lebih mencerminkan pelanggan pra bayar yang mengisi ulang kartu SIM milik mereka secara lebih akurat. Penambahan atau pengurangan masa tenggang berakibat pada perhitungan jumlah pelanggan kami, Minutes per Usage setiap pelanggan dan ARPU.

Sebagai akibat diatas, jumlah pelanggan kami, Minutes per Usage setiap pelanggan dan ARPU tidak akan mencerminkan jumlah aktual dari pelanggan-pelangan dan tidak dapat dibandingkan antar periode. Dengan demikian, anda sebaiknya tidak menggantungkan keakuratan data ini atau membandingkan data ini dari waktu ke waktu.

Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha,kondisi keuangan dan hasil usaha kami

Saat ini kami diwajibkan untuk membayar biaya frekuensi berdasarkan jumlah unit *transmitter* dan *receiver* (atau *transceiver*) pada suatu BTS di jaringan telekomunikasi GSM kami. Biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi GSM kami dibayarkan secara periodik di muka berdasarkan tagihan yang diterima dari Pemerintah. Biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi 3G kami dibayarkan per tahun di muka secara *lump sum*, berdasarkan formula yang ditentukan oleh Pemerintah. Selama kami meningkatkan jumlah BTS kami untuk meningkatkan jumlah pelanggan kami, biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi GSM kami juga akan meningkat, sehingga meningkatkan biaya operasional kami. Hal ini dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Anggapan adanya risiko kesehatan sebagai akibat dari medan elektromagnetik yang ditimbulkan dari BTS dan peralatan telepon genggam, serta gugatan hukum dan publikasi mengenai hal tersebut, tanpa memperhatikan nilainya, dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami

Beberapa spekulasi mengenai risiko terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik dari BTS dan penggunaan telepon genggam telah timbul di masyarakat. Kami tidak dapat menjamin bahwa penelitian di masa mendatang mengenai risiko kesehatan ini tidak akan menyimpulkan adanya hubungan antara medan elektromagnetik dan dampak merugikan terhadap kesehatan sehingga Perusahaan dapat menjadi subyek gugatan dari individu yang menuduh adanya cidera atau hal-hal lainnya, yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha kami.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS LAYANAN DATA TETAP ("MIDI")

Persaingan layanan MIDI kami meningkat, dan kami mungkin akan mengalami penurunan marjin dari jasa tersebut seiring dengan meningkatnya persaingan

Layanan MIDI kami menghadapi persaingan yang semakin ketat dari para operator baru dan operator yang telah ada, yang mungkin memiliki basis pelanggan yang lebih banyak dan sumber dana yang lebih besar dari Perusahaan, seperti Telkom, yang memiliki jangkauan internasional yang luas dan infrastruktur dalam negeri yang telah berkembang. Selain itu, para operator seperti XL, First Media dan Icon+, beberapa di antaranya yang mempunyai aliansi dengan operator telekomunikasi asing, bersaing dengan kami di segmen bisnis ini. Pada tahun 2009, layanan jasa World Link kami menghadapi peningkatan persaingan dengan diluncurkannya layanan kabel internasional "Matrix" oleh PT NAP Info Lintas Nusa pada bulan Agustus 2008.

Bisnis satelit kami juga menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring dengan diluncurkannya satelit-satelit baru dan berkemampuan lebih besar dan dengan adanya beberapa perusahaan yang memperoleh ijin eksklusif untuk menyelenggarakan jasa penyiaran di Indonesia. Kami menyewakan satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami untuk jangka waktu antara dua sampai lima tahun, dan kami perkirakan sisa umur produktif satelit tersebut adalah berkisar empat dan 10,7 tahun. Mengingat adanya satelit-satelit lain yang beroperasi dan sewa *transponder* kami yang akan berakhir atau diakhiri dan adanya persaingan harga yang semakin ketat, maka pihak penyewa *transponder* kami kemungkinan akan menggunakan satelit-satelit lain, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasional dan pendapatan usaha kami dari sektor jasa ini.

Satelit kami memiliki umur produktif yang terbatas dan dapat rusak atau benar-benar musnah selama pengoperasiannya. Hilangnya atau menurunnya kinerja satelit kami, baik yang disebabkan kerusakan perangkat atau dicabutnya ijin, dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan, hasil usaha dan kemampuan untuk menyediakan beberapa layanan Perusahaan

Satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami mempunyai umur produktif yang terbatas, saat ini diperkirakan berakhir masing-masing pada tahun 2014 dan 2020. Beberapa faktor mempengaruhi umur produktif satelit, di antaranya kualitas dari konstruksi, daya tahan sistem, subsistem dan komponen, cadangan minyak *on-board*, keakuratan dari peluncuran mereka menuju orbit, risiko *badai mikrometeroit*, atau bencana alam lain di luar angkasa, benturan dengan puing orbital, atau yang digunakan dan cara satelit tersebut dimonitor dan dioperasikan. Saat ini kami menggunakan kapasitas *transponder* satelit kami sehubungan dengan berbagai aspek dari bisnis kami, termasuk sewa langsung untuk kapasitas tersebut dan untuk menyalurkan sambungan jarak jauh internasional dan jasa selular kami. Kami memperhatikan, bahwa berdasarkan faktor-faktor yang diatas, satelit Palapa-C2 kami dapat saja tidak berfungsi sebelum 2014 dan satelit Palapa-D dapat tidak berfungsi sebelum 2020, dan perbaikan di orbit tidak memungkinkan kecuali perbaikan-perbaikan terhadap perangkat lunak dasar –perbaikan peranti lunak atau operasional. Selanjutnya, Peraturan International Telecommunications Union ("ITU") menyatakan bahwa slot satelit yang telah ditentukan sudah dialokasikan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak menentukan pihak mana yang akan diberikan ijin untuk menggunakan slot tersebut. Meskipun kami saat ini memiliki ijin untuk menggunakan slot satelit yang telah ditentukan, apabila satelit Palapa-D kami mengalami masalah teknis atau tidak berfungsi, Pemerintah dapat menyatakan bahwa kami tidak berhasil memanfaatkan slot yang ada berdasarkan ijin yang diberikan kepada kami, dan dengan demikian Pemerintah dapat mencabut ijin kami dan memberikannya kepada salah satu pesaing kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami akan dapat terus mempertahankan penggunaan slot satelit yang telah ditentukan dengan cara yang dianggap baik oleh Pemerintah.

Kami memelihara asuransi *in-orbit* satelit Palapa-C2 dan satelit Palapa-D kami dengan syarat dan ketentuan yang konsisten dengan praktik industri. Terhitung sejak 31 Desember 2009, kami telah memiliki polis asuransi dengan total nilai pertanggungan sebesar US$216.3 juta, untuk jumlah kerugian keseluruhan dan sebagian yang diderita satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami. Apabila kerusakan atau kegagalan tersebut mengakibatkan satelit kami tidak layak lagi untuk digunakan, maka kami mungkin akan memilih untuk menghentikan pengoperasian satelit atau menyewa kapasitas *transponder* dari penyelenggara pihak ketiga daripada membeli satelit baru. Penghentian bisnis satelit kami dapat meningkatkan biaya operasional yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi lainnya dan mungkin dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan dan hasil usaha Perusahaan.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS JASA TELEKOMUNIKASI TETAP KAMI

Masuknya operator telekomunikasi Indonesia lainnya sebagai penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasi, pangsa pasar dan hasil usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap

Telkom, perusahaan telekomunikasi Indonesia yang telah lama berdiri dengan sumber-sumber keuangan dan politik yang kuat, telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan jasa sambungan jarak jauh internasional dan meluncurkan layanan komersialnya di tahun 2004. Sebagai akibat dari masuknya Telkom ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, kami kehilangan pangsa pasar dan mengalami dampak negatif lainnya yang mempengaruhi usaha jasa telekomunikasi tetap kami. Pada akhir tahun 2006, Telkom telah menguasai pangsa pasar yang jauh lebih besar dari kami untuk sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pada tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan ijin baru untuk penyelenggaraan jasa sambungan jarak jauh internasional kepada Bakrie Telekom dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih besar lagi di pasar jasa sambungan jarak jauh internasional. Pemain lama dan munculnya operator baru ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, termasuk jasa penyelenggaraan VoIP yang dilakukan oleh sejumlah operator, secara berkelanjutan menimbulkan ancaman persaingan yang signifikan kepada Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa dampak negatif tersebut tidak akan terus berlanjut atau bahwa meningkatnya persaingan tidak akan terus mengikis pangsa pasar kami atau memberikan dampak negatif bagi marjin operasi dan hasil usaha kami di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional.

Kami menghadapi risiko berkenaan dengan pembukaan kode akses baru untuk sambungan jarak jauh

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan telepon SLJJ. Pada bulan April 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa penggunaan kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilakukan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada bulan Desember 2007, Pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk membuka kode akses SLJJ di kota pertama di Balikpapan pada bulan April 2008. Sejak tanggal pelaksanaan tersebut, penduduk Balikpapan akan dapat memilih untuk menggunakan kode akses "0", "011" atau "017" untuk melakukan panggilan jarak jauh.

Pada bulan April 2008, Perusahaan dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari masing-masing pelanggan kami di Balikpapan. Penggunaan kode akses SLJJ tersebut di kota-kota lain akan dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRTI. Implementasi akses SLJJ baru dapat secara potensial meningkatkan persaingan dengan menawarkan kepada pelanggan kami lebih banyak pilihan untuk layanan SLJJ. Selain itu, pembukaan kode akses SLJJ baru tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kompetisi dan berkurangnya kerjasama oleh operator saat ini, yang dapat mengakibatkan berkurangnya marjin dan pendapatan operasional, yang seluruhnya dapat menimbulkan dampak material yang negatif kepada kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kode akses kami akan terus ada atau dapat berhasil meningkatkan pendapatan Perusahaan dari sektor SLJJ.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN **ATAS KEADAAN KEUANGAN DAN HASIL USAHA**

Diskusi berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, beserta catatan-catatan terkait.

Laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 oleh Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (anggota firma *Ernst & Young Global Limited* di Indonesia), auditor independen, sesuai dengan standar akuntansi yang dibuat oleh IICPA, sebagaimana dinyatakan dalam laporan mereka yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

TINJAUAN UMUM

Kami adalah penyelenggara jaringan dan penyedia layanan telekomunikasi terpadu di Indonesia dan kami menawarkan layanan telekomunikasi nasional dan internasional di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2009, kami adalah operator selular terbesar kedua di Indonesia diukur dari jumlah pelanggan selular. Kami menyediakan layanan MIDI kepada pelanggan korporasi dan pelanggan ritel di Indonesia dan regional dan juga menyediakan jasa sambungan telepon jarak jauh internasional dan domestik di Indonesia.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Keadaan Keuangan Kami

Hasil usaha dan keadaan keuangan kami telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor-faktor berikut ini:

Jumlah Pelanggan Selular dan Pola Penggunaan Selular

Jumlah pelanggan selular kami dan penggunaan layanan selular secara langsung mempengaruhi pendapatan usaha selular kami begitu juga dengan biaya usaha kami, termasuk biaya interkoneksi dan biaya depresiasi. Untuk memenuhi permintaan atas layanan kami yang semakin meningkat, kami kemungkinan harus memperluas cakupan dan kapasitas jaringan selular kami, yang memerlukan tambahan pengeluaran barang modal. Peningkatan dalam pengeluaran barang modal kami mempengaruhi arus kas, biaya bunga dan biaya depresiasi kami.

Kami adalah penyedia layanan selular yang terbesar kedua di Indonesia, dilihat dari jumlah pelanggan selular,

dengan 33,1 juta pelanggan (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) per 31 Desember 2009.

Pada tahun 2009, kami mengimplementasikan strategi untuk mengurangi tipe pelanggan "*calling card*" bernilai-rendah, yang kami yakini sebagai pelanggan jangka pendek yang tidak akan mengisi ulang kartu SIM mereka. Berdasarkan strategi ini, kami mengidentifikasi pelanggan pra-bayar yang tidak mengisi ulang kartu SIM mereka setelah kami mengurangi manfaat (seperti bonus aktivasi dan *preloads on-net*) yang tersedia untuk pelanggan-pelanggan tersebut. Kami percaya bahwa strategi ini berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi jumlah pelanggan kami selama tahun 2009. Dengan strategi ini, dalam sembilan bulan pertama tahun 2009, kami telah menghapus 6,8 juta pelanggan jenis tersebut.

Jumlah total pelanggan kami berkurang sebanyak kurang lebih 9,2% dari tanggal 31 Desember 2008, namun pendapatan usaha selular kami hanya berkurang sebanyak 1,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008. Mulai triwulan ketiga tahun 2009, kami mulai melihat tanda-tanda stabilisasi dalam jumlah pelanggan kami dan kami menambah 4,4 juta pelanggan, diluar dari pelanggan yang telah diputuskan, pada triwulan keempat tahun 2009.

Persaingan

Kami menghadapi persaingan ketat dalam setiap segmen usaha. Di antaranya, persaingan tersebut mempengaruhi tarif yang kami kenakan terhadap layanan, permintaan dan pemakaian layanan, serta margin usaha dan hasil usaha kami.

Usaha layanan selular di Indonesia telah menjadi sangat kompetitif, sebagaimana ditunjukkan oleh program untuk mendapatkan pelanggan yang dilakukan secara agresif oleh operator selular Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Sejarah persaingan pada industri komunikasi selular didasarkan pada cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur khusus, dan kualitas serta ketanggapan layanan pelanggan. Dimulai pada tahun 2007, persaingan telah semakin terfokus pada penetapan harga, di mana banyak operator, termasuk kami, mulai menawarkan potongan harga promosi yang signifikan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Sebagai akibatnya, tingkat *churn* pelanggan di Indonesia adalah di antara yang tertinggi di dunia, yaitu sekitar 11% per bulan di tahun 2009. Tingkat *churn* Indonesia yang tinggi diakibatkan oleh sensitivitas pelanggan yang tinggi terhadap harga, terutama pelanggan pra-bayar dan pelanggan pasca bayar yang pindah dengan biaya rendah, karena terbatasnya ikatan kontraktual. Dimulai pada akhir tahun 2009, kami percaya bahwa fokus pasar pada harga sebagai penentu kunci dalam pilihan produk pelanggan telah menurun dan bahwa pelanggan telah kembali terfokus pada dorongan terdahulu yaitu cakupan jaringan, kualitas teknik, harga, ketersediaan layanan data dan fitur khusus.

Tiga operator layanan nirkabel utama di Indonesia, yaitu Telkomsel, kami dan XL, memiliki kira-kira 86,0% dari jumlah pelanggan di Indonesia pada tahun 2009. Kami bersaing dengan Telkomsel dan XL terutama dalam hal cakupan jaringan, kualitas atau layanan dan harga. Kami percaya bahwa jumlah pelanggan kami memberikan keuntungan persaingan yang signifikan terhadap operator selular yang lebih kecil, karena kami memiliki jumlah pelanggan "*on net*" yang lebih besar dan kami mampu menyediakan harga yang lebih menarik untuk panggilan-panggilan *on net*, karena kami tidak membayar biaya interkoneksi apapun terhadap pihak ketiga.

Persaingan dalam layanan MIDI kami juga terus meningkat. Selama beberapa tahun terakhir, persaingan antara penyedia layanan komunikasi data telah meningkat terutama disebabkan oleh diterbitkannya ijin baru setelah deregulasi industri telekomunikasi di Indonesia. Sebagai tambahan, usaha satelit kami, yang terutama terdiri dari penyewaan transponders kepada *broadcaster* dan operator telekomunikasi VSAT, selular dan layanan SLI dan ISP, menghadapi persaingan dari operator layanan luar dan dalam negeri yang mempunyai basis pelanggan yang sama.

Kami bukan lagi satu-satunya operator yang diberi kewenangan untuk menyediakan layanan panggilan SLI tradisional (misalnya non-VoIP) di Indonesia. Pemerintah dapat menerbitkan lebih banyak ijin untuk layanan SLI kepada operator telekomunikasi lainnya, yang akan meningkatkan persaingan dalam usaha telekomunikasi tetap kami.

Kami memperkirakan persaingan di tiga segmen usaha kami akan terus meningkat. Persaingan telah menimbulkan, dan diperkirakan akan menimbulkan dampak bagi hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Tarif dan tingkat harga

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Menkominfo menetapkan formula tarif yang menentukan jumlah yang dapat dibebankan oleh operator atas layanan selular dan telekomunikasi tetap. Namun demikian, Menkominfo mengijinkan operator selular dan telekomunikasi tetap, termasuk kami, untuk menawarkan paket-paket promosi yang menawarkan harga yang lebih rendah daripada tarif plafon yang ditentukan berdasarkan formula tarif. Saat ini kami menetapkan harga untuk layanan selular kami berdasarkan berbagai program promosi yang sedang berlangsung yang dimaksudkan untuk menarik pelanggan-pelanggan baru, menstimulasi permintaan dan meningkatkan posisi saing kami. Perubahan dalam struktur harga kami, baik sebagai akibat dari kebijakan tarif Pemerintah atau sebagai tanggapan terhadap persaingan, dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Ekonomi Indonesia

Kami percaya bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia sebagian didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, dan permintaan atas layanan-layanan tersebut akan berlanjut, karena perekonomian Indonesia terus berkembang dan mengalami modernisasi. Kinerja dan kualitas serta pertumbuhan jumlah pelanggan dan penawaran layanan kami tergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pengeluaran Barang Modal

Penyediaan layanan telekomunikasi bersifat padat modal. Untuk dapat terus bersaing, kami terus-menerus melakukan perluasan, memodernisasi dan memperbaharui teknologi kami, yang memerlukan pengeluaran barang modal yang besar. Dalam rangka memenuhi permintaan terkait dengan peningkatan yang substansial dalam jumlah pelanggan dan pemakaian jaringan selama tahun 2007 hingga 2009, kami harus meningkatkan pengeluaran barang modal kami secara substansial, terutama untuk memperluas kapasitas jaringan kami. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami masing-masing berjumlah total Rp9.726,4 miliar, Rp12.341,9 miliar dan Rp11.584,5 miliar (US$1.232,4 juta). Untuk tahun 2010, kami berencana untuk mengalokasikan US$550 juta hingga US$700 juta untuk pengeluaran barang modal baru, yang, bersama-sama dengan perkiraan pengeluaran barang modal aktual untuk tahun 2010 untuk komitmen pengeluaran barang modal di periode sebelumnya, akan bernilai kurang lebih antara US$1.000 hingga US$1.200 juta total pengeluaran barang modal aktual untuk tahun 2010 untuk digunakan bagi pengembangan aset tetap dalam lini bisnis selular, data tetap dan telekomunikasi tetap kami.

Secara historis, kami membiayai pengeluaran barang modal kami melalui sumber internal dan arus kas dari usaha-usaha Perusahaan, dan juga dari hutang pembiayaan melalui pinjaman bank dan pasar modal. Kami mengharapkan untuk terus membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber-sumber tersebut. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila peristiwa-peristiwa tertentu terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang kami harapkan, dapat mengakibatkan penurunan peringkat hutang, atau kinerja keuangan atau rasio keuangan kami. Apabila kami tidak mendapatkan jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung rencana pengeluaran barang modal kami untuk tahun 2010, kami mungkin tidak dapat memperbaiki atau memperluas infrastruktur telekomunikasi selular kami atau memperbaharui teknologi kami yang dibutuhkan untuk tetap bersaing dalam pasar telekomunikasi Indonesia, dimana hal tersebut dapat berdampak bagi keadaan keuangan, hasil usaha serta prospek kami.

Selain itu, perubahan yang tidak diharapkan dalam teknologi, permintaan kapasitas jaringan yang lebih besar dari pelanggan kami dan tanggapan kepada usaha dan inovasi produk dari pesaing kami dapat mengharuskan kami untuk meningkatkan pengeluaran barang modal kami, yang dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Ketidakstabilan Nilai Tukar Valuta Asing

Nilai mata uang Rupiah telah cukup menguat secara signifikan selama dekade terakhir dari nilai terendah yaitu

sekitar Rp17.000 per Dolar AS selama krisis keuangan Asia. Selama tahun 2009, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berkisar dari nilai terendah sebesar Rp12.065 per Dolar AS hingga nilai tertinggi sebesar Rp9.293 per Dolar AS. Pada 31 Desember 2009, nilai tukar berdasarkan Bank Indonesia adalah Rp9.400 per Dolar AS.

Meskipun sebagian besar dari pendapatan usaha kami dalam mata uang Rupiah, ada juga sebagian pendapatan usaha kami dalam mata uang Dolar AS atau mata uang lain yang terkait dengan Dolar AS. Pendapatan yang terkait dengan mata uang dolar AS adalah berdasarkan tarif dalam mata uang Dolar AS yang ditagih dalam mata uang Rupiah dengan nilai tukar valuta asing yang berlaku untuk mata uang Dolar AS ke Rupiah. Selain itu, sebagian besar dari pinjaman, pengeluaran barang modal dan beban usaha Perusahaan, termasuk pembayaran bunga untuk Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010, Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 dan Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, adalah dalam mata uang selain dari Rupiah, terutama Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2009, 57,6% dari pinjaman kami adalah dalam mata uang Rupiah, dan sisanya adalah dalam mata uang Dolar AS. Melemahnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, diantaranya nilai Rupiah dari beban yang harus dibayarkan dalam mata uang Dolar AS akan meningkat karena faktor tersebut sehingga kami harus mengkonversi mata uang Rupiah yang lebih banyak lagi guna membayar kewajiban kami dalam Dolar AS. Sebaliknya, meningkatnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, di antaranya, hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan dari panggilan masuk internasional yang dilakukan oleh pengguna layanan operator asing, roaming oleh pelanggan operator asing di Indonesia dan pendapatan usaha dari layanan MIDI dan operasi satelit kami. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, kami mencatat rugi kurs-bersih sebesar masing-masing Rp155,3 miliar dan Rp885,7 miliar, dan laba kurs-bersih sebesar Rp1.656,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Sebagai tambahan, sebagian besar aset dan kewajiban moneter kami dapat terkena dampak risiko mata uang asing. Aset moneter ini terutama terdiri dari kas, setara kas, dan piutang usaha dari operator asing, dan piutang usaha berdenominasi mata uang asing. Kewajiban moneter kami yang dapat terkena dampak risiko mata uang asing terdiri dari hutang pengadaan, hutang pinjaman dan hutang obligasi yang timbul akibat pengeluaran barang modal yang berkaitan dengan kewajiban. Tingkat aset moneter bersih kami sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah panggilan masuk yang melampaui jumlah penggilan keluar dalam usaha SLI kami dan pendapatan dari mata uang asing kami. Dalam upaya mengelola risiko valuta asing dan menurunkan risiko valuta asing, kami mengadakan beberapa kontrak swap valuta asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat berhasil mengelola tingkat risiko valuta asing kami di kemudian hari ataupun bahwa kami tidak akan terus menerus terkena dampak risiko valuta asing. Risiko kami terhadap fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama terhadap mata uang dolar AS, dapat meningkat jika kami mengadakan hutang tambahan dalam mata uang dolar AS untuk membiayai rencana pengeluaran barang modal kami. Pada bulan Februari dan Maret 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam instrumen dan perjanjian hutang kami untuk memberikan tambahan fleksibilitas dalam kewajiban kami untuk mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas, hutang terhadap EBITDA dan EBITDA terhadap pembayaran bunga. Sementara kami percaya bahwa perubahan tersebut akan memberikan ruang yang cukup jika terjadi ketidakstabilan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS , kami tidak dapat memastikan tidak terjadinya ketidakstabilan di masa mendatang dan tidak terjadinya ketidakstabilan yang lebih kuat dibandingkan yang dialami dalam 12 bulan terakhir, yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan keuangan kami.

Tinjauan tentang Usaha-Usaha Perusahaan

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi berkenaan dengan masing-masing produk dan jasa utama kami untuk periode yang disebutkan:

	Selular	MIDI	Telekomunikasi tetap	Total
	(Rp dalam miliar)			
Pada dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007:(1)				
Pendapatan usaha	12.752,5	2.168,6	1.567,4	16.488,5
Laba usaha	3.438,8	419,8	661,0	4.519,6
Penyusutan dan amortisasi	3.445,0	519,8	198,4	4.163,2
Segmen aset	35.594,5	4.923,6	1.667,5	42.185,6
Segmen kewajiban	27.859,4	981,3	989,6	29,830.3
Pengeluaran barang modal untuk segmen aset	8.382,8	915,3	428,3	9.726,4
Pada dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008:(1)				
Pendapatan usaha	14.178,9	2.735,5	1.744,7	18.659,1
Laba usaha	3.148,9	790,7	793,7	4.733,3
Penyusutan dan amortisasi	3.698,6	566,4	290,9	4.555,9
Segmen aset	39.472,7	7.115,9	2.570,2	49.158,8
Segmen kewajiban	29.574,7	3.795,2	1.197,3	34.567,2
Pengeluaran barang modal untuk segmen aset	10.042,8	1.616,2	682,9	12.341,9
Pada dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009:(1)				
Pendapatan usaha	13.928,6	2.721,0	1.743,4	18.393,0
Laba usaha	1.960,5	760,9	491,6	3,213.0
Penyusutan dan amortisasi	4.583,6	643,6	334,2	5.561,4
Segmen aset	43.858,2	7.799,6	2.596,7	54,254.5
Segmen kewajiban	31.671,2	3.761,1	1.023,4	36,455.7
Pengeluaran barang modal untuk segmen aset	9.658,2	1.348,6	577,7	11,584.5

(1) Hasil segmen dan aktiva mencakup hal-hal yang secara langsung berasal dari suatu segmen dan juga hasil dan aktiva yang dapat dialokasikan secara wajar. Pendapatan bunga tidak dilaporkan dalam segmen usaha karena kas dan setara kas dihitung dan dievaluasi secara terpisah dari kegiatan usaha. Beban bunga dan pajak penghasilan juga tidak dilaporkan dalam segmen usaha karena tidak dipertimbangkan di dalam evaluasi kinerja oleh manajemen kami. Pengeluaran barang modal untuk segmen aktiva merupakan total biaya yang timbul selama masa pembelian aktiva yang direncanakan akan digunakan lebih dari satu tahun.Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perusahaan terutama diperoleh melalui penyelenggaraan jasa selular, MIDI dan telepon tetap (khususnya sambungan jarak jauh internasional). Tabel berikut ini memperlihatkan rincian total pendapatan usaha kami dan persentase kontribusi dari masing-masing layanan terhadap total pendapatan usaha kami untuk setiap tahun yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						
	2007		2008		2009		
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS kecuali persentase)						
Pendapatan Usaha:	Rp		Rp		Rp	Dolar AS	
Selular	12.752,5	77,3 %	14.178,9	76,0%	13.928,6	1.481,8	75,7%
MIDI	2.168,6	13,2%	2.735,5	14,7%	2.721,0	289,4	14,8%
Telekomunikasi tetap	1.567,4	9,5%	1.744,7	9,3%	1.743,4	185,5	9,5%
Jumlah pendapatan usaha	16.488,5	100,0%	18.659,1	100,0%	18.393,0	1.956,7	100,0%

Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan usaha kami bagi semua jenis jasa yang ditawarkan adalah jumlah pelanggan, tingkat penggunaan dan tarif jasa. Tingkat penggunaan jasa-jasa kami dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terus meningkatnya permintaan atas jasa telekomunikasi di Indonesia, terus berkembangnya perekonomian Indonesia dan adanya persaingan.

Jasa Selular. Perolehan pendapatan usaha kami dari jasa selular berasal dari pendapatan pemakaian selular, jasa nilai tambah, pendapatan langganan bulanan, penjualan modem *broadband* dan *handset* selular, dan biaya jasa penyambungan juga pendapatan interkoneksi dari penyelenggara telekomunikasi lainnya dan pendapatan sewa menara. Pada triwulan ke-empat tahun 2008, kami mulai mencatat penjualan modem *broadband* dan penggunaan data komunikasi nirkabel *broadband* sebagai pendapatan usaha kami dari jasa selular. Pendapatan tersebut sebelumnya dicatat dibawah pendapatan usaha jasa MIDI.

Tabel berikut ini memperlihatkan komponen-komponen pendapatan usaha kami dari jasa selular untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						
	2007		2008		2009		
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS kecuali persentase)						
	Rp		Rp		Rp	Dolar AS	
Pendapatan pemakaian	6.542,9	51,3%	7.021,9	49,5%	5.844,5	621,8	42,0%
Jasa nilai tambah	4.173,7	32,7	5.052,6	35,6	5.999,0	638,2	43,1
Pendapatan interkoneksi	1.847,5	14,5	1.826,0	12,9	1.491,8	158,7	10,7
Pendapatan jasa penyambungan	79,1	0,6	68,5	0,5	9,3	1,0	0,1
Pendapatan langganan bulanan	20,4	0,2	66,3	0,5	184,2	19,6	1,3
Penjualan handset blackberry dan modem	15,6	0,1	82,4	0,6	206,5	22,0	1,5
Sewa menara	-	-	-	-	62,3	6,6	0,4
Lain-lain	73,3	0,6	61,2	0,4	131,0	13,9	0,9
Total Pendapatan usaha dari jasa selular	12.752,5	100,0%	14.178,9	100,0%	13.928,6	1.481,8	100,0%

Sebagian besar pelanggan selular kami adalah pelanggan prabayar kurang lebih 96,7% per tanggal 31 Desember 2009. Kami menawarkan beberapa layanan-layanan tambahan kepada pelanggan prabayar kami, yang telah meningkatkan pendapatan usaha layanan selular dari jasa nilai tambah, terutama SMS dan SMS bernilai tambah, yang memampukan pelanggan untuk mengakses berbagai macam informasi, seperti berita politik, olahraga dan bisnis. Pendapatan dari SMS dan jasa nilai tambah lainnya mencerminkan masing-masing 32,7%, 35,6% dan 43,1% dari pendapatan usaha layanan selular kami untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009. Kami mengharapkan pendapatan dari SMS dan jasa nilai tambah lainnya untuk terus meningkat, yang kami percaya akan didorong oleh layanan wireless *broadband* dan situs jejaring sosial yang berkembang dan perkembangan konten online populer lainnya.

- Pendapatan selular yang berasal dari pemakaian pulsa dan penjelajahan diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan selular kami;
- Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan;
- Untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan akhir. Penjualan voucher pulsa perdana/isi

ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya;

- Penjualan modem *broadband* nirkabel dan *handset* selular diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan. Pendapatan dari komunikasi data *broadband* nirkabel diakui berdasarkan durasi dari pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung perjanjian dengan pelanggan;
- Pendapatan selular dari interkoneksi dengan operator lain (biaya pemakaian) diakui bulanan berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap kami;
- Pendapatan selular disajikan sebesar jumlah bersih, setelah kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah.

Layanan MIDI. Pendapatan usaha dari layanan MIDI terutama berasal dari (i) layanan Internet yang kami sediakan, Indosat Mega Media, ("IM2") dan PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), (ii) layanan IP VPN, sewa jaringan berkecepatan tinggi dan *frame relay* yang diselenggarakan oleh kami dan Lintasarta, (iii) layanan *digital data network* yang diselenggarakan oleh Lintasarta, dan (iv) layanan satelit.

Pendapatan dari jasa instalasi diakui pada saat instalasi selesai dilakukan. Pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan. Pendapatan dari pemakaian diakui setiap bulan berdasarkan durasi pemakaian internet atau berdasarkan jumlah beban tetap, tergantung perjanjian dengan pelanggan. kami mencatat pendapatan satelit berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Pendapatan dari jasa MIDI lainnya diakui ketika jasa diserahkan.

Sebagian besar dari pendapatan usaha yang berasal dari layanan MIDI dinyatakan dalam mata uang Dolar AS dan oleh karenanya dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Beberapa faktor lainnya juga mempengaruhi pendapatan usaha dari layanan MIDI, seperti persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi domestik dan para penyelenggara telekomunikasi internasional, penurunan tarif dan migrasi dari layanan tradisional ke layanan berbasis IP. Kami memperkirakan tren ini akan terus berlangsung tetapi kami yakin bahwa hal ini akan terkompensasi dengan peningkatan jumlah layanan yang disewakan kepada pelanggan korporasi, peningkatan permintaan layanan yang *customized*, dan juga pengoperasian satelit Palapa-D.

Layanan Telekomunikasi Tetap. Layanan telekomunikasi tetap meliputi layanan sambungan jarak jauh internasional, layanan jaringan tetap nirkabel dan layanan jaringan tetap. Layanan sambungan jarak jauh internasional yang terdiri dari layanan SLI "001" dan "008", "Flatcall 01016" dan juga layanan bantuan operator dan jasa nilai tambah, memberikan kontribusi sebanyak 78,2% dari jumlah pendapatan usaha layanan komunikasi tetap dari layanan sambungan langsung jarak jauh internasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sementara sisanya berasal dari layanan jaringan tetap nirkabel dan layanan jaringan tetap.

Layanan Sambungan Jarak Jauh Internasional. Pendapatan usaha dari layanan sambungan jarak jauh internasional berasal dari dua sumber utama, yaitu pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dan pendapatan dari percakapan telepon ke luar negeri. Kami telah menegosiasikan *volume commitments* dan *accounting rates* dengan para penyelenggara telekomunikasi asing, atau telah mengimplementasikan sistem tarif berbasis terminasi pasar, dan menerima penyelesaian bersih dari operator-operator tersebut. Penyelesaian bersih dan *accounting rates* ini biasanya dinyatakan dan dilakukan dalam mata uang selain Rupiah, khususnya mata uang Dolar AS; dengan demikian, pendapatan sambungan telepon masuk dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya.

Layanan Telepon Tetap Nirkabel. Per tanggal 31 Desember 2009, kami telah memiliki 594.133 pelanggan telepon tetap nirkabel di 82 kota di Indonesia. Pada akhir tahun 2009, kami memperluas layanan telepon tetap nirkabel ke beberapa kota lainnya dalam upaya meningkatkan kapasitas untuk sekitar empat juta pelanggan telepon tetap nirkabel. Dengan demikian, kami mengharapkan di masa mendatang layanan telepon tetap nirkabel ini akan menjadi sumber yang semakin penting bagi pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap.

Pendapatan telepon jaringan tetap nirkabel dari pemakaian pulsa diakui berdasarkan durasi percakapan

yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap kami. Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan aktivasi diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan baru di jaringan tetap kami, sedangkan pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan. Untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan akhir. Penjualan *voucher* pulsa/ isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Jasa Telepon Jaringan Tetap. Saat ini kami memiliki cakupan jarak jauh lokal dan domestik di 82 kota besar di Indonesia. Pendapatan dari jasa instalasi telepon jaringan tetap diakui pada saat instalasi selesai dilakukan. Pendapatan dari pemakaian diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap kami.

Beban Usaha

Beban usaha utama kami meliputi beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi, biaya karyawan, pemasaran dan beban umum dan administrasi.

Beberapa beban Perusahaan dinyatakan dalam mata uang Dolar AS atau mata uang selain Rupiah. Beban-beban tersebut meliputi pembayaran tarif interkoneksi internasional, beberapa perjanjian pemeliharaan dan biaya konsultasi.

Beban Jasa Telekomunikasi. Beban jasa telekomunikasi meliputi beban interkoneksi, ijin frekuensi radio, pemeliharaan, penggunaan, sewa sirkit, uang sewa, harga pokok penjualan kartu SIM dan voucher isi ulang, dan harga pokok telepon dan modem *handset*.

Penyusutan dan Amortisasi. Kami menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap, fasilitas dan peralatan selama taksiran umur manfaatnya. Sebagian besar beban penyusutan kami terkait dengan aktiva yang digunakan untuk layanan selular. Oleh karena kami terus memperluas dan meningkatkan cakupan, kapasitas dan kualitas jaringan, kami memperkirakan beban penyusutan tersebut akan semakin besar.

Pemasaran. Beban pemasaran meliputi biaya untuk pameran, promosi dan iklan yang berhubungan dengan program pemasaran kami.

Karyawan. Beban karyawan meliputi gaji, insentif dan imbalan kerja lainnya, pajak penghasilan karyawan, bonus, manfaat perawatan kesehatan setelah pensiun dan jasa tenaga outsourcing.

Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi meliputi beban sewa, biaya tenaga profesional, penyisihan piutang ragu-ragu, perjalanan, listrik, gas dan air, transportasi, kantor, asuransi, katering, komunikasi, pelatihan, pendidikan dan penelitian dan lain-lain.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Komponen utama dari penghasilan (beban) lain-lain kami adalah pendapatan bunga, laba (rugi) selisih kurs-bersih, amortisasi goodwill, beban pendanaan, laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif—bersih.

Laba atau rugi selisih kurs biasanya dipengaruhi oleh besarnya hutang non-Rupiah yang belum dibayar, piutang perusahaan internasional di luar negeri dan valuta asing dari kas dan setara kas kami. Kami saat ini sedang melakukan lindung nilai/*hedging* atas sebagian kewajiban kami dalam mata uang Dolar AS berdasarkan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 dan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 dan ING/DBS Syndicated Loan Facility.

Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan disajikan berdasarkan perkiraan pendapatan kena pajak untuk periode tertentu. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aktiva dan kewajiban antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, dihitung sejauh realisasi manfaat tersebut dimungkinkan. Pengaruh pajak untuk suatu periode dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat nilai aktiva direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Perubahan dalam jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat pajak akan dikreditkan

atau dibebankan kepada usaha pada periode saat ini, kecuali sampai pada titik dimana mereka berhubungan dengan pos-pos yang sebelumnya dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dihitung pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika kami mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Untuk setiap anak perusahaan yang dikonsolidasi, efek pajak dari perbedaan sementara dan kerugian pajak bawaan, yang secara sendiri-sendiri adalah aktiva atau kewajiban, ditunjukkan dalam nilai bersih yang berlaku.

Laba bersih

Laba bersih Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, dan 2009 tidak setara dengan pendapatan usaha dan laba usaha kami pada periode-periode tersebut. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya fluktuasi yang besar pada beberapa pos non-usaha yang mempengaruhi laba bersih kami pada periode-periode tersebut. Pos non-usaha tersebut di antaranya adalah fluktuasi pajak penghasilan yang ditangguhkan, laba atau rugi selisih kurs-bersih, dan laba atau rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih.

Hasil Usaha

Tabel berikut ini memperlihatkan data laporan laba rugi yang dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2007	2008	2009
Pendapatan Usaha:			
Selular	77,3%	76,0%	75,7%
MIDI	13,2	14,7	14,8
Telekomunikasi tetap	9,5	9,3	9,5
Jumlah Pendapatan Usaha	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Beban Usaha:			
Beban Jasa Telekomunikasi	29,2%	32,6%	36,2%
Penyusutan dan amortisasi	25,2	24,4	30,2
Karyawan	9,7	8,8	7,9
Pemasaran	4,2	4,9	4,4
Umum dan administrasi	4,3	3,9	3,8
Total Beban Usaha	**72,6%**	**74,6%**	**82,5%**
Pendapatan Bersih:			
Laba Usaha	**27,4%**	**25,4%**	**17,5%**
Pendapatan (beban) lainnya - bersih	(9,6)	(12,9)	(5,3)
Laba sebelum Pajak Penghasilan	17,8	12,5	12,2
Beban pajak penghasilan - bersih	(5,2)	(2,3)	(3,7)
Hak Minoritas	(0,2)	(0,1)	(0,3)
Laba bersih	**12,4%**	**10,1%**	**8,1%**

Tabel berikut menunjukkan pendapatan usaha dari berbagai segmen usaha untuk periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						
	2007		2008		2009		
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS kecuali persentase)						
	Rp	%	Rp	%	Rp	Dollar AS	%
Jasa Selular							
Pendapatan pemakaian	6.542,9	51,3%	7.021,9	49,5%	5.844,5	621,8	42,0%
Jasa nilai tambah	4.173,7	32,7	5.052,6	35,6	5.999,0	638,2	43,1
Pendapatan interkoneksi	1.847,5	14,5	1.826,0	12,9	1.491,8	158,7	10,7
Pendapatan jasa penyambungan	79,1	0,6	68,5	0,5	9,3	1,0	0,1
Pendapatan langganan bulanan	20,4	0,2	66,3	0,5	184,2	19,6	1,3
Penjualan handset Blackberry dan modem	15,6	0,1	82,4	0,6	206,5	22,0	1,5
Sewa menara	-	-	-	-	62,3	6,6	0,4
Lain-lain	73,3	0,6	61,2	0,4	131,0	13,9	0,9
Subtotal	**12.752,5**	**100,0%**	**14.178,9**	**100,0%**	**13.928,6**	**1.481,8**	**100,0%**
MIDI							
Internet	570,0	26,3%	703,9	25,7%	677,4	72,1	24,9%
IP VPN	383,3	17,7	585,6	21,4	566,1	60,2	20,8
World link dan direct link	370,8	17,1	456,7	16,7	394,2	41,9	14,5
Frame net	305,1	14,1	315,8	11,6	276,5	29,4	10,2
Sewa jaringan	163,1	7,5	231,5	8,5	211,1	22,5	7,7
Layanan aplikasi	98,6	4,6	118,9	4,3	146,1	15,5	5,4
Digital data network	100.3	4,6	124,9	4,6	144,6	15,4	5,3
Sewa satelit	95,7	4,4	96,3	3,5	113,1	12,0	4,1
MPLS	13,4	0,6	25,2	0,9	67,1	7,1	2,5
TV link	6,9	0,3	8,7	0,3	6,2	0,7	0,2
Lain-lain	61,4	2,8	68,0	2,5	118,6	12,6	4,4
Subtotal	**2.168,6**	**100,0%**	**2.735,5**	**100,0%**	**2.721,0**	**289,4**	**100,0%**
Telekomunikasi Tetap							
Telepon Internasional	1.230,2	78,5%	1.373,1	78,7%	1.362,7	145,0	78,2%
Telepon jaringan tetap nirkabel	218,7	14,0	244,3	14,0	249,9	26,6	14,3
Telepon jaringan tetap	117,4	7,5	126,6	7,3	129,9	13,8	7,5
Lainnya	1,1	0,0	0,7	0,0	0,9	0,1	0,0
Subtotal	**1.567,4**	**100,0%**	**1.744,7**	**100,0%**	**1.743,4**	**185,5**	**100,0%**
Total	**16.488,5**		**18.659,1**		**18.393,0**	**1.956,7**	

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pendapatan Usaha

Total pendapatan usaha menurun secara marginal dari Rp18.659,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp18.393,0 miliar (US$1.956,7 juta) pada tahun 2009, atau sebesar 1,4%, terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan dari jasa selular.

Selama tahun 2009, pendapatan usaha dari layanan selular menurun sebesar Rp250,3 miliar, atau 1,8%, dari Rp14.178,9 miliar pada tahun 2008. Pendapatan usaha dari layanan MIDI menurun dari sebesar Rp14,5 miliar, atau 0,5% dari Rp2.735,5 miliar di tahun 2008. Pendapatan usaha dari layanan telekomunikasi tetap di tahun 2009 menurun secara marginal sebesar Rp1,3 miliar, atau 0,1%, dari Rp1.744,7 miliar di tahun 2008.

Jasa Selular. Pada tahun 2009, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa selular sebesar Rp13.928,6 miliar (US$1.481,8 juta), menurun sebesar 1,8% dari Rp14.178,9 miliar pada tahun 2008. Kami percaya bahwa penurunan tersebut terutama disebabkan karena strategi nilai kami, yang dimulai pada tahun 2009, untuk meminimalisir pelanggan tipe "lower-value calling card". Penghapusan tipe pelanggan "calling card" mengakibatkan penurunan kurang dari 1,8% dari pendapatan usaha dari selular. Selain itu, kami yakin bahwa penurunan pendapatan usaha dari selular diakibatkan oleh penurunan ARPU kami dari Rp38.639 pada tahun 2008 menjadi Rp37.330 pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa selular mewakili 75,7% dari total pendapatan usaha kami pada tahun 2009, dibandingkan dengan 76,0% pada tahun 2008.

Pendapatan pemakaian menurun sebesar Rp1.177,4 miliar, atau 16,8%, dari tahun 2008, dan mewakili 42,0% dari total pendapatan usaha layanan selular kami. Penurunan dalam pemakaian terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pelanggan, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan pendapatan dari jasa nilai tambah.

Pada tahun 2009, pendapatan usaha dari jasa selular yang berasal dari jasa nilai tambah mengalami peningkatan sebesar Rp946,3 miliar, atau 18,7%, dibandingkan pada tahun 2008. Kontribusi jasa nilai tambah untuk pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebesar 7,5% dari 35,6% pada tahun 2008 menjadi 43,1% pada tahun 2009. Peningkatan pendapatan usaha dari jasa nilai tambah, demikian juga dengan peningkatan kontribusi pendapatan dari jasa nilai tambah kepada pendapatan usaha selular kami secara keseluruhan, didorong oleh peningkatan penggunaan layanan *broadband* nirkabel kami.

Layanan MIDI. Pada tahun 2009, pendapatan usaha dari layanan MIDI relatif konstan, dengan Rp2.735,5 miliar pada tahun 2008 dan Rp2.721,0 miliar (US$289,4 juta) pada tahun 2009. Pendapatan usaha internet terus mencerminkan komponen terbesar dari pendapatan usaha dari layanan MIDI, walaupun terjadi penurunan dalam pendapatan usaha dari Internet sebesar Rp26,5 miliar di tahun 2009. Penurunan pendapatan usaha dari layanan Internet, demikian juga dengan layanan sewa jaringan domestik dan internasional, terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan dan menurunnya harga jasa kami.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap cenderung tetap, dengan Rp1.743,4 miliar (US$185,5 juta) pada tahun 2009 dan Rp1.744,7 miliar pada tahun 2008. Pendapatan usaha dari layanan sambungan telepon internasional dan telepon tetap nirkabel, masing-masing merupakan 78,2% dan 14,3%, dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2009. Sedangkan 7,5% lainnya dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap berasal dari jasa telepon tetap dan layanan-layanan lainnya pada tahun 2009.

Pendapatan yang berasal dari sambungan telepon internasional menurun dari Rp1.373,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.362,7 miliar (US$145,0 juta) pada tahun 2009 akibat dari penurunan trafik SLI keluar oleh pelanggan di luar Indosat. Jumlah volume sambungan telepon internasional dari sambungan "001" dan "008" Perusahaan meningkat sebanyak 0,9% dari 1.958,4 juta menit pada tahun 2008 menjadi 1.976,7 juta menit pada tahun 2009. Jumlah incoming traffic relatif stabil dengan 1.484,4 juta menit pada tahun 2008 dan 1.477,1 juta menit pada tahun 2009, terutama karena adanya penurunan volume komitmen dari operator telekomunikasi asing. Outgoing traffic meningkat sebanyak 6,3% dari 474,0 juta menit pada tahun 2008 menjadi 504,1 juta menit

pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan pengguna trafik dari pelanggan kami, misalnya melalui layanan "Flatcall 01016".

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp1.254,2 miliar, atau 9,0%, dari Rp13.925,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp15.180,0 miliar (US$1.614,9 juta) pada tahun 2009 terutama karena adanya kenaikan beban penyusutan dan beban jasa telekomunikasi, yang merupakan dua beban usaha terbesar kami. Peningkatan ini sebagian diimbangi dengan penurunan beban karyawan, beban pemasaran dan beban umum dan administrasi pada periode tersebut.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp581,3 miliar, atau 9,6%, dari Rp6.075,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp6.656,7 miliar (US$708,2 juta) pada tahun 2009 terutama karena adanya peningkatan iuran Pemerintah untuk biaya frekuensi, pembayaran biaya ijin 3G tahunan, termasuk biaya penambahan spektrum pada tahun 2009, USO dan biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peningkatan ini juga terjadi karena pembayaran sewa untuk penambahan BTS, peningkatan biaya modem dan handset yang dipengaruhi dari tingginya penjualan Blackberry™ and peningkatan beban terkait penyewaan sambungan, Internet dan penyewaan transponder.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 22,1% dari Rp4.555,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 5.561,4 miliar (US$591,6 juta) pada tahun 2009, terutama sebagai akibat dari peningkatan terus menerus dari jumlah aset tetap kami, termasuk satelit Palapa-D kami yang baru, serta percepatan penyusutan elemen yang tidak digunakan pada jaringan selular. Aset tetap meningkat dari Rp63.478,4 miliar di tahun 2008 menjadi Rp74.818,5 miliar (US$7.959,4 juta) di tahun 2009.

Beban karyawan menurun sebesar Rp187,4 juta, atau 11,4%, dari Rp1.639,0 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.451,6 miliar (US$154,4 juta) pada tahun 2009, terutama karena penurunan tingkat pajak pendapatan karyawan, serta penurunan bonus dan insentif, beban pegawai outsourcing dan iuran dana pensiun.

Beban pemasaran menurun sebesar Rp101,2 miliar, atau 11%, dari Rp 918,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 816,9 miliar (US$86,9 juta) pada tahun 2009 terutama karena adanya penurunan beban iklan, promosi dan pameran, sejalan dengan strategi target pemasaran dan program efisiensi yang kami lakukan.

Beban umum dan administrasi menurun sebesar Rp44,0 miliar, atau sebesar 6,0%, dari Rp737,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp693,4 miliar (US$73,8 juta) pada tahun 2009 terutama karena penurunan biaya transportasi, pelatihan dan biaya penelitian, jasa profesional, biaya jasa kantor dan biaya katering, sementara Perusahaan terus melaksanakan program efisiensi yang dirancang untuk meminimalisir biaya non-operasional.

Laba Usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha menurun sebesar Rp1.520,3 miliar atau 32,1%, dari Rp4.733,3 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp3.213,0 miliar (US$341,8 juta) pada tahun 2009.

Beban Lain-lain - Bersih

Beban lain-lain -bersih menurun sebesar Rp1.427,2 miliar, dari Rp2.408,2 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp981,0 miliar (US$104,4 juta) pada tahun 2009, terutama karena adanya laba dari nilai tukar valuta asing, yang didorong oleh menguatnya Rupiah Indonesia terhadap Dolar AS. Dari kerugian nilai tukar valuta asing sebesar Rp 885,7 miliar pada tahun 2008, kami mencatat laba nilai tukar valuta asing sebesar Rp1.656,4 miliar (US$176,2 juta) pada tahun 2009.

Dari laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp136,6 miliar pada tahun 2008, kami mencatat kerugian di perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp517,7 miliar (US$55,1 juta) pada tahun 2009 disebabkan oleh menguatnya rupiah terhadap Dolar AS.

Kami mencatat penurunan pendapatan bunga menjadi Rp139,0 miliar (US$14,8 juta) pada tahun 2009, yang ditunjukkan oleh penurunan sebesar Rp321,1 miliar, atau 69,8% selama tahun 2008, karena neraca kas rata-rata lebih rendah yang kami miliki.

Beban lain-lain bersih mengalami peningkatan sebesar Rp116,8 miliar dari Rp33,5 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp150,3 miliar (US$16,0 juta) pada tahun 2009 terutama akibat sebuah klaim asuransi yang kami ajukan dan denda perhitungan pajak yang ditanggung Perusahaan.

Perpajakan

Kami mencatat beban pajak penghasilan-bersih sebesar Rp419,8 miliar pada tahun 2008 dibandingkan dengan Rp677,3 miliar (US$72,0 juta) pada tahun 2009. Peningkatan/penurunan dalam beban pajak penghasilan-bersih terutama disebabkan oleh penyesuaian tarif pajak penghasilan pada tahun 2008.

Laba Bersih

Laba bersih kami menurun sebesar Rp380,3 miliar, atau 20,2%, dari Rp1.878,5 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.498,2 miliar (US$159,4 juta) pada tahun 2009 dikarenakan oleh hal-hal diatas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pendapatan Usaha

Total pendapatan usaha meningkat dari Rp16.488,5 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp18.659,1 miliar pada tahun 2008 atau sebesar 13,2%, terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan usaha dari jasa selular dan layanan MIDI. Selama tahun 2008, pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebesar Rp1.426,4 miliar, atau sebesar 11,2%, dari Rp12.752,5 miliar pada tahun 2007. Pendapatan usaha dari layanan MIDI meningkat sebesar Rp566,9 miliar, atau 26,1%, dari Rp2.168,6 miliar pada tahun 2007. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap meningkat sebesar Rp177,3 miliar, atau sebesar 11,3% dari Rp1.567,4 miliar pada tahun 2007.

Jasa Selular. Pada tahun 2008, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa selular sebesar Rp14.178,9 miliar, yang meningkat sebesar 11,2% dari Rp12.752,5 miliar pada tahun 2007. Pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan jumlah pelanggan selular sebanyak 48,7% dari tahun 2007 ke tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan efektif Perusahaan per menit dan dampak dari biaya interkoneksi yang lebih rendah. Pada tahun 2008, kami menawarkanpotongan harga dan bonus melalui paket promosi sebagai jawaban terhadap promosi harga yang agresif oleh pesaing kami, yang berakibat pada pendapatan per menit yang lebih rendah. Paket tarif kompetitif membantu meningkatkan penetrasi pasar pelanggan berpenghasilan rendah dan membantu meningkatkan jumlah total pelanggan kami. Pendapatan usaha dari layanan selular mencerminkan 76,0% dari total pendapatan usaha untuk tahun 2008, dibandingkan dengan 77,3% untuk tahun 2007.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp479,0 miliar, atau 7,3%, dari tahun 2007, dan mewakili 49,5% dari total pendapatan usaha jasa selular kami. Peningkatan dalam pemakaian ini terutama disebabkan oleh usaha pemasaran yang agresif untuk menarik pelanggan baru, yang meningkatkan jumlah pelanggan selular kami dan berakibat pada peningkatan total penggunaan selular.

Pada tahun 2008, pendapatan usaha dari jasa selular yang berasal dari jasa nilai tambah meningkat sebesar Rp878,9 miliar, atau 21,1%, dibandingkan dengan tahun 2007, terutama karena peningkatan dalam penggunaan SMS, layanan-layanan nilai tambah dan *wireless broadband*, pendapatan-pendapatan yang sebelumnya kami catat sebagai layanan MIDI. Kontribusi fitur nilai tambah pada pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebesar 2,9% dari 32,7% pada tahun 2007 menjadi 35,6% pada tahun 2008.

Layanan MIDI. Pada tahun 2008, pendapatan usaha dari layanan MIDI meningkat sebesar 26,1% dari Rp2.168,6 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2.735,5 miliar pada tahun 2008, terutama karena peningkatan permintaan untuk Internet, IP VPN dan layanan leased lines. Pendapatan usaha dari internet dan IP VPN mencerminkan dua komponen terbesar dari pendapatan usaha dari layanan MIDI pada tahun 2008. Peningkatan layanan IP VPN didorong oleh kapasitas yang lebih besar dan semakin banyaknya sirkuit yang disewakan kepada pelanggan besar.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap meningkat sebesar 11,3% menjadi Rp1.744,7 miliar pada tahun 2008 dari Rp1.567,4 miliar pada tahun 2007. Pendapatan usaha yang berasal dari layanan sambungan telepon internasional dan telepon tetap nirkabel tetap mewakili 78,5% dan 14,0%, masing-masing, dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap. Sisanya sebesar 7,5% dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2008 berasal dari layanan telepon tetap dan layanan-layanan lainnya. Pendapatan yang berasal dari sambungan telepon internasional meningkat dari Rp1.230,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1.373,1 miliar pada tahun 2008

karena adanya kenaikan pendapatan sambungan telepon masuk yang mengimbangi penurunan pendapatan telepon keluar sebagai akibat dari persaingan yang semakin ketat dengan para operator lain, seperti Telkom dan penyedia layanan VoIP. Jumlah volume sambungan telepon internasional dari sambungan "001" dan "008" Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 27,7% dari 1.533,5 juta menit di tahun 2007 menjadi 1.958,4 juta menit di tahun 2008. Jumlah incoming traffic meningkat sebesar 20,0% dari 1.236,6 juta menit di tahun 2007 menjadi 1.484,5 juta menit di tahun 2008, terutama disebabkan oleh adanya volume commitments dari beberapa penyelenggara telekomunikasi asing. Outgoing traffic meningkat sebesar 59,6% dari 296,9 juta menit di tahun 2007 menjadi 474,0 juta menit di tahun 2008, terutama disebabkan oleh meningkatnya pengguna trafik dari pelanggan kami misalnya melalui layanan "Flatcall 01016". Outgoing traffic dari akses non-pelanggan mengalami penurunan karena persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi domestik dan juga persaingan dengan para penyedia jasa VoIP.

Pendapatan usaha dari jasa akses telepon tetap nirkabel meningkat dari Rp218,7 miliar di tahun 2007 menjadi Rp244,3 miliar di tahun 2008, yang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan basis pelanggan akses telepon tetap nirkabel Perusahaan.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp1.957,0 miliar atau 16,4%, dari Rp11.968,9 miliar di tahun 2007 menjadi Rp13.925,9 miliar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi dan kenaikan biaya pemasaran sebagai tanggapan dari tingginya tingkat kompetisi dalam pasar telekomunikasi Indonesia.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp1.263,5 miliar atau 26,3%, dari Rp4.811,9 miliar di tahun 2007 menjadi Rp6.075,4 miliar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh kenaikan beban terkait dengan pungutan Pemerintah, seperti biaya frekuensi radio, biaya USO dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang timbul karena bertambahnya jumlah BTS dan meningkatnya pendapatan usaha dari jasa selular kami di tahun 2008. Beban jasa telekomunikasi juga meningkat sebagai akibat dari peningkatan dalam (i) beban listrik, air dan gas dan sewa tempat sebagai akibat dari perluasan jumlah lokasi selular; (ii) biaya interkoneksi sebagai akibat meningkatnya *off-net traffic*; (iii) biaya pemeliharaan sebagai akibat dari aset tetap tambahan; (iv) biaya sewa sirkit sebagai akibat dari perluasan jaringan untuk selular dan layanan MIDI; dan (v) harga pokok kartu SIM dan vouchers isi ulang sebagai akibat dari kenaikan penjualan paket perdana.

Beban penyusutan dan amortisasi mengalami peningkatan sebesar 9,4% dari Rp4.163,2 miliar di tahun 2007 menjadi Rp4.555,9 miliar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh hasil dari penggunaan peralatan selular baru dan pengelompokkan kembali aset tetap tertentu sejak 1 Januari 2008, sebagai akibat dari sebuah penelaahan dan penilaian berkala atas masa manfaat ekonomis dari aset Perusahaan.

Beban karyawan meningkat sebesar Rp44,2 miliar atau 2,8%, dari Rp1.594,8 miliar di tahun 2007 menjadi Rp1.639,0 miliar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh penyesuaian berbasis inflasi pada gaji yang diakibatkan oleh peningkatan harga minyak seperti terlihat pada tingkat inflasi Indonesia yang dimulai sejak bulan Mei 2008.

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp225,2 miliar atau 32,5%, dari Rp692,9 miliar di tahun 2007 menjadi Rp918,1 miliar di tahun 2008, terutama disebabkan adanya kampanye pemasaran yang agresif dan program promosi yang secara strategis dilaksanakan sebagai tanggapan atas tingginya tingkat kompetisi.

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp31,3 miliar atau 4,4%, dari Rp706,1 miliar di tahun 2007 menjadi Rp737,4 miliar di tahun 2008, yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya tenaga profesional, sewa, biaya penggunaan kantor dan biaya pelatihan. Kami juga menurunkan beban untuk piutang ragu-ragu, biaya hubungan masyarakat, dan biaya makan karyawan. Berkurangnya piutang ragu-ragu timbul sebagai akibat dari pembalikan atas penyisihan piutang ragu-ragu dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena adanya penyelesaian atas piutang yang lama tertunggak, yang berasal dari pelanggan MIDI yang mana telah kami sisihkan 100%.

Laba Usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha Perusahaan naik sebesar Rp213,7 miliar atau 4,7%, dari Rp4.519,6 miliar di tahun 2007 menjadi Rp4.733,3 miliar di tahun 2008.

Beban Lain-lain-Bersih

Beban lain-lain-bersih meningkat sebesar Rp818,2 miliar atau 51,5%, dari Rp1.590,0 miliar di tahun 2007 menjadi Rp2.408,2 miliar di tahun 2008, terutama disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs, khususnya pada triwulan ke-empat di tahun 2008, kenaikan beban pendanaan dan menurunnya laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih.

Laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih meningkat sebesar Rp68,6 miliar, atau 100,8% dari Rp68,0 miliar di tahun 2007, menjadi Rp136,6 miliar di tahun 2008 akibat meningkatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Selisih rugi kurs-bersih meningkat sebesar Rp730,4 miliar, atau 470,3% dari Rp155,3 miliar di tahun 2007 menjadi Rp885,7 miliar di tahun 2008 yang disebabkan oleh melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS, khususnya pada triwulan ke-empat tahun 2008.

Kami mencatat beban pendanaan sebesar Rp1.858,3 miliar di tahun 2008 dibandingkan dengan beban sebesar Rp1.428,6 miliar di tahun 2007, atau naik sebesar 30,1%, yang terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi baru dan pelaksanaan dan/atau penarikan dari perjanjian pinjaman di tahun 2008, termasuk fasilitas pinjaman sindikasi ING/DBS, Fasilitas Komersial HSBC, fasilitas berjangka HSBC COFACE dan fasilitas berjangka Sinosure HSBC dan penerbitan Obligasi Indosat Ke-enam dan Sukuk Ijarah Ketiga, yang dipakai untuk membiayai pengeluaran barang modal kami.

Meskipun penerbitan obligasi dan pinjaman baru ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran hutang atas pinjaman sindikasi ING/DBS, Obligasi Indosat Kedua dan Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama kami, tingkat bunga rata-rata kami mengalami penurunan karena rendahnya tingkat bunga dari penerbitan obligasi dan pinjaman yang baru.

Kami mencatat peningkatan dalam pendapatan bunga menjadi Rp460,1 miliar pada tahun 2008, yang meningkat sebesar Rp227,7 miliar, atau 98,0% terhadap tahun 2007 yang disebabkan oleh tingginya rata-rata jumlah kas dan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Beban lain-lain-bersih mengalami penurunan sebanyak Rp46,5 miliar atau 58,1% dari Rp80,0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp33,5 miliar pada tahun 2008, disebabkan oleh penurunan denda perhitungan pajak dan pebalti pembayaran dari Nokia Siemens Network untk keterlambatan penyelesaian proyek.

Perpajakan

Kami mencatat beban pajak penghasilan-bersih sebesar Rp859,5 miliar di tahun 2007 dibandingkan dengan Rp419,8 miliar di tahun 2008.

Penurunan beban pajak penghasilan-bersih disebabkan oleh penurunan beban pajak penghasilan tahun berjalan dan manfaat pajak penghasilan tangguhan yang dicatat. Penurunan beban pajak penghasilan saat ini disebabkan oleh penurunan pendapatan sebelum pajak sebagai akibat dari rugi kurs dan tingginya beban pendanaan. Kami mencatat beban pajak penghasilan tangguhan sebesar Rp198,8 miliar di tahun 2007 dibandingkan dengan manfaat pajak penghasilan tangguhan sebesar Rp159,9 miliar di tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh penyesuaian dalam pengakuan tarif pajak penghasilan, yang berubah untuk dari 30,0% pada tahun 2008 menjadi 28,0% pada tahun 2009.

Laba bersih

Laba bersih Perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp163,5 miliar, atau 8,0%, dari Rp2.042,0 miliar di tahun 2007 menjadi Rp 1.878,5 miliar di tahun 2008, yang mana disebabkan oleh faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya.

Likuiditas dan Sumber Daya Modal

Secara historis, kebutuhan likuiditas Perusahaan timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perusahaan. Bisnis telekomunikasi Perusahaan membutuhkan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan, terutama selama tahap

pembangunan jaringan. Meskipun kami memiliki banyak infrastruktur jaringan, kami memperkirakan bahwa Perusahaan akan kembali melakukan pengeluaran barang modal tambahan khususnya untuk pengembangan jaringan selular di daerah-daerah yang diperkirakan sebagai daerah yang tinggi pertumbuhannya, dan juga untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan yang telah ada.

Menurut kami, kas dan setara kas, arus kas dari kegiatan operasional Perusahaan dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia akan cukup memenuhi kebutuhan dana yang telah diperkirakan, termasuk kebutuhan dana untuk modal kerja dan pengeluaran barang modal yang telah direncanakan, di masa mendatang. Akan tetapi, apabila keadaan ekonomi dunia atau Indonesia memburuk, persaingan atau produk pengganti timbul lebih cepat dari yang diperkirakan saat ini atau nilai mata uang Rupiah melemah secara tajam terhadap Dolar AS, maka arus kas bersih Perusahaan yang berasal dari kegiatan operasi dapat menurun dan jumlah pengeluaran barang modal yang dibutuhkan dalam mata uang Rupiah dapat meningkat, dimana salah satu di antaranya dapat memberikan dampak buruk bagi likuiditas Perusahaan.

Arus Kas

Tabel di bawah ini menunjukkan informasi-informasi tambahan mengenai arus kas historis kami:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,			
	2007	2008	2009	
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS kecuali persentase)			
Arus kas bersih:	Rp	Rp	Rp	Dolar AS
Dari kegiatan operasional	8.273,9	6.513,3	4.051,2	431,0
Digunakan dalam kegiatan investasi	(7.290,4)	(10.286,9)	(10.670,7)	(1.135,2)
Diperoleh dari kegiatan pendanaan	4.237,0	1.458,5	3.724,7	396,2

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Kegiatan Operasional Perusahaan

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional adalah masing-masing sebesar Rp8.273,9 miliar, Rp6.513,3 miliar dan Rp4.051,2 miliar (US$431,0 juta) untuk tahun 2007, 2008 dan 2009. Pada 2008, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional menurun terutama karena kenaikan biaya operasional sebesar Rp1.957,0 miliar, kenaikan pembayaran beban bunga dan pembayaran premi swap valuta asing pada tahun 2008. Pada tahun 2008, pendapatan bunga kami meningkat menjadi Rp460,1 miliar sebagai akibat dari rata-rata saldo kas yang lebih tinggi yang kami terima dan peningkatan dalam suku bunga, terutama dari obligasi dan pinjaman kami. Kami juga menerima pengembalian pajak sebesar Rp271,3 juta sebagai akibat dari klaim untuk pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak. Pada tahun 2009, kas bersih dari kegiatan operasional menurun terutama karena adanya peningkatan beban usaha yang didorong oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan kenaikan biaya dibayar di muka jangka panjang yang, termasuk pembayaran dimuka untuk biaya perizinan sebesar Rp320 miliar untuk ijin 3G. Kami menambahkan bahwa tren penurunan arus kas juga terutama disebabkan aktivitas operasional bersamaan dengan adanya peningkatan beban usaha.

Kas Bersih Yang Digunakan Dalam Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi adalah masing-masing sebesar Rp7.290,4 miliar, Rp 10.286,9 miliar dan Rp10.670,7 miliar (US$1.135,2 juta) untuk tahun 2007, 2008 dan 2009. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 terutama didorong oleh akuisisi signifikan terhadap aset tetap, mencapai total masing-masing sebesar Rp6.933,6 miliar, Rp10.307,9 miliar dan Rp10.684,7 miliar (US$1.136,7 juta), seiring dengan dilakukannya perluasan cakupan dan kapasitas jaringan Perusahaan selama periode-periode ini. Aset tetap yang dibeli terutama meliputi peralatan telekomunikasi lainnya, peralatan kantor, peralatan teknis FWA, peralatan teknis selular dan sarana penunjang bangunan dan partisi.

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Dalam) Kegiatan Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah masing-masing sebesar Rp4.237,0 miliar, Rp1.458,5 miliar dan Rp3.724,7 miliar (US$396,2 juta) pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan pada 2008 terutama terkait dengan

pinjaman jangka panjang dan obligasi tambahan yang diterima pada tahun 2008 sejumlah Rp6.776,6 miliar yang sebagian diimbangi dengan pembayaran obligasi sebesar Rp3.828,8 miliar dan pembayaran dividen kas sebesar Rp1.021,0 miliar. Kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2009 terutama berkaitan dengan pinjaman jangka panjang tambahan sebesar Rp3.892,8 miliar (US$414,1 juta) dan penerbitan Obligasi Indosat Ketujuh dan Sukuk Ijarah Keempat sebesar Rp1.500,0 miliar (US$159,6 juta), yang sebagian diimbangi oleh pembayaran dividen kas sebesar Rp939,3 miliar (US$99,99 juta) dan pembayaran kembali pinjaman jangka panjang sebesar Rp632,8 miliar (US$67,3 juta).

Hutang Pokok

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah hutang yang terhutang per 31 Desember 2007, 2008 dan 2009:

	Sampai dengan 31 Desember			
	2007	2008	2009	
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS)			
	Rp	Rp	Rp	Dolar AS
Hutang jangka panjang (setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek)	4.249,0	10.812,2	12.721,3	1.353,3
Hutang obligasi (setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi, diskon, biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek)	10.088,7	10.315,6	8.472,2	901,3
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang	494,4	572,5	1.440,3	153,2
Bagian jangka pendek dari hutang obligasi	1.860,0	56,4	2.840,7	302,2

Peningkatan hutang pinjaman setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi dan bagain jangka pendek. menjadi sebesar Rp12.721,3 miliar (US$1.353,3 juta) per 31 Desember 2009 dari Rp10.812,2 miliar per 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh pinjaman-pinjaman baru dari Bank Central Asia, Bank Mandiri dan SEK, dan penarikan tambahan atas fasilitas HSBC France kami.

Penurunan hutang obligasi setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi, diskon dan biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek. dari Rp10.315,6 miliar per 31 Desember 2008 menjadi Rp8.472,2 miliar (US$901,3 juta) per 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh pembayaran atas Obligasi Indosat Ketiga Seri A kami.

Hutang kami meningkat sebesar 30,5% dari Rp16,692.1 miliar per tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp21,757.7 miliar per tanggal 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh (i) peningkatan emisi hutang baru di tahun 2008 untuk mendukung pengeluaran modal pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 dan (ii) efek akuntansi dari depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS. Nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah menurun dari US$1,00 untuk Rp9.393 per tanggal 31 Desember 2007 menjadi US$1,00 untuk Rp10.950 per tanggal 31 Desember 2008. Karena bagian kewajiban kami berdenominasi Dolar AS, kami berisiko terhadap fluktuasi Rupiah. Depresiasi Rupiah baru-baru ini dan peningkatan ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing mengekspos kami terhadap penyesuaian akunting jangka pendek yang mempengaruhi rasio keuangan kami. Untuk membantu menangani efek fluktuasi mata uang tersebut di masa depan, pada tahun 2009, kami mengubah kesepakatan rasio hutang terhadap ekuitas dalam semua instrumen dan perjanjian hutang kami untuk meningkatkan rasio dari 1,75 menjadi 2,50, untuk memberikan kami "ruang" tambahan dalam hal terjadinya pergerakan nilai tukar mata uang asing yang merugikan. Kami juga mengubah kesepakatan rasio hutang terhadap ekuitas untuk mencerminkan secara lebih baik efek kebijakan lindung nilai pada rasio ini dan mengubah definisi "Hutang" dan "Ekuitas" dalam instrumen dan perjanjian hutang tersebut untuk memberikan ruang dalam butir-butir tersebut. *Guaranteed Notes* yang jatuh tempo tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* yang jatuh tempo tahun 2012 tidak mengandung ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas.

Sebagai bagian dari perubahan yang disetujui pada tahun 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah definisi dalam beberapa instrumen dan perjanjian hutang kami (selain *Guaranteed Notes* yang jatuh tempo pada tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* yang jatuh tempo pada tahun 2012): (i) mengecualikan hal-hal non-kas, termasuk laba atau rugi kurs valuta asing, dari definisi "EBITDA"; (ii) mengecualikan hutang pengadaan berbunga dari definisi "Hutang" kecuali apabila jatuh temponya lebih dari enam bulan dari tanggal tagihan (invoice); dan (iii) memasukkan definisi "Ekuitas" (a) kepentingan minoritas, untuk entitas yang hutangnya 100% terkonsolidasi oleh kami, dan (b) pinjaman subordinasi pemegang saham.

Walaupun kami yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut akan memberikan kami ruangan yang cukup dalam hal terjadi ketidakstabilan antara nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah, kami tidak dapat memastikan bahwa ketidakstabilan yang lebih besar daripada yang terjadi pada 12 bulan terakhir tidak akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kami melanggar ketentuan keuangan kami.

Di bawah ini adalah penghitungan rasio keuangan kami secara historis yang terdapat dalam ketentuan keuangan kami. Rasio keuangan secara historis per tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 dihitung berdasarkan perubahan definisi "Hutang" (juga didefinisikan sebagai "Pinjaman" dalam beberapa terjemahan instrumen dan perjanjian hutang kami"), "Ekuitas" dan "EBITDA" dalam beberapa instrumen dan perjanjian kami yang seolah definisi tersebut telah berlaku sejak tanggal tersebut.

	Pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	Ketentuan Rasio	2007	2008	2009	
		Rp	Rp	Rp	US$
		(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS, kecuali persentase)			
Neraca dan Laporan Laba Rugi					
Bagian jangka pendek dari:					
Hutang jangka panjang		494,4	572,5	1.440,3	153,2
Hutang obligasi		1.860,0	56,4	2.840,7	302,2
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		1.794,9	1.596,1	2.192,5	233,2
Pihak ketiga		2.454,1	9.216,0	10.528,8	1.120,1
Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek		10.088,7	10.315,6	8.472,2	901,3
Biaya emisi hutang obligasi, biaya *consent solicitation* dan diskon yang belum diamortisasi		123,3	312,4	338,4	36,0
Jumlah hutang[1]		**16.815,4**	**22.069,0**	**25.812,9**	**2.746,0**
Jumlah Aset		45.305,1	51.693,3	55.041,5	5.855,5
Jumlah Kewajiban		28.463,0	33.994,8	36.753,2	3.909,9
Jumlah Ekuitas		16.842,1	17.698,6	18.288,3	1.945,6
Laba usaha		4.519,6	4.733,3	3.213,0	341,8
Penyusutan dan amortisasi		4.163,2	4.555,9	5.561,4	591,6
EBITDA[3] (tidak diaudit)		8.682,8	9.289,2	8.774,4	933,4
Beban Bunga[4]		1.396,1	1.776,5	1.808,6	192,4
Rasio Keuangan: (tidak diaudit)					
Rasio hutang terhadap Ekuitas	Tidak lebih dari 2,50x	1,00x	1,25x	1,41x	-

	Pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	Ketentuan Rasio	2007	2008	2009	
		Rp	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS, kecuali persentase)				
Rasio hutang terhadap EBITDA	Tidak lebih dari 3,50x	1,94x	2,38x	2,94x	-
Rasio EBITDA terhadap beban bunga	Tidak kurang dari 3,00x	6,22x	5,23x	4,85x	-

(1) Kami mendefinisikan total hutang sebagai total dari hutang pinjaman dan hutang obligasi (jatuh tempo lancar dan tidak lancar), biaya emisi (pinjaman, obligasi dan *notes*) yang belum diamortisasi, biaya *consent solicitation* (pinjaman dan obligasi) yang belum diamortisasi dan diskonto (pinjaman dan *notes*) yang belum diamortisasi. Menurut definisi yang telah diubah, "Hutang" berarti, dalam hubungannya dengan suatu pihak pada setiap tanggal penentuan (tanpa duplikasi):
   (a) jumlah hutang pokok dan premium (jika ada) sehubungan dengan hutang kepada pihak tersebut dan hutang yang sebagaimana dibuktikan dengan *notes*, surat hutang, obligasi atau instrument serupa lainnya untuk pembayaran kepada pihak tersebut yang bertanggung jawab dalam beberapa hal, tingkat bunga atau bunga yang harus dibayar; dan
   (b) seluruh kewajiban kepada suatu pihak sehubungan dengan hutang pengadaan yang merupakan hutang dagang kepada pemasok yang mengandung bunga atau bunga yang harus dibayar dan pembayaran untuk hutang dagang yang memiliki jatuh tempo lebih dari enam (6) bulan setelah tanggal penerbitan tagihan yang terkait, tetapi, sehubungan dengan anggota dari Perusahaan, atau anak perusahaannya, atau Group, tidak termasuk seluruh pinjaman yang diperoleh anggota group dari pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) yang memiliki peringkat subordinasi terhadap hutang termasuk dalam paragraf (a) dan (b) di atas.

(2) Kami mendefinisikan ekuitas sebagai total ekuitas para pemegang saham dan hak minoritas. Menurut definisi yang telah diubah, "Ekuitas" berarti jumlah aktiva dikurangi jumlah kewajiban, dimana jumlah kewajiban tidak termasuk seluruh pinjaman anggota Group kepada pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) yang mempunyai kedudukan subordinasi terhadap Hutang.

(3) Kami mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum bunga, amortisasi goodwill, pendapatan dan beban non-operasional, beban pajak penghasilan dan depresiasi, dan kepentingan minoritas dalam laba bersih anak perusahaan yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi termasuk laporan tahunan yang dibuat berdasarkan SAK. EBITDA bukanlah merupakan ukuran standar dalam SAK maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat (U.S. GAAP). Sebagaimana bisnis telekomunikasi memerlukan modal yang banyak, ketentuan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang dan beban bunga dapat memiliki efek yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan dengan hasil operasional yang sama. Oleh karena itu, kami yakin bahwa EBITDA memberikan gambaran yang berguna bagi hasil operasional kami dan bahwa laba bersih adalah ukuran keuangan yang paling dapat secara langsung dibandingkan terhadap EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak disarankan menganggap bahwa definisi kami tentang EBITDA merupakan indikator terhadap kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya berdasarkan SAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Amerika Serikat (U.S. GAAP), atau definisi perusahaan lainnya atas EBITDA. Definisi kami akan EBITDA tidak memperhitungkan pajak dan pengeluaran kas non-operasional lainnya. Dana yang didapat dari ukuran ini mungkin tidak dapat digunakan untuk pembayaran hutang karena adanya pembatasan ketentuan, ketentuan pengeluaran barang modal dan komitmen lainnya. Menurut definisi yang telah diubah, "EBITDA" berarti, untuk setiap periode, suatu jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan (finance cost), pajak, pendapatan atau biaya non operasional dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi, serta untuk keperluan penghitungan rasio total Hutang terhadap EBITDA, EBITDA juga memperhitungkan proforma dari adanya akuisisi atau pengalihan material atas aktiva atau usaha seolah-olah akuisisi atau pengalihan tersebut terjadi pada hari pertama periode tersebut.

(4) "Beban Bunga" berarti, untuk setiap periode, beban bunga atas hutang.

Tabel di bawah ini menunjuk pada laba bersih kami berdasarkan SAK untuk definisi kami akan EBITDA untuk periode yang ditunjukkan:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2007	2008	2009	
	Rp	Rp	Rp	Dolar AS
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS)			
EBITDA (tidak diaudit)	8.682,8	9.289,2	8.774,4	933,4
Penyesuaian:				
Amortisasi goodwill	(226,5)	(227,3)	(235,4)	(25,0)
Pendapatan Bunga	232,4	460,1	139,0	14,8
Biaya Pendanaan (termasuk beban bunga)	(1.428,6)	(1.858,3)	(1.873,0)	(199,3)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar derivatif – bersih	68,0	136,6	(517,7)	(55,1)
Lainnya - bersih	(80,0)	(33,6)	(150,3)	(16,0)
Keuntungan (kerugian) dari pertukaran valas – bersih	(155,3)	(885,7)	1.656,4	176,2
Beban pajak penghasilan	(859,5)	(419,8)	(677,3)	(72,0)
Depresiasi dan amortisasi	(4.163,2)	(4.555,9)	(5.561,4)	(591,6)
Kepentingan minoritas dalam laba bersih anak perusahaan	(28,1)	(26,8)	(56,5)	(6,0)
Laba bersih	**2.042,0**	**1.878,5**	**1.498,2**	**159,4**

Dari waktu ke waktu, kami dapat membeli kembali bagian efek hutang kami melalui transaksi pasar terbuka berdasarkan kondisi pasar pada umumya.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan hutang jangka panjang dan hutang obligasi utama kami per 31 Desember 2007, 2008 dan 2009.

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2007	2008	2009	
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS)			
	Rp	Rp	Rp	Dolar AS
Hutang Obligasi:				
Obligasi Indosat Kelima—setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	2.592,4	2.593,1	2.587,2	275,2
Guaranteed Notes yang jatuh tempo tahun 2010—setelah dikurangi beban emisi hutang yang belum diamortisasi	2.804,5	2.563,5	2.202,7	234,3
Obligasi Indosat Ketujuh— setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	-	-	1.293,8	137,6
Obligasi Indosat Keenam—setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	-	1.075,7	1.073,0	114,1
Guaranteed Notes jatuh tempo tahun 2012— setelah dikurangi diskon hutang yang belum diamortisasi dan beban emisi hutan yang belum diamortisasi	2.313,1	1.185,3	1.018,8	108,4

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2007	2008	2009	
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dollar AS)			
Obligasi Indosat Keempat—setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	809,2	810,6	811,0	86,3
Obligasi Indosat Ketiga—setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	2.491,4	637,3	637,9	67,9
Sukuk Ijarah Indosat Ketiga—setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	-	567,8	566,4	60,3
Sukuk Ijarah Indosat Kedua— setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	398,8	399,0	398,1	42,3
Obligasi Syariah Ijarah Indosat—setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	282,9	283,4	283,6	30,2
Obligasi Indosat Kedua	200,0	200,0	199,3	21,2
Sukuk Ijarah Indosat Keempat—setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi	-	-	199,0	21,2
Obligasi Terbatas II yang diterbitkan oleh Lintasarta *	31,1	31,1	25,0	2,7
Obligasi Terbatas I yang diterbitkan oleh Lintasarta **	25,3	25,3	17,0	1,8
Total hutang obligasi	11.948,7	10.372,1	11.312,8	1.203,5
Dikurangi jatuh tempo lancar	1.860,0	56,5	2.840,6	302,2
Hutang Obligasi: Bagian jangka panjang	**10.088,7**	**10.315,6**	**8.472,2**	**901,3**
Hutang Pinjaman:				
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa—setelah dikurangi beban emisi yang belum diamortisasi	1.994,9	1.796,1	2.592,5	275,8
Pihak Ketiga—setelah dikurangi beban emisi yang belum diamortisasi	2.748,5	9.588,5	11.569,1	1.230,8
Total hutang pinjaman	4.743,4	11.384,6	14.161,6	1.506,6
Dikurangi bagian jangka pendek	494,4	572,4	1.440,3	153,3
Hutang Pinjaman: Bagian jangka panjang	**4.249,0**	**10.812,2**	**12.721,3**	**1.353,3**

* Setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas II yang diterbitkan kepada Perusahaan sebesar Rp35,0 miliar
** Setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas I yang diterbitkan kepada Perusahaan sebesar Rp9,0 miliar Untuk uraian berkenaan dengan persyaratan pokok hutang dapat dilihat pada "Deskripsi Hutang Lain."

PRAKTEK PEMBAYARAN DIVIDEN

Pemegang saham kami menentukan pembayaran dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2008 dan 2009, pemegang saham mengumumkan dividen tunai final sebesar 50,0% dari laba bersih kami untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008. Kami berniat untuk terus melakukan pembayaran dividen dalam jumlah tersebut agar memungkinkan bagi kami untuk memenuhi tata kelola keuangan yang baik dan harapan investor.

SUMBER-SUMBER PERMODALAN

Kami percaya bahwa arus kas dari kegiatan operasional dan penarikan dari fasilitas kredit kami, akan memberikan pendanaan yang cukup untuk pengeluaran barang modal Perusahaan, pembayaran hutang dan kewajiban bunga serta kebutuhan operasional lainnya pada rencana bisnis saat ini. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada lambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tingkat pertumbuhan yang kami harapkan, turunnya peringkat hutang Perusahaan atau melemahnya kinerja keuangan atau rasio keuangan Perusahaan.

Apabila kami tidak dapat membiayai pengeluaran barang modal yang direncanakan dari arus kas internal Perusahaan, kami akan berupaya memperoleh sumber pembiayaan eksternal lainnya. Kemampuan kami untuk dapat memperoleh hutang pembiayaan tambahan tergantung pada beberapa ketentuan yang diatur pada perjanjian hutang Perusahaan yang telah ada. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan yang sesuai (termasuk pembiayaan dari pihak penjual (vendor) atau pihak ketiga lainnya) untuk membiayai pengeluaran barang modal yang telah direncanakan oleh Perusahaan. Apabila kami tidak dapat mencari sumber pembiayaan eksternal tambahan, maka kami akan memutuskan untuk menurunkan jumlah pengeluaran barang modal yang telah direncanakan. Penurunan jumlah pengeluaran barang modal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja operasional dan kondisi keuangan Perusahaan.

PENGELUARAN BARANG MODAL

Historis Pengeluaran Barang Modal

Sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009, jumlah total pengeluaran barang modal kami telah mencapai sebesar Rp33.652,8 miliar (3.395,0 juta Dolar AS).

Dana ini, terutama kami gunakan untuk membeli peralatan dan jasa-jasa dari pemasok asing sehubungan dengan pembangunan jaringan selular kami. Kami telah mencapai jumlah total pengeluaran barang modal sebesar Rp11.584.5 miliar (1.232,4 juta Dolar AS) selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, di mana investasi tersebut kami fokuskan pada perluasan cakupan selular kami melalui penambahan 2.691 BTS.

Pengeluaran Barang Modal Selama Tahun 2010

Berdasarkan program pengeluaran barang modal untuk berbagai kegiatan usaha kami, rencana pengeluaran barang modal kami berjumlah lebih sedikit dari pengeluaran pada tahun 2007, 2008 dan 2009, dikarenakan kami bermaksud untuk mengurangi pengambilalihan aktiva operasional dan lebih fokus pada upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan selular dan infrastruktur telekomunikasi kami yang ada saat ini. Sepanjang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, jumlah total pengeluaran barang modal kami yang terkonsolidasi masing-masing sebesar Rp9.726,4 miliar, Rp12.341,9 miliar, dan Rp11.584,5 miliar (1.232,4 juta Dolar AS).

Selama tahun 2010, kami bermaksud untuk mengalokasikan 550 juta sampai dengan 700 juta Dolar AS untuk pengeluaran barang modal yang baru, yang, diambil bersama dengan estimasi pengeluaran barang modal yang sebenarnya dikeluarkan untuk tahun 2010 dengan komitmen pengeluaran barang modal pada periode sebelumnya, akan menghasilkan jumlah aktual pengeluaran barang modal sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 juta Dolar AS untuk tahun 2010.

Kami bermaksud untuk mengalokasikan pengeluaran barang modal tahun 2010 dengan cara sebagai berikut:

- ***Investasi Jaringan Selular:*** Kami berencana untuk menempatkan sebagian besar pengeluaran barang modal kami untuk membiayai kelanjutan peningkatan dan perluasan kapasitas dan cakupan jaringan selular kami.
- ***Investasi lain:*** Kami berencana untuk menginvestasikan sisa pengeluaran barang modal untuk area-area di luar jaringan selular, termasuk jaringan akses tetap, sebagaimana kami meningkatkan akses jaringan untuk pelanggan perusahaan kami, dan selanjutnya menyediakan untuk pelanggan servis suara, jarak jauh dan MIDI, serta mengadakan peningkatan kekuatan perusahaan kami.

Jumlah di atas merepresentasikan rencana penganggaran investasi kami; pengeluaran aktual atas dasar kas akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk metode pembiayaan dan waktu penyelesaian pengiriman peralatan dan jasa yang dibeli. Secara historis, pengeluaran atas dasar jalur uang tunai dianggarkan akan menghabiskan biaya sekitar 20,0% dari anggaran kami.

Rencana pengeluaran barang modal di atas didasarkan pada pemahaman kami tentang keadaan pasar dan kondisi peraturan saat ini, dan kami dapat mengubah rencana kami dalam menanggapi perubahan kondisi-kondisi tersebut. Secara khusus, tergantung pada

kerangka peraturan atas jasa jaringan nirkabel lainnya, kami dapat memutuskan untuk meningkatkan investasi kami pada jaringan dan layanan akses tetap nirkabel, baik melalui peningkatan pengeluaran barang modal, realokasi rencana pengeluaran yang ada, skema pembagian pendapatan atau kombinasi dari ketiga hal di atas. Skema pembagian pendapatan akan mencakup kerjasama dengan investor swasta di mana investor akan membiayai pembangunan proyek dengan imbalan pendapatan dari proyek tersebut, yang mirip dengan struktur *build-operate-transfer*.'

KEWAJIBAN KONTRAKTUAL DAN KOMITMEN KEUANGAN

Per 31 Desember 2009, kami memiliki kewajiban kontraktual dalam jumlah sebesar 1.280,4 juta Dolar AS berdasarkan kontrak-kontrak dalam mata uang asing dan Rp16.777,6 miliar berdasarkan kontrak-kontrak dalam mata uang rupiah. Kewajiban-kewajiban kontraktual dalam mata uang asing mewajibkan pembayaran sebesar 378,9 juta Dolar AS pada tahun 2010, 492,4 juta Dolar AS dari tahun 2011 sampai tahun 2012 dan US$256,6 juta dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dan 152,5 juta Dolar AS dari tahun 2015 ke atas. Kewajiban-kewajiban kontraktual dalam mata uang Rupiah mewajibkan pembayaran sebesar Rp2.795,5 miliar pada tahun 2010, Rp4.796,9 miliar dari tahun 2011 sampai tahun 2012, Rp5.672,3 miliar dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dan Rp3.512,9 miliar dari tahun 2015 ke depan.

	Pembayaran terhutang pada periode 31 Desember									
	Total		2010		2011-2012		2013-2014		2015 dan setelahnya	
	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS)									
Kewajiban Kontraktual:										
Hutang Jangka Panjang[1]	6.633,0	831,2	993,8	47,5	3.654,9	383,0	1.984,3	256,6	-	144,1
Hutang Obligasi[1][2]	8.132,0	344,2	640,0	234,8	1.142,0	109,4	3.688,0	-	2.662,0	-
Kewajiban Pembelian	1.161,7	96,6	1.161,7	96,6	-	-	-	-	-	-
Kewajiban tidak Lancar Lainnya	850,9	8,4	-	-	-	-	-	-	850,9	8,4
Total kewajiban kontraktual tunai	**16.777,6**	**1.280,4**	**2.795,5**	**378,9**	**4.796,9**	**492,4**	**5.672,3**	**256,6**	**3.512,9**	**152,5**

PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR

Kami memiliki risiko terhadap pasar terutama yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, dan perubahan nilai tukar valuta asing, dan risiko nilai ekuitas atas nilai investasi jangka panjang Perusahaan. Untuk mengatur risiko nilai tukar valuta asing dan nilai tingkat suku bunga, kami telah menandatangani kontrak swap suku bunga, kontrak swap valuta asing dan kontrak *forward* valuta asing atau transaksi lainnya yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau mengatur dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga pada pelaksanaan kegiatan bisnis dan arus kas kami. Kami mengadakan transaksi-transaksi tersebut untuk memperkecil risiko terkait praktek-praktek yang bersifat spekulasi. Kami mencatat hal-hal tersebut bukan sebagai transaksi lindung nilai (*hedge*), dimana perubahan dalam nilai wajar akan ditagih atau dikreditkan secara langsung sebagai beban atau pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Kami mengkonversi kelebihan dana dalam mata uang Rupiah menjadi Dolar AS secara berkala yang jumlahnya disesuaikan dengan pengeluaran kami dalam mata uang Dolar AS.

Sensitivitas Tingkat Suku Bunga

Per 31 Desember 2009, sebagian besar dari hutang kami yang terhutang memiliki tingkat bunga tetap.

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai instrumen keuangan kami yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Untuk hutang jangka panjang dan obligasi yang harus dibayar, tabel ini menyajikan arus kas pokok dan tingkat suku bunga yang terkait dengan perkiraan tanggal jatuh tempo. Informasi yang disajikan di dalam tabel tersebut telah dibuat berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini: (i) variabel tingkat suku bunga deposito dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah adalah berdasarkan tingkat suku bunga pada tahun 2009; (ii) tingkat suku bunga deposito jangka panjang dalam mata uang Rupiah adalah berdasarkan sertifikat Bank Indonesia untuk tiga bulan, sertifikat Bank Indonesia untuk satu bulan dan JIBOR tiga bulan pada bulan Desember 2009 ditambah marjin; (iii) tingkat suku bunga hutang jangka panjang dalam mata uang Dolar AS adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dari berbagai perjanjian. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa asumsi-asumsi tersebut adalah benar untuk periode di masa mendatang. Asumsi- asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kenaikan tingkat suku bunga di Indonesia akibat terus berlangsungnya keadaan ekonomi yang tidak likuid dan faktor-faktor moneter dan makro ekonomi lainnya yang mempengaruhi Indonesia.

		Jumlah terhutang pada tanggal 31 Desember 2009		Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember						
	Suku bunga	Mata uang asing	Jumlah Rupiah yang setara	2010	2011	2012	2013	2014	2015 dan setelahnya	Jumlah
		(dalam jutaan US$)	(dalam miliar Rp)	(dalam miliar Rp)						
Aset										
Suku bunga variabel										
Deposito berjangka dan deposits on call										
Rp	2,50% - 14,50%	-	2.395,4	2.395,4	-	-	-	-	-	2.395,4
US$	0,001% - 6,00%	23,0	216,1	216,1	-	-	-	-	-	216,1
Total aset		23,0	2.611,5	2.611,5	-	-	-	-	-	2.611,5
Kewajiban										
Hutang jangka panjang										
Suku bunga tetap										
Rp			434,3	-	-	-	434,3	-	-	434,3
Pokok			-	38,0	38,0	38,0	19,0	-	-	133,0
Bunga	Suku bunga tetap 8,75% per tahun									
US$										
Pokok		217,8	2,053.0	271,3	235,6	199,8	303,5	199,8	843,0	2.053,0
Bunga	Suku bunga tetap, berkisar dari 4,15% per tahun dan 5,69% per tahun		-	100,7	87,1	75,7	65,1	54,4	121,0	504,0
Suku bunga variabel										
Rp										
Pokok			6.198,7	993,8	1.029,9	2.625,0	550,0	1.000,0	-	6.198,7
Bunga	Suku bunga mengambang JIBOR 3 bulanan ditambah 1,5% - 4,0%		-	578,9	526,3	348,3	153,5	63,9	-	1.706,9
US$										
Pokok		612,7	5.759,8	201,2	2.273,9	890,8	1.694,5	214,0	485,4	5.759,8
Bunga	Suku bunga mengambang LIBOR 6 bulanan ditambah 0,35% - 2,87%		-	164,5	175,4	140,2	89,5	40,6	52,8	663,0

		Jumlah terhutang pada tanggal 31 Desember 2009		Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember						
	Suku bunga	Mata uang asing	Jumlah Rupiah yang setara	2010	2011	2012	2013	2014	2015 dan setelahnya	Jumlah
		(dalam jutaan US$)	(dalam miliar Rp)	(dalam miliar Rp)						
Hutang obligasi										
Suku bunga tetap										
Rp										
Pokok			8.090,0	640,0	1.100,0	-	1.330,0	2.358,0	2.662,0	8.090,0
Bunga	Berkisar dari 10,2% per tahun – 16,0% per tahun.		-	902,1	753,7	687,7	619,5	468,2	1,139,3	4,570,5
US$										
Pokok		344,2	3.235,1	2.206,6	-	1.028,5	-	-	-	3.235,1
Bunga	7,75% dan 7,125%		-	244,3	73,3	36,6	-	-	-	354,2
Suku bunga variabel										
Rp										
Pokok			42,0	-	-	42,0	-	-	-	42,0
Bunga	Maksimum sebesar 19% per tahun and Minimum sebesar 12,75% per tahun		-	5,4	5,4	2,6	-	-	-	13,4
Jumlah kewajiban		**1.174,7**	**25.812,9**	**6.346,8**	**6.298,6**	**6.151,2**	**5.258,9**	**4.398,9**	**5.303,5**	**33.757,9**
Arus kas bersih		**(1.151,7)**	**(23.201,4)**	**(3.753,3)**	**(6.298,6)**	**(6.151,2)**	**(5.258,9)**	**(4.398,9)**	**(5.303,5)**	**(31.146,4)**

Kontrak Swap Suku Bunga

Pada tahun 2008, kami mengadakan sepuluh kontrak swap suku bunga dengan lima lembaga keuangan internasional sebesar US $ 362,2 juta secara total di mana kami sepakat untuk melakukan pembayaran tingkat bunga tetap sebagai ganti dari enam bulan Dolar AS LIBOR-*linked* tingkat suku bunga mengambang ditambah baik 0,35%, 1,45% atau 1,85% per tahun dalam rangka mencegah risiko tingkat suku bunga atas masing-masing perjanjian pembiayaan satelit HSBC Sinosure dan HSBC Commercial serta Kredit Sindikasi ING/DBS kami. Pada tahun 2009, kami mengadakan berbagai kontrak barter tingkat suku bunga dengan pihak-pihak yang berbeda yang meliputi nilai total sebesar US $ 121,0 juta.

Tingkat Sensitivitas Nilai Tukar

Kami memiliki risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing terutama akibat adanya kewajiban hutang jangka panjang, obligasi yang harus dibayar dan piutang dan hutang dalam mata uang Dolar AS.

Kewajiban utama kami yang harus dibayar adalah kewajiban pembayaran bersih dalam valuta asing kepada para operator telekomunikasi asing, sementara di lain pihak, sebagian besar piutang kami adalah dalam mata uang Rupiah dari para operator domestik. Selama periode sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009, nilai tukar Rupiah/ Dolar AS berkisar dari yang terendah yaitu Rp12.400 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp8.672 per Dolar AS, dan selama tahun 2009, berkisar dari yang terendah yaitu Rp12.065 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp9.293 Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2009, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku adalah sebesar Rp9.400 per Dolar AS. Dengan demikian, kami mencatat kerugian nilai tukar bersih sebesar Rp155,3 miliar, dan Rp885,7 miliar masing-masing pada tahun 2007 dan 2008, dan keuntungan sebesar Rp 1.656,4 miliar (176,2 juta Dolar AS) pada tahun 2009.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi-informasi mengenai instrumen keuangan kami dalam mata uang yang terkait dan menyajikan informasi tersebut dalam mata uang Rupiah yang setara nilainya, yang dalam hal ini merupakan mata uang yang digunakan dalam dokumen pelaporan kami. Tabel ini merangkum informasi mengenai instrumen dan transaksi yang sensitif terhadap nilai tukar valuta asing, termasuk deposito, hutang dan piutang, dan instrumen keuangan Perusahaan seperti deposito, piutang dan hutang, dan hutang jangka panjangnya. Tabel ini menyajikan arus kas pokok pada perkiraan tanggal jatuh tempo.

	Jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember							
	Mata uang asing	2010	2011	2012	2013	2014	Seterusnya	Jumlah
	(dalam jutaan Dolar AS)	(dalam miliar Rp)						
Aset								
Kas dan setara kas[1]								
Dalam mata uang Dolar AS	37,1	348,9	-	-	-	-	-	348,9
Piutang usaha								
Dalam mata uang Dolar AS	177,8	1.671,4	-	-	-	-	-	1.671,4
Aset derivatif								
Dalam mata uang Dolar AS	23,9	224,7	-	-	-	-	-	224,7
Aset lancar lainnya								
Dalam mata uang Dolar AS	1,7	15,9	-	-	-	-	-	15,9
Piutang hubungan istimewa								
Dalam mata uang Dolar AS	0,1	0,7	-	-	-	-	-	0,7
Aset tidak lancar lainnya								
Dalam mata uang Dolar AS	1,4	0,1	0,3	1,0	-	-	11,7	13,1
Jumlah aset	**242,0**	**1.261,7**	**0,3**	**1,0**	**-**	**-**	**11,7**	**2.274,7**
Kewajiban								
Hutang dagang								
Dalam mata uang Dolar AS	4,9	46,3	-	-	-	-	-	46,3
Hutang pengadaan								
Dalam mata uang Dolar AS	310,2	2.915,4	-	-	-	-	-	2.915,4
Biaya masih harus dibayar								
Dalam mata uang Dolar AS	38,5	362,2	-	-	-	-	-	362,2
Uang muka pelanggan								
Dalam mata uang Dolar AS	0,8	7,9	-	-	-	-	-	7,9
Kewajiban derivatif								
Dalam mata uang Dolar AS	21,3	200,2	-	-	-	-	-	200,2

	Jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember							
	Mata uang asing	2010	2011	2012	2013	2014	Seterusnya	Jumlah
	(dalam jutaan Dolar AS)	(dalam miliar Rp)						
Kewajiban lancar lainnya								
Dalam mata uang Dolar AS	0,0	0,4	-	-	-	-	-	0,4
Hutang jangka panjang								
Dalam mata uang Dolar AS	831,2	446,5	2.509,5	1.090,6	1.998,1	413,8	1.354,4	7.812,9
Hutang obligasi								
Dalam mata uang Dolar AS	344,2	2.206,6	-	1.028,5	-	-	-	3.235,1
Kewajiban tidak lancar lainnya								
Dalam mata uang Dolar AS	8,4	-	-	-	-	-	78,6	78,6
Jumlah kewajiban	**1.559,5**	**6.185,5**	**2.509,5**	**2.119,1**	**1.998,1**	**413,8**	**1.433,0**	**14.659,0**
Arus kas bersih	**(1.317,5)**	**(3.923,8)**	**(2.509,2)**	**(2.118,1)**	**(1.998,1)**	**(413,8)**	**(1.421,3)**	**(12.384,3)**

(1) Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits.

Informasi yang diberikan dalam tabel ini telah ditentukan berdasarkan asumsi bahwa nilai tukar terhadap Dolar AS didasarkan pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp9.400 = 1,00 Dolar AS. Bagaimanapun, kami tidak dapat memastikan bahwa asumsi-asumsi tersebut akan tetap untuk masa yang akan datang. Asumsi-asumsi tersebut dan informasi yang diberikan dalam tabel berikut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk depresiasi lebih lanjut terhadap rupiah pada masa yang akan datang.

Kontrak Swap Valuta Asing

Per tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan tetap memiliki kontrak swap valuta asing yang dibuat antara 2005 dan 2008. Dari tahun 2007 hingga 2009, kami menyelesaikan seluruh sisa kontrak *structured forward* dengan empat lembaga keuangan internasional yang berbeda. Per tanggal 31 Desember 2009, kami mendapatkan fasilitas lindung nilai (*hedging facilities*) sebesar US$509,0 juta yang mewakili 43,3% dari obligasi dan pinjaman kami dalam mata uang Dolar AS per tanggal 31 Desember 2009, sesuai dengan target kami untuk melakukan lindung nilai sekitar 50% dari eksposur valuta asing.

Per tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki kontrak valuta asing terhutang dimana kami setuju untuk membayarkan Rupiah sebagai ganti kewajiban partner kami untuk membayarkan Dolar AS, berdasarkan nilai tukar spot yang disetujui. Akan tetapi, dalam hal Rupiah menguat terhadap Dolar AS, kami akan mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tersebut, yang mana dapat memberikan dampak negatif bagi kondisi keuangan Perusahaan.

Risiko Harga Ekuitas

Investasi jangka panjang kami terutama terdiri dari investasi kecil dalam bentuk saham di perusahaan-perusahaan swasta Indonesia dan di perusahaan-perusahaan asing. Sehubungan dengan investasi kami di perusahaan-perusahaan Indonesia, kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat terkena dampak buruk akibat kondisi ekonomi di Indonesia.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasi kami telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan penilaian yang mempengaruhi jumlah aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban yang dilaporkan serta aktiva dan kewajiban kontinjensi. Taksiran dan penilaian manajemen didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang relevan pada kondisi tersebut. Kami secara terus-menerus mengevaluasi taksiran dan penilaian tersebut. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari taksiran di atas bila asumsi atau kondisi yang sebenarnya berbeda.

Kami juga menyediakan rangkuman dari perbedaan signifikan antara prinsip akuntansi kami dan prinsip akuntansi berdasarkan IFRS. Lihat rekonsiliasi Prinsip Akuntansi berdasarkan SAK dengan IFRS. Kami percaya bahwa dengan adanya perbedaan signifikan prinsip akuntansi, berikut ini mungkin akan melibatkan tingkat penilaian atau kompleksitas yang lebih tinggi.

Goodwill dan Aktiva Tidak Berwujud Lainnya

Pada saat kami mengakuisisi anak perusahaan yang bukan merupakan perusahaan sepengendali, selisih lebih antara harga perolehan di atas bagian pemilikan kami atas nilai wajar aktiva anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, setelah dikurangi kewajiban, pada tanggal akuisisi diakui sebagai goodwill. Dilakukan tes penurunan nilai secara berkala terhadap goodwill dan aktiva tak berwujud. Banyaknya penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan kisaran nilai pasar wajar untuk aktiva dan kewajiban anak perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan kami secara material.

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun.

Total biaya perolehan dari goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya per 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebesar Rp2.087,2 miliar, Rp1.833,4 miliar dan Rp1.580,1 miliar (US$ 168,1 juta).

Taksiran Umur Manfaat dan Penurunan Nilai Aset Tetap

Kami telah memilih model biaya untuk mengukur aset tetap. Kami mengelompokkan kembali beberapa aset tetap mulai tanggal 1 Januari 2008 berdasarkan tinjauan dan penilaian berkala kami terhadap umur manfaat aktiva. Jumlah umur manfaat yang tersisa setelah pengelompokan yang baru disesuaikan. Di bawah ini adalah perkiraan umur manfaat (dalam tahun) yang kami gunakan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007, 2008 dan 2009:

	Tahun Berakhir 31 Desember 2007	Tahun Berakhir 31 Desember 2008 dan 2009
Bangunan	15 sampai 20	20
Kabel laut	12	-
Stasiun bumi	10	-
Kabel bawah tanah	15	-
Peralatan sentral	10	-
Peralatan telekomunikasi lainnya	5	-
Peralatan teknologi informasi	3 sampai 5	3 sampai 5
Peralatan kantor	5	3 sampai 5
Sarana penunjang bangunan & partisi	5	3 sampai 15
Kendaraan	5	5
Peralatan teknis selular	10 sampai 15	10
Peralatan teknis satelit	12	-
Peralatan *cross-connection* dan transmisi	12	10 sampai 15
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	10	10
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	-	3 sampai 5
Peralatan jaringan akses tetap	-	10

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar yang meningkatkan kondisi aset melebihi standar kinerja semula, dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap, dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar harga perolehan. Semua biaya pinjaman, yang dapat diatribusikan ke aset tertentu, dikapitalisasi ke harga perolehan aset dalam pembangunan dan pemasangan. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan dan pemasangan selesai dan aset yang dibangun atau dipasang tersebut siap untuk digunakan. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, Perusahaan meluncurkan Satelit Palapa-D. Satelit tersebut mengalami gangguan kinerja dari kendaraan peluncur dalam proses penempatannya pada posisi orbit yang ditentukan. Akibatnya, masa orbit dari satelit menjadi berkurang. Klaim auransi untuk kerusakan sebagian telah dibuat dan diakui sebagai pengurang biaya perolehan satelit. Satelit tersebut mulai beroperasi pada bulan November 2009 seteleah sebelumnya mengalami proses pengujian dan penempatan pada posisi orbitnya pada bulan September dan Oktober 2009.

Nilai tercatat aset tetap setelah dikurangi, akumulasi depresiasi per tanggal 31 Desember 2007, 2008, dan 2009 adalah masing-masing sebesar Rp30.572,8 miliar, Rp38.394,1 miliar dan Rp44.428,8 miliar (US$ 4.726,5 juta).

Dana Pensiun dan Kenikmatan Karyawan

Kewajiban dan biaya kami untuk pensiun dan kenikmatan karyawan lainnya ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih dari masing-masing imbalan yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau nilai wajar aset dana pensiun, mana yang lebih tinggi, pada tanggal terseut.

Sementara kami meyakini bahwa asumsi-asumsi tersebut beralasan dan tepat, perbedaan signifikan dalam kenyataan atau perubahan asumsi yang signifikan dapat mempengaruhi biaya dan kewajiban dana pensiun dan kenikmatan karyawan lainnya secara signifikan.

Beban pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 mencapai nilai masing-masing Rp47,3 miliar, Rp36,8 miliar dan Rp32,3 miliar dan beban pensiun dibayar di muka bersih per 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 mencapai nilai masing-masing Rp200,1 miliar, Rp173,1 miliar dan Rp149,8 miliar.

Pajak

Beban pajak saat ini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan. Pajak atas aktiva dan kewajiban yang ditangguhkan diakui sebagai perbedaan temporer antara laporan keuangan dan dasar pengenaan pajak atas aktiva dan kewajiban pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti akumulasi rugi pajak, juga diakui sampai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Pengaruh pajak untuk periode dialokasikan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan kepada pemegang saham.

Pajak atas aktiva dan kewajiban yang ditangguhkan diukur pada tarif pajak yang diharapkan berlaku pada periode saat aktiva tersebut direalisasikan atau kewajiban diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan tentang pajak) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai pada pajak aktiva dan kewajiban yang ditangguhkan disebabkan oleh perubahan dalam tarif pajak yang dikreditkan atau dibebankan pada operasional periode berjalan, kecuali apabila hal tersebut berhubungan dengan hal-hal yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan kepada pemegang saham.

Amandemen terhadap kewajiban perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan sementara dan akumulasi rugi pajak, yang dapat berupa aktiva atau kewajiban, ditunjukan dalam jumlah bersih.

Penyelenggaraan *Off-Balance Sheet*

Sampai pada tanggal laporan tahunan ini, kami belum menerima dokumen mengenai penyelenggaraan off balance sheet.

Kebijakan Keuangan Non-Standar Akuntansi Keuangan

Kami menggunakan EBITDA untuk memberikan informasi tambahan mengenai kinerja operasional kami. EBITDA merujuk pada pendapatan kami sebelum hal-hal di bawah ini:

- Beban pendanaan (termasuk beban bunga)
- Pendapatan bunga;
- Penyusutan dan amortisasi;
- Rugi perubahan nilai wajar derivatif (bersih);
- Amortisasi goodwill;
- Rugi kurs (bersih);
- Pendapatan/beban non-operasional;
- Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan; dan
- Beban pajak penghasilan.

EBITDA bukan merupakan ukuran standar baik menurut IFRS ataupun SAK. Karena bisnis telekomunikasi merupakan bisnis yang memerlukan modal yang besar, permintaan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang serta beban bunga dapat memiliki efek yang signifikan pada pendapatan bersih perusahaan dengan hasil operasional yang sama. Oleh karena itu, kami percaya bahwa kelompok investor biasanya menggunakan perhitungan keuangan jenis ini untuk menilai kinerja operasional Perusahaan dalam sektor pasar kami.

Sebagai ukuran dari kinerja operasional kami, kami yakin ukuran yang paling dapat dibandingkan dengan EBITDA berdasarkan SAK maupun IFRS adalah laba bersih. Kami menggunakan EBITDA sebagai tambahan terhadap laba bersih karena laba bersih mencakup banyak item akuntansi yang terkait dengan pengeluaran barang modal, seperti depresiasi, dan juga item non-operasional, seperti amortisasi goodwill dan pendapatan bunga, serta beban bunga. Dengan meminimalkan perbedaan pengeluaran barang modal dan beban penyusutan terkait begitu pula dengan posisi pajak yang dilaporkan, amortisasi goodwill dan pendapatan bunga serta beban bunga, EBITDA memberikan informasi lebih lanjut mengenai kinerja operasional dan ukuran tambahan untuk membandingkan kinerja operasional kami dengan hasil dari perusahaan lain. Dana yang didapatkan dari cara ini mungkin tidak dapat digunakan untuk pembayaran hutang karena adanya pembatasan ketentuan dalam perjanjian, ketentuan pengeluaran barang modal dan komitmen-komitmen lainnya.

Tabel di bawah ini merekonsiliasi pendapatan bersih kami berdasarkan SAK dengan definisi EBITDA untuk periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,			
	2007	2008	2009	
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS)			
	Rp	Rp	Rp	Dolar AS
EBITDA (tidak diaudit)	8.682,8	9.289,2	8.774,4	933,4
Penyesuaian:				
Amortisasi goodwill	(226,5)	(227,3)	(235,4)	(25,0)
Pendapatan bunga	232,4	460,1	139,0	14,8
Beban pendanaan (termasuk beban bunga)	(1.428,6)	(1.858,3)	(1.873,0)	(199,3)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif - bersih	68,0	136,6	(517,7)	(55,1)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,			
	2007	2008	2009	
	(dalam miliar Rp dan jutaan Dolar AS)			
	Rp	Rp	Rp	Dolar AS
Lainnya—bersih	(80,0)	(33,6)	(150,3)	(16,0)
Laba (rugi) kurs—bersih	(155,3)	(885,7)	1.656,4	176,2
Beban pajak penghasilan (bersih)	(859,5)	(419,8)	(677,3)	(72,0)
Penyusutan dan amortisasi	(4.163,2)	(4.555,9)	(5.561,4)	(591,6)
Hak minoritas atas pendapatan bersih anak perusahaan	(28,1)	(26,8)	(56,5)	(6,0)
Laba bersih	2.042,0	1.878,5	1.498,2	159,4

Anda tidak disarankan untuk menggunakan definisi EBITDA berdiri sendiri atau memakainya sebagai alternatif terhadap laba bersih atau sebagai indikator kinerja operasional atau ukuran standar lainnya berdasarkan SAK ataupun IFRS. Kebijakan EBITDA kami mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kebijakan lain yang serupa yang digunakan oleh perusahaan lain.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2009 DAN 2008 (DIAUDIT)
PT INDOSAT TBK

BOARD OF DIRECTORS STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2009 AND 2008 (AUDITED)
PT INDOSAT TBK

No. 007/A00/FIN/10

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Harry Sasongko
   Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Alamat Rumah : Jl. Ciasem III/1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 3869 600
   Jabatan : President Director and Chief Executive Officer

2. Nama : Peter Wladyslaw Kuncewicz
   Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Alamat Rumah : Jl Kebon Kacang Raya No.2 Jakarta Pusat
   Nomor telepon : 3869 606
   Jabatan : Director and Chief Financial Officer

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

We the undersigned:

1. *Name : Harry Sasongko*
   Office Address : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Home Address : Jl. Ciasem III/1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
   Phone Number : 3869 600
   Designation : President Director and Chief Executive Officer

2. *Name : Peter Wladyslaw Kuncewicz*
   Office Address : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Home Address : Jl. Kebon Kacang Raya No. 2 Jakarta Pusat
   Phone Number : 3869 606
   Designation : Director and Chief Financial Officer

hereby declares:

1. *Responsible to the preparation and the presentation of the company's financial statements;*
2. *The company's financial statements are prepared and presented according to the generally acceptable accounting principle;*
3. a. *All information contained in the company's financial statements is complete and true;*
   b. *The company's financial statement does not contain any false material information or facts, and does not omit any material information or facts;*
4. *Responsible to the company's internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 24 Maret/March 2010

President Director and Chief Executive Officer	*Director and Chief Financial Officer*
Harry Sasongko	**Peter Wladyslaw Kuncewicz**
NIK. 30000016	NIK. 30000017

LAPORAN KEUANGAN

PT Indosat Tbk dan Anak Perusahaan

Laporan keuangan konsolidasi
beserta laporan auditor independen
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2009 dan 2008

LAPORAN -
REKONSILIASI PSAK TERHADAP IFRS

REKONSILIASI/REKLASIFIKASI ANTARA PSAK DENGAN IFRS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009

Tabel berikut ("Tabel Rekonsiliasi") menyajikan rekonsiliasi antara laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2009 dan laporan pendapatan komprehensif konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 untuk masing-masing perbedaan antara laporan keuangan berdasarkan IFRS dan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK.

Rekonsiliasi antara laporan posisi keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK dan IFRS yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2009:

	PSAK	Rekonsiliasi/ Reklasifikasi	IFRS
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2.835.999	-	2.835.999
Piutang			
Usaha	1.356.697	-	1.356.697
Lain-lain	593.287	-	593.287
Persediaan - bersih	112.260	-	112.260
Aset derivatif	224.743	(739)	224.004
Uang muka	35.173	-	35.173
Pajak dibayar di muka	818.326	(818.326)	-
Piutang Pajak	-	396.581	396.581
Biaya dibayar di muka	1.125.091	-	1.125.091
Aset lancar lainnya	38.051	386.572	424.623
Aset keuangan lancar lainnya	-	35.173	35.173
Jumlah Aset Lancar	7.139.627	(739)	7.138.888
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang hubungan istimewa - bersih	7.215	-	7.215
Aset pajak tangguhan - bersih	85.812	2.187	87.999
Investasi pada perusahaan asosiasi	422	-	422
Investasi jangka panjang lainnya	2.730	-	2.730
Aset tetap - bersih	44.428.807	(506.465)	43.922.342
Goodwill dan aset tak berwujud lainnya - bersih	1.580.080	462.737	2.042.817
Izin dibayar di muka jangka panjang	463.549	-	463.549
Piutang jangka panjang	66.611	-	66.611
Pensiun dibayar di muka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	147.380	-	147.380
Uang muka jangka panjang	294.391	-	294.391
Sewa tanah dibayar di muka	-	377.868	377.868
Aset tidak lancar lainnya	824.863	(84.160)	740.703
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	84.160	84.160
Jumlah Aset Tidak Lancar	47.901.860	336.327	48.238.187
JUMLAH ASET	**55.041.487**	**335.588**	**55.377.075**

LAPORAN -
REKONSILIASI PSAK TERHADAP IFRS

	PSAK	Rekonsiliasi/ Reklasifikasi	IFRS
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang usaha	537.476	-	537.476
Hutang pengadaan	5.289.782	-	5.289.782
Hutang Pajak	161.820	(99.872)	61.948
Biaya masih harus dibayar	1.583.732	(58.171)	1.525.561
Pendapatan diterima di muka	941.223	21.751	962.974
Uang muka pelanggan	22.463	-	22.463
Kewajiban derivatif	200.202	(25.662)	174.540
Bagian jangka pendek dari:			
Hutang jangka panjang	1.440.259	-	1.440.259
Hutang obligasi	2.840.662	-	2.840.662
Kewajiban lancar lainnya	50.503	114.323	164.826
Kewajiban keuangan lancar lainnya	-	43.721	43.721
Jumlah Kewajiban Lancar	13.068.122	(3.910)	13.064.212
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Hutang hubungan istimewa	13.764	-	13.764
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	1.535.202	115.116	1.650.318
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	12.721.308	(5.816)	12.715.492
Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek	8.472.175	-	8.472.175
Kewajiban tidak lancar lainnya	942.633	(6.546)	936.087
Kewajiban keuangan tidak lancar lainnya	-	6.546	6.546
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	23.685.082	109.300	23.794.382
HAK MINORITAS	**330.593**	**(330.593)**	**-**
EKUITAS			
Modal saham	543.393	-	543.393
Agio saham	1.546.587	-	1.546.587
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	119.464	-	119.464
Belum ditentukan penggunaannya	15.341.773	233.828	15.575.601
Selisih transaksi perubahan ekuitas Perusahaan asosiasi/Anak Perusahaan	404.104	(404.104)	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2.369	(2.369)	-
Komponen ekuitas lainnya	-	406.473	406.473
Jumlah ekuitas yang menjadi hak Pemilik Perusahaan	17.957.690	233.828	18.191.518
Hak Minoritas	-	326.963	326.963
Jumlah Ekuitas	**17.957.690**	**560.791**	**18.518.481**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**55.041.487**	**335.588**	**55.377.075**

LAPORAN - REKONSILIASI PSAK TERHADAP IFRS

Rekonsiliasi antara laporan pendapatan komprehensif konsolidasi berdasarkan PSAK dan IFRS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009:

	PSAK	Rekonsiliasi/ Reklasifikasi	IFRS
PENDAPATAN USAHA			
Selular	13.928.602	31.072	13.959.674
MIDI	2.720.984	(8.352)	2.712.632
Telekomunikasi tetap	1.743.430	213.749	1.957.179
Jumlah Pendapatan Usaha	**18.393.016**	**236.469**	**18.629.485**
BEBAN USAHA			
Beban jasa telekomunikasi	6.656.680	239.620	6.896.300
Penyusutan dan amortisasi	5.561.390	-	5.561.390
Karyawan	1.451.560	-	1.451.560
Pemasaran	816.934	-	816.934
Administrasi dan umum	693.437	-	693.437
Jumlah Beban Usaha	**15.180.001**	**239.620**	**15.419.621**
LABA USAHA	**3.213.015**	**(3.151)**	**3.209.864**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Laba selisih kurs - bersih	1.656.407	-	1.656.407
Pendapatan bunga	138.951	-	138.951
Beban pendanaan	(1.872.967)	-	(1.872.967)
Rugi perubahan nilai wajar derivatif - bersih	(517.655)	30.739	(486.916)
Amortisasi goodwill	(235.420)	235.420	-
Lain-lain - bersih	(150.338)	30.739	(116.821)
Beban Lain-lain - Bersih	**(981.022)**	**299.675**	**(681.346)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**2.231.993**	**296.524**	**2.528.518**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Periode berjalan	(460.973)	(33.517)	(494.489)
Tangguhan	(216.292)	(70.738)	(287.030)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**(677.265)**	**(104.255)**	**(781.520)**
LABA TAHUN BERJALAN	**1.554.728**	**192.269**	**1.746.998**
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	(14.563)	(14.563)
Efek pajak penghasilan dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	3.641	3.641
LABA KOMPREHENSIF LAIN-LAIN - SETELAH PAJAK	**-**	**(10.922)**	**(10.922)**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**1.554.728**	**181.347**	**1.736.076**
LABA TAHUN BERJALAN			
YANG MENJADI HAK:			
Pemilik Perusahaan	1.498.245	192.559	1.690.804
Minoritas	56.483	(289)	56.194
Jumlah	1.554.728	192.270	1.746.998

	PSAK	Rekonsiliasi/ Reklasifikasi	IFRS
LABA KOMPREHENSIF LAIN-LAIN			
YANG MENJADI HAK:			
Pemilik Perusahaan	-	(10.922)	(10.922)
Minoritas	-	-	-
Jumlah	-	(10.922)	(10.922)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF			
YANG MENJADI HAK:			
Pemilik Perusahaan	1.498.245	181.637	1.679.882
Minoritas	56.483	(289)	56.194
Jumlah	1.554.728	181.368	1.736.076

Rekonsiliasi antara laporan Keuangan berdasarkan PSAK dan IFRS ini tidak mempunyai dampak yang material terhadap laporan arus kas konsolidasi.

Rekonsiliasi:

1. Hak atas tanah

Menurut SAK, hak atas tanah berdasarkan jenis dari masing-masing hak dicatat sebagai tanah dan tidak disusutkan, kecuali dapat diprediksi bahwa manajemen tidak akan dapat untuk memperpanjang atau memperbarui hak atas tanah tersebut atau perpanjangan atau pembaruan tersebut tidak dapat dilakukan.

Beban sehubungan dengan perolehan ijin dari pemerintah untuk menggunakan lahan (seperti biaya notaris, pajak, dsb) harus diamortisasi selama perkiraan masa pemakaian hak atas tanah yang diperoleh dari Pemerintah, yang dalam hal Perusahaan, berkisar antara 20 sampai 30 tahun.

Menurut IFRS, bagian kepemilikan atas tanah yang disewa dicatat sebagai sewa operasi. Pembayaran yang dilakukan untuk mengadakan atau memperoleh tanah yang disewakan yang dicatat sebagai sewa operasi mencerminkan pembayaran sewa dimuka yang diamortisasi selama masa sewa sesuai dengan pola atau manfaat yang disediakan.

2. Goodwill

Menurut SAK, goodwill diamortisasi dengan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya.

Menurut IFRS, berdasarkan penggabungan usaha yang dikecualikan seperti diatur dalam IFRS 1, nilai tercatat dari goodwill pada tanggal 1 Januari 2008 adalah nilai tercatat menurut SAK pada tanggal tersebut. Setelah tanggal tersebut, goodwill tidak diamortisasi tapi subjek dari penelaahan penurunan nilai yang diharuskan dalam IAS 36 "Impairment of Assets", setelah tanggal transisi.

LAPORAN -
REKONSILIASI PSAK TERHADAP IFRS

3. Pengakuan pendapatan

Pendapatan aktivasi dan instalasi

Menurut SAK, pendapatan dari aktivasi dan instalasi diakui sebagai pendapatan pada saat penyambungan selesai dilakukan (untuk layanan pasca bayar) atau pada saat aktivasi kartu perdana oleh pelanggan (untuk layanan prabayar)

Menurut IFRS, pendapatan dari aktivasi dan instalasi harus ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa hubungan dengan pelanggan untuk setiap kontrak layanan.

4. Derivatif – penyesuaian risiko kredit (Credit Risk Adjustment)

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi kewajiban keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

Reklasifikasi :

Beberapa akun direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan keperluan penyajian IFRS pada laporan keuangan 2009. Hal-hal berikut ini mendiskusikan reklasifikasi yang signifikan:

- Menurut SAK, hak minoritas disajikan diluar bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasi, dimana menurut IFRS, hak minoritas disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

- Menurut SAK, hak atas tanah disajikan sebagai bagian dari aset tetap pada laporan posisi keuangan konsolidasi, dimana menurut IFRS, hak atas tanah disajikan sebagai sewa tanah dibayar di muka dalam akun aset tidak lancar.

- Menurut SAK, beberapa komponen tertentu pendapatan telekomunikasi tetap terkait dengan interkoneksi internasional disajikan secara neto, dimana menurut IFRS, pendapatan tersebut disajikan secara bruto.

- Format penyajian yang berbeda digunakan untuk laporan pendapatan komprehensif konsolidasi sebagai hasil dari penerapan IAS 1 (Revisi), yang memperkenalkan penggunaan laporan pendapatan komprehensif. Perubahan pada ekuitas minoritas pada tahun berjalan seperti translasi valuta asing dan perubahan ekuitas perusahaan asosiasi/anak perusahaan, yang diperlihatkan dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasi berdasarkan SAK dan IFRS, sekarang disajikan sebagai pendapatan komprehensif lainnya dalam laporan pendapatan komprehensif konsolidasi. Menurut IFRS, laporan perubahan ekuitas hanya berisi rincian transaksi dengan pemilik perusahaan, dengan perubahan pada ekuitas minoritas disajikan dalam rekonsiliasi pada setiap komponen dari ekuitas.

- Biaya nilai awal (upfront fee) ijin 3G direklasifikasi dari Goodwill dan Aset tak berwujud lainnya menjadi Ijin dibayar di muka jangka panjang untuk bagian jangka panjang dan biaya dibayar di muka untuk bagian jangka pendek. Amortisasi terkait direklasifikasi dari penyusutan dan amortisasi ke beban jasa telekomunikasi. Reklasifikasi dilakukan karena biaya nilai awal 3G dipandang sebagai satu kesatuan dengan biaya frekuensi tahunan 3G menurut akuntansi sewa operasi.

- Menurut SAK, pajak dibayar dimuka dan hutang pajak terdiri dari piutang dan hutang terkait dengan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan lainnya. HUtang atas pajak penghasilan ditahan (withholding tax) atas beban bunga untuk Guaranteed Notes Jatuh tempo 2010 dan 2012 diakui sebagai biaya masih harus dibayar.

Menurut IFRS, pajak dibayar dimuka dan hutang pajak hanya terdiri dari pajak dalam negeri dan luar negeri berdasarkan penghasilan kena pajak dan pajak ditahan, yang terhutang oleh anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan joint venture yang dilaporkan oleh entitas pelaporan (reporting entity). Semua piutang dan hutang pajak lainnya dicatat sebagai aset lancar lainnya atau kewajiban lancar lainnya.

- Beberapa aset dan kewajiban keuangan telah direklasifikasi dari aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya dan kewajiban lancar lainnya dan kewajiban tidak lancar lainnya menjadi aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya dan kewajiban keuangan lancar lainnya dan kewajiban keuangan tidak lancar lainnya.

- Menurut SAK, jumlah pokok pajak dan denda yang dikenakan berdasarkan Surat Keputusan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan harus dibebankan sebagai beban lain-lain pada laporan laba rugi tahun berjalan, kecuali surat keberatan atau banding telah dicatatkan, dimana pada kasus tersebut maka pengakuan beban dapat ditangguhkan.

Menurut IFRS, setiap penyesuaian atas pajak penghasilan badan yang diakui pada tahun berjalan untuk beban pajak tahun berjalan dari tahun sebelumnya diakui sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pertanggungjawaban terhadap Laporan Tahunan 2009

Laporan Tahunan 2009 ini berikut perhitungan tahunan/laporan keuangan dan informasi lain yang terkait di dalamnya dipersiapkan oleh PT Indosat Tbk.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indosat Tbk membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Informasi keuangan yang dilaporkan di sini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan pada bagian-bagian tertentu mencakup beberapa perkiraan yang dibuat berdasarkan estimasi maupun penilaian terbaik oleh Direksi PT Indosat Tbk.

Dewan Komisaris

Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al-Thani
Komisaris Utama

Dr. Nasser Mohammed.Marafih
Komisaris

Richard Farnsworth Seney
Komisaris

Rachmat Gobel
Komisaris

Rionald Silaban
Komisaris

Jarman
Komisaris

Alexander Rusli
Komisaris Independen

Soeprapto
Komisaris Independen

GeorgeThia Peng Heok
Komisaris Independen

Chris Kanter
Komisaris Independen

Direksi

Harry Sasongko Tirtotjondro
President Director & CEO

Peter Wladyslaw Kuncewicz
Director and Chief Finance Officer

Stephen Edward Hobbs
Director and Chief Technology Officer

Fadzri Sentosa
Director and Chief Wholesale and Infrastructure Officer

Laszlo Imre Barta
Director and Chief Commercial Officer

LAPORAN TAHUNAN **DALAM FORMAT 20-F**

(Laporan yang Kami Sajikan kepada *US-Securities and Exchange Commission*)

Berikut ini adalah terjemahan dari Laporan Tahunan 20F yang disiapkan oleh Perusahaan untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal di Amerika Serikat. Laporan Tahunan 20F ini disajikan guna memberikan informasi yang sama kepada seluruh pemegang saham Perusahaan. Butir 5 dari Terjemahan Laporan Tahunan 20F mengenai Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha disusun berdasarkan International Financial Reporting Standard (IFRS), sehingga terdapat beberapa perbedaan dengan Analisa dan Pembahasan Manajemen yang tercantum pada Laporan Tahunan yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Untuk memberikan gambaran atas perbedaan tersebut, kami menyajikan rekonsiliasi antara perbedaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan IFRS pada bagian Rekonsiliasi PSAK terhadap IFRS.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Daftar Isi

BEBERAPA DEFINISI, ATURAN UMUM DAN INFORMASI UMUM 281
FORWARD-LOOKING STATEMENTS 281
DAFTAR ISTILAH 282

Bagian 1

Butir 1: IDENTITAS DIREKSI, MANAJEMEN SENIOR DAN PENASIHAT 287
Butir 2: STATISTIK YANG DIAJUKAN DAN PERKIRAAN JADWAL 287
Butir 3: INFORMASI PENTING 287
Butir 4: INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN 312
Butir 5: ANALISA OPERASIONAL DAN KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA 348
Butir 6: DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN KARYAWAN 377
Butir 7: PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 386
Butir 8: INFORMASI TENTANG KEUANGAN 388
Butir 9: PENAWARAN DAN PENCATATAN 391
Butir 10: INFORMASI TAMBAHAN 394
Butir 11: PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF RISIKO PASAR 407
Butir 12: PENJELASAN TENTANG EFEK SELAIN DARI EFEK EKUITAS 410

Bagian 2

Butir 13: CIDERA JANJI YANG BELUM DIBAYAR DAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN 412
Butir 14: PERUBAHAN MATERIAL TERHADAP HAK PEMEGANG EFEK DAN PENGGUNAAN HASIL 412
Butir 15: PENGAWASAN DAN PROSEDUR 412
Butir 16A: AHLI KEUANGAN DARI KOMITE AUDIT 413
Butir 16B: KODE ETIK 413
Butir 16C: BIAYA DAN JASA AKUNTAN 413
Butir 16D: PENGECUALIAN DARI STANDAR PENCATATAN BURSA EFEK NEW YORK UNTUK KOMITE AUDIT 414
Butir 16E: PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS OLEH PERUSAHAAN DAN PIHAK TERAFILIASI 415
Butir 16F: PERUBAHAN DALAM PENDAFTARAN AKUNTAN BERSERTIFIKAT 415
Butir 16G: TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE) 415

Bagian 3

Butir 17: Laporan Keuangan 417
Butir 18: Laporan Keuangan 417

BEBERAPA DEFINISI, ATURAN UMUM DAN INFORMASI UMUM

Kecuali dinyatakan lain, istilah "Perusahaan", "Indosat" dan "kami" di dalam Laporan Tahunan dalam Format 20-F ("Format 20-F") ini merujuk pada PT Indosat Tbk dan anak-anak perusahaan terkonsolidasi. Semua istilah "Indonesia" merujuk pada negara Republik Indonesia. Semua istilah "Pemerintah" merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia. Istilah "Amerika Serikat" atau "AS" merujuk pada negara Amerika Serikat. Istilah "Inggris" merujuk pada Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara. Istilah "Rupiah" atau "Rp" merujuk pada mata uang yang sah dari negara Indonesia dan istilah "dolar AS" atau "US$" merujuk pada mata uang yang sah dari negara Amerika Serikat. Beberapa angka (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk kemudahan, dan oleh karenanya setiap jumlah, perbandingan, persentase dan rasio dapat berbeda.

Laporan keuangan konsolidasi kami pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 terlampir dalam laporan tahunan yang telah kami persiapkan sesuai dengan International Financial Reporting Standards ("IFRS") yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board ("IASB"). Kami menerapkan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan menerapkan IFRS1 "First Time Adoption of International Financial Reporting Standards." Laporan keuangan konsolidasi kami pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 awalnya dipersiapkan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia ("SAK"), dan disajikan kembali sesuai dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB untuk tujuan perbandingan. Efek dari transisi ke IFRS yang dikeluarkan oleh IASB terhadap laporan keuangan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008, hasil usaha dan arus kas pada tahun tersebut, diuraikan pada Catatan 2d dan 2e dari laporan keuangan konsolidasi yang dilampirkan dalam bagian-bagian di laporan tahunan ini. Sesuai dengan amandemen peraturan yang diterapkan oleh U.S. Securities and Exchange Commission, atau U.S. SEC, yang efektif pada tanggal 4 Maret 2008, kami tidak menyediakan rekonsiliasi terhadap US GAAP. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan transisi yang diberikan oleh U.S. SEC sehubungan dengan penerapan awal IFRS, kami telah mengecualikan dalam laporan tahunan dalam format 20-F ini, laporan keuangan dan informasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

Semata-mata untuk memudahkan para pembaca, sejumlah nilai dalam mata uang Rupiah telah dikonversi menjadi dolar AS dengan nilai tukar tertentu. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan dalam mata uang dolar AS untuk nilai-nilai dalam mata uang Rupiah telah dikonversi berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2009, yaitu Rp9.400 untuk US$1,00. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar AS pada tanggal 14 Mei 2010 adalah Rp9.094 untuk US$1,00. Federal Reserve Bank of New York untuk keperluan pabean tidak menetapkan nilai tukar beli siang hari untuk transfer dalam mata uang Rupiah. Kami tidak membuat pernyataan apapun bahwa mata uang Rupiah maupun dolar AS yang tercantum di dalam Format 20-F ini seharusnya dapat atau dapat dikonversi menjadi dolar AS atau Rupiah, yang berlaku, dengan nilai tukar tertentu atau apapun. Lihat "Butir 3: Informasi Penting—Informasi tentang Nilai Tukar" untuk informasi lebih lanjut mengenai nilai tukar Rupiah atau dolar AS.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Format 20-F ini memuat *"forward-looking statements"* (pernyataan mengenai proyeksi di masa mendatang), sebagaimana didefinisikan dalam Section 27A of the Securities Act, Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana diubah atau "Exchange Act" dan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995, yang meliputi pernyataan-pernyataan mengenai proyeksi kami untuk kinerja operasi dan prospek bisnis Perusahaan di masa mendatang. Kata-kata seperti "yakin," "harap," "antisipasi," "estimasi," "perkiraan," dan kata-kata serupa merupakan *forward-looking statements*. Selain itu, semua pernyataan kecuali pernyataan tentang fakta historis yang dimuat dalam Format 20-F ini merupakan *forward-looking statements*. Meskipun kami yakin bahwa proyeksi yang tercermin dalam *forward-looking statements* di dalam Format 20-F adalah wajar, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa proyeksi tersebut akan terbukti benar adanya. *Forward looking statements* ini dapat dipengaruhi oleh beberapa risiko dan ketidakpastian, termasuk perubahan lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. "Butir 3: Informasi Penting—Faktor-faktor Risiko" dan di bagian lain dari Format 20-F ini menjelaskan faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil yang sebenarnya menjadi sangat berbeda dengan proyeksi kami.

DAFTAR ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah-istilah teknis di bawah ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami istilah-istilah tersebut, tetapi tidak dimaksudkan sebagai definisi teknis.

"2G"	generasi kedua dari teknologi telepon tanpa kabel yang terdiri dari GSM, Interim Standar-95 (IS-95) dan teknologi personnel digital cellular (PDC)
"3G"	generasi ketiga dari standar telekomunikasi bergerak, termasuk Wideband Code Division Multiple Access/Universal Mobile Telecommunication System (WCDMA/UMTS)
"analog"	Sinyal, baik itu suara, video atau data yang dikirim dalam bentuk serupa, atau sinyal analog, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan transmisi telepon dan/atau layanan-layanan yang memanfaatkan *switching* bukan digital
"ARPM"	Pendapatan rata-rata bulanan per menit (dalam Rupiah), yang dihitung dengan membagi pendapatan dari jasa selular prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan *non-recurring* seperti biaya aktifasi dan lelang khusus nomor telepon, untuk periode relevan, dengan jumlah menit (yang sudah tertagih dan belum tertagih) dari panggilan keluar penggunaan selular pra bayar dan pasca bayar pelanggan untuk periode tertentu.
"ARPU"	*Average Revenue Per User*, suatu evaluasi statistik untuk mengukur basis pelanggan operator selular. ARPU dihitung dengan membagi pendapatan *recurring* dari jasa selular pra bayar dan pasca bayar (biaya penggunaan, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan biaya langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan *non-reccuring* seperti biaya aktifasi dan lelang khusus nomer telepon, untuk periode yang relevan dengan jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar adalah jumlah total pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Kami mendefinisikan "pelanggan selular aktif" sebagai pelanggan selular: (i) dalam hal pelanggan selular pasca bayar, tidak memiliki saldo yang terhutang lebih dari 120 hari setelah tanggal terakhir penagihan; atau (ii) dalam hal pelanggan pra bayar, mengisi kembali kartu SIM dalam 33 hari masa tenggang segera setelah masa berlaku kartu SIM berakhir dengan menambah jumlah minimum tertentu ke dalam kartu SIM. Karena perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular pra bayar, ARPU kami yang tercantum dalam laporan tahunan tidak dapat dibandingkan dengan periode-periode tertentu. Lihat: "Item 3: Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko berkaitan dengan Jasa Selular – Data Pelanggan prabayar kami – terkait data operasional mungkin tidak dapat diperbandingkan antar periode.
"ATM"	*Asynchronous Transfer Mode,* standar protokol *packet-switching protocol* untuk mengirim dan menerima data melalui *uniform 53-byte cells,* yang memungkinkan kecepatan pengiriman data melebihi 600 MBps
"Attenuation"	kehilangan intensitas sinyal frekuensi secara bertahap karena penyerapan dan penyebaran
"backbone"	Tingkat tertinggi dalam hirarki jaringan dan dirancang untuk menyalurkan trafik yang sangat besar. *Backbone* dapat berupa *switched* (sistem *switching*) (menggunakan ATM, *frame relay* atau keduanya) atau *routed* (hanya menggunakan *routers* dan tidak ada *switches*). Link transmisi antara nodes atau fasilitas *switching* dapat berupa jaringan gelombang mikro, kabel laut, satelit, serat optik atau teknologi transmisi lainnya

"bandwidth"	Kapasitas saluran komunikasi
"base station controller"	Perangkat pengontrol dalam jaringan 2G yang mengkoordinasikan pengoperasian dari beberapa BTS
"BTS"	*Base Transceiver Station,* suatu *mobile phone base station* yang terdiri dari pemancar radio dan unit penerima yang digunakan untuk menyalurkan dan menerima suara dan data ke dan dari telepon bergerak di suatu sel area tertentu
"CDMA"	*Code Division Multiple Access,* suatu teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan ke beberapa frekuensi dan suatu kode tertentu diberikan untuk setiap pengiriman data atau suara, yang dapat membuat beberapa pengguna menggunakan spektrum frekuensi yang sama
"cellular backhaul"	jaringan transmisi yang menghubungkan *base station controllers,* BTS dan *mobile switching centers*
"churn rate"	Deaktivasi (pemberhentian) pelanggan untuk suatu periode tertentu, yang dihitung dengan membagi jumlah deaktivasi baik secara sukarela maupun tidak sukarela selama suatu periode tertentu dengan jumlah rata-rata pelanggan pada periode yang sama. Jumlah rata-rata pelanggan selular adalah jumlah dari total pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua
"dBW"	*decibel* yang merujuk pada satu watt
"digital"	Metode penyimpanan, pemrosesan dan pengiriman informasi dengan menggunakan *electronic* atau *optical pulses* tertentu yang dinyatakan dalam angka binary 0 dan 1. Teknologi transmisi dan *switching* digital menggunakan urutan dari *pulses* ini untuk menyampaikan informasi yang merupakan kebalikan dari sinyal variabel analog yang terus menerus. Dibandingkan dengan jaringan analog, jaringan digital mempunyai kapasitas yang lebih besar, tingkat gangguan yang lebih kecil, terlindung dari penyadapan dan koreksi kesalahan secara otomatis
"SLJJ"	Sambungan Langsung Jarak Jauh, jasa telekomunikasi sambungan jarak jauh dalam suatu negara
"EDGE"	*Enhanced Data GSM Environment,* versi tercepat dari *global system* untuk layanan nirkabel GSM yang dirancang untuk mengirim data pada tingkat kecepatan sampai dengan 384 Kbps, sehingga dapat mengirimkan aplikasi multimedia dan *broadband* bagi pemakai selular
"kabel serat optik"	Media transmisi yang dibangun dari bahan gelas yang sangat murni dan konsisten, dimana sinyal digital ditransmisikan sebagai kecepatan cahaya. Kabel serat optik mempunyai kapasitas transmisi yang lebih besar dengan tingkat gangguan sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel tembaga yang biasa digunakan
"Fixed Telecommunication"	Disebut juga sebagai telepon tetap dan termasuk SLI, SLJJ dan layanan telepon tetap lokal. Layanan ini juga termasuk FWA

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

"frame relay"	Bentuk sistem *packet switching* yang memecah data menjadi paket data kecil yang dikenal dengan nama "*frame*", yang dilengkapi dengan alat deteksi kesalahan yang lebih baik daripada bentuk *packet switching* yang biasa (juga disebut sebagai *"frame net"* di dalam laporan keuangan kami yang telah diaudit sebagaimana terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini)
"FWA"	*Fixed Wireless Access service,* pelayanan telekomunikasi bergerak terbatas yang terhubung dengan suatu kode area
"GSM"	*Global System for Mobile Communications*, suatu sistem telekomunikasi selular digital yang distandarisasi oleh *European Telecommunications Standards Institute* yang didasarkan pada rancangan transmisi digital dan jaringan selular dengan daya jelajah di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya
"GPRS"	*General Packet Radio Service*, suatu standar komunikasi selular yang mendukung kapasitas *bandwidth* yang besar, terutama untuk pengiriman dan penerimaan data, termasuk *e-mail* dan aplikasi *bandwidth* tinggi lainnya
"HSDPA"	*High-Speed Downlink Packet Access,* suatu layanan paket data atau protocol di 3G (WCDMA/UMTS) standar untuk transmisi data downlink dengan kecepatan dari sampai dengan 14,4 Mbps
"HSPA +"	*High Speed Packet Access +,* layanan paket data atau protokol di 3G (WCDMA/UMTS) standar yang memberikan kecepatan transmisi data *downlink* dan *uplink* yang lebih besar dengan menggunakan *order modulation* yang lebih tinggi dan menggunakan *multiple-input* dan *multiple-output* dan *multicarrier* teknologi, mencapai kecepatan *downlink* sampai dengan 42 Mbps dan kecepatan *uplink* sampai dengan 11,6 Mbps
"SLI"	Sambungan Langsung Internasional, suatu layanan telekomunikasi yang dapat membuat penggunanya melakukan sambungan telepon jarak jauh internasional tanpa melalui jasa operator
"interkoneksi"	Suatu tindakan yang dapat membuat suatu penyelenggara telekomunikasi dapat menghubungkan jaringannya ke jaringan atau unsur-unsur jaringan dari beberapa penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk dapat melakukan terminasi trafik yang berasal dari pelanggan jaringan milik penyelenggara telekomunikasi tersebut ke pelanggan jaringan milik penyelenggara telekomunikasi lainnya
"IPLC"	*suatu international private line circuit*
"IP VPN"	*Internet Protocol Virtual Private Network,* suatu layanan yang membuat pelanggan dapat melakukan panggilan yang serupa dengan bila menggunakan sistem *international private automatic branch exchange* atau PABX, yang dapat melakukan panggilan internasional dengan *international abbreviation* dan fitur PABX lainnya
"ISP"	*Internet Service Provider,* suatu perusahaan yang menyediakan akses ke Internet dengan menyediakan *interface ke Internet backbone*
"Kbps"	*kilobits (10^3) per second*, ukuran kecepatan transmisi digital

"LAN"	*Local Area Network,* suatu jaringan jarak dekat yang dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer dalam satu lingkungan agar dapat berbagi data dan melakukan komunikasi lainnya
"Mbps"	*megabits (10^6) per second*, ukuran kecepatan transmisi digital
"media gateway"	Unit penerjemahan antar jaringan-jaringan telekomunikasi yang menggunakan standar yang berbeda, seperti PSTN, *next generation networks* dan *radio access networks*
"MIDI"	Multimedia, komunikasi data dan Internet, layanan data tetap, yang termasuk multimedia, komunikasi data dan layanan internet
"MPLS"	*Multi-Protocol Label Switching,* teknologi platform jaringan komunikasi data yang meningkatkan efisiensi aliran trafik data melalui pola manajemen trafik yang menggolongkan data berdasarkan aplikasinya
"Minutes of Usage"	*minutes per usage* dari pelanggan selular, yang dihitung dengan membagi jumlah total menit penggunaan panggilan keluar dari pelanggan selular pra bayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar adalah jumlah total pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Kami mendefinisikan "pelanggan selular aktif" sebagai pelanggan selular: (i) dalam hal pelanggan selular pasca bayar, tidak memiliki saldo yang terhutang lebih dari 120 hari setelah tanggal terakhir penagihan; atau (ii) dalam hal pelanggan pra bayar, mengisi kembali kartu SIM dalam waktu 33 hari masa tenggang segera setelah masa berlaku kartu SIM berakhir dengan menambah jumlah minimum tertentu ke dalam kartu SIM. Karena perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular pra bayar, ARPU kami yang tercantum dalam laporan tahunan tidak dapat dibandingkan dengan periode-periode tertentu. Lihat: "Item 3: Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko berkaitan dengan Jasa Selular – Data Pelanggan prabayar kami – terkait data operasional mungkin tidak dapat diperbandingkan antar periode.
"MMS"	*Multimedia Messaging Service,* sistem telekomunikasi selular yang dapat mengirimkan pesan SMS dalam bentuk grafik, suara atau komponen video.
"MPLS"	*Multi-Protocol Label Switching,* jaringan data komunkasi teknologi yang dapat meningkatan efisiensi arus data trafik melalui *traffic management pattern* yang mengklasifikasikan data berdasarkan aplikasi.
"infrastruktur jaringan"	Perangkat infrastruktur tetap yang terdiri dari kabel-kabel serat optik, perangkat transmisi, perangkat *multiplexing, switches,* pemancar radio, antena, sistem informasi manajemen dan perangkat lainnya yang menerima, mengirim dan memproses sinyal dari dan ke perangkat pelanggan dan/atau antara jaringan nirkabel dan jaringan tetap
"Node B"	BTS untuk jaringan 3G
"PSTN"	*Public Switched Telephone Network,* jaringan telepon tetap yang dioperasikan dan dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
"DPI"	Daftar Penawaran Interkoneksi, suatu istilah perundang-undangan atas suatu dokumen yang meliputi aspek teknis, operasional, ekonomi dan aspek lain dari akses interkoneksi oleh satu penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk kepentingan penyelenggara telekomunikasi lainnya

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

"roaming"	Fitur telekomunikasi selular yang dapat membuat pelanggan dari suatu jaringan menggunakan telepon genggam dan nomor teleponnya di suatu wilayah dimana terdapat cakupan jaringan selular yang diselenggarakan oleh penyelenggara lain
"SIM" atau "kartu SIM"	*Subscriber Identity Module,* kartu "pintar" yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam telepon genggam, yang memuat semua data yang berhubungan dengan pengguna, seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori penyimpanan pesan-pesan
"SMS"	*Short Message Service*, sarana untuk mengirim atau menerima pesan yang berisi huruf dan angka kepada atau dari telepon genggam selular
"VoIP"	*Voice over Internet Protocol*, sarana pengiriman informasi suara dengan menggunakan *Internet protocol*. Informasi suara dikirimkan dengan *discrete packets* dalam bentuk digital, bukan melalui *circuit-committed protocols* dari PSTN seperti biasanya, sehingga dapat menghindari biaya yang dikenakan oleh para penyelenggara sambungan jarak jauh konvensional
"VSAT"	*Very Small Aperture Terminal, satellite dish* yang ukurannya relatif kecil, biasanya berdiameter 1,5 sampai dengan 3,8 meter, yang diletakkan di tempat pengguna dan digunakan untuk komunikasi data dua arah melalui satelit
"WAP"	*Wireless Application Protocol,* suatu teknologi *platform* standar yang bersifat terbuka dan global yang dapat membuat pengguna selular mengakses dan berinteraksi dengan layanan informasi bergerak seperti e-mail, situs internet (situs), informasi keuangan, informasi *online banking,* informasi hiburan, permainan dan pembayaran mikro
"x.25"	Standar *packet-switching* data yang banyak digunakan, yang sebagian telah diganti oleh layanan *frame relay*

Bagian 1

Butir 1: IDENTITAS DIREKSI, MANAJEMEN SENIOR DAN PENASIHAT

Tidak berlaku.

Butir 2: STATISTIK YANG DIAJUKAN DAN PERKIRAAN JADWAL

Tidak berlaku.

Butir 3: INFORMASI PENTING

Beberapa Data Keuangan dan Data Lainnya

Tabel-tabel berikut ini menyajikan beberapa informasi keuangan konsolidasi kami dan statistik kegiatan usaha kami pada tanggal dan untuk setiap periode yang disebutkan. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit yang disusun sesuai dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu secara keseluruhan kepada laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit, termasuk catatan-catatan di dalamnya, dan informasi-informasi lainnya yang terkandung di suatu tempat dalam laporan tahunan ini. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007 adalah berdasarkan laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit yang disusun sesuai dengan SAK dengan rekonsiliasi terhadap US GAAP. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2006 dan 2007 harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu secara keseluruhan kepada laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit, termasuk catatan-catatan di dalamnya, dan informasi-informasi lainnya yang terkandung di suatu tempat dalam laporan tahunan kami sebelumnya yang dilaporkan kepada U.S. SEC pada tanggal 5 Mei 2008 dan 10 Mei 2007. Oleh karena itu, informasi keuangan untuk tahun 2008 dan 2009 tidak dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 dan disajikan secara terpisah. Laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007, 2008 dan 2009 telah diaudit oleh Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, Indonesian member firm dari Ernst & Young Global.

IFRS, dalam beberapa hal, berbeda secara signifikan dari SAK. Untuk penjelasan secara naratif atas perbedaan-perbedaan signifikan tertentu, lihat Catatan 2d dan 2e dalam laporan keuangan konsolidasi kami.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

	Per 31 Desember		
	2008 Rp	2009 Rp	2009 US$[1]
	(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US$, kecuali jumlah saham)		
Data Posisi Keuangan:			
IFRS:			
Asets			
Kas dan Setara Kas	5.737,9	2.836,0	301,7
Aset lancar lainnya (selain kas dan setara kas)	3.953,9	4.302,9	457,7
Piutang hubungan istimewa	42,5	7,2	0,8
Aset pajak tangguhan —bersih	70,8	88,0	9,4
Investasi jangka panjang	3,4	3,2	0,3
Aset tetap — bersih	37.904,7	43.922,3	4.672,6
Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya — bersih	2.060,7	2.042,8	217,3
Aset tidak lancar lainnya	2.046,3	2.174,7	231,4
Total aset	51.820,2	55.377,1	5.891,2
Kewajiban			
Kewajiban Lancar	10.719,7	13.064,2	1.389,8
Kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	14,7	13,8	1,5
Kewajiban Pajak Tangguhan — bersih	1.349,7	1.650,3	175,5
Hutang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jangka pendek)	10.812,2	12.715,5	1.352,7
Hutang Obligasi (setelah dikurangi bagian jangka pendek)	10.315,6	8.472,2	901,3
Kewajiban tidak lancar lainnya	871,8	942,6	100,3
Total Kewajiban	34.083,7	36.858,6	3.921,1
Aset Bersih	17.736,5	18.518,5	1.970,1
Modal Saham	543,4	543,4	57,8
Ekuitas	17.736,5	18.518,5	1.970,1
Total Kewajiban dan Ekuitas	51.820,2	55.377,1	5.891,2
Jumlah saham beredar	5.433.933.500	5.433.933.500	N/A

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008 Rp	2009 Rp	2009 US$[1]
	(dalam miliar Rupiah dan juta US$, kecuali untuk saham dan data ADS)		
Data Keuangan Komprehensif			
IFRS:			
Pendapatan Usaha:			
Selular	14.185,4	13.959,7	1.485,1
MIDI	2.733,4	2.712,6	288,6
Telekomunikasi tetap	2.029,6	1.957,2	208,2
Total pendapatan usaha	18.948,4	18.629,5	1.981,9
Jumlah beban usaha	14.226,4	15.419,6	1,640.4
Laba usaha	4.722,0	3.209,9	341,5
Pendapatan lain-lain (beban):			
Laba penjualan investasi pada perusahaan afiliasi	-	-	-
Pendapatan bunga	460,1	139,0	14,8
Laba penjualan investasi jangka panjang lainnya	-	-	-
Laba (rugi) kurs bersih	(885,7)	1.656,4	176,2
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivative bersih	136,6	(486,9)	(51,8)
Amortisasi goodwill	-	-	-
Beban pendanaan	(1.858,3)	(1.873,0)	(199,3)
Pendapatan (beban) lain-lain —bersih	(25,6)	(116,8)	(12,4)
Total pendapatan (beban) lain-lain—bersih	(2.172,9)	(681,3)	(72,5)
Beban pajak penghasilan – bersih	(485,3)	(781,5)	(83,1)
Laba tahun berjalan	2.063,8	1.747,0	185,8
Yang menjadi hak pemilik Perusahaan	2.037,8	1.690,8	179,9
Yang menjadi hak pemegang saham bukan pengendali	26,0	56,2	6,0
Jumlah saham disetor	5.433.933.500	5.433.933.500	N/A
Laba dasar dan dilusi per saham yang menjadi hak pemilik Perusahaan (jumlah penuh)[2]	375,01	311,16	0,03
Dividen yang dibagikan per saham (dalam jumlah penuh)[2]	172,85	–	–
Dividen yang dibagikan per saham (dalam jumlah penuh) (dalam US$)[2][4]	0,02	–	–
Dividen yang dibagikan per ADS (dalam jumlah penuh) (dalam US$)[2][3][4]	0,79	–	–

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2009
	Rp	Rp	US$[1]
	(dalam miliar Rupiah dan juta US$, kecuali untuk jumlah saham yang telah ditempatkan, EBITDA dan rasio keuangan)		
IFRS:			
Data Arus Kas			
Kas bersih yang disediakan untuk (digunakan untuk):			
Kegiatan usaha	6.513,3	4.051,2	431,0
Kegiatan investasi	(10.286,9)	(10.670,7)	(1.135,2)
Kegiatan pendanaan	1.458,5	3.724,7	396,2
Data Keuangan Lainnya (tidak diaudit)			
EBITDA[5]	9.277,9	8.771,3	933,1
margin EBITDA[6]	49,0%	47,1%	47,1%
Data Keuangan Lainnya			
Pengeluaran barang modal[7]	12.285,2	11.567,4	1.230,6
Rasio Keuangan (tidak diaudit)			
Total hutang terhadap EBITDA[8]	2,38x	2,94x	–
Hutang bersih terhadap EBITDA[9]	1,76x	2,62x	–
EBITDA terhadap beban bunga	5,07x	4,72x	–

	Per tanggal 31 Desember		
	2005	2006	2007
	Rp	Rp	Rp
	(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US$, kecuali jumlah saham)		
Data Neraca:			
SAK:			
Asset			
Kas dan Setara Kas	4.717,3	2.807,3	8.053,0
Aset lancar lainnya (selain kas dan setara kas)	2.809,7	2.858,2	2.773,1
Piutang hubungan istimewa	30,4	23,3	56,5
Aset pajak tangguhan — bersih	44,2	46,6	87,1
Investasi Jangka Panjang	3,2	8,8	3,0
Aset tetap — bersih	21.564,8	24.918,6	30.572,8
Goodwill dan aset tidak berwujud — bersih	2.682,6	2.394,5	2.087,2
Aset tidak lancar lainnya	934,9	1.171,4	1.672,4
Total Aset	32.787,1	34.228,7	45.305,1
Kewajiban			
Kewajiban Lancar	5.431,4	6.803,2	11.658,6
Jatuh tempo kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	16,5	29,4	64,9
Kewajiban Pajak Tangguhan — bersih	865,7	1.244,5	1.482,2
Hutang yang masih harus dibayar (bersih dari jangka waktu sekarang)	1.308,8	1.504,8	4.249,0
Hutang Obligasi (dikurangi porsi saat ini)	10.161,9	8.734,0	10.088,7
Kewajiban tidak lancar lainnya	511,8	510,4	919,6
Total Kewajiban	18.296,1	18.826,3	28.463,0
Hak Minoritas	175,7	200,6	297,4
Aset bersih	14.491,0	15.402,4	16.842,1
Ekuitas	14.315,3	15.201,8	16.544,7
Total Kewajiban dan Ekuitas	32.787,1	34.228,7	45.305,1
Jumlah saham yang ditempatkan	5.356.174.500	5.433.933.500	5.433.933.500
U.S GAAP:[10]			
Total aset	35.414,4	36.990,9	48.840,1
Total Ekuitas	15.744,3	16.574,8	18.260,6

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2005 Rp	2006 Rp	2007 Rp
	(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US$, kecuali untuk data per saham dan per ADS)		
Laporan Laba Rugi:			
SAK:			
Pendapatan Usaha:			
Selular[6]	8.645,0	9.227,5	12.752,5
MIDI	1.694,0	1.902,6	2.168,6
Telekomunikasi tetap	1.250,8	1.109,3	1.567,4
Total Pendapatan Usaha	11.589,8	12.239,4	16.488,5
Total beban usaha[6]	7.937,9	8.840,7	11.968,9
Laba Usaha	3.651,9	3.398,7	4.519,6
Pendapatan Lain-lain (beban):			
Laba penjualan investasi di perusahaan asosiasi	14,6	-	-
Pendapatan Bunga	215,1	212,8	232,4
Laba penjualan investasi jangka panjang lainnya	1,2	-	-
Laba (rugi) selisih kurs —bersih	(79,9)	304,4	(155,3)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif—bersih	(44,2)	(438,8)	68,0
Amortisasi goodwill	(226,4)	(226,5)	(226,5)
Beban Pendanaan	(1.264,8)	(1.248,9)	(1.428,6)
Pendapatan (beban) Lain-lain—bersih	85,2	21,2	(80,0)
Total Pendapatan (beban) lain-lain —bersih	(1.299,2)	(1.375,8)	(1.590,0)
Ekuitas laba bersih di perusahaan asosiasi	0,1	(0,2)	-
hak minoritas atas laba bersih di anak perusahaan	(31,4)	(36,5)	(28,1)
Beban pajak penghasilan —bersih	(697,9)	(576,1)	(859,5)
Laba bersih	1.623,5	1.410,1	2.042,0
Jumlah saham beredar	5.253.249.519	5.404.654.859	5.433.933.500
Laba Usaha dari hasil operasi per saham	695,2	628,8	831,7
Dilusi per saham	309,0	258,8	375,8
Laba per saham[2]	309,0	260,9	375,8
Dividen yang dibagikan per saham[2]	149,32	129,75	187,90
Dividen yang dibagikan per saham (dalam US$)[2][4]	0,017	0,014	0,017
Dividen yang dibagikan per saham (dalam US$)[2][3][4]	0,83	0,69	0,86
U.S GAAP:[10]			
Laba Bersih	1.875,6	1.751,0	2.475,8
Laba bersih per saham[2]	357,0	324,0	455,6
Laba bersih per ADS[2][3]	17.851,4	16.199,3	22.781,0
Dilusi per saham	353,3	321,9	455,6
Dilusi per ADS	17.663,5	16.097,2	22.781,0

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2005	2006	2007
	Rp	Rp	Rp
	(dalam miliar Rupiah dan juta US$, kecuali untuk jumlah saham yang telah ditempatkan, EBITDA dan rasio keuangan)		
SAK			
Data Arus Kas			
Kas bersih yang disediakan untuk (digunakan untuk):			
Kegiatan usaha	5.316,0	5.669,6	8.273,9
Kegiatan investasi	(6.635,0)	(6.331,0)	(7.290,4)
Kegiatan pendanaan	2.063,4	(1.248,7)	4.237,0
Data Keuangan Lainnya (tidak diaudit)			
EBITDA[12]	6.732,1	7.027,2	8.682,8
Margin EBITDA[13]	58,1%	57,4%	52,7%
Data Keuangan Lainnya			
Pengeluaran barang modal[14]	7.297,9	6.921,3	9.726,4
Rasio Keuangan (tidak diaudit)			
Total hutang terhadap EBITDA[15]	1,87x	1,64x	1,94x
Hutang bersih terhadap EBITDA[16]	1,17x	1,24x	1,01x
EBITDA terhadap beban bunga	5,43x	5,83x	6,22x

Catatan kaki terhadap Informasi Keuangan:

(1) Dikonversi ke dalam dolar A.S berdasarkan tingkat konversi Rp9,400= US$1.00, Kurs rata-rata Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2009. Lihat"—Informasi nilai tukar" di bawah ini.
(2) Laba per saham /ADS, dan dividen yang dibagikan per saham/ADS dilaporkan dalam mata uang Rupiah dan Dolar. Laba bersih per saham/ADS dan dividen yang dibagikan per saham/ADS untuk seluruh periode yang ditunjukkan telah dihitung berdasarkan jumlah rata-rata saham yang telah dikeluarkan, setelah mempertimbangkan opsi saham yang berlaku.
(3) Laba dan dividen yang dibagikan per ADS dihitung berdasarkan dasar bahwa ADS mewakili 50 saham biasa dan tidak menggunakan penyisihan untuk pajak dimana pemegang ADS terikat.
(4) Dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada setiap tanggal pembayaran dividen.
(5) Kami mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum pajak, pendapatan non operasional dan beban, beban pajak penghasilan, depresiasi dan keuntungan minoritas pada laba bersih anak perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan yang disiapkan berdasarkan SAK. EBITDA bukan merupakan standar pengukuran berdasarkan IFRS. Mengingat kegiatan telekomunikasi memerlukan modal yang besar, persyaratan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang dan bunga memiliki dampak pada laba bersih perusahaan-perusahaan yang memiliki hasil yang sama. Dengan demikian, kami percaya bahwa EBITDA memberikan refleksi yang berguna untuk menunjukkan kinerja operasional dan bahwa laba bersih merupakan satu-satunya ukuran yang dapat dibandingkan terhadap EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak disarankan untuk mempertimbangkan definisi EBITDA secara terpisah atau sebagai indikator kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya berdasarkan IFRS, atau definisi EBITDA perusahaan lain. Definisi EBITDA tidak mempertimbangkan pajak dan beban tunai dari non operasional. Dana dari perhitungan ini mungkin tidak tersedia untuk membayar pinjaman karena adanya batasan-batasan ketentuan, persyaratan pengeluaran barang modal dan komitmen lain.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi laba yang diperuntukkan kepada pemilik Perusahaan sesuai dengan IFRS terhadap definisi kami untuk EBITDA untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2008	2009
	Rp	Rp
	(dalam miliar Rp)	
EBITDA	**9.277,9**	**8.771,3**
Penyesuaian:		
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(885,7)	1.656,4
Pendapatan bunga	460,1	139,0
Beban pendanaan (termasuk beban bunga)	(1.858,3)	(1.873,0)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – net	136,6	(486,9)
Beban amortisasi *goodwill*	-	-
Beban lain-lain – bersih	(25,6)	(116,9)
Beban pajak penghasilan – bersih	(485,3)	(781,5)
Penyusutan dan amortisasi	(4.555,9)	(5.561,4)
Laba yang diperuntukkan kepada pemilik bukan pengendali	(26,0)	(56,2)
Laba yang diperuntukkan kepada pemilik Perusahaan	**2.037,8**	**1.690,8**

(6) Margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA sebagaimana didefinisikan dalam catatan 5 diatas, dengan total pendapatan usaha sesuai dengan IFRS.
(7) Pengeluaran barang modal dihitung dengan menambahkan total tambahan aset tetap dan goodwill serta aset tidak berwujud sesuai dengan IFRS.
(8) Kami mendefinisikan hutang bersih sebagai total hutang yang harus dibayar dan hutang obligasi (lancar maupun jatuh tempo tidak lancar), beban penerbitan yang tidak diamortisasi (hutang, obligasi dan *notes*), biaya persetujuan yang tidak diamortisasi fees (hutang dan obligasi) dan potongan tidak diamortisasi (hutang dan *notes*) sesuai dengan IFRS.
(9) Kami mendefinisikan total hutang sebagai total hutang dikurangi kas dan setara kas.
(10) Jumlah US-GAAP menunjukkan penyesuaian sebagai akibat dari perbedaan perlakuan akuntansi dalam kapitalisasi beban bunga, kapitalisasi rugi selisih kurs, pengakuan pendapatan, ekuitas di laba (rugi) bersih dari perusahaan asosiasi, amortisasi goodwill, amortisasi hak atas tanah, manfaat karyawan masa pensiun, dana pensiun, dan penyesuaian pajak penghasilan tangguhan berdasarkan U.S GAAP.
(11) Pada tahun 2007, Pemerintah telah menetapkan sistem pendapatan interkoneksi baru yang berdasarkan biaya, menggantikan sistem bagi hasil yang berlaku sebelumnya. Berdasarkan sistem ini, kami melaporkan pendapatan operasional kami dalam jumlah kotor *(gross)* dan tidak dalam jumlah bersih *(net)*. Dengan menggunakan metode pencatatan dalam jumlah bersih *(net),* pendapatan interkoneksi dicatat setelah dikurangi beban interkoneksi. Pada pencatatan dalam jumlah kotor *(gross)*, kami mencatat pendapatan interkoneksi dalam pendapatan usaha dan beban interkoneksi dalam beban usaha. Kami tidak melakukan penyajian kembali atas laporan laba rugi kami untuk periode sebelumnya untuk mencerminkan pencatatan dalam jumlah kotor *(gross)*, dikarenakan metode penghitungan baru tersebut baru berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007.
(12) Kami telah mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum beban pendanaan (termasuk beban bunga), pendapatan bunga, beban pajak (bersih), beban depresiasi dan amortisasi, amortisasi goodwill, laba (rugi) kurs, laba dari perubahan nilai wajar derivative (bersih), beban non operasional (bersih), dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang dimasukkan dalam laporan ini yang disiapkan berdasarkan SAK Indonesia. EBITDA bukan merupakan ukuran standar berdasarkan SAK maupun U.S. GAAP Karena kegiatan telekomunikasi merupakan kegiatan yang memerlukan modal yang besar, kebutuhan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang serta beban bunga mengalami akibat yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan serupa. Dengan demikian, kami percaya bahwa EBITDA memberikan refleksi yang berguna untuk menunjukkan hasil operasional dan bahwa laba bersih merupakan ukuran keuangan yang dapat langsung dibandingkan dengan EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak dapat membandingkan definisi EBITDA secara terpisah atau menjadikannya indikator dari kinerja usaha, likuiditas atau ukuran standar lainnya, baik berdasarkan SAK maupun U.S. GAAP, maupun definisi EBITDA perusahaan-perusahaan lain. Dana yang diperoleh dari ukuran ini mungkin dapat tidak tersedia untuk pembayaran hutang karena adanya pembatasan, kewajiban pengeluaran barang modal dan komitmen lainnya. Definisi EBITA berdasarkan perjanjian tertentu sehubungan dengan hutang kami dapat berbeda dari definisi yang kami gunakan di sini. Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi laba bersih kami sesuai dengan SAK terhadap definisi kami untuk EBITDA untuk periode yang disebutkan:

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2005	2006	2007
	Rp	Rp	Rp
	(dalam miliar Rp dan jutaan dolar AS)		
EBITDA	**6.732,1**	**7.027,2**	**8.682,8**
Penyesuaian:			
Pendapatan (beban) lain-lain			
Laba penjualan investasi di perusahaan asosiasi	14,6	-	-
Pendapatan bunga	215,1	212,8	232,4
Laba penjualan investasi jangka panjang lainnya	1,2		
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(79,9)	304,4	(155,3)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – net	(44,2)	(438,8)	68,0
Beban amortisasi goodwill	(226,4)	(226,5)	(226,5)
Beban pendanaan	(1.264,8)	(1.248,9)	(1.428,6)
Beban lain-lain – bersih	85,2	21,2	(80,0)
Bagian laba dari perusahaan asosiasi	0,1	(0,2)	-
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(31,4)	(36,5)	(28,1)
Beban pajak penghasilan – bersih	(697,9)	(576,1)	(859,5)
Penyusutan dan amortisasi	(3.080,2)	(3.628,6)	(4.163,2)
Laba bersih	**1.623,5**	**1.410,0**	**2.042,0**

(13) Margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA sebagaimana didefinisikan dalam catatan 12 diatas, dengan total pendapatan usaha dihitung sesuai SAK.
(14) Pengeluaran barang modal dihitung dengan menambahkan total tambahan perlengkapan dan peralatan dan goodwill serta aset tidak berwujud dihitung sesuai SAK.
(15) Kami mendefinisikan total hutang sebagai total hutang yang harus dibayar dan hutang obligasi (lancar maupun jatuh tempo tidak lancar), beban penerbitan yang tidak diamortisasi (hutang, obligasi dan *notes*), biaya persetujuan yang tidak diamortisasi fees (hutang dan obligasi) dan potongan tidak diamortisasi (hutang dan *notes*) dihitung sesuai SAK.
(16) Kami mendefinisikan total hutang sebagai total hutang dikurangi kas dan setara kas dihitung sesuai SAK.

Informasi Tentang Nilai Tukar Valuta

	Nilai tukar Rupiah per Dollar AS			
	Akhir Periode	Rata-rata[1][2]	Rendah	Tinggi
Periode				
2005	9.830	9.751	10.310	9.165
2006	9.020	9.141	9.395	8.775
2007	9.419	9.137	9.479	8.672
2008	10.950	9.761	12.400	9.051
2009	9.400	10.398	12.065	9.293
November	9.480	9.470	9.610	9.348
Desember	9.400	9.458	9.505	9.400
2010				
Januari	9.365	9.275	9.408	9.130
Februari	9.335	9.348	9.413	9.280
Maret	9.115	9.174	9.313	9.070
April	9.012	9.027	9.075	9.001
Mei (sampai dengan 14 Mei 2010)	9.094	9.111	9.293	9.017

Sumber: Bank Indonesia
(1) Nilai tukar rata-rata per tahun dihitung berdasarkan rata-rata nilai tukar dari setiap periode akhir bulan.
(2) Nilai tukar rata-rata per bulan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai tukar dari setiap penutupan hari.

Bank Indonesia adalah satu-satunya penerbit mata uang Rupiah dan bertanggung jawab dalam mempertahankan stabilitas Rupiah. Sejak tahun 1970, Indonesia telah menggunakan tiga sistem nilai tukar mata uang, yaitu: (i) nilai tukar tetap antara 1970 sampai dengan 1978; (ii) nilai tukar mata uang mengambang antara 1978 sampai dengan 1997; dan (iii) nilai tukar mata uang bebas mengambang sejak 14 Agustus 1997. Berdasarkan sistem nilai tukar mata uang mengambang, Bank Indonesia telah mempertahankan nilai Rupiah dengan kebijakan *trading band*, dimana Bank Indonesia masuk ke pasar valuta asing dan membeli dan menjual Rupiah, bila diperlukan, ketika perdagangan Rupiah melebihi nilai lelang dan penawaran yang diumumkan oleh Bank Indonesia setiap harinya. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia tidak lagi menerapkan kebijakan *trading band* dan membiarkan nilai tukar Rupiah mengambang tanpa nilai tukar yang diumumkan dimana Bank Indonesia dapat melakukan intervensi, yang berakibat pada penurunan yang substansial pada nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Berdasarkan sistem yang digunakan saat ini, nilai tukar mata uang Rupiah ditentukan oleh pasar, yang merupakan refleksi dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Namun demikian, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil. Nilai tukar adalah Rp10.950 = US$1,00 per 31 Desember 2008 dan Rp9.400= US$1.00 per 31 Desember 2009. Pada 14 Mei 2010 2010, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS adalah Rp9.094 per Dolar AS. The Federal Reserve Bank of New York untuk keperluan pabean tidak menetapkan nilai tukar tengah hari *(noon buying rate)* untuk transfer dalam mata uang Rupiah.

Mata uang Rupiah sebelumnya dan saat ini secara umum dapat dikonversi atau dipindahkan secara bebas. Bank Indonesia memberlakukan peraturan yang melarang pemindahan mata uang Rupiah dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di luar negeri tanpa dasar alasan perdagangan atau investasi, dan karenanya perdagangan luar negeri terbatas pada sumber likuiditas yang ada. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan valuta asing dari semua orang dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia sekurang-kurangnya satu tahun.

Valuta Asing

Pengawasan valuta asing telah dihapuskan pada tahun 1971, dan Indonesia saat ini memberlakukan sistem valuta asing bebas yang memperbolehkan aliran valuta asing secara bebas. Transaksi modal, termasuk pengiriman modal, keuntungan, dividen dan bunga, bebas dari pengawasan valuta asing. Akan tetapi ada beberapa peraturan yang berdampak pada sistem valuta asing. Bank Indonesia belum lama ini memberlakukan peraturan yang melarang pemindahan mata uang Rupiah dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di luar negeri tanpa dasar alasan perdagangan atau investasi, dan karenanya perdagangan luar negeri terbatas pada sumber likuiditas yang ada. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan valuta asing dari semua orang dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia sekurang-kurangnya selama satu tahun.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

FAKTOR-FAKTOR RISIKO

Risiko-Risiko yang berkaitan dengan Indonesia

Kami didirikan di Indonesia dan sebagian besar bisnis, aset dan pelanggan kami berada di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin, atau mungkin tidak diambil atau diadopsi oleh Pemerintah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi Indonesia, antara lain, terjadinya depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi bisnis di Indonesia, termasuk memberikan dampak yang negatif bagi kualitas dan pertumbuhan basis pelanggan dan pemberian layanan kami, yang bergantung pada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, krisis ekonomi telah mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Banyak perusahaan Indonesia yang masih belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi, dan masih dalam proses restrukturisasi hutang mereka atau terlibat dalam sengketa yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi atas kewajiban hutang tersebut. Krisis keuangan global yang sebagian dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Krisis ini mengakibatkan kegagalan pada beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek, dan rontoknya harga pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari melemahnya ekonomi dunia telah mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi karena hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya risiko akibat ketidakpastian ekonomi dunia. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak negatif pada bisnis dan konsumen Indonesia, dan dapat berakibat pada menurunnya permintaan jasa telekomunikasi.

Gejolak harga minyak dan kemungkinan berkurangnya persediaan makanan dapat pula menyebabkan penurunan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan tingkat perekonomian Indonesia dapat pula menyebabkan timbulnya wanprestasi oleh para debitur-debitur Indonesia dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kegiatan bisnis, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasional dan prospek kami. Pemerintah terus mengalami defisit fiskal dalam jumlah besar dan hutang luar negeri yang tinggi. Cadangan mata uang asing Pemerintah dalam jumlah yang rendah dan melemahnya sektor perbankan yang diakibatkan oleh tingginya kredit macet. Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia juga dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan yang dibelanjakan oleh konsumen atau menyebabkan berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan untuk jasa telekomunikasi, termasuk jasa kami.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan di pasar yang sedang berkembang dan juga pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk memburuknya keadaan ekonomi global, dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada pasar uang Indonesia dan penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat atau pertumbuhan yang menurun atau negatif dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Ketidakstabilan politik dan sosial dapat memberikan dampak negatif bagi Perusahaan

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan tatanan demokrasi yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa politik dan sosial yang menimbulkan ketidakpastian pada kerangka politik Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga beberapa kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara demokrasi yang masih cukup baru, Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah sosiopolitik dan dari waktu ke waktu telah mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial politik.

Sejak tahun 2000, ribuan rakyat Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia lainnya baik untuk mendukung maupun melawan Mantan Presiden Wahid, Mantan Presiden Megawati, dan Presiden Yudhoyono, serta untuk menanggapi berbagai isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi minyak, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti-korupsi, *bail-out* PT Bank Century pada tahun 2008, desentralisasi dan otonomi daerah dan kampanye militer Amerika di Afghanistan dan Irak.

Pada bulan Juni 2001, rangkaian demonstrasi dan mogok kerja mewarnai sekurang- kurangnya 19 kota setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 30,0%. Demonstrasi serupa juga terjadi pada bulan Januari 2003 ketika Pemerintah kembali berupaya menaikkan harga bahan bakar, tarif listrik dan tarif telepon. Di dalam kedua peristiwa ini, Pemerintah terpaksa menangguhkan atau benar-benar menurunkan tingkat kenaikan tarif yang direncanakan. Pada bulan Maret 2005, Pemerintah memberlakukan kenaikan harga minyak sebesar sekitar 29,0%. Pada bulan Oktober 2005, Pemerintah memberhentikan subsidi minyak pada jenis premium dan minyak tanah serta mengurangi subsidi pada solar, yang mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar. Sebagai tanggapan, beberapa protes massa dilakukan untuk melawan kenaikan harga minyak domestik tersebut, dan tekanan politik akibat dari keputusan Pemerintah. Pada bulan Mei 2008, Pemerintah kembali mengurangi subsidi minyak kepada masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya demonstrasi. Walaupun demonstrasi-demonstrasi ini pada dasarnya dilakukan secara damai, beberapa berakhir dengan kekerasan. Kami tidak dapat memastikan bahwa situasi ini tidak akan berlanjut pada instabilitas politik dan sosial.

Ketidakstabilan politik regional dan pertikaian antara kelompok agama dan etnis tetap menjadi masalah. Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama dan etnis telah berakibat pada keresahan sosial dan sipil di beberapa tempat di Indonesia. Di provinsi Aceh dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi bentrokan antara pendukung gerakan separatis dan satuan militer Indonesia, walaupun hanya ada sedikit konflik di Aceh sejak ditandatanganinya Memo Kesepakatan pada bulan Agustus 2005. Pada bulan April 2006 beratus-ratus orang terlibat dalam aksi protes yang berujung pada kekerasan terhadap pengoperasian tambang emas Freeport di propinsi Papua. Dalam tahun-tahun terakhir, ketidakstabilan politik di Maluku dan Poso, sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, telah meningkat dan bentrokan-bentrokan antara kelompok-kelompok agama di daerah-daerah ini telah menyebabkan ribuan korban dan hilangnya orang-orang di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah pada beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah tidak membuat banyak kemajuan dalam negosiasi dengan daerah-daerah bermasalah ini, kecuali di Provinsi Aceh di mana pemilihan daerah yang damai telah dilaksanakan yang berujung dengan kelompok separatis memenangkan pemilihan dan menjadi Gubernur provinsi tersebut.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemilihan Umum dengan daftar calon terbuka. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, rakyat Indonesia telah mulai memilih secara langsung kepala daerahnya sendiri. Pada tahun 2009, pemilihan umum kembali diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Aktifitas politik yang lebih tinggi dapat terjadi di Indonesia. Walaupun pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009 telah dilakukan dengan damai, kampanye politik di Indonesia dapat menyebabkan ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu, dan kami tidak dapat memastikan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa yang akan datang dan dalam skala yang lebih besar atau bahwa gangguan tersebut tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Indonesia terletak pada zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan kerugian secara ekonomi

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan vulkanik dan musim kemarau, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya di luar kendali Perusahaan. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia (selain tsunami Asia pada tahun 2004), termasuk tsunami di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006, gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 2006 serta semburan dan banjir lumpur panas di Jawa Timur pada tahun 2006 dan beberapa gempa bumi

di Papua, Jawa Barat, Sulawesi, dan Sumatra pada tahun 2009. Indonesia juga mengalami banjir besar di Jakarta pada bulan Februari 2007 dan Solo, Jawa Tengah pada bulan Januari 2008. Pada bulan Januari 2009, hujan lebat telah mengakibatkan jebolnya bendungan di luar Jakarta, menenggelamkan rumah-rumah di daerah berpenduduk padat, dan mengakibatkan kematian atas kira-kira 100 orang. Banjir melanda ratusan rumah dan menyebabkan beberapa orang dilaporkan hilang.

Sebagai akibat dari bencana-bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk bantuan keadaan darurat dan penempatan kembali. Sebagian besar dari biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah negara lain dan organisasi bantuan internasional. Kami tidak dapat menjamin bahwa bantuan tersebut akan terus diberikan, atau bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada para penerimanya pada waktunya. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan asing tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut pada waktunya, keresahan sosial dan politik dapat terjadi. Sebagai tambahan, upaya perbaikan dan bantuan tersebut kemungkinan akan terus membebani keuangan Pemerintah, dan dapat berakibat pada kemampuannya untuk memenuhi kewajibanya berdasarkan hutang Pemerintah. Kegagalan Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya tersebut, atau pernyataan Pemerintah atau adanya moratorium atas hutang negara, dapat menimbulkan wanprestasi atas pinjaman pihak swasta termasuk pinjaman Perusahaan, sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap kegiatan usaham keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kami tidak dapat menjamin bahwa asuransi kami akan cukup untuk melindungi kami dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam tersebut dan hal-hal lain yang terjadi diluar kendali kami. Sebagai tambahan, kami tidak dapat menjamin bahwa premi yang dibayarkan untuk polis asuransi-asuransi tersebut pada saat perpanjangan jumlahnya tidak akan meningkat secara substansial, sehingga dapat secara material mengakibatkan dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil dari kegiatan operasional kami. Kami juga tidak dapat menjamin bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi, kerusakan geologis atau bencana alam di kota-kota yang memiliki populasi yang besar atau merupakan pusat keuangan di Indonesia dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan investor, sehingga menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kegiatan terorisme di Indonesia dapat membuat Negara tidak stabil, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Beberapa insiden pengeboman telah terjadi di Indonesia, terutama pada bulan Oktober 2002 di Bali, suatu wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tempat yang aman dari kerusuhan-kerusuhan yang mempengaruhi bagian-bagian lain dari negeri ini. Selain itu, beberapa insiden pengeboman, walaupun dalam skala yang lebih kecil, juga telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk di tempat perbelanjaan dan tempat ibadah. Pada bulan April 2003, sebuah bom meledak di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, dan sebuah bom meledak di depan terminal domestik di Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Pada bulan Agustus 2003, sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott di Jakarta, dan pada bulan September 2004, sebuah bom meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta. Pada bulan Mei 2005, sebuah bom meledak di Sulawesi Tengah yang menyebabkan korban meninggal sebanyak 21 orang dan korban luka-luka sekurang-kurangnya 60 orang. Pada bulan Oktober 2005, terjadi ledakan bom di Bali, yang menewaskan sekurang-kurangnya 23 orang dan melukai sekurang-kurangnya 101 orang lainnya. Pejabat Pemerintah Indonesia, Australia dan AS mengindikasikan bahwa pengeboman ini kemungkinan terkait dengan organisasi teroris internasional. Beberapa demonstrasi juga terjadi di Indonesia sebagai reaksi atas rencana aksi militer dan penambahan pasukan AS, Inggris dan Australia di Irak. Pada Januari 2007, kelompok teroris sektarian melakukan beberapa pengeboman di Poso. Pada bulan Juli 2009, ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton Jakarta menewaskan 6 orang dan melukai sekurang-kurangnya 50 orang. Tindakan teroris lain mungkin saja terjadi di masa mendatang dan ditargetkan pada warga negara asing di Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari, dan mengarah pada, ketidakstabilan dan kerusuhan ini dapat menggoyahkan Indonesia dan Pemerintah dan telah, dan dapat terus memberikan dampak negatif yang material bagi investasi dan kepercayaan pada, serta kinerja perekonomian Indonesia, dan dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Usaha kami dapat dipengaruhi oleh menyebarnya virus Severe Acute Respiratory Syndrome ("SARS"), flu burung, flu babi (H1N1) atau epidemik lainnya

Pada tahun 2003, beberapa Negara di Asia, termasuk Indonesia, Cina, Vietnam, Thailand dan Kamboja, mengalami penyebaran SARS, *atypical pneumonia* yang sangat menular, yang menyebabkan gangguan serius pada aktivitas ekonomi di, dan penurunan permintaan pada, negara-negara yang terjangkit.

Selama tiga tahun terakhir, sebagian besar Asia mengalami penyebaran baru dari flu burung. Per tanggal 2 Juni 2009, *World Health Organization*, atau WHO menyatakan bahwa total terdapat 262 kematian pada total 433 kasus yang dilaporkan kepada WHO, yang hanya mencakup pelaporan laboratorium atas kasus flu burung. Dari jumlah ini, Kementrian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO bahwa terdapat 115 kematian dari jumlah total 141 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, pada bulan Juni 2006 WHO mengumumkan bahwa transmisi antara manusia akibat flu burung terjadi di Sumatra, Indonesia. Menurut *United Nations Food and Agricultural Organization*, virus flu burung berasal dari 31 propinsi dari 33 propinsi di Indonesia dan usaha untuk menahan penyebarannya telah gagal di Indonesia, hal mana meningkatkan kemungkinan virus tersebut untuk berubah menjadi bentuk yang lebih mematikan. Tidak ada vaksin efektif terhadap flu burung yang telah berhasil dikembangkan dan vaksin tersebut mungkin tidak akan ditemukan tepat waktu untuk mencegah pandemi virus flu burung.

Pada bulan April 2009, terjadi penyebaran virus Influenza A (H1N1), yang berasal dari Meksiko namun telah menyebar secara global, termasuk di wilayah Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura dan daerah lain di Asia. Virus Influenza A (H1N1) dipercaya bersifat sangat menular dan penyebarannya sulit dicegah.

Penyebaran virus SARS, flu burung, Influenza A (H1N1) atau epidemik yang serupa, atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari Negara-negara yang terjangkit, termasuk Indonesia, untuk melawan penyebaran tersebut, dapat berdampak bagi ekonomi Indonesia dan Negara lain dan mengurangi kepercayaan investor, dan oleh sebab itu akan memberikan dampak negatif secara material terhadap keadaan keuangan atau hasil usaha kami.

Gerakan dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Liberalisasi peraturan yang mengijinkan pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan keadaan perekonomian yang lemah, telah menyebabkan, dan akan menyebabkan berlanjutnya keresahan dan aktivitas tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan peraturan ketenagakerjaan yang mengijinkan tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pengusaha. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah mengeluarkan undang-undang tenaga kerja, UU No. 13/2003 ("UU Tenaga Kerja"), yang, antara lain, meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi pada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan mengharuskan forum bipartite yang diikuti oleh pemberi kerja dan pekerja untuk perusahaan yang memiliki 50 atau lebih pekerja. Untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan tersebut, keanggotaan serikat pekerja harus lebih dari 50,0% dari jumlah total pekerja di perusahaan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap keberatan atas keabsahan UU Tenaga Kerja tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Tenaga Kerja adalah sah, kecuali untuk beberapa ketentuan. Pemerintah mengusulkan untuk mengubah UU Tenaga Kerja dengan cara dimana, menurut pandangan aktivis tenaga kerja, dapat berakibat pada menurunnya manfaat pensiun, peningkatan pemakaian tenaga kerja *outsourcing* dan larangan serikat tenaga kerja untuk melakukan mogok kerja. Rancangan perubahan undang-undang tersebut telah ditunda pembahasannya dan peraturan Pemerintah mengenai pemutusan hubungan kerja belum berlaku efektif. Kerusuhan dan gerakan buruh dapat mengganggu bisnis kami dan dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Negara lainnya, yang mana hal ini dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Depresiasi nilai rupiah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha, dan prospek Perusahaan

Salah satu dari penyebab yang paling utama atas terjadinya krisis ekonomi yang dimulai di Indonesia di pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan ketidakstabilan nilai tukar Rupiah, sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar AS. Walaupun Rupiah telah menguat secara tajam dari titik terendah sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, mata uang Rupiah dapat saja kembali mengalami ketidakstabilan di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2009, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS bervariasi dari titik terendah Rp12.400 per Dolar AS hingga mencapai titik tertinggi, yaitu Rp9.293 per Dolar AS. Sebagai akibatnya, kami mencatat kerugian-bersih akibat nilai tukar mata uang asing masing-masing sebesar miliarRp885,7 miliarmiliar pada tahun 2008, dan keuntungan sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009. Kami tidak dapat memastikan bahwa depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing, termasuk Dolar AS tidak akan terjadi lagi. Apabila Rupiah melemah lebih jauh dari nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2009, kewajiban kami atas hutang dagang, hutang pengadaan dan hutang pinjaman serta obligasi kami dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah. Depresiasi lebih lanjut atas Rupiah dapat berakibat pada bertambahnya kerugian pada nilai tukar valuta asing dan akan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan lain-lain dan pendapatan bersih kami.

Sebagai tambahan, walaupun Rupiah secara umum bebas dikonversi dan ditransfer (kecuali bank-bank Indonesia dapat menolak melakukan transfer Rupiah kepada pihak-pihak di luar Indonesia yang tidak mempuyai tujuan perdagangan atau investasi yang jelas), Bank Indonesia, dari waktu ke waktu, telah melakukan intervensi dalam pasar uang dalam rangka melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah atau membeli Rupiah dengan menggunakan cadangan mata uang asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan nilai tukar mengambang dari Bank Indonesia tidak akan berubah, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lain untuk menstabilkan, mempertahankan atau menguatkan nilai Rupiah, ataupun bahwa salah satu tindakan-tindakan ini, apabila dilakukan, dapat membuahkan hasil yang baik. Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang dapat berakibat pada sangat meningginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas, diawasinya permodalan atau pertukaran valuta atau tidak diberikannya bantuan dana tambahan oleh para kreditur multinasional. Hal ini dapat berakibat menurunnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, terjadinya cidera janji dalam pembayaran hutang atau berkurangnya penggunaan oleh pelanggan kami, dan sebagai dampaknya, kami juga akan mengalami kesulitan dalam membiayai pengeluaran barang modal dan dalam menjalankan strategi bisnis kami. Salah satu dari konsekuensi-konsekuensi tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Sejak tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat hutang pemerintah (*sovereign rating*) Indonesia dan peringkat hutang dari berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan lainnya di Indonesia. Pada tanggal laporan tahunan ini, hutang jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat "Ba2 stable" oleh Moody's, "BB- positif" oleh Standard & Poor's dan "BB+ stable" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar hutangnya dan kesanggupan dan kemauannya untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo.

Kami tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat hutang Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan. Setiap penurunan peringkat tersebut dapat memiliki dampak negatif bagi likuiditas di pasar uang Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan kami, untuk memperoleh pendanaan tambahan serta tingkat suku bunga serta ketentuan-ketentua komersial lainnya dimana pendanaan tambahan tersedia. Tingkat suku bunga mengambang atas hutang dalam mata uang Rupiah kemungkinan juga akan naik. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional dan prospek kami.

Kami tunduk pada keterbukaan perusahaan dan persyaratan pelaporan yang berbeda dengan negara lain

Sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek New York, kami tunduk pada good corporate governance atau tata penyelenggaraan perusahaan dan persyaratan pelaporan di Indonesia dan Amerika Serikat yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek dari yang berlaku untuk perusahaan yang ada di negara lain. Jumlah informasi yang disediakan untuk umum oleh emiten di Indonesia mungkin lebih sedikit dibanding dengan yang disediakan untuk umum oleh perusahaan sejenis di beberapa negara maju, dan informasi statistik dan keuangan dari tipe tertentu yang disediakan oleh perusahaan di beberapa negara maju mungkin tidak tersedia. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses pada tingkat dan tipe yang sama yang disediakan di negara lain, dan perbandingan dengan perusahaan lain di negara lainnya mungkin tidak dimungkinkan dalam semua aspek.

Kami didirikan di Indonesia, dan investor mungkin tidak dapat melakukan tindakan hukum atau melaksanakan keputusan, terhadap kami di Amerika Serikat, atau untuk memberlakukan putusan pengadilan asing terhadap kami di Indonesia

Kami adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, menjalankan usaha dalam kerangka hukum Indonesia dengan status sebagai perusahaan modal asing, dan hampir semua aktiva kami berada di Indonesia. Selain itu, beberapa Komisaris kami dan hampir seluruh Direksi kami bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian besar aktiva dari pihak-pihak tersebut berada di luar Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, investor mungkin akan kesulitan dalam melakukan tindakan hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan, terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat, atau memberlakukan putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat.

Penasihat hukum Indonesia kami telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan Amerika Serikat, termasuk putusan-putusan mengenai ketentuan kewajiban perdata dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat, tidak dapat diberlakukan di pengadilan Indonesia, meskipun putusan tersebut dapat dijadikan bukti yang tidak bersifat final dalam pemeriksaan perkara yang diajukan di pengadilan Indonesia. Tidak dapat dipastikan apakah pengadilan Indonesia akan mengeluarkan putusan berdasarkan gugatan asli yang diajukan di hadapannya, yang mana hanya didasarkan pada ketentuan kewajiban perdata (*civil liability*) dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak penggugat harus mengajukan gugatan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di pengadilan Indonesia.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Perusahaan

Kami menjalankan usaha di dalam keadaan dimana hukum dan perundang-undangan sedang mengalami reformasi. Reformasi ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang dapat mengakibatkan, antara lain, berkurangnya marjin dan pendapatan usaha, yang semua ini dapat memberikan dampak material yang negatif bagi kami

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1999 telah mendorong liberalisasi industri telekomunikasi sampai pada titik tertentu, termasuk di antaranya kemudahan bagi para pemain baru untuk masuk ke sektor industri telekomunikasi dan perubahan struktur persaingan industri telekomunikasi. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan peraturan tersebut menjadi sedemikian banyak dan rumit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, seiring dengan terus berlangsungnya reformasi di sektor telekomunikasi Indonesia, para pesaing dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari kami mulai memasuki sektor telekomunikasi Indonesia dan bersaing dengan kami dalam menyediakan layanan telekomunikasi.

Sebagai contoh, sejak Januari 2007, Pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Informasi ("Menkominfo"), telah bertanggung jawab untuk menetapkan tarif untuk layanan interkoneksi. Lihat Butir 3 : Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko "Risiko-Risiko Terkait Bisnis Kami—Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami." Menkominfo menetapkan tarif interkoneksi

untuk penyelenggara telekomunikasi dominan berdasarkan "biaya", berdasarkan Daftar Penawaran Interkoneksi ("DPI") yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi dominan, termasuk kami. Sebaliknya, penyelenggara telekomunikasi yang tidak masuk dalam klasifikasi penyelenggara dominan dapat hanya memberitahukan kepada Menkominfo mengenai tarif mereka dan menerapkan tarif tersebut kepada pelanggan tanpa persetujuan Menkominfo. Perbedaan perlakuan terhadap penyelenggara telekomunikasi dominan dan non-dominan dapat menciptakan peluang bagi pemain baru di bidang indutri telekomunikasi, memperbesar keleluasan bagi mereka dalam menetapkan tarif yang rendah dan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya. Sebagai tambahan, tarif DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan kami memperkirakan penurunan ini akan berlanjut. Penurunan biaya interkoneksi ini dapat menurunkan pendapatan kami dan juga biaya trafik antar-operator.

Baru-baru ini, pada tanggal 25 Januari 2010, Menkominfo menerbitkan peraturan baru dimana penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah diberikan alokasi frekuensi dan kode akses untuk menyediakan jaringan tertentu dikecualikan dari proses seleksi berikutnya apabila penyelenggara tersebut bermaksud untuk mendapatkan ijin jaringan baru dengan kode akses yang lain. Hal ini diharapkan memungkinkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk melakukan ekspansi bisnisnya dengan lebih mudah.

Di masa mendatang, Pemerintah akan mengumumkan atau memberlakukan perubahan peraturan lainnya, seperti perubahan kebijakan interkoneksi atau tarif yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis atau ijin yang kami miliki saat ini. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan berhasil bersaing dengan para penyelenggara telekomunikasi dalam negeri maupun asing atau bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau di kemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami mungkin tidak mampu untuk membiayai pengeluaran barang modal yang dibutuhkan untuk tetap bersikap kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia.

Penyelenggaraan layanan telekomunikasi bersifat padat modal. Agar dapat bersaing, kami harus terus melakukan perluasan, modernisasi dan pembaharuan teknologi infrastruktur telekomunikasi kami, yang memerlukan investasi modal dalam jumlah yang besar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, total pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami mencapai masing-masing Rp12.285,2 miliar dan Rp11.567,4 miliar (US$1.230,6 juta). Pada tahun 2010, kami berencana untuk mengalokasikan US$550 juta hingga US$700 juta untuk pengeluaran barang modal baru, yang, bersama-sama dengan prakiraan pengeluaran barang modal aktual yang dikeluarkan pada tahun 2010 untuk komitmen pengeluaran barang modal pada periode-periode sebelumnya, diperkirakan akan bernilai kurang lebih US$1.000 juta hingga US$1.200 juta total pengeluaran barang modal aktual untuk tahun 2010. Kemampuan kami untuk membiayai pengeluaran barang modal di masa yang akan datang akan bergantung pada kinerja operasi kami di masa yang akan datang, yang bergantung pada keadaan ekonomi, tingkat suku bunga dan faktor keuangan, bisnis dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kekuasaan kami, dan juga terhadap kemampuan kami untuk memperoleh tambahan pendanaan eksternal. Kami tidak dapat memastikan bahwa pendanaan tambahan akan tersedia, atau apabila ada, dapat diterima secara komersial. Sebagai tambahan kami dapat mendapatkan pendanaan tambahan sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang kami. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat memastikan bahwa kami akan memiliki sumber dana yang mencukupi untuk meningkatkan atau memperluas teknologi infrastruktur telekomunikasi atau memperbaharui teknologi kami yang lainnya yang diperlukan agar dapat tetap bersaing di pasar telekomunikasi Indonesia. Kegagalan kami untuk melakukan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami

Kami bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami dan infrastruktur terkait agar pengoperasian bisnis Perusahaan berhasil. Apabila terjadi perselisihan mengenai interkoneksi, baik yang disebabkan kegagalan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban kontraktual atau karena alasan lainnya, maka satu satu atau lebih layanan kami dapat terhambat, terganggu atau berhenti

sama sekali, kualitas layanan kami dapat menurun, *churn* pelanggan kami dapat meningkat atau tarif interkoneksi kami dapat naik. Perselisihan yang melibatkan perjanjian interkoneksi kami saat ini, dan juga kegagalan kami untuk menandatangani atau memperbaharui perjanjian interkoneksi dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami dapat menjadi subyek pembatasan kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 ("Peraturan Presiden"), menetapkan jenis industri dan bidang usaha dalam mana investasi asing dilarang, dibatasi atau harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur oleh institusi Pemerintah yang terkait atau Daftar Negatif Investasi. Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi, dan oleh karena itu investasi asing dalam industri telekomunikasi Indonesia terpengaruh oleh pembatasan dan ketentuan yang berlaku. Daftar Negatif Investasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau BKPM. Pembatasan yang berlaku bagi industri telekomunikasi bergantung pada jenis usaha telekomunikasi yang dilakukan. Pembatasan yang berbeda berlaku tergantung pada apakah usaha tersebut terkait dengan jaringan atau layanan telekomunikasi. Batasan terhadap kepemilikan saham oleh asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang usaha jaringan telekomunikasi berkisar dari 49,0% sampai dengan 65,0%, dan batasan pada kepemilikan saham oleh asing pada perusahaan Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa multimedia (termasuk komunikasi data seperti jasa *wireless broadband*), berkisar dari 49,0% sampai dengan 95,0%. Berdasarkan Pasal 5 dari Peraturan Presiden, pembatasan yang diatur dalam Peraturan tersebut tidak berlaku bagi investasi yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Presiden; dengan ketentuan bahwa investasi tersebut ditetapkan oleh suatu surat persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh BKPM. Dengan demikian, pembatasan yang diatur dalam Peraturan Presiden tidak berlaku pada persetujuan investasi yang telah kami peroleh sebelum berlakunya Peraturan Presiden.

Pada tanggal 22 Juni 2008, Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. ("Qtel"), melalui anak perusahaannya, Qatar South East Asia Holding S.P.C. membeli seluruh saham yang diterbitkan dan yang beredar dari masing-masing Indonesia Communications Limited ("ICLM"), dan Indonesia Communications Ptd. Ltd. ("ICLS") dari Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. ("AMH"), sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura. Setelah akuisisi ini, perubahan pengendalian terjadi di Perusahaan dan mewajibkan Qtel untuk melakukan penawaran tender. Sehubungan dengan penawaran tender, pada tanggal 23 Desember 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia ("Bapepam-LK"), mengeluarkan surat (i) menyatakan bahwa Bapepam-LK telah menerima surat dari BKPM tertanggal 19 Desember 2008, dimana BKPM mengkonfirmasikan bahwa jumlah maksimal kepemilikan saham asing di Perusahaan adalah 65,0%, dan bahwa Perusahaan masih tetap dapat melakukan kegiatan operasional jaringan selularnya dan usaha jaringan tetap lokal dan (ii) memberikan ijin kepada Qtel untuk melakukan penawaran tender. Menyusul keluarnya surat tersebut, Qtel melakukan penawaran tender untuk membeli hingga 1.314.466.775 Saham Seri B, mewakili kira-kira 24,19% dari total Saham Seri B yang telah diterbitkan dan telah beredar (termasuk Saham Seri B dalam bentuk ADS).

Sebagai perseroan terbuka, kami percaya bahwa Daftar Negatif Investasi tidak berlaku bagi kami. Selain itu, kami mengetahui bahwa BKPM saat ini sedang memikirkan untuk mengubah Peraturan Presiden suatu waktu di tahun 2010. Terdapat kesepakatan di antara pejabat pemerintah bahwa perubahan dapat membatasi kemampuan investor asing untuk memiliki saham mayoritas di perusahaan-perusahaan terdaftar yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang dibatasi.

Apabila pihak regulator yang berwenang hendak memberlakukan Daftar Negatif Investasi terhadap Perusahaan, terlepas dari status Perusahaan sebagai perseroan terbuka, pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham asing lain kami dapat diminta untuk mengurangi kepemilikan sahamnya pada Perusahaan, hal mana dapat mempengaruhi penurunan harga perdagangan saham Perusahaan dan dapat memiliki pengaruh negatif yang material terhadap usaha, kondisi keuangan, dan prospek kami. Kami juga dapat diharuskan untuk memisahkan bidang usaha kami menjadi dua bagian, jaringan bergerak atau selular dan jaringan tetap atau jaringan tertutup tetap, agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemisahan bidang usaha kami ke dalam dua sektor dapat dilakukan melalui pengalihan kegiatan jaringan tetap atau jaringan bergerak atau selular kami kepada anak Perusahaan atau pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami secara material dan dapat

mengakibatkan penurunan pada pendapatan usaha kami. Sebagai tambahan, apabila pihak regulator yang berwenang menetapkan bahwa kepemilikan asing di Perusahaan masih melebihi batasan yang ditetapkan dalam Daftar Negatif Investasi, regulator yang berwenang mungkin melarang kami untuk mengikuti tender atau untuk memperoleh izin lain atau spektrum tambahan. Apabila hal ini terjadi, usaha, peluang, kondisi keuangan dan hasil usaha kami menjadi terpengaruh.

Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, gateway menuju jaringan kami atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Untuk menyediakan layanan kami, Perusahaan sangat bergantung pada lancarnya pengoperasian jaringan. Misalnya, Perusahaan bergantung pada akses ke PSTN untuk terminasi dan sumber panggilan selular ke dan dari telepon dengan jaringan tetap, dan sebagian besar dari trafik sambungan selular dan sambungan jarak jauh internasional Perusahaan disalurkan melalui PSTN. Terbatasnya fasilitas interkoneksi PSTN yang tersedia untuk Perusahaan telah memberikan dampak negatif bagi bisnis kami pada masa lalu dan dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami di masa mendatang.

Oleh karena hambatan kapasitas interkoneksi, para pelanggan selular kami sesekali mengalami kesulitan dalam melakukan panggilan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa fasilitas interkoneksi ini akan ditingkatkan atau dipertahankan pada level saat ini.

Perusahaan juga bergantung pada beberapa sistem informasi manajemen atau sistem lainnya yang canggih dalam hal teknologi, seperti sistem tagihan pelanggan yang membuat kami dapat menjalankan bisnis. Selain itu, kami cukup bergantung pada interkoneksi ke jaringan operator telekomunikasi lainnya yang menghubungkan sambungan telepon para pelanggan kami ke para pelanggan operator telepon jaringan tetap dan para operator selular lainnya baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jaringan kami, yang meliputi sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur, dan jaringan para operator lainnya dengan mana para pelanggan kami berinterkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan dan gangguan operasi akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, putusnya aliran listrik, tidak berfungsinya perangkat, cacat pada *software* jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa-peristiwa yang serupa. Misalnya, pusat pengendali telekomunikasi dan fasilitas *back-up* teknologi informasi kami sangat berkonsentrasi di kantor pusat dan *principal operating and tape back-up storage facilities* di dua tempat di Jakarta. Setiap kegagalan yang mengakibatkan gangguan pada operasional kami atau penyediaan salah satu layanan, baik akibat gangguan operasional, bencana alam atau lainnya, dapat menghambat kami dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, yang mana hal ini dapat menyebabkan para pelanggan menjadi sangat tidak puas dan memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Industri telekomunikasi terbentuk dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Kami dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari segi teknologi yang saat ini sedang dikembangkan atau yang mungkin dikembangkan di kemudian hari. Perkembangan atau penerapan teknologi, layanan atau standar baru atau alternatif di masa mendatang memerlukan perubahan besar terhadap model bisnis Perusahaan, pengembangan produk baru, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, perkembangan teknologi konvergensi telepon tetap-selular yang dapat membuat sambungan telepon yang berasal dari selular tidak melalui jaringan selular, tetapi sebaliknya melalui jaringan telepon tetap, dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis Perusahaan. Pengembangan produk dan layanan baru membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat mengakibatkan lahirnya pesaing baru di pasar. Kami tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perubahan teknologi yang baru muncul dan yang akan ada di kemudian hari dapat mempengaruhi operasional atau daya saing layanan kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa teknologi kami tidak akan menjadi usang, atau tidak akan mendapat persaingan dengan teknologi baru di masa mendatang, atau bahwa kami akan dapat memperoleh teknologi baru yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima

secara komersial, agar dapat bersaing di situasi yang telah berubah. Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami secara merugikan.

Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dari para pesaing utama kami, yaitu Telkom dan Telkomsel. Pemerintah dapat memberikan prioritas pada bisnis Telkom dan Telkomsel daripada Perusahaan

Per tanggal 31 Desember 2009, Pemerintah memiliki saham sebanyak 14,29% di Perusahaan, termasuk satu saham Seri A, yang memiliki hak suara istimewa dan hak veto atas beberapa hal strategis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk keputusan untuk pembubaran, likuidasi dan mengajukan kepailitan dan memperbolehkan Pemerintah untuk menominasikan satu Direktur dari Direksi dan satu Komisaris dari Dewan Komisaris.

Per tanggal 31 Desember 2009, Pemerintah juga memiliki saham sebanyak 52,47% di Telkom, yang merupakan pesaing utama kami di sektor jasa telepon tetap SLI. Per tanggal yang sama, Telkom memiliki saham sebanyak 65,0% di Telkomsel, salah satu pesaing utama kami dalam penyelenggaraan jasa selular. Persentase kepemilikan saham Pemerintah di Telkom jauh lebih besar dibandingkan di Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana Pemerintah akan banyak mendukung bisnis Perusahaan atau bahwa Pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada Telkom dan Telkomsel serta Perusahaan ketika memberlakukan keputusan-keputusan di kemudian hari, atau ketika menggunakan wewenang regulasinya terhadap industri telekomunikasi Indonesia. Jika Pemerintah memberikan prioritas kepada kegiatan usaha Telkom atau Telkomsel daripada Perusahaan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek perusahaan kami.

Kepentingan para pemegang saham pengendali kami dapat berbeda dengan kepentingan para pemegang saham lainnya

Per tanggal 31 Desember 2009, Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. ("Qtel Asia"), memiliki sekitar 65% saham yang telah ditempatkan dan disetor kami. Qtel Asia saat ini seluruhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Qtel, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Qatar dan pihak terkaitnya. Qtel Asia dan pemegang saham pengendalinya dapat menggunakan kendalinya atas bisnis Perusahaan dan dapat membuat kami mengambil tindakan-tindakan yang tidak berhubungan dengan, atau dapat berbenturan dengan, kepentingan terbaik kami ataupun para pemegang saham lainnya dari Perusahaan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan kebijakan kami. Meskipun orang-orang yang ditunjuk oleh Qtel Asia memegang jabatan baik di dalam Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pemegang saham pengendali kami akan menunjuk direksi dan komisaris atau untuk dapat mempengaruhi usaha kami dengan cara yang menguntungkan para pemegang saham lainnya.

Kami mengandalkan personil manajemen inti, dan bisnis kami dapat terkena dampak negatif apabila tidak mampu mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti

Kami yakin bahwa tim manajemen kami saat ini telah memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian yang besar dalam mengelola bisnis Perusahaan. Keberhasilan bisnis kami dan kemampuan kami dalam melaksanakan strategi-strategi bisnis kami di masa mendatang sangat bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh personil inti kami. Personil yang terampil di sektor industri telekomunikasi di Indonesia tidak banyak jumlahnya dan kelangkaan ini mungkin akan terus terjadi. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan personil ahli tertentu menjadi semakin tinggi. Selain itu, seiring dengan masuknya para pemain baru di pasar yang mulai menjalankan atau memperluas bisnisnya di Indonesia, beberapa karyawan inti kami dapat meninggalkan jabatannya saat ini. Ketidakmampuan kami dalam mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti dapat memberikan dampak negatif yang material bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa kami terbukti bersalah melakukan penetapan harga dan gugatan class action, kami dapat dikenakan sanksi yang cukup besar sehingga dapat menurunkan pendapatan kami dan berdampak pada bisnis, reputasi dan keuntungan kami

Pada tanggal 1 November 2007, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"), telah mengeluarkan putusan mengenai pemeriksaan awal terhadap kami dan delapan perusahaan telekomunikasi lainnya dengan tuduhan penetapan harga SMS dan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli ("Undang-Undang No. 5/1999"). Pada 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa Telkom, Telkomsel, XL Axiata Tbk ("XL"), PT Bakrie Telecom ("Bakrie Telekom"), PT Mobile-8 Telecom Tbk ("Mobile 8"), dan PT Smart Telecom ("Smart Telecom") secara bersama-sama telah melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999. Mobile-8 mengajukan keberatan atas putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Telkomsel, XL, Telkom, Indosat, PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison"), Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Selular ("Natrindo") dipanggil untuk menghadap sebagai turut terlapor dalam perkara ini, sedangkan Telkomsel mengajukan keberatan terhadap putusan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun KPPU memutuskan bahwa kami tidak bersalah terhadap tuduhan penetapan harga SMS, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pengadilan Negeri akan menguatkan putusan KPPU. Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan keberatan terhadap putusan KPPU berdasarkan pemeriksaan kembali atas putusan KPPU dan dokumen kasus yang diserahkan kepada KPPU. Jika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan kepentingan kami, kami dapat diharuskan untuk membayar denda, yang jumlahnya akan berada sepenuhnya pada keputusan Pengadilan Negeri, hal mana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Sebagai tambahan, selama tahun 2007 dan 2008 beberapa gugatan *class action* telah ditujukan kepada Perusahaan dan Telkomsel di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, berkaitan dengan kepemilikan silang Temasek sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh telah mengakibatkan pengaturan harga telekomunikasi sehingga merugikan masyarakat. Penggugat telah menarik kembali gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi. Pada tanggal 27 Januari 2010, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima karena para penggugat menolak untuk membuktikan kewenangan mereka dan bahwa dua anggota penggugat tidak memenuhi syarat sebagai perwakilan dari *class action*. Karena jangka waktu mengajukan banding telah berakhir pada tanggal 18 Maret 2010, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2010 menjadi mengikat.

Perkara class action Tangerang dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 2010, dimana tergugat memasukkan eksepsi dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2010 majelis hakim memutuskan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima karena ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatan dan penggugat juga gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai perwakilan dari class action. Walaupun gugatan class action tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang serta gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi telah ditarik kembali, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pelanggan tidak akan mengajukan gugatan yang serupa di kemudian hari. Jika terdapat gugatan *class action* baru dan Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang menguntungkan para penggugat, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Kami terekspos dengan risiko tingkat bunga

Hutang kami mencakup pinjaman-pinjaman bank untuk membiayai usaha kami. Apabila memungkinkan, kami berusaha meminimalisir eksposur risiko tingkat bunga kami dengan mengadakan kontrak *swap* untuk mengubah tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap selama jangka waktu tertentu bagi pinjaman-pinjaman kami. Bagaimanapun, kebijakan lindung nilai kami tidak dapat secara cukup menutupi risiko kami terhadap fluktuasi tingkat bunga dan hal ini dapat berakibat pada beban bunga yang besar dan dapat mempengaruhi bisnis, keadaan keuangan dan hasil usaha kami secara negatif.

Kami terekspos dengan risiko counter-party

Kami dapat mengadakan beberapa transaksi dari waktu ke waktu yang dapat mengekspos kami kepada kredit para *counterparty* kami dan kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak mereka

dengan kami. Sebagai contohnya, kami dapat menandatangani kesepakatan *swap*, yang mengekspos kami pada risiko di mana para *counterparty* dapat melakukan wanprestasi dalam kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang relevan. Apabila *counterparty*, termasuk institusi keuangan, dinyatakan pailit atau menjadi insolven, hal ini dapat berakibat pada penundaan dalam mendapatkan dana atau Perusahaan harus melakukan likuidasi terhadap posisi kami, yang dapat mengakibatkan kerugian.

Kami mungkin tidak dapat tidak dapat mengelola risiko pertukaran valuta asing kami secara sukses

Perubahan nilai tukar mata uang telah mempengaruhi dan mungkin terus mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha kami. Sebagian besar dari kewajiban pembayaran hutang kami adalah dalam Rupiah dan sebagian besar pengeluaran barang modal kami adalah dalam mata uang Dolar AS. Sebagian besar pendapatan kami adalah dalam mata uang Rupiah namun sebagian pendapatan usaha kami adalah dalam Dolar AS atau yang terkait dengan Dolar AS. Kami juga mungkin akan memiliki hutang jangka panjang lainnya dalam mata uang selain dari Rupiah, termasuk Dolar AS, untuk membiayai pengeluaran barang modal tambahan.

Kami saat ini melakukan lindung nilai atas sebagian kewajiban kami dalam mata uang asing terutama karena pendapatan usaha tahunan kami dalam mata uang Dolar AS lebih kecil dari seluruh biaya operasi kami dalam mata uang Dolar AS, seperti beban usaha kami dalam Dolar AS dan pembayaran hutang pokok dan bunga dalam mata uang Dolar AS. Pada tahun 2005, dalam rangka upaya mengelola eksposur valuta asing kami dan menurunkan biaya pendanaan kami secara keseluruhan, kami mengadakan kontrak swap valuta asing dengan tiga lembaga keuangan internasional yang berbeda. Dari tahun 2006 sampai tahun 2009, kami mengadakan beberapa kontrak swap valuta asing dengan tujuh lembaga keuangan internasional sebagai usaha untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing kami. Untuk kontrak-kontrak ini, kami membayar biaya di muka atau suku bunga premi tetap. Kami tidak dapat memastikan bahwa kami dapat berhasil mengelola risiko valuta asing di masa yang akan datang atau bahwa bisnis, keadaan keuangan atau hasil usaha kami tidak akan terkena dampak negatif dengan adanya eksposur terhadap risiko nilai tukar tersebut. Lihat "Diskusi Manajemen dan Analisa Keadaan Keuangan dan Hasil Usaha – Pengungkapan Kuantitatif dan kualitatif mengenai Risiko Pasar".

Risiko yang terkait dengan Bisnis Jasa Selular Perusahaan

Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa selular Perusahaan

Persaingan di industri jasa selular sangat tinggi. Persaingan di antara para penyedia jasa selular di Indonesia didasarkan pada berbagai faktor seperti harga, kualitas dan cakupan jaringan, ragam layanan, fitur yang ditawarkan serta pelayanan pelanggan. Bisnis jasa selular kami bersaing terutama dengan Telkomsel dan XL. Beberapa penyelenggara GSM dan CDMA kecil lainnya juga menyediakan jasa selular di Indonesia, termasuk Hutchison, Natrindo dan Smart Telecom. Selain para penyelenggara jasa selular yang ada, Menkominfo dapat kembali memberikan ijin penyelenggaraan jasa selular di kemudian hari, dan pemain baru tersebut akan bersaing dengan kami.

Kami memperkirakan persaingan dalam usaha jasa selular akan semakin ketat. Penyedia jasa selular yang baru maupun yang telah ada dapat menawarkan paket produk dan jasa yang lebih menarik atau teknologi baru atau konvergensi dari beberapa layanan telekomunikasi, dan mengakibatkan *churn rates* yang lebih tinggi, ARPU yang lebih rendah atau pengurangan, atau lambatnya pertumbuhan jumlah pelanggan selular kami. Pada tahun 2009, persaingan yang berlanjut pada pemain lama dan pemain baru dalam pasar jasa selular berakibat pada kampanye harga yang agresif oleh penyelenggara jasa selular. Penurunan harga penggunaan selular juga berakibat pada peningkatan jumlah pelanggan dan pada trafik jaringan, berakibat pada peningkatan kepadatan jaringan antara operator, yang mengharuskan kami untuk melakukan penambahan pengeluaran barang modal untuk terus memperluas jaringan kami. Sebagai tambahan, teknologi yang digunakan oleh operator CDMA dan jaringan bergerak tetap bersifat kurang padat modal, sehingga memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan operator GSM.

Lahan persaingan dalam bisnis jasa selular juga dapat dipengaruhi oleh konsolidasi industri. Pada bulan Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian kerja sama untuk memakai logo dan merek yang sama di bawah nama "smartfren." Penyelenggara jasa selular lainnya mungkin akan melakukan konsolidasi yang sama di masa yang akan datang.

Persaingan dari para operator yang menggunakan teknologi baru, serta dengan operator baru, operator lama dan konsolidasi antar operator dapat menimbulkan dampak merugikan bagi posisi, bisnis jasa selular, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Banyaknya jaringan selular dan terbatasnya ketersediaan spektrum dapat menghambat peningkatan jumlah pelanggan selular kami dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan selular Perusahaan

Kami berniat untuk meneruskan rencana promosi kami untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pemakaian jaringan kami oleh pelanggan selular kami. Kami juga berniat untuk terus mempromosikan layanan data kami termasuk jasa BlackBerry™ dan layanan *wireless broadband* kami. Sebagai akibatnya, kami mungkin akan mengalami peningkatan kepadatan jaringan, yang dapat mempengaruhi performa jaringan kami dan merusak reputasi kami di mata pelanggan. Selain itu, pemakaian selular yang lebih tinggi di area perkotaan yang padat mungkin menuntut kami untuk menggunakan teknik rekayasa frekuensi radio, yang meliputi rancangan selular makro, mikro dan *indoor*, untuk mempertahankan kualitas jaringan selular kami walaupun terjadi gangguan frekuensi radio dan pola pemakaian ulang radio frekuensi yang lebih ketat. Meskipun demikian, apabila jumlah pengguna selular kami atau penggunaan layanan suara dan data kami bertumbuh secara signifikan di area-area dengan kepadatan yang tinggi, kami tidak dapat menjamin bahwa usaha-usaha ini akan cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk mendukung permintaan tambahan bagi jaringan kami, kami mungkin dituntut untuk melakukan pengeluaran barang modal yang signifikan untuk memperbaiki cakupan jaringan kami. Pengeluaran barang modal tambahan tersebut, bersama dengan kemungkinan penurunan jasa selular kami, dapat berdampak buruk bagi posisi persaingan kami, bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Terlepas dari dikeluarkannya dana yang besar untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami, jumlah pelanggan selular meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan usaha kami

Kami telah menggunakan sumber dana yang cukup banyak untuk mengembangkan dan memperluas jaringan selular kami serta untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami. Namun demikian, ketidakpastian atas situasi ekonomi di Indonesia dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli pelanggan selular kami. Terlebih lagi, terus menurunnya tarif efektif untuk penggunaan telepon sebagai dampak kampanye "free-talk" dan promosi diskon tarif baru-baru ini, peningkatan pemakaian SMS, usaha kami untuk membersihkan pelanggan kami dan penetrasi selular yang lebih tinggi pada segmen pasar berpenghasilan rendah telah mengakibatkan penurunan ARPU dan penurunan jumlah pelanggan selular kami pada tahun 2009. Jumlah pelanggan selular kami (termasuk pelanggan *wireless broadband*) meningkat kurang lebih 24,5 juta per tanggal 31 Desember 2007 menjadi kurang lebih 36,5 juta per tanggal 31 Desember 2008, dan kurang lebih 33,1 juta per tanggal 31 Desember 2009. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, ARPU kami masing-masing adalah sebesar 38.639, dan Rp37.330. Walaupun kami bermaksud untuk terus menggunakan sumber pendanaan yang signifikan untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami dan untuk memperluas jaringan selular kami untuk mendukung permintaan dari penambahan jumlah pelanggan selular, kami tidak dapat menjamin bahwa pengeluaran tersebut akan diikuti dengan peningkatan ARPU atau pendapatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, biaya akuisisi pelanggan kami dan pengeluaran barang modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas jaringan kami dapat mengalami peningkatan tanpa mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pendapatan atau laba kami, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha kami dan prospek kami.

Kami mengalami churn rate yang tinggi

Kami mengalami *churn rate* yang tinggi, sebagaimana umumnya dialami oleh operator telekomunikasi Indonesia yang menyelenggarakan jasa selular prabayar. Kami percaya bahwa *churn rate* kami yang tinggi disebabkan oleh fakta bahwa banyak pelanggan prabayar kami yang memiliki lebih dari satu kartu SIM dari berbagai operator selular,

yang memungkinkan mereka untuk memilih paket yang termurah. Kami yakin bahwa *high churn* kami juga sebagai dampak atas usaha kami, selama sembilan bulan pertama tahun 2009, untuk membersihkan basis pelanggan kami dengan cara menekan perilaku "*calling card*" dan memfokuskan diri kepada loyalitas konsumen. Kami percaya bahwa pelanggan-pelanggan tersebut merupakan pelanggan-pelanggan jangka pendek yang kemungkinan tidak mengisi ulang kartu SIM tersebut. Tingginya *churn rates* kami dapat berakibat pada menurunnya pendapatan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha kami.

Kami bergantung pada ketersediaan infrastuktur menara telekomunikasi

Kami sangat tergantung pada menara telekomunikasi kami dan yang lainnya, untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi seperti selular GSM, FWA dan 3G dan jasa telekomunikasi bergerak selular dengan memasang pemancar dan antena penerima dan fasilitas pendukung BTS lainnya pada menara tersebut. Ketersediaan dan pemasangan menara telekomunikasi tersebut memerlukan izin dari instansi berwenang di pusat dan daerah. Baru-baru ini, beberapa instansi berwenang di daerah telah memberlakukan peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mensyaratkan kewajiban berbagi penggunaan menara di antara berbagai operator telekomunikasi. Selain itu, pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo telah mengeluarkan Peraturan tentang penggunaan menara bersama telekomunikasi. Lihat Butir 4: Informasi tentang Perusahaan - Peraturan mengenai Industri Telekomunikasi di Indonesia – Kewajiban Menara telekomunikasi bersama . Berdasarkan peraturan tersebut, pendirian menara telekomunikasi memerlukan izin dari Pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah berhak menentukan wilayah penempatan dan lokasi dapat dibangunnya menara telekomunikasi tersebut. Suatu peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo, serta BKPM pada 30 Maret 2009, juga mewajibkan tiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi harus memperoleh ijin mendirikan menara untuk menunjukkan kepatuhan pada beberapa spesifikasi teknis. Apabila suatu menara tidak memperoleh ijin tersebut, maka pihak berwenang di daerah berhak untuk menentukan denda yang diberikan kepada pemilik menara. Selanjutnya, suatu penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi wajib memperbolehkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menaranya (selain menara yang digunakan sebagai jaringan utamanya), tanpa diskriminasi apapun.

Peraturan baru ini mewajibkan kami untuk menyesuaikan rencana pembangunan menara telekomunikasi kami, dan rencana menyewakan, melakukan relokasi menara telekomunikasi yang sudah ada dan memperbolehkan operator lainnya untuk menggunakan menara kami serta melakukan hal-hal lain yang dapat berdampak pada meningkatnya biaya pendirian menara telekomunikasi, keterlambatan dalam konstruksi menara dan gangguan terhadap layanan untuk pelanggan kami. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban ini atau memenuhi target kapasitas jaringan untuk menara telekomunikasi kami, kami mungkin dapat memperoleh hambatan dalam mengembangkan dan menyediakan jasa GSM selular, FWA dan 3G. Ketergantungan kami terhadap menara telekomunikasi, digabungkan dengan beban penggunaan menara telekomunikasi bersama, dapat menyebabkan dampak negatif terhadap daya saing kepada operator lain. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kapasitas jaringan kami, reputasi, bisnis, kegiatan usaha, hasil penyelenggaraan serta prospek Perusahaan.

Kemampuan kami untuk memelihara dan memperluas jaringan selular atau menjalankan usaha kami dapat dipengaruhi oleh gangguan pemasokan dan layanan dari para pemasok utama kami

Perusahaan bergantung pada beberapa pemasok utama untuk menyediakan sebagian besar perangkat yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperluas jaringan selular, termasuk *microwave backbone*, dan pada beberapa pemasok lainnya berkenaan dengan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha kami. Perusahaan mengandalkan perangkat dan barang dan jasa lainnya dari para pemasok tersebut untuk memelihara dan mengganti komponen utama dari jaringan selular dan untuk menjalankan usaha kami. Apabila kami tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mencukupi secara tepat waktu atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, atau apabila terjadi kenaikan harga yang tajam atas barang atau jasa tersebut, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kami untuk dapat memelihara dan memperluas jaringan selular dan hasil keuangan, usaha serta prospek Perusahaan.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Kami bergantung pada ijin-ijin yang kami miliki untuk menyelenggarakan jasa selular, dan ijin-ijin ini dapat dibatalkan apabila kami tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin tersebut

Kami bergantung pada ijin yang dikeluarkan oleh Menkominfo untuk penyelenggaraan jasa selular serta penggunaan alokasi spektrum frekuensi. Menkominfo, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengubah ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atas kebijakannya sendiri. Apabila kami melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin-ijin tersebut atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka ijin-ijin kami dapat dicabut. Apabila terjadi pencabutan atau perubahan yang tidak menguntungkan terhadap ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atau kami tidak dapat memperbaharui ijin-ijin tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang serupa, maka hal ini dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Data pelanggan kami terkait dengan operasi kami tidak dapat dibandingkan antar periode

Kami mendefinisikan "pelanggan selular aktif" sebagai pelanggan selular prabayar yangmelakukan pengisian ulang kartu SIM segera dalam 33-hari masa "tenggang waktu" setelah masa kartu SIM berakhir dengan cara menambah jumlah minimal pulsa ke dalam kartu SIM.

Kami telah dari waktu ke waktu mengurangi masa tenggang waktu yang berlaku untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar untuk lebih mencerminkan pelanggan pra bayar yang mengisi ulang kartu SIM milik mereka secara lebih akurat. Penambahan atau pengurangan masa tenggang berakibat pada perhitungan jumlah pelanggan kami, Minutes per Usage setiap pelanggan dan ARPU.

Sebagai akibat diatas, jumlah pelanggan kami, Minutes per Usage setiap pelanggan dan ARPU tidak akan mencerminkan jumlah aktual dari pelanggan-pelangan dan tidak dapat dibandingkan antar periode. Dengan demikian, anda sebaiknya tidak menggantungkan keakuratan data ini atau membandingkan data ini dari waktu ke waktu.

Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha,kondisi keuangan dan hasil usaha kami

Saat ini kami diwajibkan untuk membayar biaya frekuensi berdasarkan jumlah unit *transmitter* dan *receiver* (atau *transceiver*) pada suatu BTS di jaringan telekomunikasi GSM kami. Biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi GSM kami dibayarkan secara periodik di muka berdasarkan tagihan yang diterima dari Pemerintah. Biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi 3G kami dibayarkan per tahun di muka secara *lump sum*, berdasarkan formula yang ditentukan oleh Pemerintah. Selama kami meningkatkan jumlah BTS kami untuk meningkatkan jumlah pelanggan kami, biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi GSM kami juga akan meningkat, sehingga meningkatkan biaya operasional kami. Hal ini dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Anggapan adanya risiko kesehatan sebagai akibat dari medan elektromagnetik yang ditimbulkan dari BTS dan peralatan telepon genggam, serta gugatan hukum dan publikasi mengenai hal tersebut, tanpa memperhatikan nilainya, dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami

Beberapa spekulasi mengenai risiko terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik dari BTS dan penggunaan telepon genggam telah timbul di masyarakat. Kami tidak dapat menjamin bahwa penelitian di masa mendatang mengenai risiko kesehatan ini tidak akan menyimpulkan adanya hubungan antara medan elektromagnetik dan dampak merugikan terhadap kesehatan sehingga Perusahaan dapat menjadi subyek gugatan dari individu yang menuduh adanya cidera atau hal-hal lainnya, yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha kami.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Layanan Data Tetap ("MIDI")

Persaingan layanan MIDI kami meningkat, dan kami mungkin akan mengalami penurunan marjin dari jasa tersebut seiring dengan meningkatnya persaingan

Layanan MIDI kami menghadapi persaingan yang semakin ketat dari para operator baru dan operator yang telah ada, yang mungkin memiliki basis pelanggan yang lebih banyak dan sumber dana yang lebih besar dari Perusahaan, seperti Telkom, yang memiliki jangkauan internasional yang luas dan infrastruktur dalam negeri yang telah berkembang. Selain itu, para operator seperti XL, First Media dan Icon+, beberapa di antaranya yang mempunyai aliansi dengan operator telekomunikasi asing, bersaing dengan kami di segmen bisnis ini. Pada tahun 2009, layanan jasa World Link kami menghadapi peningkatan persaingan dengan diluncurkannya layanan kabel internasional "Matrix" oleh PT NAP Info Lintas Nusa pada bulan Agustus 2008.

Bisnis satelit kami juga menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring dengan diluncurkannya satelit-satelit baru dan berkemampuan lebih besar dan dengan adanya beberapa perusahaan yang memperoleh ijin eksklusif untuk menyelenggarakan jasa penyiaran di Indonesia. Kami menyewakan satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami untuk jangka waktu antara dua sampai lima tahun, dan kami perkirakan sisa umur produktif satelit tersebut adalah berkisar empat dan 10,7 tahun. Mengingat adanya satelit-satelit lain yang beroperasi dan sewa *transponder* kami yang akan berakhir atau diakhiri dan adanya persaingan harga yang semakin ketat, maka pihak penyewa *transponder* kami kemungkinan akan menggunakan satelit-satelit lain, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasional dan pendapatan usaha kami dari sektor jasa ini.

Satelit kami memiliki umur produktif yang terbatas dan dapat rusak atau benar-benar musnah selama pengoperasiannya. Hilangnya atau menurunnya kinerja satelit kami, baik yang disebabkan kerusakan perangkat atau dicabutnya ijin, dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan, hasil usaha dan kemampuan untuk menyediakan beberapa layanan Perusahaan

Satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami mempunyai umur produktif yang terbatas, saat ini diperkirakan berakhir masing-masing pada tahun 2014 dan 2020. Beberapa faktor mempengaruhi umur produktif satelit, di antaranya kualitas dari konstruksi, daya tahan sistem, subsistem dan komponen, cadangan minyak *on-board*, keakuratan dari peluncuran mereka menuju orbit, risiko *badai mikrometeroit*, atau bencana alam lain di luar angkasa, benturan dengan puing orbital, atau yang digunakan dan cara satelit tersebut dimonitor dan dioperasikan. Saat ini kami menggunakan kapasitas *transponder* satelit kami sehubungan dengan berbagai aspek dari bisnis kami, termasuk sewa langsung untuk kapasitas tersebut dan untuk menyalurkan sambungan jarak jauh internasional dan jasa selular kami. Kami memperhatikan, bahwa berdasarkan faktor-faktor yang diatas, satelit Palapa-C2 kami dapat saja tidak berfungsi sebelum 2014 dan satelit Palapa-D dapat tidak berfungsi sebelum 2020, dan perbaikan di orbit tidak memungkinkan kecuali perbaikan-perbaikan terhadap perangkat lunak dasar –perbaikan peranti lunak atau operasional. Selanjutnya, Peraturan International Telecommunications Union ("ITU") menyatakan bahwa slot satelit yang telah ditentukan sudah dialokasikan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak menentukan pihak mana yang akan diberikan ijin untuk menggunakan slot tersebut. Meskipun kami saat ini memiliki ijin untuk menggunakan slot satelit yang telah ditentukan, apabila satelit Palapa-D kami mengalami masalah teknis atau tidak berfungsi, Pemerintah dapat menyatakan bahwa kami tidak berhasil memanfaatkan slot yang ada berdasarkan ijin yang diberikan kepada kami, dan dengan demikian Pemerintah dapat mencabut ijin kami dan memberikannya kepada salah satu pesaing kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami akan dapat terus mempertahankan penggunaan slot satelit yang telah ditentukan dengan cara yang dianggap baik oleh Pemerintah.

Kami memelihara asuransi *in-orbit* satelit Palapa-C2 dan satelit Palapa-D kami dengan syarat dan ketentuan yang konsisten dengan praktik industri. Terhitung sejak 31 Desember 2009, kami telah memiliki polis asuransi dengan total nilai pertanggungan sebesar US$216.3 juta, untuk jumlah kerugian keseluruhan dan sebagian yang diderita satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami. Apabila kerusakan atau kegagalan tersebut mengakibatkan satelit kami tidak layak lagi untuk digunakan, maka kami mungkin akan memilih untuk menghentikan pengoperasian satelit atau menyewa kapasitas *transponder* dari penyelenggara pihak ketiga daripada membeli satelit baru. Penghentian bisnis satelit kami dapat meningkatkan biaya operasional yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi lainnya dan mungkin dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan dan hasil usaha Perusahaan.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Jasa Telekomunikasi Tetap Kami

Masuknya operator telekomunikasi Indonesia lainnya sebagai penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasi, pangsa pasar dan hasil usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap

Telkom, perusahaan telekomunikasi Indonesia yang telah lama berdiri dengan sumber-sumber keuangan dan politik yang kuat, telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan jasa sambungan jarak jauh internasional dan meluncurkan layanan komersialnya di tahun 2004. Sebagai akibat dari masuknya Telkom ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, kami kehilangan pangsa pasar dan mengalami dampak negatif lainnya yang mempengaruhi usaha jasa telekomunikasi tetap kami. Pada akhir tahun 2006, Telkom telah menguasai pangsa pasar yang jauh lebih besar dari kami untuk sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pada tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan ijin baru untuk penyelenggaraan jasa sambungan jarak jauh internasional kepada Bakrie Telekom dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih besar lagi di pasar jasa sambungan jarak jauh internasional. Pemain lama dan munculnya operator baru ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, termasuk jasa penyelenggaraan VoIP yang dilakukan oleh sejumlah operator, secara berkelanjutan menimbulkan ancaman persaingan yang signifikan kepada Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa dampak negatif tersebut tidak akan terus berlanjut atau bahwa meningkatnya persaingan tidak akan terus mengikis pangsa pasar kami atau memberikan dampak negatif bagi marjin operasi dan hasil usaha kami di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional.

Kami menghadapi risiko berkenaan dengan pembukaan kode akses baru untuk sambungan jarak jauh

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan telepon SLJJ. Pada bulan April 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa penggunaan kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilakukan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada bulan Desember 2007, Pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk membuka kode akses SLJJ di kota pertama di Balikpapan pada bulan April 2008. Sejak tanggal pelaksanaan tersebut, penduduk Balikpapan akan dapat memilih untuk menggunakan kode akses "0", "011" atau "017" untuk melakukan panggilan jarak jauh.

Pada bulan April 2008, Perusahaan dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari masing-masing pelanggan kami di Balikpapan. Penggunaan kode akses SLJJ tersebut di kota-kota lain akan dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRTI. Implementasi akses SLJJ baru dapat secara potensial meningkatkan persaingan dengan menawarkan kepada pelanggan kami lebih banyak pilihan untuk layanan SLJJ. Selain itu, pembukaan kode akses SLJJ baru tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kompetisi dan berkurangnya kerjasama oleh operator saat ini, yang dapat mengakibatkan berkurangnya marjin dan pendapatan operasional, yang seluruhnya dapat menimbulkan dampak material yang negatif kepada kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kode akses kami akan terus ada atau dapat berhasil meningkatkan pendapatan Perusahaan dari sektor SLJJ.

Butir 4: INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Indosat Tbk didirikan pada tanggal 10 November 1967 oleh Pemerintah, sebagai perusahaan penanaman modal asing untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1969 untuk membangun, mentransfer dan mengoperasikan stasiun bumi International Telecommunications Satellite Organization atau Intelsat, di Indonesia untuk mengakses satelit-satelit di wilayah Samudera Hindia milik Intelsat untuk jangka waktu selama 20 tahun. Pada tahun 2001, sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah untuk merestrukturisasi industri telekomunikasi, kami mengadakan suatu perjanjian dengan Telkom yang bertujuan untuk menghapus kepemilikan silang kami masing-masing di beberapa anak-anak perusahaan, yaitu:

- pembelian 22,5% kepemilikan saham Telkom di Satelindo oleh Perusahaan (pada saat tersebut merupakan operator selular terbesar kedua di Indonesia);
- pembelian 35,0% kepemilikan saham kami di Telkomsel oleh Telkom; dan
- pembelian 37,2% kepemilikan saham Telkom di Lintasarta oleh Perusahaan dan pembelian obligasi konversi Lintasarta yang dipegang oleh Telkom.

Setelah diadakan perjanjian dengan Telkom, kami menyelesaikan proses akuisisi sisa saham minoritas di Satelindo pada bulan Juni 2002. Sejak memasuki pasar selular Indonesia melalui pembelian Satelindo dan pendirian IM3 dan integrasi lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2003, layanan selular telah menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan usaha kami.

Pada bulan Agustus 2002, kami memasuki sektor jasa telekomunikasi tetap domestik setelah memperoleh ijin penyelenggaraan jasa jaringan tetap lokal di wilayah Jakarta dan Surabaya.

Pada tahun 2002, Pemerintah melakukan divestasi secara dua tahap atas 517,5 juta sahamnya, yaitu sekitar 50,0% dari saham Seri B Perusahaan pada saat itu. Pada bulan Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan di Perusahaan melalui tender global yang dipercepat. Pada bulan Desember 2002, Pemerintah menjual 41,9% dari saham Seri B di Perusahaan kepada (bekas) anak perusahaan dari STT Communication Ltd, atau STT.

Pada bulan Juni 2008, Qtel melakukan akuisisi atas saham kami di STT, dan menimbulkan kewajiban penawaran tender oleh Qtel untuk membeli sampai dengan 1.314.466.775 saham Seri B, yang merupakan 24,19% saham Seri B kami yang telah ditempatkan dan disetor, dengan harga pembelian dalam mata uang Dolar AS yang setara dengan Rp369.400 per ADS dan Rp7.388 per saham Seri B. Qtel adalah sebuah perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara Qatar dan entitas terkaitnya. Qtel beroperasi berdasarkan hukum negara Qtar dengan saham yang terdaftar pada *Doha Securities Market*, serta *Abu Dhabi Securities Market*, dan *Global Depository Receipts* dan diperdagangkan di *London Stock Exchange*. Qtel adalah penyelenggara telekomunikasi eksklusif Qatar dan salah satu perusahaan publik terbesar di negara tersebut dan menyediakan banyak pilihan produk telekomunikasi, termasuk, di antara lain, layanan mobile GSM nasional dan internasional, Internet dan televisi kabel.

Per Desember 2009, Pemerintah memiliki 14,29% dari saham disetor kami, termasuk 1 saham Seri A, dan Qtel Asia memiliki kurang lebih 65,0% saham Seri B ditempatkan kami. Qtel Asia dimiliki oleh Qtel. Sisa 20,71% dari saham Seri B ditempatkan kami dimiliki oleh pemegang saham publik per tanggal 31 Desember 2009. Lihat "Butir 6: Direktur, Manajemen Senior Dan Karyawan—Kepemilikan Saham."

Untuk penjelasan mengenai pengeluaran barang modal pokok kami sejak 1 Januari 2007 dan pengeluaran barang modal pokok kami yang sedang dijalankan saat ini, termasuk jumlah yang diinvestasikan dan metode pembiayaan, lihat "Butir 5: Tinjauan Usaha dan Keuangan serta Prospek-Likuiditas dan Sumber Pendanaan-Pengeluaran barang modal."

Kantor kami berlokasi di Gedung Indosat, jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Republik Indonesia dan nomor telepon kami adalah +62 (21) 3869615. *Website* perusahaan kami dapat diakses melalui URL **http://www.indosat.com.** Informasi yang ada dalam *website* kami bukan merupakan bagian dari laporan tahunan ini dan tidak dijadikan sebagai referensi dalam laporan tahunan ini. *Service Agent* kami di Amerika Serikat sehubungan dengan ADS adalah Bank of New York Mellon, Divisi Depository Receipt, 101 Barclay Street, New York, New York 10286, U.S.A.

Tinjauan Usaha

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan kami menawarkan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Kami adalah operator selular terbesar kedua, berdasarkan jumlah pelanggan selular, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Kami juga menyediakan layanan MIDI kepada para pelanggan korporat dan retail Indonesia dan regional. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, total pendapatan usaha kami masing-masing adalah sebesar Rp18.948,4 miliar dan Rp18.629,5 miliar (US$1.981,9 juta).

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Produk dan jasa utama kami meliputi:

- *Jasa selular*. Kami menyediakan jasa selular GSM 900 dan 1800 dan 3G kepada sekitar 33,1 juta pelanggan selular (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) di seluruh Indonesia, per tanggal 31 Desember 2009. Kami juga menyediakan layanan *broadband* nirkabel menggunakan platform 3G kami pada tahun 2006 dan pada tanggal 31 Desember 2009, telah memiliki kurang lebih 721.127 pelanggan.
- *Layanan MIDI*. Kami menyediakan layanan MIDI *broadband* dan *narrowband*, termasuk layanan VSAT, sirkuit sewa, layanan *frame relay,* dan layanan Internet secara langsung dan melalui anak perusahaan kami, Lintasarta dan IM2. Kami menawarkan paket produk dan layanan ini khususnya kepada pelanggan korporasi dan ritel dan *wholesaler* kami sebagai usaha untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi yang lengkap.
- *Jasa telekomunikasi tetap (telepon tetap).* Kami adalah salah satu penyelenggara jasa sambungan langsung jarak jauh internasional terkemuka di Indonesia, berdasarkan jumlah menit sambungan masuk dan keluar untuk tahun 2009. Untuk mendukung jasa selular kami dan meningkatkan akses kami ke pelanggan jasa sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional, kami juga meluncurkan jasa telepon tetap nirkabel menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Kami juga menyediakan jasa SLJJ sejak tahun 2003 dan jasa teleponi tetap lokal sejak 2002.

Bisnis kami tidak mengalami perubahan *trend* permintaan yang signifikan.

Pemegang saham utama kami adalah Qtel Asia, dengan kepemilikan saham sekitar 65,0% dari saham biasa kami, dan Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham sebesar 14,29% dari saham biasa kami, termasuk satu saham Seri A, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009. Qtel Asia adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Qtel.

	Per dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2007[7]	2008	2009
		(tidak diaudit)	
Data operasional usaha:			
Selular:[1]			
Jumlah pelanggan selular (tidak termasuk *broadband* nirkabel):			
Prabayar	23.945.431	35.591.033	31.333.173
Pasca bayar	569.801	661.213	1.082.215
Total pelanggan selular	24.515.232	36.252.246	32.415.388
Jumlah pelanggan *broadband* nirkabel:[2]			
Prabayar	–	116.341	610.446
Pasca bayar	30.190	141.659	110.681
Total pelanggan *broadband* nirkabel	30.190	258.000	721.127
Total pelanggan selular:	24.545.422	36.510.246	33.136.515
ARPU (Rp)[3]	–	38.639	37.330
Menit pemakaian[4]	70	98	102
ARPM (Rp)[5]	–	287	220
Jumlah *base station site*[6]	10.124	13.662	16.353
Jumlah *base station controllers*[6]	226	265	315
Jumlah pusat *mobile switching*[6]	56	73	95
MIDI:			
International High Speed Leased Circuit ('000's)	19	46	80
Domestic High Speed Leased Circuit ('000's)	51	129	171
Telekomunikasi tetap:			
Panggilan masuk (dalam juta menit)	1.237	1.484	1.486
Panggilan keluar (dalam juta menit)	297	474	502
Rasio panggilan masuk/keluar	4,2	3,1	3,0

(1) Dikarenakan perubahan dalam metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar kami, jumlah pelanggan selular, menit pemakaian untuk setiap pelanggar selular dan ARPU yang dijelaskan dalam laporan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat "Butir 3: Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."
(2) Jumlah pelanggan *wireless broadband* hanya memasukkan mereka yang berlangganan layanan *wireless broadband* kami dan tidak termasuk mereka yang menggunakan layanan "*broadband on demand*."
(3) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan selular, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan selular prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular kami, ARPU kami yang tercantum dalam lamporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."
(4) Menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan selular prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan dalam metode untuk menghitung jumlah pelanggan prabayar kami, maka jumlah menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular yang tertera dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara beberapa periode. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."
(5) ARPM (dalam Rupiah) dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit pemakaian untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.
(6) Sebelum triwulan pertama 2010, *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* yang baru dibangun atau baru dibeli tetapi belum dioperasikan dimasukkan dalam jumlah *base station sites*, *base station controllers* atau *mobile switching centers* yang dilaporkan oleh Perusahaan ("perhitungan lama"). Pada awal triwulan pertama 2010, seperti yang diungkapkan disini Perusahaan memasukkan *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya pada saat *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* tersebut dioperasikan. Berdasarkan perhitungan lama, Perusahaan akan melaporkan bahwa Perusahaan memiliki 10.760, 14.162 dan 16.804 *base station sites*, 226, 279 dan 315 *base station controllers* dan 56, 73 dan 96 *mobile switching centers* masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009.
(7) Sehubungan dengan pengecualian transisi yang diberikan oleh U.S. SEC terkait dengan penerapan pertama IFRS, kami telah mengecualikan data pendapatan usaha untuk tahun 2007. Lihat "Butir 3: Informasi Penting – Beberapa Data Keuangan dan Data Lainnya" diatas.

Tabel di bawah ini menyajikan detail mengenai pendapatan usaha untuk tiap periode yang ditunjukkan dan persentase kontribusi dari tiap layanan kami terhadap pendapatan usaha:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember[1],			
	2008		2009	
	Rp	%	Rp	%
	(dalam miliar Rp, kecuali persentase)			
Jasa selular	14.185,4	74,9	13.959,7	74,9
Telekomunikasi tetap	2.029,6	10,7	1.957,2	10,5
MIDI	2.733,4	14,4	2.712,6	14,6
Total pendapatan usaha	18.948,4	100,0	18.629,5	100,0

(1) Menurut pembebasan transisi yang diberikan oleh U.S. SEC sehubungan dengan adopsi IFRS yang pertama kali, kami tidak mencantumkan data tahun 2007. Lihat "Butir 3: Informasi Penting – Beberapa Data Keuangan dan Data Lainnya" di atas.

Jasa selular

Jasa selular telah membukukan pendapatan sebesar Rp13.959,7 miliar (US$1,485.1 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang merupakan 74,9% dari total pendapatan usaha konsolidasi Perusahaan di tahun 2009. Perusahaan adalah penyelenggara jasa selular terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular, yaitu 33,1 juta pelanggan (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) per tanggal 31 Desember 2009. Untuk tahun 2009, kami menguasai sekitar 22,7% dari pangsa pasar, berdasarkan estimasi dengan menggunakan data pasar yang tersedia. Jaringan selular kami saat ini menyediakan cakupan jaringan di semua kota besar dan pusat kependudukan di seluruh Indonesia. Kami menyediakan jasa selular dengan teknologi GSM 900 dan GSM 1800 dan, untuk platform 3G kami, teknologi IMT-2000. Kami juga merupakan salah satu penyelenggara terdepan dalam layanan *broadband* nirkabel prabayar dan pasca bayar di Indonesia. Per 31 Desember 2009, kami memiliki kurang lebih 721.127 pelanggan *broadband* nirkabel prabayar dan pasca bayar.

Layanan-layanan

Layanan selular utama kami merupakan jasa penyediaan transfer suara dan data, yang kami jual melalui program pra-bayar dan pasca bayar. Pelanggan prabayar dan pasca bayar kami dapat menerima dan melakukan panggilan suara "on-net" ke dan dari pelanggan Indosat lainnya (termasuk pelanggan Matrix, Mentari dan IM3 kami) pada jaringan telekomunikasi kami, serta panggilan suara "off-net" ke dan dari pelanggan dari operator telekomunikasi lain pada jaringan telekomunikasi selular dan tetap mereka.

Kami menawarkan program pra-bayar dengan merek "Mentari" dan "IM3". Kedua produk memiliki tingkat pengakuan merek yang tinggi, sehingga memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar yang bersaing. Kami membedakan dua merek pra-bayar kami berdasarkan segmen pasar. Pemisahan tersebut membuat kami dapat menetapkan target pemakaian dan pola pengeluaran dari segmen-segmen pelanggan yang berbeda melalui rencana promosi kami. Merek Mentari dipasarkan untuk pasar yang lebih dewasa, dimana tarif telepon dipromosikan dengan harga yang bersaing. Merek IM3 dipasarkan untuk generasi muda. dengan paket-paket suara, SMS dan data yang sangat menarik. Kami terus mengembangkan merek "Mentari" dan "IM3", menawarkan promosi dan membuat iklan yang disesuaikan untuk segmen pasar khusus tersebut. Frontier Consulting Group dan Marketing Magazine menganugerahi kami dengan "Top Brand Award" pada tahun 2008, 2009 dan 2010 kepada merek Mentari dan IM3 untuk pencapaian dalam membangun kesadaran merek dan pangsa pasar.

Kami menawarkan program pasca bayar, didesain untuk pengguna *high-end*, di bawah merek "Matrix." Matrix adalah paket layanan dasar dengan program pembayaran pasca bayar yang mencakup roaming nasional gratis. Kami menawarkan berbagai paket "Matrix" dengan fitur-fitur berbeda dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Merek Matrix kami menerima "Top Brand Award" pada tahun 2010 dari Frontier Consulting Group dan Marketing Magazine.

Para pelanggan pasca bayar dan pra-bayar memiliki akses ke sambungan telepon lokal, SLJJ dan sambungan langsung jarak jauh internasional. Selain itu, kami menawarkan berbagai layanan, fungsi dan fitur dan nilai tambah untuk para pelanggan kami. Layanan-layanan, fungsi, dan fitur tersebut, yang, pada kasus-kasus tertentu, gratis, dapat dibeli secara terpisah, atau dikemas sesuai dengan paket yang dipilih, yang mencakup:

- *SMS:* para pelanggan dapat mengirimkan teks pesan pendek ke layar selular milik pengguna lainnya;
- *MMS:* para pelanggan jasa GSM dapat mengirimkan gambar, teks dan suara dalam satu paket pesan;
- *Voice SMS:* para pelanggan dapat mengirim pesan suara;
- *Ring-back tone:* para pelanggan dapat memilih lagu favorit mereka sebagai nada panggil yang dapat didengar oleh penelpon untuk telepon yang masuk;
- *GPRS:* menyediakan komunikasi mobile data dengan teknologi berbasis GSM, yaitu mobile Internet, data transfer dan push e-mail (layanan Blackberry™);
- *Layanan mobile data dan faksimili:* para pelanggan dapat mengunduh *content* olah raga, berita, horoskop, film, musik dan keuangan ke telepon genggam mereka dan mengirim serta menerima faks;
- *Voicemail:* penelepon dapat merekam pesan suara mereka yang kemudian akan didengar oleh pelanggan;
- *Caller identification:* menampilkan nomor telepon yang masuk pada layar telepon genggam pelanggan;
- *Call holding:* para pelanggan dapat menahan telepon masuk atau keluar ketika sedang melakukan sambungan atau menerima telepon lainnya;
- *Call waiting:* sinyal bagi pelanggan bahwa ada telepon masuk ketika telepon sedang digunakan. Setelah mendengar sinyal tersebut, pelanggan dapat menerima telepon kedua yang masuk sambil tetap menahan telepon pertama yang masuk;
- *Call forwarding:* para pelanggan dapat mengalihkan telepon yang masuk ke nomor selular atau telepon tetap;
- *Tagihan terperinci:* memberikan tagihan yang terperinci kepada pelanggan yang menunjukkan durasi dan biaya telepon yang dilakukan ke dan dari telepon selular tertentu;
- *Pembayaran debit langsung:* memberikan opsi pembayaran yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank atau kartu kredit pelanggan;
- *Isi ulang via SMS dan automatic teller machines:* pelanggan dapat mengisi ulang program pra-bayar mereka via SMS dan *automatic teller machines* yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank milik pelanggan; dan

- *International roaming:* baik pelanggan pra-bayar maupun pasca bayar dapat menerima layanan SMS dan telepon ketika *roaming* di jaringan selular luar negeri.

Layanan faksimili, tagihan terperinci dan pembayaran debit-langsung hanya tersedia untuk para pelanggan pasca bayar. Sejak tahun 2009, pelanggan pasca bayar telah mampu meminta pengiriman tagihan atau pernyataan tagihan tercetak melalui e-mail, yang meminimalisir kemungkinan tagihan tidak diterima dan memaksimalkan kenyamanan pelanggan. Kami menawarkan sejumlah layanan gratis, seperti *caller identification*, *call holding*, *call waiting* dan *call forwarding*; sementara layanan lainnya, seperti SMS, *mobile data* dan faksimili dan tagihan terperinci dikenakan biaya tambahan. Kami menyediakan layanan SMS kepada pelanggan selular pra-bayar dan pasca bayar. Tingkat pemakaian telah meningkat dari rata-rata kurang lebih 90,4 juta pesan teks (tidak termasuk layanan SMS tambahan, misalnya SMS terkait promosi oleh *content providers* dan *advertisers*) per hari di bulan Desember 2008 hingga rata-rata perhari kurang lebih masing-masing 326,3 juta dan 450,2 juta pesan teks (tidak termasuk SMS bernilai tambah) pada bulan Desember 2009 dan Maret 2010. Kami mengharapkan SMS untuk terus berkontribusi pada bagian substansial dari pendapatan yang berasal dan layanan dan fitur selular yang bernilai tambah, namun mengantisipasi peningkatan pendapatan dari GPRS, BlackBerry™ dan layanan data mobile lainnya di masa yang akan datang.

Kami telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi Indonesia lainnya agar jaringan selular kami dapat melakukan interkoneksi dengan PSTN yang dioperasikan oleh Telkom, *gateway* internasional kami dan jaringan pada masing-masing operator nirkabel selular dan tetap Indonesia, dan oleh karenanya pelanggan selular kami dapat berkomunikasi dengan pelanggan dari penyelenggara layanan telekomunikasi lainnya.

Kami menawarkan layanan *roaming* internasional kepada pelanggan selular kami sehingga mereka dapat melakukan dan menerima panggilan dan mengirim serta menerima pesan SMS ketika berada di luar Indonesia. Kami telah mengadakan perjanjian *roaming* dengan operator jaringan selular GSM di Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan dan Asia. Per tanggal 31 Desember 2009, pelanggan selular pasca bayar kami dapat melakukan *roaming* internasional pada 350 jaringan, yang dimiliki oleh 264 operator di 129 negara, dan pelanggan selular prabayar kami dapat melakukan *roaming* internasional pada 13 jaringan di sembilan negara.

Pada tanggal 12 Desember 2006, kami menjadi anggota perkumpulan operator telekomunikasi internasional terbesar di Asia, CONEXUS yang didirikan untuk meningkatkan nilai saing dari setiap anggotanya dalam memberikan layanan telekomunikasi internasional di negara mereka masing-masing dan di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Untuk mendukung layanan *roaming* saat ini melalui GSM, GPRS dan *wideband code division multiple access* atau WCDMA, para anggota aliansi bekerja sama dalam menyediakan *roaming* dengan teknologi HSDPA. Aliansi ini telah memperluas cakupan layanannya kepada lebih dari 150 juta pelanggan di sembilan negara, termasuk Indonesia. Untuk anggota CONEXUS, kami menawarkan *flat rate* sebesar US$18 per hari untuk penggunaan data yang tidak terbatas.

Jasa Mobile Data

Kami meluncurkan portofolio layanan *mobile data* kami pada tahun 2000. Layanan *mobile data* dapat diakses melalui, antara lain, SMS, sambungan langsung *dial-up* ke WAP *server* atau *broadband* nirkabel, di mana pelanggan dapat mengakses berbagai informasi, termasuk daftar film, *stock quote*, nilai tukar valuta asing, berita olahraga dan bisnis dan ramalan bintang, serta mengisi ulang kartu SMS prabayar mereka. Selain itu, pelanggan dapat mengirim dan menerima email dan menikmati layanan *mobile banking* dengan beberapa bank-bank terkemuka melalui telepon genggam mereka.

Kami menyajikan layanan GPRS dengan teknologi EDGE di sebagian besar kota-kota besar di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kami adalah penyelenggara telekomunikasi pertama yang meluncurkan layanan BlackBerry™ di Indonesia. Bekerjasama dengan StarHum dan Research-In-Motion ("RIM"), kami memperkenalkan layanan BlackBerry™ Enterprise untuk pelanggan perusahaan kami pada bulan Desember 2004 dan layanan BlackBerry™ untuk pelanggan pribadi pada bulan Maret 2005. Pada bulan Juni 2008, untuk membedakan Perusahaan dari operator layanan BlackBerry™ lainnya, kami meluncurkan aplikasi I-GPS dan I-Stock

yang membuat pelanggan BlackBerry™ dapat melakukan akses ke sistem navigasi dan harga saham *real-time*. Pada bulan Januari 2009, kami meningkatkan kapasitas sambungan ke RIM dari 10 Mbps menjadi 20 Mbps, sehingga memberikan akses yang lebih cepat bagi pelanggan BlackBerry™ kami. Dengan peningkatan ini berarti kami memiliki kapasitas sambungan ke RIM yang terbesar di Indonesia. Kami memiliki kurang lebih 200.000 pelanggan BlackBerry™ per tanggal 31 Desember 2009. Indonesia adalah pasar dengan pertumbuhan terbesar kedua di dunia untuk BlackBerry™.

Pada tanggal 8 Februari 2006, Pemerintah mengadakan tender terbuka untuk ijin spektrum 3G dan, setelah berakhirnya proses tender, kami memperoleh satu ijin spektrum 3G untuk frekuensi 5 MHz dari spektrum yang ditenderkan. Pada penawaran yang sama, Telkomsel dan XL diberikan izin spektrum 3G. Pada tahun 2007, kami mulai menawarkan layanan *broadband* 3G yang ditingkatkan ("3.5G") menggunakan teknologi HSDPA, sebuah layanan telekomunikasi bergerak nirkabel dengan teknologi 3G yang lebih maju. Pada bulan Agustus 2009, kami memperoleh spektrum tambahan berdasarkan izin yang telah kami miliki, sehingga kami dapat menggandakan kapasitas jaringan kami untuk melayani pelanggan *broadband* kami. Pada tahun 2009, kami mulai nmenyebarkan jaringan 3.5G yang baru dengan menggunakan teknologi HSPA+, dengan kecepatan *downlink* hingga 42Mbps dan kecepatan *uplink* hingga 5,6Mbps, dan kami mulai memberikan layanan tersebut pada tahun 2010.

Pada tahun 2007, kami mulai menawarkan layanan 3.5G *broadband*, suatu layanan telekomunikasi bergerak nirkabel dengan tekhnologi 3.5G. Pada bulan Agustus 2009, kami memperoleh spektrum tambahan untuk *carrier* 3.5G, yang kami yakini dapat memungkinkan kami untuk menggandakan kapasitas jaringan kami untuk melayani pelanggan *broadband* kami. Kami telah mulai menggelar jaringan HSPA+ 3.5G yang baru, dengan kecepatan *downlink* hingga 42Mbps dan kecepatan *uplink* hingga 5,6Mbs. Kami telah mengatur kembali portfolio *broadband* kami untuk lebih memfokuskan diri kepada segmen sasaran. Sejak bulan September 2009, layanan *pure data/broadband* Internet, yang dipergunakan pada komputer pribadi (data saja/layar besar), telah dikelola dan dijual oleh IM2. Layanan *broadband* nirkabel untuk telepon genggam (untuk penggunaan layar kecil) disediakan melalui Matrix, Mentari dan IM3. Pada bulan Desember 2009, kami berhasil meluncurkan program "*Broadband-On-Request*" kami yang diaktivasi oleh pelanggan sendiri, untuk pemakai Mentari dan IM3, dengan pilihan paket harian, mingguan dan bulanan, dengan kuota yang dialokasikan untuk periode berlangganan masing-masing. Kami berharap untuk mulai menawarkan layanan "*Broadband-On-Request*" kepada pelanggan pasca bayar suatu saat pada tahun 2010.

Para Pelanggan dan Pemasaran

Kami membagi penduduk Indonesia berdasarkan lokasi, pendapatan dan faktor lainnya yang kami percaya menunjukkan keinginan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk membeli produk dan layanan kami. Kemudian kami menargetkan wilayah yang umumnya lebih makmur karena daerah ini cenderung menghasilkan kepadatan yang lebih tinggi untuk pelanggan selular yang potensial. Melalui pendekatan ini, kami berhasil mendapatkan pelanggan selular tersebar di seluruh pusat-pusat populasi besar di Indonesia. Kami menerapkan strategi ini untuk beradaptasi dalam rangka kompetisi dengan pendatang baru dan tekanan harga di kota-kota besar.

Jumlah pelanggan prabayar kami telah tumbuh secara signifikan pada tiga tahun terakhir relatif dengan jumlah pelanggan pasca bayar. Per tanggal 31 Desember 2007, kami memiliki 569.801 pelanggan selular pasca bayar dan 23.945.431 pelanggan selular prabayar. Per tanggal 31 Desember 2008, kami memiliki 919.213 pelanggan selular pasca bayar dan 35.591.033 pelanggan selular prabayar. Per 31 Desember 2009 pelanggan kami berkembang menjadi 1.803.342 pelanggan selular pasca bayar dan 31.333.173 pelanggan selular prabayar. Kami melakukan aktivitas pemasaran dan promosi secara nasional untuk mempertahankan pelanggan selular kami yang telah ada dan untuk mendapatkan pelanggan selular baru. Kami percaya bahwa pelanggan selular Indonesia cenderung mendukung kenyamanan, kemudahan aktivasi, menghindari komitmen tetap dan mengurangi pemeriksaan kredit terkait dengan program selular prabayar. Dengan demikian, basis fokus kami yaitu pada pelanggan tertentu dalam upaya pemasaran.

Tabel di bawah ini menunjukan informasi tentang basis pelanggan selular kami, ARPU, penggunaan menit, dan ARPM per tanggal yang dinyatakan di bawah ini:

	Per tahun atau untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2007[7]	2008	2009
Jumlah pelanggan selular (tidak termasuk *wireless broadband*)[1][2]:			
Prabayar	23.945.431	35.591.033	31.333.173
Pascabayar	569.801	661.213	1.082.215
Jumlah pelanggan selular	24.515.232	36.252.246	32.415.388
Jumlah pelanggan *broadband* nirkabel[3]:			
Prabayar	–	116.341	610.446
Pascabayar	30.190	141.659	110.681
Jumlah pelanggan *broadband* nirkabel	30.190	258.000	721.127
Jumlah pelanggan selular:	24.545.422	36.510.246	33.136.515
ARPU (Rp)[4]	–	38.639	37.330
Penggunaan Menit[5]	70	98	102
Pendapatan rata-rata per Menit (Rp)[6]	–	287	220

(1) Dikarenakan perubahan dalam metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar kami, jumlah pelanggan selular, menit pemakaian untuk setiap pelanggar selular dan ARPU yang dijelaskan dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(2) Jumlah pelanggan *wireless broadband* hanya memasukkan mereka yang berlangganan layanan *wireless broadband* kami dan tidak termasuk mereka yang menggunakan layanan "*broadband on demand*."

(3) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan selular, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan selular prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular kami, ARPU kami yang tercantum dalam lamporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(4) Menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan selular prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan dalam metode untuk menghitung jumlah pelanggan prabayar kami, maka jumlah menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular yang tertera dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara beberapa periode. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(5) ARPM (dalam Rupiah) dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit pemakaian untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.

(6) Sebelum triwulan pertama 2010, *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* yang baru dibangun atau baru dibeli tetapi belum dioperasikan dimasukkan dalam jumlah *base station sites*, *base station controllers* atau *mobile switching centers* yang dilaporkan oleh Perusahaan ("perhitungan lama"). Pada awal triwulan pertama 2010, seperti yang diungkapkan disini Perusahaan memasukkan *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya pada saat *base station sites, base station controllers* atau *mobile switching centers* tersebut dioperasikan. Berdasarkan perhitungan lama, Perusahaan akan melaporkan bahwa Perusahaan memiliki 10.760, 14.162 dan 16.804 *base station sites*, 226, 279 dan 315 *base station controllers* dan 56, 73 dan 96 *mobile switching centers* masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009.

(7) Sehubungan dengan pengecualian transisi yang diberikan oleh U.S. SEC terkait dengan penerapan pertama IFRS, kami telah mengecualikan data pendapatan usaha untuk tahun 2007. Lihat "Butir 3: Informasi Penting – Data Keuangan tertentu dan data lainnya" diatas.

Per tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki kurang lebih 33.136.515 pelanggan, termasuk kurang lebih 721.127 pelanggan bagi layanan *broadband* nirkabel kami.

Untuk mengkonsolidasi saluran pemasaran kami untuk layanan selular, kami telah membuka pusat *walk-in* terintegrasi, dengan nama "Galeri Indosat," yang kami operasikan, dan "Griya Indosat," yang dioperasikan oleh distributor eksklusif kami. Pusat *walk-in* ini berfungsi sebagai oultet penjualan dan menyajikan layanan pelanggan dan informasi produk kepada pelanggan selular lama dan potensial. Kami juga mempunyai tim karyawan yang berdedikasi untuk mengkoordinasi penjualan dan layanan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Untuk melengkapi jalur pemasaran langsung kami, kami mempertahankan jaringan sebanyak kira-kira 52 dealer independen, kepada siapa kami menawarkan berbagai insentif untuk promosi dan penjualan layanan-layanan kami. Dealer independen regional dan multi regional ini memiliki jalur distribusi di seluruh Indonesia dan promosi layanan selular kami, terutama untuk individu. Dealer ini termasuk distributor besar perangkat mobile headset dan umumnya memiliki jaringan retail sendiri, penjualan langsung dan sub dealer di Indonesia. Outlet ini tersedia sebagai tambahan outlet untuk kami dan menawarkan jangkauan luas untuk layanan, termasuk produk dan informasi

layanan, layanan pelanggan dan proses pembayaran tagihan. Pelanggan lama dan baru dapat mengaktivasi dan mendaftar serta membayar untuk seluruh layanan selular prabayar pada outlet tersebut. Kami tetap menjaga hubungan kami dengan dealer kami untuk meningkatkan volume penjualan melalui penempatan produk yang lebih baik, menjadi satu kesatuan jaringan dealer dan loyalitas dealer.

Struktur Tarif dan Pendapatan Usaha Jasa Selular

Menkominfo menetapkan formula harga yang menentukan jumlah yang dapat ditagihkan oleh operator untuk layanan selular prabayar dan pascabayar namun demikian juga memperbolehkan penyedia layanan selular untuk menawarkan program promosi yang menawarkan harga lebih rendah dari tarif tertinggi. Saat ini kami menentukan harga layanan selular dengan variasi program promosi dimana kami menawarkan berbagai macam insentif untuk menarik pelanggan baru, mendorong permintaan dan meningkatkan posisi kompetisi kami. Kami dapat membebankan tarif yang berbeda untuk layanan selular prabayar dan pascabayar tergantung pada berbagai faktor yang berlaku untuk tipe tertentu. Misalnya biaya penagihan kami kenakan untuk melayani pelanggan pasca bayar yang lebih tinggi dan sesuai dengan itu, tarif kami untuk layanan selular pascabayar cenderung lebih tinggi dibanding layanan selular prabayar.

Pasar telekomunikasi selular Indonesia menggunakan sistem pihak yang menelpon yang membayar dimana mensyaratkan pihak yang menelpon untuk membayar biaya telepon. Jika pelanggan kami melakukan panggilan pada jaringan yang berbeda, kami membebankan biaya interkoneksi. SMS menggunakan basis "*sender keeps all*", yang berarti kami memperoleh pendapatan ketika pelanggan selular kami mengirimkan SMS, tetapi tidak pada saat pelanggan operator telekomunikasi lainnya mengirimkan SMS kepada pelanggan selular kami. Untuk layanan GPRS, kami membebankan pelanggan selular Rp1 per kilobyte untuk data yang di-*download*. Kami menerima *roaming* dari operator telekomunikasi asing ketika pelanggan selular mereka berada pada jaringan kami. Untuk layanan *broadband* nirkabel, kami menawarkan berbagai paket harga tergantung cara pembayaran (prabayar atau pascabayar), kecepatan transmisi dan kuota *download* bulanan.

Biaya aktivasi dan biaya bulanan. Biaya aktivasi menunjukkan biaya koneksi awal yang dibebankan pada pelanggan prabayar baru ketika mulai berlangganan jaringan selular. Biaya bulanan menunjukkan jumlah tetap yang dibebankan hanya untuk pelanggan pasca bayar, terutama Layanan Korporasi Blackberry yang mensyaratkan perangkat lunak Blackberry. Sejak 1998 kami tidak pernah membebankan pelanggan pasca bayar kami biaya aktivasi dan kami mulai membebankan biaya aktivasi untuk pelanggan pra bayar kami. Kami menawarkan beberapa program untuk pelanggan pasca bayar termasuk minimal penggunaan bulanan sebesar Rp 25.000, paket yang dinamakan "*Matrix Strong*" sebesar Rp 50.000 dan program promosi lainnya.

*Biaya penggunaan. T*erdapat 3 tipe panggilan: lokal, domestik jarak jauh dan panggilan internasional. Panggilan dibebankan untuk basis per detik. Panggilan dapat diterminasi pada selular, jaringan tetap atau jaringan satelit. Untuk panggilan *on-net,* pelanggan kami dibebankan tarif yang menguntungkan karena kemampuan kami untuk menawarkan berbagai produk seperti selular dan layanan panggilan internasional jarak jauh. Untuk panggilan *off-net,* biaya penggunaan oleh pelanggan lebih menguntungkan karena interkoneksi, panggilan domestik jarak jauh dan panggilan internasional jarak jauh.

Layanan Nilai tambah. Sebelum tahun 2008, tarif untuk layanan nilai tambah tidak diatur oleh pemerintah. Sejak April 2008, Menkominfo bertanggung jawab untuk mengatur formula layanan nilai tambah termasuk SMS. Sebagaimana layanan suara, kami menawarkan diskon promosi untuk SMS dan layanan *mobile* data untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.

Interkoneksi

Biaya penggunaan interkoneksi dibebankan untuk layanan selular prabayar dan pascabayar seperti yang dihitung dengan mempertimbangkan 3 biaya interkoneksi: asal, transit dan biaya terminasi.

Sejak Januari 2007, Menkominfo telah mengatur formula tarif untuk layanan interkoneksi. Menkominfo mengatur formula tarif berdasarkan basis biaya, berdasarkan DPI yang disampaikan oleh penyedia layanan yang dominan di Indonesia, termasuk kami. Menkominfo menyetujui DPI yang kami sampaikan pada tahun 2007 dan 2008 yang

masih belum disesuaikan untuk tahun 2009 dan 2010. Kami mencantumkan biaya dalam DPI kami untuk perjanjian interkoneksi yang kami miliki dengan operator lain. Biaya berdasarkan DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan kami memperkirakan kelanjutan penurunan ini.

Kami saat ini berinterkoneksi dengan jaringan telepon tetap dan selular yang dioperasikan oleh semua operator jaringan di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Untuk meminimalisasi biaya interkoneksi kami, kami menggunakan fasilitas transmisi *backbone* kami sendiri bilamana dimungkinkan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Misalnya, untuk *routing* sambungan langsung jarak jauh dari seorang pelanggan di Surabaya ke pelanggan yang dituju di Jakarta dilakukan melalui saluran transmisi serat optik atau *microwave* milik kami sendiri sehingga kami dapat menghindari penggunaan jaringan milik operator lainnya dan dengan demikian mengurangi biaya interkoneksi yang terkait dengan *routing* intra-jaringan kami.

Aktivasi, Tagihan dan Perolehan Pembayaran

Pelanggan selular prabayar dapat membeli paket baru dari penjualan kami dan poin distribusi atau melalui berbagai dealer independen kami. Untuk aktivasi layanan, pelanggan selular prabayar baru harus mendaftar pada kami dan mengikuti instruksi yang dikirimkan pada pelanggan melalui SMS. Pelanggan pascabayar potensial dapat mendaftar untuk layanan selular kami pada tempat penjualan dan distribusi atau melalui dealer independen kami. Banyak dari dealer independen kami yang hanya dapat memperoleh aplikasi baru untuk layanan pelanggan pascabayar yang mana akan diteruskan kepada kami untuk diproses. Pelanggan potensial untuk layanan pascabayar kami disyaratkan untuk memberikan bukti bahwa pelanggan tersebut memenuhi persyaratan minimum kredit. Jika pelanggan potensial tidak dapat memenuhi persyaratan pascabayar kami, perwakilan tempat penjualan kami akan merekomendasikan layanan prabayar kami. Saat disetujui, kartu SIM untuk layanan pascabayar akan diaktivasi dalam waktu 24 jam.

Kami akan menagih para pelanggan pasca bayar kami setiap bulannya melalui divisi penagihan kami yang terpusat. Dalam hal para pelanggan layanan prabayar, sistem tagihan nirkabel akan otomatis mengurangi nilai rekening pelanggan prabayar ketika biaya awal, transit dan terminasi dikenakan. Para pelanggan pasca bayar kami memiliki berbagai pilihan cara pembayaran untuk melunasi tagihan bulanan mereka. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan kartu kredit terkemuka melalui galeri Indosat, *teller* bank atau cabang kantor pos. Selain itu, para pelanggan dapat juga melakukan pembayaran dengan cara debit otomatis melalui bank atau kartu kredit, transfer bank, *Automatic Teller Machines, Electronic Data Capture, mobile banking, Internet banking,* dan *phone banking*. Jatuh tempo pembayaran adalah 20 hari sejak tanggal surat tagihan. Setelah 27 hari sejak tanggal surat tagihan, kami akan mengingatkan pelanggan yang belum membayar tagihannya dan memblokir sambungan telepon keluar mereka. Kami memblokir sambungan telepon masuk atau keluar pelanggan 40 hari setelah tanggal pernyataan apabila pelanggan belum membayar tagihan mereka. Kami akan menangguhkan layanan untuk rekening yang tagihannya telah melewati jatuh tempo lebih dari 50 hari dan menghapus data pelanggan tersebut dari jaringan kami serta memutuskan secara permanen nomor dan kartu SIM pelanggan setelah 120 hari sejak tanggal surat tagihan.

Kami telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan meminimalisasi kerugian. Kami mengirimkan *voucher* prabayar kepada para dealer independen kami hanya berdasarkan pembayaran tunai pada saat diserahkan dan kami tidak menerima pembayaran layanan kami dari para pelanggan selular melalui dealer independen kami. Selain itu, tergantung pada tingkat penggunaan, kami dapat mewajibkan pemberian uang jaminan yang dapat dikembalikan kepada para pelanggan. Kami akan mengkaji secara berkala rekening dari para pelanggan yang tingkat penggunaannya tinggi untuk memastikan agar uang jaminan mereka tetap memadai jumlahnya.

Kompetisi

Dalam beberapa tahun ini, bisnis layanan selular di Indonesia menjadi sangat kompetitif. Kompetisi pada industri komunikasi selular utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Berdasarkan estimasi internal kami, tiga penyelenggara jasa nirkabel di Indonesia, Telkomsel (yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Telkom), kami dan XL (yang secara tidak langsung mayoritas sahamnya dimiliki oleh Axiata Bhd dari Malaysia), secara bersama-sama menguasai sekitar 80,0% pangsa pasar jasa nirkabel di Indonesia pada tahun 2009.

Kami juga bersaing dengan operator layanan akses nirkabel tetap lainnya. Pada bulan Mei 2003, Telkom memperkenalkan produk TelkomFlexi, suatu layanan CDMA 2000-1X di wilayah Jakarta. Saat ini, Telkom menyediakan layanan ini secara nasional. Telkom menyediakan layanan ini sebagai jasa akses telepon tetap nirkabel, akan tetapi layanan ini telah berkembang baik mobilitas maupun fitur nilai tambahnya sehingga menyerupai jasa selular. Setelah menerima permohonan dari asosiasi industri, Menkominfo mengeluarkan sebuah Keputusan Menteri yang menyatakan bahwa wilayah layanan untuk akses jaringan tetap nirkabel hanya terbatas pada wilayah yang sama dengan kode area dari layanan jaringan telepon tetap lokal. Dengan demikian, operator layanan akses telepon tetap nirkabel dilarang memperluas layanan *roaming*nya ke kode area yang berbeda, namun operator CDMA tetap memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang sama dengan memberikan nomor baru kepada pelanggan ketika mereka pindah ke kota-kota lain. Selain TelkomFlexi, operator telekomunikasi lainnya menawarkan layanan yang serupa misalnya Bakrie Telecom dan Mobile-8 (Hepi), yang menawarkan layanan mereka secara nasional.

Dari waktu ke waktu, operator telekomunikasi Indonesia yang melaksanakan program perolehan pelanggan secara agresif dengan target meningkatkan pangsa pasar mereka masing-masing. Dengan menawarkan potongan harga, bonus dan tarif khusus, para operator berupaya membedakan layanannya dari layanan operator lainnya, terutama berdasarkan tarifnya. Persaingan ini mengakibatkan tarif menurun, dan dengan demikian kami yakin bahwa ARPU pelanggan selular terus mengalami penurunan untuk sebagian besar operator telekomunikasi Indonesia.

Kami yakin bahwa persaingan layanan 3G akan semakin ketat karena para operator telekomunikasi mulai memindahkan jaringannya ke pusat-pusat berpenduduk banyak. Saat ini, ada lima operator telekomunikasi yang memegang ijin layanan 3G, yaitu: Telkomsel, Hutchison, Natrindo, XL dan Perusahaan. Kami menyediakan layanan *broadband* nirkabel menggunakan platform 3G kami pada tahun 2009, dan per tanggal 31 Desember 2009, kami telah menyediakan layanan 3G di 34 kota di seluruh Indonesia.

Kompetitor utama kami untuk layanan *broadband* nirkabel adalah Telkomsel dengan layanan "Flash" dan XL dengan layanan "XL unlimited", keduanya menggunakan teknologi 3.5G W-CDMA. Operator lainnya seperti Smart Telecom dan Mobile 8 juga menyediakan layanan *wireless broadband* dengan teknologi EVDO-CDMA.

Kami yakin bahwa rintangan untuk masuk ke industri jasa selular dan akses telepon tetap nirkabel Indonesia saat ini cukup tinggi mengingat terbatasnya spektrum frekuensi yang tersedia, iklim permodalan yang tinggi, sulitnya memperoleh lahan menara untuk perluasan jaringan dan sudah terbentuknya pasar dari tiga pemain yang ada, yaitu kami, Telkomsel dan XL. Namun demikian, kami mengantisipasi adanya peningkatan persaingan di dalam industri layanan selular dan akses telepon tetap nirkabel secara umum. Dalam menanggapi hal ini, kami bermaksud memfokuskan sebagian besar pengeluaran barang modal di masa mendatang untuk bisnis selular kami dalam upaya meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan dan menyediakan berbagai layanan nilai tambah.

JASA MIDI

Produk dan jasa yang kami tawarkan dalam segmen bisnis ini meliputi layanan digital *leased line broadband and narrowband* berbasis *point-to-point* domestik dan internasional yang berkecepatan tinggi, layanan *packet-switching* berkinerja tinggi dan penyewaan transponder satelit dan jasa penyiaran. Mengingat potensi pertumbuhan yang signifikan atas layanan data dan layanan jaringan lainnya—termasuk layanan berbasis Internet—dan keperluannya yang meningkat terhadap keseluruhan strategi bisnis kami, kami telah memberikan perhatian yang cukup pada segmen usaha ini. Pertumbuhan ditekankan pada transmisi data yang *reliable* dan interkoneksitas pelanggan korporat kami, terutama mereka yang memiliki berbagai cabang atau lokasi, sehingga memberikan kesempatan yang sangat baik bagi kami. Jasa layanan MIDI memberikan pendapatan sebesar Rp2.712,6 miliar (US$288,6) atau 14,6% dari total pendapatan operasional konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2007	2008	2009
MIDI:			
Sirkuit Disewakan Berkecepatan Tinggi Internasional ('000s)	19	46	80
Sirkuit Disewakan Berkecepatan Tinggi Nasional ('000s)	51	129	171

Jasa-Jasa

World Link, Direct Link dan Domestic Link. World Link adalah IPLC yang menyewakan jasa *leased line* antara lain sambungan internasional untuk sirkit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* dan memberikan sambungan berkecepatan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2Mbps untuk *narrowband* atau 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. *Direct Link* adalah jasa *leased line* melalui satelit yang menyediakan sirkuit data digital berkecapatan tinggi berbasis *point-to-multipoint* dan memberikan kecepatan sambungan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband*. *Domestic Link* adalah jasa *leased line* domestik berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point*, dan memberikan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. Sebagian besar pelanggan *broadband World Link* adalah para penyelenggara telekomunikasi yang membutuhkan *dedicated broadband international data links*, dan pelanggan *narrowband World Link* kami sebagian besar terdiri dari para pengguna perusahaan yang berlangganan jasa *World Link* untuk keperluan internal mereka. Koneksi VSAT digunakan untuk *World Link* dan pengguna *leased line* lainnya yang berlokasi di daerah yang tidak sepenuhnya dilewati jaringan domestik. Pelanggan *National Link broadband* kami di pasar domestik meliputi penyedia jasa telekomunikasi yang memerlukan sambungan data *broadband* domestik yang berdedikasi dan pelanggan *narrowband Domestic Link* kami terutama terdiri dari pelanggan korporasi yang memakai untuk kepentingan sendiri. Kami mencatat pendapatan usaha sebesar Rp394,2 miliar (US$41.9 juta), dari usaha *World Link*, *Direct Link* dan *Domestic Link* mewakili 14,5% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

IP VPN. Kami menyediakan jasa IP VPN yang memberikan kepada para pelanggan konektivitas yang bersifat *multipoint*, interkoneksi LAN dan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu aplikasi perhitungan yang rumit. Per 31 Desember 2009, layanan IP VPN domestik Indosat dan Lintasarta tersedia di 68 kota besar di Indonesia, dan layanan IP VPN internasional Indosat memiliki kehadiran yang kuat di Asia Tenggara, dengan cakupan sampai ke Asia Utara, Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, bekerjasama dengan beberapa operator layanan global seperti AT&T, C&W, dan NTT. Kami mencatat pendapatan usaha sebesar Rp566,1 miliar (US$60,2 juta) dari usaha IP VPN, mewakili 20,9% dari pendapatan usaha layanan MIDI konsolidasi kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

MPLS dan Metro Ethernet. MPLS dan Metro Ethernet adalah layanan *leased line* domestik berdasarkan *Internet protocol*. MPLS menyediakan sirkit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* dan multipoint memberikan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45Mbps dan 155Mbps untuk *broadband*. Metro Ethernet memberikan *bandwidth* berkecepatan tinggi, dan kecepatan *line port* sebesar 10Mbps, 100Mbps dan 1Gbps dan basis Ethernet dengan kenaikan *bandwidth* sebesar 1Mbps yang dijamin.

Frame Relay dan ATM. Kami menyediakan jasa *frame relay* dan ATM, baik internasional maupun domestik, suatu teknologi *leased packet* berkecepatan tinggi, terutama melalui Indosat dan Lintasarta, yang memberikan para pelanggannya konektivitas yang bersifat multilateral, interkoneksi LAN dan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu aplikasi perhitungan yang rumit.

Kami menawarkan berbagai layanan konektivitas data – *World Link*, *Direct Link*, *Domestic Link*, IP VPN, MPLS dan *Metro Ethernet* serta *Frame Relay* dan ATM – kepada berbagai pelanggan perusahaan kami, termasuk perusahaan multinasional, dibuat untuk menyesuaikan parameter harga, ketentuan kecepatan, dan pertimbangan keamanan mereka yang spesifik.

Layanan Satelit. Kami menyewakan kapasitas *transponder* satelit Palapa-D kami yang berada di orbital slot yang terletak di wilyah Asia-Pasifik bagi perusahaan penyiaran dan operator telekomunikasi. Indonesia memiliki pasar televisi yang besar dimana sejumlah perusahaan penyiaran domestik swasta dan *programer* internasional bersaing dengan perusahaan penyiaran milik negara dan banyak perusahaan penyiaran baik domestik dan internasional menyewa kapasitas *transponder* satelit kami. Kami mengadakan perjanjian sewa *transponder* satelit Palapa-D kami yang berbeda-beda jangka waktunya, akan tetapi umumnya berakhir dalam waktu dua sampai dengan lima tahun sejak tanggal berlakunya sewa. Sewa *transponder* dapat diakhiri karena adanya pelanggaran perjanjian

sewa dan sebagian besar dari perjanjian sewa mengatur bahwa pihak penyewa dapat mengakhiri sewa dengan pemberitahuan (umumnya enam sampai dengan 12 bulan) dengan memberikan pembayaran pengakhiran perjanjian oleh penyewa yang besarnya sama dengan persentase dari uang sewa yang seharusnya dibayarkan apabila sewa *transponder* tidak diakhiri. Terlepas dari pemakaian oleh kami sendiri, kami juga menyewakan kapasitas transponder pada satelit Palapa-C2 kami, dengan jangka waktu penyewaan maksimal empat tahun, kepada operator telekomunikasi lainnya.

Kami juga menyediakan berbagai jasa satelit tambahan lainnya, termasuk penggunaan sesekali atas jasa TV, Indosat TV link, jasa jaringan privat, akses Internet dan multimedia dan *video conferencing*. Kami perkirakan permintaan atas jasa satelit akan terus meningkat, terutama disebabkan oleh semakin berkembangnya jasa derivatif satelit. Tekanan tariff diperkirakan akan melunak sebagai konsekuensi dari meningkatnya permintaan. Jasa satelit menghasilkan Rp113,1 miliar (US$12.0 juta) atau 4,2% dari pendapatan usaha jasa MIDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Layanan Internet. Kami menyediakan jasa *Internet Network Provider* bagi perusahaan ISP dan jasa akses Internet bagi para pelanggan pengguna akhir dan perusahaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, kami mengoperasikan tiga ISP yang mengkontribusi pendapatan sebesar Rp677,4 miliar (US$72,1 juta). IM2 menyediakan jasa *Internet dedicated* dan *dial-up*, dan per tanggal 31 Desember 2009, IMM memiliki 1.903 pelanggan korporasi dan usaha kecil hingga menengah dan 675.026 pelanggan retail. Dalam mengantisipasi meningkatnya persaingan di segmen bisnis Internet, IM2 telah mengembangkan strategi untuk memperluas bisnisnya dengan cara membangun *Internet protocol backbone* di wilayah-wilayah yang berpotensi berkembang, menempatkan jasa *public hotspot*, mendirikan pusat layanan pelanggan, mengembangkan jaringannya melalui investasi bersama dengan menggunakan teknologi *hybrid fiber* dan *coaxial* serta memperbaiki proses bisnisnya.

Lintasarta menawarkan kepada para pelanggan Internetnya layanan "IdOLA" untuk penggunaan perorangan dan layanan "LintasartaNet" untuk pelanggan korporat. Dengan IdOLA dan LintasartaNet, para pelanggan dapat mengakses informasi dari berbagai penyelenggara konten di Indonesia dan di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan LintasartaNet untuk promosi Internet, alokasi software dan komputer, kerjasama usaha atau transaksi perdagangan domestik dan internasional. Kami membukukan 25% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami dari jasa Internet untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

VSAT Net/IP dan *VSAT Link*. Layanan *VSAT Net/IP* dan *VSAT Link* Lintasarta merupakan sistem data *networking* berbasis satelit. VSAT Net/IP menghubungkan dan mengendalikan trafik data antar lokasi yang berjauhan, yang dapat membangun data secara cepat untuk para pelanggan jaringan yang trafiknya rendah sampai dengan menengah, seperti di sektor jasa keuangan, transportasi, perdagangan dan distribusi. VSAT Link menyediakan transmisi digital berbasis *point-to-point* untuk lokasi yang jauh oleh perusahaan dengan trafik menengah sampai padat seperti pabrik, pertambangan dan industri jasa keuangan.

Pelanggan dan Pemasaran

Pelanggan layanan MIDI kami terutama adalah pelanggan korporat dan SME, walaupun kami juga memiliki pelanggan ritel untuk layanan-layanan tertentu, seperti jasa Internet. Kegiatan pemasaran untuk layanan MIDI meliputi presentasi kelompok, pengiriman pos langsung, promosi dengan mitra, program mempertahankan pelanggan dan iklan di publikasi dan media cetak. Masing-masing unit usaha berupaya mempertahankan hubungan pelanggan melalui kegiatan seperti forum pengguna, seminar pelatihan, kunjungan dan pertemuan informal dengan para pelanggan. Lintasarta berfokus pada perluasan pangsa pasarnya di segmen industri di luar kompetensi utamanya yaitu di bidang perbankan dan keuangan, mengingat kemungkinan adanya konsolidasi dan restrukturisasi industri-industri tersebut di Indonesia. Selain itu, Lintasarta telah semakin berfokus pada upaya penjualan dan pemasarannya pada perusahaan berskala kecil sampai menengah atau UKM, dengan mengemas ulang produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Lintasarta sedang memperluas cakupan geografis produk dan jasanya yang sudah ada dalam rangka menghadapi permintaan yang meningkat atas infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil sebagai dampak dari perkembangan politik Indonesia, di antaranya pertumbuhan otonomi daerah.

Kami mendukung para pelanggan kami melalui staf lokal, *24-hour help desk* dan manajemen jaringan *realtime* terpadu. Pada bulan April 2000, Lintasarta memperoleh sertifikasi ISO 9002 untuk layanan *frame relay*, *digital data network* dan VSAT. Pada bulan Januari 2002, kami memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk layanan *frame relay*, *digital data network* VSAT, yang membuktikan komitmen kami terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, Frontier dan majalah Marketing memberikan penghargaan "Top Brand Award" untuk kategori ISP untuk tahun 2005 hingga 2010 dan "Best Contact Center Award" untuk tahun 2007, 2008 dan 2009.

Struktur Tarif dan Harga

Para pelanggan berbagai layanan MIDI kami dikenakan biaya berdasarkan jenis produk dan jasa yang disediakan dan kapasitas yang disewakan kepada mereka, sektor industri mereka, lokasi geografis dan lamanya kontrak jasa mereka dengan Perusahaan (yang umumnya berkisar satu sampai tiga tahun). Tarif layanan ini biasanya meliputi komponen-komponen sebagai berikut: biaya instalasi awal; biaya bulanan (berdasarkan lokasi dan kecepatan akses); biaya per transaksi (berdasarkan volume, waktu dan/atau jarak yang dilalui untuk trafik jaringan); dan biaya-biaya jasa lainnya, seperti konsultasi atau manajemen proyek.

Tarif sewa *transponder* satelit untuk penyewa internasional dinegosiasikan secara sendiri-sendiri dengan pelanggan dan bergantung pada persediaan dan permintaan jasa di wilayah yang dicakup oleh satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami. Sewa untuk luar negeri kami rata-rata mencapai US$1,2 juta per tahun untuk *transponder* yang penuh. Hampir semua pembayaran sewa untuk luar negeri dilakukan setiap tiga bulan di muka dalam mata uang Dolar AS dan mata uang lainnya yang lazim digunakan.

Persaingan

Para penyelenggara jasa komunikasi data di Indonesia terutama bersaing dalam hal harga, ragam jasa yang disediakan dan kualitas jasa pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan di antara para penyelenggara jasa komunikasi data semakin meningkat terutama karena dikeluarkannya ijin-ijin baru sebagai dampak dari deregulasi di sektor industri telekomunikasi Indonesia. Kami perkirakan persaingan akan terus semakin ketat. Menurut kami pesaing utama kami adalah Primacom dan Citra Sari Makmur untuk jasa VSAT, dan Citra Sari Makmur, Telkom, XL dan Indonesia Comnet Plus (Icon+) untuk jasa *leased line*. Pemerintah menyatakan Telkom sebagai operator dominan untuk penyewaan sirkuit pada 2007. Sebagai hasil dari deklarasi ini, kami percaya bahwa Telkom akan memerlukan persetujuan ketika kami dapat mengajukan tarif baru tanpa persyaratan untuk persetujuan pemerintah.

ISP di Indonesia bersaing pada dasar kualitas jaringan, harga dan jangkauan jaringan. Sehubungan dengan layanan nilai tambah sehubungan dengan Internet, kami bersaing dengan Telkom dan ISP yang telah ada seperti First Media, Biznet, CBN, Berca dan Indonet. Kami juga menghadapi kompetisi yang signifikan dari ISP baru yang izinnya disetujui oleh Menkominfo.

Dengan adanya permintaan pasar perusahaan yang lebih cepat dengan harga terjangkau, banyak dari pemasok *bandwidth* sudah mulai melakukan investasi secara signifikan menuju pembangunan, infrastruktur superior dengan teknologi baru, seperti "Dense Wavelength Division Multiplexing" dan teknologi DWDM. Teknologi DWDM merupakan ancaman yang kompetitif karena infrastruktur memungkinkan pemasok kapasitas *bandwidth* untuk menawarkan lebih banyak *bandwidth* dengan efisiensi biaya yang lebih baik. Industri *bandwidth* telah menghadapi menghadapi tantangan baru dari munculnya operator baru, seperti Moratel dan Matrix Cable System, yang mengatur kabel internasional yang menghubungkan Indonesia dan Singapura pada tahun 2008.

Perusahaan-perusahaan di sektor bisnis satelit terutama bersaing dalam hal kekuatan transponder, penawaran produk dan tarif. Umumnya, tarif layanan bergantung pada kombinasi dari kekuatan dan cakupan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, persaingan di sektor bisnis satelit di wilayah Asia-Pasifik semakin meningkat. Pengoperasian satelit terutama meliputi sewa *transponder* untuk perusahaan penyiaran dan operator layanan VSAT, selular dan SLI dan ISP. Kami menghadapi persaingan dari penyelenggara jasa domestik dan asing di masing-masing bidang ini. Dalam menyewakan *transponder* kami di satelit Palapa-D, kami bersaing sangat ketat di Indonesia dengan PT Pasifik Satelit Nusantara atau Pasifik Satelit Nusantara, dan Telkom. Pasifik Satelit Nusantara juga memiliki *transponder* pada

Mabuhay Philippines Satellite. Telkom saat ini mengoperasikan satelitnya sendiri (Telkom-1 dan Telkom-2) dan stasiun bumi, terutama untuk menyediakan hubungan transmisi *backbone* untuk jaringannya. Telkom juga menyewakan kapasitas transponder satelit dan menyediakan layanan stasiun bumi satelit *uplinking* dan *downlinking* kepada para pengguna domestik dan internasional. Satelit swasta lainnya yang ada dalam pasar penyiaran dalam wilayah cakupan satelit Palapa adalah AsiaSat-2, AsiaSat-4, AsiaSat-3S, Apstar-2R, Apstar-5, Apstar-6, ThaiCom 3, Measat-2, Measat-3, Measat-3a, PanAmSat-4 dan PanAmSat-7. Measat Sdn. Bhd, yang mengoperasikan satelit-satelit Measat, APT Satellite yang mengoperasikan satelit-satelit Apstar, dan Shin Satellite PCL yang mengoperasikan satelit-satelit ThaiCom, juga bersaing secara langsung dengan kami di dalam pasar regional Asia.

Selain itu, dengan meningkatnya popularitas televisi *Direct-To-Home* atau DTH, bisnis satelit kami akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan diluncurkannya satelit-satelit regional yang baru dan berkemampuan tinggi. DTH adalah penerimaan program satelit dengan piringan satelit/*dish* tersendiri yang ditempatkan pada masing-masing rumah. Perusahaan penyiaran nasional berupaya memperoleh ijin DTH agar dapat menyediakan jasa penyiaran yang berskala nasional di Indonesia. Televisi DTH akan memungkinkan para perusahaan penyiaran untuk menyalurkan isi program mereka tanpa menggunakan dukungan jaringan telekomunikasi kami. Selain itu, karena popularitas DTH yang semakin bertambah, kami menghadapi kemungkinan hilangnya pelanggan karena DTH menggunakan platform satelit yang tidak kami sediakan.

Jasa-Jasa Telekomunikasi Tetap

Jasa telekomunikasi tetap kami meliputi layanan sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional serta jasa akses telepon tetap nirkabel. Untuk 31 Desember 2009, kami mencatat pendapatan operasional sebesar Rp1.957,2 miliar (US$208,2 juta) dari jasa telekomunikasi tetap, yang mewakili 10,5% dari total pendapatan usaha konsolidasi kami. Kecuali yang berhubungan dengan pembayaran selular, pelanggan nirkabel tetap dan pelanggan *fixed line*, kami tidak menerima pembayaran langsung dari pengguna akhir jasa sambungan jarak jauh internasional. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 3,2% dari pendapatan usaha telekomunikasi tetap dihasilkan dari jumlah yang dibayarkan atau terhutang kepada Telkom dan penyedia layanan telekomunikasi domestik lainnya untuk panggilan keluar, 6,8% dari pendapatan tersebut dihasilkan dari jumlah yang dibayarkan atau terhutang kepada penyedia layanan selular dan 70,3% dari pendapatan tersebut dihasilkan dari pendapatan bersih dengan penyedia layanan telekomunikasi luar negeri untuk panggilan keluar dan panggilan masuk. Sisa 19,5% dari pendapatan operasional jasa telekomunikasi tetap berasal dari tagihan langsung untuk jasa-jasa spesifik, seperti *calling card* dan pelanggan *fixed-line* untuk periode yang sama.

Layanan-Layanan

Jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh Internasional. Kami menyediakan berbagai jasa telekomunikasi suara internasional dan jasa telekomunikasi internasional baik *switched* maupun *non-switched*. Layanan *switched* memerlukan interkoneksi dengan PSTN atau fasilitas milik operator selular lainnya; sedangkan layanan *nonswitched* dapat dilakukan melalui fasilitas transmisi kami tanpa perlu interkoneksi.

Melalui layanan "001" dan "008", saat ini Perusahaan menguasai kurang lebih 25% bisnis SLI di Indonesia. Demi meningkatkan kompetisi yang bersumber dari deregulasi industri, kami meluncurkan "FlatCall 016" pada bulan Maret 2005 dan memasarkannya sebagai produk baru yang ditujukan kepada konsumen pada segmen pasar yang paling sensitif harga. Mulai bulan Januari 2007, dalam rangka mematuhi keputusan dari Pemerintah, kami mengubah kode akses menjadi lima digit dan menamakannya "FlatCall 01016." Produk "FlatCall 01016" menawarkan tingkat tarif bersaing untuk beberapa negara tujuan sembari menawarkan tingkat tarif VoIP regular untuk negara-negara lain.

Sambungan keluar internasional jarak jauh kami disalurkan melalui salah satu dari empat *international gateway* kami. Dari *gateway* ini, layanan sambungan langsung jarak jauh internasional akan ditransfer via satelit atau kabel laut berdasarkan program routing yang telah ditetapkan, yang dikembangkan berdasarkan kolaborasi dengan para operator telekomunikasi asing. Operator asing yang menerima panggilan melalui *international gateway* bertanggung jawab untuk mengakhiri panggilan kepada penerima panggilan. Demikian pula, panggilan internasional jarak jauh yang diterima oleh *gateway* kami dialihkan dari *gateway* menuju tujuan mereka di dalam

negeri melalui jaringan lokal Telkom, jaringan selular, jaringan tetap lokal atau operator selular lainnya dimana kami memiliki perjanjian interkoneksinya.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, pendapatan kami yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional adalah masing-masing sebesar Rp1.576,4 milliar (US$167,7 juta).

Tabel berikut ini memuat data operasional tertentu dari jasa layanan sambungan internasional langsung untuk periode berikut:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
	2007		2008		2009	
	Jumlah Menit	% Perubahan	Jumlah Menit	%Perubahan	Jumlah Menit	% Perubahan
	(dalam ribuan, kecuali persentase)					
Jumlah Menit Masuk yang dibayarkan	1.236,6	26.1	1.484,4	20,0	1.482,8	-0,5
Jumlah Menit Keluar yang dibayarkan	296,9	93.0	474,0	59,7	442,0	6,3
Jumlah Menit Masuk dan Keluar yang dibayarkan	1.533,4	35.2	1.958,4	27,7	1.924,8	0,9
Rasio Lalu Lintas masuk dan keluar	4,2	—	3,1	—	3,2	—

Selama tahun 2008 dan 2009, sambungan keluar internasional kami yang diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan meningkat sebesar 59,7% dan 6,3%, masing-masing, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan panggilan masuk internasional yang diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan meningkat sebesar 20,0% dan menurun sebesar 0,5% untuk periode yang sama. Panggilan masuk dan keluar yang dikombinasikan, juga diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan, masing-masing meningkat sebesar 27,7% dan 0,9% selama tahun 2008 dan 2009. Kami percaya pertumbuhan yang lebih kuat di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh strategi bisnis agresif kami yang menekankan volume penjualan berbasis volume. Kami percaya bahwa meningkatnya kompetisi dari Telkom dan operator VoIP, beberapa di antaranya, tidak mempunyai izin, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami di masa depan.

Layanan Akses Telepon Tetap Nirkabel. Kami meluncurkan jasa akses telepon nirkabel tetap kami di tahun 2004 untuk mengembangkan bisnis telekomunikasi tetap kami dan untuk memperluas layanan selular kami. Dengan menggunakan teknologi CDMA 2000 1x, jasa telepon tetap nirkabel kami menawarkan alternatif yang lebih ekonomis bagi pelanggan yang memerlukan pergerakan terbatas. Per tanggal 31 Desember 2009, layanan akses telepon tetap nirkabel kami, "StarOne," memiliki total basis pelanggan sebanyak 594.133 dengan 68.742 pelanggan pasca bayar dan 525.391 pelanggan prabayar. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, pendapatan yang berasal dari layanan akses telepon tetap nirkabel sebesar Rp 249,9 milliar (US$ 26,6 juta). Pada tanggal 12 Desember 2006, Pemerintah memberikan ijin untuk dua kanal layanan akses telepon tetap nirkabel berskala nasional pada frekuensi 800MHz. Ijin ini menggantikan ijin akses telepon tetap nirkabel 1900MHz kami yang lama dan pada akhir tahun 2007 kami melakukan migrasi frekuensi CDMA dari 1900MHz ke frekuensi baru 800MHz di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami memperluas layanan StarOne ke 82 kota pada bulan Desember 2009.

Sambungan Lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh Domestik. Kami telah meluncurkan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik dari titik akses Indosat seperti "StarOne" dan "INDOSAT phone" di bulan Oktober 2005. Kami saat ini telah memiliki cakupan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik di 82 kota besar di Indonesia.

Pelanggan dan Pemasaran

Pelanggan utama dari jasa telekomunikasi tetap kami adalah pelanggan korporat, selular, pelanggan telekomunikasi tetap dan pelanggan akses telepon tetap nirkabel kami, serta pelanggan dari operator telekomunikasi lainnya.

Kami mempekerjakan tim penjualan yang kuat, yaitu kelompok penjual yang memfokuskan pada 500 pelanggan terbesar kami, termasuk hotel, pelanggan korporat besar, kantor pemerintahan dan kedutaan. Kami juga

mengimplementasikan program loyalitas pelanggan, yang memberikan insentif kepada pelanggan reguler. Selain itu, kami berusaha untuk memperluas basis pelanggan kami dengan melakukan kerjasama promosi dengan perusahaan telekomunikasi internasional lainnya untuk mempromosikan layanan kami. Kami berusaha untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi yang dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan.

Kami telah melakukan berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan layanan untuk pelanggan telekomunikasi tetap kami. Strategi pemasaran kami berfokus pada: (i) memperkuat strategi *price-tiering* dengan mengimplementasikan "FlatCall 01016" untuk menyaingi layanan VoIP; (ii) memperluas pangsa pasar sementara tetap mempertahankan pelanggan kami melalui inisiatif *bundling*, (iii) menetapkan komitmen volume untuk lalu lintas masuk dari operator telekomunikasi asing; (iv) memperluas cakupan layanan akses tetap nirkabel kami. Kami selalu melakukan kampanye iklan nasional melalui media televisi, surat kabar, majalah, *website* dan radio untuk meningkatkan kesadaran merek diantara pelanggan bisnis dan ritel. Kami juga mengoperasikan 8 lokasi kantor penjualan regional di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2009, sebesar kurang lebih 37% dari jumlah menit sambungan keluar internasional jarak jauh (termasuk panggilan yang ditempatkan melalui "Flatcall 01016") sebagian besar berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, diikuti oleh Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara, yang jika dihitung secara bersama-sama adalah sebesar 63% dari jumlah menit sambungan keluar internasional jarak jauh kami.

Kami memiliki database informasi pelanggan, sehingga kami dapat menganalisa preferensi konsumen dan pola penggunaan dan merancang pola pemasaran dan produk. Kami melakukan riset pasar sendiri dan juga bekerja sama dengan konsultan untuk melakukan riset yang lebih luas pada perilaku dan kebutuhan pelanggan.

Struktur Tarif, Kewajiban Pelayanan Universal dan Harga

Tarif. Sebelum tahun 2008, Menkominfo menetapkan tarif untuk jasa telekomunikasi tetap, yang berdasarkan pada pembagian untuk seluruh tujuan ke dalam enam zona. Pada tanggal 30 April 2008, Menkominfo menetapkan rumusan tarif untuk layanan-layanan dasar pada jaringan tetap dan mengharuskan operator untuk menghitung harga menggunakan rumus berbasis-biaya, yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah untuk memperoleh persetujuan. Namun, tarif jarak jauh internasional kami tidak mengalami perubahan, dan dengan demikian kami berniat untuk tetap memakai tarif jarak-jauh internasional berdasarkan peraturan sebelumnya yang mendasarkan tarif pada enam zona untuk tujuan panggilan.

Penyediaan layanan sambungan jarak jauh di antara dua negara biasanya diadakan antara para *carrier* telekomunikasi secara bilateral. Kami biasanya menerapkan sistem harga berbasis tingkat terminasi pasar, yaitu kami setuju untuk menggunakan tarif harga asimetris untuk panggilan masuk dan keluar. Kami memiliki sambungan langsung dengan 64 operator telekomunikasi asing di 40 negara. Perjanjian kami dengan para *carrier* ini menetapkan ketentuan pembayaran dari kami kepada operator telekomunikasi asing dalam rangka penggunaaan fasilitas mereka dalam menghubungkan layanan jarak jauh internasional yang ditagih di Indonesia dan oleh operator telekomunikasi asing kepada kami dalam rangka penggunaan fasilitas (dan jaringan lokal Indonesia) sehubungan dengan layanan internasional jarak jauh yang akan ditagih di luar negeri. Praktek diantara *carrier* telekomunikasi ini adalah untuk tagihan yang telah jatuh tempo sehubungan dengan penggunaan jaringan luar negeri akan dicatat, ditagihkan dan diteruskan oleh *carrier* operator telekomunikasi dari negara dimana panggilan tersebut ditagih. Berdasarkan harga yang dinegosiasikan dengan setiap operator telekomunikasi asing, kami melakukan pembayaran kepada *carrier* lalu lintas panggilan keluar yang ditagih di Indonesia, dan kami menerima pembayaran dari *carrier* tersebut untuk lalu lintas panggilan masuk yang ditagih di luar wilayah Indonesia. Penyelesaian pembayaran diantara penyelenggara biasanya dilakukan secara triwulan dengan metode net-basis. koresponden carrier terbesar kami berlokasi di Malaysia, Singapura, Taiwan, Timur Tengah dan Hong Kong.

Para penyelenggara layanan VoIP dapat menentukan biaya penagihan mereka sendiri, dan masing-masing penyelenggara harus bernegosiasi dengan penyelenggara jaringan yang terkait untuk biaya interkoneksi. Kami telah menandatangani perjanjian dengan Telkom untuk menjadi penyedia jaringan kami untuk sambungan VoIP.

Interkoneksi dengan Jaringan Domestik. Meskipun kami menyediakan *international gateway* untuk sambungan telepon keluar dari dan telepon masuk ke Indonesia, semua layanan sambungan langsung jarak jauh internasional harus berakhir pada salah satu jaringan telepon tetap domestik atau selular. Menkominfo telah menetapkan biaya interkoneksi layanan sambungan langsung jarak jauh internasional yang melewati jaringan telepon tetap domestik dan akses jaringan tetap nirkabel. Kami memiliki perjanjian interkoneksi terpisah, yang mencerminkan tarif-tarif ini, dengan para penyelenggara yang berinterkoneksi secara langsung dengan *international gateway* kami.

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations). Pemerintah menetapkan tarif Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligations*, atau USO), yang sejak tahun 2005 hingga 2009 adalah 0,75% dari pendapatan kotor tahunan dikurangi dari biaya interkoneksi yang dibayarkan kepada *carrier* telekomunikasi lainnya dan piutang ragu-ragu. Pada bulan Januari 2009, Pemerintah meningkatkan tarif USO dari 0,75% dari pendapatan kotor tahunan menjadi 1,25% dari pendapatan kotor tahunan.

Tagihan Pelanggan dan Biaya Interkoneksi

Para operator domestik melakukan proses *billing* dan penagihan dari panggilan internasional jarak jauh yang dilakukan melalui jaringan domestik. Operator domestik akan memotong biaya interkoneksi yang terhutang kepadanya dari jumlah uang yang diperoleh dan membayar sisanya (tanpa bunga) dalam mata uang Rupiah kepada kami dalam waktu paling lambat 25 hari setelah perolehan pembayaran dari pelanggan di Indonesia. Siklus perolehan pembayaran untuk sebagian besar operator domestik adalah sekitar 30 hari. Kami bertanggung jawab atas penerbitan dan pengiriman informasi tagihan kepada para operator domestik, melalui modul yang dikenal sebagai layanan *System Online Clearing Interconnection*, pada tanggal 12 setiap bulannya, yang kemudian ditagihkan oleh operator domestik kira-kira lima hari setelah penerimaan dari kami, hal ini menjadikan siklus perolehan pembayaran kami menjadi kurang lebih 50 sampai dengan 80 hari. Untuk keperluan laporan keuangan, kami membukukan pendapatan per bulanan berdasarkan catatan trafik kami sendiri. Kami melakukan penagihan kepada operator selular dalam negeri pada pertengahan bulan berikutnya dan mewajibkan pembayaran pada akhir bulan. Oleh sebab itu, siklus penagihan yang normal untuk operator selular domestik kami adalah kurang lebih 20 sampai dengan 60 hari.

Kami mengirimkan tagihan interkoneksi kepada operator yang relevan untuk panggilan yang masuk pada jaringan domestik. Kami umumnya menagih biaya tersebut dalam waktu 20 sampai dengan 60 hari dengan melakukan *off-set* terhadap piutang dari panggilan keluar. Pembayaran dari operator telekomunikasi asing biasanya dilakukan dalam mata uang U.S dollar, yang akan didepositokan di Indonesia, dan jumlah yang mewakili pembayaran interkoneksi yang dibayarkan kepada kami melalui jaringan operator domestik dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

Pemakaian pelanggan atas layanan akses nirkabel dan sambungan domestik jarak jauh dihitung dari awal sampai dengan akhir bulan. Penagihan kepada pelanggan dilakukan dari awal sampai dengan akhir bulan. Penagihan kepada pelanggan dilakukan dari awal bulan berikutnya dan diselesaikan pada tanggal kelima dari bulan yang bersangkutan. Laporan tagihan diterima oleh pelanggan tidak lebih dari tanggal sepuluh tiap bulannya dan pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal dua puluh setiap bulannya. Untuk layanan akses tetap nirkabel, kami memblokir pelanggan untuk melakukan panggilan apabila mereka belum melakukan pembayaran dari tagihan yang jatuh tempo pada tanggal dua puluh setiap bulannya. Kami memblokir pelanggan untuk menerima panggilan selama empat puluh hari setelah tanggal penagihan apabila mereka belum melunasi tagihannya. Kami akan memutuskan layanan dan menghapuskan akun secara permanen untuk pelanggan dengan tagihan yang telah melewati enam puluh hari sejak hari pertama diterbitkannya tagihan. Untuk layanan domestik jarak jauh, kami akan memblokir pelanggan untuk melakukan panggilan di akhir bulan apabila mereka belum membayar tagihannya. Untuk pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo di bulan kedua, kami akan memblokir pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan. Kami akan memutuskan layanan dan menghapuskan akun secara opermanen untuk pelanggan dengan tagihan yang telah melewati sembilan puluh hari dari hari pertama diterbitkannya tagihan.

Persaingan

Kami bukan lagi satu-satunya penyedia resmi jasa sambungan SLI tradisional (i.e., non VoIP) di Indonesia. Menkominfo telah memberikan izin operasional untuk menyediakan jasa sambungan SLI kepada Telkom, termasuk hak untuk menggunakan kode akses SLI "007" untuk memasuki pasar sambungan internasional jarak-jauh, dan Bakrie Telecom. Pemerintah juga menerbitkan izin-izin baru untuk penggunaan layanan SLI untuk operator telekomunikasi lain, yang akan meningkatkan persaingan. Selain itu, Telkom tidak lagi melakukan monopoli untuk jasa layanan SLJJ. Pasar SLI tradisional telah menjadi semakin kompetitif dengan adanya kenaikan penggunakan teknologi VoIP. Bisnis VoIP kami telah meningkat secara signifikan dari 201,9 juta menit di tahun 2007 menjadi 442,4 juta menit di tahun 2009.

Pada bulan April 2008, kami dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari pelanggan kami masing-masing di Balikpapan, dimana pelanggan jaringan tetap Telkom menggunakan "011" untuk mengakses jaringan SLJJ kami sementara pelanggan jaringan tetap lokal kami dapat menggunakan "017" untuk mengakses jaringan Telkom. Selain itu, pada tahun 2008, Bakrie Telecom telah memperoleh izin baru sebagai penyelenggara SLJJ. Pembukaan akses SLJJ diantara para kompetitor dan dimulainya kegiatan usaha oleh dari penyelenggara SLJJ baru diharapkan dapat meningkatkan persaingan dengan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pelanggan untuk layanan SLJJ.

Kami juga menghadapi persaingan dari penyedia layanan akses tetap nirkabel lainnya. Saat ini, Telkom, merupakan operator akses tetap nirkabel terbesar, menawarkan TelkomFlexi, sebuah layanan CDMA 2000 1x, di lebih dari 250 kota di Indonesia. Bakrie Telecom, yang menawarkan layanan di lebih dari 30 kota di Indonesia, dan Mobile-8, juga telah diberikan izin baru untuk layanan akses tetap nirkabel secara nasional, yang meningkatkan persaingan lebih lanjut di dalam segmen ini.

Fasilitas dan Infrastruktur

Berikut ini adalah pembahasan mengenai jaringan selular, jaringan telekomunikasi tetap (termasuk jaringan SLI), serta fasilitas dan infrastruktur komunikasi lainnya milik kami, termasuk milik anak perusahaan utama kami yang beroperasi.

Jaringan Selular

Komponen-komponen utama dari jaringan selular kami adalah sebagai berikut:

- *base transceiver/Node B stations*: terdiri dari *transmitter* dan *receiver* dan berfungsi sebagai jembatan antara para pengguna selular dalam satu *cell* dan *mobile switching centers* melalui *base station controllers* dan *radio network controllers*;
- *base station controllers/radio network controllers*: merupakan alat untuk menghubungkan ke dan mengendalikan *base station* dalam setiap *cell site*;
- *mobile switching centers*: pusat yang mengendalikan *base station controllers* dan yang melakukan *routing* sambungan telepon; dan
- *transmission lines*: sambungan yang menghubungkan *mobile switching centers, base station controllers, base stations* dan PSTN.

Jaringan selular kami saat ini beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 10 MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 900 GSM, *bandwidth* frekuensi 20MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 1800 DCS dan 5MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum IMT-2000. Berikut adalah tabel yang memuat beberapa informasi mengenai jaringan selular kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per 31 Desember,		
	2007	2008	2009
Base Transceiver Stations(1)	9.324	12.237	14.385
Node B Stations (3G BTS) (1)	800	1.425	1.968
Jumlah BTS (termasuk 2G dan 3G) (1)	10.124	13.662	16.353
Base Station Controllers(1)	226	265	315
Mobile Switching Center (1)	56	73	95
Radio Network Controllers (1)	12	14	20
Media Gateways (1)	24	40	73

(1) Sebelum masa triwulan pertama di tahun 2010, *base transceiver station*, stasiun node B, BTS, *base station controller*, pusat *mobile switching,* dan pengendali jaringan radio atau *gateway* media yang baru dibangun atau baru dibeli dan belum beroperasi dimasukkan dalam laporan Perusahaan. Awal dari triwulan pertama di tahun 2010, sebagaimana diungkapkan di sini, Perusahaan berniat untuk memasukkan *base transceiver station*, stasiun node B, BTS, *base station controller*, pusat *mobile switching,* dan pengendali jaringan radio atau *media gateway* yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya ketika mereka telah beroperasi. Berdasarkan Perhitungan Awal, Perusahaan telah memiliki angka-angka berikut:

	Per tanggal December 31,		
	2007	2008	2009
Base Transceiver Stations	9.960	12.677	14.621
Node B Stations (3G BTS)	800	1.485	2.183
Jumlah BTS (termasuk 2G dan 3G)	10.760	14.162	16.804
Base Station Controllers	226	279	315
Mobile Switching Center	56	73	96
Radio Network Controllers	12	16	21
Media Gateways	24	54	80

Kami membeli peralatan telekomunikasi selular kami terutama dari pemasok Eropa dan Cina. Jaringan kami adalah sebuah sistem terintegrasi yang menggunakan peralatan *switching*, *cell site*, dan jaringan transmisi *point-to-point microwave* radio. Sebagian besar dari *cell site* dan basis stasiun radio kami berlokasi di atau pada gedung atau di lahan kosong, yang kami miliki, atau yang sewanya telah dinegosiasikan oleh kami dengan jangka waktu yang bervariasi dari lima hingga 20 tahun.

Sebagai hasil pengoperasian tiga jaringan lama yang menggunakan peralatan dari berbagai *supplier*, pengeluaran barang modal kami secara historis pernah lebih tinggi dibandingkan apabila kami mengoperasikan suatu jaringan dengan pemasok yang lebih sedikit. Sejak tahun 2009, sebagai bagian dari strategi pengaturan fungsional kami, kami mulai merasionalisasikan pengeluaran barang modal dan rencana pengadaan kami melalui komite investasi kami yang baru dibentuk. Kami telah memfokuskan pengadaan kami jumlah pemasok yang lebih sedikit dan telah mengadopsi sebuah pendekatan perjanjian utama (*framework agreement*) dengan para pemasok tersebut, yang kami percaya akan meningkatkan efisiensi program pengeluaran barang modal kami secara signifikan.

Kami mempertimbangkan berbagai pilihan sehubungan dengan operasional, kepemilikan, dan penggunaan dari aset-aset menara kami yang kami percaya dapat mengoptimalkan nilai dari aset-aset tersebut.

Jaringan Telepon Tetap

Kami telah membangun jaringan telekomunikasi telepon tetap yang terdiri dari enam *international gateway* yang didukung oleh sirkit satelit, kabel laut dan transmisi *microwave*. Pada akhir tahun 2009, kami menyediakan jasa telepon tetap nirkabel di 82 kota di Indonesia.

International Gateways. Untuk bisnis sambungan langsung jarak jauh internasional, kami mengoperasikannya dengan menggunakan enam *gateway*, tiga *gateway* di Jakarta, dan masing-masing satu *gateway* di Surabaya, Medan dan Batam, yang menyediakan seluruh koneksi untuk layanan kami ke jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami. Kami membeli perangkat *gateway-switching* dari Lucent Technologies, Inc. (yang telah bergabung dengan Alcatel) dan Siemens.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Per tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki kapasitas *bandwidth* internasional sebesar 1.390,66 Mbps untuk suara dan 14.969,64 Mbps untuk transmisi data. Seluruh tujuan kami terkoneksi secara digital. *Bandwidth* yang tersedia untuk kami jauh lebih banyak dari kapasitas yang digunakan sehingga dapat mengakomodasi pertumbuhan trafik di masa mendatang. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan rata-rata penggunaan kurang dari 80% dari kapasitas untuk dapat mengakomodasi peningkatan penggunaan pada jam sibuk.

Setiap *international gateway* berhubungan dengan *international gateway* lainnya, sehingga setiap sambungan telepon mempunyai beberapa pilihan *routing* dan menyediakan sistem dengan kemampuan *back-up* apabila terjadi kerusakan perangkat atau kesibukan yang luar biasa pada salah satu *gateway*. Kami telah menempatkan perangkat interkoneksi di beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Telkom dan beberapa operator selular lainnya untuk menghubungkan jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami ke jaringan telekomunikasi domestik.

Transmisi suara dan data secara internasional antar *international gateway* terjadi melalui sirkit satelit atau kabel laut. Sirkit satelit tidak terpengaruh oleh jarak dan menyediakan jasa penyiaran yang membuatnya bersifat fleksibel sehubungan dengan tujuan sambungan telepon. Kabel laut, terutama kabel serat optik digital, dapat memberikan layanan berkualitas tinggi yang lebih murah. Akan tetapi, biaya kabel akan meningkat seiring dengan jauhnya jarak dan tujuannya harus tetap. Sirkit satelit dapat terpengaruh oleh kondisi atmosfir, sedangkan kabel laut dapat rusak akibat ulah manusia atau alam. Secara umum, kami menggunakan kabel laut dengan *cable-to-cable back-up* untuk sambungan jarak menengah di Asia dan *satellite links backup* untuk transmisi yang berjarak lebih jauh. Kami menggunakan *link microwave* dan serat optik untuk koneksi antara *gateway* dan stasiun bumi, dan untuk *gateway* Batam yang memiliki *microwave links* ke Singapura. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan 100% *redundancy* untuk semua sambungan jarak jauh internasional kami (yang mungkin membutuhkan *routing* melalui negara ketiga) dalam upaya memberikan layanan berkualitas tinggi kepada para pelanggan kami.

Kabel laut. Kami memiliki hak kepemilikan di dalam dan akses ke kapasitas kabel laut yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik, Afrika Utara dan Eropa, dan yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik dengan Amerika Utara. Tabel berikut ini memuat cakupan geografis, umur dan kapasitas yang dialokasikan dari jaringan kabel kami, per tanggal 31 Desember 2009:

Jaringan Kabel Bawah Laut	Cakupan Geografis	Kapasitas (dalam Mbps)
APCN	Australia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Philipina, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, Vietnam dan Thailand	1.328,19
APCN-2	China, Jepang, Malaysia, Philipina, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan	310,00
SEA-ME-WE 3	Australia, Austria, Belgia, Brunei, Kanada, China, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong, India, Iran, Italia, Jepang, Macau, Malaysia, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Oman, Pakistan, Portugal, Arab Saudi, Qatar, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turki, United Emirat Arab, Amerika Serikat dan Inggris	9.649,28
Jakabare	Singapura	2.296,19
China-US	China, Taiwan, Philipina, Korea Selatan dan Amerika Serikat	1.414,00
TPC-5	Jepang dan Amerika Serikat	118,00
Asia America Gateway	Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, Hong Kong, Philipina, dan Amerika Serikat	1.244,00
Jakabare	Jawa, Kalimantan, Batam (Indonesia)	6.376,32
Jakasusi	Jawa, Kalimantan, Sulawesi (Indonesia)	6.998,40
Jasutra	Jawa, Sumatera (Indonesia)	11.197,44
Jakarta - Surabaya	Jawa (Indonesia)	15.396,48
Total		**56.328,30**

Untuk mendukung pengoperasian *gateway* kami di Surabaya, kami telah mengoperasikan kabel laut serat optik yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya sejak bulan Januari 1997. *Link* ini meningkatkan keandalan jaringan dan kualitas layanan kami di wilayah Surabaya.

Sirkit Microwave Internasional. Kami mengoperasikan sistem transmisi *microwave* antara *gateway* Batam kami dan Singapura. Sistem ini memiliki kapasitas gabungan sebesar 300 Mbps untuk suara dan data, dan berfungsi sebagai stasiun relay untuk melakukan routing trafik ke wilayah yang tidak memiliki koneksi kabel serat optik.

Sirkit Satelit Internasional. Per tanggal 31 Desember 2009, *bandwidth* satelit kami yang tersedia adalah 3,84 Mbps untuk suara dan 0,64 Mbps untuk sirkit data melalui stasiun bumi di gerbang kami di Jakarta. Kapasitas satelit kami saat ini diperoleh terutama dari Intelsat dan, sebagian kecil, dari satelit Palapa D. Sejak tanggal 31 Desember 2002, kami telah memindahkan trafik dari transmisi satelit menjadi kabel laut oleh karena kualitasnya yang lebih baik, ketersediaan yang lebih banyak dan biaya yang lebih hemat dengan penggunaan kabel laut.

Jaringan akses tetap nirkabel kami saat ini beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 5MHz pada spektrum 800MHz. Tabel berikut ini memuat beberapa informasi tentang jaringan akses tetap nirkabel kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember,		
	2007	2008	2009
Base Transceiver Stations(1)	1.079	1.454	1.421
Base Station Controllers(1)	27	34	31
Mobile Switching Center(1)	9	9	8
Media Gateways(1)	17	17	25

(1) Sebelum kuartal pertama 2010, *base transceiver station*, pengendali stasiun base, pusat *mobile switching*, dan *gateway* media yang baru dibangun atau baru dibeli dan belum beroperasi dimasukkan dalam laporan Perusahaan. Dimulai sejak kuartal pertama 2010, sebagaimana diungkapkan di sini, Perusahaan berniat untuk memasukkan *base transceiver station*, pengendali stasiun base, pusat *mobile switching*, dan *gateway* media yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya ketika mereka telah beroperasi. Berdasarkan Perhitungan Awal, Perusahaan telah memiliki angka-angka berikut:

	Per tanggal 31 Desember,		
	2007	2008	2009
Base Transceiver Stations	1.079	1.454	1.505
Base Station Controllers	27	34	34
Mobile Switching Center	9	9	9
Media Gateways	17	17	17

Fasilitas Komunikasi Lainnya

Sistem komunikasi Satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami dan serat optik kami terhubung ke pusat perdagangan utama di wilayah Jakarta serta wilayah terpencil di Indonesia dan digunakan untuk menyediakan layanan MIDI Perusahaan dan untuk *backhaul* selular.

Sistem Komunikasi Satelit

Satelit komunikasi digunakan untuk berbagai hal bergantung pada fitur seperti jelajah, atau cakupan wilayah; kekuatan *transponder* (biasanya dinyatakan dalam dBW); dan *bandwidth transponder*. *Bandwidth transponder*, yang dinyatakan dalam megahertz, berbeda antara *C-band* dan *Ku-band transponder*. *C-band* digunakan di seluruh dunia sebagai standar komunikasi satelit untuk mengirim sinyal dengan gangguan atmosfir yang minim. *C-band* memberikan cakupan yang sangat luas meliputi sebagian besar benua Asia, yang membuatnya menjadi sangat populer untuk diaplikasikan seperti untuk penyiaran televisi. Sedangkan *Ku-band transponder* beroperasi dengan frekuensi berkisar 11-14 gigahertz. Meskipun frekuensi Ku-band lebih rentan terhadap gangguan kelembaban dan pengikisan oleh hujan daripada frekuensi *C-band*, *Ku-band* lebih cocok untuk aplikasi antena kecil. *Ku-band* umumnya digunakan untuk tujuan yang sama seperti halnya dengan *C-band*, dan juga untuk *satellite news gathering* (*truck-mounted antennas*) dan beberapa aplikasi VSAT. *Ku-band* terutama digunakan di wilayah yang banyak memakai sistem *ground-based microwave*. Untuk mengkompensasi atas hilangnya kekuatan sinyal akibat gangguan kelembaban dan pengikisan oleh hujan, pemancar *Ku-band* umumnya mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan transponder *C-band* dan cakupan layanan yang lebih kecil.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Pada tanggal 31 Agustus 2009, kami meluncurkan satelit baru, Palapa-D, untuk menggantikan Palapa-C2 pada orbital slot 113E, yand secara signifikan akan meningkatkan kapasitas transponder kami dan memberikan cakupan satelit yang lebih luas. Setelah transfer trafik yang berhasil dilakukan dari Palapa-C2 ke Palapa-D pada awal bulan November 2009, Palapa-C2 dipindahkan ke orbital slot 150.5E dan akan beroperasi pada *inclined orbit* hingga kira-kira tahun 2014 untuk melakukan *cellular backhaul* kami. Ketika satelit Palapa-D kami beroperasi, kami secara signifikan meningkatkan kapasitas transponder kami, yang memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan transponder satelit kami sendiri, sebagai tambahan dari kebutuhan pelanggan yang menyewa kapasitas transponder dari kami. Oleh sebab itu, kira-kira 60% dari kapasitas standar *C-band transponder* Palapa-D kami saat ini dipakai untuk disewakan kepada pihak ketiga sementara 40% sisanya dipakai untuk kebutuhan kami. Kami berharap untuk mengalihkan sumber dari kebutuhan satelit kami dari Palapa-D ke Palapa-C2, sehingga menghasilkan kira-kira 40% dari kapasitas transponder C-band standar Palapa-D, sebagai tambahan bagi 11 *extended C-Band transponder* untuk Palapa-D yang baru ditambahkan, yang tersedia untuk penyewaan kepada pihak ketiga.

Satelit Palapa-D memiliki sebelas *extended C-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz, serta 24 standar *C-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz dan lima *Ku-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz yang sepenuhnya dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum dari masing-masing *C-band* dan *Ku-band transponder* adalah 43 dan 53 dBW. Satelit Palapa-D menyediakan cakupan *C-band* ke hampir seluruh wilayah Asia yang membentang dari Arabian Peninsula sampai Jepang dan dari Cina sampai Selandia Baru, termasuk Australia bagian tengah dan timur. Tingkat dBW-nya berkisar dari *beam edge* sebesar 32 dBW sampai dengan *beam center* sebesar 43 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-D mampu memberikan layanan *uplink* dan *downlink* dari manapun dalam cakupan layanan satelit. Lima *Ku-band transponder* mencakup wilayah Indonesia dan beberapa negara ASEAN dengan kekuatan *transponder* tertinggi sebesar 53 dBW.

Satelit Palapa-C2 memiliki enam *extended C-band transponder* 36-megahertz milik Pasifik Satelit Nusantara, dan dua puluh empat transponder C-band standar 36-megahertz serta empat Ku-band transponder 72-megahertz yang dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum pada setiap transponder C-band adalah 40 dBW. Karena lokasi baru Palapa-C2 dekat dengan satelit lain dengan rencana frekuensi Ku-band yang sama, kami, konsisten dengan peraturan dari International Telecommunication Union dan izin kami, tidak mengoperasikan transponder Ku-band untuk menghindari benturan berbahaya dari satelit lain. Satelit Palapa-C2 menyediakan cakupan C-band secara substansial di seluruh Asia, dengan jarak yang membentang dari Asia Tengah ke Jepang dan dari Cina bagian selatan ke Selandia Baru, termasuk beberapa bagian Australia. Tingkat dBW berkisar dari tepi 32 dBW ke pusat 40 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-C2 memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa *uplink* dan *downlink* dari lokasi manapun dalam jarak bentangan satelit.

Fiber Optic and Microwave Terrestrial Links. Backbone serat optik kami yang baru yang berbasis DWDM telah menghubungkan semua kota di propinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. *Backbone* serat optik menyediakan 40-60 *gigabits* per detik untuk lalu lintas selular di dalam maupun antar kota-kota dan juga menyediakan *physical layer* untuk peningkatan *broadband* internet kami secara progresif saat ini melalui 3.5 HSDPA dan akses *wireless broadband* tetap. Oleh karena pertimbangan kapasitas dan teknologi, sistem *terestria microwave* yang lama telah dipindahkan untuk mencakup *remote spur route areas*. Per tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki *fiber optic* dan *microwave terrestrial link* ke lebih dari 25 kota besar. Jaringan ini pada prinsipnya digunakan untuk layanan jasa Internet dan MIDI kepada pelanggan perusahaan.

Pada bulan Februari 2008, kami telah menandatangani kontrak dengan NEC, Jepang untuk pembuatan sistem kabel bawah laut, JAKABARE, yang baru yang diharapkan dapat menghubungkan Jawa, Kalimantan, Batam dan Singapura dan menyediakan kapasitas *bandwidth* yang tinggi untuk antar pulau dan kebutuhan *bandwidth* internasional dari/ke Indonesia untuk layanan selular dan MIDI. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk kapasitas *bandwidth* internasional dari/ke Singapura, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan sistem kabel internasional kami. Sistem ini akan sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan dan dirancang untuk dapat beroperasi selama 25 tahun. Sistem ini akan dilengkapi dengan kapasitas 160 *gigabits* per detik dengan kapasitas optimalnya yaitu 1,2 terrabits per detik. Pembangunan sistem kabel ini adalah proyek jangka panjang dan telah diluncurkan pada tanggal 17 November 2009. Sistem ini diperkirakan dapat mengakomodasi kebutuhan *bandwidth* kami sampai dengan tahun 2012. Sampai dengan akhir 2010, kami berencana untuk membelanjakan

sekitar US$1,2 juta untuk pengeluaran barang modal yang akan digunakan untuk pembangunan gedung, *backhaul* dan infrastruktur pendukung lainnya dari sistem kabel ini.

IP/MPLS Backbone dan *Metro Ethernet Network*. Per tanggal 31 Desember 2009, kami telah menyelesaikan proyek pemasangan jaringan Metro Ethernet di lebih dari 157 *point of presence* di Indonesia. Melalui jaringan ini, kami menyediakan leased line virtual yang menawarkan akses *point-to-point Ethernet*, jasa virtual private LAN yang menawarkan akses multipoint-to-multipoint Ethernet dan jaringan *virtual private routed* yang menawarkan IP VPN dan Internet yang terhubung secara lokal. Kami juga memakai Jaringan Metro Ethernet kami untuk melakukan *backhauling* terhadap trafik selular 2G dan 3G kami. *Dual redundant boxes IP-MPLS Core* di 10 kota telah ditempatkan dan dihubungkan melalui *backbone* serat optik. Jaringan Metro Ethernet juga telah ditempatkan di 9 kota besar untuk memberikan akses *broadband* bagi pasar korporasi di gedung-gedung pencakar langit dan backhaul selular untuk layanan 3.5 HSDPA. Layanan yang digunakan oleh para pelanggan kami, di antaranya adalah akses Internet, jasa penyiaran dan sambungan pusat data.

Karena teknologi saat ini bergerak ke arah "all IP" dan permintaan layanan berbasis IP meningkat akibat keuntungan atas jaringan lama, kami berniat untuk menempatkan jaringan di masa yang akan datang sehingga layanan-layanan berbasis IP tersedia secara luas di wilayah tersebut. Pada tahun 2008, kami merampungkan pembangunan *Disaster Recovery Center* ("DRC"), di Jatiluhur untuk pelanggan perusahaan agar mereka memeiliki pusat *back-up* data untuk mengamankan dan melindungi informasi bisnis mereka.

Struktur Organisasi

Bagan berikut ini merupakan struktur organisasi ringkas Perusahaan per 31 Desember 2009, termasuk kepemilikan langsung dan tidak langsung pada anak perusahaan penting kami dan yurisdiksi pendirian masing-masing anak perusahaan tersebut. Daftar lengkap mengenai anak-anak perusahaan kami dan investasi-investasi kami di perusahaan-perusahaan afiliasi yang bersifat signifikan, dan kepemilikan persentase saham kami di dalam masing-masing perusahaan, pada tanggal 31 Desember 2009 dimuat dalam Catatan 1d dari laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini.

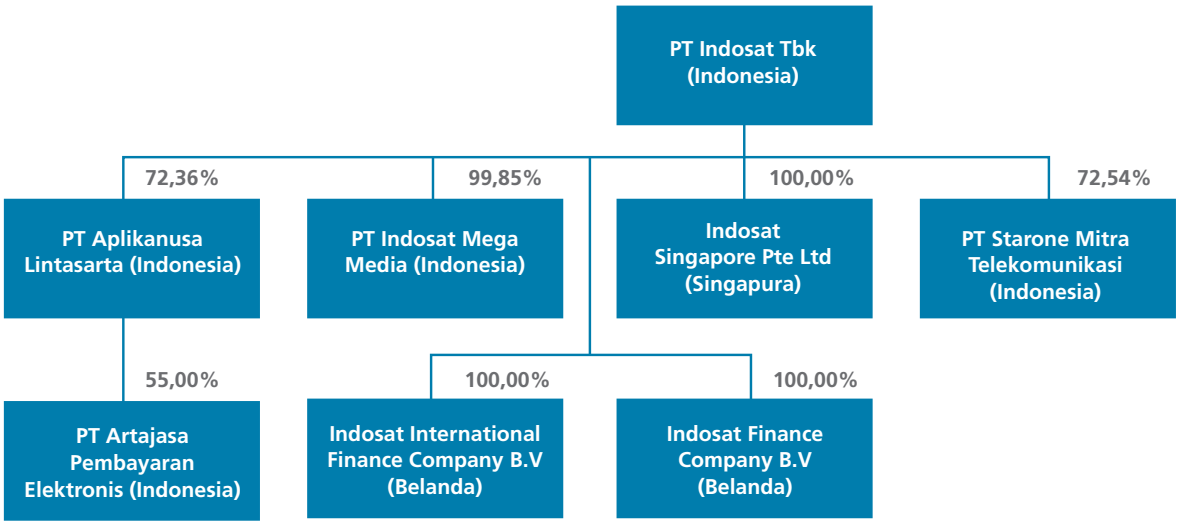

Lintasarta didirikan pada tahun 1988. Berdasarkan anggaran dasarnya, Lintasarta bergerak dalam usaha penyediaan layanan telekomunikasi sistem data dan teknologi informasi, serta aplikasi jaringan, yang mencakup penyediaan infrastruktur fisik dan aplikasi perangkat lunak dan layanan konsultasi pada sistem komunikasi dan informasi data untuk perbankan, keuangan dan industri lainnya.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

PT Indosat Mega Media ("IM2"), didirikan pada tahun 1996 untuk bergerak dalam usaha penyediaan layanan Internet dan televisi.

PT Starone Mitra Telekomunikasi ("SMT"), didirikan pada tahun 2006 untuk menyediakan layanan telekomunikasi dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi, termasuk multimedia.

PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("Artajasa"), didirikan pada tahun 2000 untuk menyediakan layanan perdagangan umum dan aplikasi untuk industri, terutama industri perbankan, konsultasi teknologi informasi dan jasa telekomunikasi.

Asuransi

Per tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan telah mengasuransikan tanah/bangunan dan perangkat (kecuali kabel laut dan hak atas tanah), termasuk asuransi terhadap risiko gangguan bisnis. Selama tahun 2009, kami tidak memiliki asuransi terhadap risiko kerugian yang terkait dengan barang yang diasuransikan. Secara umum, kami tidak mengalami kesulitan dalam memperpanjang polis asuransi dan kami yakin asuransi kami adalah wajar dan sesuai dengan standar industri.

Kami memiliki asuransi *in-orbit* di satelit Palapa-C2 dan Palapa-D dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan praktik industri. Pada tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki cakupan polis asuransi dengan total pertanggungan sebesar US$216,3 juta, untuk kerugian total dan sebagian dari satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami.

Sehubungan dengan Satelit Palapa-D baru kami, kami telah mengasuransikan satelit tersebut dengan total pertanggungan sebesar US$206,1 juta untuk kerugian total dan sebagian.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perusahaan telah mendaftarkan merek dagang dan hak cipta untuk nama, logo dan beberapa jasa dari Perusahaan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Kami yakin bahwa merek dagang kami adalah penting untuk keberhasilan kami. Kami tidak pernah melakukan pembelaan terhadap salah satu dari merek dagang kami, akan tetapi kami akan melakukannya secara sungguh-sungguh, bilamana diperlukan.

Aset Tetap

Kecuali hak milik yang diberikan kepada perorangan di Indonesia, hak atas tanah dimiliki oleh Negara Indonesia berdasarkan Hukum Agraria No. 5/1960. Penggunaan tanah dapat dilakukan dengan hak atas tanah dimana pemegang hak atas tanah dapat menggunakan tanah sepenuhnya untuk jangka waktu yang ditentukan, yang mana dapat diperbaharui dan diperpanjang. Dalam banyak hal, hak atas tanah bebas diperjualbelikan dan dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman.

Aktiva tetap kami yang terpenting berada di Jakarta (sekitar 12.045 m^2 digunakan sebagai *international gateway* dan kantor pusat), Ancol (sekitar 11.889 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut dan digunakan sebagai pusat *switching*), Tanjung Pakis, Karawang (sekitar 1.850 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Daan Mogot (sekitar 130.000 m^2 digunakan sebagai kompleks stasiun bumi), Medan (sekitar 6.780 m^2 digunakan sebagai *international gateway*), Jatiluhur (sekitar 135.850 m^2 digunakan sebagai kompleks stasiun bumi), Pantai Cermin (sekitar 68.228 m^2 digunakan sebagai stasiun bumi dan stasiun kabel laut), Batam (sekitar 2.000 m^2 digunakan sebagai *international gateway* dan stasiun bumi), Tanjung Bemban (sekitar 3.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Surabaya (sekitar 11.246 m^2 digunakan sebagai kantor regional) dan Banyu Urip-Gresik (sekitar 141.905 m^2 digunakan sebagai stasiun bumi dan *international gateway* dan stasiun kabel laut), Takisung – Banjarmasin (sekitar 1.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Aeng Batu-batu-Makasar (sekitar 2.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut) dan Sei Kakap Pontianak (sekitar 5.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut). Kecuali untuk Aset tetap kami di

Daan Mogot, yang kami sewa dari Telkom, kami memegang hak atas tanah atas sebagian besar Aset tetap kami untuk jangka waktu awal berkisar antara 20 sampai dengan 30 tahun. Kami perkirakan hak atas tanah kami akan diperbaharui dengan biaya nominal di kemudian hari. Tidak ada satupun dari aktiva tetap kami yang dibebankan dengan hak tanggungan atau dibebankan dengan cara lain.

Alamat Kantor-Kantor Utama

Kantor Pusat:	Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 3001, 3869 999 Fax: (62-21) 3000 3754, 3000 3757
Kantor Regional Jabotabek & Banten	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 7001 Fax: (62-21) 3000 5702
Kantor Regional Sumatera Utara	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39 Medan 20236, Indonesia Tel: (62-61) 4567 001 Fax: (62-61) 4537 372
Kantor Regional Sumatera Selatan	Jl. Angkatan 45 No. 222 Palembang 30137, Indonesia Tel: (62-711) 605 9999 Fax: (62-711) 9966, 605 9977
Kantor Regional Jawa Tengah & DI Yogyakarta	Jl. Pandanaran No. 131 Semarang 50134, Indonesia Tel: (62-24) 8447 186/3300 2000 Fax: (62-24) 8447 187/3300 1001
Kantor Regional Jawa Barat	Jl. Asia Afrika No. 141-147 Bandung 40111, Indonesia Tel: (62-22) 3000 0900 Fax: (62-22) 4200 001
Kantor Regional Jawa Timur & Bali Nusra	Jl. Kayoon No. 72 Surabaya 60271, Indonesia Tel: (62-31) 5455 001 Fax: (62-31) 5322 982, 5464 414
Kantor Wilayah Sulampapua	Jl. Slamet Riyadi No. 4 Makassar 90111, Indonesia Tel: (62-411) 326 808 Fax: (62-411) 326 828
Kantor Regional Kalimantan	Jl. MT Haryono No. 69 Balikpapan 76114, Indonesia Tel: (62-542) 741 001, 3030 001 Fax: (62-542) 7514 001, 7206 750

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Industri Telekomunikasi Indonesia

Latar Belakang

Sejak tahun 1961, jasa telekomunikasi di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi merupakan hal yang penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara umum. Selain itu, banyaknya penduduk dan meningkatnya perekonomian Indonesia telah menyebabkan meningkatnya permintaan atas jasa telekomunikasi.

Pada tahun 2008, Indonesia memiliki penduduk sekitar 227,35 juta orang, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia berdasarkan perkiraan International Telecommunications Union. *Gross Domestic Product* atau GDP Indonesia telah meningkat secara signifikan dari US$208,3 miliar di tahun 2003 menjadi US$514,4 miliar di tahun 2008 dalam mata uang Dolar AS saat ini menurut data Bank Dunia, yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 6,1%. Tingkat pertumbuhan ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan GDP sekitar 2,6% dan sekitar 4,5% yang dialami oleh Thailand dan Malaysia dalam periode yang sama. Menurut Bank Dunia, GDP per kapita pada tingkat daya beli juga telah meningkat dari US$2.823 di tahun 2003 menjadi US$3.975 di tahun 2008.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan untuk mengatur dan memiliki kendali pengawasan yang besar atas sektor telekomunikasi. Meskipun Pemerintah secara historis telah mempertahankan praktek monopoli di sektor jasa telekomunikasi di Indonesia, reformasi hukum baru-baru ini yang sebagian besar sudah berlaku sejak tanggal 8 September 2000 telah berupaya untuk membuat kerangka hukum yang mendukung persaingan usaha dan mempercepat investasi infrastruktur pada fasilitas-fasilitas telekomunikasi.

Di Indonesia, sebagian besar jasa telepon tetap diselenggarakan oleh Telkom, yaitu badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, yang memiliki dan menyelenggarakan PSTN dan titik akses telepon tetap nirkabel. Sebelum pelaksanaan peraturan interkoneksi yang baru, operator telekomunikasi terinterkoneksi dengan jaringan Telkom guna mengakses semua pengguna telepon tetap dan selular. Monopoli telepon tetap lokal Telkom berakhir pada tanggal 1 Agustus 2002, dan kami sejak saat itu mulai membangun jaringan tetap tersendiri. Menurut peraturan interkoneksi yang baru, para operator telekomunikasi dapat mengadakan perjanjian bilateral yang memungkinkan mereka untuk melakukan interkoneksi secara langsung dengan operator telekomunikasi lainnya.

Meskipun laju penetrasi selular relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, berdasarkan estimasi International Telecommunications Union, laju penetrasi selular Indonesia telah meningkat dari sekitar 21,4% di tahun 2005 menjadi sekitar 61,8% di tahun 2008, dengan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 44,17%. Profil pertumbuhan GDP dan laju penetrasi yang relatif rendah menunjukkan adanya potensi peningkatan pelanggan selular di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2008, jumlah telepon tetap, termasuk akses telepon tetap nirkabel, adalah sekitar 30,4 juta, yang mencerminkan penetrasi telepon tetap sebanyak 13,36%, yaitu salah satu yang terendah di wilayah Asia dan sebagai akibatnya hal ini mengakibatkan pertumbuhan telepon tetap yang stagnan berdasarkan sistem peraturan yang lama. Tabel di bawah ini merupakan rangkuman beberapa informasi mengenai laju penetrasi selular dan telepon tetap di Indonesia dan wilayah Asia pada tahun 2008:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008			
	Penduduk[1]	Penetrasi Telepon Tetap[1]	Penetrasi Selular[1][2]	GDP per kapita[3]
	(Juta)			(US$)
Hong Kong	6,98	58,9%	163%	43.922
Singapura	4,62	40,2%	138%	49.288
Korea Selatan	48,15	44,3%	94,7%	27.939
Malaysia	27,01	15,9%	100,4%	14.215
Thailand	67,39	10,4%	92%	7.703
Philipina	90,35	4,3%	75,4%	3.510
China	1.337,41	27,3 %	47,4%	5.962

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008			
	Penduduk[1]	Penetrasi Telepon Tetap[1]	Penetrasi Selular[1][2]	GDP per kapita[3]
	(Juta)			(US$)
India	1.181,41	3,2%	29,4%	2.972
Indonesia	227,35	13,4%	61,8%	3.975

(1) *Sumber*: International Telecommunications Union World Telecommunication / ICT Indicators Database & World Bank estimates, ICT Statistics 2008.
(2) Penetrasi selular adalah persentase jumlah pelanggan selular dan populasi penduduk.
(3) *Sumber*: World Bank 2008.

Pasar Jasa Selular

Industri telekomunikasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di sektor jasa telekomunikasi selular beberapa tahun terakhir ini. International Telecommunications Union memperkirakan jumlah keseluruhan pelanggan selular di Indonesia meningkat dari sekitar 47,0 juta per tanggal 31 Desember 2005 menjadi sekitar 141,0 juta per tanggal 31 Desember 2008, yang merupakan peningkatan laju penetrasi selular dari sekitar 21,4% menjadi sekitar 61,8%. Terlepas dari tingkat pertumbuhan yang cepat ini, laju penetrasi selular sebesar 61,8% per tanggal 31 Desember 2008 relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia.

Tabel berikut ini memuat informasi berkenaan dengan industri telekomunikasi di Indonesia untuk periode yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember,				
	2005	2006	2007	2008	Tingkat pertumbuhan keseluruhan dari tahun 2005 – 2008
	(dalam juta, kecuali persentase)				
Penduduk Indonesia[1]	219	222	225	227	1,22%
Pelanggan Selular[1]	47	64	93	141	44,17%
Penetrasi Selular[2]	21,4%	28,7%	41,6%	61,8%	42,43%

(1) *Sumber*: International Telecommunications Union World Telecommunication / ICT Indicators Database ICT Statistics 2008, tidak termasuk jasa nirkabel telepon tetap.
(2) Penetrasi selular merupakan jumlah pelanggan selular yang dinyatakan dalam persentase penduduk Indonesia.

Pasar nirkabel di Indonesia saat ini telah didominasi oleh tiga operator GSM terbesar: Telkomsel, kami dan XL. Sejak tahun 2002, Pemerintah telah mengeluarkan ijin penyelenggaraan jasa selular yang baru dengan menggunakan teknologi CDMA kepada Mobile-8 dan ijin penyelenggaraan jasa akses telepon tetap nirkabel dengan menggunakan teknologi CDMA kepada Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Per 31 Desember 2009, berdasarkan perkiraan kami, para operator GSM berskala nasional ini secara bersama-sama telah menguasai sekitar 80,0% dari pangsa pasar nirkabel Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2009, Telkomsel merupakan penyelenggara jasa selular nasional terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggannya berkisar 81,6 juta dan menguasai lebih dari sekitar 50,0% dari pangsa pasar GSM. Kami adalah penyelenggara jasa selular terbesar kedua dengan jumlah pelanggan berkisar 33,1 juta dan menguasai sekitar 23,0% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. XL, penyelenggara terbesar ketiga, memiliki sekitar 31,4 juta pelanggan dan menguasai sekitar 21,0% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. Sedangkan jasa akses telepon tetap nirkabel didominasi oleh Telkom dengan merek Flexi dengan jumlah pelanggannya sekitar 15,1 juta, berdasarkan laporan triwulanan Telkom pada Desember 31, 2009. Penyelenggara terbesar kedua adalah Bakrie Telecom dengan merek Esia dengan jumlah pelanggan sebesar 10,6 juta pelanggan, berdasarkan laporan manajemen tahunan tahun 2009. Kami merupakan penyelenggara terbesar ke-tiga dengan jumlah pelanggan sebanyak 594.133 dengan merek StarOne. Terdapat juga beberapa pemain lainnya dengan skala lebih kecil dalam pasar nirkabel Indonesia seperti HCPT, NTS, Mobile-8, Smart Telecom dan STI.

Pertumbuhan jumlah pelanggan nirkabel di Indonesia sebagian dipacu oleh sistem "*calling party pays*", peluncuran jasa pra-bayar, serta diperkenalkannya layanan SMS. Sistem "*calling party pays*" mengharuskan pihak asal sambungan telepon membayar tarif telepon. Berdasarkan pengalaman di lingkungan internasional, negara-negara yang menjalankan sistem "*calling party pays*" umumnya mengalami laju penetrasi telepon nirkabel yang lebih

tinggi karena para pelanggan telepon nirkabel lebih besar kemungkinannya untuk memberikan nomor teleponnya dan tetap membiarkan telepon genggamnya dalam keadaan hidup.

Sejak peluncurannya di tahun 1998, layanan pra-bayar telah populer di Indonesia, sebagaimana yang terjadi juga di negara-negara lainnya di Asia karena layanan pra-bayar ini memungkinkan para pelanggannya untuk berlangganan telepon nirkabel tanpa perlu melewati prosedur pemeriksaaan atas sejarah kredit mereka. Layanan pra-bayar juga memberikan lebih banyak kontrol pada para pelanggan atas pengeluaran bulanan mereka. SMS telah terbukti populer di Indonesia, terutama pada layanan pra-bayar karena memberikan alternatif lain yang nyaman dan hemat biaya daripada komunikasi suara dan e-mail. Persaingan di industri layanan nirkabel Indonesia terutama terjadi dalam hal kualitas layanan, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur nilai tambah seperti voice mail dan SMS.

Pasar Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional

Penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional di Indonesia memperoleh pendapatan dari trafik jarak jauh internasional baik ke dalam maupun ke luar negeri. Tiga penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional adalah Telkom yang memberikan layanan "007", Bakrie Telecom dengan kode akses "009" dan kami dengan kode akses "001" dan "008". Tarif ke luar negeri ditetapkan oleh Menkominfo, sedangkan tarif ke dalam negeri dihitung berdasarkan *accounting rate* yang berlaku. Trafik ke luar negeri berasal dari pelanggan telepon tetap dan selular dan dikirimkan ke tiga penyelenggara layanan internasional secara langsung melalui *international gateway* atau secara tidak langsung melalui PSTN Telkom. Trafik sambungan internasional ke dalam negeri diterima di *international gateway* dan diarahkan ke tujuan yang dimaksud dari *international gateway* atau melalui jaringan PSTN Telkom yang pada akhirnya dialihkan ke tujuan yang dimaksud.

Di Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara yang pasarnya yang mulai berkembang, trafik komunikasi ke dalam negeri melebihi trafik komunikasi ke luar negeri dimana banyak negara-negara maju memperoleh penghasilan dari trafik sambungan jarak jauh internasional yang tidak berimbang.

Secara historis, trafik antar-operator diselesaikan berdasarkan konsep *accounting rate* yaitu metode kompensasi penyelenggara asal dan akhir. Umumnya, penyelenggara sambungan jarak jauh internasional melakukan negosiasi *accounting rate* per menit atas dasar *route-by-route* dengan menggunakan satu tarif yang dipakai oleh semua penyelenggara di *route* tersebut. Pada tahun 2003, kami mulai mengganti sistem *accounting rate* dengan sistem berbasis tarif terminasi pasar dengan beberapa pihak penyelenggara telekomunikasi asing, dimana kami menyetujui tarif asimetris untuk sambungan ke dalam maupun ke luar negeri. Berdasarkan sistem berbasis tarif terminasi pasar, kami dapat mengurangi tarif yang kami harus bayar untuk sambungan ke banyak tujuan internasional dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif sambungan dari tujuan tersebut ke Indonesia. Meskipun sistem tarif ini mengurangi tarif yang kami terima untuk sambungan ke dalam negeri, kami yakin bahwa secara keseluruhan hal ini dapat meningkatkan marjin kami untuk jasa sambungan jarak jauh internasional, terutama sambungan ke luar negeri.

Persaingan antar para penyelenggara VoIP yang menawarkan layanan seperti telepon hemat, yaitu "01017" yang ditawarkan Telkom dan "FlatCall 01016" yang ditawarkan oleh kami, dan kartu telepon pra-bayar telah mulai dan diperkirakan akan berdampak negatif pada pendapatan yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional yang telah ada.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur komunikasi data di Indonesia, permintaan atas layanan VoIP meningkat. VoIP menggunakan koneksi komunikasi data untuk memindahkan trafik suara ke Internet, yang biasanya menghemat banyak biaya bagi para pelanggan.

Meskipun Pemerintah telah memberlakukan sistem perijinan untuk membatasi jumlah operator VoIP di Indonesia, Pemerintah saat ini tidak lagi mengendalikan tarif yang dikenakan kepada para pengguna akhir dari layanan VoIP. Akan tetapi, Pemerintah telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk mengatur tarif tersebut di kemudian hari, dan diperkirakan peraturan tersebut akan membatasi tarif VoIP menjadi setara dengan tarif diskon maksimum pada kisaran 40,0% dari tarif PSTN yang berlaku saat ini.

Pasar Komunikasi Data

Secara historis, layanan data di Indonesia terutama terdiri dari layanan *narrow bandwidth leased line*, layanan x.25, layanan jaringan data digital dan layanan jaringan digital terpadu. Layanan jaringan data digital merupakan layanan *digital leased line* untuk transmisi data. Layanan jaringan digital terpadu merupakan protokol yang memberikan akses *dial-in* berkapasitas tinggi untuk jaringan publik. Jenis protokol ini dapat menangani trafik suara dan data dalam bentuk digital secara bersamaan pada sambungan digital yang sama melalui *integrated switches* melewati jaringan publik. Layanan x.25 merupakan protokol *open standard packet switching* yang dapat membuat terminal berkecepatan rendah sampai menengah memperoleh akses *dial-in* atau permanen ke jaringan dari tempat pengguna dan beroperasi pada jaringan. Tarif untuk layanan-layanan ini menurun pada beberapa tahun terakhir ini.

Meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya aplikasi multimedia diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas layanan data *broadband* yang canggih. Para operator di Indonesia tengah mempergunakan jaringan *broadband* tingkat lanjut agar dapat memberikan jasa *high-end* data, seperti jasa *frame relay*, *asynchronous transfer mode* dan *Internet protocol*. Secara khusus, layanan virtual *private network*, yang menggunakan ATM dan teknologi *Internet protocol*, dapat mengambil bagian yang lebih besar dari pangsa pasar karena layanan ini memberikan alternatif lain yang dapat diandalkan dan hemat biaya bagi jaringan privat yang bergantung pada *dedicated leased lines*.

Pasar Jasa Layanan Satelit

Beberapa tahun terakhir ini, persaingan yang semakin ketat terjadi di pasar satelit Asia-Pasifik. Perusahaan-perusahaan di bisnis ini bersaing terutama dalam hal kemampuan cakupan, penawaran produk dan harga.

Pada tanggal 6 September 2005, melalui KM 13/2005, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua operator telekomunikasi yang menggunakan satelit dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk memiliki ijin penyelenggaraan stasiun bumi dan stasiun luar angkasa. Ijin-ijin ini hanya diberikan kepada operator telekomunikasi yang memiliki *landing right* dan dengan ketentuan bahwa spektrum frekuensi yang digunakannya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap para operator yang ada. Satelit asing diperkenankan untuk beroperasi di Indonesia apabila operator telekomunikasi Indonesia memiliki hak penyelenggaraan yang bersifat timbal balik di negara asal satelit tersebut.

Trend Industri

Kami meyakini bahwa trend industri telekomunikasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Jasa Nirkabel

- Pertumbuhan yang terus berlanjut di sektor telekomunikasi nirkabel. Kami memperkirakan industri telekomunikasi nirkabel dan permintaan atas layanan telekomunikasi nirkabel akan terus tumbuh seiring dengan semakin berkembang dan semakin modernnya Indonesia.
- Migrasi trafik suara dan data ke nirkabel. Kami mengantisipasi bahwa layanan nirkabel akan semakin populer oleh karena meluasnya daerah cakupan dan meningkatnya kualitas jaringan nirkabel, menurunnya tarif telepon genggam dan semakin banyaknya layanan pra-bayar.
- Pertumbuhan yang signifikan pada tingkat penetrasi nirkabel di wilayah luar Jawa. Tingkat penetrasi nirkabel yang relatif rendah di luar Jawa memberikan potensi besar untuk para penyelenggara layanan nirkabel di Indonesia karena penduduk yang tinggal di luar Jawa semakin makmur.
- Pertumbuhan penggunaan jasa nilai tambah. Pertumbuhan tingkat penggunaan jasa nilai tambah, seperti SMS, *content* dan akses internet diharapkan meningkat di tahun-tahun mendatang, oleh karenanya akan membantu menstabilkan penurunan tingkat penggunaan dan ARPU untuk layanan suara.
- Meningkatnya persaingan dengan masuknya para operator nirkabel yang baru ke dalam pasar.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional

- *Meningkatnya persaingan di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional*. Kami memperkirakan akan terjadi deregulasi Pemerintah dan peningkatan kualitas layanan VoIP untuk meningkatkan persaingan dengan jasa sambungan jarak jauh internasional.
- *Pertumbuhan jumlah sambungan telepon yang cukup*. Kami yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan akan mendorong peningkatan jumlah layanan sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pertumbuhan layanan VoIP juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas jasa sambungan jarak jauh internasional.

Jasa MIDI

- *Meningkatnya permintaan atas layanan komunikasi data tingkat lanjut*. Kami yakin bahwa meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya pasar untuk aplikasi multimedia dapat meningkatkan permintaan atas layanan komunikasi data yang canggih.
- *Semakin ketatnya persaingan di pasar ISP*. Sebagai dampak dari liberalisasi pasar dan terus diterbitkannya ijin-ijin baru, kami mengantisipasi bahwa persaingan di pasar ISP akan meningkat. Kami yakin persaingan akan terjadi terutama dalam hal harga, kualitas layanan dan cakupan jaringan.
- *Meningkatnya permintaan atas layanan broadband*. Kami yakin akan terjadi peningkatan preferensi dan permintaan pelanggan atas akses Internet berkecepatan tinggi yang mana akan mendorong pertumbuhan layanan *broadband* dalam negeri.

Peraturan Industri Telekomunikasi Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menkominfo, memiliki kewenangan dan memegang kendali regulasi dan melaksanakan kebijakan yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Kerangka hukum industri telekomunikasi didasarkan pada beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri dan direktorat jenderal yang diberlakukan dan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Sebelum bulan Maret 1998, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah instansi yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Setelah pemilihan umum tahun 1999 dan pergantian Pemerintahan di tahun 2001, Departemen Perhubungan mengambil alih tanggung jawab pengaturan industri telekomunikasi. Pada bulan Februari 2005, kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi dialihkan dari Departemen Perhubungan ke Departemen Komunikasi dan Informatika.

Melalui Menkominfo, Pemerintah mengatur penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Selain itu, Menkoninfo mengatur alokasi spektrum frekuensi radio untuk semua operator telekomunikasi, yang diwajibkan untuk memperoleh ijin dari DJPT, untuk setiap layanan yang menggunakan spektrum frekuensi. Selain tarif spektrum frekuensi radio, Pemerintah mewajibkan semua operator telekomunikasi untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) sebesar 0,5% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan penyisihan untuk piutang macet, untuk setiap tahun buku, yang harus dibayar dengan cicilan setiap triwulanan.

Kebijakan reformasi telekomunikasi Pemerintah diformulasi dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi" tanggal 17 September 1999. Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah untuk:

- meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi;
- meliberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur persaingan melalui penghapusan praktek monopoli;
- meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kerangka peraturan;
- menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan mitra asing; dan
- menciptakan peluang bisnis untuk usaha berskala kecil dan menengah dan memfasilitasi peluang kerja yang baru.

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia baru-baru ini didasarkan pada Undang-Undang Telekomunikasi.

Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2000 dan mengatur pedoman penting untuk reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, kemudahan bagi para pemain baru dan mendorong persaingan. Pemerintah menetapkan pedoman melalui peraturan pemerintah, keputusan atau peraturan menteri dan keputusan-keputusan dari instansi pemerintah. Undang-Undang Telekomunikasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan, untuk membuat kebijakan dan untuk mengatur, mengawasi dan melakukan kontrol atas industri telekomunikasi. Sampai pada tahun 2005, Menteri Perhubungan adalah badan pembuat peraturan untuk industri telekomunikasi, yang memiliki wewenang atas sektor telekomunikasi di Indonesia dan dapat mengeluarkan peraturan melalui keputusan menteri, membuat kebijakan dan menerbitkan izin serta membuat formulasi tarif.

Peraturan Pemerintah No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi") dan Peraturan Pemerintah No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit diberlakukan sebagai peraturan-peraturan pelaksana pertama dari Undang-Undang Telekomunikasi. Departemen Perhubungan juga mengeluarkan berbagai keputusan, yaitu: (i) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/2001, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010, tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Peraturan Jaringan Telekomunikasi"), (ii) Peraturan Menteri Perhubungan No. 21/2001, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008, tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ("Peraturan Jasa Telekomunikasi"), dan (iii) Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 yang selanjutnya dibatalkan dengan Keputusan Menkominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/2008 dan selanjutnya diubah dengan Keputusan Menkominfo No. 31/PER/M.KONINFO/8/2009 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi").

Pada tanggal 11 Juli 2003, Menteri Perhubungan mengeluarkan Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi, berdasarkan mana Menteri Perhubungan mendelegasikan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi di Indonesia kepada BRTI, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk industri telekomunikasi. BRTI pertama kali dibentuk pada bulan Januari 2004, yang terdiri dari tujuh anggota, termasuk jabatan ketua yang dipegang oleh DJPT, dari DJPT, dan Komite Regulasi dan Informatika. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi diangkat oleh Menkominfo. Seluruh anggota Komite Regulasi Telekomunikasi: (i) harus berwarga negara Indonesia; (ii) memiliki keahlian profesional di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, ekonomi, hukum atau ilmu sosial; (iii) tidak memiliki kepentingan apapun di salah satu operator telekomunikasi; dan (iv) tidak diangkat sebagai direktur atau komisaris di salah satu operator telekomunikasi.

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 67 tahun 2003 mengatur hubungan antara Menteri Perhubungan (dan selanjutnya Menkominfo) dan BRTI. Dalam menjalankan fungsi pengaturan, BRTI diberikan kewenangan untuk: (i) melakukan pemberian ijin untuk jaringan dan jasa telekomunikasi sesuai dengan kebijakan Menkominfo dan (ii) mengusulkan kepada Menkominfo standar pelaksanaan operasional, jasa, biaya interkoneksi dan peralatan untuk jaringan dan jasa telekomunikasi. BRTI diberikan kewenangan untuk mengawasi dan diminta untuk melaporkan kepada Menkominfo atas: (i) pelaksanaan standar operasional, (ii) persaingan antara operator jaringan dan jasa, dan (iii) pemenuhan standar penggunaan peralatan telekomunikasi. Dalam menjalankan fungsi pengendalian, BRTI juga diminta untuk melaporkan kepada Menkominfo atas: (i) perkembangan penyelesaian sengketa diantara operator jaringan dan jasa, (ii) mengawasi penggunaan peralatan telekomunikasi, dan (iii) pelaksanaan standar kualitas jasa.

Penggolongan Penyelenggara Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi menggolongkan penyelenggara telekomunikasi menjadi: (i) penyelenggara jaringan telekomunikasi, (ii) penyelenggara jasa telekomunikasi, dan (iii) penyelenggara telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan Telekomunikasi lebih lanjut digolongkan ke dalam: (i) penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap dan (ii) penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak selular. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi,

untuk setiap kategori penyelenggara telekomunikasi diperlukan ijin. Penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan ijin untuk memiliki dan/atau menyelenggarakan jaringan telekomunikasi. Sebaliknya, pemilik ijin penylenggara jasa telekomunikasi diberikan izin untuk menyelenggarakan jasa, tetapi tidak diharuskan untuk memiliki jaringan sendiri. Ijin telekomunikasi khusus diperlukan untuk para penyelenggara jasa telekomunikasi privat atau untuk keperluan yang berkaitan dengan penyiaran dan keperluan keamanan nasional. Peraturan Jaringan Telekomunikasi mengatur bahwa ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dikeluarkan oleh Menkominfo. Peraturan Jasa Telekomunikasi membedakan ijin penyelenggaraan jasa telepon dasar yang dikeluarkan oleh Menkominfo dan ijin penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon dan multimedia yang dikeluarkan oleh DJPT.

Pengakhiran Hak Eksklusifitas

Pada tahun 1995, Telkom diberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon tetap lokal sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dan layanan SLJJ sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Sementara Indosat dan Satelindo (yang selanjutnya bergabung dengan Indosat) diberikan hak duopoli untuk secara eksklusif menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon dasar internasional sampai dengan tahun 2004.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Telekomunikasi dan Keputusan Menkominfo No. 21 (2001), Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Telkom dan hak duopoli yang sebelumnya diberikan kepada Indosat dan Satelindo. Pemerintah mengadopsi kebijakan duopoli agar kami dan Telkom bersaing sebagai penyelenggara jasa dan jaringan terpadu.

Pasar untuk penyediaan layanan SLI telah dibebaskan pada bulan Agustus 2003 dengan diakhirinya hak eksklusif Indosat dan Satelindo. Kami mulai menyediakan jasa telepon tetap sejak tahun 2002 dan jasa telepon nirkabel serta SLJJ pada tahun 2003, setelah menerima izin SLJJ kami. Telkom telah menerima izin layanan SLI dan mulai menawarkan layanan SLI dengan kode akses internasional "007" pada tahun 2004 yang bersaing langsung dengan kami.

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan sambungan SLJJ. Pada tanggal 1 April 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan bahwa Menkominfo akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada tanggal 3 Desember 2007, Menkominfo mengundangkan Keputusan Menteri No. 43/P/M.KOMINFO/12/2007, yang mengundurkan tanggal pelaksanaan kode akses SLJJ menjadi tanggal 3 April 2008 dan juga menetapkan jadwal pelaksanaan akses sambungan jarak jauh "01X". Pada bulan Januari 2007, Pemerintah telah menetapkan peraturan baru mengenai interkoneksi dan sistem akses kode lima angka untuk jasa VoIP. Pada April 2008, kode akses tersebut telah digunakan di Balikpapan. Penduduk Balikpapan dapat memilih menggunakan "0", "01016" atau "01017" pada saat mereka melakukan telepon jarak jauhnya. Apakah kode akses SLJJ akan dilaksanakan di kota-kota lain akan tergantung pada studi yang dilakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atas pelanggan jasa telepon tetap Indosat dan Telkom.

Tarif Jasa Jaringan Tetap dan Selular

Menkominfo bertanggung jawab untuk mengatur dan menyesuaikan formula tarif. Pada tahun 2006, Menkominfo mengeluarkan keputusan-keputusan kementerian seperti: (i) No. 8/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang interkoneksi berbasis biaya, (ii) No. 2/PER/M.KOMINFO/1/2006, (iii) No. 4/PER/M.KOMINFO/1/2006, No. 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2006 tentang Ketentuan Jasa 3G, (iii) No. 5/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Warung Telekomunikasi, (iv) No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006 sebagaimana diubah dengan No. 12/PER/M.KOMNFO/4/2008 tentang Tarif Telekomunikasi Telepon Tetap, (v) No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Penyadapan Sah, (vi) No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 yang digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tarif Selular, dan (vii) No. 102/Kep/M.KOMINFO/10/2006 tentang 2G dan 3G Ijin Jaringan Selular sebagaimana diubah dengan keputusan Mekominfo No. 181/2006 tentang Migrasi Jaringan FWA menuju Frekuensi Alokasi

800MHz. Pada tahun 2007, Menkominfo mengeluarkan keputusan-keputusan Menteri, termasuk No. 162/2007 tentang alokasi aliran frekuensi radio 800 MHz untuk pengoperasian FWA-CDMA dan selular (perubahan keputusan Menteri No. 181/2006), Peraturan Menkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang petunjuk pelaksanaan tarif pada kontribusi USO, No. 3/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang sewa jaringan, No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 (sekarang No. 38/2007) yang mengatur pelaksanaan pengembangan infrastruktur menggunakan dana USO dan Peraturan Menkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/12/2007 tentang penggantian keempat FTPs (Rencana Teknis Dasar/Fundamental Technical Plans) – 2000 yang mengganti tanggal pelaksanaan dari kode akses jarak jauh di Balikpapan menjadi tanggal 3 April 2008. Pada bulan April 2008, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri No. 9/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang penentuan tarif untuk jasa selular, yang menentukan tarif untuk tipe dan struktur retail selular berdasarkan formula dan Peraturan Menteri No. 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 yang mengatur mengenai tarif baru layanan selular termasuk layanan teleponi dasar melalui jaringan tetap. Jenis tarif tersebut terdiri dari jasa layanan telepon dasar, layanan roaming dan multimedia struktur tarif terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan layanan tambah nilai. Tarif tertinggi untuk layanan selular retail tiap operator akan berbeda sebagai akibat dari perbedaan metode perhitungan antar operator. Berdasarkan peraturan baru tersebut, tarif untuk jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap dan SMS sebagai fasilitas tambahan harus diperhitungkan oleh operator dengan menggunakan formula berbasis biaya dengan hasil penghitungan yang dinyatakan sebagai batas maksimum tarif. Pemerintah diharapkan untuk mengubah tarif formula untuk telekomunikasi tetap di kemudian hari. Pemerintah mengatur formula tarif untuk sewa jaringan berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007.

Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Telekomunikasi, masing-masing penyelenggara harus memenuhi tingkat pelayanan tertentu. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas kerugian kepada penyelenggara telekomunikasi.

Peraturan Menkominfo tentang standar penyediaan layanan dapat ditemukan di: (i) Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Tetap Lokal, (ii) Peraturan Menkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Bergerak Selular, dan (iii) Peraturan Menkominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Tetap dengan mobilitas terbatas.

Telepon Umum

Berdasarkan izin telekomunikasi tetap untuk jasa teleponi dasar yang kami miliki, kami mempunyai kewajiban untuk menyediakan telepon umum sejumlah 3,0% dari total kapasitas jaringan yang dipasang untuk jaringan telekomunikasi tetap yang telah kami bangun.

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations)

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, semua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal ("USO"), yang mengharuskan semua penyelenggara untuk ikut serta dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai wilayah USO oleh Menkominfo. USO dimaksudkan untuk menyediakan akses telekomunikasi dan/atau jasa di area-area yang sebelumnya belum ada akses atau jaringan.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 28/2005 dan Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/9/2005, Pemerintah mengumumkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembayaran USO dan mengubah tarif USO dari Rp750 untuk setiap telepon internasional keluar atau masuk menjadi 0,75% dari jumlah pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi yang telah dibayar kepada penyelenggara telekomunikasi dan piutang tidak lancar. Perdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7/2009, Pemerintah meningkatkan tarif USO dari 0,75% menjadi 1,25%.

Pada bulan Maret 2004, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No. 34/Tahun 2004 yang memuat spesifikasi pelaksanaan program dan zona USO, persyaratan teknis, pengoperasian, pendanaan dan monitor ("KM 34/2004"). KM 34/2004 digantikan dengan Peraturan Menteri No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 yang kemudian diubah dengan

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Peraturan Menteri No. 38/PER/M.KOMINFO/09/2007 yang mengatur prosedur penggunaan dana USO untuk keperluan pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi di wilayah dimana tidak ada jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2008 (sebagaimana diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/02/2010) yang menggantikan Peraturan Menteri No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007. Berdasarkan peraturan ini, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memenangkan tender untuk menyediakan jasa telekomunikasi di daerah yang belum ada jaringan telekomunikasi ("Daerah USO") akan menggunakan dana yang dikumpulkan dari tarif USO untuk menyediakan akses dan layanan telekomunikasi, termasuk layanan teleponi, SMS, dan akses internet. Dalam menyediakan layanan telekomunikasi di Daerah USO, penyelenggara telekomunikasi memiliki hak untuk: (i) menggunakan teknologi, (ii) menandatangani perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, dan (iii) menggunakan frekuensi spektrum 2.390 – 2400 MHz.

Pengaturan Interkoneksi

Sesuai dengan larangan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan para penyelenggara jaringan untuk memperbolehkan para pengguna dari satu jaringan mengakses para pengguna atau layanan pada jaringan lainnya dengan membayar tarif yang disepakati oleh setiap penyelenggara jaringan. Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur bahwa tarif interkoneksi antara dua atau lebih penyelenggara jaringan harus bersifat transparan, disepakati bersama dan adil.

Pada tanggal 8 Februari 2006, melalui Peraturan Mekominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/02/2006, Pemerintah mengeluarkan peraturan interkoneksi yang baru yang merupakan peraturan interkoneksi berbasis biaya untuk menggantikan peraturan interkoneksi berbasis bagi hasil yang berlaku sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan baru, Pemerintah menetapkan suatu rumusan guna menghitung biaya interkoneksi dari setiap penyelenggara. Hasil perhitungan akan dievaluasi oleh Pemerintah dan digunakan oleh Pemerintah sebagai rujukan.

Penyelenggara harus memasukkan hasil penghitungan dari formula Pemerintah ke dalam usulan DPI, bersama dengan usulan-usulan untuk skenario panggilan, penyaluran trafik, titik interkoneksi, tata cara permohonan dan pemberian interkoneksi, dan lain-lain. DPI juga harus mengungkapkan jenis jasa interkoneksi dan tarif yang dikenakan untuk tiap jasa yang ditawarkan. Penyedia akses interkoneksi harus memberlakukan sistem antri atas dasar *First-In–First-Serve*. Selain itu, mekanisme interkoneksi juga harus transparan dan tanpa diskriminasi.

Para penyelenggara telekomunikasi SLI yang dominan seperti Perusahaan dan para penyelenggara non-dominan mengajukan DPI pada bulan September 2006. DPI dari penyelenggara dominan disetujui oleh Pemerintah pada bulan Oktober 2006 dan pelaksanaan peraturan baru dimulai pada bulan Januari 2007 melalui perjanjian bilateral antar para penyelenggara. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, DPI akan diubah setiap tahun. Pada tanggal 11 April 2008, Pemerintah menyetujui DPI dari penyelenggara dominan untuk mengganti DPI sebelumnya.

Rencana Teknis Dasar Nasional Pemerintah mengatur persyaratan teknis seperti rencana routing, penomoran, dan aspek teknis untuk interkoneksi antar jaringan-jaringan dari berbagai penyelenggara telekomunikasi, yang dapat membuat semua penyelenggara jaringan berinterkoneksi secara langsung tanpa harus melalui PSTN.

Peraturan mengenai Biaya

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan sejalan dengan peraturan-peraturan lainnya, setiap penyelenggara telekomunikasi diwajibkan membayar kepada Pemerintah biaya hak penggunaan (BHP), biaya frekuensi dan biaya orbit satelit, sebagaimana yang berlaku. BHP untuk masing-masing penyelenggara telekomunikasi adalah sekitar 0,5% dari pendapatan kotor, yang meliputi hal-hal seperti pendapatan dari sewa jaringan, tarif interkoneksi, biaya aktivasi pelanggan baru, tarif penggunaan, tarif roaming dan kartu SIM. Sebagai tambahan, Pemerintah juga mewajibkan seluruh penyelenggara telekomunikasi untuk membayar tarif USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan hutang macet setiap tahunnya, yang dibayarkan secara triwulanan. Tarif frekuensi untuk jaringan GSM 900, DCS 1800 dan FWA dihitung berdasarkan suatu rumus yang pada intinya didasarkan pada jumlah pengendali BTS yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Untuk layanan 3G, penyelenggara harus membayar tarif frekuensi berdasarkan *bandwidth allocated frequency*. Selain itu, para pengguna harus melakukan pembayaran satu kali di muka untuk biaya koneksi orbit satelit ketika satelit dioperasikan.

Pendaftaran Pengguna Selular Pra-bayar

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah mulai mewajibkan para penyelenggara telekomunikasi untuk mengadakan pendaftaran para pengguna selular pra-bayar. Peraturan ini menyatakan bahwa proses pendaftaran tersebut wajib diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 28 April 2006, dimana kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2006. Kami telah merancang prosedur agar kewajiban pendaftaran dapat dilakukan pada titik awal penjualan dan kami telah menyelesaikan kewajiban pendaftaran pengguna selular pra-bayar pada bulan September 2006, dengan membatalkan rekening sekitar 1,3 juta pelanggan yang tidak mendaftar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No 23/PER/M.KOMINFO/10/2005, semua penyelenggara akan terus mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan setiap pelanggan baru selular prabayar mereka.

Peraturan tentang Satelit

Industri satelit internasional merupakan industri yang diatur secara ketat. Selain perijinan dan peraturan di dalam negeri, penempatan dan pengoperasian satelit kami harus didaftarkan pada Biro Komunikasi Radio. Setelah diadakannya Konferensi Radiokomunikasi Dunia/World Radiocommunication Conference (WRC) yang diadakan pada tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 16 November 2007, beberapa karakteristik satelit Indonesia yang berada pada slot 113E dan 150,5E telah dinyatakan kembali pada International Telecommunication Union. Untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit 150,5E, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan Peraturan No. 79/DIRJEN/2009 pada tanggal 12 Maret 2009, mengenai pembentukan kelompok kerja yang terdiri atas DJPT, Telkom dan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 16 Maret 2009, Menkominfo telah mengeluarkan Surat No. 110/M.KOMINFO/03/2009 mengenai persetujuan untuk kerjasama dengan Perusahaan dan Telkom untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit tersebut secara cepat.

Frekuensi Fixed Wireless Access-CDMA

Melalui Peraturan Menkominfo No. 181/2006, Pemerintah melakukan realokasi frekuensi 800MHz kepada penyelenggaran FWA sebagai bagian dari ijin frekuensi untuk layanan 3G (IMT-2000) kepada Bakrie Telecom, Telkom, Mobile-8 dan Perusahaan. Perusahaan sebelumnya telah diberikan ijin 5MHz pada frekuensi *uplink* dan *downlink* di frekuensi berikut: *uplink* frekuensi 1.880-1.885MHz dan *downlink* 1.960-1.965MHz di Jakarta, Banten dan Jawa Barat dan frekuensi *uplink* dan *downlink* di frekuensi 830-835MHz dan *downlink* 875-880MHz untuk wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Berdasarkan peraturan baru di atas, Perusahaan diberikan ijin untuk frekuensi 2x1.23MHz (*uplink* 842.055-843.285MHz dan *downlink* 887.055-888.285MHz) di Jakarta, Banten dan Jawa Barat (*uplink* 843.285-844.515MHz dan *downlink* 888.285-889.515). Migrasi frekuensi telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2007.

Kewajiban Tower Bersama

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Peraturan Menara"). Berdasarkan Peraturan Menara, pembangunan menara telekomunikasi memerlukan ijin dari institusi pemerintah terkait, sementara pemerintah daerah menentukan penempatan dan lokasi dimana menara telekomunikasi dapat dibangun. Selain itu, penyedia telekomunikasi yang memiliki menara telekomunikasi dan pemilik menara diwajibkan untuk mengijinkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasi mereka (selain dari menara yang digunakan untuk jaringan utama), tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menkominfo serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengeluarkan Peraturan Bersama No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama") yang mewajibkan adanya ijin pendirian menara untuk setiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi yang harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Namun demikian, melalui pembuatan Peraturan Bersama ini, Peraturan Menara tetap berlaku sepanjang ketentuan yang didalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bersama.

Selain dari Peraturan Bersama dan Peraturan Menara, beberapa pemerintah daerah telah membuat peraturan-peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mewajibkan operator untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama.

Butir 5: **ANALISA OPERASIONAL DAN KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA**

Pembahasan berikut ini harus dibaca bersama dengan laporan-laporan keuangan konsolidasi Perusahaan yang telah diaudit dan catatan-catatannya per tanggal 31 Desember 2008 dan 2009. Laporan Keuangan konsolidasi ini telah disiapkan sesuai dengan IFRS. Beberapa angka (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk memudahkan.

A. HASIL-HASIL USAHA

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan adalah operator selular terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular. Kami juga menyediakan layanan MIDI kepada para pelanggan korporat dan retail Indonesia maupun regional serta menyediakan jasa sambungan langsung jarak jauh di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan

Hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk hal-hal sebagai berikut:

Basis Pelanggan Selular dan Pola Pemakaian Selular

Jumlah pelanggan selular kami dan pemakaian layanan selular secara langsung mempengaruhi pendapatan usaha selular kami begitu juga dengan beban usaha kami, termasuk biaya interkoneksi dan biaya penyusutan dan amortisasi. Untuk memenuhi permintaan atas layanan kami yang semakin meningkat, kami kemungkinan harus memperluas cakupan dan kapasitas jaringan selular kami, yang memerlukan tambahan pengeluaran barang modal. Peningkatan dalam pengeluaran barang modal kami mempengaruhi arus kas, biaya bunga dan biaya penyusutan kami.

Kami adalah penyedia layanan selular yang terbesar kedua di Indonesia, bila diukur dari jumlah pelanggan selular, dengan 33,1 juta pelanggan (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) pada tanggal 31 Desember 2009.

Pada tahun 2009, kami mengimplementasikan strategi untuk mengurangi tipe pelanggan "*calling card*" yang bernilai-rendah, yang kami percaya sebagai pelanggan jangka pendek yang tidak akan mengisi ulang kartu SIM mereka. Berdasarkan strategi ini, kami mengidentifikasi pelanggan prabayar yang tidak mengisi ulang SIM mereka setelah kami secara signifikan mengurangi manfaat (seperti bonus aktivasi dan *on-net preloads*) yang tersedia untuk pelanggan-pelanggan tersebut. Kami percaya bahwa strategi ini memberikan kontribusi secara signifikan dalam penurunan jumlah pelanggan kami selama tahun 2009. Karena strategi ini, selama sembilan bulan pertama tahun 2009, kami telah menghapus 6,8 juta pelanggan jenis tersebut. Jumlah pelanggan kami berkurang sekitar 9,2% dari tanggal 31 Desember 2008, namun pendapatan usaha selular kami hanya berkurang sebanyak 1,6% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008. Mulai triwulan ketiga tahun 2009, kami mulai melihat tanda-tanda stabilisasi dalam jumlah pelanggan kami dan kami menambah 4,4 juta pelanggan, setelah dikurangi dari pelanggan yang telah dideaktivasi, pada triwulan keempat tahun 2009.

Kompetisi

Kami menghadapi kompetisi yang sangat ketat pada seluruh segmen usaha kami. Kompetisi tersebut diantaranya berakibat kepada tarif yang dapat kami bebankan atas layanan, permintaan dan penggunaan jasa kami serta marjin usaha dan hasil usaha.

Bisnis layanan selular di Indonesia telah menjadi sangat kompetitif , sebagaimana terlihat dengan adanya program akuisisi besar-besaran atas pelanggan selular di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Secara historis, kompetisi

pada industri selular utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Sejak tahun 2007, kompetisi semakin terfokus pada harga, dimana seluruh operator, termasuk kami, mulai menawarkan berbagai promosi potongan harga untuk menarik pelanggan, yang kami percayai menyebabkan terjadinya *churn rates* yang tinggi. Tingkat *churn rate* pelangggan yang tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan sensitifitas harga para pelanggan, terutama pelanggan pra-bayar dan rendahnya biaya perpindahan pelanggan pasca bayar akibat pengikatan kontraktual terbatas. Sejak tahun 2009, fokus pasar kepada harga yang merupakan kunci utama terjadinya seleksi produk oleh pelanggan telah menurun dan para pelanggan kembali terfokus pada pendorong historis yaitu cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus.

Berdasarkan estimasi internal kami, ketiga penyelenggara mayoritas layanan nirkabel di Indonesia, Telkomsel, kami dan XL, secara bersama-sama menguasai sekitar 80% pangsa pasar jasa nirkabel di Indonesia pada tahun 2009. Kami berkompetisi dengan Telkomsel dan XL utamanya pada cakupan jaringan, kualitas layanan dan harga. Dengan basis pelanggan "on-net" yang lebih besar dan penawaran harga yang lebih menarik bagi panggilan on-net, kami percaya bahwa jumlah pelanggan kami akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan terhadap penyelenggaran selular kecil lainnya, mengingat kami tidak perlu membayar biaya interkoneksi kepada pihak ketiga.

Kompetisi pada layanan MIDI juga semakin meningkat. Dalam beberapa tahun ini, kompetisi antar penyelenggara layanan komunikasi data semakin meningkat, yang utamanya disebabkan oleh penerbitan berbagai lisensi baru setelah terjadinya deregulasi pada industri telekomunikasi di Indonesia. Selain itu layanan satelit kami yang terdiri dari penyewaan transponder kepada *broadcaster* dan penyelenggara telekomunikasi layanan VSAT, selular dan SLI serta ISP menghadapi kompetisi dari penyelenggara asing dan domestik yang memberikan layanan pada basis pelanggan yang sama.

Kami tidak lagi menjadi satu-satunya penyelenggara jasa SLI tradisional di Indonesia (seperti non VoIP). Pemerintah dapat menerbitkan lisensi baru untuk layanan SLI kepada operator telekomunikasi lainnya yang akan menyebabkan meningkatnya kompetisi pada layanan telekomunikasi tetap.

Kami menyadari bahwa kompetisi tiga segmen usaha kami akan terus meningkat. Kompetisi telah dan akan memberikan dampak pada hasil operasi dan kondisi keuangan kami.

Tingkat Tarif dan Harga

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Menkominfo menetapkan formula tarif yang menentukan jumlah yang dapat dibebankan oleh operator atas layanan telekomunikasi tetap dan selular. Namun demikian, Menkominfo mengijinkan operator telekomunikasi tetap dan selular, termasuk kami, untuk menawarkan paket-paket promosi yang menawarkan harga yang lebih rendah daripada tarif plafon yang ditentukan berdasarkan formula tarif. Saat ini kami menetapkan harga kepada layanan selular kami berdasarkan berbagai program promosi yang sedang berlangsung yang dimaksudkan untuk menarik pelanggan-pelanggan baru, menstimulasi permintaan dan meningkatkan posisi saing kami. Perubahan dalam struktur harga kami, baik sebagai akibat dari kebijakan tarif Pemerintah atau sebagai tanggapan terhadap persaingan, dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Ekonomi Indonesia

Kami percaya bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia sebagian didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, dan permintaan atas layanan-layanan tersebut akan berlanjut, karena perekonomian Indonesia terus berkembang dan termodernisasi. Kinerja dan kualitas serta pertumbuhan jumlah pelanggan dan penawaran layanan kami tergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pengeluaran barang modal

Penyediaan layanan telekomunikasi bersifat sarat modal. Untuk dapat terus bersaing, kami harus terus-menerus melakukan perluasan, memodernisasi dan memperbarui teknologi kami, yang memerlukan pengeluaran barang

modal yang besar. Dalam rangka memenuhi permintaan terkait dengan peningkatan yang substansial dalam jumlah pelanggan dan pemakaian jaringan selama tahun 2008 hingga 2009, kami harus meningkatkan pengeluaran barang modal kami secara substansial, terutama untuk memperluas kapasitas jaringan kami. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami masing-masing berjumlah total Rp12.285,2 miliar dan Rp11.567,4 miliar (US$1.230,6 juta). Untuk tahun 2010, kami berencana untuk mengalokasikan US$550 juta hingga US$700 juta untuk pengeluaran barang modal baru, yang bersama-sama dengan estimasi pengeluaran barang modal aktual untuk tahun 2010 dari komitmen pengeluaran barang modal di periode sebelumnya, akan bernilai kurang lebih antara US$1.000 hingga US$1.200 juta total pengeluaran barang modal aktual untuk tahun 2010 untuk digunakan bagi pengembangan aset tetap dalam segmen usaha selular, data tetap dan telekomunikasi tetap kami. Lihat "—Pengeluaran Barang Modal".

Sebelumnya, kami telah membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber internal dan arus kas dari kegiatan usaha Perusahaan, dan juga dari hutang pembiayaan melalui pinjaman bank dan pasar modal. Kami mengharapkan untuk terus membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber-sumber tersebut. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila peristiwa-peristiwa tertentu terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang kami harapkan, menurunnya peringkat hutang kami, atau menurunnya kinerja keuangan atau rasio keuangan kami. Apabila kami tidak mendapatkan jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung rencana pengeluaran barang modal kami untuk tahun 2010, kami mungkin tidak dapat memperbaiki atau memperluas infrastruktur telekomunikasi selular kami atau memperbarui teknologi kami yang dibutuhkan untuk tetap bersaing dalam pasar telekomunikasi Indonesia, dimana hal tersebut dapat berdampak bagi keadaan keuangan, hasil usaha serta prospek kami.

Selain itu, perubahan yang tidak diharapkan dalam teknologi, permintaan kapasitas jaringan yang lebih besar dari pelanggan kami dan tanggapan kepada usaha dan inovasi produk dari pesaing kami dapat mengharuskan kami untuk meningkatkan pengeluaran barang modal kami, yang dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Ketidakstabilan Nilai Tukar Valuta Asing

Nilai mata uang Rupiah telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir dari nilai terendah yaitu sekitar Rp17.000 per dolar AS selama krisis keuangan Asia. Selama periode antara tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, nilai tukar Rupiah/dolar AS berkisar dari nilai terendah Rp12.400 per dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp9.051 per dolar AS dan selama tahun 2009, berkisar dari nilai terendah Rp12.065 per dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp9.293 per dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2009, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp9.400 per dolar AS.Meskipun sebagian besar dari pendapatan usaha kami dalam mata uang Rupiah, sebagian pendapatan usaha kami dalam mata uang Dolar AS atau mata uang lain yang terkait dengan Dolar AS. Pendapatan yang terkait dengan mata uang dolar AS adalah berdasarkan tarif dalam mata uang Dolar AS yang ditagih dalam mata uang Rupiah dengan nilai tukar valuta asing yang berlaku untuk mata uang Dolar AS ke Rupiah. Selain itu, sebagian besar dari pinjaman, pengeluaran barang modal dan beban usaha Perusahaan, termasuk pembayaran bunga untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010, *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 dan Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, adalah dalam mata uang selain dari Rupiah, terutama dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2009, 57,6% dari pinjaman kami adalah dalam mata uang Rupiah, dan sisanya adalah dalam mata uang Dolar AS. Melemahnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, antara lain nilai Rupiah dari beban yang harus dibayarkan dalam mata uang Dolar AS akan meningkat karena faktor tersebut sehingga kami harus mengkonversi mata uang Rupiah yang lebih banyak lagi guna membayar kewajiban Perusahaan dalam Dolar AS. Sebaliknya, meningkatnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, di antaranya, hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan dari panggilan masuk internasional yang dilakukan oleh pengguna layanan operator asing, *roaming* oleh pelanggan operator asing di Indonesia dan hasil usaha dari layanan MIDI dan operasi satelit kami. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, kami mencatat rugi selisih kurs bersih sebesar Rp885,7 miliar, dan laba selisih kurs-bersih sebesar Rp1.656,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Sebagai tambahan, sebagian besar aset dan kewajiban moneter kami dapat terkena dampak risiko mata uang asing. Aset moneter ini terutama terdiri dari kas, setara kas, dan piutang usaha dari operator asing, dan piutang usaha dalam mata uang asing. Kewajiban moneter kami yang dapat terkena dampak risiko mata uang asing terdiri dari hutang pengadaan, hutang jangka panjang dan hutang obligasi yang timbul akibat kewajiban yang berkaitan denganpengeluaran barang modal. Tingkat aset moneter bersih kami sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah panggilan masuk yang melebihi jumlah penggilan keluar dalam usaha SLI kami dan pendapatan dari mata uang asing kami. Dalam upaya mengelola risiko valuta asing kami dan menurunkan biaya pendanaan kami, kami menandatangani beberapa kontrak swap valuta asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat berhasil mengelola tingkat risiko valuta asing kami di kemudian hari ataupun bahwa kami tidak akan terus menerus terkena dampak risiko valuta asing. Risiko kami terhadap fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama terhadap mata uang dolar AS, dapat meningkat jika Perusahaan mengadakan hutang tambahan dalam mata uang dolar AS untuk membiayai rencana pengeluaran barang modal kami.

Pada bulan Pebruari dan Maret 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam instrumen dan perjanjian hutang kami untuk memberikan tambahan fleksibilitas dalam kewajiban kami untuk mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas, hutang terhadap EBITDA dan EBITDA terhadap beban bunga. Sementara kami percaya bahwa perubahan tersebut akan memberikan ruang yang cukup jika terjadi ketidakstabilan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS , kami tidak dapat memastikan tidak terjadinya ketidakstabilan di masa mendatang dan tidak terjadinya ketidakstabilan yang lebih kuat dibandingkan yang dialami dalam 12 bulan terakhir, yang dapat mengakibatkan pelanggaran persyaratan keuangan kami. Lihat "—Hutang Pokok."

Tinjauan Usaha

Pendapatan usaha

Kami memperoleh pendapatan usaha terutama melalui penyelenggaraan jasa selular, MIDI dan telekomunikasi tetap (terutama sambungan jarak jauh internasional). Tabel berikut ini memperlihatkan perincian total pendapatan usaha Perusahaan dan persentase kontribusi dari masing-masing layanan terhadap total pendapatan usaha Perusahaan untuk setiap periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008		2009		
	Rp		Rp	US$	
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta dolar AS, kecuali persentase)				
IFRS:					
Pendapatan Usaha:					
Selular	14.185,4	74,9	13.959,7	1.485,1	74,9
MIDI	2.733,4	14,4	2.712,6	288,6	14,6
Telekomunikasi tetap	2.029,6	10,7	1.957,2	208,2	10,5
Jumlah pendapatan usaha	18.948,4	100,0%	18.629,5	1.981,9	100,0%

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pendapatan usaha kami untuk semua jenis layanan yang ditawarkan adalah jumlah pelanggan, tingkat pemakaian dan tarif. Tingkat pemakaian jasa-jasa kami dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan berkelanjutan untuk permintaan atas jasa telekomunikasi di Indonesia, terus berkembangnya perekonomian Indonesia dan persaingan.

Jasa Selular. Kami menghasilkan pendapatan usaha jasa selular berasal dari pendapatan pemakaian selular, jasa nilai tambah, biaya langganan bulanan, penjualan modem *broadband* nirkabel dan *handset* selular, dan juga pendapatan interkoneksi dari penyelenggara telekomunikasi lainnya dan pendapatan sewa menara. Pada triwulan ke-empat tahun 2008, kami mulai mencatat penjualan modem *wireless broadband* dan pemakaian komunikasi data *wireless broadband* sebagai pendapatan usaha Perusahaan dari jasa selular. Pendapatan tersebut sebelumnya dicatat sebagai bagian dari pendapatan usaha jasa MIDI.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Tabel berikut ini memperlihatkan komponen-komponen pendapatan usaha Perusahaan dari jasa selular untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008		2009		
	Rp		Rp	US$	
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US$, kecuali persentase)				
IFRS:					
Pendapatan pemakaian	7.021,9	49,5	5.844,5	621.8	41,9
Jasa nilai tambah	5.052,6	35,6	5.999,0	638,2	43,0
Pendapatan interkoneksi	1.826,0	12,9	1.491,8	158.7	10,7
Pendapatan jasa penyambungan	75,0	0,5	40,3	4,3	0,3
Pendapatan langganan bulanan	66,3	0,5	184,2	19,6	1,3
Penjualan *handsets* Blackberry dan modem	82,4	0,6	206,5	22,0	1,5
Sewa menara	—	-	62,4	6,6	0,4
Lain-Lain	61,2	0,4	131,0	13,9	0,9
Total Pendapatan Usaha Layanan selular	14.185,4	100,0%	13.959,7	1.485,1	100,0%

Sebagian besar pelanggan selular kami adalah pelanggan prabayar kurang lebih 96,7% pada tanggal 31 Desember 2009. Kami menawarkan beberapa layanan-layanan nilai tambah kepada pelanggan prabayar kami, yang telah meningkatkan pendapatan usaha layanan selular dari layanan-layanan nilai tambah, terutama SMS dan SMS nilai tambah, yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses berbagai macam informasi, seperti berita politik, olahraga dan bisnis. Pendapatan dari SMS dan layanan-layanan nilai tambah lainnya mencerminkan masing-masing 35,6% dan 43,0% dari pendapatan usaha layanan selular kami masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009. Kami mengharapkan pendapatan dari SMS dan layanan-layanan nilai tambah lainnya untuk terus meningkat, yang kami percaya akan didorong oleh layanan *wireless broadband* dan situs jejaring sosial yang berkembang dan perkembangan konten *online* populer lainnya.

Kami mengakui pendapatan selular sebagai berikut:

- Pendapatan selular yang berasal dari pemakaian pulsa dan penjelajahan diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan selular Perusahaan;
- Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan;
- Untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan akhir. Penjualan voucher pulsa perdana/isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya;
- Penjualan modem *broadband* nirkabel dan *handset* selular diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan;
- Pendapatan dari komunikasi data *broadband* nirkabel diakui berdasarkan durasi dari pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung perjanjian dengan pelanggan;
- Pendapatan selular disajikan sebesar jumlah bersih, setelah kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah;
- Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri dan internasional lainnya diakui setiap bulan berdasarkan lalu lintas komunikasi aktual yang tercatat selama bulan berjalan.

Layanan MIDI. Pendapatan usaha dari layanan MIDI terutama berasal dari (i) layanan Internet yang disediakan oleh kami, Indosat Mega Media("IM2") dan PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), (ii) layanan IP VPN, sirkit sewa berkecepatan tinggi dan *frame relay* yang diselenggarakan oleh kami dan Lintasarta, (iii) layanan *digital data network* yang diselenggarakan oleh Lintasarta, dan (iv) layanan satelit.

Kami menangguhkan pendapatan instalasi untuk layanan internet, frame net, World link dan Direct line, pada saat penyelesaian instalasi atau koneksi dari peralatan, dan diakui sebagai pendapatan selama masa hubungan pelanggan yang diestimasi. Kami mengakui pendapatan dari biaya jasa bulanan diakui pada saat jasa tersebut diberikan. Pendapatan dari pemakaian diakui setiap bulan berdasarkan durasi pemakaian internet atau berdasarkan jumlah tetap, tergantung perjanjian dengan pelanggan. Kami mencatat pendapatan sewa satelit secara garis lurus sesuai dengan masa sewa *transponder.* Biaya sewa bulanan untuk kapasitas transponder satelit didasarkan terutama pada kapasitas yang disewa.

Sebagian besar pendapatan usaha yang berasal dari layanan MIDI adalah dalam mata uang Dolar AS dan oleh karenanya dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Beberapa faktor lainnya juga mempengaruhi pendapatan usaha dari layanan MIDI, termasuk persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi domestik dan internasional, penurunan tarif dan migrasi dari layanan tradisional ke layanan berbasis IP. Kami memperkirakan tren ini akan terus berlangsung tetapi kami yakin bahwa hal ini akan terkompensasi dengan peningkatan jumlah layanan yang disewakan kepada pelanggan korporasi, peningkatan permintaan layanan yang *customized*, dan juga pengoperasian satelit Palapa-D kami yang baru.

Layanan Telekomunikasi Tetap. Jasa telekomunikasi tetap meliputi jasa sambungan jarak jauh internasional dan layanan jasa sambungan tetap. Jasa sambungan jarak jauh internasional yang terdiri dari layanan SLI "001" dan "008", "Flatcall 01016" dan juga layanan dengan bantuan operator dan layanan-layanan nilai tambah, memberikan kontribusi sebanyak 80,5% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sementara sisanya berasal dari pendapatan layanan telepon jaringan tetap dan FWA.

Jasa sambungan jarak jauh internasional. Pendapatan usaha dari jasa sambungan jarak jauh internasional berasal dari dua sumber utama, yaitu pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dan pendapatan dari percakapan telepon ke luar negeri. Kami telah menegosiasikan *volume commitments* dan *accounting rates* dengan para penyelenggara telekomunikasi asing, atau telah melaksanakan sistem tarif *market termination based*, dan menerima pembayaran dalam jumlah bersih dari operator-operator tersebut. Pembayaran dalam jumlah bersih dan *accounting rates* ini biasanya dilaksanakan dan dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah, khususnya mata uang Dolar AS; dengan demikian, pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya.

Layanan Telepon Jaringan Tetap Nirkabel. Pada tanggal 31 Desember 2009, kami telah memiliki 594.133 pelanggan telepon jaringan tetap nirkabel di 82 kota di Indonesia. Pada akhir tahun 2009, kami memperluas layanan telepon jaringan tetap nirkabel ke beberapa kota lainnya dalam upaya meningkatkan kapasitas untuk sekitar empat juta pelanggan telepon jaringan tetap nirkabel. Dengan demikian, kami mengharapkan di masa mendatang layanan telepon jaringan tetap nirkabel ini akan menjadi sumber yang semakin penting bagi pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap.

Pendapatan telepon jaringan tetap nirkabel yang berasal dari pendapatan pemakaian diakui berdasarkan durasi panggilan telepon yang berhasil dilakukan melalui jaringan tetap kami. Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa tersebut diserahkan.Untuk pelanggan prabayar, komponen aktivasi dari penjualan paket perdana ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama estimasi hubungan dengan pelanggan. Pendapatan dari penjualan voucher pulsa perdana atau isi ulang diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakain pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Jasa Telepon Jaringan Tetap. Saat ini kami memiliki cakupan lokal dan domestik jarak jauh di 82 kota di Indonesia. Pendapatan dari jasa instalasi telepon jaringan tetap ditangguhkan dan diakui selama estimasi masa hubungan pelanggan. Pendapatan dari pemakaian diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap Perusahaan.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Beban Usaha

Beban usaha utama Perusahaan meliputi beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi, beban karyawan, pemasaran dan beban umum dan administrasi.

Beberapa beban Perusahaan dinyatakan dalam mata uang Dolar AS atau mata uang selain Rupiah. Beban-beban tersebut meliputi penyelesaian interkoneksi internasional, beberapa perjanjian pemeliharaan dan beban konsultasi.

Beban Jasa Telekomunikasi. Beban jasa telekomunikasi meliputi beban interkoneksi, ijin frekuensi radio, pemeliharaan, listrik, gas dan air, sewa sirkit, sewa, harga pokok penjualan kartu SIM dan voucher isi ulang, dan harga pokok penjualan *handsets* dan modem.

Penyusutan dan amortisasi. Kami menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aset tetap, selama taksiran umur manfaatnya. Sebagian besar beban penyusutan kami terkait dengan aset yang digunakan untuk layanan selular Perusahaan. Oleh karena kami terus memperluas dan meningkatkan cakupan, kapasitas dan kualitas jaringan kami, kami memperkirakan beban penyusutan akan terus meningkat.

Pemasaran. Beban pemasaran meliputi biaya untuk pameran, promosi dan iklan yang berhubungan dengan program pemasaran kami.

Karyawan. Beban karyawan meliputi gaji, insentif dan imbalan kerja lainnya, pajak penghasilan karyawan, bonus, manfaat kesehatan setelah pensiun dan jasa karyawan *outsourcing*.

Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi meliputi sewa, jasa tenaga profesional, penyisihan piutang ragu-ragu, perjalanan, listrik, gas dan air, asuransi, kantor, makan karyawan, komunikasi, pelatihan, pendidikan dan penelitian dan lain-lain.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Komponen utama dari pendapatan (beban) lain-lain kami adalah pendapatan bunga, laba (rugi) selisih kurs-bersih, beban pendanaan, laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif—bersih. Laba atau rugi selisih kurs biasanya dipengaruhi oleh besarnya hutang non-Rupiah yang belum dibayar, piutang usaha dari perusahaan internasional dankas dan setara kas dalam mata uang asing. Kami saat ini sedang melakukan lindung nilai/*hedging* atas sebagian kewajiban kami dalam mata uang Dolar AS seperti *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2010 dan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012 dan ING/DBS *Syndicated Loan Facility.* Lihat "Butir 11: Pengungkapan Secara Kualitatif dan Kuantitatif Tentang Risiko Pasar."

Perpajakan

Beban pajak periode berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode yang bersangkutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan kewajiban antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu periode dialokasikan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat nilai aset direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika Perusahaan dan Anak Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau kewajiban, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing perusahaan tersebut.

Laba bersih

Laba bersih kami untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 tidak setara dengan pendapatan usaha dan laba usaha kami pada periode-periode tersebut. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya fluktuasi yang besar pada beberapa pos non-usaha yang mempengaruhi laba bersih Perusahaan pada periode-periode tersebut. Pos non-usaha tersebut di antaranya adalah fluktuasi beban pajak penghasilan tangguhan, laba atau rugi selisih kurs-bersih, dan laba atau rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih.

Hasil Usaha

Tabel berikut ini memperlihatkan data pendapatan komprehensif yang dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember	
	2008	2009
IFRS:		
Pendapatan usaha:		
Selular	74,9%	74,9%
MIDI	14,4%	14,6%
Telekomunikasi Tetap	10,7%	10,5%
Total pendapatan usaha	**100,0%**	**100,0%**
Beban Usaha:		
Beban Jasa Telekomunikasi	33,6%	37,0%
Penyusutan dan amortisasi	24,0%	29,9%
Karyawan	8,7%	7,8%
Pemasaran	4,9%	4,4%
Umum dan administrasi	3,9%	3,7%
Jumlah Beban Usaha	**75,1%**	**82,8%**
Laba Bersih:		
Laba Usaha	24,9%	17,2%
Pendapatan (beban) lain-lain -bersih	11,5%	3,6%
Laba sebelum pajak penghasilan	13,4%	13,6%
Manfaat (beban) pajak penghasilan -bersih	2,6%	4,2%
Laba yang diperuntukkan pemilik bukan pengendali	0,1%	0,3%
Laba yang diperuntukkan untuk pemilik Perusahaan	10,7%	9,1%

Tabel berikut ini memperlihatkan pendapatan usaha dari segmen-segmen usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2008		2009		
	Rp		Rp	US$	
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US$, kecuali untuk persentase)				
IFRS:					
Jasa Selular					
Pendapatan pemakaian	7.021,9	49,5%	5.844,5	621,8	41,9%
Jasa nilai tambah	5.052,6	35,9%	5.999,0	638,2	43,0%
Pendapatan Interkoneksi	1.826,0	12,9%	1.491,8	158,7	10,7%

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember			
	2008		2009	
	Rp		Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US$, kecuali untuk persentase)			
Pendapatan jasa penyambungan	75,0	0,5%	40,3	0,3%
Pendapatan langganan bulanan	66,3	0,5%	184,2	1,3%
Penjualan *handset Blackberry handsets modems*	82,4	0,6%	206,5	1,5%
Sewa Menara	—	—	62,4	0,4%
Lain-lain	61,2	0,4%	131,0	0,9%
Subjumlah	**14.185,4**	**100,0%**	**13.959,7**	**100,0%**
MIDI				
Internet	703.9	25,8%	677.4	25,0%
IP VPN	585.6	21,4%	566.1	20,9%
World link and direct link	456.7	16,7%	394.2	14,5%
Frame net	315.8	11,6%	276.5	10,2%
Sewa jaringan	231.5	8,5%	211.1	7,8%
Jasa aplikasi	118.9	4,3%	146.1	5,4%
Digital data network	124.9	4,6%	144.6	5,3%
Sewa Satelit	96.3	3,5%	113.1	4,2%
MPLS	25.2	0,9%	67.1	2,4%
TV link	8.7	0,3%	6.2	0,2%
Lain-lain	65.8	2,4%	110.2	4,1%
Subjumlah	**2.733,4**	**100,0%**	**2.712,6**	**100,0%**
Telekomunikasi Tetap				
Telepon International	1.657,9	81,7%	1.576,4	80,5%
Telepon jaringan tetap nirkabel	244,3	12,0%	249,9	12,8%
Telepon jaringan tetap	126,7	6,2%	129,9	6,6%
Lain-Lain	0,7	0,1%	1,0	0,1%
Subjumlah	**2.029,6**	**100,0%**	**1.957,2**	**100,0%**
Jumlah	**18.948,4**		**18,629.5**	

Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Total pendapatan usaha menurun secara marginal dari Rp18.948,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp18.629,5 miliar (US$1.981,9 juta) pada tahun 2009, atau sebesar 1,7%, terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan layanan selular kami. Selama tahun 2009, pendapatan usaha dari layanan selular menurun sebesar Rp225,8 miliar, atau 1,6%, dari Rp14.185,5 miliar pada tahun 2008. Pendapatan usaha dari layanan MIDI menurun dari sebesar Rp20,8 miliar, atau 0,8% dari Rp2.733,4 miliar di tahun 2008. Pendapatan usaha dari layanan telekomunikasi tetap di tahun 2009 menurun secara marginal sebesar Rp72,4 miliar, atau 3,6%, dari Rp2.029,6 miliar di tahun 2008.

Layanan Selular. Pada tahun 2009, kami mencatat pendapatan usaha dari layanan selular sebesar Rp13.959,7 miliar (US$1.485,1 juta), menurun sebesar 1,6% dari Rp14.185,4 miliar pada tahun 2008. Kami percaya bahwa penurunan tersebut terutama disebabkan karena strategi nilai kami, yang dimulai pada tahun 2009, untuk meminimalisir pelanggan bernilai rendah "*calling card*". Penghapusan jenis pelanggan "*calling card*" mengakibatkan penurunan kurang dari 1,6% dari pendapatan usaha dari selular. Selain itu, kami yakin bahwa penurunan pendapatan usaha dari selular diakibatkan oleh penurunan ARPU kami dari Rp38.639 pada tahun 2008 menjadi Rp37.330 pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa selular mewakili 74,9% dari total pendapatan usaha kami pada tahun 2009 yang memiliki persentase yang sama pada tahun 2008 (74,9%).

Pendapatan pemakaian menurun sebesar Rp1.177,4 miliar, atau 16,8%, dari tahun 2008, dan mewakili 41,9% dari total pendapatan usaha layanan selular kami. Penurunan dalam pemakaian terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pelanggan, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan pendapatan dari jasa nilai tambah.

Pada tahun 2009, pendapatan usaha dari layanan selular yang berasal dari jasa nilai tambah mengalami peningkatan sebesar Rp946,4 miliar, atau 18,7%, dibandingkan pada tahun 2008. Kontribusi jasa nilai tambah untuk pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebesar 7,3% dari 35,6% pada tahun 2008 menjadi 43,0% pada tahun 2009. Peningkatan pendapatan usaha dari jasa nilai tambah, demikian juga dengan peningkatan kontribusi pendapatan dari jasa nilai tambah kepada pendapatan usaha selular kami secara keseluruhan, didorong oleh peningkatan penggunaan layanan *broadband* nirkabel kami.

Layanan MIDI. Pada tahun 2009, pendapatan usaha dari layanan MIDI relatif konstan, dengan Rp2.733,4 miliar pada tahun 2008 dan Rp2.712,6 miliar (US$288,6 juta) pada tahun 2009. Pendapatan usaha internet terus mencerminkan komponen terbesar dari pendapatan usaha dari layanan MIDI, walaupun terjadi penurunan dalam pendapatan usaha dari Internet sebesar Rp26,5 miliar di tahun 2009. Penurunan pendapatan usaha dari layanan Internet, demikian juga dengan layanan sewa jaringan domestik dan internasional, terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan dan menurunnya tarif layanan kami.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Terdapat penurunan dalam pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap dari Rp2.029,6 miliar di tahun 2008 menjadi Rp1.957,2 miliar di tahun 2009 (US$208,2 juta) pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari layanan telepon internasional dan telepon jaringan tetap nirkabel, masing-masing mencerminkan 80,5% dan 12,8%, dari pendapatan usaha layanan telekomunikasi tetap pada tahun 2009. Sedangkan 6,7% lainnya dari pendapatan usaha layanan telekomunikasi tetap berasal dari jasa telepon tetap dan layanan-layanan lainnya pada tahun 2009. Pendapatan yang berasal dari telepon internasional menurun dari Rp1.657,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.576,4 miliar (US$167,7 juta) pada tahun 2009 akibat dari penurunan lalu lintas telepon SLI ke luar negeri oleh pelanggan bukan Indosat. Jumlah volume sambungan telepon internasional dari sambungan "001" dan "008" Perusahaan meningkat sebanyak 0,9% dari 1.958,4 juta menit pada tahun 2008 menjadi 1.976,7 juta menit pada tahun 2009. Jumlah *incoming traffic* relatif stabil dengan 1.484,4 juta menit pada tahun 2008 dan 1.477,1 juta menit pada tahun 2009, terutama karena adanya penurunan *volume commitments* dari operator telekomunikasi asing. Lalu lintas percakapan ke luar negeri meningkat sebanyak 5,9% dari 474,0 juta menit pada tahun 2008 menjadi 502 juta menit pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan lalu lintas pemakaian dari pelanggan kami, misalnya mereka yang menggunakan layanan "Flatcall 01016".

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp1.193,2 miliar, atau 8,4%, dari Rp14.226,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp15.419,6 miliar (US$1.640,4 juta) pada tahun 2009 terutama karena adanya kenaikan beban penyusutan dan amortisasi dan beban jasa telekomunikasi, yang merupakan dua komponen beban usaha terbesar kami. Peningkatan ini sebagian diimbangi dengan penurunan beban karyawan, beban pemasaran dan beban umum dan administrasi pada tahun tersebut.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp520,3 miliar, atau 8,2%, dari Rp6.376,0 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp6.896,3 miliar (US$733,6 juta) pada tahun 2009 terutama karena adanya peningkatan iuran Pemerintah untuk biaya frekuensi, pembayaran biaya ijin 3G tahunan, termasuk biaya penambahan spektrum pada tahun 2009, USO dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Peningkatan ini juga terjadi karena pembayaran sewa untuk penambahan BTS, peningkatan biaya pokok penjualan modem dan *handset* yang dipengaruhi dari tingginya penjualan Blackberry™ and peningkatan beban terkait sewa sirkit, Internet dan penyewaan transponder.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 22,1% dari Rp4.555,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp5.561,4 miliar (US$591,6 juta) pada tahun 2009, terutama sebagai akibat dari pertumbuhan dari jumlah aset tetap kami yang berkelanjutan, termasuk satelit Palapa-D kami yang baru, serta percepatan penyusutan elemen yang tidak digunakan pada jaringan selular kami. Aset tetap meningkat dari Rp62.989,1 miliar di tahun 2008 menjadi Rp74.312,0 miliar (US$7.905,5 juta) di tahun 2009.

Beban karyawan menurun sebesar Rp187,4 miliar, atau 11,4%, dari Rp1.639,0 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.451,6 miliar (US$154,4 juta) pada tahun 2009, terutama karena penurunan tarif pajak penghasilan karyawan, serta penurunan bonus, insentif dan kenikmatan karyawan lainnya, beban pegawai *outsourcing* dan manfaat kesehatan masa pensiun.

Beban pemasaran menurun sebesar Rp101,2 miliar, atau 11,0%, dari Rp918,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp816,9 miliar (US$86,9 juta) pada tahun 2009 terutama karena adanya penurunan beban iklan, promosi dan pameran, sejalan dengan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan program efisiensi yang kami lakukan.

Beban umum dan administrasi menurun sebesar Rp44,0 miliar, atau sebesar 6%, dari Rp737,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp693,4 miliar (US$73,8 juta) pada tahun 2009 terutama karena penurunan biaya transportasi, biaya pelatihan dan penelitian, jasa profesional, biaya kantor dan biaya makan karyawan, sementara kmai terus melaksanakan program efisiensi yang dirancang untuk mengurangi biaya non-operasional.

Laba usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha menurun sebesar Rp1.512,1 miliar atau 32,0%, dari Rp 4.722,0 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp3.209,9 miliar (US$341,5 juta) pada tahun 2009.

Beban Lain-lain - Bersih

Beban lain-lain - bersih menurun sebesar Rp1.491,6 miliar, dari Rp2.172,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp681,3 miliar (US$72,5 juta) pada tahun 2009, terutama karena adanya laba selisih kurs, yang didorong oleh menguatnya Rupiah terhadap Dolar AS. Dari rugi selisih kurs sebesar Rp885,7 miliar pada tahun 2008, kami mencatat laba selisih kurs sebesar Rp1.656,4 miliar (US$176,2 juta) pada tahun 2009.

Kami mencatat laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp136,6 miliar pada tahun 2008dan rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp486,9 miliar (US$51,8 juta) pada tahun 2009 disebabkan oleh menguatnya rupiah terhadap Dolar AS.

Kami mencatat penurunan pendapatan bunga menjadi Rp139,0 miliar (US$14,8 juta) pada tahun 2009, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp321,1 miliar, atau 69,8% selama tahun 2008, karena jumlah rata-rata kas lebih rendah yang kami miliki.

Beban lain-lain bersih mengalami peningkatan sebesar Rp91,2 miliar dari Rp25,6 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp116,8 miliar (US$12,4 juta) pada tahun 2009 terutama akibat peningkatan kerusakan aset tetap yang disebabkan bencana alam, seperti gempa bumi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2009 dibandingkan tahun 2008 yang menyebabkan perusahaan asuransi menurunkan jumlah yang dapat diklaim dari kerusakan aset tetap yang diasuransikan seiring dengan bertambahnya pembatasan dalam amandemen perjanjian asuransi dan peningkatan beban pajak atas pajak penghasilan dan PPN.

Perpajakan

Kami mencatat beban pajak penghasilan-bersih sebesar Rp485,3 miliar pada tahun 2008 dibandingkan dengan Rp781,5 miliar (US$83,1 juta) pada tahun 2009. Peningkatan dalam beban pajak penghasilan-bersih terutama disebabkan oleh penyesuaian tarif pajak penghasilan pada tahun 2008.

Laba Bersih

Laba bersih kami menurun sebesar Rp 316,8 miliar, atau 15,3%, dari Rp2.063,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.747,0 miliar (US$185,9 juta) pada tahun 2009 dikarenakan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Secara historis, kebutuhan likuiditas kami timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perusahaan. Bisnis telekomunikasi kami membutuhkan

modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, terutama selama tahap pengembangan jaringan. Meskipun kami memiliki banyak infrastruktur jaringan yang telah ada, kami memperkirakan akan kembali melakukan pengeluaran barang modal khususnya untuk pengembangan jaringan selular di daerah-daerah yang diperkirakan sebagai daerah yang tinggi pertumbuhannya, dan juga untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan yang telah ada.

Kami berkeyakinan kas dan setara kas kami, arus kas dari kegiatan usaha Perusahaan dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia akan cukup memenuhi kebutuhan dana yang telah diantisipasi, termasuk kebutuhan dana untuk modal kerja dan pengeluaran barang modal yang telah direncanakan, di masa mendatang. Akan tetapi, apabila keadaan ekonomi dunia atau Indonesia memburuk, persaingan atau produk pengganti yang timbul lebih cepat di luar perkiraan saat ini atau nilai mata uang Rupiah melemah secara tajam terhadap Dolar AS, maka arus kas bersih Perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha dapat menurun dan jumlah pengeluaran barang modal yang dibutuhkan dalam mata uang Rupiah dapat meningkat, dimana salah satu di antaranya dapat memberikan dampak negatif bagi likuiditas kami.

Arus Kas

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai arus kas Perusahaan secara historis:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	
	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta Rupiah)		
Arus kas bersih:			
Yang disediakan dari kegiatan usaha	6.513,3	4.051,2	431.0
Yang digunakan untuk kegiatan investasi	(10.286,9)	(10.670,7)	(1.135,2)
Yang disediakan dari kegiatan pendanaan	1.458,5	3.724,7	396.2

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Kegiatan Usaha Perusahaan

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha adalah masing-masing sebesar Rp6.513,3 miliar dan Rp4.051,2 (US$431,0 juta) untuk tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2009, kas bersih dari kegiatan operasional menurun terutama karena adanya peningkatan beban usaha yang didorong oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan kenaikan pembayaran dimuka biaya jangka panjang yang termasuk Izin dibayar dimuka jangka panjang sebesar Rp320 miliar untuk ijin 3G kami. Kami menambahkan bahwa tren penurunan arus kas juga terutama disebabkan peningkatan beban usaha.

Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah masing-masing sebesar Rp 10.286,9 miliar dan Rp10.670,7 miliar (US$1.135,2 juta) untuk tahun 2008 dan 2009. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun 2008 dan 2009 terutama didorong oleh akuisisi signifikan terhadap aset tetap, mencapai total masing-masing sebesar Rp10.307,9 miliar dan Rp10.684,7 miliar (US$1.136,7 juta), seiring dengan dilakukannya perluasan cakupan dan kapasitas jaringan kami selama tahun-tahun tersebut. Aset tetap yang dibeli terutama meliputi aset sentral dan jaringan, perlengkapan pelanggan dan peralatan lain dan gedung dan sarana penunjang dan partisi.

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Kegiatan Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah masing-masing sebesar Rp1.458,5 miliar dan Rp3.724,7 miliar (US$396,2 juta) pada tahun 2008 dan 2009. Kas bersih dari kegiatan pendanaan pada tahun 2009 terutama berkaitan dengan penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp3.892,8 miliar (US$414,1 juta) dan penerbitan Obligasi Indosat Ketujuh dan Sukuk Ijarah Keempat sebesar Rp1.500,0 miliar (US$159,6 juta), yang sebagian diimbangi oleh pembayaran dividen tunai sebesar Rp939,3 miliar (US$99,9 juta) dan pembayaran kembali hutang jangka panjang sebesar Rp632,8 miliar (US$67,3 juta).

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Hutang

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah hutang yang yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009:

	Per 31 Desember		
	2008	2009	
	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta Dolar)		
Hutang jangka panjang (setelah dikurangi biaya emisi pinjaman dan biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek)	10.812,2	12.721,3	1.353,3
Hutang Obligasi (setelah dikurangi biaya emisi hutang obligasi, diskon, biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek)	10.315,6	8.472,2	901,3
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang	572,5	1.440,3	153,2
Bagian jangka pendek dari hutang obligasi	56,4	2.840,7	302,2

Peningkatan hutang jangka panjang (setelah dikurangi biaya emisi pinjaman dan biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek) menjadi sebesar Rp12.715,5 miliar (US$1.352,7 juta) pada tanggal 31 Desember 2009 dari Rp10.812,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh pinjaman-pinjaman baru dari Bank Central Asia, Bank Mandiri dan SEK, dan penarikan tambahan atas fasilitas HSBC France kami. Penurunan hutang obligasi (setelah dikurangi biaya emisi hutang obligasi, diskon, biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek) dari Rp10.315,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp8.472,2 miliar (US$901,3 juta) pada tanggal 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh pembayaran atas Obligasi Indosat Ketiga Seri A kami.

Beberapa instrumen hutang kami (selain dari Guaranteed Notes jatuh tempo 2010 dan Guaranteed Notes 2012) dan perjanjian-perjanjian hutang mewajibkan kami untuk mempertahankan maksimum rasio tertentu atas hutang (atau pinjaman) terhadap ekuitas, atau hutang rasio hutang terhadap ekuitas yang sebelum Februari 2009 adalah 1,75:1 atau 175%. Sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang kami minta atas instrumen dan perjanjian-perjanjian tersebut kami sepakat dengan pemberi pinjaman dan wali amanat di bulan Februari dan Maret 2009 bahwa hutang rasio hutang terhadap ekuitas menjadi 2,50:1 atau 250%. Kami juga meminta dan mendapatkan persetujuan pada batasan-batasan tertentu pada rasio hutang terhadap ekuitas sehingga definisi tersebut menjadi seragam terhadap seluruh instrumen dan perjanjian-perjanjian. Guaranteed Notes jatuh tempo 2010 dan Guaranteed Notes jatuh tempo 2012 tidak memuat persyaratan rasio hutang terhadap ekuitas.

Hutang kami meningkat sebesar 30,5% dari Rp16.692 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp21.756,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh (i) peningkatan dalam penerbitan hutang baru untuk mendukung peningkatan pengeluaran barang modal pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 dan (ii) efek akuntansi dari penurunan nilai Rupiah terhadap Dolar AS. Nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah menurun dari Rp9.393 untuk US$1,00 pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp10.950 untuk US$1,00 pada tanggal 31 Desember 2008. Karena bagian kewajiban kami dalam mata uang Dolar AS, kami terkena imbas fluktuasi Rupiah. Depresiasi Rupiah baru-baru ini dan peningkatan ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing mengekspos kami terhadap penyesuaian akuntansi jangka pendek yang mempengaruhi rasio keuangan kami. Untuk membantu menangani efek fluktuasi mata uang tersebut di masa depan, pada tahun 2009, kami mengubah kesepakatan rasio hutang terhadap ekuitas dalam semua instrumen dan perjanjian hutang kami untuk meningkatkan rasio dari 1,75 menjadi 2,50, untuk memberikan kami "ruang" tambahan dalam hal terjadinya pergerakan nilai tukar mata uang asing yang merugikan. Kami juga mengubah kesepakatan rasio hutang terhadap ekuitas untuk mencerminkan secara lebih baik efek kebijakan lindung nilai pada rasio ini dan mengubah definisi "Hutang" dan "Ekuitas" dalam instrumen dan perjanjian hutang tersebut untuk memberikan ruang dalam butir-butir tersebut. *Guaranteed Notes* jatuh tempo tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* jatuh tempo tahun 2012 tidak mengandung ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas.

Sebagai bagian dari perubahan yang disetujui pada tahun 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah definisi dalam beberapa instrumen dan perjanjian hutang kami (selain *Guaranteed Notes* jatuh tempo tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* jatuh tempo tahun 2012): (i) mengecualikan hal-hal non-kas, termasuk laba atau

rugi kurs valuta asing, dari definisi "EBITDA"; (ii) mengecualikan hutang pengadaan yang dikenakan bunga dari definisi "Hutang" kecuali apabila jatuh temponya lebih dari enam bulan dari tanggal tagihan (*invoice*); dan (iii) memasukkan dalam definisi "Ekuitas" (a) hak minoritas, untuk entitas yang hutangnya 100% terkonsolidasi oleh kami, dan (b) pinjaman subordinasi pemegang saham.

Walaupun kami yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut akan memberikan kami ruangan yang cukup dalam hal terjadi ketidakstabilan antara nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah, kami tidak dapat memastikan bahwa ketidakstabilan yang lebih besar daripada yang terjadi pada 12 bulan terakhir tidak akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kami melanggar ketentuan keuangan kami.

Di bawah ini adalah penghitungan rasio keuangan kami secara historis yang terdapat dalam ketentuan keuangan kami berdasarkan SAK yang dipersyaratkan oleh Perjanjian hutang kami. Rasio keuangan secara historis pada tanggal 31 Desember 2008 dihitung berdasarkan perubahan definisi "Hutang" (juga didefinisikan sebagai "Pinjaman" dalam beberapa terjemahan instrumen dan perjanjian hutang kami"), "Ekuitas" dan "EBITDA" dalam beberapa instrumen dan perjanjian kami seolah definisi tersebut telah berlaku sejak tanggal tersebut.

		Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	Persyaratan Ratio	2008	2009	
		Rp	Rp	US$
		(dalam miliar Rupiah, dalam juta US Dolar, kecuali persentase)		
Posisi keuangan dan pendapatan komprehensif				
Bagian jangka pendek dari:				
Hutang jangka panjang		572,5	1.440,3	153,2
Hutang Obligasi		56,4	2.840,7	302,2
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		1.596,2	2.192,5	233,2
Pihak Ketiga		9.216,0	10.523,0	1.119,5
Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek		10.315,6	8.472,2	901,3
Biaya emisi hutang obligasi, biaya consent solicitation dan diskon yang belum diamortisasi		312,3	338,4	36,0
Jumlah Hutang[1]		22.069,0	25.807,1	2.745,4
Jumlah Aset		51.820,2	55.377,1	5.891,2
Jumlah Kewajiban		34.083,7	36.858,6	3.921,1
Jumlah Ekuitas[2]		17.736,5	18.518,5	1.970,1
Laba Usaha		4.722,0	3.209,9	341,5
Penyusutan dan amortisasi		4.555,9	5.561,4	591,6
EBITDA[3]		9.277,9	8.771,3	993,1
Beban Bunga[4]		1.830,1	1.859,9	197,9
Rasio Keuangan:				
Rasio Hutang terhadap Ekuitas [5]	<2,50x	1,24x	1,39x	-
Rasio Hutang terhadap EBITDA [6]	<3,50x	2,38x	2,94x	-
Rasio EBITDA terhadap beban bunga [7]	>3,00x	5,07x	4,72x	-

(1) Kami mendefinisikan total hutang sebagai jumlah dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi (bagian jangka pendek dan jangka panjang), biaya emisi yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang, obligasi dan *notes*), biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang dan obligasi) dan diskon yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang dan *notes*).
Menurut definisi yang telah diubah, "Hutang" berarti, dalam hubungannya dengan suatu pihak pada setiap tanggal penentuan (tanpa duplikasi):
(a) jumlah hutang pokok dan premium (jika ada) sehubungan dengan hutang kepada pihak tersebut dan hutang yang sebagaimana dibuktikan dengan *notes*, surat hutang, obligasi atau instrumen serupa lainnya yang mengandung bunga yang harus dibayar; dan
(b) seluruh kewajiban kepada suatu pihak sehubungan dengan hutang pengadaan yang merupakan hutang dagang kepada pemasok yang mengandung bunga atau memiliki jatuh tempo lebih dari enam (6) bulan setelah tanggal penerbitan *invoice* yang terkait.
Akan tetapi, sehubungan dengan anggota dari Perusahaan, atau penggantinya, atau Grup, tidak termasuk seluruh pinjaman yang diperoleh anggota grup dari pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) yang memiliki peringkat subordinasi terhadap hutang termasuk dalam poin (a) dan (b) di atas.

(2) Kami mendefinisikan ekuitas sebagai jumlah ekuitas para pemegang saham dan hak minoritas. Menurut definisi yang telah diubah, "Ekuitas" berarti jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban, dimana jumlah kewajiban tidak termasuk seluruh pinjaman anggota Grup kepada pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) yang mempunyai kedudukan subordinasi terhadap Hutang.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

(3) Kami telah mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum bunga, amortisasi *goodwill*, pendapatan non-operasional dan beban, beban pajak penghasilan dan penyusutan, dan hak minoritas dalam laba bersih anak perusahaan sebagaimana dihitung berdasarkan SAK. EBITDA bukanlah merupakan ukuran standar dalam SAK maupun IFRS. Sebagaimana bisnis telekomunikasi memerlukan modal yang banyak, ketentuan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang dan beban bunga dapat memiliki efek yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan dengan hasil operasional yang sama. Oleh karena itu, kami yakin bahwa EBITDA memberikan gambaran yang berguna bagi hasil operasional kami dan bahwa laba bersih adalah ukuran keuangan yang paling dapat secara langsung dibandingkan terhadap EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak disarankan menganggap bahwa definisi kami tentang EBITDA merupakan indikator terhadap kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya berdasarkan SAK maupun IFRS, atau definisi perusahaan lainnya atas EBITDA. Definisi kami akan EBITDA tidak memperhitungkan pajak dan pengeluaran kas non-operasional lainnya. Dana yang didapat dari ukuran ini mungkin tidak dapat digunakan untuk pembayaran hutang karena adanya pembatasan ketentuan, ketentuan pengeluaran barang modal dan komitmen lainnya.
Menurut definisi yang telah diubah, "EBITDA" berarti, untuk periode adalah jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan *(finance cost),* pajak, pendapatan atau biaya yang berasal dari kegiatan non operasional dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi, serta untuk keperluan penghitungan rasio total Hutang terhadap EBITDA, EBITDA juga memperhitungkan proforma dari adanya akuisisi atau pengalihan material atas aset atau usaha seolah-olah akuisisi atau pengalihan tersebut terjadi pada hari pertama periode tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi laba bersih berdasarkan SAK terhadap pengertian EBITDA berdasarkan periode-periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	
	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US$)		
EBITDA berdasarkan SAK	9.289,2	8.774,4	933,4
Penyesuaian:			
Amortisasi goodwill	(227,3)	(235,4)	(25,0)
Pendapatan bunga	460,1	139,0	14,8
Beban Pendanaan (termasuk beban bunga)	(1.858,3)	(1.873,0)	(199,3)
Laba (Rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih	136,6	(486,9)	(51,8)
Lain-Lain — bersih	(33,6)	(150,3)	(16,0)
Laba (rugi) selisih kurs— net	(885,7)	1.656,4	176,2
Beban pajak penghasilan — bersih	(419,8)	(677,3)	(72,0)
Penyusutan dan amortisasi	(4.555,9)	(5.561,4)	(591,6)
Laba untuk kepentingan bukan pengendali	(26,8)	(56,5)	(6,0)
Laba kepada pemilik Perusahaan berdasarkan SAK	**1.878,5**	**1.498,2**	**159,4**

(4) "Beban Bunga" berarti, untuk setiap periode, beban bunga atas hutang.
(5) menggunakan hasil IFRS, total Hutang akan mencapai masing-masing Rp22.069,0 miliar dan Rp25.807,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, dan Total Ekuitas mencapai masing-masing sebesar Rp17.736,5 miliar dan Rp18.518,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, sebagai akibatnya rasio Debt to Equity 124% dan 139% per 31 Desember 2008 dan 2009.
(6) menggunakan hasil IFRS, total Hutang akan mencapai masing-masing Rp22.069,0 miliar dan Rp25.807,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, dan EBITDA akan mencapai Rp9.277,9 miliar and Rp8.771,3 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2009, mengakibatkan rasio Debt to EBITDA, masing-masing 238% dan 294% per tanggal 31 Desember 2008 dan 2009.
(7) menggunakan hasil IFRS, EBITDA sebesar Rp9.277,9 miliar dan Rp8.771,3 miliar untuk tahun yang berakhir 31 December 2008 dan 2009, dan Beban Bunga Rp1.830,1 miliar dan Rp1.859,9 miliar untuk tahun yang berakhir 31 December 2008 dan 2009, mengakibatkan rasio EBITDA terhadap Interest Expense 507% dan 472% per 31 Desember 2008 dan 2009.

Dari waktu ke waktu, kami dapat membeli kembali bagian efek hutang kami melalui transaksi pasar terbuka berdasarkan kondisi pasar pada umumya.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan hutang jangka panjang dan hutang obligasi utama kami per 31 Desember 2008 dan 2009.

	Per tanggal 31 Desember		
	2008		2009
	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US$)		
Bonds Payable:			
Obligasi Indosat kelima— setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	2.593,1	2.587,2	275,2
Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2010 — setelah dikurangi biaya emisi GN yang belum diamortisasi	2.563,5	2.202,7	234,3
Obligasi Indosat Tujuh— setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	—	1.293,8	137,6
Obligasi Indosat Keenam — setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	1.075,7	1.073.0	114,1
Guaranteed Notes jatuh tempo 2012 — setelah dikurangi biaya emisi GN yang belum diamortisasi	1.185,3	1.018,8	108,4
Obligasi Indosat Keempat — setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	810,5	811,0	86,3

	Per tanggal 31 Desember		
	2008		2009
	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US$)		
Obligasi Indosat Ketiga — setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasii	637,3	637,9	67,9
Indosat Sukuk Ijarah III — setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	567,8	566,4	60,3
Indosat Sukuk Ijarah II — setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	399,0	398,1	42,4
Indosat Syari'ah Ijarah Bonds — setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	283,4	283,6	30,2
Obligasi Kedua	200,0	199,4	21,2
Sukuk Ijarah IV— setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	—	199,0	21,2
Obligasi Terbatas II yang dikeluarkan Lintasarta(1)	31,1	25,0	2,6
Obligasi Terbatas I yang dikeluarkan Lintasarta(2)	25,3	17,0	1,8
Jumlah Hutang	10.372,0	11.312,9	1.203,5
Dikurangi bagian jangka pendek	56,4	2.840,7	302,2
Hutang Obligasi: bagian jangka panjang	**10.315,6**	**8.472,2**	**901,3**
Hutang jangka panjang:			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa — setelah dikurangi biaya emisi pinjaman yang belum diamortisasi	1.796,2	2.592,5	275,8
Pihak Ketiga — setelah dikurangi biaya emisi pinjaman yang belum diamortisasi	9.588,5	11.563,3	1.230,1
Jumlah Hutang	11.384,7	14.155,8	1.505,9
Dikurangi bagian jangka pendek	572,5	1.440,3	153,2
Hutang: bagian jangka panjang	**10.812,2**	**12.715,5**	**1.352,7**

Setelah eliminasi Obligasi Terbatas II sebesar Rp35,0 miliar yang diterbitkan kepada Perusahaan
Setelah eliminasi Obligasi Terbatas I sebesar Rp9,6 miliar yang diterbitkan kepada Perusahaan

Obligasi Indosat

Ketentuan-ketentuan khusus untuk masing-masing Obligasi Indosat Kedua, Obligasi Indosat Ketiga, Obligasi Indoast Keempat, Obligasi Indosat Kelima, Obligasi Indosat keenam dan obligasi Indosat ketujuh (**"Obligasi Indosat"**) akan diuraikan di bawah ini. Obligasi Indosat tidak dijamin dengan aset tertentu atau dijamin oleh pihak lain dan berkedudukan pari passu dengan hutang lainnya yang tidak dijamin. Kami menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyetujui untuk mempertahankan:

- ekuitas sekurang-kurangnya Rp5.000,0 miliar;
- rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5 terhadap 1,00, sebagaimana dilaporkan dalam tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi tahunan;
- rasio hutang terhadap ekuitas 2,5 berbanding 1, sebagaimana dialporkan pada tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi triwulanan; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 3,0 berbanding 1.

Pada tanggal 24 Maret 2009 kami mengadakan rapat dengan pemegang obligasi Rupiah, termasuk pemegang Obligasi Indosat, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Hutang," "EBITDA," memasukkan definisi baru "Ekuitas" dan "Grup" dan mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari 1,75 berbanding 1 menjadi 2,5 berbanding 1 dalam perjanjian perwaliamanatan yang mengatur obligasi-obligasi tersebut, berdasarkan perubahan perjanjian untuk Obligasi Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam.

Obligasi Indosat Kedua. Pada 6 November 2002, kami menerbitkan Obligasi Indosat II ("Obligasi Indosat Kedua"), dengan tingkat suku bunga tetap dan/atau mengambang, dimana satu-satunya seri yang masih terhutang adalah obligasi Seri B. Obligasi Seri B, dengan jumlah total sebesar Rp 200,0 miliar Rupiah, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 16,0% per tahun dan wajib dibayar setiap triwulan selama 30 tahun dimulai sejak 6 Februari 2003. Kami memiliki hak untuk membeli kembali obligasi Seri B, secara keseluruhan tapi tidak secara sebagian, setiap ulang tahun ke-5, 10, 15, 20 dan 25 atas penerbitan obligasi Seri B pada harga yang setara dengan 101% dari nilai nominal obligasi Seri B. Para pemegang obligasi Seri B memiliki suatu *put right* yang mengizinkan para pemegang tersebut untuk meminta pembayaran awal dari kami pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi Seri B pada saat (i) kapan pun, apabila peringkat dari obligasi tersebut turun menjadi "$_{id}$ AA-" atau lebih rendah (ii) setelah lewatnya salah satu dari ulang tahun ke-15, 20, dan 25 pada penerbitan obligasi Seri B. Obligasi Seri B jatuh tempo pada 6 November 2032.

Obligasi Indosat Ketiga. Pada 15 Oktober 2003, kami menerbitkan Obligasi Indosat III ("Obligasi Indosat Ketiga"), dimana satu-satunya seri yang terhutang adalah obligasi Seri B. Obligasi Seri B, yang mana akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2010 dengan jumlah total sebesar Rp 640,0 miliar, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,875% per tahun. Bunga atas Obligasi Indosat Ketiga dibayar setiap triwulan. Kami memiliki hak untuk melakukan pembayaran awal atas seluruh obligasi Seri B pada ulang tahun ke- empat dan ke-enam atas obligasi tersebut pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi. Setelah peringatan pertama penerbitan obligasi, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh bagian dari obligasi senilai harga pasar.

Obligasi Indosat Keempat. Pada 21 Juni 2005, kami menerbitkan Obligasi Indosat IV ("Obligasi Indosat Keempat"). Obligasi Indosat Keempat memiliki nilai nominal sebesar Rp 815,0 miliar dan akan jatuh tempo pada 21 Juni 2011. Obligasi Indosat Keempat memiliki tingkat suku bunga tetap 12,0% per tahun, yang wajib dibayar setiap triwulannya. Kami memiliki hak untuk membeli kembali seluruh obligasi pada ulang tahun keempat obligasi-obligasi tersebut pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi tersebut. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar.

Obligasi Indosat Kelima. Pada 29 Mei 2007, kami menerbitkan Obligasi Indosat V ("Obligasi Indosat Kelima"), dalam dua seri dengan jumlah sebesar Rp2.600,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp760,0 miliar, akan jatuh tempo pada 29 Mei 2014 dan obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp1.370,0 miliar, akan jatuh tempo pada 29 Mei 2017. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 10,20% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 10,65% per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Obligasi Indosat Keenam. Pada 9 April 2008, kami menerbitkan Obligasi Indosat VI ("Obligasi Indosat Keenam"), dalam dua seri dengan jumlah sebesar Rp1.080,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp320,0 miliar yang akan jatuh tempo pada 9 April 2015. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,80% per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Obligasi Indosat Ketujuh. Pada 8 Desember 2009, kami menerbitkan Obligasi Indosat VII ("Obligasi Indosat Ketujuh"), dalam dua seri dengan jumlah sebesar Rp1.300,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp700,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014 dan obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp 600,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016. Obligasi seri A memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 11,25% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 11,75% per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010

Pada bulan Oktober 2003, anak perusahaan kami di bidang pembiayaan, Indosat Finance Company B.V., menerbitkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 memiliki jumlah sebesar US$300.0 juta dan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2010. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,75% per tahun yang harus dibayar dalam cicilan enam bulanan dan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei dan 5 November setiap tahun, dimulai sejak tanggal 5 Mei 2004. Indosat Finance Company B.V. dapat membeli kembali sebanyak-banyaknya 35,0% dari total nilai pokok dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dengan dana yang berasal dari penawaran umum saham yang kami tawarkan, dengan harga senilai 107,75% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 juga dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Finance Company B.V., secara keseluruhan atau sebagian pada setiap waktu, pada atau setelah tanggal 5 November 2008 dengan harga senilai 103,875%, pada atau setelah tanggal 5 November 2009 dengan harga senilai 101,9375% dan pada atau setelah tanggal 5 November 2010 dengan harga senilai 100,0% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada. Indosat memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 tercatat di Luxembourg Stock Exchange dan di Official List dari Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 dapat dibeli kembali atas pilihan Indosat Finance Company B.V., secara keseluruhan tetapi tidak sebagian pada setiap waktu, dengan harga senilai 103,5625% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya sampai dengan tanggal pembelian kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi pajak penghasilan di Indonesia dan Belanda yang mengharuskan Indosat Finance Company B.V. atau kami membayar uang tambahan sehubungan dengan hutang yang melebihi jumlah tertentu. Apabila terjadi perubahan kendali di dalam Indosat Finance Company B.V. (termasuk penjualan, pemindahan, pengalihan, penyewaan, penyerahan atau pelepasan lainnya atas semua atau sebagian besar aktivanya), seorang pemegang surat hutang berhak meminta Indosat Finance Company B.V. untuk membeli kembali semua atau sebagian dari surat hutang yang dimilikinya dengan harga senilai 101% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada, sampai dengan tanggal pembelian.

Kami menerima hasil *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 pada tanggal 5 November 2003 berdasarkan perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan Indosat Finance Company B.V. dan menggunakan dananya terutama untuk melunasi sebagian hutang kami yang ada. Kami menyetujui beberapa ketentuan berkenaan dengan penerbitan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010, termasuk namun tidak terbatas pada kesepakatan-kesepakatan yang melarang kami untuk:

- mengadakan hutang tambahan;
- membayar dividen atau melakukan pembagian modal saham;
- membeli atau menarik kembali modal saham;
- melakukan penggadaian;
- menjual, menggadaikan, menjadikan agunan atau melepaskan modal saham dari anak perusahaan;
- menjual aset;
- mengadakan kesepakatan yang melarang pembagian dividen dari anak perusahaan;
- mengadakan transaksi dengan, atau untuk kepentingan, salah satu afiliasi;
- mengadakan transaksi *sale and lease back*;
- menjalankan usaha selain dari usaha telekomunikasi; atau
- melakukan konsolidasi, penggabungan usaha atau menjual semua atau sebagian besar aktiva kami, selain dari dalam rangka transaksi tertentu antara kami dengan satu atau lebih anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh kami.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Pada tanggal 11 Januari 2006, kami telah menyelesaikan proses *consent solicitation* sehubungan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. Tujuan utama dari *consent solicitation* adalah untuk mengubah beberapa ketentuan berkenaan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dengan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012. Dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012, kami dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan administrasi, dan untuk mengubah beberapa ketentuan yang termuat dalam surat perjanjian berkenaan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 yang lebih ketat lagi larangannya. Pada 19 September 2008, kami telah menyelesaikan penawaran sebagai akibat dari perubahan pengendalian untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. Per 31 Maret 2010 terdapat US$234,7 juta nilai pokok dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 yang belum dibayar (nilai kotor dari biaya penerbitan surat hutang yang belum diamortisasi).

Pada tanggal 11 Mei 2010, kami, bersama-sama dengan Indosat Finance Company B.V. ("Indosat Finance") dan Indosat International Finance Company B.V ("Indosat International", mengumumkan dimulainya penawaran tender untuk membeli secara tunai semua dan setiap jumlah yang terhutang dari Guaranteed Notes jatuh tempo 2010 yang diterbitkan oleh Indosat Finance dan Guaranteed Notes jatuh tempo 2012 yang diterbitkan oleh Indosat International. Sebagai tambahan dari Penawaran untuk Guaranteed Notes jatuh tempo 2010, Indosat Finance juga mengajukan, satu usulan, atas beberapa perubahan tertentu yang diusulkan atas Indenture yang diubah dan dinyatakan kembali, tanggal 25 Januari 2006 ("Indenture 2010") yang memperpendek periode pemberitahuan untuk opsi pelunasan dari Notes 2010 dan untuk melepaskan kedudukan Indosat International sebagai penjamin berdasarkan Indenture 2010. Penawaran tersebut diperkirakan akan berakhir pada pukul 12:00 tengah malam, waktu New York, pada tanggal 17 Juni 2010, kecuali diperpanjang atau diakhiri oleh Indosat Finance atau Indosat International.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012

Pada tanggal 22 Juni 2005, anak perusahaan pembiayaan kami, Indosat International Finance Company B.V., menerbitkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 memiliki jumlah sebesar US$250.0 juta yang diterbitkan pada 99,3% dari nilai nominal tersebut dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2012. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,125% per tahun yang harus dibayar dalam cicilan enam bulanan, yang jatuh tempo pada tanggal 22 Juni dan 22 Desember setiap tahun, dimulai sejak tanggal 22 Desember 2005. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Finance Company B.V., secara keseluruhan atau sebagian, pada setiap waktu pada atau setelah tanggal 22 Juni 2010 dengan harga senilai 103,5625%, pada atau setelah tanggal 22 Juni 2011 dengan harga senilai 101,7813% dan pada atau setelah tanggal 22 Juni 2012 dengan harga senilai 100,0% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada. Selain itu, sebelum tanggal 22 Juni 2008, Indosat International Finance Company B.V. dapat membeli kembali sebanyak-banyaknya 35,0% dari hasil satu atau lebih penawaran umum saham Perusahaan, dengan harga senilai 107,125% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 juga dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat International Finance Company B.V., secara keseluruhan tetapi tidak sebagian pada setiap waktu, dengan harga senilai 103,5625% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya sampai dengan tanggal pembelian kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi pajak penghasilan di Indonesia dan Belanda yang mengharuskan Indosat Finance Company B.V. atau kami membayar sejumlah tambahan sehubungan dengan hutang yang melebihi jumlah tertentu. Apabila terjadi perubahan kendali di dalam Indosat Finance Company B.V. (termasuk penjualan, pemindahan, pengalihan, lease, penyerahan atau pelepasan lainnya atas semua atau sebagian besar aktivanya), seorang pemegang surat hutang berhak meminta Indosat Finance Company B.V. untuk membeli kembali semua atau sebagian dari surat hutang yang dimilikinya dengan harga senilai 101% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang timbul dan belum dibayarkan dan jumlah lainnya, jika ada, sampai dengan tanggal pembelian. Indosat memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 tercatat di Luxembourg Stock Exchange dan di Official List dari Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Kami menerima hasil penerbitan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 pada tanggal 23 Juni 2005 berdasarkan perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan Indosat Finance Company B.V. dan menggunakan dana tersebut

untuk melunasi sebagian hutang kami yang ada. Kami menyetujui beberapa ketentuan berkenaan dengan penerbitan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 yang sebagian besar serupa dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan *consent solicitation*.

Pada tanggal 19 September 2008, Indosat melengkapi penawaran atas perubahan kendali untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012. Sejak 31 Maret 2010, terdapat US$109.4 juta nilai pokok dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012 yang terhutang (sebelum dikurangi i diskon *notes* yang belum diamortisasi dan biaya emisi *notes*).

Bersamaan dengan penawaran tender Guaranteed Notes jatuh tempo 2010, kami juga melaksanakan tender untuk Guaranteed Notes jatuh tempo 2012. Lihat "—Guaranteed Notes jatuh tempo 2012.

Fasilitas Export Credit

Pada tanggal 12 Mei 2006, kami mengadakan perjanjian fasilitas berjangka dengan Finnish Export Credit Ltd, sebagai pemberi pinjaman, dan The Royal Bank of Scotland, N.V. (yang dulunya dikenal dengan nama ABN Amro Bank, N.V.) sebagai agen fasilitas (*facility agent*), untuk Fasilitas Kredit Ekspor, dengan total jumlah pokok sebesar US$38,0 juta. Jangka waktu Fasilitas Kredit Ekspor adalah 60 bulan sejak tanggal perjanjian dan harus dibayar dalam sepuluh kali cicilan dengan jumlah yang sama yang dibagi rata selama jangka waktu fasilitas. Fasilitas Kredit Ekspor memiliki tingkat suku bunga 4,15% per tahun, yang dihitung dengan merujuk pada tingkat suku bunga komersial untuk Dollar AS. Setelah nilai dari Fasilitas Kredit Ekspor ditarik dan dilunasi, jumlah tersebut tidak lagi tersedia untuk dipinjamkan secara berulang. Fasilitas Kredit Ekspor memuat ketentuan-ketentuan tertentu tentang keuangan. Selama tahun 2008 dan 2009, Indosat membayar cicilan atas fasilitas ini masing-masing dengan nilai sebesar US$7,6 juta dan US$7,6 juta.

Obligasi Syari'ah Ijarah (Sukuk Ijarah)

Ketentuan khusus atas setiap Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, Sukuk Ijarah Kedua, Sukuk Ijarah Ketiga, dan Sukuk Ijarah Keempat ("Obligasi Syari'ah Ijarah"), didiskusikan berikut ini. Obligasi Syari'ah Ijarah tidak dijaminkan dengan suatu aktiva apapun atau dijamin oleh suatu pihak manapun dan berkedudukan setingkat dengan hutang Indosat lainnya yang tidak dijaminkan.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah, Indosat setuju untuk tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan tertentu yang termuat di dalam Obligasi Indosat. Selain itu, Indosat juga dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentang dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Disamping larang-larangan tersebut, tidak terdapat perbedaan yang material di antara ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Obligasi Syari'ah Ijarah dengan Obligasi Indosat. Pada 24 Maret 2009, Indosat menyelenggarakan rapat dengan para pemegang obligasi dengan mata uang Rupiah, termasuk dengan para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Hutang," "EBITDA," untuk menambah definisi-definisi baru bagi "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari semula 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 pada perjanjian perwaliamanatan yang mengatur obligasi-obligasi ini.

Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama. Pada 21 Juni 2005, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat I ("Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama memiliki total nilai sebesar Rp285,0 miliar dan jatuh tempo pada 21 Juni 2011. Para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Cicilan imbalan Ijarah diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama adalah sebesar Rp34,2 miliar per tahun. Kami memiliki hak untuk melakukan pembayaran awal untuk seluruh Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama pada ulang tahun keempat dari Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi tersebut. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama tersebut senilai harga pasar, baik untuk disimpan maupun untuk tujuan pelunasan awal.

Sukuk Ijarah Kedua. Pada 29 Mei 2007, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat II ("Sukuk Ijarah Kedua"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku di dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah kedua memiliki total nilai sampai dengan Rp400,0 miliar dan jatuh tempo pada 29 Mei 2014. Para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua adalah sebesar Rp40,8 miliar per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Sukuk Ijarah Ketiga. Pada 9 April 2008, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat III ("Sukuk Ijarah Ketiga"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga memiliki total nilai sampai dengan Rp570,0 miliar dan jatuh tempo pada 9 April 2013. Para pemegang dari Sukuk Ijarah Ketiga menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah Ketiga adalah sebesar Rp 58,4 miliar per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Sukuk Ijarah Ketiga, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Sukuk Ijarah Keempat. Pada 8 Desember 2009, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat IV ("Sukuk Ijarah Keempat"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat memiliki total nilai sebesar Rp 200,0 miliar. Obligasi Syari'ah Ijarah Seri A, yang memiliki total nilai sebesar Rp 28,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014 dan Obligasi Syari'ah Ijarah Seri B, yang memiliki total nilai sebesar Rp 172,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016. Para pemegang dari Sukuk Ijarah Keempat menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah Keempat adalah sebesar Rp3,2 miliar per tahun untuk Sukuk Ijarah Keempat Seri A dan Rp20,2 miliar per tahun untuk Sukuk Ijarah Keempat Seri B. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Sukuk Ijarah Keempat, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Fasilitas Pinjaman Goldman Sachs International

Pada tanggal 30 Mei 2007, kami menerima dari Goldman Sachs International ("GSI") suatu pinjaman sebesar Rp434,3 miliar, yang mana diterima dalam Dollar AS sampai dengan US$50,0 juta untuk keperluan pembelian perangkat telekomunikasi. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, yang harus dibayar setiap triwulanan pada tanggal 28 Februari, 30 Mei, 30 Agustus dan 30 November, yang dimulai sejak 30 Agustus 2007 sampai dengan 30 Mei 2012.

Perjanjian pinjaman tersebut memberikan opsi bagi GSI untuk mengkonversikan pinjaman tersebut menjadi pinjaman dalam Dolar AS sebesar US$50,0 juta pada tanggal 30 Mei 2012 ("Opsi Konversi"). Nilai wajar dari Opsi Konversi disajikan sebagai bagian dari hutang jangka panjang. Jika GSI menggunakan opsi tersebut, maka sejak tanggal 30 Mei 2012, pinjaman akan dikenakan suku bunga tetap sebesar 6,45% terhadap nilai pokok atas jumlah US$50.0 juta. Hutang pokok dalam mata uang Dolar AS dan bunga tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013.

Perusahaan diharuskan untuk memberitahukan GSI mengenai peristiwa-peristiwa berikut yang dapat mengakibatkan pengakhiran pinjaman seperti (i) perubahan-perubahan tertentu yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan di Inggris ataupun Indonesia, (ii) cidera janji berdasarkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012, (iii) cidera janji berdasarkan *notes* yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Dolar AS atau cidera janji berdasarkan *notes* yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, (iv) pembelian kembali, pembelian atau pembatalan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 dan tidak ada hutang lain dalam mata uang Dolar AS yang masih terhutang, setelah pembelian kembali, pembelian ataupun pembatalan dan (v) perubahan kendali

dalam Perusahaan. Pada tanggal 24 Juni 2008, GSI tidak melaksanakan haknya untuk mengakhiri pinjaman tersebut sebagai hasil dari perubahan kendali yang dipicu oleh akuisisi Qtel terhadap 40,81% kepemilikan atas modal saham ditempatkan Perusahaan, pada Juni 2008.

Fasilitas Pinjaman Bank Central Asia

Pada tanggal 28 Agustus 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Central Asia ("BCA") sebesar Rp1.600,0 miliar untuk membayar kembali Fasilitas Pinjaman Sindikasi II dan membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk JIBOR tiga bulanan ditambah 1,5% per tahun; dan seluruh pembayaran bunga dilakukan setiap triwulanan. Pada tanggal 20 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit tambahan sebesar Rp400,0 miliar dari BCA. Akibatnya, keseluruhan jumlah pokok dari fasilitas kredit dengan BCA menjadi sebesar Rp2.000,0 miliar. Pembayaran kembali atas pinjaman yang dicairkan akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun pertama dan kedua setelah pencairan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun ketiga dan keempat setelah pencairan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun kelima setelah pencairan pertama. Pada tanggal 27 September, 26 Oktober dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan pencairan pinjaman pertama, kedua dan ketiga dengan jumlah total sebesar Rp2.000,0 miliar. Pada 27 September 2008, kami membayar cicilan pertama tengah tahunan kami sejumlah Rp200,0 miliar.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, termasuk ketentuan pemeliharaan, yang mana serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Obligasi Indosat.

Pada 17 September 2008, Perusahaan membuat perjanjian fasilitas kredit tiga tahun tanpa jaminan dengan BCA yang bernilai Rp500,0 miliar untuk pembelian, dan/atau untuk pembiayaan ulang dari hutang yng timbul karena pembelian tersebut, atas perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan bunga JIBOR tiga bulanan ditambah 2,25% per tahun. Pembayaran kembali atas pinjaman yang dicairkan akan dibuat setiap tahunnya, sebagai berikut: (a) 20% dari total pinjaman yang dicairkan pada tahun pertama, (b) 30% dari total pinjaman yang dicairkan pada tahun kedua, (c) 50% dari total pinjaman yang dicairkan pada tahun ketiga. Pada 16 Maret 2009, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman sampai dengan Rp500,0 miliar. Pembayaran kembali lebih awal sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) diizinkan dengan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai yang dibayar awal tersebut. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio pembiayaan tertentu.

Pada 12 Februari 2009, Perusahaan merubah perjanjian fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dengan BCA, berdasarkan surat kesepakatan yang diterima tanggal 6 Februari 2009, untuk merubah definisi dari "EBITDA," untuk menambahkan definisi baru dari "Pinjaman," "Ekuitas," dan "Grup" dan untuk merubah rasio antara Hutang terhadap Ekuitas dari awalnya 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 pada perjanjian pinjaman yang mengatur tentang fasilitas pinjaman tersebut.

Pada 8 Juni 2009, Perusahaan membuat perjanjian fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dengan BCA yang bernilai Rp1,000 miliar untuk pengadaan, dan/atau pembiayaan ulang dari hutang yang timbul dari pembelian tersebut, atas perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan bunga JIBOR tiga bulanan ditambah 4,00% per tahun. Pembayaran kembali atas pinjaman yang dicairkan akan dibuat setiap tahunnya, sebagai berikut: (a) 10% dari total pinjaman yang dicairkan pada tahun pertama dan kedua, (b) 15% dari total pinjaman yang dicairkan pada tahun ketiga dan keempat, dan (c) 50% dari total pinjaman yang dicairkan pada tahun kelima. Pada 25 Juni 2009, Perusahaan melakukan pencairan pinjaman yang bernilai Rp1.000,0 miliar. Pembayaran kembali awal sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) adalah diizinkan, yang terikat pada 1% denda dari nilai yang dibayar awal tersebut, kecuali pembayaran dalam rangka membiayai kembali fasilitas ini. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio pembiayaan tertentu.

Fasilitas Pinjaman Bank Mandiri

Pada 18 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Mandiri sebesar Rp2.000,0 miliar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk JIBOR tiga bulanan ditambah 1,5% per tahun, dan semua bunga harus dibayar setiap triwulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah dicairkan akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun pertama dan kedua setelah pencairan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun ketiga dan keempat setelah pencairan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Pada tanggal 27 September dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan pencairan pinjaman pertama dan kedua sebesar Rp2.000,0 miliar. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, termasuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada 27 September 2008, kami membayar cicilan pertama kami sejumlah Rp200,0 miliar. Pada tanggal 23 Maret 2009, kami telah mengadakan perjanjian dengan Bank Mandiri untuk melakukan pada perubahan definisi "EBITDA", menambah definisi baru mengenai "Pinjaman", "Ekuitas" dan "Grup" dan rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dalam pinjaman kami sesuai dengan ketentuan perjanjian perubahan.

Pada 28 Juli 2009, Perusahaan membuat fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Mandiri sebesar Rp1.000 miliar untuk keperluan umum perseroan. Pinjaman dikenakan bunga pada suku bunga rata-rata JIBOR tiga bulanan ditambah 4% per tahun. Pada tanggal 31 Juli 2009, Perusahaan mencairkan sebesar Rp1.000 miliar dari fasilitas kredit tersebut. Pembayaran kembali dari pinjaman yang telah dicairkan akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun pertama dan kedua setelah pencairan pertama, (b) 15% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun ketiga dan keempat setelah pencairan pertama, (c) 50% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Pembayaran kembali awal sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) adalah diizinkan, yang terikat pada 2% denda dari nilai yang dibayar awal tersebut. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio pembiayaan tertentu.

Fasilitas Pinjaman Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 1 November 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp500,0 miliar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman tersebut dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,7% untuk tahun pertama dan 10,4% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk sertifikat Bank Indonesia tiga bulan ditambah 1,5% per tahun; semua bunga harus dibayar setiap triwulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah dicairkan akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun pertama dan kedua setelah pencairan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun ketiga dan keempat setelah pencairan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang dicairkan dalam tahun kelima setelah pencairan pertama. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk mempertahankan rasio pembiayaan tertentu. Pada 31 Januari 2008, kami mencairkan Rp500,0 miliar dari fasilitas tersebut. Pada 31 Maret 2010, kami memiliki Rp400,0 miliar hutang yang belum dibayar pada Fasilitas Pinjaman Bank DBS Indonesia. Pada 25 Maret 2009, kami membuat perjanjian dengan Bank DBS Indonesia untuk memasukkan definisi baru mengenai "Hutang," "EBITDA", "Ekuitas", dan "Grup" dan untuk merubah rasio Hutang terhadap Ekuitas pada perjanjian pinjaman yang mengatur fasilitas pinjaman ini.

Pembiayaan Satelit HSBC

Pada 27 November 2007, kami menandatangani dua perjanjian fasilitas tanpa jaminan dengan HSBC Perancis dan satu perjanjian fasilitas dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta ("HSBC Jakarta") untuk membiayai satelit telekomunikasi kami yang baru. Gabungan fasilitas kredit ekspor dan fasilitas pembiayaan komersial ini terdiri dari:

- perjanjian fasilitas dengan jangka waktu 12 tahun sebesar US$157,2 juta untuk membiayai pembayaran 85,0% dari nilai Muatan Perancis berdasarkan Kontrak Satelit Palapa-D ditambah 100% Premi COFACE, yang mana ketentuan tersebut diatur di dalam perjanjian fasilitas. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap tahunan sebesar 5,69%, yang harus dibayar setiap enam bulanan;
- perjanjian fasilitas dengan jangka waktu 12 tahun sebesar US$44.2 juta untuk membiayai pembayaran 85,0% dari nilai Kontrak Jasa Peluncuran Satelit (sebagaimana yang didefinisikan di dalam perjanjian fasilitas) sehubungan dengan Satelit Palapa-D milik kami. Pinjaman dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dollar AS pada LIBOR ditambah 0,35% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulan; dan
- Perjanjian Fasilitas Komersial dengan jangka waktu 9 tahun sebesar US$27.0 juta untuk membiayai pembangunan dan peluncuran satelit dan pembayaran premi yang berkaitan dengan polis asuransi kredit pembelian jangka menengah dan jangka panjang yang diterbitkan sehubungan dengan Fasilitas Sinosure. Pinjaman dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dollar AS pada LIBOR ditambah 1,45% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulanan.

Pada tanggal 31 Maret 2010, kami memiliki US$149,3 juta yang terhutang di bawah Ketentuan Fasilitas COFACE, US$42,0 juta yang terhutang di bawah Ketentuan Fasilitas Sinosure, dan US$25,7 juta yang terhutang di bawah Fasilitas Komersial. Fasilitas memuat ketentuan-ketentuan pembiayaan tertentu. Pada 18 Maret 2009, kami membuat perjanjian-perjanjian dengan HSBC Perancis dan HSBC Jakarta untuk merubah definisi "Hutang," "EBITDA," dan "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas pada Perjanjian Fasilitas Ketentuan COFACE, Perjanjian Fasilitas Ketentuan Sinosure dan Perjanjian Fasilitas Komersial, sebagaimana yang berlaku. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan: (i) modal pokok senilai lebih dari Rp5.000 miliar, (ii) rasio Hutang dengan ekuitas yang tidak melebihi 2,5:1, (iii) EBITDA terhadap rasio bunga untuk tidak melebihi 2,5:1, dan (iv) rasio Hutang terhadap EBITDA yang tidak melebihi 3,5:1. Selain itu pada 4 Desember 2009, Perusahaan membuat Perjanjian Fasilitas Korporasi dengan HSBC untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek. Fasilitas tersebut terdiri atas suatu batasan kombinasi sebesar US$30 juta dan *revolving loan* sebesar US$30 juta. Perusahaan belum melakukan pencairan atas fasilitas ini sampai dengan 31 Maret 2010.

Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS

Pada tanggal 12 Juni 2008, kami menandatangani fasilitas kredit sindikasi sebesar US$450.0 juta dengan 13 bank dan lembaga keuangan, dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura dan DBS Bank Ltd. bertindak sebagai *arrangers*. Jumlah bunga yang harus dibayar atas hutang tersebut adalah total dari (i) marjin yang berlaku sebesar 1,85% per tahun untuk pemberi pinjaman non-Indonesia atau 1,90% per tahun untuk pemberi pinjaman yang bertempat tinggal di Indonesia dan (ii) LIBOR. Pembayaran kembali atas hutang yang telah dicairkan akan dibuat dengan cara cicilan per enam bulanan dimulai sejak tanggal 12 Juni 2011. Pada tanggal 24 Februari 2009, kami menandatangani suatu perjanjian dengan mayoritas kreditur untuk mengubah definisi "Hutang", "EBITDA" dan "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/ DBS. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, sebagaimana yang telah diubah berdasarkan akta-akta perubahannya, kami telah menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk namun tidak terbatas untuk mempertahankan ketentuan sebagai berikut:

- rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5 : 1;
- rasio total hutang terhadap ekuitas sebesar 2,5 : 1; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap akhir tahun buku dan pada akhir setiap 3 bulan pertama tahun buku kami, sekurang-kurangnya 2,5 : 1.

Pada 26 September dan 30 Oktober 2008, Perusahaan menerima pencairan pertama dan kedua dari fasilitas kredit ini sejumlah US$450,0 juta. Pada 31 Maret 2010, jumlah yang belum dibayar dalam fasilitas ini sebesar US$450,0 juta.

Fasilitas Pinjaman dari AB Svensk Exportkredit ("SEK") yang Dijamin oleh Export Kredit Namnden ("EKN")

Pada 18 Agustus 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari SEK, yang dijamin oleh EKN, suatu agen kredit ekspor dari Kerajaan Swedia, untuk total maksimum sebesar US$315,0 juta yang akan digunakan untuk keperluan pembelian perangkat telekomunikasi Ericsson, dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC"), Hong Kong dan The Royal Bank of Scotland N.V. (yang sebelumnya dikenal dengan nama ABN AMRO Bank N.V.), Cabang Hong Kong sebagai kreditur asli dan *arrangers,* sementara HSBC Bank PLC, London, Inggris bertindak sebagai agen fasilitas dan agen EKN. Pada 2 September 2009, kreditur asli mentransfer hak dan kewajiban kepada SEK, berdasarkan kepada ketentuan perjanjian.

Fasilitas kredit tersebut terdiri atas fasilitas A, B, dan C dengan nilai maksimum sebesar US$100,0 juta, US$155,0 juta, US$60 juta, masing-masing. Fasilitas A dikenakan tingkat suku bunga pada LIBOR ditambah 0,25% per tahun, bersama-sama dengan biaya dana SEK dan marjin premiun SEK. Fasilitas B dan Fasilitas C dikenakan tingkat suku bunga sebesar 0,5% per tahun ditambah 2,60% per tahun ditambah Margin Premiun EKN. Pembayaran kembali atas masing-masing fasilitas A, B dan C harus dilakukan dengan 14 kali cicilan dimulai sejak 31 Mei 2009, 28 Februari 2010 dan 30 November 2010, masing-masing. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti mempertahankan rasio pembiayaan tertentu, yang mana secara garis besar adalah sama dengan ketentuan-ketentuan di bawah Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS. Selain itu, Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan modal bersama mínimum sebesar Rp5.000,0 miliar. Perusahaan telah membayar cicilan enam bulanannya yang pertama untuk Fasilitas A senilai US$7,14juta. Per 31 Maret 2010, Perusahaan telah mencairkan US$100 juta dan US$38,8 juta untuk fasilitas A dan B, masing-masing.

Lintasarta

Hutang jangka panjang Lintasarta terdiri dari beberapa fasilitas kredit investasi dari PT Bank Niaga Tbk (sekarang CIMB Niaga) dan obligasi terbatas yang tidak dijamin. Pada tanggal 31 Maret 2010, fasilitas kredit investasi dari CIMB Niaga berjumlah Rp94,9 miliar, dan obligasi yang terhutang berjumlah Rp42,0 miliar.

Fasilitas Kredit Investasi V. Pada tanggal 10 Juli 2007, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari PT CIMB Niaga sebesar Rp50,0 miliar untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer and fasilitas pendukung lain. Pinjaman tersebut memiliki tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga tahunan yang berlaku bagi sertifikat Bank Indonesia berjangka satu bulan ditambah 2,25% per tahun. Kami memulai pelunasan secara triwulanan atas hutang pokok tersebut pada tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp5,0 miliar. Pembayaran kembali tersebut harus dibayar setiap twilunannya sampai dengan 10 Januari 2011.

Fasilitas Kredit Investasi VI. Pada 24 Februari 2009, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga dengan nilai sampai dengan Rp75,0 miliar untuk pembelian perangkat telekomunikasi, komputer, dan fasilitas pendukung lainnya. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga sebesar 14,5%, yang mana dapat diubah oleh CIMB Niaga berdasarkan kondisi pasar. Kami memulai pembayaran kembali setiap triwulanan atas pinjaman pokoknya pada 24 Maret 2010, dengan nilai sebesar Rp7,5 miliar. Pembayaran kembali tersebut harus dibayar setiap triwulanan sampai dengan 24 Juni 2012. Pada tanggal 31 Maret 2010, Lintasarta telah sepenuhnya mencairkan fasilitas kredit ini.

Obligasi Terbatas I. Pada 2 Juni 2003, Lintasarta dan para pemegang sahamnya telah menyetujui untuk menerbitkan obligasi terbatas kepada para pemegang saham sebesar Rp40,0 miliar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 miliar. Obligasi terbatas tersebut tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 2 Juni 2006. Obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 16% per tahun untuk tahun pertama dan tingkat suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) ditambah marjin 3,0%, dengan batas maksimum sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 2 September 2003. Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta menyetujui dengan para pemegang

obligasi untuk memperpanjang jatuh tempo dari tanggal 2 Juni 2006 menjadi 2 Juni 2009 dan nilai nominal Obligasi Terbatas menjadi Rp34,9 miliar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 miliar. Pada 2 Juni 2009, Lintasarta membayar kembali sebagian dari Obligasi Terbatas senilai Rp8.303 juta. Pada 25 Agustus 2009, perjanjian yang mengatur tentang Obligasi Terbatas I diubah dalam rangka merubah total nilai dari obligasi tersebut menjadi Rp26,6 miliar, memperpanjang tanggal jatuh tempo menjadi 2 Juni 2012, dan untuk merubah tingkat suku bunga mengambang menjadi berdasarkan JIBOR ditambah 4%, tanpa melebihi 19%, dengan tingkat suku bunga mengambang mínimum sebesar 12,75%.

Obligasi Terbatas II. Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta dan para pemegang sahamnya telah menyetujui untuk mengeluarkan obligasi terbatas kepada para pemegang saham sebesar Rp66,2 miliar, termasuk bagian kami sebesar Rp35,0 miliar. Obligasi tersebut tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 14 Juni 2009. Obligasi memiliki tingkat suku bunga mengambang yang ditentukan dengan mengacu pada rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) ditambah marjin 3,0%, dengan batas maksimum sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 14 September 2006. Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari PT Bank Niaga Tbk, sekarang CIMB Niaga atas perubahan tanggal jatuh tempo dan nilai nominal dari Obligasi Terbatas II. Hasil penerbitan Obligasi Terbatas II digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka memperluas jangkauan telekomunikasi Lintasarta. Pada tanggal 14 Juni 2009, Lintasarta membayar sebagian Obligasi Terbatas II sejumlah Rp6,2 miliar. Pada tanggal 25 Agustus 2009, perjanjian yang mengatur Obligasi Terbatas II diubah untuk mengubah nilai obligasi menjadi Rp60.0 miliar, memperpanjang jatuh tempo menjadi 14 Juni 2012, dan mengubah tingkat suku bunga mengambang menjadi berdasarkan JIBOR + 4%, dan tidak melebihi 19%, dengan tingkat suku bungan mínimum mengambang sebesar 12,75%.

Praktek Pembayaran Dividen

Pemegang saham kami menentukan pembayaran dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2008 dan 2009, pemegang saham mengumumkan dividen tunai final sebesar 50,0% dari laba bersih kami untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, masing-masing. Kami berniat untuk terus melakukan pembayaran dividen dalam jumlah tersebut agar memungkinkan bagi kami untuk memenuhi tata kelola keuangan yang baik dan pengharapan investor.

Sumber-Sumber Permodalan

Meskipun menurut kami, sebagian dari sumber-sumber internal dan arus kas dari kegiatan operasional Perusahaan akan digunakan untuk membiayai rencana pengeluaran barang modal Perusahaan, kami berharap dapat menjajaki peluang perolehan dana dari sumber-sumber eksternal. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada lambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tingkat pertumbuhan yang kami harapkan, turunnya peringkat hutang Perusahaan atau melemahnya kinerja keuangan atau rasio keuangan Perusahaan.

Apabila kami tidak dapat membiayai pengeluaran barang modal yang direncanakan dari arus kas internal Perusahaan, kami akan berupaya memperoleh sumber pembiayaan eksternal lainnya. Kemampuan kami untuk dapat memperoleh hutang pembiayaan tambahan tergantung pada beberapa ketentuan yang diatur pada perjanjian hutang Perusahaan yang telah ada. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada Anda bahwa kami akan dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan yang sesuai (termasuk pembiayaan dari pihak penjual (vendor) atau pihak ketiga lainnya) untuk membiayai pengeluaran barang modal yang telah direncanakan oleh Perusahaan. Apabila kami tidak dapat mencari sumber pembiayaan eksternal tambahan, maka kami akan memutuskan untuk menurunkan jumlah pengeluaran barang modal yang telah direncanakan. Penurunan jumlah pengeluaran barang modal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja operasional dan kondisi keuangan Perusahaan.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Pengeluaran barang modal

Historis Pengeluaran barang modal

Sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2009, jumlah total pengeluaran barang modal kami telah mencapai sebesar Rp23.852,7 miliar (US$2.537,5 juta). Dana ini, terutama kami gunakan untuk membeli peralatan dan jasa-jasa dari pemasok asing sehubungan dengan pembangunan jaringan selular kami. Kami telah mencapai jumlah total pengeluaran barang modal sebesar Rp11.564,7 miliar (US$1.230,6 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, di mana investasi tersebut kami fokuskan pada perluasan cakupan selular kami melalui penambahan 2.691 *base transceiver stations*.

Pengeluaran barang modal untuk tahun 2010

Berdasarkan program pengeluaran barang modal untuk berbagai kegiatan usaha kami, rencana pengeluaran barang modal kami berjumlah lebih sedikit dari pengeluaran pada tahun 2008 dan 2009, dikarenakan kami bermaksud untuk mengurangi pembelian aset operasional dan lebih fokus pada upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan selular dan infrastruktur telekomunikasi kami yang ada saat ini. Sepanjang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, jumlah total pengeluaran barang modal konsolidasi kami adalah sebesar masing-masing Rp12.285,2 miliar dan Rp11.567,4 miliar (US$1.230,6 juta). Selama tahun 2010, kami bermaksud untuk mengalokasikan 550 juta sampai dengan 700 juta Dolar AS untuk pengeluaran barang modal yang baru, yang bila memperhitungkan estimasi pengeluaran barang modal yang direalisasi untuk tahun 2010 untuk komitmen pengeluaran barang modal dari periode sebelumnya, akan menghasilkan jumlah aktual pengeluaran barang modal sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 juta Dolar AS untuk tahun 2010.

Kami bermaksud untuk mengalokasikan pengeluaran barang modal tahun 2010 sebagai berikut:

- *Investasi Jaringan Selular*: Kami berencana untuk menggunakan sebagian besar pengeluaran barang modal kami untuk membiayai kelanjutan pemutakhiran dan perluasan kapasitas dan cakupan jaringan selular kami.
- *Investasi lain*: Kami berencana untuk menginvestasikan sisa anggaran pengeluaran barang modal untuk area-area di luar jaringan selular, termasuk jaringan akses tetap, sebagaimana kami meningkatkan akses jaringan untuk pelanggan-pelanggan korporat kami, dan terus menyediakan untuk mereka servis suara, jarak jauh dan MIDI, serta mengadakan peningkatan kekuatan perusahaan kami.

Jumlah di atas merepresentasikan rencana anggaran investasi kami; pengeluaran aktual atas dasar kas akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk metode pembiayaan dan waktu penyelesaian pengiriman peralatan dan jasa yang dibeli. Secara historis, pengeluaran atas dasar jalur uang tunai dianggarkan akan menghabiskan biaya sekitar 20,0% dari anggaran kami.

Rencana pengeluaran barang modal di atas didasarkan pada pemahaman kami tentang keadaan pasar dan kondisi peraturan saat ini, dan kami dapat mengubah rencana kami dalam menanggapi perubahan kondisi-kondisi tersebut. Secara khusus, tergantung pada kerangka peraturan atas jasa jaringan tanpa kabel lainnya, kami dapat memutuskan untuk meningkatkan investasi kami pada jaringan dan layanan akses tetap tanpa kabel, baik melalui peningkatan pengeluaran barang modal, realokasi rencana pengeluaran yang ada, skema pembagian pendapatan atau kombinasi dari ketiga hal di atas. Skema pembagian pendapatan akan mencakup kerjasama dengan investor swasta di mana investor akan membiayai pembangunan proyek dengan imbalan pendapatan dari proyek tersebut, yang mirip dengan struktur *build-operate-transfer*.

Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasi kami telah disusun sesuai dengan IFRS. Referensi untuk IFRS termasuk penerapan International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards ("IAS"), penafsiran dari International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC") dan Standards Interpretarion Committee ("SIC").

Penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan serta pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi

pada tanggal laporan keuangan dan pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan tersebut. Taksiran dan asumsi manajemen didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang relevan pada kondisi tersebut. Kami secara terus menerus mengevaluasi taksiran dan asumsi tersebut. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari taksiran di atas bila asumsi atau kondisi yang sebenarnya berbeda. Kami percaya bahwa dengan adanya perbedaan signifikan prinsip akuntansi, berikut ini mungkin akan melibatkan tingkat penilaian atau kompleksitas yang lebih tinggi.

Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya

Laporan keuangan konsolidasi dan hasil operasi mencerminkan entitas yang diakuisisi setelah penyelesaian dari proses akuisisi terkait. Kami menghitung entitas yang diakuisisi dengan menggunakan metode pembelian (*purchase method*) yang membutuhkan estimasi akuntansi dan penilaian untuk mengalokasikan harga akuisisi ke nilai pasar wajar dari aset dan kewajiban entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Nilai lebih dari harga pembelian atas estimasi nilai pasar wajar dari aset bersih yang diakuisisi diakui sebagai *goodwill* pada laporan posisi keuangan konsolidasi. Proses akuisisi ini telah menghasilkan goodwill dan aset tak berwujud, yang masing-masing menjadi subjek untuk proses penurunan nilai dan amortisasi. Oleh karena itu, sejumlah penilaian yang diambil dalam mengestimasi nilai pasar wajar untuk dialokasikan ke aset dan kewajiban entitas yang diakusisi dan mempengaruhi kinerja keuangan kami secara signifikan.

Taksiran Umur Manfaat dan Penurunan Nilai Aset Tetap

Kami memperkirakan umur manfaat dari aset tetap kami berdasarkan pada ekspektasi masa penggunaan aset sebagaimana diatur dalam rencana usaha dan strategis (*business plans and strategies*) yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan kelakuan pasar (*market behaviour*). Taksiran masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penelaahan secara kolektif pada praktek industri (*industry practice*), evaluasi teknis secara internal dan pengalaman dengan aset-aset yang sejenis. Akan tetapi, terdapat kemungkinan hasil usaha di masa depan dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor disebutkan di atas.

Jumlah dan waktu dari beban yang diakui untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor-faktor tersebut. Pengurangan dalam taksiran masa manfaat dari aset tetap kami akan meningkatkan beban usaha yang diakui dan menurunkan aset tidak lancar.

Estimasi Beban Pensiun dan Manfaat Karyawan Lainnya

Penentuan dari kewajiban dan biaya pensiun dan manfaat karyawan lainnya kami tergantung pada pemilihan beberapa asumsi yang digunakan oleh aktuaris untuk menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut termasuk, di antara hal lainnya, tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan dan kenaikan tingkat kompensasi. Hasil sebenarnya yang berbeda dari estimasi kami diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi bersih dari laba atau rugi aktuarial pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari kelebihan kewajiban manfaat pensiun tetap dan nilai wajar aset dana pensiun pada tanggal tesebut.

Kami berkeyakinan bahwa asumsi mereka dapat diandalkan dan tepat, perbedaan signifikan dengan pengalaman aktual kami atau perubahan signifikan dalam asumsi mereka dapat mempengaruhi biaya dan kewajiban pensiun dan manfaat karyawan lainnya secara material.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Kami menelaah nilai tercatat dari aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi jumlah tersebut sampai jumlah yang mungkin dapat direalisasikan dimana jumlah pendapatan kena pajak akan tersedia untuk memungkinkan semua atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Penelaahan kami terhadap pengakuan aset pajak tangguhan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan berdasarkan pada tingkat dan waktu dari pendapatan kena pajak yang diperkirakan untuk periode pelaporan selanjutnya. Perkiraan ini didasarkan pada hasil kami di masa lampau dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban sebagaimana juga perencanaan pajak di masa datang.

Perkiraan cadangan atas kerugian penurunan nilai

Kami memperkirakan cadangan atas kerugian penurunan nilai terkait dengan piutang usaha yang diidentifikasi secara spesifik ragu-ragu untuk ditagih. Tingkat pencadangan ditelaah oleh manajemen dengan basis faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas dari piutang tersebut. Dalam kasus ini, kami menggunakan penilaian berdasarkan fakta terbaik yang tersedia dan keadaan-keadaan, termasuk tapi tidak terbatas pada, lama hubungan dengan pelanggan dan keadaan kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang umum, untuk mencatat pencadangan spesifik terhadap jumlah terhutang pelanggan yang telah jatuh tempo untuk mengurangi jumlah piutang kami menjadi jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan apabila terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Sebagai tambahan terhadap cadangan spesifik untuk piutang individual yang signifikan, kami juga menelaah cadangan penurunan nilai kolektif terhadap risiko kredit terhadap pelanggan-pelanggan mereka yang dikelompokkan berdasarkan risiko kredit yang sama, yang mana, meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan pencadangan, memiliki risiko yang lebih besar terhadap kegagalan bayar daripada sewaktu piutang tersebut diberikan kepada pelanggan pada awalnya. Cadangan kolektif ini didasarkan pada sejarah pengalaman kerugian dengan menggunakan faktor-faktor yang bervariasi seperti kinerja historis dari pelanggan dalam kelompok kolektif, penurunan di pasar yang mana pelanggan beroperasi dan kelemahan struktur yang teridentifikasi atau penurunan dalam arus kas dari pelanggan.

Penentuan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan

Kami mencatat beberapa aset dan kewajiban keuangan pada nilai wajar, yang memerlukan penggunaan estimasi akuntansi yang berkelanjutan dan penilaian untuk nilai wajar aset dan kewajiban keuangan. Sementara komponen signifikan untuk pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi (contoh nilai tukar valuta asing, suku bunga dan tingkat volatilitas (*volatility rates*), jumlah perubahan nilai wajar akan berbeda jika kami menggunakan metode penilaian yang berbeda. Setiap perubahan dalam nilai wajar aset keuangan ini akan langsung mempengaruhi laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan, laporan pendapatan komprehensif atau laporan perubahan ekuitas konsolidasi.

C. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PATEN DAN LISENSI, DAN LAIN-LAIN

Untuk dua tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, kami tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat signifikan.

D. INFORMASI TENTANG TREN

Lihat pembahasan pendahuluan pada "Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha" di atas untuk keterangan lebih lanjut mengenai tren-tren penting yang memberikan dampak bagi hasil-hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan. Lihat juga "Butir 3: Informasi Penting—Faktor-Faktor Risiko" untuk keterangan lebih lanjut mengenai mengapa informasi keuangan yang dilaporkan tidak selalu merupakan indikasi hasil usaha di kemudian hari.

E. PENYELENGGARAAN OFF-BALANCE SHEET

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan tidak mempunyai penyelenggaraan *off-balance sheet* yang sewajarnya dapat memberikan pengaruh pada saat ini atau di kemudian hari terhadap kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, pendapatan atau pengeluaran, hasil usaha, likuiditas, pengeluaran barang modal atau sumber modal Perusahaan, yang bersifat material bagi para investor.

F. PENGUNGKAPAN DALAM BENTUK TABEL (TABULAR DISCLOSURE) TENTANG KEWAJIBAN KONTRAKTUAL

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan memiliki kewajiban kontraktual sebesar US$1.279,7 juta dari kontrak-kontrak dalam mata uang asing dan Rp16.790,7 miliar dari kontrak-kontrak dalam mata uang Rupiah. Kewajiban kontraktual dalam mata uang asing yang harus dibayar adalah US$378,9 juta di 2010, US$492,4 juta dari 2011 sampai 2012 dan US$255,9 juta dari tahun 2013 sampai 2014 dan US$152,5 juta dari 2015 dan seterusnya. Kewajiban

kontraktual dalam Rupiah mewajibkan pembayaran sampai dengan Rp2.795,5 miliar di 2010, Rp4.796,9 miliar dari tahun 2011 sampai 2012, Rp5.672,3 miliar dari 2013 sampai 2014 dan Rp3.526,0 miliar dari 2015 dan seterusnya.

	Pembayaran Jatuh Tempo Per 31 Desember									
	Total		2010		2011-2012		2013-2014		2015 dan selanjutnya	
	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$
	(Rp in billions and US$ in millions)									
Kewajiban Kontraktual:										
Hutang jangka panjang [1]	6.633,0	830,5	993,8	47,5	3.654,9	383,0	1.984,3	255,9	—	144,1
Hutang Obligasi[1][2]	8.132,0	344,2	640,0	234,8	1.142,0	109,4	3.688,0	—	2.662,0	—
Kewajiban Pembelian	1.161,7	96,6	1.161,7	96,6	—	—	—	—	—	—
Kewajiban tidak lancar dan kewajiban keuangan tidak lancar lainnya	864,0	8,4	—	—	—	—	—	—	864,0	8,4
Total Kewajiban Kontraktual Tunai	**16.790,7**	**1.279,7**	**2.795,5**	**378,9**	**4.796,9**	**492,4**	**5.672,3**	**255,9**	**3.526,0**	**152,5**

(1) Angka-angka ini tidak termasuk kewajiban bunga kontraktual yang terkait.
(2) Angka-angka ini telah dihitung berdasarkan asumsi bahwa opsi yang terkait dengan hutang pinjaman dan obligasi, tidak digunakan.

Butir 6: DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN KARYAWAN

Direktur dan Manajemen Senior

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, Perusahaan memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Dua organ perusahaan ini terpisah, dan tidak seorangpun dapat menjadi anggota dari keduanya.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris kami terdiri dari sepuluh anggota, satu di antaranya diangkat menjadi Komisaris Utama. Para anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan para pemegang saham yang diambil di dalam rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Dewan Komisaris diajukan oleh pemegang saham Seri A. Sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau Bapepam-LK, dan peraturan Bursa Efek Indonesia, empat orang komisaris telah diangkat sebagai Komisaris Independen, yaitu: George Thia Peng Heok, Alexander Rusli, Soeprapto S.IP, dan Chris Kanter. Per tanggal 14 Mei 2010, Dewan Komisaris kami terdiri dari sepuluh anggota sebagai berikut:

Nama	Umur	Komisaris Sejak	Jabatan
Abdulla Mohammed S.A. Al Thani	50	2008	Komisaris Utama
Dr. Nasser Mohammed Marafih	48	2008	Komisaris
Jarmant	51	2008	Komisaris
Richard Farnsworth Seney	55	2009	Komisaris
Rachmat Gobel	47	2008	Komisaris
Rionald Silaban	44	2008	Komisaris
George Thia Peng Heok	61	2008	Komisaris Independen
Alexander Rusli	39	2010	Komisaris Independen
Soeprapto S.IP	63	2005	Komisaris Independen
Chris Kanter	58	2010	Komisaris Independen

Di bawah ini adalah biografi singkat dari masing-masing Komisaris Perusahaan.

Sheikh Abdulla Mohammed S.A Al Thani telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak bulan Agustus 2008. Saat ini, Sheikh Abdulla adalah *Chairman of the Board of Directors* Qtel. Dalam kapasitasnya sebagai *Chairman*, beliau telah mengembangkan sistem *corporate governance* Qtel untuk menjamin Qtel dikelola sesuai dengan praktek yang berlaku secara internasional. Sheikh Abdulla telah juga melakukan restrukturisasi dan pengembangan usaha

Qtel di regional. Setelah akuisisi Qtel atas Wataniya, sebagai perusahaan yang berbasis di Kuwait, dan merupakan transaksi telekomunikasi terbesar di wilayah Arab, Sheikh Abdulla ditunjuk sebagai *Chairman* Wataniya. Sheikh Abdulla juga merupakan anggota dari *Qatari Planning Council* dan *Chief* dari *Royal Court* (Amiri Diwan) sejak tahun 2002 hingga 2005. Sheikh Abdulla memiliki latar belakang yang beragam baik dalam bidang militer maupun penerbangan dan merupakan penerbang bersertifikat (instruktur) dari *British Royal Air Force*.

Dr. Nasser Mohammed Marafih telah menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Agustus 2008 dan juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Anggaran kami. Dr. Marafih memulai karirnya di Qtel pada tahun 1992 sebagai penasihat ahli dari Universitas Qatar dan selanjutnya ditunjuk sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan (*Director of Strategic Planning and Development*) pada tahun 1994 dan sebagai *Chief Executive Officer (CEO)* pada tahun 2002. Beliau sukses membawa Qtel melewati program transformasi dan restrukturisasi dari unit bisnis dan *corporate centers*-nya. Beliau memainkan peran penting dalam akuisisi Qtel atas Wataniya, suatu perusahaan yang berbasis di Kuwait pada tahun 2007, suatu transaksi strategis dengan AT&T untuk memperoleh kepemilikan di NavLink. Dr. Marafih memiliki gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Elektro, *Master of Science* dan Ph.D. dalam bidang *Communication Engineering*, semuanya dari George Washington University, di Amerika Serikat. Dr. Marafih tergabung dalam berbagai Komite pemerintahan tingkat tinggi di Qatar dan sebagai anggota Direksi dari anak-anak perusahaan Qtel. Dr. Marafih juga menjabat sebagai dosen dan asisten profesor di bidang *Electrical Engineering* di Universitas Qatar. Beliau adalah anggota dari *the Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc*. selama lebih dari sepuluh tahun.

Jarman telah menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Juni 2008. Saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara urusan Usaha Energi dan Industri namun sebelumnya beliau pernah memegang berbagai jabatan, termasuk Komisaris Utama dari PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sejak Maret 2004 hingga Mei 2008, Komisaris PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sejak April 2003 hingga Maret 2004, Asisten Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara urusan Usaha Industri Strategis dan Telekomunikasi sejak Januari 2002 hingga Februari 2006 dan Komisaris dari PT Industri Sandang Nusantara (Persero) sejak Desember 2002 hingga sekarang. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1981 dan *Master of Science* dari Rensselaer Polytechnic Institute, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Richard Farnsworth Seney telah menjabat menjadi Komisaris sejak bulan Juni 2009. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional di Qtel International (QI) sejak tahun 2007 hingga sekarang, Presiden dan Kepala Bagian Eksekutif di MCT Corp (termasuk para pendahulunya) dari tahun 1992 hingga tahun 2007, Wakil Presiden Deputi Eksekutif dan General Manager dari MCT Investors, L.P sejak tahun 1987 hingga tahun 2002, dan Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Bagian Keuangan dari Charisma Communications Corporation, Perusahaan yang bergerak di bidang Komunikasi sejak tahun 1985 hingga tahun 1992. Beliau memperoleh gelar *Bachelor* di bidang *Commerce* dari University of Virgina McIntire School of Commerce.

Rachmat Gobel telah menjadi Komisaris sejak bulan Agustus 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Pimpinan dari Grup Gobel yang bergerak di bidang pengolahan, perdagangan, jasa, manajemen logistic terintegrasi seperti makanan dan obat-obatan, termasuk industri katering. Grup Gobel adalah *partner joint venture* dari Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., suatu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang elektronik dan barang-barang elektronik yang dipasarkan dengan merek Panasonic. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Perdagangan Internasional dari Universitas Chuo, Tokyo, pada tahun 1987,dan dianugerahi gelar *Honorary Doctorate* dari Universitas Takushoku, Tokyo, Jepang, pada tahun 2002. Pada tahun 2009, Beliau telah menerima "*Distinguished Engineering Award in Manufacturing Technology*", gelar yang bergengsi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beliau juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, termasuk Komite Olimpiade Indonesia dan Palang Merah Indonesia.

Rionald Silaban menjabat sebagai Komisaris sejak Juni 2008 dan ditunjuk sebagai anggota dari Komite Manajemen Risiko pada tahun yang sama. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Departemen Keuangan. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi termasuk sebagai Direktur Manajemen Risiko Fiskal Departemen Keuangan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, Penasehat Senior di World Bank di Washington D.C., Amerika Serikat sejak tahun 2004 hingga tahun 2006, Kepala Divisi Sekretaris Jenderal

Departemen Keuangan sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, Kepala Divisi Pengawasan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional sejak tahun 2000 hingga tahun 2002, Kepala Divisi Jasa Keuangan di Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, Wakil Direktur untuk Direktorat Privatisasi untuk Direktorat Umum Badan Usaha Milik Negara Departemen Keuangan sejak tahun 1997 hingga tahun 1998, Kepala Seksi Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997 dan Kepala Sekretariat Komite Privatisasi Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar LL.M.dari Georgetown University Law Center, Washington D.C., Amerika Serikat pada tahun 1993.

George Thia Peng Heok menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Juni 2008 dan ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit Perusahaan pada tahun yang sama. Beliau kemudian menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan pada bulan Agustus 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur/Konsultan di Asiainc Private Limited. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi, termasuk sebagai Konsultan bagi Singapore Exchange sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, Konsultan/Direktur *Strategic Advisor Private Limited* sejak tahun 2003 hingga tahun 2006, Ketua Eksekutif MediaStream Limited sejak tahun 1999 hingga tahun 2003, Direktur/Konsultan Phoenix Capital Private Limited sejak tahun 1995 hingga tahun 1998, Ketua Eksekutif Asia Matrix Limited sejak tahun 1993 hingga tahun 1995, *Managing Director* Lum Chang Securities Private Limited sejak tahun 1991 hingga tahun 1993, *Managing Director* Sun Hung Kai Securities Private Limited sejak tahun 1989 hingga tahun 1991, *Managing Director* Merrill Lynch International Bank Limited sejak tahun 1987 hingga tahun 1989, Direktur Eksekutif/Partner Kay Hian Private Limited sejak tahun 1985 hingga tahun 1987 dan Managing Director Morgan Grenfell (Asia) limited sejak tahun 1975 hingga tahun 1985. Beliau adalah seorang akuntan publik bersertifikat and anggota dari *Chartered Association of Certified Accountants* (Inggris) dan *Singapore Institute of Directors*.

Alexander Rusli telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010 dan saat ini menjabat sebagai anggota dari Komite Remunerasi Perusahaan. Saat ini Beliau menjabat sebagai komisaris dari PT Krakatau Steel (Persero), Badan usaha yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara yang memproduksi produk baja-karbon. Beliau pernah menjabat sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan pengawasan kepada 140 Badan Usaha Milik Negara dan lebih dari 500 anak perusahaan. Sebelumnya, beliau menjabat pula sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, dimana beliau terlibat dalam perumusan kebijakan dan peraturan dan dalam mengawasi proyek-proyek nasional infrastruktur ICT negara. Posisi ini beliau duduki selama dua masa kabinet kementrian. Beliau juga bertindak sebagai Konsultan bagi Pricewaterhouse Coopers. Beliau meraih gelar *Doctor of Philosophy*, Sistem Informasi, Curtin University of Technology, Australia.

Soeprapto S.IP telah menjabat sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit sejak bulan Juni 2005. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan, seperti Asisten Pribadi dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2001 dan Komisaris PT Nusariau Kencana Coal dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Selain itu, beliau telah menjabat sebagai Komisaris PT Mentari Abdi Pertiwi sejak tahun 2004. Beliau memperoleh gelar sarjana ilmu politik dari Universitas Terbuka, Jakarta dan pernah mengikuti pelatihan Lembaga Pertahanan Nasional.

Chris Kanter telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua dan Pendiri dari Sigma Sembada Group, sebuah kontraktor alat berat untuk perangkat transportasi dan logistik. Beliau telah menjabat sebagai Wakil Presiden untuk Investasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi, Transportasi dan Kepariwisataan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) sejak tahun 1994. Baru-baru ini beliau ditunjuk kembali untuk jangka waktu lima tahun berikutnya sampai dengan tahun 2013 untuk jabatan Investasi dan Transportasi. Beliau juga menjabat posisi sebagai Ketua Dewan Eksekutif KADIN, Komite Khusus dalam bidang Investasi dan Pembangunan Perdagangan Internasional dan Ketua dari Dewan Pendiri Swiss German University. Beliau juga menjabat beberapa peran di pemerintahan Indonesia dan telah terlibat langsung dalam Paket Kebijakan untuk Mengembangkan Iklim Investasi di Indonesia dan juga bertindak sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan 2002. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Teknik, Universitas Trisakti, Indonesia.

Masa jabatan dari masing-masing Komisaris berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang ke-empat setelah tanggal pengangkatan komisaris yang bersangkutan, yang mana akan berakhir pada tahun

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

2012 untuk para Komisaris yang sedang menjabat saat ini. Seorang Komisaris dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya pada rapat umum pemegang saham. Alamat kantor Dewan Komisaris adalah di Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta, 10110, Republik Indonesia.

Direksi

Direksi bertanggung jawab atas segala kepengurusan dan kegiatan Perusahaan sehari-hari di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk satu Direktur Utama. Para anggota Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham yang diambil dalam rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Direksi diajukan oleh pemegang saham Seri A. Per tanggal laporan ini, Direksi Perusahaan terdiri dari lima orang sebagai berikut:

Nama	Umur	Direktur Sejak	Jabatan
Harry Sasongko Tirtotjondro	50	2009	President Director and Chief Executive Officer
Fadzri Sentosa	46	2007	Director and Chief Wholesale and Infrastructure Officer
Peter Wladyslaw Kuncewicz	56	2009	Director and Chief Financial Officer
Stephen Edward Hobbs	59	2009	Director and Chief Technology Officer
Laszlo Imre Barta	41	2010	Director and Chief Commercial Officer

Di bawah ini adalah biografi singkat dari masing-masing Direktur Perusahaan:

Harry Sasongko Tirtotjondro telah menjabat sebagai President Director and Chief Executive Officer sejak bulan Agustus 2009. Sebelumnya beliau telah memegang beberapa jabatan sebagai Presiden Direktur dan *CEO* dari *GE Consumer Finance* sejak tahun 2005 sampai 2009, dimana beliau diakui sebagai salah satu dari 10 *CEO* terbaik di Indonesia pada tahun 2008 oleh *the SWA Magazine & Synovate awards*. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2005, beliau merupakan anggota Lippo Group dimana Beliau sempat menjabat sebagai *Managing Director* dari Matahari Retail & Lippo Bank. Beliau pernah menjabat sebagai *Managing Director of Consumer Banking* di PT Bank Tiara Asia pada tahun 1995 sampai dengan 1998, dan sebelumnya sebagai Direktur di PT Citicorp Finance dan Citibank, N.A. pada tahun 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung Indonesia, gelar *Master of Science* di bidang Pendidikan dari the Ohio State University, Amerika Serikat, dan merupakan *Chartered Financial Consultant (ChFC)*, gelar yang diperoleh dari Singapore College of Insurance / American College di Amerika Serikat.

Fadzri Sentosa telah menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juni 2007 dan sebagai Director and Chief Wholesale and Infrastructure Officer sejak bulan Juni 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Aplikanusa Lintasarta. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan di Perusahaan, termasuk sebagai anggota dari Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, *Group Head National Card* dan *Channel Management* sejak tahun 2006 sampai dengan 2007, *Senior Vice President* bidang *Commerce*, daerah Jabotabek sejak tahun 2005 sampai dengan 2006 dan *Senior Vice President* bidang Penjualan Selular sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, anggota dari Direksi Satelindo pada tahun 2003 dan anggota dari Dewan Direksi dari IM3 dari tahun 2002 sampai 2003. Beliau memperoleh gelar Master di bidang Regional Business Management dari University of Technology, Sydney pada tahun 2001 dan gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986.

Peter Wladyslaw Kuncewicz telah menjabat sebagai Director and Chief Financial Officer sejak bulan September 2009. Beliau memiliki pengalaman di bidang keuangan di berbagai pasar keuangan internasional, 10 di antaranya bergerak di bidang telekomunikasi. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2009, Beliau memegang jabatan sebagai Chief Financial Officer di Telenor Pakistan, memegang urutan ke-2 terbaik dalam urutan 5 pasar keuangan teraktif. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2006, beliau menjabat sebagai *Chief Financial Officer* di Star Foods SA, sebuah perusahaan FMCG, dan sejak tahun 1996 sampai dengan 1997 beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di United Biscuits Poland. Beliau juga bekerja di bidang pengadaan keuangan dan *IT roles* di Batelco, Bahrain sejak tahun 1996 sampai dengan 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Biologi dari University of Sussex, England, dan *Master of Science* di bidang di bidang *Business Planning* dan *Finance* dari University of Salford, England. Beliau juga merupakan anggota dari *Chartered Institute of Management Accountants* di Inggris.

Stephen Edward Hobbs telah menjabat sebagai Director and Chief Technology Officer sejak bulan Juni 2009. Beliau menduduki jabatan sebagai CTO Asiacell di Iraq selama sembilan bulan pertama bisnisnya dijalankan, setelah memperoleh izin CPA antara tahun 2003 dan tahun 2004. Sebelumnya beliau juga telah berkecimpung dalam praktek konsultan mandiri, membantu klien-klien penting seperti Virgin Management, Inggris, C&W, Inggris, Wataniya Telecom (Kuwait) and Sapient (Inggris dan Amerika Serikat), membantu di bidang teknologi, pembangunan dan strategi. Beliau memiliki pengalaman sebagai Chief Engineer C&W Mobile, CTO Asia, CTO Global Mobile, Vice President Mobile dan ASP services (C&W Global) sampai tahun 2001, sebagai unggulan dalam sistem satelit antena kecil dan ahli dalam program keamanan untuk lingkungan nirkabel. Beliau memiliki pengalaman manajemen internasional selama lebih dari tiga dekade dalam industri telekomunikasi dan teknologiindustry di seluruh Eropa dan Asia. Beliau merupakan *Petty Officer Radio Electrician (Royal Navy)* dari Cable & Wireless Telecommunication.

Laszlo Imre Barta telah menjabat sebagai Director and Chief Commercial Officer sejak tanggal 1 Mei 2010. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Deputy Chief Marketing Officer* di Grameenphone di Bangladesh. Beliau menghabiskan lebih dari empat tahun di Grameenphone di Bangladesh, dimana beliau mengembangkan diri dan memimpin peluncuran strategi bisnis pasar, mendirikan dan memimpin departemen UKM, dan menjabat sebagai Direktur Penjualan. Sebelum diperbantukan untuk Grameenphone oleh Grup Telenor, beliau bekerja untuk Pannon GSM di Hungaria, dimana beliau mengepalai departemen *Corporate Client*. Sebelum Pannon, beliau bekerja untuk Ericsson Hungary dimana beliau memimpin penjualan handset dan aksesori untuk operator selular lokal Hungaria. Beliau bergabung dengan Ericsson dari Phillip Morris, dimana beliau memulai karirnya dalam bidang Penjualan. Beliau memiliki gelar di bidang Akuntansi dan *Landscape Architecture & Engineering* dari universitas-universitas di Hungaria.

Masa jabatan Direksi berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Pada rapat umum pemegang saham, para pemegang saham dapat memberhentikan Direktur sebelum habis masa jabatannya. Masa jabatan seorang Direktur akan berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan pailit, berada dalam pengampuan berdasarkan putusan pengadilan, mengundurkan diri atau meninggal dunia atau apabila Direktur yang bersangkutan dilarang memegang jabatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila salah seorang anggota Direksi mengundurkan diri, yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pemberitahuan pengunduran dirinya kepada Perusahaan, ditujukan untuk perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pengunduran diri tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima surat pengunduran diri. Dalam waktu 45 hari setelah terdapat lowongan jabatan di dalam Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimum Direktur yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka rapat umum pemegang saham harus diadakan untuk mengisi lowongan jabatan tersebut. Seorang anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung. Seorang anggota Direksi dapat merangkap jabatan lain yang tidak mengakibatkan benturan kepentingan, dengan ketentuan ia harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan memberikan pemberitahuan kepada rapat umum pemegang saham. Apabila Direktur Utama bermaksud untuk merangkap jabatan, Direktur Utama harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Alamat kantor Direksi adalah di Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta, 10110, Republik Indonesia.

Tidak seorangpun anggota Komisaris ataupun Direktur Perusahaan yang memiliki kontrak kerja dengan Perusahaan, dan tidak terdapat kontrak kerja yang telah ditawarkan atau sedang dipertimbangkan. Selain itu, tidak ada hubungan keluarga antara para Komisaris ataupun para Direktur yang tercantum di atas.

Remunerasi Para Komisaris dan Direktur

Untuk jasa-jasa yang diberikannya, para anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan berhak atas remunerasi, yang besarnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan. Jumlah uang remunerasi untuk dibayarkan kepada para anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, termasuk kompensasi dasar dan insentif jangka pendek dan jangka panjang adalah sebesar Rp 53.7 miliar (US$ 5.7 juta).

Remunerasi para anggota Direksi Perusahaan ditentukan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam memutuskan hal tersebut, Dewan Komisaris harus mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan harus

melaporkan keputusannya kepada para pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Sejak tahun 2006, insentif per semester dihapuskan dan kami memperkenalkan sebuah skema baru, yaitu insentif jangka pendek berdasarkan kinerja perusahaan dan direktur setiap tahunnya, dan insentif jangka panjang berdasarkan kinerja saham Perusahaan selama tiga tahun.

Pensiun dan Fasilitas Lainnya

Kami dan Lintasarta telah menyusun rencana pensiun dan fasilitas lainnya yang secara substansial meliputi seluruh karyawan tetap Perusahaan. PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), suatu perusahaan persero yang bergerak di bidang asuransi, mengelola rencana dan jumlah fasilitas pensiun yang akan diberikan pada masa pensiun berdasarkan gaji pokok terakhir karyawan dan masa kerja mereka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan, Lintasarta, dan IM2 mengeluarkan biaya sebesar Rp 161,9 miliar untuk dana pensiun, manfaat pasca pensiun (misalnya fasilitas berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan manfaat kesehatan pasca pensiun untuk karyawan-karyawan kami. Per tanggal 31 Desember 2009, kami dan Lintasarta mencatat biaya pensiun dibayar di muka sebesar Rp 149,8 miliar, sementara kami, Lintasarta dan IM2 mencatat kewajiban total yang masih harus dibayar, manfaat pasca pensiun dan manfaat kesehatan pasca pensiun sebesar Rp 712.2 miliar. Untuk informasi lebih lanjut tentang Dana Pensiun termasuk jumlah dana pensiun, masa pensiun atau manfaat lainnya dapat dilihat di Catatan 21 dan Catatan 24 dari Laporan Keuangan Konsolidasi kami.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Perusahaan bertindak sebagai penasehat dan pengawas Perusahaan secara keseluruhan dengan fungsi utama untuk mengkaji rencana pengembangan Perusahaan, mengawasi kinerja rencana kerja Perusahaan dan mengkaji serta menyetujui anggaran Perusahaan. Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan rapat umum pemegang saham. Keputusan-keputusan yang melebihi batas keuangan tertentu harus diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau para pemegang saham untuk dikaji dan disetujui. Dalam menjalankan kegiatan pengawasannya, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris Perusahaan harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, atau apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau atas permintaan dari paling sedikit dari 1/3 dari seluruh angggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat dianggap sah dan mengikat dalam membuat keputusan hanya apabila sebagian besar anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. Pada setiap rapat, masing-masing Komisaris berhak memberikan satu suara, dan memberikan satu suara tambahan untuk setiap Komisaris yang ia wakili. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Komisaris lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Kecuali apabila diatur lain di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan-keputusan Dewan Komisaris harus diambil secara musyarawah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari anggota Dewan Komisaris. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut individu, dimana Komisaris Utama berhak menentukan. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui dan menandatangani keputusan tersebut.

Direksi Perusahaan secara umum bertanggung jawab untuk menjalankan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan dan perintah yang dikeluarkan oleh rapat umum pemegang saham dan Dewan Komisaris. Direktur Utama sendiri berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perusahaan. Namun, apabila Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, maka salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: (i) membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal; (ii) mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerjasama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya

dengan badan usaha atau pihak lain; (iii) membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aktiva tetap atau aktiva lain milik Perusahaan (termasuk seluruh kepentingan yang ada); (iv) tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari pembukuan serta persediaan barang; (v) mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalis) atau dengan cara apapun sehingga Perusahaan menjadi bertanggung jawab terhadap utang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambil alih utang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka, atau pinjaman untuk membayar lunas utang pihak lain; (vi) menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah atau panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku); (vii) melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; (viii) menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham; (ix) mengusulkan pengeluaran saham baru Perusahaan; (x) memberikan indemnity (ganti rugi) kepada atau memberikan jaminan atas kewajiban suatu pihak; (xi) menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perusahaan; (xii) membuat rencana bisnis baru atau mengubah rencana bisnis; (xiii) mengubah praktek dan sistem akuntansi, keuangan, atau pajak di Perusahaan atau Anak Perusahaannya; (xiv) mengubah nama Perusahaan (xv) menyetujui laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (xvi) menentukan anggaran tahunan Perusahaan dan dan anggaran tahunan Anak Perusahaannya; (xvii) melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal; (xviii) mendirikan Anak Perusahaan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung atau tidak langsung dalam setiap Anak Perusahaan atau mengambil alih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain; (xix) melakukan setiap tindakan korporasi atau investasi terkait dengan anak perusahaan Perusahaan; (xx) menggunakan hak sebagai pemegang saham pada anak perusahaan Perusahaan, atau pada perusahaan lain dimana Perusahaan mempunyai penyertaan saham; (xxi) menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perusahaan atau mengubah struktur remunerasikaryawan; (xxii) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (xxiii) menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan tanggung jawab pembayaran (*asset liability*) Perusahaan; (xxiv) menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan dan komitmen-komitmen lainnya; dan (xxv) mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5,0% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan atau 2,5% (dua setengah persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar Perusahaan yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menentukan batasan nilai berkaitan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan (viii), (x) dan (xxi) di atas dan berhak untuk mengubah batasan tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan-tindakan tersebut masih tercakup dalam batasan nilai yang telah ditetapkan, persetujuan Dewan Komisaris tidak diperlukan. Dalam memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris harus memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

Rapat Direksi diadakan apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau apabila diminta oleh sepertiga dari seluruh anggota Direksi. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak membuat keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 anggota Direksi hadir atau diwakili. Seorang Direktur dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Direktur lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang dibuat untuk tujuan khusus tersebut. Pada setiap Rapat Direksi, masing-masing Direktur berhak memberikan satu suara, dan memberikan satu suara tambahan untuk setiap Direktur yang ia wakili. Keputusan Rapat Direksi harus diambil secara musyarawah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan, apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Direktur Utama yang menentukan. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi apabila seluruh anggota Direksi menyetujui dan menandatangani keputusan tersebut secara tertulis.

Setiap orang Direktur akan diberikan tanggung jawab khusus. Apabila terdapat lowongan jabatan di dalam Direksi, maka selama jabatan tersebut belum terisi, salah satu Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan melaksanakan pekerjaan dari Direktur yang tidak ada tersebut. Apabila karena alasan apapun, Perusahaan sama sekali tidak memiliki Direktur, maka Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Direksi dan wajib mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memilih anggota Direksi yang baru, dalam waktu sekurang-kurangnya 45 hari.

Anggaran Dasar Perusahaan mengatur bahwa apabila terdapat benturan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan seorang Direktur, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi yang lainnya. Apabila seluruh Direktur mempunyai benturan kepentingan, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau satu Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Apabila seluruh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka para pemegang saham dapat menunjuk salah satu atau lebih orang yang akan mewakili Perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.

Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange, kami telah membentuk Komite Audit yang independen, yang terdiri dari lima orang dan diketuai oleh salah satu Komisaris Independen. Tugas-tugas Komite Audit meliputi pemberian nasehat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, termasuk tinjauan pada hal-hal berikut ini: informasi keuangan Perusahaan (termasuk laporan dan proyeksi keuangan); independensi dan objektivitas dari akuntan publik Perusahaan; kecukupan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik Perusahaan untuk memastikan bahwa semua risiko material telah dipertimbangkan; kecukupan pengendalian internal Perusahaan; kepatuhan Perusahaan sebagai perusahaan terbuka terhadap peraturan pasar modal yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan kewajiban-kewajiban auditor internal Perusahaan. Komite Audit juga memeriksa dan melaporkan keluhan-keluhan kepada Dewan Komisaris, menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perusahaan, melakukan audit terhadap dugaan kesalahan yang dilakukan di dalam keputusan-keputusan rapat Direksi atau penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan keputusan rapat tersebut dan membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Pada tanggal 5 Juni 2008, George Thia Peng Heok diangkat sebagai Kepala Komite Audit. Pada tanggal 29 Januari 2010, Chris Kanter diangkat sebagai anggota Komite Audit. Per tanggal 29 Januari 2010, anggota Komite Audit terdiri dari George Thia Peng Heok (Ketua), Soeprapto S.IP, Chris Kanter, Kanaka Puradiredja dan Unggul Saut Marupa Tampubolon. Peraturan Bapepam-LK mensyaratkan paling sedikit dua orang anggota independen untuk menjabat sebagai anggota Komite Audit, Kanaka Puradiredja dan Unggul Saut Marupa Tampubolon menjabat sebagai anggota independen dari Komite Audit. Kami telah memasukkan Piagam Komite Audit ke dalam situs Perusahaan di *www.indosat.com* yang tersedia untuk umum.

Piagam tersebut dikaji setiap satu tahun sekali dan charter yang direvisi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana terlampir di dalam Exhibit 15.16.

Komite Remunerasi

Komite Remunerasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi, bonus dan manfaat lainnya kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta para karyawan, termasuk mengenai struktur, ketentuan-ketentuan dan penerbitan opsi saham. Per tanggal 29 Januari 2010, anggota Komite Remunerasi terdiri dari Dr. Nasser Mohammed Marafih (Ketua), Alexander Rusli dan Soeprapto S.IP. Kami telah memasukkan Piagam Komite Remunerasi (*Remuneration Committee Charter*) ke dalam situs Perusahaan di www.indosat.com yang tersedia untuk umum.

Komite Manajemen Risiko

Pada tanggal 26 Oktober 2005, kami membentuk Komite Manajemen Risiko, yang melapor ke Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko Perusahaan mengevaluasi risiko potensial tentang bisnis Perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan Perusahaan mengenai penilaian risiko dan manajemen

risiko, termasuk membuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur Perusahaan yang ada, sebagaimana diperlukan. Per tanggal 31 Desember 2009, anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari Rachmat Gobel (Ketua), George Thia Peng Heok, Jarman dan Rionald Silaban. Kami telah memasukkan Piagam Komite Manajemen Risiko (*Management Risk Charter*) ke dalam situs Perusahaan di www.indosat.com yang tersedia untuk umum.

Komite Anggaran

Komite Anggaran Perusahaan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dengan meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana strategis Perusahaan, rencana kerja tahunan dan anggran (termasuk rancangan anggaran belanja). Per tanggal 31 Desember 2009, anggota dari Komite Anggaran adalah Dr. Nasser Marafih (Ketua), George Thia Peng Heok, Richard Farnsworth Seney and Jarman.

Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2009, secara keseluruhan, Perusahaan mempekerjakan sekitar 7.126 karyawan, 4.883 di antaranya adalah karyawan tetap dan 2.243 lainnya adalah karyawan tidak tetap. Per tanggal 31 Desember 2009, di luar karyawan yang ditempatkan, anak-anak perusahaan kami telah mempekerjakan sekitar 996 karyawan tetap. Per tanggal 31 Desember 2009, karyawan tetap kami meliputi 735 karyawan tingkat manajer (karyawan dengan jabatan manajer atau lebih tinggi) dan 3.152 karyawan non-manajer, dibandingkan dengan 772 manajer and 3.221 non-manajer per tanggal 31 Desember 2008, dan 754 manajer dan 3.170 non-manajer per tanggal 31 Desember 2007. Tingkat *turnover* karyawan kami selama tahun 2009 adalah 2,3% per tahun, dimana lebih dari setengahnya berhenti secara sukarela dengan memilih program pensiun dini. Dengan demikian, per tanggal 31 Desember 2009, rata-rata jangka waktu karyawan yang bekerja di Perusahaan adalah 12,19 tahun.

Perusahaan memberikan beberapa tunjangan kepada karyawan, termasuk program pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan pajak penghasilan dan akses ke koperasi yang didirikan oleh para karyawan.

Pada tanggal 25 Agustus 1999, karyawan kami membentuk suatu serikat pekerja yang dinamakan Serikat Pekerja Indosat, atau SPI. Pada tanggal 15 September 2006, manajemen kami dan SPI telah menandatangani suatu perjanjian kerja bersama yang memuat ketentuan-ketentuan kerja umum, meliputi jam kerja, gaji, pengembangan dan kompetensi karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, tata tertib karyawan dan tata cara penyelesaian perselisihan. Perjanjian kerja bersama ini telah diperbaharui pada tanggal 5 Juni 2008. Kami yakin bahwa kami memiliki hubungan baik dengan serikat pekerja. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.3 dari perjanjian kerja bersama, kami mengadakan pertemuan dengan serikat pekerja sedikitnya satu kali setiap 3 bulan. Kami telah mendirikan Komite Kerjasama yang terdiri atas anggota manajemen dan perwakilan serikat pekerja, dan komite ini telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Jakarta Pusat.

Sejumlah karyawan kami berhak atas pensiun berdasarkan program tunjangan yang telah ditetapkan, dimana mereka memperoleh pembayaran sekaligus dan tunjangan bulanan melalui program asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), suatu perusahaan asuransi milik negara. Per tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan telah mengasuransikan 2.386 karyawan tetap melalui program pensiun yang dibiayai penuh. Berdasarkan program ini, seorang karyawan yang mengundurkan diri pada saat berusia 56 tahun akan menerima tunjangan pensiun. Selain itu, kami juga membuat program pensiun kontribusi yang ditetapkan untuk para karyawan kami pada bulan Mei 2001. Setelah dilakukannya merger Satelindo dan IM3 ke dalam Indosat, kami menggabungkan program kami dengan program pensiun kontribusi yang ditetapkan untuk karyawan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Berdasarkan program kontribusi yang ditetapkan, seorang karyawan akan memberikan kontribusi sebesar 10,0% sampai dengan 13,33% dari gaji pokoknya ke program tersebut. Kami memberikan kontribusi sebesar 50% kepada masing-masing karyawan. Administrasi dan manajemen program dikoordinasi oleh tujuh lembaga keuangan.

Para karyawan kami juga membentuk sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Pegawai Indosat ("Kopindosat"). Kopindosat menyediakan berbagai manfaat, seperti pinjaman yang bersifat konsumtif, terutama kepada karyawan Perusahaan, dan penyewaan mobil dan peralatan, terutama kepada Perusahaan. Manajemen Kopindosat dipilih oleh para karyawan setiap tiga tahun sekali dalam rapat anggota. Kopindosat dan beberapa anak perusahaannya berada di bawah pengawasan manajemen kami. Kopindosat memiliki saham minoritas di dalam beberapa perusahaan

afiliasi kami. Perusahaan juga menempatkan beberapa karyawan kami untuk sementara waktu di Kopindosat dan anak perusahaannya untuk membantu mereka dalam menjalankan usaha dan memberikan pelatihan kerja untuk para karyawannya.

Pada bulan Juli 2009, kami menerima penghargaan "HR Excellence Award 2009" dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI), *SWA Magazine* dan *Human Resources Indonesia* untuk empat kategori: salah satu *best overall talent management, recruitment and succession planning, development management* dan *performance management*.

Kepemilikan saham

Satu dari anggota direktur Perusahaan secara individual dan benefisial memiliki kurang dari satu persen dari saham biasa Perusahaan dan kepemilikan saham beliau di Perusahaan sudah dicatatkan dalam daftar khusus pemegang saham.

Butir 7: PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pemegang Saham Utama

Per tanggal 31 Maret2009, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan terbagi atas 1 saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100. Pemerintah, melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, memiliki 1 saham Seri A dan memiliki hak suara istimewa, serta memiliki 776,624,999 saham Seri B yang mewakili 14,29% saham Perusahaan. Qtel Asia memiliki sebesar 3.031.528.000 saham Seri B dan 500.528.600 saham Seri B yang mendasari kepemilikan saham di dalam ADS, atau sebesar 3.532.056.600 lembar saham Seri B yang mewakili 65% saham Perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2009, sebanyak 316.674.800 saham biasa Perusahaan yang mendasari kepemilikan saham Perusahaan di dalam ADS, mewakili secara keseluruhan sekitar 5,83% dari seluruh saham Perusahaan yang ditempatkan, dan 808.577.100 saham Seri B yang mewakili 14,20% saham Perusahaan yang dimiliki oleh publik. Oleh karena saham Seri B dan ADS Perusahaan banyak dimiliki oleh pialang dan lembaga-lembaga lainnya atas nama pemegang efek, kami yakin bahwa jumlah pemegang saham biasa Perusahaan lebih besar.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi per tanggal 31 Desember 2009 tentang (i) pihak-pihak yang kami ketahui memiliki lebih dari 5,0% dari saham biasa Perusahaan (baik secara langsung maupung tidak langsung melalui *American Depository Shares*) dan (ii) jumlah saham biasa Perusahaan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Nama Kelas	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Persentase dari Jumlah Kelas Saham yang di tempakan
Series A	Pemerintah	1	100,00%
Series B	Qtel Asia(1)	3.532.056.600	65.00%
Series B	Pemerintah	776,624,999	14,29%
Series B	Fadzri Sentosa	*	*

*Kurang dari 1,0%
(1) Qtel Asia secara keseluruhan dimiliki oleh Qtel.

Pemerintah

Sebelum dilakukannya penawaran saham perdana Perusahaan di tahun 1994, Pemerintah memiliki 100% saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan. Sejak awal tahun 2002, Pemerintah memiliki 65,0% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan. Berdasarkan kepemilikan saham tersebut, Pemerintah mengendalikan Perusahaan dan memiliki kekuasaan untuk memilih seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan untuk menentukan semua tindakan yang memerlukan persetujuan dari para pemegang saham. Selain itu, program pensiun, dana asuransi dan investor Indonesia lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, membeli sebagian saham biasa pada penawaran saham perdana Perusahaan.

Pada tanggal 16 Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan melalui global tender, yang mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 56,9%. Pada tanggal 20 Desember 2002, Pemerintah menjual 41,9% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan kepada ICLM (sebagaimana diuraikan di bawah ini), yang kembali mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 15,0%. Walaupun kepemilikan Pemerintah telah berkurang, Pemerintah tetap memiliki kendali yang signifikan atas Perusahaan melalui kepemilikan satu saham Seri A.

Sebagai pemegang 1 saham Seri A, Pemerintah memiliki hak suara istimewa. Hak-hak dan batasan-batasan material yang berlaku atas saham biasa juga berlaku atas 1 saham Seri A Perusahaan, kecuali bahwa Pemerintah tidak dapat memindahkan hak atas saham Seri A. Selain itu, melalui saham Seri A, Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan tindakan: (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iii) pembubaran, likuidasi dan kepailitan; (iv) perubahan Anggaran Dasar Perusahan sehubungan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A.

ICLM dan Qtel Asia

Pada tanggal 15 Desember 2002, ICLM, yang pada waktu itu merupakan anak perusahaan dari STT, menandatangani perjanjian jual beli saham (*Share Purchase Agreement)* dan perjanjian antara pemegang saham *(Shareholders Agreement)* dengan Pemerintah, yang bertindak melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan. STT seluruhnya dimiliki oleh ST Telemedia, yang dimiliki secara tidak langsung oleh Temasek Holdings (Private) Limited. Berdasarkan perjanjian jual beli saham, Pemerintah menjual kepada ICLM sebanyak 434.250.000 saham Seri B yang merupakan 41,9% dari seluruh saham Seri B yang ditempatkan oleh Perusahaan. Setelah dilaksanakannya transaksi jual beli saham ini, Pemerintah memiliki 155.324.999 saham Seri B, yang merupakan 15,0% dari seluruh saham Seri B yang ditempatkan oleh Perusahaan. Per tanggal 4 Mei 2006, ICLM memiliki 2.171.250.000 (39,96%) dari saham Seri B di Perusahaan, Pemerintah memiliki 1 saham Seri A dan 776.624.999 (14,29%) dari saham Seri B di Perusahaan dan ICLS, sebagai afiliasi dari ICLM, memiliki 46.340.000 (0,85%) dari saham Seri B di Perusahaan.

Pada tanggal 17 Januari 2007, ICLM memberitahukan kepada Perusahaan mengenai rencana Qtel untuk melakukan investasi modal sekitar 25,0% di AMH, yang pada saat itu dimiliki sepenuhnya oleh STT, yang mana kami memahami bahwa transaksi berakhir pada tanggal 1 Maret 2007. Setelah penutupan transaksi, STT secara efektif mengendalikan sekitar 75,0% dari AMH, yang secara langsung memiliki ICLM dan ICLS.

Pada tanggal 22 Juni 2008, setelah melakukan negosiasi dengan ST Telemedia, Qtel membeli semua saham yang diterbitkan dan ditempatkan masing-masing dari ICLM dan ICLS. Sesuai dengan perjanjian jual beli saham, Qtel, melalui anak perusahaannya Qatar South East Asia Holding S.P.C., membeli seluruh saham ICLM dan ICLS milik AMH, yang 75,0% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh STTdan 25,0% dimiliki secara tidak langsung oleh Qtel. Setelah akuisisi ini, sesuai dengan persyaratan dalam hukum Indonesia, Qtel melakukan penawaran tender untuk membeli sampai dengan 24,19% dari saham seri B kami (termasuk Saham Seri B yang berdasarkan ADSs) dan saat ini memiliki saham sebesar 65.0% pada Perusahaan. Pada 4 Juni 2009, ICLM menjual kepemilikan sahamnya di Indosat sebesar 39,96% kepada ICLS dan berdasarkan penjualan tersebut, ICLS menjadi pemilik yang sah dari 3.532.056.600 saham yang mewakili 65% saham Indosat. Pada tanggal 11 September 2009, ICLS mengubah namanya menjadi Qatar Telecom Asia (Qtel Asia) Pte. Ltd.

Qtel dimiliki 68% oleh pemerintah Qtar. Berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik terhitung sejak tanggal diterbitkannya laporan ini, Qtel merupakan pemain telekomunikasi yang besar yang menyediakan jasa yang beragam dengan wilayah operasional di sekitar 15 pasar, memiliki peringkat perusahaan A-, A1 dan A+ masing-masing diberikan oleh Standard & Poor's, Moody's and Fitch, dan menganggap Indosat sebagai anak perusahaan non-domestik terbesar, yang memberikan sebesar 29% dari pendapatan konsolidasi, 30% dari EBITDA terkonsolidasi dan 59% dari pelanggannya untuk triwulan pertama di tahun 2010.

Qtel menyediakan ahli keuangan, pengadaan, hukum, operasional, pembangunan jaringan dan pemeliharaan, pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan bisnis dan dukungan teknis yang signifikan kepada Perusahaan. Qtel memiliki perwakilan manajemen di dalam Perusahaan dan secara aktif berpartisipasi dalam perumusan strategi

bisnis. Kami bermaksud untuk mengambil keuntungan dari sinergi yang sudah ada dan diciptakan oleh keanggotaan dalam kelompok Qtel, dengan demikian meningkatkan posisi kami di pasar Telekomunikasi Indonesia.

Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan adalah pihak dari beberapa perjanjian dan mengadakan transaksi-transaksi dengan sejumlah perusahaan yang terkait dengan kami, termasuk perusahaan usaha patungan, koperasi dan yayasan, dan juga dengan pemegang saham pengendali, yaitu Pemerintah dan Qtel Asia, dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan atau dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah dan Qtel Asia. Beberapa transaksi utama meliputi kas dan setara dengan kas sebesar Rp 2.068 miliar yang disimpan di bank-bank milik pemerintah per tanggal 31 Desember 2009. Pendapatan usaha dari Telkom mencapai Rp 1.633,6 miliar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tingkat bunga seubngan dengan hutang tertunggak Perusahaan, lihat Butir %: Tinjauan dan Prospek Usaha dan Keuangan—Hutang Pokok." Selain itu, Perusahaan juga merupakan pihak dari berbagai perjanjian dengan badan usaha milik negara, seperti perusahaan asuransi, bank dan berbagai pemasok. Sebagai bahan diskusi untuk beberapa transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dapat dilihat di Catatan 26 dari dari Laporan Keuangan Konsolidasi kami yang dimasukkan di dalam laporan tahunan ini.

Butir 8: INFORMASI TENTANG KEUANGAN

Laporan Keuangan Konsolidasi dan Informasi Keuangan Lainnya

Lihat "Butir 17: Laporan Keuangan" untuk laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan tahunan ini. Tidak ada perubahan signifikan yang terjadi sejak tanggal laporan keuangan Perusahaan tersebut.

Proses Perkara Hukum

Dari waktu ke waktu, kami terlibat di dalam proses perkara hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan bisnis Perusahaan. Saat ini, Perusahaan tidak terlibat, dan belum terlibat di dalam, proses perkara pengadilan ataupun arbitrase yang menurut kami dapat memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan atau hasil usaha Perusahaan selain dari yang telah diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.

Pada tanggal 5 Mei 2004, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung No. 1610K/PDT/2003 yang memenangkan Primer Koperasi Pegawai Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (dikenal sebagai Primkopparseni), berkenaan dengan perselisihan transaksi valuta asing. Putusan Mahkamah Agung mengharuskan Perusahaan untuk membayar Rp13,7 miliar ditambah 6,0% bunga per tahun sejak tanggal 16 Februari 1998 sampai dengan tanggal pelunasan dan pada tanggal 22 Desember 2004, Perusahaan telah memenuhi putusan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp19,3 miliar (US$2,1 juta) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk menutup pengeluaran yang telah dibayarkan kepada Primkopparseni, Perusahaan kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut bahwa rapat anggota Primkopparseni dimana di dalamnya para anggota memutuskan untuk memperkarakan Perusahaan adalah tidak sah. Pada tanggal 19 Januari 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa rapat anggota tersebut adalah tidak sah, tetapi tidak mewajibkan Primkopparseni untuk memberikan kompensasi kepada Perusahaan, telah mendorong Perusahaan dan Primkopparseni untuk mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2005. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya No. 483 / PDT / 2005 / PT.DKI memenangkan kami dengan mengeluarkan putusan bahwa rapat tersebut tidak sah, tetapi di sisi lain, tidak mewajibkan Primkopparseni untuk memberikan kompensasi kepada kami. Kami dan Primkopparseni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memohon ganti rugi atas biaya hukum dan atas pencemaran nama baik Perusahaan, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kami pada tanggal 13 Agustus 2008 melalui putusannya No. 229/K/PDT/2008.

Berdasarkan Schedule TO yang diajukan oleh Qtel tertanggal 20 Januari 2009 dan disampaikan kepada SEC pada tanggal 20 Januari 2009, pada 19 November 2007, KPPU memutuskan dan menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("Temasek"), bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.("ST Telemedia"), STT, Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd. ("AMHC"),

AMH, ICLM, ICLS, Singapore Telecomunications Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("Singtel"), dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("SingTel Mobile") telah melanggar hukum persaingan usaha Indonesia dan menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan STT, AMHC, AMH, ICLM, ICLS dan SingTel ("Entitas Afiliasi Temasek") untuk melepaskan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau Indosat dalam waktu dua tahun, efektif sejak tanggal putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hukum persaingan usaha Indonesia menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50,0% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek dan para pihak lainnya yang terkait telah mengajukan banding atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan dan membenarkan keputusan KPPU, dan menghukum Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek untuk melepaskan kepemilikannya di Telkomsel atau Indosat dalam jangka waktu dua belas bulan setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 10 September 2008, Mahkamah Agung menolak kasasi dan membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sebagai berikut: (1) menyatakan Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No.5/1999; (2) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menghentikan kepemilikan silang saham mereka di Telkomsel dan Indosat dengan mengalihkan sahamnya di Telkomsel atau Indosat, dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau mengurangi 50,0% kepemilikan sahamnya di masing-masing Telkomsel dan Indosat tidak lebih dari dua belas bulan dari tanggal keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; (3) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menetapkan perusahaan dimana mereka akan melepaskan saham-saham tersebut dan melepaskan hak suara dan hak-hak untuk mengangkat direktur dan komisaris baik di Telkomsel maupun Indosat sampai dengan dilakukannya pelepasan seluruh saham yang dimilikinya atau dilakukannya penurunan kepemilikan saham sampai dengan 50,0% saham mereka di masing-masing Telkomsel dan Indosat sebagaimana disebutkan dalam butir 2 di atas. Pada 22 Juni 2008, Qtel membeli semua 40,81% kepemilikan saham Entitas Afiliasi Temasek yang ada di Indosat.

Runtutan gugatan *class action* juga diajukan terhadap kami dan Telkomsel di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang sehubungan dengan kepemilikan silang saham Temasek sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh mengakibatkan penetapan harga jasa telekomunikasi yang tinggi yang merugikan masyarakat. Pada tanggal 31 Oktober 2007, sekelompok pelanggan telepon selular di Indonesia mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di Bekasi menuntut di antaranya ganti rugi sebesar Rp1.231,7 miliar sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Kami juga menjadi pihak tergugat dalam *class action* yang sama yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2007 ("*Class Action* Tangerang"). Penggugat mewakili para pelanggan kami dan pelanggan dari Telkomsel dan XL di seluruh Indonesia yang menggunakan jasa-jasa Simpati, Mentari, Kartu As, IM3, Kartu Halo, Matrix, Jempol, Xplor dan Bebas dan menuntut kompensasi di antaranya sebesar Rp30.808,7 miliar. Pada tanggal 22 April 2008 kami menerima pemberitahuan bahwa kami, Temasek Holdings, ST Telemedia, STT, AMH, ICLM, ICLS. SingTel, SingTel Mobile, Telkomsel, Telkom dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah menjadi tergugat dalam gugatan *class action* yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"). Para penggugat mewakili pelanggan Telkomsel, Indosat dan XL dan telah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan *class action* di Tangerang. Para penggugat meminta di antaranya kompensasi sampai dengan Rp30.808,7 miliar. Pada Juli 2008, kami memperoleh pemberitahuan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Bekasi telah dicabut oleh Penggugat dan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah digabungkan dengan *Class Action* Tangerang. Gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang ditunda dengan putusan penundaan hakim, dikarenakan menunggu putusan banding ke Mahkamah Agung oleh Penggugat dari gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Maret 2009, kami memperoleh informasi bahwa Mahkamah Agung pada tanggal 21 Januari 2009 telah mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Pengadian Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan gugatan *class actio*n. Pada tanggal 22 Desember 2009, Indosat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menyebutkan bahwa selama

tidak ada bukti yang menunjukkan kerugian pelanggan selama jangka waktu kepemilikan STT. Di waktu yang sama, Indosat juga mempersiapkan eksepsi atas ketidakwenangan wakil dari perwakilan kelompok dan juga jawaban atas gugatan. Pada tanggal 5 Januari 2010, para tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi sehubungan dengan *legal standing* dari wakil kelompok berdasarkan ketentuan hukum acara gugatan perwakilan kelompok. Pada tanggal 27 Januari 2010, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima dan memerintahkan para penggugat dan tergugat untuk menghentikan kasus dikarenakan (i) penggugat menolak untuk membuktikan *legal standing* mereka dan (ii) dua anggota dari penggugat kolektif tidak memenuhi kualifikasi sebagai wakil dalam gugatan perwakilan kelompok. Jangka waktu untuk mengajukan banding telah lewat, keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2010 telah menjadi putusan akhir dan mengikat.

Pada tanggal 22 Maret 2010, sidang Class Action Tangerang berlanjut, namun para penggugat tidak hadir. Pada tanggal 3 Mei 2010, Perusahaan mengajukan eksepsi dan pada tanggal 24 Mei 2010 majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima karena ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatan dan penggugat juga gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai perwakilan dari Class Action.

Selain yang telah disebutkan diatas, kami telah menerima surat dari KPPU No. 398/AK/KTPP/XI/2007, tanggal 15 November 2007 sehubungan dengan kemungkinan pelanggaran atas Pasal 5 dari Undang-Undang No. 5/1999 tentang penetapan harga SMS yang dilakukan oleh operator telekomunikasi (pokok perkara nomor 26/KPPU-L/2007). Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa hanya Telkom, Telkomsel, XL, Bakrie Telecom, Mobile-8 dan Smart Telecom yang secara bersama melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/ 1999. Telkomsel mengajukan keberatan dari putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sementara Mobile-8 mengajukan keberatan dari putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana XL, Telkomsel, Indosat, Telkom, Hutchison, Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Selular dipanggil sebagai turut termohon.

Pada pemeriksaan pajak terhadap pembayaran pajak kami untuk tahun 2004 dan 2005 oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara ("KPP BUMN"), pada tanggal 4 Desember 2006 dan 27 Maret 2007, Perusahaan diberitahu bahwa pemotongan pajak penghasilan untuk bunga pinjaman antar perusahaan (*intercompany loans*) yang dibayarkan kepada Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. sehubungan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2010 Perusahaan dengan jumlah pokok sebesar US$300,0 juta dan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012 dengan jumlah pokok sebesar US$250,0 juta adalah 20,0%, bukan 10,0%. Berdasarkan opini dari Penasihat Pajak kami dan pemahaman kami atas hukum Indonesia, kami berpendapat bahwa perhitungan kami pertama kali atas pemotongan pajak adalah benar dan kami telah mengajukan keberatan kepada KPP BUMN terhadap pemeriksaan tersebut. Pada tanggal 18 Februari 2008 dan 4 Juni 2008, kami menerima surat dari Direktorat Pajak yang menolak keberatan kami terhadap pembayaran pajak tahun 2004 dan 2005, masing-masing sebesar Rp60.493 juta dan Rp82.126 juta. Karena keberatan kami ditolak, kami mengajukan surat banding untuk keputusan pajak tahun 2004 dan 2005 ke Pengadilan Pajak, masing-masing pada tanggal 14 Mei 2008 dan 2 September 2008. Per tanggal 31Desember 2009, kami belum menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas keberatan-keberatan tersebut.

Kami juga mempermasalahkan kelebihan pembayaran pajak untuk tahun buku 2005 kepada Kantor Pajak. Pada tanggal 27 Maret 2007, kami menerima surat dari Kantor Pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyetujui pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badandi tahun 2005 sebesar Rp135.766 jutadimana jumlah tersebut lebih rendah daripada Rp176.645 juta yang kami ketahui. Kami mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak pada tanggal 22 Juni 2007 dan menggugat adanya perbedaan jumlah yang bernilai sampai Rp40.879 juta. Pada tanggal 27 Mei 2008, kami menerima surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menerima sebagian keberatan kami, tetapi hanya berjumlah sampai Rp2.725 juta. Kami mengajukan surat banding untuk sisa revisi pajak penghasilan badan tahun 2005 pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan jumlah sebesar Rp38.154 juta. Per tanggal 31 Desember 2009, kami belum menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas banding tersebut.

Pada tanggal 24 Desember 2008, kami menerima surat kelebihan pembayaran pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Fiskal untuk tahun 2004 dengan jumlah sebesar Rp84.650 juta, dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada

jumlah yang dinyatakan dalam surat keputusan sebelumnya yang kami terima pada tanggal 4 Juli 2008. Pada tanggal 21 Januari 2009, kami telah mengajukan banding terhadap perbedaan jumlah kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2004. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 November 2009, Pengadilan Pajak telah membatalkan Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-539/WPJ.19/BD.05/2008, tanggal 24 Desember 2008. Pada tanggal 17 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan putusan yang mendukung kedudukan Perusahaan, yang memberitahukan bahwa kelebihan bayar pajak fiscal tahun 2004 seharusnya sebesarnya Rp126.403 juta bukanlah Rp84.650, yang mana memberikan hak kepada Perusahaan untuk mendapatkan pengembalikan dari perbedaan jumlah tersebut, dengan jumlah yang bernilai sampai Rp41.753 juta. Selanjutnya Perusahaan menerima pembayaran dari pengembalian kelebihan bayar pajak sebesar Rp41.753 juta dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 13 April 2010.

Kami tidak terlibat dalam perkara-perkara material lainnya, termasuk perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ataupun perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan secara material.

Kebijakan Dividen

Para pemegang saham kami menetapkan pembagian dividen di dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi kami. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2008 dan 2009, pemegang saham perusahaan mengumumkan dividen tunai final sebesar 50% dari laba bersih untuk masing-masing tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2008. Kami bermaksud untuk terus membayar dividen dalam jumlah tersebut untuk memenuhi tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan harapan investor.

Butir 9: PENAWARAN DAN PENCATATAN

Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan

Tabel di bawah ini memperlihatkan kutipan laporan harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu dari saham biasa Perusahaan di Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Seluruh harga yang tercantum sebelum tanggal 3 Desember 2007 adalah berasal dari BEJ, sedangkan seluruh harga yang tercantum setelah tanggal 3 Desember 2007 adalah berasal dari BEI, setelah BEI mulai beroperasi:

	Harga per saham	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam Rp.)	
Tahunan		
2005	6.400	4.275
2006	6.750	4.050
2007	9.900	5.600
2008	8.750	3.950
2009	5.950	4.200
Periode Triwulan		
Triwulan Pertama 2008	8.750	5.850
Triwulan Kedua 2008	7.000	5.300
Triwulan Ketiga 2008	6.750	5.800
Triwulan Keempat 2008	5.750	3.950
Triwulan Pertama 2009	5.900	4.200
Triwulan Kedua 2009	5.950	4.850
Triwulan Ketiga 2009	5.700	5.050
Triwulan Keempat 2009	5.700	4.600
Triwulan Pertama 2010	6.200	4.700
Bulan		
Nopember 2009	5.300	4.850
Desember 2009	5.000	4.600
Januari 2010	4.700	5.800

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

	Harga per saham	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam Rp.)	
Februari 2010	5.400	5.000
Maret 2010	6.200	5.100
April 2010	6.150	5.750
Mei (sampai dengan 14 Mei 2010)	5.950	5.500

Pada tanggal 14 Mei 2010, harga penutupan untuk saham biasa Perusahaan adalah Rp5.500

Tabel di bawah ini memperlihatkan kutipan laporan harga tertinggi dan terendah untuk ADS, untuk periode tertentu, dari ADS di *New York Stock Exchange* atau NYSE.

	Harga per ADS	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam USD)	
Tahunan		
2005	34 1/4	20 45/64
2006	38 71/128	21 13/16
2007	51 13/16	30 13/64
2008	47 1/64	16
2009	30 47/128	16 189/256
Periode Tahunan		
Triwulan Pertama 2008	47 1/64	32 23/32
Triwulan Kedua 2008	38 29/32	29 13/64
Triwulan Ketiga 2008	37 29/64	29 55/64
Triwulan Keempat 2008	31 13/16	16
Triwulan Pertama 2009	26 1/4	16 95/128
Triwulan Kedua 2009	26 83/128	20 127/128
Triwulan Ketiga 2009	28 45/128	24 37/128
Triwulan Keempat 2009	30 47/128	24 9/32
Triwulan Pertama 2010	33 123/128	25 3/8
Bulan		
Nopember 2009	27 111/128	25 119/128
Desember 2009	26 1/2	24 9/32
Januari 2010	30 51/128	25 3/8
Februari 2010	29 3/32	26 7/64
Maret 2010	33 123/128	27 113/128
April 2010	34 3/16	31 27/64
Mei (sampai dengan 14 Mei 2010)	33 45/128	28 13/16

Pada tanggal 14 Mei 2010, harga penutupan untuk ADS adalah sebesar US$ 29.79 di NYSE.

Pasar

Saham biasa kami tercatat di BEI. BEI merupakan bursa perdagangan non-Amerika Serikat untuk saham biasa kami. Sebagai tambahan, tiap lembar ADS kami mewakili 50 saham biasa kami, dan tercatat di NYSE. Setelah pemecahan saham, yang telah efektif pada 10 Maret 2004, tiap ADS mewakili 50 saham Seri B (sebagaimana dibandingkan dengan 10 saham Seri B yang sebelumnya diwakili).

Pasar Modal Indonesia

Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi BEI. BEI mulai beroperasi pada tanggal 3 Desember 2007, dan pada tahun 2007, BEI memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.539.041 miliar, dimana Rp1.982 miliar di antaranya berasal dari saham, Rp79.065 miliar dan 105 juta Dolar AS berasal dari obligasi perusahaan dan Rp477 triliun berasal dari obligasi pemerintah.

Tinjauan tentang BEI

Saat ini, ada dua sesi perdagangan efek harian, dari Senin sampai dengan Kamis, yaitu pukul 9:30 sampai dengan pukul 12:00, dan pukul 13:30 sampai dengan pukul 16:00. Sementara itu, ada dua sesi perdagangan di hari Jumat, dari pukul 9:30 sampai dengan pukul 11:30 dan dari pukul 14:00 sampai dengan pukul 16:00. Perdagangan di BEI berlangsung berdasarkan *order-driven market system.* Para investor harus menghubungi perusahaan pialang atau anggota BEI, yang akan menjalankan pesanan mereka melalui sistem perdagangan BEI. Perdagangan efek di BEI hanya dapat dilakukan oleh anggota BEI yang terdaftar sebagai anggota PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Perusahaan pialang juga dapat melakukan transaksi jual beli efek untuk dirinya sendiri. Tidak ada batasan kepemilikan saham oleh investor asing atau institusi asing, baik dalam bentuk penyertaan modal langsung maupun melalui transaksi perdagangan di BEI, kecuali untuk bank, yang hanya dapat dimiliki asing sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99,0%.

Perdagangan saham dibedakan menjadi tiga segmen pasar: pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai. Pasar reguler adalah mekanisme perdagangan saham dengan menggunakan satuan lot di pasar lelang yang berlangsung terus-menerus selama jam bursa. Sehubungan dengan perdagangan saham, satu lot saham terdiri dari 500 lembar saham. Fraksi harga dibatasi, yaitu sebagai berikut: (i) apabila harga saham berada di bawah Rp200, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp1 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp10; (ii) apabila harga saham sama dengan Rp200 atau lebih, tetapi kurang dari Rp500, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp5 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp50; (iii) apabila harga saham sama dengan Rp500 atau lebih, tetapi kurang dari Rp2.000, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp10 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp100; (iv) apabila harga saham sama dengan Rp2.000 atau lebih, tetapi kurang dari Rp5.000, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp25 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp250; and (v) apabila harga saham sama dengan Rp5.000 atau lebih, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp50 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp500. Pesanan-pesanan diproses dengan komputer yang akan melakukan *matching* antara "penawaran" dan "permintaan"yang ditempatkan sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga memprioritaskan pesanan pembelian dengan harga terendah atau pesanan penjualan dengan harga tertinggi. Apabila pesanan pembelian atau penjualan dilakukan pada harga yang sama, prioritas diberikan pada pesanan pembelian atau penjualan yang dilakukan pertama (prioritas waktu).

Perdagangan efek di pasar negosiasi dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem lot saham dan aturan tahapan harga. Anggota BEI dapat mengumumkan pesanan penjualan atau pembelian melalui sistem perdagangan BEI dan dapat mengubah pesanan mereka berdasarkan negosiasi dengan anggota lainnya. Harga akhir terbentuk berdasarkan kesepakatan, tetapi disarankan untuk berpatokan pada harga saham di pasar reguler.

Transaksi-transaksi di pasar reguler dan pasar non-reguler pada BEI harus diselesaikan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah dilakukannya transaksi. Apabila anggota bursa melanggar ketentuan waktu penyelesaian transaksi, maka anggota bursa tersebut diwajibkan untuk membayar 125,0% dari harga tertinggi untuk efek yang sama pada hari perdagangan yang sama.

Direksi BEI dapat membatalkan suatu transaksi apabila terbukti adanya unsur penipuan, manipulasi atau penggunaan informasi orang dalam. Direksi dapat menghentikan perdagangan efek sementara apabila terdapat indikasi adanya transaksi tipuan atau upaya manipulasi harga saham, informasi yang menyesatkan, penggunaan informasi orang dalam, efek palsu atau efek yang diblokir dari perdagangan, atau kejadian-kejadian penting lainnya.

Anggota BEI dapat mengenakan biaya untuk jasa-jasanya berdasarkan suatu perjanjian dengan para nasabahnya. Ketika melakukan transaksi saham di BEI, anggota bursa diwajibkan membayar biaya transaksi sebesar 0,03% dari nilai transaksi kumulatif untuk setiap bulan ditambah 0,01% untuk transaksi di pasar tunai dan reguler yang dijamin oleh KPEI (dengan ketentuan biaya transaksi minimum sebesar Rp2.000.000). Komisi dan biaya transaksi tidak termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10,0% dan pajak transaksi sebesar 0,1% yang dikenakan atas nilai kumulatif dari penjualan saham.

Pasar modal Indonesia umumnya kurang likuid dibandingkan dengan di negara-negara yang memiliki pasar modal yang lebih berkembang. Tidak likuidnya pasar modal ini terutama untuk efek dalam jumlah besar. Selain itu, harga saham di pasar modal Indonesia biasanya lebih bergejolak dibandingkan pasar modal di negara lainnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat menjamin bahwa seorang pemegang saham biasa akan dapat melepaskan saham biasanya dengan harga atau pada waktu dimana pemegang saham tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau tidak sama sekali. Selain itu, kami tidak dapat menjamin bahwa seorang pemegang saham biasa akan dapat melepaskan saham biasanya dengan atau di atas harga beli dari pemegang saham yang bersangkutan.

Perdagangan di NYSE

Bank of New York berfungsi sebagai depositary atau Depositary. sehubungan dengan ADS Perusahaan, yang diperdagangkan di NYSE. Setelah dilakukannya pemecahan saham, yang berlaku efektif pada tanggal 10 Maret 2004, masing-masing ADS mewakili 50 saham biasa Perusahaan (dibandingkan sepuluh saham Seri B yang sebelumnya diwakili). Per tanggal 31 Maret 2009, 574.944.900 ADS yang merupakan 10,58% dari saham biasa Perusahaan, telah ditempatkan di Amerika Serikat dan terdapat 40 pemegang ADS Perusahaan yang tercatat.

Butir 10: INFORMASI TAMBAHAN

Uraian tentang Anggaran Dasar dan Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2009, modal dasar Indosat adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000, terbagi menjadi 20.000.000.000 saham yang terdiri dari satu saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari modal dasar Perusahaan, 5.433.933.500 saham telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai, terdiri dari satu saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B, atau dengan total nilai nominal sebesar Rp543.393.350.000 yang dimiliki oleh:

a. Pemerintah Republik Indonesia, satu saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp77.662.500.000;
b. Qtel Asia, 3.532.056.600 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp353.205.660.000; dan
c. Publik, 1.125.251.900 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp112.525.190.000.

Pada tanggal 8 Maret 2004, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A dan saham Seri B dari Rp500 menjadi Rp100 per lembar saham, yang meningkatkan jumlah saham dalam modal dasar Perusahaan menjadi 20.000.000.000 saham dan saham yang ditempatkan menjadi 5.177.500.000 saham. Setelah dilakukannya pemecahan saham, modal dasar Indosat adalah sebesar Rp2.000.000.000.000, terbagi menjadi 20.000.000.000 saham yang terdiri dari satu saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari modal dasar Perusahaan, 5.177.500.000 saham telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai, terdiri dari satu saham Seri A dan 5.177.499.999 saham Seri B, atau dengan total nilai nominal sebesar Rp517.750.000.000 yang dimiliki oleh:

a. Pemerintah Republik Indonesia, satu saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp77.662.499.900;
b. ICLM, 2.171.250.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp217.125.000.000; dan
c. Publik, 2.229.625.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp222.962.500.000.

Perubahan Anggaran Dasar Indosat, sehubungan dengan adanya pemecahan saham, telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor C- 05582 HT.01.04. TH.2004, tanggal 8 Maret 2004. Perubahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah nomor 0540/RUB.09.05/III/2004, tanggal 9 Maret 2004. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tanggal 28 Januari 2010, Indosat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui, antara lain, perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Indosat mengenai maksud dan tujuan Indosat. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam and LK No. IX.J.1.

Anggaran Dasar Perusahaan, atau Anggaran Dasar, menyatakan bahwa setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham yang khusus diadakan untuk itu.

Masing-masing Direktur menerima bonus tahunan serta insentif lainnya apabila Perusahaan dapat melampaui target keuangan dan operasional tertentu, dimana besarnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan. Bonus dianggarkan setiap tahunnya dan dibuat berdasarkan rekomendasi Direksi, yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada pemegang saham Perseroan. Masing-masing Komisaris diberikan honorarium bulanan dan beberapa tunjangan lainnya, yang besarnya ditentukan oleh pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan.

Direksi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mengendalikan, mempertahankan dan mengelola aset Perusahaan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Direksi diberi wewenang untuk memastikan agar Perusahaan dapat memperoleh pinjaman dana sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur di dalam Anggaran Dasar. Kekuasaan Direksi untuk melakukan pinjaman hanya dapat diubah dengan cara mengubah Anggaran Dasar. Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan tentang usia pensiun tertentu dari Direktur atau untuk memiliki saham dalam batasan tertentu.

Saham Biasa

Berikut ini adalah ringkasan hak-hak dan batasan-batasan material berkenaan dengan saham biasa Indosat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir diubah pada tanggal 28 Januari 2010 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2010. Penjelasan yang diberikan di sini bukan merupakan penjelasan yang lengkap dan karena itu harus mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perseroan terbatas, yang dalam beberapa hal dapat berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Anggaran Dasar.

Semua saham biasa adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar di dalam daftar pemegang saham Indosat. Direksi mengadakan daftar pemegang saham Indosat, dan Indosat harus memperlakukan pihak yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham tersebut sebagai satusatunya pihak yang berhak menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum berkenaan dengan saham biasa tersebut.

Segala pemindahan hak atas saham biasa harus dibuktikan dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan atau berdasarkan surat-surat lainnya, yang memberikan bukti yang cukup menurut pendapat Direksi. Pemindahan hak atas saham biasa berlaku hanya setelah pemindahan hak tersebut didaftarkan di daftar pemegang saham. Pihak yang memindahkan saham biasa akan diakui sebagai pemilik saham biasa tersebut sampai dengan nama pihak yang menerima pemindahan telah dicatatkan ke dalam daftar pemegang saham.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Para pemegang saham biasa berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu/*pre-emptive right* apabila Indosat mengeluarkan saham biasa, obligasi konversi, waran atau efek serupa. Hak memesan efek terlebih dahulu dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap pengeluaran hak memesan efek terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Indosat dan rencana tersebut harus diumumkan oleh Direksi di dalam dua surat kabar harian (satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Indonesia). Apabila para pemegang saham biasa tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang terkait, maka Direksi dapat mengeluarkan saham biasa, obligasi konversi, waran atau efek serupa tersebut kepada pihak ketiga dengan harga dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sekurang-kurangnya sama dengan apa yang ditawarkan sebelumnya kepada para pemegang saham yang ada dan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Modal dasar Indosat hanya dapat ditingkatkan atau diturunkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan melalui perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar berlaku efektif hanya setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sebagai pengecualian dari ketentuan-ketentuan di atas, Indosat dapat mengeluarkan saham baru tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan ketentuan tindakan tersebut memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dimana pemegang saham Seri A hadir di dalam rapat dan menyetujui keputusan. Penerbitan saham ini dapat dilakukan sepanjang saham yang diterbitkan terbatas jumlahnya dan diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan pasar modal Indonesia atau berdasarkan pengecualian yang diperoleh oleh Indosat, dan saham tersebut dapat dijual oleh Indosat kepada pihak manapun dengan harga dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan harga saham tidak lebih rendah dari harga nominal. Tidak ada batasan mengenai hak para investor asing untuk memiliki saham biasa Perusahaan jika saham tersebut diperoleh melalui pasar modal.

Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku secara *mutatis mutandis* dalam hal Indosat mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran atau efek lainnya yang serupa, dengan ketentuan bahwa setiap saham baru yang dikeluarkan sebagai akibat penerbitan obligasi konversi dan/atau waran atau efek lainnya yang serupa akan terbatas jumlahnya dan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan pasar modal Indonesia atau berdasarkan pengecualian yang diperoleh oleh Indosat.

Saham Seri A

Hak-hak dan batasan-batasan yang bersifat material yang berlaku atas saham biasa juga berlaku atas satu saham Seri A, kecuali Pemerintah tidak dapat memindahkan hak atas saham Seri A dan Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan: (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iii) likuidasi dan pengajuan permohonan agar diajukan pailit; (iv) perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A.

Tujuan dan Jangka Waktu

Menurut Pasal 3 dari Anggaran Dasar kami, sebagaimana diubah pada tanggal 28 Januari 2010, untuk mematuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, maksud, tujuan dan kegiatan usaha Indosat adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa multimedia, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, jasa akses internet, jaringan telekomunikasi bergerak dan jaringan telekomunikasi tetap; dan

b. menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi serta informatika dan/atau teknologi konvergensi.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

   a. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan, serta memelihara sarana/fasilitas termsuk sumber daya untuk mendukung usaha Perusahaan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi;

   b. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pengembangan, pemasaran serta penjualan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang diselenggarakan Perusahaan), termasuk penelitian, layanan pelanggan, penyelenggaraan pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

   c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi elektronis, penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, konten serta jasa pengelolaan telekomunikasi.

Perusahaan didirikan pada tanggal 10 November 1967 tanpa batas waktu pendirian.

Hak Suara

Setiap saham biasa memberikan hak bagi pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk memberikan satu suara pada setiap rapat umum pemegang saham Indosat. Pemegang saham menunjuk anggota Direksi untuk suatu periode yang dimulai pada tanggal rapat umum pemegang saham yang menunjuk mereka dan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal penunjukan mereka.

Rapat umum pemegang saham tahunan harus diadakan, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni setiap tahun. Pada rapat umum pemegang saham tahunan, Direksi wajib (i) melaporkan perihal jalannya Indosat dan administrasi keuangan dari tahun buku yang baru berlalu; (ii) menyampaikan neraca dan perhitungan laporan rugi laba untuk disetujui dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham; (iii) penggunaan keuntungan dan besarnya dividen yang harus dibayarkan; (iv) mengajukan penunjukkan akuntan; dan (v) mengajukan hal-hal lainnya demi kepentingan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga harus melaporkan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahun buku yang baru berlalu sebagaimana dicantumkan dalam laporan tahunan. Semua bahan yang diuraikan dalam butir (i) sampai dengan (v) tersedia di kantor Indosat untuk diperiksa oleh para pemegang saham pada saat panggilan rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan tanggal rapat umum pemegang saham tahunan. Usul-usul yang disampaikan secara sah oleh para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10,0% dari saham yang ditempatkan oleh Indosat dapat dimasukkan ke dalam agenda rapat tersebut, dengan ketentuan usul-usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 21 hari sebelum rapat tersebut.

Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan wajib mengadakan rapat tersebut setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari seorang pemegang saham atau para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10,0% dari saham yang ditempatkan dalam Indosat. Dalam waktu 22 hari setelah menerima permohonan tersebut, Direksi akan membahas, memutuskan, dan jika Direksi memutuskan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka Direksi akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa selambat-lambatnya 14 hari (tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan) sebelum panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kemudian, selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakan rapat umum

pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, Direksi akan membuat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Apabila para Direktur tidak membuat panggilan rapat tersebut, maka para pemegang saham yang bersangkutan akan mengajukan kembali permohonannya kepada Dewan Komisaris. Dalam waktu 22 hari setelah menerima permohonan tersebut Dewan Komisaris akan membahas, memutuskan, dan jika Dewan Komisaris memutuskan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka Dewan Komisaris akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa selambat-lambatnya 14 hari (tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan) sebelum panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kemudian, selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, Dewan Komisaris akan membuat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Apabila Dewan Komisaris tidak membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam waktu 22 hari setelah diterimanya permohonan tersebut, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat memanggil rapat atas biaya Indosat setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pengumuman tentang rapat umum pemegang saham diberikan kepada para pemegang saham sekurang-kurangnya 14 hari (tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan) sebelum panggilan rapat umum pemegang saham melalui iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian (satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Indonesia), satu di antaranya memiliki peredaran yang luas di Indonesia. Panggilan rapat harus disampaikan melalui iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia dan memiliki peredaran luas di Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tanggal rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Apabila seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili, maka ketentuan panggilan rapat dapat dikesampingkan dan rapat umum pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Secara umum, kuorum untuk Rapat umum pemegang saham memerlukan kehadiran pemegang saham secara langsung atau kuasanya, berdasarkan surat kuasa, yang mewakili lebih dari 50% dari saham biasa yang dikeluarkan Perusahaan.

Pemegang saham dapat diwakili di dalam rapat umum pemegang saham oleh seseorang yang memiliki surat kuasa, tetapi tidak satupun Komisaris, Direktur atau karyawan Indosat yang dapat bertindak dalam kapasitas tersebut. Kecuali ditentukan lain di dalam Anggaran Dasar, dan dengan memperhatikan hak suara istimewa dari Saham Istimewa, keputusan-keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari para pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham biasa hadir dan memberikan suara di dalam rapat (suara mayoritas biasa).

Tahun Buku dan Laporan Keuangan Tahun buku Perusahaan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Selambat-lambatnya 90 hari sejak penutupan tahun buku, Direksi wajib menyampaikan neraca, laporan rugi laba dan laporan-laporan keuangan lainnya yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Komisaris, yang harus mengkaji laporan-laporan ini dan melaporkan hasil pengkajiannya kepada rapat umum pemegang saham. Salinan dari dokumen-dokumen tersebut harus tersedia di kantor pusat Indosat sejak tanggal panggilan rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan tanggal penutupan rapat umum pemegang saham tahunan.

Rapat umum pemegang saham tahunan akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah neraca dan laporan rugi laba Indosat akan disetujui atau tidak. Persetujuan tersebut berarti memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab mereka selama tahun buku yang bersangkutan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam neraca dan laporan rugi laba.

Penggunaan Laba dan Dividen

Perolehan Laba Indosat, sebagaimana ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak perusahaan, harus digunakan untuk dana cadangan, dividen atau keperluan lainnya, dimana persentasenya harus ditentukan oleh rapat umum pemegang saham setiap tahunnya.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil di dalam rapat umum pemegang saham, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, dimana keputusan tersebut juga menentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Seluruh saham biasa yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat diumumkannya dividen atau pembagian laba lainnya berhak mendapat bagian yang sama atas dividen atau pembagian laba lainnya tersebut. Dividen harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham Indosat, pada hari kerja yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dimana pembagian dividen diputuskan.

Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan keduanya, dapat mengumumkan pembagian dividen interim apabila kondisi keuangan Indosat mengijinkan, dengan ketentuan dividen interim akan dikompensasikan terhadap dividen yang akan dibagikan pada rapat umum pemegang saham tahunan berikutnya.

Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal dimana dividen harus dibayarkan menjadi tidak lagi harus dibayarkan dan dimasukkan ke dalam dana cadangan Indosat. Pemberitahuan tentang dividen dan dividen interim harus diumumkan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas atau nasional di Indonesia, di satu surat kabar harian berbahasa Inggris dan pada bursa efek dimana saham Perusahaan tercatat.

Apabila laporan rugi laba dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup oleh dana cadangan yang dimaksud di atas, maka kerugian akan tetap dicatat di dalam laporan rugi laba dan untuk tahun-tahun selanjutnya Indosat dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat di dalam laporan rugi laba tersebut belum tertutup sama sekali.

Untuk menutup kerugian di kemudian hari, dana cadangan dapat dibentuk dan besarnya dana cadangan akan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Dana cadangan dapat digunakan untuk pengeluaran barang modal atau keperluan lainnya sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan. Akan tetapi, dana cadangan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan Indosat. Setiap laba yang diperoleh dari dana cadangan tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi Indosat.

Likuidasi

Dalam hal terjadi likuidasi Perusahaan, Direksi akan bertindak sebagai likuidator jika dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sisa dari seluruh aset likuidasi yang telah dipersiapkan, setelah pembayaran seluruh utang dan kewajiban Perusahaan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham. Jika memungkinkan, pembayaran terhadap saham-saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan harga yang tertera pada sertifikat saham. Sisa aset likuidasi akan dibagikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari para pemegang saham dan disetujui oleh dua per tiga dari para pemegang saham dengan hak suara, dengan ketentuan hal-hal yang berkenaan dengan (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iii) pembubaran dan likuidasi; (iv) perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A, hanya dapat diberlakukan apabila rapat dihadiri dan tindakan tersebut disetujui oleh pemegang saham Seri A.

Keputusan mengenai pengurangan modal dasar dan modal ditempatkan harus diumumkan oleh Direksi di dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, dan yang lainya berbahasa Inggris, untuk kepentingan para kreditur dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal rapat umum pemegang saham. Dalam hal kuorum rapat umum pemegang saham luar biasa tidak tercapai, maka dalam waktu sepuluh sampai dengan dua puluh satu hari sejak rapat umum pemegang saham luar biasa yang pertama, rapat kedua dapat diadakan untuk memutuskan hal-hal yang tidak diselesaikan di dalam rapat pertama. Rapat kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per lima dari jumlah pemegang saham dan disetujui oleh lebih dari ½ dari jumlah pemegang saham

dengan hak suara. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan pengurangan modal hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Transaksi-Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Indosat memiliki kebijakan untuk tidak mengadakan transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi kecuali apabila ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya tidak kurang menguntungkan Indosat dibanding dengan yang akan diperoleh Indosat di dalam transaksi yang dilakukan secara wajar dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK dan Pasal 19 dari Anggaran Dasar Perusahaan, setiap transaksi dimana di dalamnya terdapat benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) harus mendapat persetujuan mayoritas dari para pemegang saham biasa yang tidak memiliki benturan kepentingan di dalam transaksi yang diusulkan, kecuali apabila benturan kepentingan tersebut telah timbul sebelum Indosat mencatatkan sahamnya dan benturan kepentingan tersebut telah diungkapkan di dalam dokumen-dokumen penawaran saham. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, benturan kepentingan berarti perbedaan kepentingan ekonomis Indosat di satu pihak, dan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham mayoritas (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang dikeluarkan) Indosat dalam satu transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Perusahaan. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK, benturan kepentingan juga terjadi apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali Indosat terlibat di dalam suatu transaksi dimana kepentingan pribadi mereka dapat berbenturan dengan kepentingan Indosat, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan Bapepam-LK.

Mengingat banyaknya perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau Qtel Asia atau salah satu dari afiliasi mereka yang berada di Indonesia, kami memperkirakan bahwa seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan, Perusahaan ingin mengadakan usaha patungan atau pengaturan atau transaksi lainnya dengan suatu perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Dalam keadaan tersebut, Perusahaan dapat berkonsultasi dengan Bapepam-LK mengenai apakah rencana usaha patungan, pengaturan atau transaksi akan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan menurut ketentuan-ketentuan peraturan Bapepam-LK. Apabila Bapepam-LK memandang bahwa berdasarkan peraturannya rencana usaha patungan, pengaturan atau transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan, maka kami dapat melaksanakan rencana tersebut tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan. Akan tetapi, apabila Bapepam-LK berpendapat bahwa berdasarkan peraturannya rencana tersebut memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan, maka kami akan berupaya memperoleh persetujuan pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak melanjutkan rencana tersebut.

Kontrak-Kontrak Material

Pada tanggal 18 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama interkoneksi dengan Telkom untuk menggunakan jaringan interkoneksi antara jaringan selular kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkom setuju untuk membuka prefiks dan kode akses milik pihak lainnya yang dapat memungkinkan pelanggan dari masing-masing pihak untuk melakukan berbagai macam panggilan antara jaringan telekomunikasi tetap kami dan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi terkait dengan penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (*cost-based*) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Kami mengamandemen perjanjian pada tanggal 31 Maret 2008, untuk mematuhi surat BRTI No. 009/DJPT3/KOMINFO/II/2008 tetang pelaksanaan pengaturan interkoneksi tahun 2008 dan pada tanggal 30 Desember 2009.

Pada tanggal 18 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian interkoneksi dengan Telkom untuk membuat jaringan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkom setuju untuk membuka prefiks dan kode akses milik pihak lainnya yang dapat memungkinkan pelanggan dari masing-masing pihak untuk melakukan sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh dan sambungan internasional antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi terkait dengan penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (*cost-based*) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang

atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Pada tanggal 31 Maret 2008, perjanjian tersebut diubah untuk mematuhi surat BRTI No. 009/DJPT3/ KOMINFO/II/2008 tetang pelaksanaan pengaturan interkoneksi tahun 2008.

Untuk informasi lebih lanjut atas perjanjian ini, lihat "Butir 5: Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek – Hutang."

Pada tanggal 25 Nopember 2009, kami menandatangani dua perjanjian perwaliamanatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai waliamanat, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Ketujuh dan Sukuk Ijarah Indosat Keempat. Obligasi Indosat Ketujuh diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2009 dan memiliki total nilai nominal sebesar Rp 1.3 miliar. Sedangkan, Sukuk Ijarah Indosat Keempat diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2009 dan memiliki total nilai nominal sebesar Rp 200 miliar.

Pada tanggal 17 September 2008 dan 8 Juni 2009, kami menandatangani *credit facility agreement* tanpa jaminan dengan jangka waktu tiga tahun dan *credit facility agreement* tanpa jaminan dengan jangka waktu lima tahun dengan BCA, masing-masing bernilai Rp500.000 dan Rp1.000.000.

Pada tanggal 28 Juli 2009, kami menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bernilai Rp1.000.000 dan pada tanggal 18 Agustus 2009, kami telah memperoleh *export credit facility* dari EKN sejumlah US315 juta dollar.

Pada tanggal 24 Maret 2009, kami menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi untuk Obligasi Indosat II Seri B, Obligasi Indosat III Seri B, Obligasi Indosat IV, Obligasi Indosat V, dan Obligasi Indosat VI, Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah Ijarah untuk Obligasi Syariah Ijarah, serta Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah untuk Sukuk Ijarah Indosat II dan Sukuk Ijarah Indosat III, dan telah mendapatkan persetujuan untuk, antara lain mengubah definisi "Pinjaman", "Ebitda", dan "Ekuitas" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1, menjadi 2,5 banding 1 di masing-masing perjanjian perwaliamanatan untuk maisng-masing obligasi, obligasi syariah ijarah, dan sukuk ijarah.

Untuk informasi lebih lanjut atas perjanjian ini, lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan – Hutang Pokok."

Salinan, berupa ringkasan dan atau terjemahan, dari perjanjian-perjanjian yang tercantum di atas dilampirkan dalam Lampiran 4.4, 4.5, 15.26 sampai dengan 15.38.

Pengawasan Valuta Asing

Lihat "Butir 3: Informasi Penting–Valuta Asing" yang terdapat pada bagian lainnya dari laporan tahunan ini.

Perpajakan

Rangkuman di bawah ini memuat penjelasan mengenai konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan menurut peraturan perpajakan Indonesia dan federal Amerika atas pembelian, kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa. Rangkuman ini tidak dimaksudkan sebagai penjelasan yang bersifat persaingan mengenai semua pertimbangan pajak yang mungkin berkaitan dengan keputusan untuk membeli, memiliki atau melepaskan ADS atau saham biasa. PARA CALON PEMBELI HARUS BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MENGENAI KONSEKUENSI-KONSEKUENSI PAJAK INDONESIA DAN PAJAK FEDERAL, NEGARA BAGIAN DAN LOKAL AMERIKA BAGI DIRINYA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN, KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN ADS ATAU SAHAM BIASA.

Hukum Perpajakan di Indonesia

Berikut ini adalah rangkuman konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan Indonesia sehubungan dengan kepemilikan dan pelepasan saham biasa atau ADS bagi perorangan non-penduduk maupun badan nonpenduduk yang memiliki saham biasa atau ADS ("Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia"). Sebagaimana digunakan di dalam kalimat sebelumnya, "perorangan non-penduduk" adalah orang berkebangsaan asing yang secara fisik tidak tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih selama jangka waktu dua belas bulan dalam periode manapun dengan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dimana selama jangka waktu tersebut perorangan non-penduduk menerima

penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS, dan "badan non-penduduk" adalah perusahaan atau badan non-perusahaan yang didirikan, berdomisili atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu yurisdiksi selain dari Indonesia dan tidak memiliki tempat usaha yang tetap atau secara lain menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia selama tahun pajak Indonesia, dimana selama jangka waktu tersebut badan non-penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS. Dalam menentukan tempat tinggal perorangan atau badan, akan dipertimbangkan juga ketentuan-ketentuan dari perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia menjadi salah satu pihaknya.

Dividen. Dividen yang diumumkan oleh Perusahaan yang berasal dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia sehubungan dengan saham biasa atau ADS akan dikenakan pajak potongan Indonesia, yang saat ini besarnya 20,0%, atas jumlah yang dibagikan (dalam hal dividen tunai) atau bagian pemegang saham yang bersangkutan atas nilai pembagian. Pengenaan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak berganda dapat diberikan apabila pihak penerima adalah *beneficial owner* dari dividen dan menyerahkan kepada Perusahaan (dengan tembusan ke Kantor Pelayanan Pajak Indonesia dimana Perusahaan terdaftar) surat pernyataan domisili pajak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, atau yang ditunjuknya, yang menerangkan yurisdiksi dimana Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia tersebut berdomisili. Indonesia telah mengadakan perjanjian pajak berganda dengan lebih dari 50 negara, seperti Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Malaysia, Belanda, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian pajak berganda Amerika-Indonesia, pajak potongan atas dividen secara umum, apabila tidak ada hak suara sebanyak 20.0%, adalah sebesar 15.0%.

Laba/Capital Gains. Penjualan atau pemindahan hak atas saham biasa yang tercatat di bursa efek Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Pialang yang menangani transaksi harus melakukan pemotongan pajak tersebut. Kepemilikan, penjualan atau pemindahan saham pendiri yang tercatat di bursa efek Indonesia, berdasarkan peraturan pajak Indonesia saat ini, dapat dikenakan juga pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Dengan memperhatikan pemberlakuan peraturan pelaksana (yang belum dikeluarkan sampai saat ini), perkiraan laba bersih yang diterima atau timbul dari penjualan aset bergerak di Indonesia, yang meliputi saham biasa yang tidak tercatat di bursa efek Indonesia atau ADS, oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia (kecuali penjualan aset berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dari undang-undang pajak penghasilan Indonesia) dapat dikenakan pajak potongan Indonesia sebesar 20,0%. Akan tetapi, ketentuan pajak penghasilan ini belum diterapkan di dalam prakteknya. Kami perkirakan, apabila dan jika peraturan pelaksana dikeluarkan berkenaan dengan ketentuan ini, maka di dalam prakteknya pajak potongan ini (i) hanya akan dikenakan apabila saham biasa yang tidak tercatat di bursa efek Indonesia dibeli dan dibayar oleh penduduk Indonesia yang merupakan subyek pajak atau oleh badan usaha tetap di Indonesia dari badan atau perorangan non-penduduk dan (ii) tidak akan mempengaruhi hasil bersih penjualan atau pemindahan ADS melalui perdagangan reguler di NYSE oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia.

Dalam hal dimana pembeli atau pialang Indonesia diwajibkan berdasarkan undang-undang pajak Indonesia untuk memotong pajak atas pembayaran harga beli untuk saham biasa atau ADS, pembayaran tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan pajak potongan atau pajak penghasilan Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia adalah salah satu pihaknya (termasuk perjanjian pajak berganda Amerika-Indonesia). Akan tetapi, peraturan perpajakan Indonesia saat ini tidak mengatur secara tegas prosedur untuk mencabut kewajiban pembeli atau pialang Indonesia untuk memotong pajak dari hasil penjualan tersebut. Untuk memanfaatkan keringanan perjanjian pajak berganda, Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia harus berupaya memperoleh pengembalian uang/*refund* dari Kantor Pajak Indonesia dengan mengajukan permohonan khusus yang disertai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh instansi perpajakan yang berwenang, atau yang ditunjuknya, yang menerangkan yurisdiksi dimana Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia tersebut berdomisili.

Bea materai. Transaksi-transaksi saham biasa di Indonesia akan dikenakan bea materai sebesar Rp6.000 untuk transaksi-transaksi bernilai lebih dari Rp1.000.000 dan Rp3.000 untuk transaksi-transaksi bernilai antara Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. Untuk transaksi-transaksi bernilai kurang dari Rp250.000 tidak dikenakan bea materai.

Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Pemerintah Federal AS

Pembahasan berikut ini berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan Pemerintah federal Amerika Serikat bagi Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, sebagaimana yang didefinisikan di bawah ini, sehubungan dengan kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa. Penjelasan di bawah ini adalah berdasarkan *Internal Revenue Code of 1986,* sebagaimana diubah atau *Code, Treasury Regulations* yang diberlakukan berdasarkan *Code*, perjanjian pajak penghasilan antara Amerika Serikat dan Indonesia dan penafsiran judisial dan administratif daripadanya, dimana seluruhnya berlaku pada tanggal laporan keuangan ini dan seluruhnya dapat diubah, bahkan mungkin berlaku secara retroaktif. Perlakuan pajak atas pemilik ADS atau saham biasa dapat berbeda tergantung pada situasi tertentu dari pemiliknya. Beberapa pemilik (termasuk namun tidak terbatas, perusahaan asuransi, organisasi yang dikecualikan dari pajak, lembaga keuangan, pihak yang tunduk pada alternatif pajak minimum, pialang-penjual, pihak yang memiliki "mata uang fungsional/*functional currency"* selain dari Dolar AS, pihak yang menerima ADS atau saham biasa sebagai imbalan atas jasa-jasanya, pihak yang memiliki baik secara langsung atau tidak langsung 10,0% atau lebih dari saham dengan hak suara Perusahaan, dan pihak yang memiliki ADS atau saham biasa sebagai bagian dari "lindung nilai/*hedge*", "strategi pergerakan harga/*straddle*" atau "transaksi konversi/*conversion transactions"* dalam pengertian *Sections 1221, 1092 dan 1258 of the Code* dan *the Treasury Regulations)* tunduk pada peraturan khusus yang tidak dibahas di sini. Kecuali sebagaimana dibahas di bawah ini berkenaan dengan pihak yang bukan merupakan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, rangkuman berikut ini terbatas untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang akan memiliki ADS atau saham biasa sebagai "aset modal/*capital asset"* dalam pengertian *Section 1221 of the Code.* Pembahasan berikut ini tidak menyinggung dampak dari undang-undang pajak negara bagian atau lokal terhadap pemilik ADS atau saham biasa.

Sebagaimana digunakan di sini, istilah "Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat" berarti pemilik ADS atau saham biasa, untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, yang merupakan (i) warga negara atau penduduk Amerika Serikat; (ii) perusahaan (termasuk badan yang dianggap perusahaan untuk tujuan pajak penghasilan federal Amerika Serikat) yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, salah satu negara bagiannya atau *District of Columbia;* (iii) warisan yang penghasilannya tunduk pada pajak Amerika Serikat terlepas dari sumbernya; (iv) suatu pengelola dana jika Pengadilan Amerika Serikat dapat melakukan pengawasan utama terhadap administrasi pengelolaan dana dan satu atau lebih warganegara Amerika Serikat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh keputusan penting dari pengelola dana tersebut; atau (v) pemilik ADS atau saham biasa yang penghasilannya dari ADS atau saham biasa dikenakan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat berdasarkan laba bersih.

Apabila suatu bentuk kemitraan/*partnership* atau badan atau pengaturan lainnya yang dianggap sebagai kemitraan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, memiliki ADS atau saham biasa, maka perlakuan pajak atas seorang mitra/*partner* umumnya tergantung pada status mitra tersebut dan kegiatan kemitraannya. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang merupakan mitra dari suatu kemitraan yang memiliki ADS atau saham biasa disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya.

Rangkuman berikut ini tidak membahas semua aspek dari pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat yang mungkin relevan bagi pemilik ADS atau saham biasa tertentu sehubungan dengan keadaan tertentu mereka dan situasi pajak penghasilan tertentu. Calon pemilik ADS atau saham biasa harus berkonsultasi dengan konsultan pajaknya mengenai konsekuensi-konsekuensi pajak baginya, secara terperinci, sehubungan dengan pembelian, kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa, termasuk penerapan dan keberlakuan peraturan perundang-undangan pajak negara bagian, lokal, asing dan lainnya dan kemungkinan dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan pajak Amerika Serikat atau lainnya.

Pajak atas Pembagian Dividen. Dengan memperhatikan pembahasan tentang "Status Perusahaan Investasi Asing Pasif" di bawah ini, untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, besarnya pembagian laba berkenaan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa (termasuk pajak potongan yang harus dikenakan atas pembagian laba tersebut) akan dianggap sebagai dividen kena pajak seperti penghasilan biasa pada tanggal

penerimaannya masing-masing oleh Depositary atau pemiliknya, sebatas besarnya penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi sebagaimana ditentukan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat. Pembagian laba, jika ada, yang melebihi penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi pertama-tama akan dianggap sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak sebatas besarnya penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi tersebut, dan kemudian dianggap sebagai *capital gain* yang direalisasikan pada saat pelepasan ADS atau saham biasa. Bagian dari setiap pembagian laba yang dianggap sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak ini akan mengurangi dasar penyesuaian pajak dari pemilik yang bersangkutan atas ADS atau saham biasa yang dimilikinya. *Capital gain* bersifat jangka panjang apabila ADS atau saham biasa telah dimiliki lebih dari satu tahun. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat tidak berhak atas faktor pengurang pajak sejumlah dividen yang diterima/*dividends received deduction,* yang seharusnya diperbolehkan berdasarkan *Code* untuk pembagian laba kepada perusahaan domestik, sehubungan dengan pembagian laba dari ADS atau saham biasa.

Untuk tahun kena pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2011, "penghasilan dividen yang memenuhi syarat/*qualified dividend income"* yang diterima oleh perorangan akan dikenakan pajak penghasilan federal yang besarnya lebih rendah dari yang dikenakan atas penghasilan biasa lainnya. Berdasarkan kegiatan usaha dan aset lancar Perusahaan saat ini dan perkiraan masa depan, kami berpendapat bahwa kami adalah "perusahaan asing yang memenuhi syarat" dan bahwa dividen Perusahaan yang dibayarkan kepada Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat perorangan dapat dianggap sebagai "penghasilan dividen yang memenuhi syarat", dengan ketentuan bahwa persyaratan mengenai jangka waktu kepemilikan yang berlaku atas ADS atau saham biasa dan ketentuan yang berlaku lainnya telah dipenuhi oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika yang bersangkutan. Dividen yang dibayar oleh perusahaan asing yang digolongkan sebagai perusahaan Investasi asing pasif/*passive foreign investment company* atau PFIC bukan merupakan "penghasilan dividen yang memenuhi syarat." Lihat "—Status Perusahaan investasi Asing Pasif" di bawah ini.

Apabila pembagian dividen dibayar dalam mata uang lain selain dari dolar AS, maka besarnya pembagian laba tersebut akan dikonversikan ke mata uang dolar AS dengan menggunakan nilai tukar *spot* pada tanggal diterimanya pembagian laba tersebut (untuk para pemilik ADS, pada tanggal dividen tersebut diterima oleh *Depositary*), terlepas apakah pembagian dividen tersebut benar-benar dikonversikan ke mata uang dolar AS pada tanggal itu. Setiap keuntungan atau kerugian berkenaan dengan mata uang non-Amerika Serikat yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing setelah tanggal itu akan dianggap sebagai laba atau rugi biasa.

Pajak atas Kenaikan Modal dan Kerugian/Capital Gains and Losses. Dengan memperhatikan pembahasan tentang "Status Perusahaan Investasi Asing Pasif" di bawah ini, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat umumnya mengetahui adanya rugi atau laba kena pajak atas penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa yang besarnya sama dengan selisih antara jumlah yang diperoleh dari penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya tersebut dengan dasar penyesuaian pajak dari pemilik yang bersangkutan atas ADS atau saham biasa miliknya. Hal ini akan mengakibatkan *capital gain* atau *loss* jangka panjang atau jangka pendek, tergantung pada apakah ADS atau saham biasa tersebut telah dimiliki lebih dari satu tahun. Untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat non-perusahaan, pajak penghasilan Amerika Serikat yang dikenakan atas *capital gain* bersih jangka panjang yang diakui untuk satu tahun atas penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa, pada saat ini besarnya tidak akan melebihi 15,0% untuk tahun kena pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2011. Penempatan dan penarikan saham biasa sebagai ganti ADS yang dilakukan oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat tidak akan mengakibatkan realisasi laba atau rugi untuk tujuan pajak penghasilan federal Amerika Serikat.

Status Perusahaan Investasi Asing Pasif. Aturan khusus pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat berlaku bagi Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki penyertaan di PFIC. Umumnya, perusahaan asing dianggap sebagai PFIC pada tahun kena pajak berjalan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat apabila 75,0% atau lebih dari penghasilan kotornya untuk tahun kena pajaknya terdiri dari penghasilan pasif (biasanya, bunga, dividen, uang sewa, royalti dan keuntungan bersih dari pelepasan asset yang menghasilkan penghasilan tersebut) atau 50,0% atau lebih dari aset rata-ratanya selama tahun kena pajak terdiri dari aset pasif yang menghasilkan, atau yang dimiliki sebagai hasil dari penghasilan pasif.

Berdasarkan kegiatan bisnis dan aset lancar Perusahaan saat ini dan proyeksi masa depan, kami berpendapat bahwa kami bukan PFIC dan kami memperkirakan bahwa kami tidak akan menjadi PFIC di kemudian hari. Akan tetapi, apabila Perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan yang diperkirakan pada saat ini, kami mungkin akan dianggap sebagai PFIC untuk tahun yang berjalan dan yang akan datang, tergantung pada kegiatan Perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, oleh karena status PFIC tergantung pada komposisi penghasilan dan aset perusahaan dan harga pasar dari asetnya dari waktu ke waktu, maka tidak ada jaminan bahwa kami tidak akan dianggap sebagai PFIC untuk setiap tahun kena pajak.

Apabila kami adalah PFIC dalam tahun kena pajak berjalan dimana pemilik berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki ADS atau saham biasa, pemilik tersebut akan dikenakan kebijakan pajak khusus terhadap penerimaan atas "pembagian berlebih" dan keuntungan yang direalisasikan dari penjualan atau disposisi lain termasuk gadai, atas ADS atau saham biasa. Pembagian yang diterima di dalam tahun kena pajak berjalan yang lebih besar dari 125% dari rata-rata pembagian tahunan yang diterima selama waktu yang lebih singkat antara tiga tahun pajak sebelumnya atau selama ADS atau saham biasa dimiliki, akan diperlakukan sebagai pembagian berlebih. Kebijakan pajak khusus ini mengatur: (a) kelebihan pembagian atau keuntungan akan dikenakan secara proporsional selama periode kepemilikan; (b) jumlah yang dialokasikan perpajakan yang berlaku untuk tahun berjalan dan perpajakan untuk tahun sebelum tahun pertama dimana kami adalah PFIC, akan diperlakukan sebagai pendapatan biasa dan; (c) jumlah yang dialokasikan pada setiap dua tahun sekali akan dikenakan pajak tambahan yang harus dibayar pada tahun pajak berjalan dan dimana besarnya sama dengan total pada tahun-tahun tersebut; (i) jumlah yang dialokasikan untuk tahun tersebut dikalikan dengan tarif pajak tertinggi pada tahun tersebut; (ii) jumlahnya sebesar beban bunga yang ditagih yang akan dikenakan untuk tahun tersebut.

Pemilihan diberikan untuk menghindari konsekuensi pajak negatif dalam kondisi tertentu dimana pemilik memilih untuk melakukan perbandingan dengan harga pasar atas ADS atau saham biasa yang dimilikinya. Selanjutnya, walaupun pemegang PFIC diperkenankan untuk menggunakan peraturan-peraturan di atas dengan cara memilih untuk memperlakukan PFIC sebagai "pemilikan dana yang wajar" sesuai bagian 1295 dalam peraturan ini, opsi ini tidak berlaku untuk pemilik berkebangsaan Amerika Serikat karena kami tidak bermaksud untuk memenuhi persyaratan untuk memperbolehkan pemilik berkebangsaan Amerika Serikat untuk memilihnya.

Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya tentang konsekuensi-konsekuensi pajak penghasilan federal Amerika Serikat sehubungan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa dan atas penentuan pilihan *mark-to-market.* Apabila kami dipertimbangkan sebagai PFIC untuk pajak tahun berjalan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki ADS atau saham biasa selama tahun dimana Perusahaan dianggap sebagai PFIC diwajibkan untuk menyampaikan Form 8621 ke *Internal Revenue Service* atau IRS.

Pertimbangan Pajak Asing yang Terutang. Untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, Pemilik Berkebangsaan Amerika akan dianggap telah menerima jumlah pajak Indonesia yang telah dipotong dari pembayaran dividen dan telah menyetor pajak tersebut ke Indonesia. Sebagai akibat pemberlakuan peraturan ini, besarnya dividen yang dimasukkan ke dalam laba kotor Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat menjadi lebih besar dari jumlah uang tunai yang sesungguhnya diterima (atau dapat diterima) oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat.

Dengan memperhatikan batasan-batasan dan syarat-syarat yang dimaksud di dalam *Code*, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat dapat memilih untuk mengajukan klaim kredit terhadap kewajiban pajak penghasilan federal Amerika untuk pajak Indonesia yang telah dipotong dari dividen atau pajak Indonesia yang dikenakan atas *capital gain*, jika ada, atau, apabila Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memilih untuk tidak mengkreditkan pajak asing untuk tahun kena pajak, mereka dapat melakukan pengurangan pajak tersebut. Untuk tujuan batasan kredit pajak asing, dividen dan *capital gain,* tergantung pada keadaan-keadaan tertentu dari Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, umumnya akan dianggap sebagai penghasilan "pasif" atau "umum". Selanjutnya, dividen umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan asing, dan keuntungan valuta asing dan *capital gain* umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan Amerika Serikat. *Capital loss* umumnya akan dialokasikan terhadap sumber penghasilan Amerika Serikat. Oleh karena *capital gain* umumnya akan dianggap sebagai sumber

penghasilan Amerika Serikat, karena batasan kredit pajak asing Amerika Serikat, maka setiap pajak Indonesia atau pajak asing lainnya sehubungan dengan ADS atau saham biasa saat ini tidak dapat dikreditkan, kecuali apabila Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memiliki sumber penghasilan asing lainnya untuk tahun tersebut yang dapat masuk ke dalam keranjang batasan kredit pajak asing, atau tersedia pilihan untuk menganggap keuntungan tersebut sebagai sumber penghasilan asing. Para investor disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya mengenai tersedianya kredit pajak asing berdasarkan keadaan-keadaan mereka.

Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat. Kecuali kemungkinan adanya pengenaan cadangan pajak penghasilan Amerika Serikat (lihat "–Cadangan Pajak Penghasilan Amerika Serikat dan Pelaporan Informasi"), pembayaran setiap dividen atas ADS atau saham biasa kepada pemilik yang bukan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat ("Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat") tidak akan dikenakan pajak penghasilan federal Amerika Serikat dan setiap keuntungan dari penjualan, penarikan atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa, dengan ketentuan:

a. Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat tidak akan atau tidak sedang menjalankan perdagangan atau bisnis di negara Amerika Serikat;

b. tidak ada hubungan baik saat ini atau sebelumnya antara Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat dan negara Amerika Serikat, termasuk tanpa pembatasan seperti status Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat sebagai bekas warga negara atau penduduk Amerika Serikat; dan

c. dalam hal keuntungan dari penjualan, penarikan atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa oleh perorangan, Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat yang tidak berada di Amerika Serikat selama 183 hari atau lebih dalam tahun kena pajak atas penjualan atau terpenuhinya syarat-syarat lainnya.

Apabila dividen, keuntungan atau penghasilan sehubungan dengan ADS atau saham biasa yang dimiliki oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat secara efektif berhubungan dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis (atau akibat adanya badan usaha tetap di Amerika Serikat, apabila pemilik merupakan penduduk dari suatu negara yang memiliki perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat), Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat dapat dikenakan pajak penghasilan Amerika Serikat atas dividen, keuntungan atau penghasilan tersebut sesuai dengan persentase pajak yang ditetapkan untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, setelah dikurangi dengan faktor pengurang pajak sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan/*deductible expenses* terhubung secara efektif dengan penghasilan. Sebagai tambahan, apabila Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat adalah perusahaan asing, pemilik yang bersangkutan dapat dikenakan pajak keuntungan atas kantor cabang sebesar 30.0% dari penghasilan dan keuntungan yang berhubungan secara efektif untuk tahun pajak tersebut, sebagaimana disesuaikan untuk beberapa hal, kecuali apabila terdapat tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak penghasilan Amerika Serikat dengan negara tempat tinggal Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat. Untuk tujuan ini, dividen, keuntungan atau penghasilan sehubungan dengan ADS atau saham biasa akan dimasukkan ke dalam penghasilan dan keuntungan yang kena pajak keuntungan atas kantor cabang apabila dividen, keuntungan atau penghasilan tersebut berhubungan secara efektif dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat di Negara Amerika Serikat.

Cadangan Pajak Penghasilan Amerika Serikat dan Pelaporan. Pembayaran yang dilakukan oleh agen pembayaran Amerika Serikat atau pialang perantara Amerika Serikat sehubungan dengan ADS atau saham biasa dapat dikenakan kewajiban membuat pelaporan kepada IRS dan cadangan terhadap pajak penghasilan. Cadangan pajak penghasilan tidak akan dikenakan apabila (i) pemilik yang memberikan nomor identifikasi subyek pajak yang benar dan membuat surat pernyataan lainnya yang ditentukan atau (ii) pada pemilik lainnya yang dikecualikan dari cadangan pajak penghasilan.

Setiap jumlah uang yang dipotong berdasarkan peraturan cadangan pajak penghasilan atas pembayaran kepada pemilik dapat diperoleh kembali dalam bentuk pengembalian uang atau kredit terhadap pajak penghasilan federal Amerika Serikat dari pemilik yang bersangkutan, dengan ketentuan pemilik tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan yang berlaku.

Penyajian dokumen-dokumen

Bahan materi apapun yang diajukan sebagai dokumen pendukung untuk laporan tahunan dalam *Form 20-F* oleh the U.S. Securities and Exchange Commission dapat dilakukan inspeksi di kantor kami. Lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan – Kantor Utama".

Butir 11: PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF RISIKO PASAR

Pengungkapan dari Segi Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar

Kami memiliki risiko terhadap pasar terutama yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar valuta asing dan risiko nilai ekuitas atas nilai investasi jangka panjang Perusahaan. Untuk mengatur risiko nilai tukar valuta asing dan nilai tingkat suku bunga, kami telah menandatangani kontrak *interest rate swap,* kontrak *cross currency swap* dan kontrak *currency forward* atau transaksi lainnya yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau mengatur dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga pada pelaksanaan kegiatan bisnis dan arus kas kami. Kami mengadakan transaksi-transaksi tersebut untuk memperkecil risiko tanpa terlibat pada praktek-praktek spekulatif. Kami mencatat hal-hal tersebut sebagai bukan transaksi lindung nilai (*hedge*), dimana perubahan dalam nilai wajar akan ditagih atau dikreditkan secara langsung sebagai beban atau pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Kami mengkonversi kelebihan dana dalam mata uang Rupiah menjadi Dolar AS secara berkala yang jumlahnya disesuaikan dengan pengeluaran kami dalam mata uang Dolar AS.

Sensitifitas terhadap Tingkat Suku Bunga

Per tanggal 31 Desember 2009, sebagian besar hutang Perusahaan yang belum dibayarkan dikenakan suku bunga tetap. Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai instrumen keuangan kami yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Untuk hutang jangka panjang dan obligasi yang harus dibayar, tabel ini menyajikan arus kas pokok dan tingkat suku bunga yang terkait dengan perkiraan tanggal jatuh tempo. Informasi yang disajikan di dalam tabel tersebut telah dibuat berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini: (i) variabel tingkat suku bunga deposito dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah adalah berdasarkan tingkat suku bunga pada tahun 2009; (ii) tingkat suku bunga deposito jangka panjang dalam mata uang Rupiah adalah berdasarkan sertifikat Bank Indonesia untuk tiga bulan, sertifikat Bank Indonesia untuk satu bulan dan JIBOR tiga bulan pada bulan Desember 2009 ditambah marjin; (iii) tingkat suku bunga hutang jangka panjang dalam mata uang Dolar AS adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dari berbagai perjanjian. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada Anda bahwa asumsi-asumsi tersebut adalah benar untuk periode di masa mendatang. Asumsi- asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kenaikan tingkat suku bunga di Indonesia akibat terus berlangsungnya keadaan ekonomi yang tidak likuid dan faktor-faktor moneter dan makro eknomi lainnya yang mempengaruhi Indonesia.

		Jumlah terhutang pada tanggal 31 Desember 2009		Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember						
	Suku bunga	Mata uang asing	Jumlah Rupiah yang setara	2010	2011	2012	2013	2014	2015 dan setelahnya	Jumlah
		(dalam jutaan US$)	(dalam miliar Rp)	(dalam miliar Rp)						
Aset										
Suku bunga variable										
Deposito berjangka dan deposits on call										
Rp	2,50% - 14,50%	-	2.395,4	2.395,4	-	-	-	-	-	2.395,4
US$	0,001% - 6,00%	23,0	216,1	216,1	-	-	-	-	-	216,1
Total aset		23,0	2.611,5	2.611,5	-	-	-	-	-	2.611,5
Kewajiban										
Hutang jangka panjang										

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

		Jumlah terhutang pada tanggal 31 Desember 2009		Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember						
	Suku bunga	Mata uang asing	Jumlah Rupiah yang setara	2010	2011	2012	2013	2014	2015 dan setelahnya	Jumlah
		(dalam jutaan US$)	(dalam miliar Rp)	(dalam miliar Rp)						
Suku bunga tetap										
Rp			434,3	-	-	-	434,3	-	-	434,3
Pokok			-	38,0	38,0	38,0	19,0	-	-	133,0
Bunga	Suku bunga tetap 8,75% per tahun									
US$										
Pokok		217,8	2.047,3	271,3	235,6	199,8	297,8	199,8	843,0	2.047,3
Bunga	Suku bunga tetap, berkisar dari 4,15% per tahun dan 5,69% per tahun		-	100,7	87,1	75,7	65,1	54,4	121,0	504,0
Suku bunga variabel										
Rp										
Pokok			6.198,7	993,8	1.029,9	2.625,0	550,0	1.000,0	-	6.198,7
Bunga	Suku bunga mengambang JIBOR 3 bulanan ditambah 1,5% - 4,0%		-	578,9	526,3	348,3	153,5	63,9	-	1.706,9
US$										
Pokok		612,7	5.759,8	201,2	2.273,9	890,8	1.694,5	214,0	485,4	5.759,8
Bunga	Suku bunga mengambang LIBOR 6 bulanan ditambah 0,35% - 2,87%		-	164,5	175,4	140,2	89,5	40,6	52,8	663,0
Hutang obligasi										
Suku bunga tetap										
Rp										
Pokok			8.090,0	640,0	1.100,0	-	1.330,0	2.358,0	2.662,0	8.090,0
Bunga	Berkisar dari 10,2% per tahun – 16,0% per tahun.		-	902,1	753,7	687,7	619,5	468,2	1,139,3	4,570,5
US$										
Pokok		344,2	3.235,1	2.206,6	-	1.028,5	-	-	-	3.235,1
Bunga	7,75% dan 7,125%		-	244,3	73,3	36,6	-	-	-	354,2
Suku bunga variabel										
Rp										
Pokok			42,0	-	-	42,0	-	-	-	42,0
Bunga	Maksimum sebesar 19% per tahun and Minimum sebesar 12,75% per tahun		-	5,4	5,4	2,6	-	-	-	13,4
Jumlah kewajiban		1.174,7	25.807,2	6.346,8	6.298,6	6.151,2	5.253,2	4.398,9	5.303,5	33.752,2
Arus kas bersih		(1.151,7)	(23.195,7)	(3.753,3)	(6.298,6)	(6.151,2)	(5.253,2)	(4.398,9)	(5.303,5)	(31.140,7)

Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2009, kami memiliki beberapa deposito dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS, yang juga memiliki risiko terhadap fluktuasi tingkat suku bunga.

Sensitifitas terhadap Nilai Tukar Valuta Asing

Kami memiliki risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing terutama akibat adanya kewajiban hutang jangka panjang, obligasi yang harus dibayar dan piutang dan hutang dalam mata uang Dolar AS.

Kewajiban utama kami yang harus dibayar adalah kewajiban pembayaran bersih dalam valuta asing kepada para operator telekomunikasi asing. Sementara di lain pihak, sebagian besar piutang kami adalah dalam mata uang Rupiah dari para operator domestik. Selama periode sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2009, nilai

tukar Rupiah/ Dolar AS berkisar dari yang terendah yaitu Rp12.400 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp8.672 per Dolar AS, dan selama tahun 2009, berkisar dari yang terendah yaitu Rp12. 065per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp9. 293 Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2009, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku adalah sebesar Rp. 9.400 per Dolar AS. Dengan demikian, kami mencatat kerugian nilai tukar bersih sebesar Rp.885,7 miliar pada tahun 2008, dan Rp,656,4 miliar pada tahun 2009.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi-informasi mengenai instrumen keuangan kami dalam mata uang yang terkait dan menyajikan informasi tersebut dalam mata uang Rupiah yang setara nilainya, yang dalam hal ini merupakan mata uang yang digunakan dalam dokumen pelaporan kami. Tabel ini merangkum informasi mengenai instrumen dan transaksi yang sensitif terhadap nilai tukar valuta asing, termasuk deposito, hutang dan piutang, dan instrumen keuangan Perusahaan seperti deposito, piutang dan hutang, dan hutang jangka panjangnya. Tabel ini menyajikan arus kas pokok pada perkiraan tanggal jatuh tempo.

Informasi yang disajikan di dalam tabel ini telah ditentukan berdasarkan asumsi-asumsi bahwa nilai tukar untuk Dolar AS adalah berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 9.400 = US$1,00. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa asumsi-asumsi tersebut akan benar untuk masa mendatang. Asumsi-asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti depresiasi nilai Rupiah pada periode mendatang.

	Perkiraan tanggal jatuh tempo per tanggal 31 Desember							
	Mata Uang Asing	2010	2011	2012	2013	2014	2015 dan Setelahnya	Jumlah
	(dalam jutaan)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	(Rp. Dalam miliar)							
Aktiva:								
Kas dan setara kas[1]								
Dalam US$	37.1,2	348.9	—	—	—	—	—	348.9
Piutang								
Dalam US$	177.8,5	1,671.5	—	—	—	—	—	1,671.5
Aktiva Derifativ								
Dalam US$	23.9,0	224.7	—	—	—	—	—	224.7
Aktiva Lancar Lainnya								
Dalam US$	1.7	15.9	—	—	—	—	—	15.9
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa								
Dalam US$	0.1	0.7	—	—	—	—	—	0.7
Aktiva tidak lancar lainnya								
Dalam US$	1.4	0.1	0.3	1.0	—	—	11.7	13.1
Total Aktiva	**242.0**	**2,261.7**	**0.3**	**1.0**	**—**	**—**	**11.7**	**2,274.7**
Kewajiban:								
Hutang Dagang								
Dalam US$	4.9	46.3	—	—	—	—	—	46.3
Hutang Pengadaan								
Dalam US$	310.2	2,915.4	—	—	—	—	—	2,915.4
Biaya Masih Harus Dibayar								
Dalam US$	38.5	362.2	—	—	—	—	—	362.2
Uang muka dari pelanggan								
Dalam US$	0.8	7.9	—	—	—	—	—	7.9
Kewajiban Derifativ								
Dalam US$	21.3	200.2	—	—	—	—	—	200.2
Kewajiban Lancar Lainnya								46.3
Dalam US$	0.0	0.4	—	—	—	—	—	0.4

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

	Perkiraan tanggal jatuh tempo per tanggal 31 Desember							
	Mata Uang Asing	2010	2011	2012	2013	2014	2015 dan Setelahnya	Jumlah
	(dalam jutaan)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	(Rp. Dalam miliar)							
Hutang Pinjaman								
Dalam US$	831.2	446.5	2,509.5	1,090.6	1,998.1	413.8	1,354.4	7,812.9
Hutang Obligasi								
Dalam US$	344.2	2,206.6	-	1,028.5		—	—	3,235.1
Kewajiban tidak lancar lainnya								
Dalam US$	8.4	-	—	—	—	—	78.6	78.6
Jumlah Kewajiban	**1,559.5**	**6,185.5**	**2,509.2**	**2,119.1**	**1,998.1**	**413.8**	**1,433.0**	**14,659.0**
Arus Kas Bersih	**(1,317.5)**	**(3,923.8)**	**(2,509.2)**	**(2,118.1)**	**(1,998.1)**	**(413.8)**	**(1,421.3)**	**(12,384.3)**

Risiko Harga Ekuitas

Investasi jangka panjang kami terutama terdiri dari investasi kecil dalam bentuk saham di perusahaan-perusahaan swasta Indonesia dan di perusahaan-perusahaan asing. Sehubungan dengan investasi kami di perusahaan-perusahaan Indonesia, kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat terkena dampak buruk akibat kondisi ekonomi di Indonesia.

Kontrak Swap Valuta Asing

Per 31 Desember 2009, kami mempertahankan kontrak swap valuta asing yang dibuat antara tahun 2005 sampai dengan 2008. Sejak 2008 sampai dengan 2009, Perusahaan telah menyelesaikan seluruh sisa kontrak *structured forward* dengan empat lembaga keuangan internasional yang berbeda. Per tanggal 31 Desember 2009, kami mendapatkan fasilitas lindung nilai *(hedging facilities)* sebesar US$509,0 juta yang mewakili 43,3% dari obligasi dan pinjaman kami dalam mata uang dolar AS per 31 Desember 2009 sejalan dengan target kami untuk membatasi selisih nilai tukar mata uang asing sebesar 50%

Per 31 Desember 2009, kami memiliki kontrak-kontrak valuta asing dimana berdasarkan kontrak-kontrak tersebut Perusahaan menyetujui untuk membayar mata uang Rupiah dan sebagai gantinya pihak lainnya wajib membayar mata uang Dolar AS berdasarkan nilai tukar spot yang disepakati. Namun, dalam keadaan nilai Rupiah menguat terhadap US dollar, kami akan mengakui kerugian atas transaksi tersebut yang mana akan memiliki efek merugikan yang material pada keadaan keuangan kami.

Kontrak Swap Tingkat Suku Bunga

Pada tahun 2008, kami mengadakan sepuluh kontrak swap tingkat suku bunga dengan lima lembaga keuangan internasional dengan nilai keseluruhan sebesar US$362,2 juta dimana kami menyetujui untuk membayar bunga tetap sebagai ganti pembayaran tingkat suku bunga mengambang yang terkait dengan LIBOR untuk enam bulan dalam mata uang dolar AS ditambah salah satu antara 0,35%, 1,45% atau 1,85% per tahun, agar dapat melakukan lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga pada perjanjian pembiayaan satelit komersial HSBC dan HSBC *Sinosure* dan Pinjaman Sindikasi ING/DBS Perusahaan.

Pada tahun 2009, kami mengadakan kontrak swap tingkat suku bunga dengan berbagai pihak yang berbeda dengan jumlah total sebesar US$121 miliar.

Butir 12: **PENJELASAN TENTANG EFEK SELAIN DARI EFEK EKUITAS**

Biaya dan beban yang mungkin harus dibayar oleh para pemegang American Depositary Shares (ADS) kami

The Bank of New York Mellon, depository dari program ADS kami, mengenakan biaya berikut kepada setiap pihak yang menyimpan atau menarik saham biasa atau setiap pihak yang menyerahkan ADR atau kepada siapa ADR akan diterbitkan, sebagaimana berlaku, berdasarkan *deposit agreement* dengan *depositary*: (1) pajak dan biaya

pemerintah lainnya, (2) biaya pendaftaran sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu untuk mendaftarkan peralihan saham, (3) kabel, telex dan pengiriman faksimili cepat sebagaimana dinyatakan dalam *deposit agreement* menjadi beban orang yang menyimpan saham atau pemilik, (4) biaya-biaya yang dikeluarkan oleh depositary dalam melakukan konversi mata uang asing berdasarkan *deposit agreement*, (5) biaya dalam jumlah tidak lebih dari $5.00 per 100 ADS (atau bagian dari itu) untuk pelaksanaan dan pengiriman ADS dan penyerahan ADS dan, (6) biaya untuk pembagian hasil penjualan efek atau hak berdasarkan *deposit agreement* dalam jumlah senilai dengan biaya untuk menerbitkan ADS sebagaimana dimaksud di atas yang akan dibiayakan sebagai akibat dari penyimpanan oleh pemilik pada saat saham diterima sebagai pelaksanaan *rights* yang dibagikan kepada mereka berdasarkan *deposit agreement*, dan juga efek atau rights yang dijual oleh depositary dan hasil bersih yang dibagikan. Berdasarkan *deposit agreement*, *depositary* mengumpulkan biaya tersebut dengan mengurangi biaya-biaya dari jumlah yang dibagikan atau dengan menjual bagian dari harta yang dibagi untuk membayar biaya.

Biaya Yang Harus Dibayar Depository kepada Kami

Depositary telah setuju untuk mengganti biaya-biaya tertentu sehubungan dengan program dan yang kami keluarkan berdasarkan program. *Depositary* akan mengganti Perusahaan, atau membayar jumlah untuk dan atas nama kami kepada pihak ketiga, atau mengesampingkan biaya dan pengeluaran, dalam jumlah kotor sebesar US$178.149.94 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Tabel di bawah ini menunjukkan tipe biaya yang telah disetujui oleh *depositary* untuk diganti, dan invoice berkaitan dengan 31 December 2009 yang akan diganti

Jenis Biaya	Jumlah
Biaya Pencetakan	$8.908,09
Biaya Pencatatan New York Stock Exchange	$45.746,90
Biaya terkait dengan program ADS	$5.749,24
Total	$60.404,23

Depositary juga setuju untuk mengesampingkan biaya-biaya standar yang berhubungan dengan biaya program ADS dan telah membayar biaya tertentu secara langsung kepada pihak ketiga untuk dan atas nama Perusahaan. Tabel berikut ini menunjukkan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikesampingkan atau dibayar langsung kepada pihak ketiga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009:

Jenis Biaya	Jumlah
Biaya dan Pengeluaran Pengiriman, pencetakan dan jasa	$10.751,46
Biaya yang berkaitan dengan pertemuan	$4.994,25
Biaya yang berkaitan dengan administrasi program ADS	$102.000,00
Total	$117.205,71

Depositary telah setuju untuk mengganti Perusahaan untuk seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pendirian dan pemeliharaan dari program ADS. Depositary setuju untuk mengganti Perusahaan untuk setiap kelanjutan biaya pencatatan tahunan. Depositary juga setuju untuk membayar standar biaya pemeliharaan standar terkait dengan out-of-pocket untuk ADS, yang terdiri dari pengeluaran untuk amplop untuk mengirim laporan keuangan tahunan dan interim, mencetak dan membagikan cek dividen, registrasi eelektronik untuk informasi pajak, form pajak, alat-alat kantor, faksimili, dan telepon. Depositary juga menyetujui untuk mengganti kami secara tahunan untuk setiap program tertentu yang berhubungan dengan karywan atau aktivitas promosi dengan investor khusus. Di beberapa tahap tertentu, depositary setuju untuk memberikan tambahan pembayaran kepada kami berdasarkan indicator pelaksanaan yang berlaku terkait dengan fasilitas ADS. Terdapat pembatasan untuk jumlah biaya dimana depositary akan mengganti kami, namun jumlah pengembalian yang tersedia kepada kami tidak selalu sama dengan jumlah yang diterima oleh Depostary dari investor.

Bagian 2

Butir 13: CIDERA JANJI YANG BELUM DIBAYAR DAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Menyusul terjadinya krisis keuangan Asia dan devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS pada akhir tahun 1997, Satelindo dinyatakan cidera janji akibat tidak memenuhi kewajiban hutangnya pada 1998. Satelindo melakukan restrukturisasi kewajiban hutangnya pada tahun 2000. Sebelum dilakukannya restrukturisasi hutang, Satelindo mempunyai hutang pokok keseluruhan sebesar US$530,5 juta, dimana US$519,1 juta dari hutang tersebut telah direstrukturisasi. Per tanggal 31 Desember 2009, baik kami ataupun anak perusahaan kami tidak memiliki cidera janji yang bersifat material sehubungan dengan kewajiban yang masih terhutang.

Butir 14: PERUBAHAN MATERIAL TERHADAP HAK PEMEGANG EFEK DAN PENGGUNAAN HASIL

Tidak ada.

Butir 15: PENGAWASAN DAN PROSEDUR

Pengawasan dan Prosedur Pengungkapan Informasi

Per tanggal 31 Desember 2009, atau Tanggal Evaluasi, manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, telah melakukan evaluasi terhadap efektifitas pengawasan dan prosedur pengungkapan informasi, sebagaimana didefinisikan di dalam *Rules 13(a)-15(e)* dan *15(d)-15(e)* dari *Exchange Act.* Berdasarkan evaluasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada Tanggal Evaluasi, pengawasan dan prosedur pengungkapan informasi Perusahaan telah dilakukan secara memadai untuk memberikan kepastian yang sewajarnya bahwa informasi yang harus diungkapkan oleh Perusahaan di dalam laporan yang kami ajukan atau serahkan menurut ketentuan *Exchange Act* telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam aturan dan sesuai dengan format yang berlaku, dan bahwa informasi tersebut telah dikumpulkan dan diberitahukan kepada manajemen, termasuk kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sebagaimana layaknya, untuk memberikan waktu yang cukup untuk memberikan persetujuan atas pengungkapan tersebut.

Laporan Tahunan Manajemen tentang Pengendalian internal Atas Pelaporan Keuangan

Sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal *404* dari *Sarbanes-Oxley Act of 2002,* manajemen kami bertanggung jawab atas pembentukan dan pengadaan pengendalian internal yang memadai atas pelaporan keuangan, sebagaimana didefinisikan di dalam *Rule 13a-15(f)* dari *Exchange Act.* Sistem pengendalian internal Perusahaan atas pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan kepastian yang sewajarnya kepada manajemen dan Komite Audit mengenai keandalan pelaporan keuangan Perusahaan dan penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di negara Amerika Serikat. Direksi Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Kerangka Pengendalian internal Terpadu/*Internal Control – Integrated Framework,* yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* atau COSO. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan meliputi kebijakan dan prosedur (1) mengenai pengadaan catatan yang memperlihatkan transaksi-transaksi dan pengaturan-pengaturan aset perusahaan secara terperinci, tepat dan wajar sebagaimana layaknya; (2) yang memberikan kepastian yang sewajarnya bahwa transaksi-transaksi telah dicatat sebagaimana diperlukan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan agar penerimaan dan pengeluaran perusahaan yang telah dilakukan semata-mata sesuai dengan kewenangan

yang diberikan oleh Direksi Perusahaan; dan (3) yang memberikan kepastian yang sewajarnya sehubungan dengan pencegahan atau pendeteksian pada waktunya terhadap akuisisi, penggunaan atau pelepasan tanpa ijin atas aset perusahaan yang akan sangat mempengaruhi laporan keuangan. Berdasarkan kriteria ini, manajemen kami menyimpulkan bahwa, pada tanggal 31 Desember 2009, pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan telah berjalan secara efektif.

Semua sistem pengendalian internal, sebaik apapun rancangannya, mempunyai keterbatasan misalnya adanya kemungkinan kesalahan manusia/*human error* dan adanya tindakan menghindari atau melampaui pengawasan dan prosedur yang tidak dapat mencegah atau mendeteksi pernyataan yang salah. Selain itu, perkiraan-perkiraan dari setiap evaluasi tentang efektifitas untuk masa mendatang harus juga memperhatikan risiko bahwa pengawasan dapat menjadi tidak memadai karena adanya perubahan-perubahan keadaan.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota Ernst & Young Global, kantor akuntan publik terdaftar, telah melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi kami yang dicantumkan dalam laporan tahunan ini dan telah mengeluarkan laporan penegasan atas pengendalian internal seputar laporan keuangan per 31 Desember 2008. Laporan penegasan ini terdapat dalam halaman F-3 laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir.

Perubahan-perubahan di dalam Pengendalian internal atas Pelaporan Keuangan

Tidak ada perubahan-perubahan di dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan selama periode yang dicakup dalam laporan tahunan ini yang dapat mempengaruhi, atau sewajarnya mungkin akan sangat mempengaruhi pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan.

Butir 16A: **AHLI KEUANGAN DARI KOMITE AUDIT**

Dewan Komisaris telah menetapkan bahwa George Thia Peng Heok dan Kanaka Puradiredja yang telah diangkat sebagai Komite Audit pada tanggal 1 Januari 2009 adalah "ahli keuangan dari Komite Audit," sebagaimana didefinisikan di dalam Butir 16A dari Format 20-F, dan bahwa masing-masing dari mereka juga adalah "independen," sebagaimana didefinisikan di dalam *Rule 10A-3 dari Exchange Act.* Untuk keterangan lebih lanjut mengenai George Thia Peng Heok, lihat "Butir 6. Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan—Direktur dan Manajemen Senior-Dewan Komisaris."

Butir 16B: **KODE ETIK**

Kami telah mengubah Kode Etik Perusahaan yang berlaku bagi seluruh karyawan, termasuk *Chief Executive Officer, Chief Financial Officer* dan pejabat akuntan utama kami. Kami telah menempatkan Kode Etik ini di dalam situs kami di *www.indosat.com,* yang tersedia untuk umum. Salinan atas kode etik baru ini terdapat pada Lampiran 11.1 pada laporan tahunan kami pada form 20-F.

Butir 16C: **BIAYA DAN JASA AKUNTAN**

Tabel berikut ini memuat rangkuman biaya jasa yang dibayar kepada Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota dari Ernst & Young Global dari Indonesia, auditor eksternal independen Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009:

	2008	2009
	(dalam US$)	
Biaya audit[1]	1.963.307	2.330.298
Biaya terkait audit[2]	953.962	1.279.708
Biaya pajak[3]	—	-
Biaya yang lainnya[4]	—	-
Biaya total	2.917.269	3.610.006

(1) Biaya jasa audit merupakan biaya jasa profesional audit keuangan terhadap laporan keuangan kami dan anak perusahaan kami, PT Indosat Mega Media, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Starone Mitra Telekomunikasi dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dan audit pengendalian internal dan jasa *review* atestasi untuk memenuhi pasal 404 dari Sarbanes-Oxley Act of 2002.
(2) Biaya yang terkait dengan audit pada tahun 2008 dan 2009 terutama terdiri dari biaya untuk melaksanakan penelaahan terbatas triwulanan atas laporan keuangan konsolidasi kami, termasuk laporan keuangan anak perusahaan kami, dan untuk penerbitan obligasi pada tahun 2008 dan 2009.
(3) Biaya jasa pajak merupakan biaya jasa profesional yang terkait dengan kepatuhan terhadap pajak dan konsultasi perencanaan/nasihat tentang perpajakan.
(4) Semua biaya lainnya merupakan biaya jasa profesional untuk layanan-layanan yang tidak secara langsung mendukung audit laporan keuangan.

Layanan profesional ini terdapat dalam cakupan dari audit dan diijinkan layanan non-audit sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Komisi.

Pada Juni 2004, Komite Audit telah mengambil sebuah kebijakan yaitu seluruh jasa audit dan non-audit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Dalam keadaan apapun, auditor eksternal kami tidak dapat memberikan jasa yang dilarang berdasarkan *Sarbanes-Oxley Act Of 2002* atau peraturan yang diterbitkan dibawahnya. Jasa audit yang tidak dilarang dapat diberikan kepada kami sesuai dengan proses persetujuan terlebih dahulu dan dengan memperhatikan larangan yang ada. Kebijakan mengenai persetujuan terlebih dahulu tersebut disyaratkan untuk semua layanan yang diberikan oleh auditor eksternal dan tidak termasuk persetujuan untuk biaya yang telah ditentukan sebelumnya, yang tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu atau pengecualian *de minimis.*

Butir 16D: **PENGECUALIAN DARI STANDAR PENCATATAN BURSA EFEK NEW YORK UNTUK KOMITE AUDIT**

Sesuai dengan hukum Indonesia, Perusahaan mempunyai struktur dua tingkatan dewan, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Fungsi manajemen eksekutif dijalankan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris secara prinsip bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan-kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perusahaan dan memberikan nasehat kepada Direksi.

Menurut aturan Bursa Efek Indonesia, Komite Audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, satu di antaranya harus merupakan Komisaris Independen yang juga menjabat sebagai ketua komite audit, sementara dua anggota lainnya merupakan pihak independen eksternal dimana satu di antaranya harus memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan. Komite Audit Perusahaan terdiri dari lima anggota dan diketuai oleh salah satu Komisaris Independen. Anggota Komite Audit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Aturan pencatatan baru yang diadopsi berdasarkan *Rule 10A-3 dari Exchange Act* mewajibkan perusahaan swasta asing yang efeknya dicatat di NYSE untuk mempunyai Komite Audit yang terdiri dari para direktur independen. Aturan ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2005. Menurut *Rule 10A-3-(c)(3),* perusahaan swasta asing dikecualikan dari persyaratan independensi apabila (i) pemerintah atau bursa dari negara asal mengharuskan perusahaan untuk mempunyai Komite Audit; (ii) Komite Audit terpisah dari Direksi atau mempunyai anggota baik dari dalam maupun luar Direksi; (iii) para anggota Komite Audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif manajemen dari perusahaan yang menjadi anggota Komite Audit; (iv) pemerintah atau bursa dari negara asal mensyaratkan bahwa Komite Audit bersifat independen dari manajemen perusahaan; dan (v) Komite Audit bertanggung jawab atas pengangkatan, pengikatan dan pengawasan kerja dari para auditor eksternal. Kami mengikuti ketentuan pengecualian umum berdasarkan *Rule 10A-3-(c)(3)* dari *Securities Exchange Act of 1934* sehubungan dengan komposisi Komite Audit kami sebagaimana dimaksud di dalam Bagian 303A.11 dari pengungkapan melalui situs kami, yang tersedia untuk umum pada situs www.indosat.com.

Kami yakin bahwa dengan mengikuti ketentuan pengecualian tersebut, hal ini tidak akan memberikan dampak yang material ataupun negatif bagi kemampuan Komite Audit untuk bertindak independen. Kami juga yakin bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk memastikan agar Komite Audit bebas dari pengaruh manajemen dan agar tersedianya suatu forum yang terpisah dari manajemen dimana para auditor dan para pihak yang berkepentingan dapat secara bebas membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Aturan Bursa Efek Indonesia mensyaratkan bahwa setiap anggota Komite Audit harus independen. Aturan ini juga mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya dua dari anggota Komite Audit merupakan anggota independen eksternal, yang berarti bahwa mereka harus independen tidak saja dari Direksi tetapi juga Dewan Komisaris dan Perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, kami yakin standar yang ditetapkan oleh aturan Bursa Efek Indonesia setidaknya sama efektifnya dengan ketentuan dari New York Stock Exchange dalam memastikan agar Komite Audit kami bertindak secara independen.

Butir 16E: **PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS OLEH PERUSAHAAN DAN PIHAK TERAFILIASI**

Tidak berlaku.

Butir 16F: **PERUBAHAN DALAM PENDAFTARAN AKUNTAN BERSERTIFIKAT**

Tidak ada perubahan atau perbedaan pendapat dengan akuntan terhadap segala hal yang menyangkut prinsip-prinsip akuntansi, praktik atau keterbukaan keuangan selama dua tahun buku terakhir.

Butir 16G: **TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)**

Perusahaan kami didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan bursa perdagangan utama kami untuk saham biasa perusahaan adalah BEI. Saham biasa kami terdaftar di *United States Securities and Exchange Commission* dan tercatat di NYSE. Dengan demikian, Perusahaan kami tunduk pada ketentuan tata kelola perusahaan tertentu.

Ketentuan tata kelola perusahaan di negara kami terutama diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Peraturan Bapepam-LK dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh bursa efek Indonesia, yaitu BEI. Selain ketentuan peraturan ini, anggaran dasar Perusahaan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur praktek tata kelola perusahaan.

Namun demikian, banyak aturan tentang tata kelola perusahaan dari *NYSE Listed Company Manual* atau standar pencatatan NYSE, yang tidak diwajibkan untuk *foreign private issuer* dan kami diperbolehkan untuk mengikuti praktek tata kelola perusahaan dari negara asal kami sebagai pengganti sebagian besar standar tata kelola perusahaan yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE. Meskipun kami secara sukarela telah mematuhi sebagian besar aturan tata kelola perusahaan menurut standar pencatatan NYSE, ada beberapa perbedaan antara standar tata kelola perusahaan kami dengan standar yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tercatat di NYSE yang akan dijelaskan di bawah ini.

Komite Audit

Standar pencatatan NYSE mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE untuk memiliki suatu Komite Audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota yang memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang dimaksud dalam *Section 303A.02*. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK, perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia wajib memiliki Komite Audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris independen dan dua anggota dari luar perusahaan. Komite Audit Perusahaan terdiri dari lima anggota, tiga di antaranya adalah komisaris independen dan dua lainnya merupakan pihak luar yang independen, sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam-LK.

Sebagai tambahan, menurut *charter* tertulis Komite Audit kami, Komite Audit tidak diharuskan untuk mempelajari *earnings guidance* sebelum mengajukan pendaftaran (*filing*), untuk menjamin kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku sebagaimana diwajibkan menurut *Section 303A.07(c)(iii)(C),* meskipun *charter* tertulis ini mengharuskan Komite Audit untuk mempelajari setiap siaran pers yang memuat informasi keuangan. Tidak seperti ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE, Komite Audit Perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab langsung atas penunjukkan, retensi dan kompensasi untuk auditor eksternal kami. Komite Audit Perusahaan kami hanya dapat memberikan rekomendasi auditor eksternal kepada Dewan Komisaris, dan keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari pemegang saham sebagaimana ditentukan oleh hukum Indonesia. Salinan dari *charter* tertulis Komite Audit kami dapat dilihat pada situs kami di www.indosat.com sebagaimana terlampir dalam Exhibit 15.16.

LAPORAN -
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

Susunan Direksi; Komite Pencalonan

Standar pencatatan NYSE mewajibkan agar direksi dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE terdiri dari sebagian besar direktur independen dan agar dibentuk komite pencalonan. Perusahaan kami memiliki struktur dua dewan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, yang memisahkan kekuasaan manajemen (yang dijalankan oleh Direksi) dan kekuasaan pengawasan (yang dijalankan oleh Dewan Komisaris). Dengan demikian, apabila standar pencatatan NYSE menerapkan prinsip tata kelola perusahaan pada para direktur dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE, kami mengevaluasi kegiatan usaha kami dengan mengacu pada para Komisaris Perusahaan. Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bapepam-LK dan aturan BEI, sepuluh anggota Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota independen. Selain itu, kami tidak memiliki komite pencalonan. Pada rapat umum pemegang saham, para pemegang saham kami mencalonkan dan memilih orang-orang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Menurut standar pencatatan NYSE, para direktur dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE harus bertemu dalam sesi eksekutif yang terjadwal secara berkala tanpa manajemen. Sehubungan dengan hal ini, baik Peraturan Bapepam-LK ataupun aturan BEI tidak mewajibkan kami untuk mengadakan sesi eksekutif tersebut dimana Dewan Komisaris bertemu tanpa kehadiran Direktur. Dahulu, semua anggota Dewan Komisaris perusahaan kami yang merupakan orang-orang non-manajemen, bertemu dalam sesi eksekutif secara berkala, selain dari pertemuan untuk menyampaikan informasi yang biasa dilakukan oleh Direksi kami kepada Dewan Komisaris. Pada awal tahun 2005, kami memberlakukan prosedur dimana Dewan Komisaris perusahaan kami mengadakan pertemuan sesi eksekutif pada akhir dari setiap rapat terjadwal secara berkala, yang saat ini dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.

Komite Remunerasi

Standar pencatatan NYSE mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE untuk memiliki komite remunerasi yang seluruh anggotanya terdiri dari Direktur yang independen dengan *charter* tertulis yang mengatur kinerja dan tanggung jawab komite dan juga mewajibkan dilakukannya evaluasi kinerja tahunan. Komite Remunerasi kami terdiri dari tiga anggota Dewan Komisaris dan mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE. Akan tetapi, hanya satu komisaris dari tiga anggota komite yang merupakan komisaris independen dan *charter* tertulisnya tidak mengatur evaluasi kinerja tahunan Komite Remunerasi. Salinan dari peraturan Komite Remunerasi kami dapat ditemui dalam situs kami di **www.indosat.com.**

Bagian 3

Butir 17: LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang terdapat pada bagian 19(a) pada laporan tahunan ini bersama dengan laporan dari auditor independen kami, disampaikan sebagai bagian dalam laporan ini.

Butir 18: LAPORAN KEUANGAN

Tidak berlaku. Lihat butir 17.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD **(IFRS)**

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH REPORT OF INDEPENDENT
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2009

Table of Contents

	Page
Report of Independent Registered Public Accounting Firm	F-2 – 3
Consolidated Statements of Financial Position	F-4 – 6
Consolidated Statements of Comprehensive Income	F-7 – 8
Consolidated Statements of Changes in Stockholders' Equity	F-9 – 10
Consolidated Statements of Cash Flows	F-11 – 12
Notes to Consolidated Financial Statements	F-13 – 130

****

Report of Independent Registered Public Accounting Firm

Report No. RPC-11641

The Stockholders and Boards of Commissioners and Directors
PT Indosat Tbk

We have audited the accompanying consolidated statements of financial position of PT Indosat Tbk ("the Company") and its subsidiaries as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in stockholders' equity and cash flows for each of the two years in the period ended December 31, 2009. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit also includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements, assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indosat Tbk and its subsidiaries as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009, and the consolidated results of their operations and their cash flows for the years ended December 31, 2008 and 2009 in conformity with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board.

We also have audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States), PT Indosat Tbk and its subsidiaries' internal control over financial reporting as of December 31, 2009, based on criteria established in Internal Control-Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and our report dated May 24, 2010 expressed an unqualified opinion thereon.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Jakarta, Indonesia

May 24, 2010

Report of Independent Registered Public Accounting Firm

Report No. RPC-11642

The Stockholders and Boards of Commissioners and Directors
PT Indosat Tbk

We have audited PT Indosat Tbk ("the Company") and its subsidiaries' internal control over financial reporting as of December 31, 2009, based on criteria established in Internal Control-Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (the COSO criteria). The Company's management is responsible for maintaining effective internal control over financial reporting, and for its assessment of the effectiveness of internal control over financial reporting included in the accompanying Management's Annual Report on Internal Control over Financial Reporting. Our responsibility is to express an opinion on PT Indosat Tbk and its subsidiaries' internal control over financial reporting based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether effective internal control over financial reporting was maintained in all material respects. Our audit included obtaining an understanding of internal control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk, and performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

A company's internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company, and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect misstatements. Also, projections of any evaluation of effectiveness to future periods are subject to the risk that controls may become inadequate because of changes in conditions or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

In our opinion, PT Indosat Tbk and its subsidiaries maintained, in all material respects, effective internal control over financial reporting as of December 31, 2009, based on the COSO criteria.

We also have audited, in accordance with auditing standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States), the consolidated statements of financial position of PT Indosat Tbk and its subsidiaries as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009, and the related consolidated statements of operations, cash flows and shareholders' equity for each of the years in the two-year period ended December 31, 2009, and our report dated May 24, 2010, expressed an unqualified opinion thereon.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Jakarta, Indonesia

May 24, 2010

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah and thousands of U.S. dollar, except share data)

	Notes	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
		Rp	Rp	Rp
ASSETS				
CURRENT ASSETS				
Cash and cash equivalents	2g8,4,16 26,32	8,053,006	5,737,866	2,835,999
Short-term investments—net of allowance for decline in value of Rp25,395 as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009	2g8,16	1,250	—	—
Accounts receivable—net	2g,5,3b			
Trade	16,26,32	1,030,968	1,340,706	1,356,697
Others	34a	20,901	16,914	593,287
Inventories—net of allowance for obsolescence of Rp476 as of January 1, 2008, Rp3,368 as of December 31, 2008 and Rp10,769 as of December 31, 2009	2g20	161,573	241,991	112,260
Derivative assets	2g8,2g15 16,29,32	127,717	656,594	224,004
Advances		38,017	39,151	35,173
Taxes receivable	6,12	490,133	247,185	396,581
Prepaid expenses	2g19,2g21, 25,26	650,893	1,019,073	1,125,091
Other current assets	2g5,32	226,801	347,516	424,623
Other current financial assets	2g8,16,32	24,868	44,777	35,173
Total Current Assets		10,826,127	9,691,773	7,138,888
NON-CURRENT ASSETS				
Due from related parties—net of allowance for doubtful accounts of Rp2,257 as of January 1, 2008, Rp2,419 as of December 31, 2008 and Rp1,182 as of December 31, 2009	2g8,26,16,35	56,455	42,496	7,215
Deferred tax assets—net	2g6,3b,12	88,956	70,744	87,999
Investments in associated companies—net of allowance for decline in value of Rp56,300 as of January 1, 2008, and Rp56,586 as of December 31, 2008 and 2009	2g3,2g22	286	700	422
Other long-term investments—net of allowance for decline in value of Rp99,977 as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009	2g8,16	2,730	2,730	2,730
Property and equipment—net	2g16,2g17, 2g18,2g22,7	30,140,107	37,904,724	43,922,342
Goodwill and other intangible assets	2d2,2g1,2g2, 2g22,3b,9	2,087,178	2,060,709	2,042,817
Long-term prepaid licenses—net of current portion	2g19	231,289	199,289	463,549
Long-term receivables	2g8	77,515	81,524	66,611
Long-term prepaid pension—net of current portion	2g7,3b,25,26	198,360	169,986	147,380
Long-term advances	9	646,997	456,093	294,391
Prepaid landrights lease	2d1,10	345,665	386,622	377,868
Other non-current assets	2g21,26	458,999	694,465	740,703
Other non-current financial assets	2g8,16	59,259	58,357	84,160
Total Non-current Assets		34,393,796	42,128,439	48,238,187
TOTAL ASSETS		**45,219,923**	**51,820,212**	**55,377,075**

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION—(Continued)
January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah and thousands of U.S. dollar, except share data)

	Notes	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
		Rp	Rp	Rp
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY				
CURRENT LIABILITIES				
Accounts payable—trade	2g9,16,26,32	446,450	608,754	537,476
Procurement payable	2g9,11,16, 26,32	6,206,649	6,446,357	5,289,782
Taxes payable	2g6,12	314,529	111,169	61,948
Accrued expenses	13,25,16,26,32	1,282,939	1,445,238	1,525,561
Unearned income	2g5	758,747	867,456	962,974
Deposits from customers	32	40,947	32,121	22,463
Derivative liabilities	2g9,2g15, 16,29,32	64,310	315,866	174,540
Current maturities of:				
Loans payable	2g9,14,16,32	494,387	572,469	1,440,259
Bonds payable	2g9,15,16,32	1,860,000	56,442	2,840,662
Other current liabilities	2g9,26,32	186,983	232,821	164,826
Other current financial liabilities	2g9,16,32	51,560	31,022	43,721
Total Current Liabilities		11,707,501	10,719,715	13,064,212
NON-CURRENT LIABILITIES				
Due to related parties	2g9,16,26,32	64,850	14,699	13,764
Deferred tax liabilities—net	2g6,12	1,468,676	1,349,675	1,650,318
Loans payable—net of current maturities	2g9,14, 16,26,32	4,249,033	10,812,160	12,715,492
Bonds payable—net of current maturities	2g9,15,16,32	10,088,741	10,315,616	8,472,175
Other non-current liabilities	2g9,17, 25,26,32	639,902	819,681	936,087
Other non-current financial liabilities	2g9,16,18,32	279,658	52,178	6,546
Total Non-current Liabilities		16,790,860	23,364,009	23,794,382
TOTAL LIABILITIES		**28,498,361**	**34,083,724**	**36,858,594**

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION—(Continued)
January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah and thousands of U.S. dollar, except share data)

	Notes	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
		Rp	Rp	Rp
EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE COMPANY				
Capital stock—Rp100 par value per A share and B share Authorized—1 A share and 19,999,999,999 B shares Issued and fully paid—1 A share and 5,433,933,499 B shares	19	543,393	543,393	543,393
Premium on capital stock	19	1,546,587	1,546,587	1,546,587
Retained earnings				
Appropriated		80,258	100,678	119,464
Unappropriated		13,846,541	14,842,838	15,575,601
Other components of equity	2b,2g3,2g4	409,989	417,395	406,473
Total Equity Attributable to Owners of the Company		16,426,768	17,450,891	18,191,518
Non-controlling Interests		294,794	285,597	326,963
TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY		**16,721,562**	**17,736,488**	**18,518,481**
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY		**45,219,923**	**51,820,212**	**55,377,075**

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah and thousands of U.S. dollar, except share data)

	Notes	2008	2009
		Rp	Rp
OPERATING REVENUES	2g5,3b,20,26, 31		
Cellular		14,185,453	13,959,674
Multimedia, Data Communication, Internet ("MIDI")		2,733,412	2,712,632
Fixed telecommunication		2,029,564	1,957,179
Total Operating Revenues		**18,948,429**	**18,629,485**
OPERATING EXPENSES	2g5.5		
Cost of services	21,26	6,375,987	6,896,300
Depreciation and amortization	2d2,2g2,2g16 7,8	4,555,891	5,561,390
Personnel	2g7,22,25,26	1,638,993	1,451,560
Marketing		918,124	816,934
Administration and general	23,26	737,432	693,437
Total Operating Expenses		**14,226,427**	**15,419,621**
OPERATING INCOME		**4,722,002**	**3,209,864**
OTHER INCOME (EXPENSES)	2g5		
Gain (loss) on foreign exchange—net	2g4,2g11,5	(885,729)	1,656,407
Interest income	2g5.2,26	460,089	138,951
Financing cost	24,26	(1,858,294)	(1,872,967)
Gain (loss) on change in fair value of derivatives—net	2g11,2g15,29	136,603	(486,916)
Others—net	12	(25,597)	(116,821)
Other Expenses—Net		**(2,172,928)**	**(681,346)**
PROFIT BEFORE INCOME TAX		**2,549,074**	**2,528,518**
INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)	2g6,3b,12		
Current		(587,642)	(494,490)
Deferred		102,319	(287,030)
Income Tax Expense—Net		**(485,323)**	**(781,520)**
PROFIT FOR THE YEAR		**2,063,751**	**1,746,998**
OTHER COMPREHENSIVE INCOME	12		
Differences in foreign currency translation		9,485	(14,563)
Income tax effect on differences in foreign currency translation		(2,371)	3,641
Differences in foreign currency translation—net of tax		7,114	(10,922)
Difference in transaction of equity changes in associated company		389	—
Income tax effect on difference in transaction of equity changes in associated company		(97)	—
Differences in transaction of equity changes in associated company—net of tax		292	—

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME—(Continued)
Years Ended December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah and thousands of U.S. dollar, except share data)

	Notes	2008	2009
		Rp	Rp
OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX	2g4	7,406	(10,922)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME	2d	**2,071,157**	**1,736,076**
PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:			
Owners of the Company		2,037,753	1,690,804
Non-controlling interests		25,998	56,194
Total		**2,063,751**	**1,746,998**
OTHER COMPREHENSIVE INCOME—NET OF TAX ATTRIBUTABLE TO:			
Owners of the Company		7,406	(10,922)
Non-controlling interests		—	—
Total		**7,406**	**(10,922)**
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:			
Owners of the Company		2,045,159	1,679,882
Non-controlling interests		25,998	56,194
Total		**2,071,157**	**1,736,076**
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE COMPANY	2g25,19,27	**375.01**	**311.16**
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER AMERICAN DEPOSITARY SHARES (ADS) (50 B SHARES PER ADS) ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE COMPANY	2g25,19,27	**18,750.26**	**15,557.83**

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY
Years Ended December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah)

Description	Notes	Attributable to the Owners of the Company							Non-Controlling Interests	Total Equity
		Capital Stock—Issued and Fully Paid	Premium on Capital Stock	Difference in Transactions of Equity Changes in Associated Companies/ Subsidiaries*	Difference in Foreign Currency Translation**	Retained Earnings		Total		
						Appropriated	Unappropriated			
Balance as of January 1, 2008 under Indonesian GAAP		543,393	1,546,587	403,812	6,177	80,258	13,964,503	16,544,730	297,370	16,842,100
IFRS adjustments	2d	—	—	—	—	—	(117,962)	(117,962)	(2,576)	(120,538)
Balance as of January 1, 2008 (restated) under IFRS		543,393	1,546,587	403,812	6,177	80,258	13,846,541	16,426,768	294,794	16,721,562
Profit for the year under Indonesian GAAP	2d	—	—	—	—	—	1,878,522	1,878,522	26,763	1,905,285
IFRS adjustments		—	—	—	—	—	159,231	159,231	(765)	158,466
Profit for the year (restated)		—	—	—	—	—	2,037,753	2,037,753	25,998	2,063,751
Other comprehensive income		—	—	292	7,114	—	—	7,406	—	7,406
Total comprehensive income for the year		—	—	292	7,114	—	2,037,753	2,045,159	25,998	2,071,157
Resolution during the Annual Stockholders' General Meeting on June 5, 2008	28									
Declaration of cash dividend		—	—	—	—	—	(1,021,036)	(1,021,036)	—	(1,021,036)
Appropriation for reserve fund		—	—	—	—	20,420	(20,420)	—	—	—
Changes in non-controlling interest										
Total non-controlling interest under Indonesian GAAP		—	—	—	—	—	—	—	(35,195)	(35,195)
Balance as of December 31, 2008		543,393	1,546,587	404,104	13,291	100,678	14,842,838	17,450,891	285,597	17,736,488

* This reserve includes difference in foreign currency translation resulting from reduction in tax rates.

** This reserve arose from the translation of the financial statements of Indosat Finance B.V. and Indosat International Finance Company B.V. from euro, and Indosat Singapore Pte. Ltd. from U.S. dollar to rupiah, net of applicable taxes.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY—(Continued)
Years Ended December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah)

Description	Notes	Attributable to the Owners of the Company								
		Capital Stock—Issued and Fully Paid	Premium on Capital Stock	Difference in Transactions of Equity Changes in Associated Companies/ Subsidiaries*	Difference in Foreign Currency Translation**	Retained Earnings		Total	Non-Controlling Interests	Total Equity
						Appropriated	Unappropriated			
Balance as of December 31, 2008		543,393	1,546,587	404,104	13,291	100,678	14,842,838	17,450,891	285,597	17,736,488
Profit for the year		—	—	—	—	—	1,690,804	1,690,804	56,194	1,746,998
Other comprehensive income		—	—	—	(10,922)	—	—	(10,922)	—	(10,922)
Total comprehensive income		—	—	—	(10,922)	—	1,690,804	1,679,882	56,194	1,736,076
Resolution during the Annual Stockholders' General Meeting on June 11, 2009	28									
Declaration of cash dividend		—	—	—	—	—	(939,255)	(939,255)	—	(939,255)
Appropriation for reserve fund		—	—	—	—	18,786	(18,786)	—	—	—
Changes in non-controlling interest										
Total non-controlling interest under Indonesian GAAP		—	—	—	—	—	—	—	(14,828)	(14,828)
Balance as of December 31, 2009		543,393	1,546,587	404,104	2,369	119,464	15,575,601	18,191,518	326,963	18,518,481

* This reserve includes difference in foreign currency translation resulting from reduction in tax rates.

** This reserve arose from the translation of the financial statements of Indosat Finance B.V. and Indosat International Finance Company B.V. from euro, and Indosat Singapore Pte. Ltd. from U.S. dollar to rupiah, net of applicable taxes.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah and thousands of U.S. dollar)

	Notes	2008	2009
		Rp	Rp
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Cash received from:			
Customers		18,336,914	18,415,890
Interest income		460,020	146,826
Refund of taxes	6	271,321	84,650
Settlement from derivative contract	29a	58,375	—
Cash paid to/for:			
Suppliers and others		(7,992,693)	(10,116,183)
Financing cost		(1,776,934)	(1,730,149)
Employees		(1,708,174)	(1,359,817)
Taxes		(897,161)	(878,137)
Long-term prepaid licenses		—	(338,408)
Swap cost from cross currency swap contracts	29a,29c-p	(235,971)	(125,748)
Interest rate swap contracts paid	29s-t	(2,432)	(47,715)
Net Cash Provided by Operating Activities		**6,513,265**	**4,051,209**
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES			
Dividend income received		26,348	26,774
Proceeds from sale of property and equipment	7	1,131	2,253
Acquisitions of property and equipment	7	(10,307,932)	(10,684,690)
Acquisition of intangible assets	8	(6,952)	(15,044)
Proceeds from sale of short-term investment		1,250	—
Purchase of investment in associated company		(700)	—
Net Cash Used in Investing Activities		**(10,286,855)**	**(10,670,707)**
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES			
Proceeds from long-term loans	14	5,126,570	3,892,786
Proceeds from bonds payable	15	1,650,000	1,500,000
Cash dividend paid		(1,021,037)	(939,255)
Repayment of long-term loans	14	(506,220)	(632,814)
Swap cost from cross currency swap contract	29b	(64,009)	(54,116)
Decrease (increase) in restricted cash and cash equivalents		4,200	(18,206)
Repayment of bonds payable	15	(3,828,827)	(14,453)
Cash dividend paid by subsidiaries to non-controlling interest		(11,326)	(9,291)
Settlement from derivative contract	29b	109,099	—
Net Cash Provided by Financing Activities		**1,458,450**	**3,724,651**

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS—(Continued)
Years Ended December 31, 2008 and 2009
(Expressed in millions of rupiah and thousands of U.S. dollar)

	Notes	2008	2009
		Rp	Rp
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		**(2,315,140)**	**(2,894,847)**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR		**8,053,006**	**5,737,866**
BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS OF ACQUIRED SUBSIDIARY		**—**	**(7,020)**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR	4	**5,737,866**	**2,835,999**
DETAILS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:			
Time deposits with original maturities of three months or less		5,469,039	2,611,529
Cash on hand and in banks		268,827	224,470
Cash and cash equivalents as stated in the consolidated statements of financial position		**5,737,866**	**2,835,999**
SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION:			
Transactions not affecting cash flows:			
Acquisitions of property and equipment credited to:			
Long-term loans payable		1,516,354	723,112
Long-term advances		190,906	161,702
Procurement payables		274,248	—
Other non-current liabilities		45,511	—

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

1. GENERAL

a. Company's Establishment

PT Indosat Tbk ("the Company") was established in the Republic of Indonesia on November 10, 1967 within the framework of the Indonesian Foreign Investment Law No. 1 of 1967 based on the notarial deed No. 55 of Mohamad Said Tadjoedin, S.H. The deed of establishment was published in Supplement No. 24 of State Gazette No. 26 dated March 29, 1968 of the Republic of Indonesia. In 1980, the Company was sold by American Cable and Radio Corporation, an International Telephone & Telegraph subsidiary, to the Government of the Republic of Indonesia and became a State-owned Company (*Persero*).

On February 7, 2003, the Company received the approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM) in its letter No. 14/V/PMA/2003 for the change of its legal status from a State-owned Company (*Persero*) to a Foreign Capital Investment Company. Subsequently, on March 21, 2003, the Company received the approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on the amendment of its Articles of Association to reflect the change of its legal status.

The Company's Articles of Association has been amended from time to time. The latest amendment was covered by notarial deed No. 118 dated June 11, 2009 of Aulia Taufani, S.H. (as a substitute notary of Sutjipto, S.H.) as approved in the Stockholders' General Meeting held on June 11, 2009, in order to comply with the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) Rule No. IX.J.1 dated May 14, 2008 on the Principles of Articles of Association of Limited Liability Companies that Conduct Public Offering of Equity Securities and Public Companies. The latest amendment of the Company's Articles of Association has been approved by and reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its letters No. AHU-31103.AH.01.02 Year 2009 dated July 7, 2009 and AHU-AH.01.10-09907 dated July 10, 2009. The amendments relate to, among others, the Company's additional business activities and additional veto rights of "A" share with respect to demerger of the Company and carrying out the submission of application for bankruptcy (Note 34b).

According to article 3 of its Articles of Association, the Company shall engage in providing telecommunications networks and/or services as well as informatics business by conducting the following activities:

- Provision of telecommunications networks and/or services and informatics business
- Planning of services, construction of infrastructure and provision of telecommunications and informatics business facilities, including supporting resources
- Carrying out operational services (comprising the marketing and sale of telecommunications networks and/or services and informatics business provided by the Company), maintenance, research and development of telecommunications and informatics business infrastructure and/or facilities, and providing education and training (both locally and overseas)
- Engaging in services which are relevant to the development of telecommunications networks and/or services and informatics business
- Engaging in payment transactions and money transfer service through telecommunications and information technology networks.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Companies") as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009 and for each of the two years ended December 31, 2009 were approved and authorized for issue by the Board of Directors on May 24, 2010, as reviewed and recommended for approval by the Audit Committee.

b. Structure of the Company's Subsidiaries

As of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009, the Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Name of Subsidiary	Location	Principal Activity	Start of Commercial Operations	Percentage of Ownership (%)	
				January 1 and December 31, 2008	December 31, 2009
Indosat Finance Company B.V. ("IFB") [2]	Amsterdam	Finance	2003	100.00	100.00
Indosat International Finance Company B.V. ("IIFB") [3]	Amsterdam	Finance	2005	100.00	100.00
Indosat Singapore Pte. Ltd. ("ISP")	Singapore	Telecommunication	2005	100.00	100.00
PT Indosat Mega Media ("IMM")	Jakarta	Multimedia	2001	99.85	99.85
PT Starone Mitra Telekomunikasi ("SMT")	Semarang	Telecommunication	2006	72.54	72.54
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	Jakarta	Data Communication	1989	72.36	72.36
PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("APE") (Note 2b)	Jakarta	Telecommunication	2000	39.80	39.80
PT Satelindo Multi Media ("SMM") [1]	Jakarta	Multimedia	1999	99.60	—

Name of Subsidiary	Total Assets (Before Eliminations)		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
IFB [2]	2,882,340	2,637,074	2,261,226
IIFB [3]	2,382,722	1,235,816	1,044,174
ISP	10,249	21,167	28,779
IMM	753,797	741,086	734,417
SMT	176,444	147,864	139,789
Lintasarta	1,059,539	1,324,324	1,404,669
APE	104,487	133,241	179,681
SMM [1]	10,690	10,690	—

(1) Liquidated on June 30, 2009

(2) Based on an IFB shareholder's resolution dated November 6, 2008, IFB decided to refund capital injection amounting to EUR99,996. The Company received such refund in February 2009.

(3) Based on an IIFB shareholder's resolution dated November 6, 2008, IIFB decided to refund capital injection amounting to EUR1,124,064. The Company received such refund in February 2009.

SMT was established on June 15, 2006 in Semarang, Central Java, by the Company, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, PT Dawamiba Engineering and PT Trikomsel Multimedia to engage in construction and operation of fixed wireless access network using Code Division Multiple Access (CDMA) 2000-1x technology for Central Java and its surrounding areas.

Based on an amendment dated August 23, 2006 to SMT's Articles of Association, in August 2006 the Company contributed Rp5,779 cash as part of the capital of SMT. SMT started its business operations in January 2007.

Furthermore, based on the latest amendment dated April 24, 2007 to SMT's Articles of Association, in May 2007 the Company made additional cash capital injection amounting to Rp49,728 and in-kind contribution of Rp45,523 in the form of telecommunications equipment. Based on such Articles of Association, the Company has 51.00% ownership in SMT. However, one of the stockholders decided not to make its capital injection as required. As a result, the Company's ownership increased to 55.36%. This increase was approved by SMT's stockholders based on the minutes of a stockholders' meeting held on July 30, 2007.

On November 27, 2008, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement with PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah ("SPJT") to purchase the 17.18% ownership of SPJT in SMT for Rp33,680. Such purchase, which resulted in the recognition of goodwill amounting to Rp9,724 (Note 8), increased the Company's ownership in SMT from 55.36% to 72.54%. On December 3, 2008, the Company fully paid SPJT for the purchase.

c. Merger of the Company, Satelindo, Bimagraha and IM3

Based on Merger Deed No. 57 dated November 20, 2003 ("merger date") of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the Company, PT Satelit Palapa Indonesia ("Satelindo"), PT Bimagraha Telekomindo ("Bimagraha") and PT Indosat Multi Media Mobile ("IM3") agreed to merge, with the Company as the surviving entity. All assets and liabilities owned by Satelindo, Bimagraha and IM3 were transferred to the Company on the merger date. These three companies were dissolved by operation of law without the need to undergo the regular liquidation process.

The names "Satelindo" and "IM3" in the following notes refer to these entities before they were merged with the Company, or as the entities that entered into contractual agreements that were taken over by the Company as a result of the merger.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows:

a. Basis of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are presented using the historical cost basis of accounting, except for inventories which are stated at the lower of cost or net realizable value and derivative financial instruments and available-for-sale financial assets which are stated at fair value.

The consolidated statements of cash flows classify cash receipts and payments into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The consolidated financial statements are presented in Indonesian rupiah, which is the Company's functional and reporting currency.

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the Company's accounts and those of its subsidiaries (Note 1b).

The consolidated financial statements also include the accounts of APE (Lintasarta's 55%-owned subsidiary). The accounts of APE in 2008 and 2009 were consolidated because its financial and operating policies were controlled by Lintasarta.

The accounts of IFB, IIFB, and ISP were translated into rupiah amounts at the middle rates of exchange prevailing at balance sheet date for balance sheet accounts and the average rates during the year for profit and loss accounts. The resulting differences arising from the translations of the financial statements of IFB, IIFB, and ISP are presented as part of "Other Components of Equity" under the Stockholders' Equity section of the consolidated balance sheets.

Non-controlling interest in subsidiaries represents the minority stockholders' proportionate share in the equity (including net income) of the subsidiaries which are not wholly-owned. Intergroup balances, transactions, income and expenses are eliminated in full on consolidation.

c. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Companies have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS") as issued by the International Accounting Standards Board ("IASB").

d. First-time Adoption and Transition to IFRS

These are the Companies' first consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS.

Prior to adoption of IFRS until December 31, 2008, the Companies' consolidated financial statements were prepared in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia (Indonesian GAAP).

The Companies applied *IFRS 1, "First-time Adoption of International Financial Reporting Standards",* in preparing these consolidated financial statements, with January 1, 2008 as the date of transition. An explanation of how the adoption of IFRS has affected the reported financial position, financial performance and cash flows is set forth below.

The first-time adoption and transition to IFRS resulted in certain changes to the Companies' accounting policies recorded under Indonesian GAAP. The comparative figures for the 2008 consolidated financial statements were restated to reflect the changes in accounting policies.

IFRS 1 allows first-time adopters certain exemptions from the general requirements to apply IFRS effective December 31, 2009 retrospectively. In preparing the Companies' first IFRS consolidated financial statements, the following exemptions were applied:

(a) *IFRS 3, "Business Combinations",* has not been applied to acquisitions of subsidiaries or of interests in associated companies that occurred before January 1, 2008. Accordingly, the Companies ceased to amortize the goodwill arising from these business combinations effective January 1, 2008.

(b) The option not to split compound financial instruments at inception into separate liability and equity components has been applied for compound financial instruments issued by the Company's subsidiary, Lintasarta, in which the liability component was no longer outstanding as of January 1, 2008.

The following tables ("Reconciliation Tables") set forth a reconciliation of (i) consolidated statement of financial position as of January 1, 2008, (ii) consolidated statement of financial position as of December 31, 2008 and (iii) consolidated statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2008, in each case between IFRS and the previously reported Indonesian GAAP consolidated financial statements.

Reconciliation of consolidated statement of financial position under Indonesian GAAP and IFRS as of January 1, 2008:

	Notes	Indonesian GAAP	Remeasurements/ Reclassifications	IFRS
ASSETS				
CURRENT ASSETS				
Cash and cash equivalents		8,053,006	—	8,053,006
Short-term investments—net		1,250	—	1,250
Accounts receivable—net				
Trade		1,030,968	—	1,030,968
Others		20,901	—	20,901
Inventories—net		161,573	—	161,573
Derivative assets		127,717	—	127,717
Advances		38,017	—	38,017
Prepaid taxes	2e	714,322	(714,322)	—
Taxes receivable	2e	—	490,133	490,133
Prepaid expenses	2e	618,893	32,000	650,893
Other current assets	2e	27,480	199,321	226,801
Other current financial assets	2e	—	24,868	24,868
Total Current Assets		10,794,127	32,000	10,826,127
NON-CURRENT ASSETS				
Due from related parties—net		56,455	—	56,455
Deferred tax assets—net	2d4	87,118	1,838	88,956
Investments in associated companies		286	—	286
Other long-term investments		2,730	—	2,730
Property and equipment—net	2e	30,572,773	(432,666)	30,140,107
Goodwill and other intangible assets—net	2d2, 2e	2,350,467	(263,289)	2,087,178
Long-term prepaid licenses	2e	—	231,289	231,289
Long-term receivables		77,515	—	77,515
Long-term prepaid pension—net of current portion		198,360	—	198,360
Long-term advances		646,997	—	646,997
Prepaid landrights lease	2d1, 2e	—	345,665	345,665
Other non-current assets	2e	518,258	(59,259)	458,999
Other non-current financial assets	2e	—	59,259	59,259
Total Non-current Assets		34,510,959	(117,163)	34,393,796
TOTAL ASSETS		**45,305,086**	**(85,163)**	**45,219,923**

	Notes	Indonesian GAAP	Remeasurements/ Reclassifications	IFRS
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY				
CURRENT LIABILITIES				
Accounts payable—trade		446,450	—	446,450
Procurement payable		6,206,649	—	6,206,649
Taxes payable	2e	436,450	(121,921)	314,529
Accrued expenses	2e	1,340,435	(57,496)	1,282,939
Unearned income	2d3	709,827	48,920	758,747
Deposits from customers		40,947	—	40,947
Derivative liabilities		64,310	—	64,310
Current maturities of:				
Loans payable		494,387	—	494,387
Bonds payable		1,860,000	—	1,860,000
Other current liabilities	2e	59,126	127,857	186,983
Other current financial liabilities	2e	—	51,560	51,560
Total Current Liabilities		11,658,581	48,920	11,707,501
NON-CURRENT LIABILITIES				
Due to related parties		64,850	—	64,850
Deferred tax liabilities—net	2d4	1,482,221	(13,545)	1,468,676
Loans payable—net of current maturities		4,249,033	—	4,249,033
Bonds payable—net of current maturities		10,088,741	—	10,088,741
Other non-current liabilities	2e	919,560	(279,658)	639,902
Other non-current financial liabilities	2e	—	279,658	279,658
Total Non-current Liabilities		16,804,405	(13,545)	16,790,860
MINORITY INTEREST	2e	297,370	(297,370)	—
STOCKHOLDERS' EQUITY				
Capital stock		543,393	—	543,393
Premium on capital stock		1,546,587	—	1,546,587
Retained earnings				
Appropriated		80,258	—	80,258
Unappropriated	2d5	13,964,503	(117,962)	13,846,541
Difference in transactions of equity changes in associated companies/subsidiaries	2e	403,812	(403,812)	—
Difference in foreign currency translation	2e	6,177	(6,177)	—
Other components of equity	2e	—	409,989	409,989
Total Equity Attributable to Owners of the Company		16,544,730	(117,962)	16,426,768
Non-controlling interest	2e	—	294,794	294,794
Total Stockholders' Equity		**16,544,730**	**176,832**	**16,721,562**
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY		**45,305,086**	**(85,163)**	**45,219,923**

Reconciliation of consolidated statement of financial position under Indonesian GAAP and IFRS as of December 31, 2008:

	Notes	Indonesian GAAP	Remeasurements/ Reclassifications	IFRS
ASSETS				
CURRENT ASSETS				
Cash and cash equivalents		5,737,866	—	5,737,866
Accounts receivable—net				
Trade		1,340,706	—	1,340,706
Others		16,914	—	16,914
Inventories—net		241,991	—	241,991
Derivative assets		656,594	—	656,594
Advances		39,151	—	39,151
Prepaid taxes	2e	592,880	(592,880)	—
Taxes receivable	2e	—	247,185	247,185
Prepaid expenses	2e	987,073	32,000	1,019,073
Other current assets	2e	46,598	300,918	347,516
Other current financial assets	2e	—	44,777	44,777
Total Current Assets		9,659,773	32,000	9,691,773
NON-CURRENT ASSETS				
Due from related parties—net		42,496	—	42,496
Deferred tax assets—net	2d4	68,445	2,299	70,744
Investments in associated companies		700	—	700
Other long-term investments		2,730	—	2,730
Property and equipment—net	2e	38,394,073	(489,349)	37,904,724
Goodwill and other intangible assets—net	2d2, 2e	2,064,681	(3,972)	2,060,709
Long-term prepaid licenses	2e	—	199,289	199,289
Long-term receivables	2e	81,524	—	81,524
Long-term prepaid pension—net of current portion		169,986	—	169,986
Long-term advances		456,093	—	456,093
Prepaid landrights lease	2d1, 2e	—	386,622	386,622
Other non-current assets	2e	752,822	(58,357)	694,465
Other non-current financial assets	2e	—	58,357	58,357
Total Non-current Assets		42,033,550	94,889	42,128,439
TOTAL ASSETS		**51,693,323**	**126,889**	**51,820,212**

	Notes	Indonesian GAAP	Remeasurements/ Reclassifications	IFRS
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY				
CURRENT LIABILITIES				
Accounts payable—trade		608,754	—	608,754
Procurement payable		6,446,357	—	6,446,357
Taxes payable	2e	268,891	(157,722)	111,169
Accrued expenses	2e	1,512,533	(67,295)	1,445,238
Unearned income	2d3	822,986	44,470	867,456
Deposits from customers		32,121	—	32,121
Derivative liabilities		315,866	—	315,866
Current maturities of:				
Loans payable		572,469	—	572,469
Bonds payable		56,442	—	56,442
Other current liabilities	2e	38,826	193,995	232,821
Other current financial liabilities	2e	—	31,022	31,022
Total Current Liabilities		10,675,245	44,470	10,719,715
NON-CURRENT LIABILITIES				
Due to related parties		14,699	—	14,699
Deferred tax liabilities—net	2d4	1,305,185	44,490	1,349,675
Loans payable—net of current maturities		10,812,160	—	10,812,160
Bonds payable—net of current maturities		10,315,616	—	10,315,616
Other non-current liabilities	2e	871,859	(52,178)	819,681
Other non-current financial liabilities	2e	—	52,178	52,178
Total Non-current Liabilities		23,319,519	44,490	23,364,009
MINORITY INTEREST	2e	288,938	(288,938)	—
STOCKHOLDERS' EQUITY				
Capital stock		543,393	—	543,393
Premium on capital stock		1,546,587	—	1,546,587
Retained earnings				
Appropriated		100,678	—	100,678
Unappropriated	2d5	14,801,568	41,270	14,842,838
Difference in transactions of equity changes in associated companies/subsidiaries	2e	404,104	(404,104)	—
Difference in foreign currency translation	2e	13,291	(13,291)	—
Other components of equity	2e	—	417,395	417,395
Total Equity Attributable to Owners of the Company		17,409,621	41,270	17,450,891
Non-controlling interest	2e	—	285,597	285,597
Total Stockholders' Equity		**17,409,621**	**326,867**	**17,736,488**
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY		**51,693,323**	**126,889**	**51,820,212**

Reconciliation between consolidated statement of comprehensive income under Indonesian GAAP and IFRS for the year ended December 31, 2008:

	Notes	Indonesian GAAP	Remeasurements/ Reclassifications	IFRS
OPERATING REVENUES				
Cellular	2d3	14,178,922	6,531	14,185,453
MIDI	2d3	2,735,495	(2,083)	2,733,412
Fixed telecommunication	2e	1,744,716	284,848	2,029,564
Total Operating Revenues		**18,659,133**	**289,296**	**18,948,429**
OPERATING EXPENSES				
Costs of services	2d1, 2e	6,043,414	332,573	6,375,987
Depreciation and amortization	2e	4,587,891	(32,000)	4,555,891
Personnel		1,638,993	—	1,638,993
Marketing		918,124	—	918,124
Administration and general		737,432	—	737,432
Total Operating Expenses		**13,925,854**	**300,573**	**14,226,427**
OPERATING INCOME		**4,733,279**	**(11,277)**	**4,722,002**
OTHER INCOME (EXPENSES)				
Interest income		460,089	—	460,089
Gain on change in fair value of derivatives—net		136,603	—	136,603
Financing cost		(1,858,294)	—	(1,858,294)
Loss on foreign exchange—net		(885,729)	—	(885,729)
Amortization of goodwill	2d2	(227,317)	227,317	—
Others – net	2e	(33,516)	7,919	(25,597)
Other Expenses—Net		**(2,408,164)**	**235,236**	**(2,172,928)**
INCOME BEFORE INCOME TAX		**2,325,115**	**223,959**	**2,549,074**
INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)				
Current	2e	(579,723)	(7,919)	(587,642)
Deferred	2d4	159,893	(57,574)	102,319
Income Tax Expense—Net		**(419,830)**	**(65,493)**	**(485,323)**
PROFIT FOR THE YEAR		**1,905,285**	**158,466**	**2,063,751**
Differences in foreign currency translation	2e	—	7,114	7,114
Differences in transaction of equity changes in associated company	2e	—	292	292
OTHER COMPREHENSIVE INCOME		**—**	**7,406**	**7,406**
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME		**1,905,285**	**165,872**	**2,071,157**
PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:				
Owners of the Company		1,878,522	159,231	2,037,753
Non-controlling interests		26,763	(765)	25,998
Total profit for the year		1,905,285	158,466	2,063,751

	Notes	Indonesian GAAP	Remeasurements/ Reclassifications	IFRS
OTHER COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:				
Owners of the Company	2e	—	7,406	7,406
Non-controlling interests		—	—	—
Total other comprehensive income		—	7,406	7,406
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:				
Owners of the Company		1,878,522	166,637	2,045,159
Non-controlling interests		26,763	(765)	25,998
Total comprehensive income		1,905,285	165,872	2,071,157

The transition from Indonesian GAAP to IFRS has not had a material impact on the consolidated statements of cash flows.

d1. Landrights

Under Indonesian GAAP, landrights based on any type of right are recorded as Land and are not depreciated, unless it can be predicted that management will not be able to extend or renew the landrights or such extension or renewal is remote.

Expenses associated with the acquisition of the government permit to use the land (i.e. notary fee, tax, etc.) should be amortized over each of the periods of the rights to use the land obtained from the Government which, in the case of the Companies, are initial periods ranging from approximately 20 to 30 years.

Under IFRS, interest on leasehold land is accounted for as an operating lease. A payment made on entering into or acquiring a leasehold that is accounted for as an operating lease represents prepaid lease payments that are amortized over the lease term in accordance with the pattern of benefits provided.

In applying IFRS during 2008, the Companies recognized landrights amortization expense of (Rp15,725) as a decrease to profit for the year. The Company also recognized accumulated amortization of landrights amounting to Rp87,001 and Rp102,727 as of January 1 and December 31, 2008, respectively.

d2. Goodwill

Goodwill

Under Indonesian GAAP, goodwill is amortized using the straight-line method over its estimated useful life.

Under IFRS, based on the business combinations exemption provided under IFRS 1, the carrying amount of goodwill at January 1, 2008 is the carrying amount under Indonesian GAAP at that date. Subsequent to this date, goodwill is not amortized but subject to impairment review at the date of transition and impairment reviews required under IAS 36, *"Impairment of Assets"*, subsequent to the date of transition. The amortization of goodwill in 2008 amounting to Rp227,317 under Indonesian GAAP is therefore reversed under IFRS.

d3. Revenue Recognition

Activation and Installation Fees

Under Indonesian GAAP, revenue from activation and installation fees is recognized as income at the time the connection takes place (for post-paid service) or at the time of activation of starter packs by customers (for prepaid service).

Under IFRS, revenue from activation and installation fees should be deferred and amortized over the estimated term of the customer relationship for each service contract.

In applying IFRS during 2008, the Companies recognized the effect of deferral and amortization of service connection fees amounting to Rp48,920 as of January 1, 2008 and Rp44,470 as of December 31, 2008.

d4. Deferred Income Tax

During 2008, the reconciliation of deferred tax pertaining to the tax effects of Indonesian GAAP and IFRS reconciliation adjustments as discussed above shows a decrease to profit for the year amounting to Rp57,574.

The adjustments to deferred tax assets and liabilities are as follows:

January 1, 2008	
Deferred tax liabilities—net in accordance with Indonesian GAAP	1,482,221
IFRS adjustments	
Decrease due to:	
Deferred activation and installation fees—net in the Company	(12,838)
Changes in share of net income of Lintasarta	(707)
Total adjustments	(13,545)
Deferred tax liabilities—net in accordance with IFRS	1,468,676
December 31, 2008	
Deferred tax liabilities—net in accordance with Indonesian GAAP	1,305,185
IFRS adjustments	
Increase (decrease) due to:	
Reversal of goodwill amortization in the Company	56,829
Deferred activation and installation fees—net in the Company	(10,153)
Changes in share of net income of Lintasarta	(2,186)
Net adjustments	44,490
Deferred tax liabilities—net in accordance with IFRS	1,349,675

January 1, 2008	
Deferred tax assets—net in accordance with Indonesian GAAP	87,118
IFRS adjustments	
Deferred activation and installation fees—net in Lintasarta	1,838
Deferred tax assets—net in accordance with IFRS	88,956
December 31, 2008	
Deferred tax assets—net in accordance with Indonesian GAAP	68,445
IFRS adjustments	
Deferred activation and installation fees—net in Lintasarta	2,299
Deferred tax assets—net in accordance with IFRS	70,744

d5. Unappropriated Retained Earnings

Reconciliation of consolidated unappropriated retained earnings under Indonesian GAAP and IFRS:

January 1, 2008	
Unappropriated retained earnings in accordance with Indonesian GAAP	13,964,503
IFRS adjustments	
Increase (decrease) due to:	
Deferred income tax effect of IFRS adjustments	15,383
Non-controlling interest	2,576
Amortization of landrights	(87,001)
Deferred activation and installation fees—net	(48,920)
Net adjustments	(117,962)
Unappropriated retained earnings in accordance with IFRS	13,846,541
December 31, 2008	
Unappropriated retained earnings in accordance with Indonesian GAAP	14,801,568
IFRS adjustments	
Increase (decrease) due to:	
Reversal of goodwill amortization	227,317
Non-controlling interest	3,341
Amortization of landrights	(102,727)
Deferred activation and installation fees—net	(44,470)
Deferred income tax effect of IFRS adjustments	(42,191)
Net adjustments	41,270
Unappropriated retained earnings in accordance with IFRS	14,842,838

e. Reclassifications

Certain accounts were reclassified to conform with IFRS presentation requirements. The following items discuss the significant reclassifications:

- Under Indonesian GAAP, non-controlling interests are presented outside of equity on the consolidated statements of financial position, whereas, under IFRS, non-controlling interests are presented as part of equity.
- Under Indonesian GAAP, landrights are presented as part of property and equipment account in the consolidated statements of financial position, whereas, under IFRS, landrights are presented as prepaid landrights lease under non-current assets.
- Under Indonesian GAAP, certain fixed telecommunication revenues related to international interconnection are presented on a net basis, whereas, under IFRS, such revenues are presented on a gross basis.
- A different presentation format was used for the consolidated statements of comprehensive income as a result of adoption of IAS 1 (Revised), which introduces the use of a statement of comprehensive income (Note 2f). Non-owner changes in equity during the year such as foreign currency translation and equity changes in associated companies/subsidiaries, which are shown in the consolidated statement of changes in stockholders' equity under Indonesian GAAP and IFRS, are now presented under other comprehensive income in the consolidated statements of comprehensive income. Under IFRS, the statements of changes in stockholders' equity include only details of transactions with owners, with non-owner changes in equity presented in a reconciliation of each component of equity.
- The 3G Upfront Fee is reclassified from Goodwill and Other Intangible Assets to Long-term Prepaid Licenses for the non-current portion and Prepaid Expenses for the current portion. The related amortization is reclassified from Depreciation and Amortization to Cost of Services. The reclassification is made since the 3G Upfront Fee is viewed as one arrangement with the 3G Annual Frequency Fee under Operating Lease Accounting.
- Under Indonesian GAAP, prepaid taxes and taxes payable consist of receivable and payable related to Corporate Income Tax, Value Added Tax and Other Income Tax. Withholding tax payable on interest expense for Guaranteed Notes 2010 and 2012 is recorded under Accrued Expenses.

  Under IFRS, prepaid taxes and taxes payable include only domestic and foreign taxes which are based on taxable profits and withholding taxes, which are payable by a subsidiary, associate or joint venture on distributions to the reporting entity. All other taxes receivable or payable are recorded under other current assets or other current liabilities.
- Certain financial assets and financial liabilities have been reclassified from Other Current and Non-current Assets and Other Current and Non-current Liabilities, to Other Current and Non-current Financial Assets and Other Current and Non-current Financial Liabilities.
- Under Indonesian GAAP, the amounts of tax principal and penalty imposed through a corporate income tax assessment letter must be charged as other expenses in the current year statement of income, unless an objection letter or appeal has been filed, in which case recognition shall be deferred.

Under IFRS, any adjustments of corporate income taxes recognized in the year for current tax of prior year are included as component of income tax expense.

f. Adoption of New and Revised Accounting Standards

Standards Effective in 2009

Concurrent with the Company's first-time adoption of IFRS, the Companies also adopted the following new and amended IFRS, IAS, and IFRIC Interpretations that became effective in 2009.

- ***IFRS 2 (Amendment), "Share-based Payment—Vesting Conditions and Cancellations"***. The amendments clarify the definition of vesting conditions for the purposes of IFRS 2, introduce the concept of 'non-vesting' conditions, and clarify the accounting treatment for cancellations. These amendments did not have an impact on the financial position or performance of the Companies.

- ***IFRS 7 (Amendment), "Financial Instruments: Disclosures".*** The amended standard requires additional disclosures about fair value measurement and liquidity risk. Fair value measurements related to items recorded at fair value are to be disclosed by source of inputs using a three level fair value hierarchy, by class, for all financial instruments recognized at fair value. In addition, a reconciliation between the beginning and ending balance for level 3 fair value measurements is now required, as well as significant transfers between levels in the fair value hierarchy. The amendments also clarify the requirements for liquidity risk disclosures with respect to derivative transactions and assets used for liquidity management. The Companies have elected not to provide comparative information for these expanded disclosures in the current year based on the transitional provisions provided by the standard.

- ***IFRS 8, "Operating Segments".*** This standard, which replaces IAS 14, adopts a full management approach in identifying, measuring and disclosing the results of an entity's operating segments. The information required to be reported is similar to what management uses internally for evaluating the performance of operating segments and allocating resources to those segments. In cases where such information is different from that required to be reported in the consolidated statement of financial position and consolidated statements of comprehensive income, the entity needs to provide explanations and reconciliations of the differences. The Company concluded that the operating segments determined in accordance with IFRS 8 are the same as the business segments previously identified. Additional disclosures required by the new standard are shown in Note 31.

- ***IAS 1 (Revised), "Presentation of Financial Statements".*** The revised standard separates owner and non-owner changes in equity. The statement of changes in equity includes only details of transactions with owners, with non-owner changes in equity presented in a reconciliation of each component of equity. In addition, the standard introduces the statement of comprehensive income: it presents all items of recognized income and expense, either in one single statement, or in two linked statements. The Company has elected to present one single statement.

- ***IAS 23 (Revised), "Borrowing Costs".*** This revised standard eliminates the option of expensing all borrowing costs and requires borrowing costs to be capitalized if they are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets as part of the cost of those

assets. This change has had no impact on the consolidated financial statements because it has always been the Companies' accounting policy to capitalize borrowing costs incurred on qualifying assets.

- ***IAS 32 and IAS 1 (Amendment), "Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation".*** These standards have been amended to allow a limited scope exception for puttable financial instruments to be classified as equity if they fulfil a number of specified criteria. The adoption of these amendments did not have any impact on the financial position or the performance of the Companies.
- ***IFRIC 9, "Reassessment of Embedded Derivatives" and IAS 39, "Recognition and Measurement".*** This amendment to IFRIC 9 requires an entity to assess whether an embedded derivative must be separated from a host contract when the entity reclassifies a hybrid financial asset out of the fair value through profit or loss category. This assessment is to be made based on circumstances that existed on the later of the date the entity first became a party to the contract and the date of any contract amendments that significantly change the cash flows of the contract. IAS 39 now states that if an embedded derivative cannot be reliably measured, the entire hybrid instrument must remain classified as at fair value through profit or loss. The adoption of these amendments did not have any impact on the financial position or the performance of the Companies.
- ***IFRIC 13, "Customer Loyalty Programmes".*** IFRIC 13 requires customer loyalty credits to be accounted for as a separate component of the sales transaction in which they are granted. A portion of the fair value of the consideration received is allocated to the award credits and deferred. This is then recognized as revenue over the period that the award credits are redeemed. Information on the Company's loyalty program is disclosed in Note 2.g5.1.
- ***IFRIC 15, "Agreements for the Construction of Real Estate".*** This Interpretation addresses how entities should determine whether an agreement for the construction of real estate is within the scope of IAS 11, *"Construction Contracts"* or IAS 18, *"Revenue"* and when revenue from the construction of real estate should be recognized. This Interpretation has no impact on the Companies as they are not involved in construction of any real estate.
- ***IFRIC 16, "Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation".*** This interpretation is to be applied prospectively. IFRIC 16 provides guidance on the accounting for a hedge of a net investment. As such it provides guidance on (a) identifying the foreign currency risks that qualify for hedge accounting in the hedge of a net investment, where within the group the hedging instruments can be held in the hedge of a net investment and (b) how an entity should determine the amount of foreign currency gain or loss, relating to both the net investment and the hedging instrument, to be recycled on disposal of the net investment. This Interpretation has no impact on the financial position or the performance of the Companies.
- ***IFRIC 18, "Transfers of Assets from Customers".*** Effective for transfers of assets from customers received on or after July 1 2009, this interpretation addresses the accounting by recipients for transfers of property, plant and equipment from 'customers' and concludes that when the item of property, plant and equipment transferred meets the definition of an asset from the perspective of the recipient, the recipient should recognize the asset at its fair value on the date of the transfer, with the credit recognized as revenue in accordance with IAS 18, *"Revenue"*. This

Interpretation has no impact on the Companies as they do not have any transactions involving transfer of assets from their customers.

2008 Improvements to IFRS

In May 2008, the IASB issued its first omnibus of amendments to its standards, primarily with a view to removing inconsistencies and clarifying wording. There are separate transitional provisions for each standard. The adoption of the following amendments did not have an impact on the Companies' financial position or performance but on their accounting policies only.

- ***IAS 1, "Presentation of Financial Statements"***: Assets and liabilities classified as held for trading in accordance with IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement* are not automatically classified as current in the statement of financial position. The Companies analyzed whether the expected period of realization of financial assets and liabilities differed from the classification of the instrument. This did not result in any reclassification of financial instruments between current and non-current in the consolidated statements of financial position.
- ***IAS 16, "Property, Plant and Equipment"***: This standard replaced the term "net selling price" with "fair value less costs to sell". The Companies amended their accounting policy accordingly, which did not result in any change in the financial position.
- ***IAS 20, "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance"***: Loans granted with no or low interest will not be exempt from the requirement to impute interest. Interest is to be imputed on loans granted with below-market interest rates. This standard has no impact on the Companies.
- ***IAS 23, "Borrowing Costs"*:** The definition of borrowing costs is revised to consolidate the two types of items (i.e., amortization of discounts/premiums and ancillary costs) that are considered components of 'borrowing costs' into one—the interest expense calculated using the effective interest rate method calculated in accordance with IAS 39. The Companies amended their accounting policy accordingly, which did not result in any change in the financial position.
- ***IAS 28, "Investment in Associates"*:** If an associate is accounted for at fair value in accordance with IAS 39, only the requirement of IAS 28 to disclose the nature and extent of any significant restrictions on the ability of the associate to transfer funds to the entity in the form of cash or repayment of loans applies. This amendment has no impact on the Companies as they do not account for their investments in associates at fair value in accordance with IAS 39.

  An investment in an associate is a single asset for the purpose of conducting the impairment test. Therefore, any impairment test is not separately allocated to the goodwill included in the investment balance. This amendment has no impact on the Companies because this policy has already been applied.
- ***IAS 31, "Interest in Joint Ventures"*:** If a joint venture is accounted for at fair value, in accordance with IAS 39, only the requirements of IAS 31 to disclose the commitments of the venturer and the joint venture, as well as the summary financial information about the assets, liabilities, income and expense, will apply. This amendment has no impact on the Companies because they do not have any interest in joint ventures.

- ***IAS 36, "Impairment of Assets"*:** When discounted cash flows are used to estimate 'fair value less cost to sell' additional disclosure is required about the discount rate, consistent with disclosures required when the discounted cash flows are used to estimate 'value in use'. This amendment has no immediate impact on the consolidated financial statements of the Companies because the recoverable amount of their cash generating units is currently estimated using 'value in use'.
- ***IAS 38, "Intangible Assets"*:** Expenditure on advertising and promotional activities is recognized as an expense when the Company either has the right to access the goods or has received the service. This amendment has no impact on the financial position and the performance of the Companies.

  The Companies reassessed the amortization method of their intangible assets and concluded that the straight-line method is still appropriate.

Standards and Interpretations in issue not yet adopted

The Companies will adopt the following accounting pronouncements when they become effective. Except as otherwise indicated, the Companies do not expect the adoption of these accounting pronouncements to have significant impact on the consolidated financial statements.

- ***IFRS 1 (Amendment), "First Time Adoption of IFRS",*** *and* ***IAS 27, "Consolidated and Separate Financial Statements".*** The amendments deal with the measurement of the cost of investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associates when adopting IFRS for the first time and with the recognition of dividend income from subsidiaries in a parent's separate financial statements. In prior years, in the absence of specific requirements in IFRS, increases in interests in existing subsidiaries were treated in the same manner as the acquisition of subsidiaries, with goodwill or a bargain purchase gain being recognized where appropriate; for decreases in interests in existing subsidiaries that did not involve a loss of control, the difference between the consideration received and the carrying amount of the share of net assets disposed of was recognized in profit or loss. Under the revised IAS 27, all such increases or decreases are dealt with in equity, with no impact on goodwill or profit or loss.

  When control of a subsidiary is lost as a result of a transaction, event or other circumstance, the revised Standard requires that the entity derecognize all assets, liabilities and non-controlling interests at their carrying amount. Any retained interest in the former subsidiary is recognized at its fair value at the date control is lost, with the gain or loss arising recognized in profit or loss.
- ***IFRS 1 (Amendment), "First Time Adoption of IFRS—Additional Exemptions for First-time Adopters".*** These amendments relate to oil and gas assets and determining whether an arrangement contains a lease. The new exemption applies to a first-time adopter who has made an assessment of whether an arrangement contains a lease under its previous GAAP that is consistent with IFRIC 4, but at a date other than that required under IFRIC 4. With the exemption, a first-time adopter will not be required to reassess its determination of whether an arrangement contains a lease under previous GAAP if that previous determination would have given the same outcome as that resulting from the application of IAS 17, *"Leases"* and IFRIC 4.

The amendment also added a paragraph that permits a first-time adopter that has previously used this basis of accounting to elect to measure the related oil and gas assets at the date of transition to IFRS on the following basis:

(a) exploration and evaluation assets, at amounts determined under the entity's previous GAAP; and

(b) oil and gas assets in the development or production phases, at the amount determined for the cost centre under the entity's previous GAAP. The entity shall allocate this amount to the cost centre's underlying assets pro rata using reserve volumes or reserve values as of that date.

- ***IFRS 2 (Amendment), "Share-based Payment—Group Cash-settled, Share-based Payment Transactions".*** This amendment to IFRS 2 clarifies the classification of share-based payment transactions for both the entity that receives the goods or services, and the entity that settles the share-based payment transaction. The entity receiving the goods or services will recognize the transaction as an equity-settled share-based payment transaction only if:
  - the awards granted are its own equity instruments; or
  - it has no obligation to settle the transaction. In all other circumstances, the entity will measure the transaction as a cash-settled, share-based payment. Subsequent remeasurement of such equity-settled transactions will be carried out only for changes in non-market vesting conditions.
- ***IFRS 3 (Revised), "Business Combinations", and IAS 27 (Revised), "Consolidated and Separate Financial Statements".*** These revised standards superseded IFRS 3 and IAS 27, respectively, effective for periods beginning on or after July 1, 2009. The revised IFRS 3 introduces a number of changes in the accounting for business combinations that will impact the amount of goodwill recognized, the reported results in the period that an acquisition occurs, and future reported results. The revised IAS 27 requires, among others, that (a) change in ownership interests of a subsidiary (that does not result in loss of control) will be accounted for as an equity transaction and will have no impact on goodwill nor will it give rise to a gain or loss; (b) losses incurred by the subsidiary will be allocated between the controlling and non-controlling interests (previously referred to as 'minority interests'), even if the losses exceed the non-controlling equity investment in the subsidiary; and (c) on loss of control of a subsidiary, any retained interest will be remeasured to fair value and this will impact the gain or loss recognized on disposal. The changes introduced by revised IFRS 3 must be applied prospectively and will affect future acquisitions and transactions with non-controlling interests. Revised IAS 27 must be applied retrospectively, subject to certain exceptions.
- ***IFRS 9, "Financial Instruments".*** This standard specifies how an entity should classify and measure financial assets, including some hybrid contracts to be: (a) classified on the basis of the entity's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets (b) initially measured at fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, particular transaction costs (c) subsequently measured at amortized cost or fair value.

- ***IAS 39 (Amendment), "Financial Instruments: Recognition and Measurement—Eligible Hedged Items"***. Amendment to IAS 39 is effective for periods beginning on or after July 1, 2009, which addresses only the designation of a one-sided risk in a hedged item, and the designation of inflation as a hedged risk or portion in particular situations. The amendment clarifies that an entity is permitted to designate a portion of the fair value changes or cash flow variability of a financial instrument as a hedged item.
- ***IFRIC 17, "Distributions of Non-cash Assets to Owners".*** This Interpretation provides guidance on the appropriate accounting treatment when an entity distributes assets other than cash as dividends to its shareholders.
- ***IFRIC 19, "Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments".*** The Interpretation provides guidance on the appropriate accounting treatment when equity instruments issued to a creditor to extinguish a financial liability in accordance with paragraph 41 of IAS 39. As a result, the financial liability is derecognized and the equity instruments issued are treated as consideration paid to extinguish that financial liability.
- ***IAS 24 (Revised 2009), "Related Party Disclosures".*** The revised standard simplifies the identification of related party relationships and re-balance the extent of disclosures of transactions between related parties based on the costs to preparers and the benefits to users in having this information available in financial statements.

2009 Improvements to IFRSs

These improvements issued by IASB in April 2009 are expected to lead a number of changes in the detail of the Companies' accounting policies—some of which are changes in terminology only, and some of which are substantive but are not expected to have a material effect on the financial position and performance of the Companies. These amendments are effective for annual periods beginning on or after July 1, 2009, except for amendments to IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36 and IAS 39 which are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2010. The amendment to IAS 18 was effective from issue date of the standard.

g. Significant Accounting Policies and Practices

g1. Business combinations and goodwill

Business combinations are accounted for using the purchase method. The cost of an acquisition is measured as the fair value of the assets given, equity instruments issued and liabilities incurred or assumed at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at fair values at the date of acquisition, irrespective of the extent of any non-controlling interest.

Goodwill is initially measured at cost being the excess of the cost of the business combination over the Companies' share in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities. If the cost of acquisition is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized directly in the statement of comprehensive income.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date,

allocated to each of the Company's cash-generating units that are expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

Where goodwill forms part of a cash-generating unit and part of the operation within that unit is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative value of the operation disposed of and the portion of the cash-generating unit retained.

g2. Intangible assets

At the time of acquisition of a subsidiary, any intangible assets recognized are amortized using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Years
Customer base	
—Prepaid	6
—Post-paid	5
Spectrum license	5
Brand	8

Software that is not an integral part of the related hardware is amortized using the straight-line method over 5 years.

Intangible assets created within the business are not capitalized and expenditures are charged against operations in the year in which the expenditures are incurred.

g3. Investments in Associated Companies

Investments in equity wherein the Companies have significant influence over the investments are accounted for under the equity method, whereby the investment cost is increased or decreased by the Companies' share of the net earnings or losses of the investees since the date of acquisition and decreased by dividends received.

Where there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Companies recognize their share of any changes and disclose this, when applicable, in the statements of changes in equity in the account "Difference in Transactions of Equity Changes in Associated Companies/ Subsidiaries", net of applicable income tax, after adjusting the Companies' equity in the investee to conform with their accounting policies.

The Companies' share of net income (loss) of associated companies is shown in the statements of comprehensive income. This is the income attributable to owners of the associated companies and therefore is income after tax.

The financial statements of the associated companies are prepared for the same reporting period as the Companies.

g4. Foreign currency translation

Transactions in foreign currencies are initially recorded at the functional currency rate prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the functional currency spot rate of exchange prevailing at the end of the reporting period. All differences are taken to the statements of comprehensive income. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined.

The functional currency and presentation currency of IFB and IIFB are in Euro, while ISP is in U.S. dollar. As at the end of the reporting period, the assets and liabilities of these subsidiaries are translated into the presentation currency of the Company at the spot rate which is the exchange rate prevailing at the end of the reporting period and their income statements are translated at the average rate during the period. The resulting differences arising from the translations of the financial statements of IFB, IIFB and ISP are included in other comprehensive income and presented as part of "Difference in Foreign Currency Translation" in the consolidated statements of changes in stockholders' equity.

g5. Revenue recognition and expense recognition

g5.1 Service Revenues

Cellular

Cellular revenues arising from airtime and roaming calls are recognized based on the duration of successful calls made through the Company's cellular network.

For post-paid subscribers, monthly service fees are recognized as the service is rendered.

For prepaid subscribers, the activation component of starter package sales is recognized as revenue over the estimated life of customer relationship. Sales of initial/reload vouchers are recorded as deferred revenue and recognized as revenue upon usage of the airtime or upon expiration of the airtime.

Sales of wireless broadband modems and cellular handsets are recognized upon delivery to the customers.

Revenues from wireless broadband data communications are recognized based on the duration of usage or fixed monthly charges depending on the arrangement with the customers.

Cellular revenues are presented on a net basis, after compensation to value added service providers.

Customer Loyalty Program

The Company operates a customer loyalty program called "Poin Plus Plus", which allows customers to accumulate points for every reload and payment by the Company's prepaid and post-paid subscribers, respectively. The points can then be redeemed for free telecommunication and non-telecommunication products, subject to a minimum number of points being obtained.

Customer loyalty credits are accounted for as a separate component of the sales transaction in which they are granted. The consideration received at the time of reload and payment by the Company's prepaid

and post-paid subscribers, respectively, is allocated between the cellular products sold and the points issued, with the consideration allocated to the points equal to their fair value. Fair value of the points issued is deferred and recognized as revenue when the points are redeemed or when the redemption period expires.

MIDI

- Internet

  Revenues arising from installation service are deferred and recognized over the expected customer relationship. Revenues from monthly service fees are recognized as the services are rendered. Revenues from usage charges are recognized monthly based on the duration of internet usage or based on the fixed amount of charges depending on the arrangement with the customers.

- Frame Net, World Link and Direct Link

  Revenues arising from installation service, which represents the installation of equipment used for network connection purposes in the customers' premises, are deferred and recognized over the expected customer relationship. Revenues from monthly service fees are recognized as the services are rendered.

- Other MIDI services

  Revenues from other MIDI services are recognized when the services are rendered.

Fixed Telecommunication

- International Calls

  Revenues from outgoing international call traffic are recognized on the basis of the actual recorded traffic for the period and are reported on a net basis, after allocations to overseas international carriers.

- Fixed Wireless

  Fixed wireless revenues arising from usage charges are recognized based on the duration of successful calls made through the Company's fixed network.

  For post-paid subscribers, activation fees are recognized as deferred revenue upon activation of new subscribers in the Company's fixed network while monthly service fees are recognized as the services are rendered.

  For prepaid subscribers, the activation component of starter package sales is deferred and recognized as revenue over the estimated life of customer relationship.

  Sale of initial/reload vouchers is recorded as deferred revenue and recognized as income upon usage of the airtime or upon expiration of the airtime.

- Fixed Line

  Revenues from fixed line installations are deferred and recognized as revenue over the estimated life of customer relationship. Revenues from usage charges are recognized based on the duration of successful calls made through the Company's fixed network.

Interconnection Revenue

Revenues from network interconnection with other domestic and international telecommunications carriers are recognized monthly on the basis of the actual recorded traffic for the month.

The interconnection expenses/charges (Note 21) are accounted for as operating expenses in the period these are incurred.

g5.2 Interest Income

Interest income is recognized as it accrues on a time proportion basis taking into account the principal amount outstanding and the effective interest rate. Majority of interest income represents interest earned from cash and cash equivalents.

g5.3 Dividends

Dividend income is recognized when the Company's right to receive the payment is established.

g5.4 Rental income

Satellite Operating Lease

Revenues are recognized on the straight-line basis over the lease term.

g5.5 Expenses

Expenses are recognized when incurred.

g6. Income Tax

Deferred income tax

Deferred income tax is provided using the balance sheet liability method on all temporary differences at the end of the reporting period between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

Deferred income tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences except: (1) when the deferred income tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss and (2) with respect to taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is possible that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future. Deferred income tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carryforward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and carryforward of unused tax losses can be utilized except: (1) when the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss and (2) with respect to deductible

temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

g7. Pensions and other post-employment benefits

Funded Plans

The Companies have defined benefit pension plans which require contributions to be made to separately administered funds. Pension costs under the Companies' defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, expected return on plan assets and annual rate of increase in compensation. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceed 10% of the present value of the defined benefit obligation or fair value of plan assets, whichever is greater, at that date. These gains or losses in excess of the 10% corridor are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

The past service costs are recognized as an expense on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. If the benefits have already vested, immediately following the introduction of or changes to a pension plan, past service costs are recognized immediately.

The defined benefit asset or liability comprises the present value of the defined benefit obligation less past service cost not yet recognized and less the fair value of plan assets out of which the obligations are to be settled directly. The value of any asset is restricted to the sum of any cumulative unrecognized net actuarial losses, past service cost not yet recognized and the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in the future contributions to the plan.

Unfunded Plans

The Companies also provided other post-employment benefits to their employees, such as benefits under Labor Law No.13/2003 ("Labor Law") and post-retirement healthcare benefits. These benefits are unfunded. The accounting treatment for the unfunded plans is the same as that of the funded plans above.

g8. Financial assets

Initial recognition

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets, as appropriate. The Companies determine the classification of their financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate the designation of such assets at each financial year-end.

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Companies commit to purchase or sell the assets.

The Companies' financial assets include cash and time deposits, trade and other receivables, quoted and unquoted financial instruments, derivative financial instruments and other current and non-current financial assets.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial assets at fair value through profit or loss

  Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

  Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchase in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit and loss are carried in the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized in the statements of comprehensive income.

  Derivatives embedded in host contracts are accounted for as separate derivatives when their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not carried at fair value. These embedded derivatives are measured at fair value with gains or losses arising from changes in fair value recognized in the statements of comprehensive income. Reassessment only occurs if there is a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required.

- Loans and receivables

  Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost, less impairment in value. Amortization is determined using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

  The Companies' cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, other current financial assets, long-term receivables and other non-current assets are included in this category.

  Time deposits with original maturities of three months or less at the time of placement are considered as "Cash Equivalents".

  Cash in banks and time deposits which are pledged as collateral for long-term debts and bank guarantees and time deposits with original maturities of more than three months are not classified as part of "Cash and Cash Equivalents". These are presented as part of either "Other Current Financial Assets" or "Other Non-current Financial Assets".

- Held-to-maturity (HTM) investments

  Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Companies have the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the

effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The Companies did not have any held-to-maturity investments during the years ended December 31, 2008 and 2009.

- Available-for-sale (AFS) financial assets

  AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in other comprehensive income until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

  The Companies have the following investments classified as AFS:

  - Investments in shares of stock that do not have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20%, and other long-term investments are carried at cost.
  - Investments in equity shares that have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% and which are classified as available-for-sale, are recorded at fair value.

g9. Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities are categorized as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Companies determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Companies' financial liabilities include trade and other payables, procurement payable, accrued expenses, loans and bonds payable, due to related parties and derivative financial instruments and other current and non-current financial liabilities.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss

  Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

  Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchase in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

- Loans and borrowings

  After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

  Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

g10. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

g11. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business on the end of reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis or other valuation models.

Credit risk adjustment

The Company adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

g12. Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

g13. Impairment of financial assets

The Companies assess at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

- *Financial assets carried at amortized cost*

  For loans and receivables carried at amortized cost, the Companies first assess whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Companies determine

that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, they include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assess them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the consolidated statements of comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Companies. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

- *AFS financial assets*

  In the case of equity investments classified as an AFS financial asset, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost.

  Where there is evidence of impairment, the cumulative loss—measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in profit or loss—is reclassified from equity to profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through the profit or loss; increases in their fair value after impairment are recognized in other comprehensive income.

In the case of debt instruments classified as available-for-sale, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Future interest income is based on the reduced carrying amount and is accrued based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Such accrual is recorded as part of "Interest income" account in the consolidated statements of comprehensive income. If, in a subsequent year, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.

g14. Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Companies have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation

to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Companies have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Companies have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

When the Companies' continuing involvement takes the form of guaranteeing the transferred asset, the extent of the Companies' continuing involvement is the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of the consideration received that the Companies could be required to repay.

When the Companies' continuing involvement takes the form of a written or purchased option (or both) on the transferred asset, the extent of the Companies' continuing involvement is the amount of the transferred asset that the Companies may repurchase. However, in case of a written put option on an asset that is measured at fair value, the extent of the Companies' continuing involvement is limited to the lower of the fair value of the transferred asset and the option exercise price.

When the Companies' continuing involvement takes the form of a cash-settled option or similar provision on the transferred asset, the extent of the Companies' continuing involvement is measured in the same way as that which results from non-cash settled options.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

g15. Derivative financial instruments

The Company enters into and engages in cross currency swap, interest rate swap and other permitted instruments, if considered necessary, for the purpose of managing its foreign exchange and interest rate exposures emanating from the Company's loans and bonds payable in foreign currencies. These derivative financial instruments are not designated in a qualifying hedge relationship and are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

Any gains or losses arising from changes in fair value on derivatives during the year that do not qualify for hedge accounting are taken directly to the profit or loss.

Derivative assets and liabilities are presented under current assets and liabilities, respectively. Embedded derivative is presented with the host contract on the balance sheet which represents an appropriate presentation of overall future cash flows for the instrument taken as a whole.

The net changes in fair value of derivative instruments, swap cost or income, termination cost or income, and settlement of derivative instruments are charged or credited to "Gain (Loss) on Change in Fair Value of Derivatives—Net", which is presented under Other Income (Expenses) in the consolidated statements of comprehensive income.

g16. Property and equipment

Property and equipment are stated at cost (which includes capitalization of certain borrowing costs incurred during the construction phase), less accumulated depreciation and impairment in value. Depreciation of property and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognized in profit or loss in the year the asset is derecognized.

The estimated useful lives of the assets are as follows.

	Years
Exchange and network assets	3 to 15
Subscribers' apparatus and other equipment	3 to 15
Buildings and building & leasehold improvements	20 and 3 to 15

Personnel costs which are directly related to the development, construction and installation of property and equipment are capitalized as part of the cost of such assets.

The cost of maintenance and repairs is charged to income as incurred. Significant renewals and betterments which enhance the asset condition on its initial performance, are capitalized. When properties are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts, and any resulting gains or losses are recognized in profit or loss for the year.

Properties under construction and installation are stated at cost. This includes cost of construction, equipment, capitalizable borrowing costs and other direct costs. Property under construction is not depreciated until such time that the relevant asset is completed and available for its intended use.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of property and equipment are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

g17. Borrowing Costs

Borrowing costs are capitalized if they are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. Capitalization of borrowing costs commences when the activities necessary to prepare the asset for its intended use are in progress and expenditures and borrowing costs are being incurred. Borrowing costs are capitalized until the asset is available for its intended use. If the resulting carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognized. Borrowing costs include interest charges and other costs incurred in connection with the borrowing of funds, as well as exchange differences arising from foreign currency borrowings used to finance these projects, to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs (estimated quarterly by capping the exchange differences taken as borrowing costs at the amount of borrowing costs on the functional currency equivalent borrowings).

g18. Asset retirement obligations

The Companies are legally required under various lease agreements to dismantle the installation in leased sites and restore such sites to their original condition at the end of the lease contract term. The Companies recognize a liability measured at the present value of the estimated costs of these obligations and capitalize such costs as part of the related item of property and equipment.

The amount of asset retirement obligations is accreted, and such accretion is recognized as interest expense.

g19. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset.

The Companies, as lessees, classify a lease as a finance lease if it transfers to them substantially all the risks and rewards incidental to ownership. All other leases are classified as operating leases.

A finance lease gives rise to a depreciation expense for the asset, as well as an interest expense for each year. Finance charges are charged directly to current operations. The depreciation policy for leased assets which is based on straight-line method is consistent with that for depreciable assets that are directly owned.

Capitalized leased assets are depreciated using the straight-line method over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Companies will obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term.

In 2006, the Company was granted a license to use 2.1 GHz radio frequency spectrum by the Ministry of Communications and Information and Technology ("MOCIT"). The upfront fee is recorded as Long-term Prepaid License for the non-current portion and Prepaid Expenses for the current portion, and amortized over the 10-year license term using the straight-line method.

In 2009, the Company received additional 3G license and IMM was granted an operating license for "Packet Switched" local telecommunication network using 2.3 GHz radio frequency spectrum of Broadband Wireless Access ("BWA"). The Company and IMM were obliged to, among others, pay upfront fee and annual radio frequency fee over the next 10 years (Note 30d).

Management believes, as supported by written confirmation from the DGPT, that the 3G and BWA licenses may be returned at any time without any financial obligation to pay the remaining outstanding annual radio frequency fees (i.e., the license arrangement does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership). Accordingly, the Company and IMM recognize the annual radio frequency fee as operating lease expense amortized using the straight-line method over the term of the rights to operate the 3G and BWA licenses. Management evaluates its plan to continue to use the licenses on an annual basis.

g20. Inventories

Inventories, which mainly consist of SIM cards, starter packs and pulse reload vouchers, broadband modems and cellular handsets, are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

g21. Prepaid Expenses

Prepaid expenses, which mainly consist of frequency fee, rentals, 3G and BWA license fees and upfront premium for cross currency swap (Note 29p), are expensed as the related asset is utilized. The non-current portion of prepaid expenses is shown as part of "Other non-current assets".

g22. Impairment of non-financial assets

Property and equipment

The Companies assess at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Companies make an estimate of the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of such asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell or its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent from those of other assets or groups of assets in which case it is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Where the carrying amount of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, the asset or cash-generating unit is considered impaired and is written down to its recoverable amount. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining the fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

For assets, excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Companies make an estimate of the recoverable amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation and amortization, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the consolidated statements of comprehensive income. After such reversal, the depreciation and amortization charges are adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining economic useful life.

The following criteria are also applied in assessing impairment of specific assets:

Goodwill and other intangible assets

Goodwill is reviewed for impairment annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of the cash-generating unit or group of cash-generating units to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-generating unit or group of cash-generating units is less than the carrying amount of the cash-generating unit or group of cash-generating units to which goodwill has been allocated, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

Investments in associates

The Companies determine at each balance sheet date whether there is any objective evidence that their investments in associates are impaired. If this is the case, the Companies calculate the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investments in associates and its carrying amount. The amount of impairment loss should be recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

g23. Provisions

Provisions are recognized when the Companies have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Companies expect some or all of provisions to be reimbursed, for example under an insurance contract, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to any provision is presented in profit or loss net of any reimbursement. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, where appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provisions due to the passage of time is recognized as financing cost.

g24. Operating segment

An operating segment is a component of entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity), whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker (Board of Directors) to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available.

g25. Basic and diluted earnings per share/ADS

Basic earnings per share is computed by dividing net income for the year attributable to ordinary owners of the Company by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the year (Note 27).

Basic earnings per ADS is computed by multiplying basic earnings per share by 50, which is equal to the number of shares per ADS.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income for the year attributable to ordinary owners of the Company (after adjusting profit or loss effect related to dilutive potential ordinary shares) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on conversion of all potentially dilutive ordinary shares.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Companies' consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

- *Determination of functional currency*

  The functional currencies of the entities under the Company are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

- *Leases*

  The Companies have various lease agreements as lessors in respect of certain properties and equipment. The Companies evaluate whether significant risks and rewards of ownership of the leased properties are transferred to the lessee or retained by the Companies based on *IAS 17, "Leases"*, which requires the Companies to make judgments and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of leased properties.

- *Determination of fair values of financial assets and financial liabilities*

  The Companies carry certain financial assets and liabilities at fair values, which require extensive use of accounting estimates and judgments for the fair values of financial assets and liabilities. While significant components of fair value measurement are determined using verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rates, interest rates and volatility rates), the amount of changes in fair value will differ if the Companies utilize a different valuation methodology. Any change in fair value of these financial assets will directly affect the Companies' consolidated statements of financial position, statements of comprehensive income and or consolidated statements of changes in equity.

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

- *Estimating useful lives of property and equipment and intangible assets*

  The Companies estimate the useful lives of their property and equipment and intangible assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of property and equipment is based on the Companies' collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Companies' property and equipment will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

- *Goodwill and intangible assets*

  The consolidated financial statements and results of operations reflect acquired businesses after the completion of the respective acquisition. The Company accounts for the acquired businesses using the purchase method of accounting which requires extensive use of accounting estimates and judgments to allocate the purchase price to the fair market values of the acquiree's identifiable assets and liabilities at the acquisition date. Any excess in the purchase price over the estimated fair market values of the net assets acquired is recorded as goodwill in the consolidated statements of financial position. These business acquisitions have resulted in goodwill and intangible assets, which are subject to periodic impairment test and amortization, respectively. Thus, the numerous judgments made in estimating the fair market value to be assigned to the acquiree's assets and liabilities can materially affect the Company's financial performance.

- *Realizability of deferred income tax assets*

  The Companies review the carrying amounts of deferred income tax assets at the end of each reporting period and reduce these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred income tax assets to be utilized. The Companies' assessment on the recognition of deferred income tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting periods. This forecast is based on the Companies' past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies.

- *Estimating allowance for impairment losses on receivables*

  The Companies estimate the allowance for impairment losses related to their trade receivables that are specifically identified as doubtful for collection. The level of allowance is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Companies use judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Companies' relationship with the customers and the customers' credit status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Companies' receivables to amounts that they expect to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affect the amounts estimated.

  In addition to specific allowance against individually significant receivables, the Companies also assess a collective impairment allowance against credit exposure of their customers which are grouped based on common credit characteristic, which, although not specifically identified as requiring a specific allowance, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to customers. This collective allowance is based on historical loss experience using various factors such as historical performance of the customers within the collective group, deterioration in the markets in which the customers operate, and identified structural weaknesses or deterioration in the cash flows of customers.

- *Estimation of pension cost and other employee benefits*

  The determination of the Companies' obligation and cost for pension and other employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions include, among other things, discount rates, expected returns on plan assets and rates of compensation increases. Actual results that differ from the Companies' assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the higher of the present value of defined benefit obligation and the fair value of plan assets at that date.

  While the Companies believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Companies' actual experience or significant changes in their assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other employee benefits.

- *Asset retirement obligations*

  Asset retirement obligations are recognized in the period in which they are incurred if a reasonable estimate of fair value can be made. This requires an estimation of the cost to restore/dismantle on a per location basis and is based on the best estimate of the expenditure required to settle the obligation at the future restoration/dismantlement date, discounted at the end of reporting period using a pre-tax rate that reflects the current market assessment of the time value of money and, where appropriate, the risk specific to the liability.

- *Impairment of non-financial assets*

  An impairment exists when the carrying value of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Companies are not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash-generating unit being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The key assumptions used to determine the recoverable amount for the different cash-generating units, are further explained in Note 8.

  The determination of future cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets, requires the Companies to make estimates and assumptions that can materially affect the consolidated financial assets. Future events could cause the Companies to conclude that property and equipment, investments and intangible assets associated with an acquired business are impaired. Any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the Companies' financial condition and results of operations.

The preparation of estimated future cash flows involves significant judgments and estimations. While the Companies believes that their assumptions are appropriate and reasonable, significant changes in the assumptions may materially affect the Companies' assessment of recoverable values and may lead to future additional impairment charges under IFRS.

- *Uncertain tax exposure*

  In certain circumstances, the Companies may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Companies apply similar considerations as they would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with IAS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.* The Companies make an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

  As of December 31, 2009, the Company is subject to tax audits for tax years 2007, 2008 and 2009.

  The Companies record interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in income tax expense account in the consolidated financial statements.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of the following:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Cash on hand (US$10 on December 31, 2008)	1,563	1,626	1,581
Cash in banks			
Related parties (Note 26) (including US$675 on January 1, 2008, US$328 on December 31, 2008 and US$4,365 on December 31, 2009)	38,291	31,509	91,783
Third parties (including US$14,141 on January 1, 2008, US$16,905 on December 31, 2008 and US$9,759 on December 31, 2009)	210,704	235,692	131,106
	250,558	268,827	224,470
Time deposits and deposits on call			
Related parties (Note 26) (including US$97,724 on January 1, 2008, US$309,079 on December 31, 2008 and US$265 on December 31, 2009)	4,916,107	4,505,596	1,976,259
Third parties (including US$95,161 on January 1, 2008, US$43,925 on December 31, 2008 and US$22,725 on December 31, 2009)	2,886,341	963,443	635,270
	7,802,448	5,469,039	2,611,529
Total	**8,053,006**	**5,737,866**	**2,835,999**

Time deposits and deposits on call denominated in rupiah earned interest at annual rates ranging from 2.25% to 11.40% on January 1, 2008, from 1.25% to 14.00% in 2008 and from 2.50% to 14.50% in 2009, while those denominated in U.S. dollar earned interest at annual rates ranging from 1.50% to 5.38% on January 1, 2008, from 0.002% to 6.00% in 2008 and from 0.001% to 6.00% in 2009.

The interest rates on time deposits and deposits on call in related parties are comparable to those offered by third parties.

5. ACCOUNTS RECEIVABLE—TRADE

This account consists of the following:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Related parties (Note 26)			
Telkom (including US$268 on January 1, 2008, US$271 on December 31, 2008 and US$75 on December 31, 2009)	38,208	32,801	31,724
Others (including US$15,850 on January 1, 2008, US$5,032 on December 31, 2008 and US$6,322 on December 31, 2009)	183,479	112,721	151,726
Total	221,687	145,522	183,450
Less allowance for impairment losses	88,342	69,444	57,538
Net	**133,345**	**76,078**	**125,912**
Third parties			
Overseas international carriers (including US$61,322 on January 1, 2008, US$81,810 on December 31, 2008 and US$98,042 on December 31, 2009)	575,998	895,820	921,595
Local companies (including US$21,211 on January 1, 2008, US$24,987 on December 31, 2008 and US$15,291 on December 31, 2009)	365,802	506,191	434,641
Post-paid subscribers of:			
Cellular	244,949	249,124	252,008
Fixed lines	22,742	28,565	12,100
Fixed wireless	14,274	11,647	14,713
Total	1,223,765	1,691,347	1,635,057
Less allowance for impairment losses	326,142	426,719	404,272
Net	**897,623**	**1,264,628**	**1,230,785**
Total	**1,030,968**	**1,340,706**	**1,356,697**

The aging schedule of the accounts receivable—trade is as follows:

Number of Months Outstanding	January 1, 2008 Amount	January 1, 2008 Percentage (%)	December 31, 2008 Amount	December 31, 2008 Percentage (%)	December 31, 2009 Amount	December 31, 2009 Percentage (%)
Related parties						
0 - 6 months	108,159	48.79	82,495	56.69	121,522	66.24
7 - 12 months	43,094	19.44	10,199	7.01	27,207	14.83
13 - 24 months	10,998	4.96	3,382	2.32	2,661	1.45
Over 24 months	59,436	26.81	49,446	33.98	32,060	17.48
Total	**221,687**	**100.00**	**145,522**	**100.00**	**183,450**	**100.00**
Third parties						
0 - 6 months	697,857	57.02	984,794	58.23	791,654	48.42
7 - 12 months	201,021	16.43	191,825	11.34	287,533	17.59
13 - 24 months	153,054	12.51	266,779	15.77	285,407	17.45
Over 24 months	171,833	14.04	247,949	14.66	270,463	16.54
Total	**1,223,765**	**100.00**	**1,691,347**	**100.00**	**1,635,057**	**100.00**

The movements in the allowance for impairment loss on accounts receivable are as follows:

	Total	Related Parties	Third Parties
December 31, 2008			
Balance at beginning of year	414,484	88,342	326,142
Provision (reversal) (Note 23)	74,281	(23,514)	97,795
Net effect of foreign exchange adjustment	42,532	6,660	35,872
Write-offs	(35,134)	(2,044)	(33,090)
Balance at end of year	496,163	69,444	426,719
Individual impairment	212,008	66,503	145,505
Collective impairment	284,155	2,941	281,214
Total	496,163	69,444	426,719
Gross amount of receivables, individually impaired, before deducting any individually assessed impairment allowance	591,363	70,901	520,462

	Total	Related Parties	Third Parties
December 31, 2009			
Balance at beginning of year	496,163	69,444	426,719
Provision (Note 23)	98,042	6,635	91,407
Net effect of foreign exchange adjustment	(29,560)	(9,143)	(20,417)
Write-offs	(101,586)	(9,398)	(92,188)
Deduction due to liquidation of SMM (Note 1b)	(1,249)	—	(1,249)
Balance at end of year	461,810	57,538	404,272
Individual impairment	162,967	52,137	110,830
Collective impairment	298,843	5,401	293,442
Total	461,810	57,538	404,272
Gross amount of receivables, individually impaired, before deducting any individually assessed impairment allowance	790,213	63,391	726,822

The net effect of foreign exchange adjustment was due to the strengthening or weakening of the rupiah vis-à-vis the U.S. dollar in relation to U.S. dollar accounts previously provided with allowance and was credited or charged to "Gain (Loss) on Foreign Exchange—Net".

Information about the Companies' exposure to credit risk is disclosed in Note 32.

6. TAXES RECEIVABLE

This account consists of claims for tax refund as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009 amounting to Rp490,133, Rp247,185 and Rp396,581, respectively, mainly consisting of the Company's corporate income tax for fiscal years 2004, 2005 and 2006 and Satelindo's corporate income tax for fiscal year 2002.

On May 27, 2008, the Company received the Decision Letter No. KEP-230/WPJ.19/BD.05/2008 from the Directorate General of Taxation ("DGT") which partially accepted the Company's objection on the remaining tax corrections on 2005 corporate income amounting to Rp2,725. On July 17, 2008, the Company received the tax refund amounting to Rp1,785 after offsetting the additional tax underpayment for income tax article 26 for fiscal year 2005. On August 21, 2008, the Company submitted an appeal letter to the Tax Court concerning the Company's remaining tax objection on the 2005 corporate income tax. As of December 31, 2009, the Company has not yet received any decision from the Tax Court on such appeal.

On June 20, 2008, the Company received assessment letter on tax overpayment ("SKPLB") from the DGT advising the Company of its approval to refund the overpayment of 2006 corporate income tax amounting to Rp232,439, which amount is lower than that recognized by the Company in its financial statements. The Company accepted partially the corrections on the 2006 corporate income tax amounting to Rp7,919, and charged them to current operations in 2008. On July 21, 2008, the Company received the refund of the 2006 tax overpayment for corporate income tax amounting to Rp232,439. On September 15, 2008, the Company submitted an objection letter to the DGT for the remaining tax corrections on the Company's 2006 corporate income tax. On September 7, 2009, the Company received the Decision Letter No.KEP-335/ WPJ.19/BD.05/2009 from the DGT declining this objection. On December 2, 2009, the Company

submitted an appeal letter to the Tax Court regarding the remaining corrections on the Company's 2006 corporate income tax. As of December 31, 2009, the Company has not yet received any decision from the Tax Court on such appeal.

On July 4, 2008, the Company received Decision Letter No. KEP-00080/WPJ.19/KP.0303/2008 (KEP-00080) from the Tax Court accepting the Company's objection on the tax correction of 2003 corporate income tax. On December 24, 2008, the Company received Decision Letter No.KEP-539/WPJ.19/BD.05/2008 from the DGT increasing the overpayment amount of the SKPLB for fiscal year 2004 amounting to Rp84,650, which amount is lower than the amount stated in KEP-00080. On January 21, 2009, the Company filed a lawsuit letter to the Tax Court requesting to increase the SKPLB for the additional tax overpayment for fiscal year 2004 as stated in KEP-00080. On February 2, 2009, the Company received the tax refund from the Tax Office amounting to Rp84,650 for the additional tax overpayment of corporate income tax for fiscal year 2004. As of December 31, 2009, the Company has not yet received any response from the Tax Court on the lawsuit letter. On December 4, 2009, the Company received Tax Court Decision No. Put.20644/PP/M.II/2009 granting the request to increase the SKPLB for fiscal year 2004. Furthermore, on December 15, 2009, the DGT issued KEP-00101/WPJ.19/KP.0303/2009 to implement such Tax Court Decision. As of December 31, 2009, the Company has not received any tax refund resulting from such Decision.

On June 8, 2009, the Company received assessment letter on tax underpayment ("SKPKB") from the DGT for Satelindo's corporate income tax for fiscal year 2002 amounting to Rp105,809 (including penalties and interest). The Company accepted a part of the correction of the 2002 corporate income tax amounting to Rp2,646 which was charged to current operations in 2009. Under Indonesian Tax Law, the taxpayer is required to pay the tax underpayment amount as stated in the SKPKB within one month from the date of SKPKB. The taxpayer can reclaim the tax paid through an objection or appeal process. On August 28, 2009, the Company submitted an objection letter to the Tax Office regarding the remaining correction on Satelindo's 2002 corporate income tax. As of December 31, 2009, the Company has not yet received any decision from the Tax Office on such objection.

7. PROPERTY AND EQUIPMENT

The details of property and equipment are as follows:

	Exchange and network assets	Subscribers' apparatus and other equipment	Buildings and building & leasehold improvements	Properties under construction and installation	Total
Cost					
At January 1, 2008	32,414,532	3,120,129	7,190,475	8,007,065	50,732,201
Additions	276,929	138,288	8,354	11,854,697	12,278,268
Derecognitions	(17,381)	(4,026)	—	—	(21,407)
Reclassifications	3,715,632	231,418	2,004,008	(5,951,058)	—
At December 31, 2008	36,389,712	3,485,809	9,202,837	13,910,704	62,989,062
Additions	158,871	56,995	18,922	11,317,601	11,552,389
Derecognitions	(89,448)	(34,507)	(14,604)	(84,218)	(222,777)
Divestment of SMM—a subsidiary	—	(6,617)	(70)	—	(6,687)
Reclassifications	14,701,390	368,118	2,369,910	(17,439,418)	—
At December 31, 2009	51,160,525	3,869,798	11,576,995	7,704,669	74,311,987
Accumulated Depreciation and impairment					
Accumulated depreciation and impairment at January 1, 2008	15,856,348	2,023,547	2,712,199	—	20,592,094
Depreciation charge for the year	3,336,090	499,939	676,717	—	4,512,746
Derecognitions	(17,357)	(3,145)	—	—	(20,502)
Accumulated depreciation and impairment at December 31, 2008	19,175,081	2,520,341	3,388,916	—	25,084,338
Depreciation charge for the year	4,156,189	431,015	857,032	—	5,444,236
Derecognitions	(89,448)	(34,359)	(9,637)	—	(133,444)
Divestment of SMM—a subsidiary	—	(5,415)	(70)	—	(5,485)
Accumulated depreciation and impairment at December 31, 2009	23,241,822	2,911,582	4,236,241		30,389,645
Net book value					
At January 1, 2008	16,558,184	1,096,582	4,478,276	8,007,065	30,140,107
At December 31, 2008	17,214,631	965,468	5,813,921	13,910,704	37,904,724
At December 31, 2009	27,918,703	958,216	7,340,754	7,704,669	43,922,342

Submarine cables, which are presented as part of subscribers' apparatus and other equipment, represent the Company's proportionate investment in submarine cable circuits jointly constructed, operated, maintained and owned with other countries, based on the respective contracts and/or the construction and maintenance agreements.

During the years ended December 31, 2008 and 2009, sales of certain property and equipment were made as follows:

	2008	2009
Proceeds from sales	1,131	2,253
Net book value	(905)	(5,115)
Gain (loss)	**226**	**(2,862)**

Depreciation expense charged to profit or loss amounted to Rp4,512,746 and Rp5,444,236 in 2008 and 2009, respectively.

Management believes that there is no impairment in assets value or recovery of the impairment reserve for the current year.

On August 31, 2009, the Company launched its Satellite Palapa-D. The Satellite experienced an under-performance of the launch vehicle during the Satellite's placement to its intended orbital position. Consequently, its orbital lifetime has been reduced. The insurance claim for the partial loss of the Satellite has been made and is recorded as a reduction of the cost of the satellite. The Satellite has been in operation since November 2009 after going through the process of testing and arranging its orbital position in September and October 2009.

As of December 31, 2009, approximately Rp42,986 of property and equipment are pledged as collateral to credit facilities obtained by Lintasarta (Note 14).

As of December 31, 2009, the Companies insured their respective property and equipment (except submarine cables) for US$296,081 and Rp47,080,388 including insurance on the Company's satellite amounting to US$216,296. Management believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses arising from fire, explosion, lightning, aircraft damage and other natural disasters.

The details of the Companies' properties under construction and installation as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009 are as follows:

	Percentage of Completion	Cost	Estimated Date of Completion
January 1, 2008			
Exchange and network assets	15 - 99	6,768,962	January - December 2008
Subscribers' apparatus and other equipment	20 - 99	62,293	January - September 2008
Buildings and building & leasehold improvements	50 - 99	1,175,810	January - September 2008
Total		**8,007,065**	
December 31, 2008			
Exchange and network assets	5 - 99	12,356,093	January - September 2009
Subscribers' apparatus and other equipment	40 - 98	189,892	January - June 2009
Buildings and building & leasehold improvements	15 - 99	1,364,719	January 2009 - January 2010
Total		**13,910,704**	

	Percentage of Completion	Cost	Estimated Date of Completion
December 31, 2009			
Exchange and network assets	5 - 99	6,796,933	January - September 2010
Subscribers' apparatus and other equipment	55 - 95	141,144	January - July 2010
Buildings and building & leasehold improvements	6 - 75	766,592	January 2010 - December 2011
Total		**7,704,669**	

Borrowing costs capitalized to properties under construction and installation for the years ended December 31, 2008 and 2009 amounted to Rp134,875 and Rp181,522, respectively.

8. GOODWILL AND OTHER INTANGIBLE ASSETS

Goodwill arose from the acquisition of ownership in Bimagraha and Satelindo in 2001 and 2002, respectively, and from the acquisition of additional ownership in Lintasarta in 2005 and in SMT in 2008 (Note 1b).

The details of the other intangible assets arising from the acquisition of Satelindo in 2002 are as follows:

	Amount
Spectrum license	222,922
Customer base	
—Post-paid	154,220
—Prepaid	73,128
Brand	147,178
Total	**597,448**

The changes in the goodwill and other intangible assets account are as follows:

	Non-Integrated Software	Other Intangible Assets	Goodwill	Total
Cost:				
At 1 January 2008	213,581	597,448	2,934,638	3,745,667
Additions	6,952	—	9,724	16,676
At December 31 2008	**220,533**	**597,448**	**2,944,362**	**3,762,343**
Additions	15,044	—	—	15,044
At December 31 2009	**235,577**	**597,448**	**2,944,362**	**3,777,387**
Accumulated Amortization:				
At 1 January 2008	182,096	545,531	930,862	1,658,489
Amortization	18,722	24,423	—	43,145
At December 31 2008	**200,818**	**569,954**	**930,862**	**1,701,634**
Amortization	14,539	18,397	—	32,936
At December 31 2009	**215,357**	**588,351**	**930,862**	**1,734,570**
Net book value:				
At 1 January 2008	**31,485**	**51,917**	**2,003,776**	**2,087,178**
At 31 December 2008	**19,715**	**27,494**	**2,013,500**	**2,060,709**
At 31 December 2009	**20,220**	**9,097**	**2,013,500**	**2,042,817**

Other intangible assets consist of the following:

		December 31, 2008			December 31, 2009		
		Gross			Gross		
	Useful lives (years)	Carrying Amount	Accumulated Amortization	Net	Carrying Amount	Accumulated Amortization	Net
Customer base:							
Post-paid	5	154,220	154,220	—	154,220	154,220	—
Prepaid	6	73,128	73,128	—	73,128	73,128	—
Spectrum license	5	222,922	222,922	—	222,922	222,922	—
Brand	8	147,178	119,684	27,494	147,178	138,081	9,097
Total		**597,448**	**569,954**	**27,494**	**597,448**	**588,351**	**9,097**

The future amortization of other intangible assets as of December 31, 2009 is as follows:

	Amount
2010	9,097
Total	**9,097**

Impairment testing of goodwill

Goodwill acquired through business combinations has been allocated to Cellular business unit, which is also considered as one of the Companies' operating segments.

The Company performed its annual impairment testing of goodwill at January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009.

The business enterprise value of the Cellular business unit has been determined based on discounted cash flow and weighted average cost of capital covering a five-year period. This projection is based on the Companies' long-term plan approved by the Board of Directors, which management believes is reasonable and is management's best estimate of the ranges of economic conditions that will exist over the remaining useful life of the asset.

Key assumptions used in fair value less cost to sell (FVLCTS) calculation:

Discount rates—The Company has chosen to use weighted average cost of capital (WACC) as a discounted rate for the discounted cash flow. The estimated WACC applied in determining the recoverable amount of the unit is between 13.1% and 15.5%.

Compounded Annual Growth Rate (CAGR)—The CAGR projection for the 5-year budget period of cellular segment revenue made by management is approximately 10%. This is higher than the historical revenue CAGR of approximately 3% due to tighter competition. The total operating expenses (including depreciation) are projected as a percentage of revenue.

Cost to Sell—As the recoverable amount of the Cellular Business is determined using Fair Value Less Cost to Sell, the estimated cost to sell the business is based on a certain percentage of the equity value. The estimated cost to sell used for this calculation is at approximately 1.5% of the enterprise value.

9. LONG-TERM ADVANCES

This account represents advances to suppliers and contractors for the purchase and construction/installation of property and equipment which will be reclassified to the related property and equipment accounts upon the receipt of the property and equipment purchased or after the construction/installation of the property and equipment has reached a certain percentage of completion.

10. PREPAID LANDRIGHTS LEASE

This account consists of payments for landrights obtained by the Companies, which are amortized over periods ranging from approximately 20 to 30 years. Movements in this account are as follows:

	Cost	Accumulated Amortization	Net Book Value
At January 1, 2008	432,666	87,001	345,665
Additions	56,682	15,725	40,957
At December 31, 2008	**489,348**	**102,726**	**386,622**
Additions	17,117	25,871	(8,754)
At December 31, 2009	**506,465**	128,597	**377,868**

11. PROCUREMENT PAYABLE

This account consists of payables for capital and operating expenditures procured from the following:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Third parties (including US$419,567 on January 1, 2008, US$411,796 in 2008 and US$309,520 in 2009)	6,038,491	6,368,639	5,172,498
Related parties (Note 26) (including US$3,648 on January 1, 2008, US$505 in 2008 and US$631 in 2009)	168,158	77,718	117,284
Total	**6,206,649**	**6,446,357**	**5,289,782**

The billed amount of procurement payable amounted to Rp852,289, Rp1,266,204 and Rp1,478,057 as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009, respectively. The unbilled amount of procurement payable amounted to Rp5,354,360, Rp5,180,153 and Rp3,811,725 as of January 1, 2008, December 31, 2008 and 2009, respectively.

12. TAXES PAYABLE

This account consists of the following:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Estimated corporate income tax payable, less tax prepayments of Rp374,278 on January 1, 2008, Rp500,923 in 2008 and Rp439,147 in 2009	286,397	78,800	21,826
Income tax article 25	28,132	32,369	40,122
Total	**314,529**	**111,169**	**61,948**

The computation of the income tax expense for the years ended December 31, 2008 and 2009 is as follows:

	December 31,	
	2008	2009
Estimated taxable income of the Company	**1,529,795**	**1,117,916**
Income tax expense—current (at statutory tax rates)		
Company	458,921	313,016
Subsidiaries	120,802	147,957
Tax correction from previous year paid during the year	7,919	33,517
Total income tax expense—current	587,642	494,490
Income tax expense (benefit)—deferred—effect of temporary differences at enacted maximum tax rates (30% in 2008, 28% or 25% in 2009)		
Company		
Depreciation—net	132,066	229,882
Equity in net income of investees	50,814	53,395
Amortization of other intangible assets	67,565	52,241
Write-off of accounts receivable	6,681	27,538
Amortization of 3G licenses	(194)	1,722
Amortization of debt and bonds issuance costs, consent solicitation fees and discount (Notes 14 and 15)	(1,990)	548
Accrual of employee benefits—net	(38,496)	(27,818)
Provision for impairment losses on receivables	(30,737)	(12,021)
Provision for termination, gratuity and compensation benefits of employees	(6,574)	(7,662)
Net periodic pension cost	(458)	(115)
Others	(16,950)	(17,022)
Net	161,727	300,688
Subsidiaries		
Write-off of accounts receivable	3,859	1,796
Net periodic pension cost	542	1,524
Depreciation—net	(8,528)	(10,549)
Provision for impairment losses on accounts receivable	(4,844)	(4,739)
Accrued expenses	1,303	(506)
Tax loss carryforward	13,318	—
Others	(522)	(1,184)
Net	5,128	(13,658)
Net income tax expense—deferred	166,855	287,030
Deferred tax expense (benefit) resulting from reduction in tax rate		
Company	(283,044)	—
Subsidiaries	13,870	—
Deferred tax benefit resulting from reduction in tax rate	(269,174)	—
Income tax expense—net	**485,323**	**781,520**

The computation of the estimated income tax payable is as follows:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Income tax expense—current			
Company	566,073	458,921	313,016
Subsidiaries	94,602	120,802	147,957
Tax correction from previous year	—	7,919	33,517
Total income tax expense—current	660,675	587,642	494,490
Less prepayments of income tax of the Company			
Article 22	97,754	99,462	101,137
Article 23	46,611	9,053	7,071
Article 25	160,929	317,745	299,289
Total prepayments of income tax of the Company	305,294	426,260	407,497
Less prepayments of income tax of Subsidiaries			
Article 22	885	1,036	7,534
Article 23	20,112	3,214	3,306
Article 25	47,987	72,086	151,693
Total prepayments of income tax of Subsidiaries	68,984	76,336	162,533
Total prepayments of income tax	374,278	502,596	570,030
Estimated income tax payable			
Company	260,779	32,661	—
Subsidiaries	25,618	46,139	21,826
Total estimated income tax payable	**286,397**	**78,800**	**21,826**
Claim for tax refund (presented as part of "Taxes Receivable")			
Company	—	—	94,481
Subsidiaries	—	1,673	36,402
Total claim for tax refund	**—**	**1,673**	**130,883**

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate of 30% in 2008 and 28% in 2009 to the income before income tax and the net income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2008 and 2009 is as follows:

	December 31,	
	2008	2009
Profit before income tax	**2,549,074**	**2,528,518**
Income tax expense at the applicable tax rate of 30% in 2008 and 28% in 2009	764,722	707,985
Company's equity in Subsidiaries' income before income tax and reversal of inter-company consolidation eliminations	48,520	53,544
Tax effect on permanent differences		
Employee benefits	19,027	15,815
Assessment for income taxes and related penalties	2,878	15,497
Amortization of landrights	4,717	7,244
Donation	18,632	3,577
Interest income already subjected to final tax	(140,563)	(41,764)
Others	9,073	(5,626)
Tax correction from previous year	7,919	33,517
Adjustment due to tax audit and others	19,572	(8,269)
Net deferred tax benefits resulting from reduction in tax rates	(269,174)	—
Income tax expense—net per consolidated statements of comprehensive income	**485,323**	**781,520**

The tax effects of significant temporary differences between financial and tax reporting of the Company are as follows:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Deferred tax assets			
Accrual of employee benefits—net	178,747	187,587	223,067
Allowance for impairment losses on accounts receivable	122,437	125,027	109,510
Allowance for decline in value of investment in associated company and other long-term investments	46,883	39,069	39,069
Pension cost	26,517	17,775	17,890
Allowance for decline in value of short-term investments	7,618	6,349	6,349
Others	12,838	10,153	5,242
Total	395,040	385,960	401,127

	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
Deferred tax liabilities			
Property and equipment	1,641,735	1,490,947	1,711,076
Investments in subsidiaries/associated companies—net of amortization of goodwill and other intangible assets	207,690	231,161	307,180
Deferred debt and bonds issuance costs, consent solicitation fees and discount	5,228	2,805	13,106
Long-term prepaid licenses	3,737	3,089	4,811
Difference in transactions of equity changes in associated company	1,752	1,460	1,460
Others	3,437	5,088	9,132
Total	1,863,579	1,734,550	2,046,765
Deferred tax liabilities—net	**1,468,539**	**1,348,590**	**1,645,638**

The breakdown by entity of the deferred tax assets and liabilities:

	January 1, 2008		December 31, 2008		December 31, 2009	
	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liabilities	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liabilities	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liabilities
Company	—	1,468,539	—	1,348,590	—	1,645,638
Subsidiaries						
Lintasarta	73,015	—	66,104	—	76,475	—
IMM	2,806	—	4,640	—	11,524	—
APE	—	137	—	565	—	3,070
ISP	—	—	—	331	—	619
SMT	13,135	—	—	189	—	991
Total	**88,956**	**1,468,676**	**70,744**	**1,349,675**	**87,999**	**1,650,318**

The deferred tax assets of Lintasarta relate mainly to the deferred tax on the temporary difference in the recognition of depreciation of property and equipment.

The significant temporary differences on which deferred tax assets have been computed are not deductible for income tax purposes until the accrued employee benefits are paid, the doubtful accounts are written off, the allowance for decline in value of investment in associated company and other long-term investments is realized upon sale of the investments, and the pension cost is paid. The significant deferred tax liabilities relate to the differences in the book and tax bases of property and equipment, investments in subsidiaries/associated companies, other intangible assets and debt and bonds issuance costs, consent solicitation fees and discount.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred

income tax asset to be utilized. Unrecognized deferred income tax assets are reassessed at each balance sheet date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred income tax asset to be recovered.

In September 2008, Law No. 7 Year 1983 regarding "Income Tax" was revised for the fourth time with the issuance of Law No. 36 Year 2008 (Note 38). The revised Law stipulates change in the corporate tax rates from progressive tax rates to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal years 2010 onwards. The revised Law was effective on January 1, 2009. The Companies recorded the effects of the changes in tax rates for the year ended December 31, 2008 resulting from the reduction in tax rates as a reduction of income tax expense amounting to Rp269,174 and credits amounting to Rp292 and Rp886, respectively, to "Other Components of Equity—Difference in transactions of equity changes in associated companies/subsidiaries" and "Difference in foreign currency translation", which are presented as part of other comprehensive income in the consolidated statements of comprehensive income.

On June 8, 2009, the Company received SKPKB from the DGT for Satelindo's 2003 corporate income tax amounting to Rp30,870 (including interest), which was paid to Tax Office on July 7, 2009 and charged to current operations in 2009.

The tax losses carryover of SMT as of December 31, 2009 can be carried forward through 2014 based on the following schedule:

Year of Expiration	Amount
2011	14,190
2012	30,205
2013	26,660
2014	31,901
Total	**102,956**

13. ACCRUED EXPENSES

This account consists of the following:

	December 31,		
	January 1, 2008	2008	2009
Network repairs and maintenance	222,594	303,200	301,857
Radio frequency fee	185,342	257,671	240,718
Interest	145,440	231,640	228,743
Employee benefits	215,720	122,049	152,447
Marketing	134,950	161,698	125,908
Utilities	5,438	8,202	94,359
Dealer Incentive	42,720	80,760	80,778
Consultancy fees	50,186	45,792	66,218
Universal Service Obligation ("USO")	108,546	38,526	62,378
Administration and general	9,949	25,829	25,546
Rental	17,584	21,762	18,225
Concession fee	82,790	49,227	2,468
Others (each below Rp20,000)	61,680	98,882	125,916
Total	**1,282,939**	**1,445,238**	**1,525,561**

14. LOANS PAYABLE

This account consists of the following:

	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
Related party (Note 26)			
Mandiri—net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp5,091 on January 1, 2008, Rp3,858 in 2008 and Rp7,511 in 2009	1,994,909	1,796,142	2,592,489
Third parties—net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp7,128 on January 1, 2008, Rp233,736 in 2008 and Rp250,888 in 2009; and unamortized debt discount of Rp37,191 on January 1, 2008, Rp31,844 in 2008 and Rp25,892 in 2009	2,748,511	9,588,487	11,563,262
Total loans payable	4,743,420	11,384,629	14,155,751
Less current maturities:			
Related party	200,000	200,000	400,000
Third parties	294,387	372,469	1,040,259
Total current maturities	494,387	572,469	1,440,259
Long-term portion	**4,249,033**	**10,812,160**	**12,715,492**

The loans from third parties consist of the following:

Syndicated U.S. Dollar Loan Facility—net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp47,276 in 2008 and Rp44,563 in 2009	—	4,880,224	4,185,437
BCA—net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp5,091 on January 1, 2008, Rp3,858 in 2008 and Rp7,055 in 2009	1,994,909	1,796,142	3,092,945
HSBC France—net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp176,408 in 2008 and Rp156,357 in 2009	—	1,276,607	1,736,678
AB Svensk Exportkredit, Sweden with Guarantee from Export Kredit Namnden—net of unamortized debt issuance cost of Rp36,909	—	—	1,200,551
Goldman Sachs International			
Principal, net of unamortized debt discount of Rp37,191 on January 1, 2008, Rp31,844 in 2008 and Rp25,892 in 2009	397,109	402,456	408,408
Foreign Exchange (FX) Conversion Option—net of credit risk adjustment	76,767	185,768	97,942
DBS *—net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp769 in 2008 and Rp1,184 in 2009	—	499,231	448,816
9-Year Commercial Loan—net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp3,962 in 2008 and Rp3,707 in 2009	—	292,093	237,733

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 19)

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Finnish Export Credit Ltd.—net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp2,038 on January 1, 2008, Rp1,463 in 2008 and Rp1,113 in 2009	247,817	206,587	106,047
Investment Credit Facility 5 from CIMB Niaga	9,463	44,933	24,933
Investment Credit Facility 6 from CIMB Niaga	—	—	23,772
Investment Credit Facility 4 from CIMB Niaga	22,446	4,446	—
Total	2,748,511	9,588,487	11,563,262
Less current maturities	294,387	372,469	1,040,259
Long-term portion	**2,454,124**	**9,216,018**	**10,523,003**

The details of the loan from a related party and third parties are as follows:

Counterparties	Loan Type	Maturity	Amount	Interest Structure	Early Repayment
a. Mandiri *	• 5-year unsecured credit facility 1 • Loan drawdowns are payable annually	September 18, 2012	Rp2,000,000	• Year 1: 9.75% p.a. • Year 2: 10.5% p.a. • Years 3-5: Average 3-month Jakarta Inter Bank Offered Rate ("JIBOR") + 1.5% p.a. • Payable quarterly	• Without penalty if the repayment is made after the 24th month after the agreement date subject to 7 days' prior written notice. • With penalty of 2% of the prepaid amount for repayment prior to the 24th month after the agreement date.
b. Mandiri *	• 5-year unsecured credit facility 2 • Loan drawdowns are payable annually	July 28, 2014	Rp1,000,000	• Average 3-month JIBOR + 4% p.a. • Payable quarterly	• Permitted - subject to 2% penalty of the prepaid amount
c. Syndicated U.S. Dollar Loan Facility—13 Financial Institutions	• 5-year unsecured credit facility • Loan drawdowns are payable semi-annually	June 12, 2013	US$450,000	• USD London Inter Bank Offered Rate ("LIBOR") + 1.9% p.a. (onshore lenders); USD LIBOR + 1.85% p.a. (off-shore lenders) • Payable semi-annually	• Permitted only after the 6th month from the date of loan agreement subject to 15 days' prior written notice (in the minimum amount of US$10,000 and in an amount divisible by US$1,000).
d. BCA	• 5-year unsecured credit facility 1 • Loan drawdowns are payable annually	August 28, 2012	Rp2,000,000	• Year 1: 9.75% p.a. • Year 2: 10.5% p.a. • Years 3-5: 3-month JIBOR + 1.5% p.a. • Payable quarterly	• Without penalty if the repayment is made after the 24th month after the agreement date subject to 7 days' prior written notice. • With penalty of 2% of the prepaid amount for repayment prior to the 24th month after the agreement date.

* a related party (Note 19)

Counterparties	Loan Type	Maturity	Amount	Interest Structure	Early Repayment
e. BCA	• 3-year unsecured credit facility 2 • Loan drawdowns are payable annually	March 16, 2012	Rp500,000	3-month JIBOR + 2.25% p.a.	• With penalty of 1% of the prepaid amount
f. BCA	• 5-year unsecured credit facility 3 • Loan drawdowns are payable annually	June 25, 2014	Rp1,000,000	3-month JIBOR + 4% p.a.	• With penalty of 1% of the prepaid amount, except for prepayment to refinance this credit facility
g. HSBC France	• 12 year - COFACE term facility • Payable in twenty semi-annual installments	November 27, 2019	US$157,243	• 5.69% p.a. • Payable semi-annually	• Permitted with a corresponding proportionate voluntary prepayment under the SINOSURE Facility after the last day of the availability period and on a repayment date subject to 30 days' prior written notice • In minimum amount of US$10,000 and in an amount divisible by US$1,000 • Any repayment shall satisfy the obligations of loan repayment in inverse chronological order
h. HSBC France	• 12 year - SINOSURE term facility • Payable in twenty semi-annual installments	November 27, 2019	US$44,200	• USD LIBOR + 0.35% p.a. • Payable semi-annually	• Permitted with a corresponding proportionate voluntary prepayment under the COFACE Facility after the last day of the availability period and on a repayment date subject to 30 days' prior written notice • In minimum amount of US$10,000 and in an amount divisible by US$1.000 • Any repayment shall satisfy the obligations of loan repayment in inverse chronological order

Counterparties	Loan Type	Maturity	Amount	Interest Structure	Early repayment
i. AB Svensk Exportkredit ("SEK"), Sweden with Guarantee from Export Kredit Namnden ("EKN")	• Credit facilities consisting of Facilities A,B and C with maximum amounts of US$100,000, US$155,000 and US$60,000, respectively • Loan drawdowns are payable semi-annually	May 31, 2016 for facility A, February 28, 2017 for facility B and November 30, 2017 for facility C	US$315,000	• Facility A: Margin of 0.25%, LIBOR, SEK Funding Cost of 1.05% and EKN Premium Margin of 1.58% • Facility B: Margin of 0.05%, Commercial Interest Reference Rate ("CIRR") and EKN Premium Margin of 1.61%	• Permitted only in proportionate amount for each Facility A, B and C, after the last day of the availability period and on a repayment date subject to 20 days' prior written notice • In minimum amount of US$5,000 and in an amount divisible by US$500 • Any repayment shall satisfy the obligations of loan repayment in inverse chronological order
j. DBS	• 5-year unsecured credit facility • Loan drawdowns are payable annually	November 1, 2012	Rp500,000	• Year 1: 9.7% • Year 2: 10.4% • Years 3-5: 3-month SBI + 1.5% p.a. • Payable quarterly	• Without penalty if the repayment is made after the 24th month after the agreement date subject to 15 days' prior written notice. • With penalty of 1% of the prepaid amount for repayment prior to the 24th month after the agreement date.
k. Goldman Sachs International (GSI)	• Investment loan • provides a "FX Conversion Option" for GSI to convert the loan payable into a U.S. dollar loan of US$50,000 on May 30, 2012 ("FX Conversion Option"). • Fair value of FX Conversion Option as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009 amounting to US$8,172.79, US$16,965.12 and US$10,419.43 (equivalent to Rp76,767, Rp185,768 and Rp97,943), respectively.	May 30, 2013	Rp434,300	• 8.75% p.a. • Payable quarterly • If GSI takes FX Conversion Option, starting May 30, 2012, the loan will bear interest at the fixed annual rate of 6.45% applied on the US$50,000 principal.	• Certain changes affecting withholding taxes in the United Kingdom or Indonesia. • Default under Guaranteed Notes due 2012. • Default under the Company's USD Notes and IDR Bonds. • Redemption, purchase or cancellation of the Guaranteed Notes Due 2012 and there are no USD Indosat Notes outstanding upon such redemption, purchase or cancellation. • Change of control in the Company.

Counterparties	Loan Type	Maturity	Amount	Interest Structure	Early repayment
l. HSBC Jakarta Branch, CIMB Niaga and Bank of China Limited, Jakarta Branch	• 9-year unsecured commercial facility • Payable in fifteen semi-annual payments after 24 months from the date of loan agreement. For the 1st five installments: US$1,351.85 each; and US$2,027.78 each for the remaining installments thereafter	November 27, 2016	US$27,037	• USD LIBOR + 1.45% p.a. • Payable semi-annually	• Permitted only on each repayment date after first repayment date subject to 30 days' prior written notice • In minimum amount of US$5,000 and in an amount divisible by US$1,000 • Any prepayment shall satisfy the obligations of loan repayment proportionately
m. Finnish Export Credit Ltd.	• 5-year credit facility • Payable semi-annually	May 12, 2011	US$38,000	• 4.15% p.a. • Payable semi-annually	• Permitted only after 60 days of the loan agreement subject to 15 days' prior written notice (in the minimum amount of US$10,000 and in an amount divisible by US$1,000).
n. CIMB Niaga	• Investment credit facility 5 obtained by Lintasarta • Payable quarterly	January 10, 2011	Rp50,000	• 1-month SBI + 2.25% p.a.	Permitted only on interest payment date subject to 13 days' prior written notice. Lintasarta may repay the whole or any part of the loan before the due date only by using the fund from Lintasarta's operational activities. Repayment using the fund from loans obtained from other parties is allowed with 1% penalty of the early repaid amount.
o. CIMB Niaga	• Investment credit facility 6 obtained by Lintasarta • Payable quarterly	June 24, 2012	Rp75,000	• 14.5% p.a., subject to change by CIMB Niaga depending on the market condition	Permitted only on interest payment date subject to 15 days' prior written notice. Lintasarta may repay the whole or any part of the loan before the due date only by using the fund from Lintasarta's operational activities. Repayment using the fund from loans obtained from other parties is allowed with penalty determined by CIMB Niaga.
p. CIMB Niaga	• Investment credit facility 4 obtained by Lintasarta • Payable quarterly	February 28, 2009	Rp45,000	3-month SBI + 3% p.a.	Permitted only on interest payment date subject to 13 days' prior written notice. Lintasarta may repay the whole or any part of the loan before the due date only by using the fund from Lintasarta's operational activities. Repayment using the fund from loans obtained from other parties is allowed with 1% penalty of the early repaid amount.

The scheduled principal payments from 2010 to 2014 and thereafter of all the loans payable as of December 31, 2009 are as follows:

	Twelve months ending December 31,					
	2010	2011	2012	2013	2014 and thereafter	Total
In rupiah						
BCA*	500,000	550,000	1,400,000	150,000	500,000	3,100,000
Mandiri*	400,000	400,000	1,150,000	150,000	500,000	2,600,000
DBS*	50,000	75,000	75,000	250,000	—	450,000
GSI*	—	—	—	434,300	—	434,300
CIMB Niaga*	43,772	4,933	—	—	—	48,705
Sub-total	**993,772**	**1,029,933**	**2,625,000**	**984,300**	**1,000,000**	**6,633,005**
In U.S. dollar						
Syndicated U.S. Dollar Loan facility (US$450,000)*	—	2,072,700	676,800	1,480,500	—	4,230,000
HSBC France (US$201,386.69)*	189,303	189,303	189,303	189,303	1,135,823	1,893,035
SEK, Sweden (US$131,644.64)*	160,329	186,372	186,372	186,372	518,015	1,237,460
9-Year Commercial Facility (US$25,685.15)*	25,415	25,415	38,122	38,122	114,366	241,440
GSI (US$10,419.43)*	—	—	—	97,942	—	97,942
FEC (US$11,400)*	71,440	35,720	—	—	—	107,160
Sub-total	**446,487**	**2,509,510**	**1,090,597**	**1,992,239**	**1,768,204**	**7,807,037**
Total	**1,440,259**	**3,539,443**	**3,715,597**	**2,976,539**	**2,768,204**	**14,440,042**
Less:						
—unamortized debt issuance costs and consent solicitation fees						(258,399)
—unamortized debt discount						(25,892)
Net						**14,155,751**

* Refer to previous discussion on early repayment options for each loan.

The amortization of debt issuance costs, consent solicitation fees and debt discount on the loans amounted to Rp15,331 in 2008 and Rp35,838 in 2009 (Note 24).

15. BONDS PAYABLE

This account consists of the following:

	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
a) Fifth Indosat Bonds in Year 2007 with Fixed Rates—net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fee of Rp7,629 on January 1, 2008, Rp6,948 in 2008 and Rp12,793 in 2009	2,592,371	2,593,052	2,587,207
b) Guaranteed Notes Due 2010—net of unamortized notes issuance cost of Rp13,389 on January 1, 2008, Rp6,977 in 2008 and Rp3,879 in 2009	2,804,511	2,563,503	2,202,743
c) Seventh Indosat Bonds in Year 2009 with Fixed Rates—net of unamortized bonds issuance cost of Rp6,198	—	—	1,293,802
d) Sixth Indosat Bonds in Year 2008 with Fixed Rates—net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fee of Rp4,256 in 2008 and Rp7,050 in 2009	—	1,075,744	1,072,950
e) Guaranteed Notes Due 2012—net of unamortized notes discount of Rp11,338 on January 1, 2008, Rp4,129 in 2008 and Rp3,116 in 2009; and unamortized notes issuance cost of Rp23,781 on January 1, 2008, Rp8,649 in 2008 and Rp6,521 in 2009	2,313,131	1,185,261	1,018,817
f) Fourth Indosat Bonds in Year 2005 with Fixed Rate—net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fee of Rp5,842 on January 1, 2008, Rp4,404 in 2008 and Rp4,050 in 2009	809,158	810,596	810,950
g) Third Indosat Bonds in Year 2003 with Fixed Rates—net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fee of Rp8,622 on January 1, 2008, Rp2,709 in 2008 and Rp2,081 in 2009	2,491,378	637,291	637,919
h) Indosat Sukuk Ijarah III in Year 2008—net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fee of Rp2,229 in 2008 and Rp3,601 in 2009	—	567,771	566,399
i) Indosat Sukuk Ijarah II in Year 2007—net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fee of Rp1,179 on January 1, 2008, Rp1,042 in 2008 and Rp1,872 in 2009	398,821	398,958	398,128
j) Indosat Syari'ah Ijarah Bonds in Year 2005—net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fee of Rp2,071 on January 1, 2008, Rp1,560 in 2008 and Rp1,429 in 2009	282,929	283,440	283,571
k) Second Indosat Bonds in Year 2002 with Fixed and Floating Rates—net of unamortized consent solicitation fee of Rp656 in 2009	200,000	200,000	199,344
l) Indosat Sukuk Ijarah IV in Year 2009—net of unamortized bonds issuance cost of Rp982	—	—	199,018
m) Limited Bonds II issued by Lintasarta *	31,150	31,150	25,000
n) Limited Bonds I issued by Lintasarta **	25,292	25,292	16,989
Total bonds payable	11,948,741	10,372,058	11,312,837
Less current maturities (net of unamortized notes and bonds issuance costs and consent solicitation fees totalling Rp5,960 in 2009)	1,860,000	56,442	2,840,662
Long-term portion	**10,088,741**	**10,315,616**	**8,472,175**

* after elimination of Limited Bonds II amounting to Rp35,000 issued to the Company
** after elimination of Limited Bonds I amounting to Rp9,564 issued to the Company

Bond	Nominal Amount	Interest	Maturity	Remarks
a. Fifth Indosat Bonds in Year 2007				
• Series A	Rp1,230,000	• 10.20% p.a. • Payable quarterly	May 29,2014	• The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price temporarily or as an early settlement. • Based on the latest rating report released in November 2009, the bonds have id AA+ (negative outlook) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo")
• Series B	Rp1,370,000	• 10.65% p.a. • Payable quarterly	May 29, 2017	
b. Guaranteed Notes Due 2010	US$300,000	• 7.75% p.a. • Payable semi-annually	November 5, 2010	The notes are redeemable at the option of IFB: • At any time on or after November 5, 2008. • At any time, in the event of certain changes affecting withholding taxes in Indonesia and the Netherlands that would require IFB or the Company to pay an additional amount in respect of any note in excess of certain amounts. • Upon a change in control of IFB, the holder of the notes has the right to require IFB to repurchase all or any part of such holder's notes.
c. Seventh Indosat Bonds in Year 2009				
• Series A	Rp700,000	• 11.25% p.a. • Payable quarterly	December 8, 2014	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price temporarily or as an early settlement.
• Series B	Rp600,000	• 11.75% p.a. • Payable quarterly	December 8, 2016	

Bond	Nominal Amount	Interest	Maturity	Remarks
d. Sixth Indosat Bonds in Year 2008				
• Series A	Rp760,000	• 10.25% p.a. • Payable quarterly	April 9, 2013	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price temporarily or as an early settlement.
• Series B	Rp320,000	• 10.80% p.a. • Payable quarterly	April 9, 2015	
e. Guaranteed Notes Due 2012	US$250,000	• 7.125% p.a. • Payable semi-annually	June 22, 2012	The notes are redeemable at the option of IIFB: • At any time on or after June 22, 2010. • At any time, in the event of certain changes affecting withholding taxes in Indonesia and the Netherlands that would require IIFB or the Company to pay an additional amount in respect of any note in excess of certain amounts. • Upon a change in control of IIFB, the holder of the notes has the right to require IIFB to repurchase all or any part of such holder's notes.
f. Fourth Indosat Bonds in Year 2005 with Fixed Rate	Rp815,000	• 12% p.a. • Payable quarterly	June 21, 2011	The Company has early settlement option on the 4th anniversary of the bonds at 100% of the bonds' nominal value and buy-back option after the 1st anniversary of the bonds at market price temporarily or as an early settlement.
g. Third Indosat Bonds in Year 2003				
• Series A	Rp1,860,000	• 12.5% p.a. • Payable quarterly	October 22, 2008	The Company has *early settlement option* on the 6th anniversary of the bonds for Series B bonds at 100% of the bonds' nominal value and *buy-back option* after the 1st anniversary of the bonds at market price temporarily or as an early settlement.
• Series B	Rp640,000	• 12.875% p.a. • Payable quarterly	October 22, 2010	

Bond	Nominal Amount	Interest	Maturity	Remarks
h. Indosat Sukuk Ijarah III in Year 2008 ("Sukuk Ijarah III")	Rp570,000	• Bondholders are entitled to annual fixed Ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp58,425, payable on a quarterly basis starting July 9, 2008 up to April 9, 2013.	April 9, 2013	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price.
i. Indosat Sukuk Ijarah II in Year 2008 ("Sukuk Ijarah II")	Rp400,000	• Bondholders are entitled to annual fixed Ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp40,800, payable on a quarterly basis starting August 29, 2007 up to May 29, 2014.	May 29, 2014	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price.
j. Indosat Syari'ah Ijarah Bonds in Year 2005 ("Syari'ah Ijarah Bonds")	Rp285,000	• Bondholders are entitled to annual fixed Ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp34,200, payable on a quarterly basis starting September 21, 2005 up to June 21, 2011.	June 21, 2011	The Company has *early settlement option* on the 4th anniversary of the bonds at 100% of the bonds' nominal value and *buy-back option* after the 1st anniversary of the bonds at market price temporarily or as an early settlement.
k. Second Indosat Bonds in Year 2002—Series B	Rp200,000	16% p.a. • Payable quarterly	November 6, 2032	The Company has *buy option* on the 10th, 15th, 20th and 25th anniversaries of the bonds at 101% of the bonds' nominal value and the bondholder has *sell option* if the rating of the bonds decreases to id AA- or lower or on the 15th, 20th and 25th anniversaries of the bonds.

	Bond	Nominal Amount	Interest	Maturity	Remarks
l.	Indosat Sukuk Ijarah IV in Year 2009 ("Sukuk Ijarah IV")				
	• Series A	Rp28,000	• Bondholders are entitled to annual fixed ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp3,150, payable on a quarterly basis starting March 8, 2010 up to December 8, 2014.	December 8, 2014	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price.
	• Series B	Rp172,000	• Bondholders are entitled to annual fixed ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp20,210, payable on a quarterly basis starting March 8, 2010 up to December 8, 2016.	December 8, 2016	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price.
m.	Limited Bonds II issued by Lintasarta (amended on August 25, 2009)	Rp66,150, with the remaining amount of Rp60,000 since June 14, 2009	• Average 3-month rupiah time deposit rates with Mandiri, BNI, BRI and BTN, plus a fixed premium of 3% (the maximum limit of floating rates was 19% and the minimum limit was 11% p.a.), starting June 14, 2009, the minimum limit increased to 12.75% • Payable quarterly	June 14, 2009 extended to June 14, 2012	Not applicable
n.	Limited Bonds I issued by Lintasarta (amended on August 25, 2009)	Rp34,856, with the remaining amount of Rp 26,553 since June 2, 2009	• Average 3-month rupiah time deposit rates with Mandiri, BNI, BRI and BTN, plus a fixed premium of 3% (the maximum limit of floating rates was 19% and the minimum limit was 11% p.a.), starting June 2, 2009, the minimum limit increased to 12.75% • Payable quarterly	June 2, 2009 extended to June 2, 2012	Not applicable

The scheduled principal payments of all the bonds payable outstanding as of December 31, 2009 are as follows:

	Twelve months ending December 31,					
	2010	2011	2012	2013	2014 and thereafter *	Total
In U.S. dollar						
Guaranteed Notes *						
Due 2010 (US$234,747)	2,206,622	—	—	—	—	2,206,622
Due 2012 (US$109,410)	—	—	1,028,454	—	—	1,028,454
Sub-total	**2,206,622**	**—**	**1,028,454**	**—**	**—**	**3,235,076**
In Rupiah						
Fifth Indosat Bonds *	—	—	—	—	2,600,000	2,600,000
Seventh Indosat Bonds *	—	—	—	—	1,300,000	1,300,000
Sixth Indosat Bonds *	—	—	—	760,000	320,000	1,080,000
Fourth Indosat Bonds *	—	815,000	—	—	—	815,000
Third Indosat Bonds *	640,000	—	—	—	—	640,000
Sukuk Ijarah III *	—	—	—	570,000	—	570,000
Sukuk Ijarah II *	—	—	—	—	400,000	400,000
Syari'ah Ijarah Bonds *	—	285,000	—	—	—	285,000
Second Indosat Bonds *	—	—	—	—	200,000	200,000
Sukuk Ijarah IV *	—	—	—	—	200,000	200,000
Limited Bonds II	—	—	25,000	—	—	25,000
Limited Bonds I	—	—	16,989	—	—	16,989
Sub-total	**640,000**	**1,100,000**	**41,989**	**1,330,000**	**5,020,000**	**8,131,989**
Total	**2,846,622**	**1,100,000**	**1,070,443**	**1,330,000**	**5,020,000**	**11,367,065**
Less:						
—unamortized bonds issuance costs and consent solicitation fees						(40,712)
—unamortized notes issuance costs						(10,400)
—unamortized notes discount						(3,116)
Net						**11,312,837**

* Refer to previous discussion on early repayment options for each bond/note.

The amortization of bonds issuance cost and consent solicitation fees, notes issuance cost and discount amounted to Rp38,210 in 2008 and Rp15,467 in 2009 (Note 24).

16. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The Companies have various financial assets such as trade and non-trade receivables and cash and short-term deposits, which arise directly from the Companies' operations. The Companies' principal financial liabilities, other than derivatives, consist of loans and bonds payable, procurement payable, trade and non-trade payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Companies' operations. The Company

also enters into derivative transactions, primarily cross currency swaps and interest rate swaps for the purpose of managing its foreign exchange and interest rate exposures emanating from the Companies' loans and bonds payable in foreign currencies.

The following table sets forth the Companies' financial assets and financial liabilities as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Financial Assets			
Held for trading			
Derivative assets	127,717	656,594	224,004
Loans and receivables			
Cash and cash equivalents	8,053,006	5,737,866	2,835,999
Accounts receivable—net	1,051,869	1,357,620	1,949,984
Other current financial assets	24,868	44,777	35,173
Due from related parties	56,455	42,496	7,215
Other non-current financial assets	59,259	58,357	84,160
Available for sale			
Short-term investments—net	1,250	—	—
Other long-term investments	2,730	2,730	2,730
Total Financial Assets	**9,377,154**	**7,900,440**	**5,139,265**
Financial Liabilities			
Held for trading			
Derivative liabilities	64,310	315,866	174,540
Liabilities at amortized cost			
Accounts payable—trade	446,450	608,754	537,476
Procurement payable	6,206,649	6,446,357	5,289,782
Deposits from customers	40,947	32,121	22,463
Accrued expenses	1,282,939	1,445,238	1,525,561
Loans payable—current portion	494,387	572,469	1,440,259
Bonds payable—current portion	1,860,000	56,442	2,840,662
Other current financial liabilities	51,560	31,022	43,721
Due to related parties	64,850	14,699	13,764
Loans payable—non-current portion	4,249,033	10,812,160	12,715,492
Bonds payable—non-current portion	10,088,741	10,315,616	8,472,175
Other non-current financial liabilities	279,658	52,178	6,546
Total Financial Liabilities	**25,129,524**	**30,702,922**	**33,082,441**

The following table sets forth the carrying values and estimated fair values of the Companies' financial instruments that are carried in the consolidated statements of financial position:

	Carrying Amount			Fair Value		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
Current Financial Assets						
Cash and cash equivalents	8,053,006	5,737,866	2,835,999	8,053,006	5,737,866	2,835,999
Short-term investments—net	1,250	—	—	1,250	—	—
Accounts receivable—net	1,051,869	1,357,620	1,949,984	1,051,869	1,357,620	1,949,984
Derivative assets	127,717	656,594	224,004	127,717	656,594	224,004
Other current financial assets	24,868	44,777	35,173	24,868	44,777	35,173
Total current financial assets	**9,258,710**	**7,796,857**	**5,045,160**	**9,258,710**	**7,796,857**	**5,045,160**
Non-current Financial Assets						
Due from related parties	56,455	42,496	7,215	47,359	32,414	6,263
Other long-term investments	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
Other non-current financial assets	59,259	58,357	84,160	39,504	39,686	65,525
Total non-current financial assets	**118,444**	**103,583**	**94,105**	**89,593**	**74,830**	**74,518**
Total Financial Assets	**9,377,154**	**7,900,440**	**5,139,265**	**9,348,303**	**7,871,687**	**5,119,678**
Current Financial Liabilities						
Accounts payable—trade	446,450	608,754	537,476	446,450	608,754	537,476
Procurement payable	6,206,649	6,446,357	5,289,782	6,206,649	6,446,357	5,289,782
Accrued expenses	1,282,939	1,445,238	1,525,561	1,282,939	1,445,238	1,525,561
Deposits from customers	40,947	32,121	22,463	40,947	32,121	22,463
Derivative liabilities	64,310	315,866	174,540	64,310	315,866	174,540
Loans payable—current portion	494,387	572,469	1,440,259	492,498	567,337	1,425,325
Bonds payable—current portion	1,860,000	56,442	2,840,662	1,916,451	57,251	2,904,566
Other current financial liabilities	51,560	31,022	43,721	51,560	31,022	43,721
Total current financial liabilities	**10,447,242**	**9,508,269**	**11,874,464**	**10,501,804**	**9,503,946**	**11,923,434**
Non-current Financial Liabilities						
Due to related parties	64,850	14,699	13,764	54,400	11,212	11,948
Loans payable—non-current portion	4,249,033	10,812,160	12,715,492	4,185,853	10,826,572	13,281,903
Bonds payable—non-current portion	10,088,741	10,315,616	8,472,175	10,265,352	9,806,811	8,495,278
Other non-current financial liabilities	279,658	52,178	6,546	279,658	52,178	6,546
Total non-current financial liabilities	**14,682,282**	**21,194,653**	**21,207,977**	**14,785,263**	**20,696,773**	**21,795,675**
Total Financial Liabilities	**25,129,524**	**30,702,922**	**33,082,441**	**25,287,067**	**30,200,719**	**33,719,109**

The fair values of the financial assets and liabilities are included at the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Short-term financial assets and liabilities:

- *Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash and cash equivalents, trade and other receivables, other current financial assets, trade payables, accrued expenses, deposits from customers and other current financial liabilities)*

  These financial instruments approximate their carrying amounts largely due to their short-term maturities.

- *Derivative Financial Instruments*

  Cross currency swap contracts (including bifurcated embedded derivative)

  These derivatives are measured at their fair values using internal valuation techniques as no quoted market prices exist for such instruments. The principal techniques used to value these instruments are discounted cash flows. The key inputs include interest rate yield curves, foreign exchange rates, Credit Default Spread ("CDS"), and the spot price of the underlying instruments.

  Interest rate swap contracts

  These derivatives are measured at their fair values, computed using discounted cash flows based on observable market inputs which include interest rate yield curves and payment dates.

Long-term financial assets and liabilities:

- *Long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (unquoted loans and bonds payable)*

  The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- *Other long-term financial assets and liabilities (due from/to related parties, long-term receivables, other non-current financial assets and liabilities)*

  Estimated fair value is based on discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the Companies' own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

- *Financial instruments quoted in an active market*

  The fair value of the bonds issued by the Company which are traded in an active market is determined with reference to their quoted market prices.

  For equity investments classified as available-for-sale, the fair value is determined based on the latest market quotation as published by the Indonesia Stock Exchange as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009.

Fair Value Hierarchy

Financial assets and liabilities are classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurements. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurements requires judgment, and may affect the valuation of the assets and liabilities being measured and their placement within the fair value hierarchy.

The best evidence of fair value is quoted prices in an active market. If the market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique. The objective of using a valuation technique is to establish what the transaction price would have been on the measurement date in an arm's length exchange motivated by normal business considerations. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing models. If there is a valuation technique commonly used by market participants to price the instrument and that technique has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market transactions, the entity uses that technique. The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs and relies as little as possible on entity-specific inputs. It incorporates all factors that market participants would consider in setting a price and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Periodically, the Company calibrates the valuation technique and tests it for validity using prices from any observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging) or based on any available observable market data.

The Company's fair value hierarchy as at December 31, 2009 is as follows:

	TOTAL	Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)	Significant other observable inputs (Level 2)	Significant unobservable inputs (Level 3)
Current Financial Assets				
Derivative assets	224,004	—	224,004	—
Total Financial Assets	**224,004**	**—**	**224,004**	**—**
Current Financial Liabilities				
Derivative liabilities	174,540	—	174,540	—
Embedded derivatives	97,942	—	97,942	—
Total Financial Liabilities	**272,482**	**—**	**272,482**	**—**

17. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES

This account consists mainly of non-current portions of post-retirement benefits (Note 25), benefits under Labor Law No. 13/2003 (Note 25) and other employee benefits.

18. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

This account consists mainly of payable for the construction of the Satellite Palapa-D and non-current portions of customer deposits.

19. CAPITAL STOCK

The Company's capital stock ownership details as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009 are as follows:

Stockholders	Number of Shares Issued and Fully Paid	Amount	Percentage of Ownership (%)
January 1, 2008			
A Share			
Government of the Republic of Indonesia	1	—	—
B Shares			
Indonesia Communications Limited, Mauritius ("ICL")	2,171,250,000	217,125	39.96
Government of the Republic of Indonesia	776,624,999	77,662	14.29
JP Morgan Chase Bank U.S. Resident (Norbax, Inc.) (stockholder holding more than 5%)	308,712,900	30,871	5.68
Indonesia Communications Pte. Ltd., Singapore ("ICLS")	46,340,000	4,634	0.85
Commissioner—Lee Theng Kiat	135,000	14	0.00
Directors:			
Raymond Tan Kim Meng	222,500	22	0.01
Wahyu Wijayadi	152,500	15	0.00
Wong Heang Tuck	75,000	8	0.00
Johnny Swandi Sjam	30,000	3	0.00
Fadzri Sentosa	10,000	1	0.00
Others (each holding below 5%)	2,130,380,600	213,038	39.21
Total	**5,433,933,500**	**543,393**	**100.00**

Stockholders	Number of Shares Issued and Fully Paid	Amount	Percentage of Ownership (%)
December 31, 2008			
A Share			
Government of the Republic of Indonesia	1	—	—
B Shares			
ICL, Mauritius	2,171,250,000	217,125	39.96
Government of the Republic of Indonesia	776,624,999	77,662	14.29
Stockholders holding more than 5%:			
Fidelity Entities	553,479,050	55,348	10.19
Goldman Sachs (Asia) L.L.C	469,653,300	46,965	8.64
Noonday (Farallon Entities)	432,226,800	43,223	7.95
SKAGEN Funds (SKAGEN AS)	349,945,317	34,995	6.44
ICLS	46,340,000	4,634	0.85
Directors:			
Raymond Tan Kim Meng	222,500	22	0.01
Wahyu Wijayadi	152,500	15	0.00
Wong Heang Tuck	75,000	8	0.00
Johnny Swandi Sjam	30,000	3	0.00
Fadzri Sentosa	10,000	1	0.00
Others (each holding below 5%)	633,924,033	63,392	11.67
Total	**5,433,933,500**	**543,393**	**100.00**
December 31, 2009			
A Share			
Government of the Republic of Indonesia	1	—	—
B Shares			
Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. (previously ICLS)	3,532,056,600	353,206	65.00
Government of the Republic of Indonesia	776,624,999	77,662	14.29
Directors:			
Fadzri Sentosa	10,000	1	0.00
Others (each holding below 5%)	1,125,241,900	112,524	20.71
Total	**5,433,933,500**	**543,393**	**100.00**

The “A” share is a special share held by the Government of the Republic of Indonesia and has special voting rights. The material rights and restrictions which are applicable to the “B” shares are also applicable to the “A” share, except that the Government may not transfer the “A” share, and it has a veto right with respect to (i) amendment to the objective and purposes of the Company; (ii) increase of capital without pre-emptive rights; (iii) merger, consolidation, acquisition and demerger; (iv) amendment to the provisions regarding the rights of “A” share as stipulated in the Articles of Association; and (v) dissolution, bankruptcy and liquidation of the Company. The “A” share also has the right to appoint one director and one commissioner of the Company.

On June 6, 2008, STT Communications Limited ("STTC") entered into a Share Purchase Agreement to sell its 75% ownership in ICL and ICLS to Qtel. The closing process of such sale was made on June 22, 2008 and resulted in Qtel's direct ownership in ICL and ICLS. As a result, Qtel has become the ultimate shareholder of the Company (Notes 14k and 15) and all of STTC's affiliations ceased to be related parties of the Companies (Notes 4, 14 and 26).

On January 8, 2009, Qtel filed tender offer statements with the United States Securities and Exchange Commission ("U.S. SEC") and the BAPEPAM-LK to purchase additional Company shares which became effective on January 16, 2009. Subsequently, as required by the U.S. SEC, on January 20, 2009, the Company filed schedule 14D-9, Solicitation/Recommendation Statement, with the U.S. SEC in response to the Tender Offers made by Qtel in the United States of America and Indonesia through Qtel's indirect wholly owned subsidiary, ICLS, to purchase Series B shares (including Series B shares held as ADS, each representing 50 Series B shares) which represent approximately 24.19% of the Company's total issued and outstanding Series B shares. On March 4, 2009, ICLS increased its ownership interest in the Company from 0.85% to 25.04%.

On May 9, 2009, ICL entered into a Share Purchase Agreement to sell its 39.96% ownership in the Company to ICLS. The closing process of such sale was made on June 4, 2009; consequently, from this date, ICLS has become the legal owner of 3,532,056,600 "B" shares representing 65.00% ownership in the Company.

On September 11, 2009, ICLS changed its name into Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd.

20. OPERATING REVENUES

This account consists of the following:

	2008	2009
Cellular		
Value added services	5,052,615	5,998,963
Usage charges	7,021,877	5,844,537
Interconnection revenues	1,825,957	1,491,772
Monthly subscription charges	66,302	184,174
Sale of blackberry handsets and modems	82,476	206,481
Tower leasing	—	62,365
Connection fee	74,992	40,354
Others	61,234	131,028
Sub-total	**14,185,453**	**13,959,674**
MIDI		
Internet	703,914	677,375
IP VPN	585,658	566,105
World link and direct link	456,692	394,189
Frame net	315,791	276,477
Leased line	231,570	211,092
Application services	118,895	146,137
Digital data network	124,891	144,619
Satellite lease	96,280	113,060
MPLS	25,161	67,141
TV link	8,679	6,230
Others	65,881	110,207
Sub-total	**2,733,412**	**2,712,632**
Fixed Telecommunication		
International Calls	1,657,915	1,576,408
Fixed Wireless	244,304	249,886
Fixed Line	126,660	129,935
Others	685	950
Sub-total	**2,029,564**	**1,957,179**
Total	**18,948,429**	**18,629,485**

Operating revenues from related parties amounted to Rp1,790,115 and Rp1,474,208 for the years ended December 31, 2008 and 2009, respectively. These amounts represent 9.45% and 7.91% of total operating revenues in 2008 and 2009, respectively (Note 26).

21. OPERATING EXPENSES—COST OF SERVICES

This account consists of the following:

	2008	2009
Interconnection	1,975,255	1,662,683
Radio frequency fee	1,025,082	1,331,416
Maintenance	903,244	922,225
Utilities	507,985	772,450
Leased circuits	447,319	487,074
Rent	377,044	475,631
Cost of SIM cards and pulse reload vouchers	391,101	326,472
Cost of handsets and modems	111,537	247,135
USO	123,452	218,210
License	46,603	117,098
Installation	88,179	97,142
Concession fee	170,321	83,970
Delivery and transportation	84,825	80,157
Billing and collection	49,209	44,297
Others	74,831	30,340
Total	**6,375,987**	**6,896,300**

Interconnection relates to the expenses for the interconnection between the Company's telecommunications networks and those owned by Telkom or other telecommunications carriers (Note 2g.5).

22. OPERATING EXPENSES—PERSONNEL

This account consists of:

	2008	2009
Salaries	420,297	451,150
Incentives and other employee benefits	287,889	275,817
Bonuses	279,483	207,690
Employee income tax	251,950	145,421
Post-retirement healthcare benefits (Note 25)	120,147	88,615
Outsourcing	115,890	74,809
Medical expense	61,220	68,471
Separation, appreciation and compensation expense under Labor Law No. 13/2003 (Note 25)	27,581	40,972
Early retirement *	19,598	38,106
Pension (Note 25)	36,796	32,336
Others	18,142	28,173
Total	**1,638,993**	**1,451,560**

* On June 27, 2006, the Company's Directors issued Decree No. 051/DIREKSI/2006, "Additional Benefits for Voluntarily Resigned Employees". Under this decree, employees qualified for early retirement and who voluntarily resigned after the approval from the Board of Directors were given benefits of additional remuneration, traveling and training package. During the years ended December 31, 2008 and 2009, there were additional 41 and 66 employees, respectively, who took the option.

The personnel expenses capitalized to properties under construction and installation during the years ended December 31, 2008 and 2009 amounted to Rp37,111 and Rp34,092, respectively.

23. OPERATING EXPENSES—ADMINISTRATION AND GENERAL

This account consists of:

	2008	2009
Rent	141,245	144,585
Professional fees	116,043	103,916
Provision for impairment losses on accounts receivable (Note 5)	74,281	98,042
Utilities	60,760	77,318
Transportation	122,987	58,882
Office	49,673	44,710
Insurance	26,093	29,183
Catering	22,045	20,730
Communications	20,203	18,374
Training, education and research	39,443	17,289
Others (each below Rp20,000)	64,659	80,408
Total	**737,432**	**693,437**

24. FINANCING COST

This account consists of:

	2008	2009
Interest on loans (Notes 14 and 15)	1,830,055	1,859,925
Loss on repurchase of GN 2010 and GN 2012 (Note 15)	19,493	—
Bank charges	8,746	13,042
Total	**1,858,294**	**1,872,967**

25. PENSION PLAN

The Company, Satelindo and Lintasarta have defined benefit and defined contribution pension plans covering substantially all of their qualified permanent employees.

Defined Benefit Pension Plan

The Company, Satelindo and Lintasarta provide defined benefit pension plans to their respective employees under which pension benefits to be paid upon retirement are based on the employees' most recent basic salary and number of years of service. PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), a state-owned life insurance company, manages the plans. Pension contributions are determined by periodic actuarial calculations performed by Jiwasraya.

Based on an amendment dated December 22, 2000 of the Company's pension plan, which was further amended on March 29, 2001, the benefits and premium payment pattern were changed. Before the amendment, the premium was regularly paid annually until the plan would be fully funded, and the benefits consisted of retirement benefit (regular monthly or lump-sum pension) and death insurance. In conjunction with the amendment, the plan would be fully funded after making installment payments up to January 2002 of the required amount to fully fund the plan determined as of September 1, 2000. The amendment also includes an additional benefit in the form of thirteenth-month retirement benefit, which is payable annually 14 days before Idul Fitri ("Moslem Holiday").

The amendment covers employees registered as participants of the pension plan as of September 1, 2000 and includes an increase in basic salary pension by 9% compounded annually starting from September 1, 2001. The amendment also stipulates that there will be no increase in the premium even in cases of mass employee terminations or changes in marital status.

The total premium installments based on the amendment amounted to Rp355,000, and were paid on due dates.

On March 1, 2007, the Company entered into an agreement with Jiwasraya to provide defined death insurance plan to 1,276 employees as of January 1, 2007, who are not covered by the defined benefit pension plan as stated above. Based on the agreement, a participating employee will receive:

- Expiration benefit equivalent to the cash value at the normal retirement age, or
- Death benefit not due to accident equivalent to 100% of insurance money plus cash value when the employee dies not due to accident, or
- Death benefit due to accident equivalent to 200% of insurance money plus cash value when the employee dies due to accident.

The premium of Rp7,600 was fully paid on March 29, 2007. Subsequently, in August 2007, February to December 2008, and January to December 2009, the Company made payments for additional premium of Rp275 for additional 55 employees, Rp805 for additional 161 employees, and Rp415 for additional 81 employees, respectively.

On June 25, 2003, Satelindo entered into an agreement with Jiwasraya to amend the benefits and premium payment pattern of the former's pension plan. The amendment covers employees registered as participants of the pension plan as of December 25, 2002 up to June 25, 2003. Other new conditions include the following:

- An increase in pension basic salary at 6% compounded annually starting from December 25, 2002
- Thirteenth-month retirement benefit, which is payable annually 14 days before Idul Fitri

- An increase in periodic payment of retirement benefit at 6% compounded annually starting one year after receiving periodic retirement benefit for the first time
- If the average annual interest rate of time deposits of government banks exceeds 15%, the participants' retirement benefit will be increased by a certain percentage in accordance with the formula agreed by both parties.

On April 15, 2005, Lintasarta entered into an agreement with Jiwasraya to replace their existing agreement. Based on the new agreement, the benefits and premium payment pattern were changed. This agreement is effective starting January 1, 2005. The total premium installments based on the agreement amount to Rp61,623, which is payable in 10 annual installments starting 2005 until 2015.

The new agreement covers employees registered as participants of the pension plan as of April 1, 2003. The conditions under the new agreement include the following:

- An increase in pension basic salary by 3% (previously was estimated at 8%) compounded annually starting April 1, 2003
- An increase in periodic payment of retirement benefit at 5% compounded annually starting one year after receiving periodic retirement benefit for the first time
- If the average annual interest rate of time deposits of government banks exceeds 15%, the participants' retirement benefit will be increased by a certain percentage in accordance with the formula agreed by both parties.

On May 2, 2005, Lintasarta entered into an agreement with Jiwasraya to amend the above agreement. The amendment covers employees registered as participants of the pension plan as of April 1, 2003 up to November 30, 2004 with additional 10 annual premium installments totalling Rp1,653 which are payable starting 2005 until 2015.

The contributions made by Lintasarta to Jiwasraya amounted to Rp9,653 and Rp9,653 for the years ended December 31, 2008 and 2009, respectively.

The net periodic pension cost for the pension plans for the years ended December 31, 2008 and 2009 was calculated based on the actuarial valuations as of December 31, 2008 and 2009, respectively. The actuarial valuations were prepared by an independent actuary, using the projected-unit-credit method and applying the following assumptions:

	2008	2009
Annual discount rate	12.0%	10.5 - 10.7%
Expected annual rate of return on plan assets	4.5 - 9.0%	4.5 - 9.0%
Annual rate of increase in compensation	3.0 - 9.0%	3.0 - 9.0%
Mortality rate (Indonesian Mortality Table—TMI)	TMI 1999	TMI 1999

a. The composition of the net periodic pension cost for the years ended December 31, 2008 and 2009 is as follows:

	2008	2009
Interest cost	66,100	63,648
Service cost	29,502	39,510
Return on plan assets	(63,894)	(69,393)
Amortization of unrecognized actuarial loss (gain)	5,088	(1,429)
Net periodic pension cost (Note 22)	**36,796**	**32,336**

b. The funded status of the plans as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009 is as follows:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Plan assets at fair value	730,787	805,199	813,588
Projected benefit obligation	(672,145)	(541,239)	(726,427)
Excess of plan assets over projected benefit Obligation	58,642	263,960	87,161
Unrecognized actuarial loss (gain)	142,349	(90,860)	62,659
Net prepaid pension cost	**200,991**	**173,100**	**149,820**

b. Movements in the fair value of plan assets during the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows:

December 31, 2008	The Company	Lintasarta	Total
Fair value of plan assets at beginning of the year	697,641	33,146	730,787
Expected return on plan assets	60,960	2,934	63,894
Actuarial gain (loss) on plan assets	37,546	(1,632)	35,914
Contributions	805	9,653	10,458
Actual benefits paid	(33,252)	(2,602)	(35,854)
Fair value of plan assets at end of year	**763,700**	**41,499**	**805,199**

December 31, 2009	The Company	Lintasarta	Total
Fair value of plan assets at beginning of the year	763,700	41,499	805,199
Expected return on plan assets	65,745	3,648	69,393
Actuarial loss on plan assets	(8,910)	(3,000)	(11,910)
Contributions	415	9,653	10,068
Actual benefits paid	(57,706)	(1,456)	(59,162)
Fair value of plan assets at end of year	**763,244**	**50,344**	**813,588**

c. Movements in the present value of the defined benefit obligation during the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows:

December 31, 2008	The Company	Lintasarta	Total
Benefit obligation at beginning of year	639,131	33,014	672,145
Interest cost	62,859	3,241	66,100
Current service cost	27,280	2,222	29,502
Actuarial gain on obligation	(10,588)	(8,144)	(18,732)
Actual benefits paid	(32,694)	(1,607)	(34,301)
Effect of changes in actuarial assumptions	(173,475)	—	(173,475)
Present value of obligation at end of year	**512,513**	**28,726**	**541,239**

December 31, 2009	The Company	Lintasarta	Total
Benefit obligation at beginning of year	512,513	28,726	541,239
Interest cost	60,288	3,360	63,648
Current service cost	36,496	3,014	39,510
Actuarial loss on obligation	624	7,808	8,432
Actual benefits paid	(57,057)	(1,092)	(58,149)
Effect of changes in actuarial assumptions	131,747	—	131,747
Present value of obligation at end of year	**684,611**	**41,816**	**726,427**

e. Movements in the prepaid pension cost during the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows:

December 31, 2008	The Company	Lintasarta	Total
Prepaid Pension Cost at beginning of year	187,801	13,190	200,991
Net periodic pension cost	(33,607)	(3,189)	(36,796)
Refund from Jiwasraya	(558)	(995)	(1,553)
Contribution to Jiwasraya	805	9,653	10,458
Prepaid Pension Cost at end of year	**154,441**	**18,659**	**173,100**

December 31, 2009	The Company	Lintasarta	Total
Prepaid Pension Cost at beginning of year	154,441	18,659	173,100
Net periodic pension cost	(29,487)	(2,849)	(32,336)
Refund from Jiwasraya	(649)	(363)	(1,012)
Contribution to Jiwasraya	415	9,653	10,068
Prepaid Pension Cost at end of year	**124,720**	**25,100**	**149,820**

f. Prepaid pension cost consists of:

	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
Current portion (presented as part of "Prepaid Expenses")			
The Company	2,128	2,712	1,715
Lintasarta	503	402	725
	2,631	3,114	2,440
Long-term portion			
The Company	185,673	151,729	123,005
Lintasarta	12,687	18,257	24,375
	198,360	169,986	147,380
Total prepaid pension cost	**200,991**	**173,100**	**149,820**

The major categories of plan assets as a percentage of the fair value of total plan assets are as follows:

	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
	%	%	%
Investment in mutual fund	71.67%	71.67%	71.67%
Investment in time deposits	12.84%	12.84%	12.84%
Investment in debt securities	9.71%	9.71%	9.71%
Investment in shares and properties	5.77%	5.77%	5.77%
Other investments	0.01%	0.01%	0.01%

The overall expected rate of return on assets is determined based on the market expectations prevailing on that date, applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been a significant change in the expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

Defined Contribution Pension Plan

In May 2001 and January 2003, the Company and Satelindo assisted their employees in establishing their respective employees' defined contribution pension plans, in addition to the defined benefit pension plan as mentioned above. Starting June 2004, the Company also assisted ex-IM3 employees in establishing their defined contribution pension plan. Under the defined contribution pension plan, the employees contribute 10%-20% of their basic salaries, while the Company does not contribute to the plans. Total contributions of the employees for the years ended December 31, 2008 and 2009 amounted to Rp16,866 and Rp19,451, respectively. The plan assets are being administered and managed by seven financial institutions appointed by the Company and Satelindo, based on the choice of the employees.

Labor Law No. 13/2003

The Company, Lintasarta and IMM also accrue benefits under Labor Law No. 13/2003 ("Labor Law") dated March 25, 2003. Their employees will receive the benefits under this law or defined benefit pension plan, whichever amount is higher.

The net periodic pension cost under the Labor Law for the years ended December 31, 2008 and 2009 was calculated based on the actuarial valuations as of December 31, 2008 and 2009, respectively. The actuarial valuations were prepared by an independent actuary, using the projected-unit-credit method and applying the following assumptions:

	2008	2009
Annual discount rate	12.0%	10.5%
Annual rate of increase in compensation	10.0 - 11.00%	9.0 - 10.0%

a. The composition of the periodic pension cost under the Labor Law for the years ended December 31, 2008 and 2009 is as follows:

	2008	2009
Service cost	16,779	19,587
Interest cost	10,357	18,639
Amortization of unrecognized actuarial loss	445	1,842
Immediate recognition of past service cost—vested benefit	—	904
Periodic pension cost (Note 22)	**27,581**	**40,972**

b. The composition of the accrued pension cost under the Labor Law as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009 is as follows:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Projected benefit obligation	104,528	156,454	187,888
Unrecognized actuarial loss	(15,737)	(42,698)	(27,147)
Unrecognized past service cost	(455)	(427)	(10,348)
Accrued pension cost	**88,336**	**113,329**	**150,393**

c. Movements in the present value of pension cost under the Labor Law obligation during the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows:

December 31, 2008	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Benefit obligation at beginning of year	94,063	6,297	4,168	104,528
Actuarial loss (gain) on obligation	27,284	2,285	(667)	28,902
Current service cost	14,736	1,019	1,024	16,779
Interest cost	9,317	628	412	10,357
Actual benefits paid	(2,526)	(46)	(16)	(2,588)
Effect of changes in actuarial assumption	(1,558)	1,281	(1,247)	(1,524)
Present value of obligation at end of year	**141,316**	**11,464**	**3,674**	**156,454**

c. Movements in the present value of pension cost under the Labor Law obligation during the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows: (continued)

December 31, 2009	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Benefit obligation at beginning of year	141,316	11,464	3,674	156,454
Actuarial gain on obligation	(3,316)	(78)	(368)	(3,762)
Current service cost	16,173	1,817	1,597	19,587
Interest cost	16,832	1,372	435	18,639
Actual benefits paid	(3,841)	(47)	(20)	(3,908)
Past service cost	—	10,853	—	10,853
Effect of changes in actuarial assumption	(8,109)	(3,208)	1,342	(9,975)
Present value of obligation at end of year	**159,055**	**22,173**	**6,660**	**187,888**

d. Movements in the accrued pension cost under the Labor Law during the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows:

December 31, 2008	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Accrued pension cost under the Labor Law at beginning of year	78,604	7,013	2,719	88,336
Periodic Labor Law cost	24,440	1,642	1,499	27,581
Benefit payment	(2,526)	(46)	(16)	(2,588)
Accrued pension cost under the Labor Law at end of year	**100,518**	**8,609**	**4,202**	**113,329**

December 31, 2009	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Accrued pension cost under the Labor Law at beginning of year	100,518	8,609	4,202	113,329
Periodic Labor Law cost	34,739	4,209	2,024	40,972
Benefit payment	(3,841)	(47)	(20)	(3,908)
Accrued pension cost under the Labor Law at end of year	**131,416**	**12,771**	**6,206**	**150,393**

As of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009, the current portion of pension cost under the Labor Law included in accrued expenses (Note 13) amounted to Rp1,828, Rp2,155 and Rp2,603, respectively, and the non-current portion included in other non-current liabilities (Note 17) amounted to Rp86,508, Rp111,174 and Rp147,790, respectively.

Post-retirement Healthcare

The Company provides post-retirement healthcare benefits to its employees who leave the Company after the employees fulfill the early retirement requirement. The spouse and children who have been officially registered in the administration records of the Company are also eligible to receive benefits. If the employees die, the spouse and children are still eligible for the post-retirement healthcare until the spouse dies or remarries and the children reach the age of 25 or get married.

The utilization of post-retirement healthcare is limited to an annual maximum ceiling that refers to monthly pension from Jiwasraya as follows:

- 16 times the Jiwasraya monthly pension for a pensioner who receives monthly pension from Jiwasraya
- 16 times the equality monthly pension for a pensioner who became permanent employee after September 1, 2000
- 16 times the last monthly pension for a pensioner who retired after July 1, 2003 and does not receive Jiwasraya monthly pension.

The net periodic post-retirement healthcare cost for the years ended December 31, 2008 and 2009 was calculated based on the actuarial valuations as of December 31, 2008 and 2009. The actuarial valuations were prepared by an independent actuary, using the projected-unit-credit method and applying the following assumptions:

	2008	2009
Annual discount rate	12.0%	11.0%
Ultimate cost trend rate	6.0%	6.0%
Next year trend rate	18.0%	16.0%
Period to reach ultimate cost trend rate	6 years	5 years

a. The composition of the periodic post-retirement healthcare cost for the years ended December 31, 2008 and 2009 is as follows:

	2008	2009
Interest cost	76,300	58,535
Service cost	16,997	19,628
Amortization of unrecognized past service cost	10,452	10,452
Amortization of unrecognized actuarial loss	16,398	—
Periodic post-retirement healthcare cost (Note 22)	**120,147**	**88,615**

b. The composition of the accrued post-retirement healthcare cost as of December 31, 2008 and 2009 is as follows:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Projected benefit obligation	767,828	492,615	605,660
Unrecognized actuarial gain (loss)	(333,412)	43,315	(2,150)
Unrecognized past service cost	(62,610)	(52,158)	(41,705)
Accrued post-retirement healthcare cost	**371,806**	**483,772**	**561,805**

c. Movements in the present value of defined benefit obligation during the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows:

	2008	2009
Benefit obligation at beginning of year	767,828	492,615
Interest cost	76,300	58,535
Current service cost	16,997	19,628
Actual benefits paid	(8,181)	(10,582)
Actuarial gain on obligation	(150,730)	(37,177)
Effect of changes in actuarial assumptions	(209,599)	82,641
Present value of obligation at end of year	**492,615**	**605,660**

d. Movements in the accrued post-retirement healthcare cost during the years ended December 31, 2008 and 2009 are as follows:

	2008	2009
Beginning balance	371,806	483,772
Net periodic post-retirement healthcare cost	120,147	88,615
Benefit payment	(8,181)	(10,582)
Ending balance	**483,772**	**561,805**

e. The effect of a one percentage point change in assumed post-retirement healthcare cost trend rate would result in aggregate service and interest costs for the years ended December 31, 2008 and 2009 and accumulated post-retirement healthcare benefit obligation as of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009 as follows:

		December 31,	
	January 1, 2008	2008	2009
Increase			
Service and interest costs	—	94,418	104,642
Accumulated post-retirement healthcare benefit obligation	943,774	588,492	725,664
Decrease			
Service and interest costs	—	63,817	70,237
Accumulated post-retirement healthcare benefit obligation	631,196	416,360	510,522

As of January 1, 2008 and December 31, 2008 and 2009, the current portion of post-retirement healthcare cost included in accrued expenses (Note 13) amounted to Rp9,661, Rp9,654 and Rp12,798, respectively, and the non-current portion included in other non-current liabilities (Note 17) amounted to Rp362,145, Rp474,118 and Rp549,007, respectively.

Amounts for the current annual period and previous two annual periods of employee benefits:

	Defined Benefit Pension Plan		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
The Company			
Plan assets	697,641	763,700	763,244
Projected benefit obligation	(639,131)	(512,513)	(684,611)
Excess of plan assets over projected benefit obligation	58,510	251,187	78,633
Unrecognized actuarial gain (loss)	129,291	(96,746)	46,087
Net Prepaid Pension	**187,801**	**154,441**	**124,720**
Lintasarta			
Plan assets	33,146	41,499	50,344
Projected benefit obligation	(33,014)	(28,726)	(41,816)
Excess of plan assets over projected benefit obligation	132	12,773	8,528
Unrecognized actuarial gain	13,058	5,886	16,572
Net Prepaid Pension	**13,190**	**18,659**	**25,100**
Total	**200,991**	**173,100**	**149,820**

	Labor Law No.13/2003		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
The Company			
Projected benefit obligation	(94,063)	(141,316)	(159,055)
Unrecognized actuarial gain	15,459	40,798	27,639
Net	**(78,604)**	**(100,518)**	**(131,416)**
Lintasarta			
Projected benefit obligation	(6,297)	(11,464)	(22,173)
Unrecognized actuarial gain (loss)	(716)	2,855	(547)
Unrecognized past service cost	—		9,949
Net	**(7,013)**	**(8,609)**	**(12,771)**
IMM			
Projected benefit obligation	(4,168)	(3,674)	(6,660)
Unrecognized actuarial gain (loss)	994	(955)	55
Unrecognized past service cost	455	427	399
Net	**(2,719)**	**(4,202)**	**(6,206)**
Total	**(88,336)**	**(113,329)**	**(150,393)**

	Post-retirement Healthcare		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
The Company			
Projected benefit obligation	(767,828)	(492,615)	(605,660)
Unrecognized actuarial loss (gain)	333,412	(43,315)	2,150
Unrecognized past service cost	62,610	52,158	41,705
Net	**(371,806)**	**(483,772)**	**(561,805)**

26. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The details of the accounts and the significant transactions entered into with related parties (affiliates, unless otherwise indicated) are as follows:

	Amount			Percentage to Total Assets/ Liabilities (%)		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
Cash and cash equivalents (Note 4)						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	2,094,958	2,207,564	1,450,937	4.63	4.26	2.62
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	341,318	1,283,174	207,983	0.75	2.48	0.38
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	686,612	763,563	171,500	1.52	1.47	0.31
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	311,965	69,400	117,000	0.69	0.13	0.21
PT Bank Syariah Mandiri ("Mandiri Syariah")	454,612	202,786	107,310	1.01	0.39	0.19
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	5,873	4,158	4,652	0.01	0.01	0.01
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	20,000	1,500	3,500	0.04	0.00	0.01
PT Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta ("BPD-DIY")	1,626	2,175	1,896	0.01	0.01	0.00
DBS *	525,720	—	—	1.16	—	—
Danamon *	508,008	—	—	1.12	—	—
Others	3,706	2,785	3,264	0.02	0.01	0.01
Total	**4,954,398**	**4,537,105**	**2,068,042**	**10.96**	**8.76**	**3.74**
Accounts Receivable—trade (Note 5)						
State-owned banks	32,253	17,644	42,860	0.07	0.03	0.08
Telkom	38,208	32,801	31,724	0.08	0.06	0.06
PT Televisi Republik Indonesia (Persero) ("TVRI")	43,745	27,016	25,322	0.10	0.05	0.04
PT Citra Sari Makmur ("CSM")	4,875	10,932	13,807	0.01	0.02	0.02
PT Pos Indonesia (Persero)	9,329	11,966	10,752	0.02	0.02	0.02
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	4,110	20,346	5,318	0.01	0.04	0.01
Q-tel **	—	—	3,460	—	—	0.01
PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN")	11,618	6,419	2,746	0.03	0.01	0.00
Perusahaan Tambang Minyak Negara ("Pertamina")	—	—	1,737	—	—	0.00
PT Angkasa Pura (Persero)	—	—	1,515	—	—	0.00
Lembaga Kantor Berita Negara ("LKBN") Antara	1,049	650	—	0.00	0.00	—
Starhub Pte. Ltd. ("Starhub"), Singapore *	53,452	—	—	0.12	—	—
Singapore Telecommunication Ltd. ("Singtel"), Singapore *	945	—	—	0.00	—	—
Others	22,103	17,748	44,209	0.05	0.05	0.09
Total	**221,687**	**145,522**	**183,450**	**0.49**	**0.28**	**0.33**
Less allowance for impairment losses on accounts receivable	88,342	69,444	57,538	0.20	0.13	0.10
Net	**133,345**	**76,078**	**125,912**	**0.29**	**0.15**	**0.23**
Prepaid expenses						
MOCIT	397,946	632,350	783,533	0.88	1.22	1.42
Jiwasraya (Note 25)	2,631	3,114	2,440	0.00	0.01	0.01
Kopindosat	2,810	2,790	2,306	0.01	0.01	0.00
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("INTI")	—	1,648	2,116	—	0.00	0.00
Telkom	—	1,434	1,434	—	0.00	0.00
Others	3,494	2,091	3,051	0.01	0.00	0.01
Total	**406,881**	**643,427**	**794,880**	**0.90**	**1.24**	**1.44**

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 19)
** became a related party starting June 6, 2008 (Note 19)

	Amount			Percentage to Total Assets/ Liabilities (%)		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
Other current assets						
Tax Office	224,188	345,695	421,745	0.67	0.67	0.76
Others	7	7	54	0.00	0.00	0.00
Total	**224,195**	**345,702**	**421,799**	**0.67**	**0.67**	**0.76**
Other current financial assets						
State-owned banks	16,667	26,045	20,173	0.04	0.05	0.04
Total	**16,667**	**26,045**	**20,173**	**0.04**	**0.05**	**0.04**
Due from related parties						
Kopindosat	5,949	5,958	5,958	0.01	0.01	0.01
Telkomsel	22,401	2,892	1,558	0.05	0.01	0.00
Senior management	2,084	817	68	0.01	0.00	—
Directorate General of Customs and Excise	24,668	23,629	—	0.05	0.05	—
State-owned banks	1,480	—	—	0.00	—	—
Pertamina	—	7,153	—	—	0.01	—
Others	2,130	4,466	813	0.01	0.01	0.00
Total	**58,712**	**44,915**	**8,397**	**0.13**	**0.09**	**0.01**
Less allowance for Impairment losses on receivables	2,257	2,419	1,182	0.01	0.00	0.00
Net	**56,455**	**42,496**	**7,215**	**0.12**	**0.09**	**0.01**
Long-term prepaid pension (Note 25)						
Jiwasraya	**198,360**	**169,986**	**147,380**	**0.44**	**0.33**	**0.27**
Long-term advance						
INTI	3,472	1,830	3,108	0.01	0.00	0.01
Kopindosat	2,464	2,577	2,059	0.00	0.01	0.00
PT Nexwave *	3,557	—	—	0.01	—	—
PT SCS Astra Graphia Technologies *	68	—	—	0.00	—	—
Total	**9,561**	**4,407**	**5,167**	**0.02**	**0.01**	**0.01**
Non-current assets—others						
Telkom	22,370	21,032	19,598	0.05	0.04	0.04
Kopindosat	10,669	12,288	11,982	0.02	0.02	0.02
INTI	—	4,744	5,499	—	0.01	0.01
Others	5,231	1,733	2,608	0.01	0.01	0.00
Total	**38,270**	**39,797**	**39,687**	**0.08**	**0.08**	**0.07**
Other non-current financial assets						
State-owned banks	36,654	32,520	46,170	0.08	0.06	0.08
Total	**36,654**	**32,520**	**46,170**	**0.08**	**0.06**	**0.08**

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 19)

	Amount			Percentage to Total Assets/ Liabilities (%)		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
Accounts payable—trade						
Telkomsel	13,213	—	30,901	0.04	—	0.08
Telkom	1,646	431	4,447	0.01	0.00	0.01
Indonesia Comnet Plus ("Comnet")	—	5,226	2,793	—	0.02	0.01
Qtel **	—	1,699	—	—	0.01	—
Optus *	2,226	—	—	0.01	—	—
Others	23,403	4,753	529	0.08	0.01	0.00
Total	**40,488**	**12,109**	**38,670**	**0.14**	**0.04**	**0.10**
Procurement payable (Note 11)						
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	—	—	35,911	—	—	0.10
INTI	92,931	34,737	30,143	0.33	0.10	0.08
Kopindosat	37,441	25,240	25,509	0.13	0.08	0.07
PT Personel Alih daya	14,652	17,739	13,907	0.05	0.05	0.04
TVRI	—	—	11,797	—	—	0.03
PT Nexwave *	16,638	—	—	0.06	—	—
PT SCS Astra Graphia Technologies *	6,496	—	—	0.02	—	—
Others	—	2	17	—	0.00	0.00
Total	**168,158**	**77,718**	**117,284**	**0.59**	**0.23**	**0.32**
Accrued expenses						
MOCIT	376,678	345,424	305,564	1.32	1.01	0.83
PLN	4,082	3,330	94,337	0.02	0.01	0.26
Senior management	17,791	15,914	27,825	0.06	0.05	0.08
PT Personel Alih Daya	—	—	9,305	—	—	0.02
Kopindosat	21,991	18,441	—	0.08	0.05	—
Others	6,170	4,872	1,112	0.02	0.02	0.00
Total	**426,712**	**387,981**	**438,143**	**1.50**	**1.14**	**1.19**
Other current liabilities						
Tax Office	121,922	157,721	99,872	0.43	0.46	0.27
Telkomsel	2,560	2,738	1,664	0.01	0.01	0.00
Starhub *	177	—	—	0.00	—	—
Others	—	620	—	—	0.00	—
Total	**124,659**	**161,079**	**101,536**	**0.44**	**0.47**	**0.27**
Other current financial liabilities						
Directorate General of Customs and Excise	24,184	—	—	0.08	—	—
Others	—	—	—	—	—	—
Total	**24,184**	**—**	**—**	**0.08**	**—**	**—**
Due to related parties						
TVRI	2,262	6,910	10,147	0.01	0.02	0.03
Kopindosat	1,509	1,303	1,490	0.00	0.00	0.01
State-owned banks	1,875	2,072	977	0.01	0.01	0.00
Telkom	45,487	601	59	0.16	0.00	0.00
PT Pos Indonesia (Persero)	48	3,813	48	0.00	0.01	0.00
Comnet	5,373	—	—	0.02	—	—
Others	8,296	—	1,043	0.03	—	0.00
Total	**64,850**	**14,699**	**13,764**	**0.23**	**0.04**	**0.04**

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 19)

** became a related party starting June 6, 2008 (Note 19)

	Amount			Percentage to Total Assets/ Liabilities (%)		
	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009	January 1, 2008	December 31, 2008	December 31, 2009
Loans payable (Note 14)						
State-owned Banks	**1,994,909**	**1,796,142**	**2,592,489**	**7.00**	**5.27**	**7.03**
Other non-current liabilities						
Telkomsel	11,445	9,782	8,118	0.04	0.03	0.02
Starhub *	855	—	—	0.00	—	—
Total	**12,300**	**9,782**	**8,118**	**0.04**	**0.03**	**0.02**

	Amount		Percentage to Respective Income or Expenses (%)	
	2008	2009	2008	2009
Operating revenues				
Telkom	919,410	672,225	4.85	3.61
Telkomsel	375,198	260,345	1.98	1.40
State-owned banks	214,631	301,434	1.13	1.62
TVRI	4,178	22,547	0.02	0.12
State-owned universities	5,203	17,348	0.03	0.09
CSM	7,420	14,855	0.04	0.08
PT Pos Indonesia	6,297	14,379	0.03	0.08
Pertamina	2,439	11,238	0.01	0.06
PSN	9,847	7,202	0.05	0.04
Comnet	10,534	5,831	0.06	0.03
PT Angkasa Pura (Persero)	4,888	3,887	0.03	0.02
Badan Meteorologi dan Geofisika ("BMG")	1,797	3,027	0.01	0.02
PLN	2,059	2,667	0.01	0.01
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ("LIPI")	1,810	2,662	0.01	0.01
PT Infomedia Nusantara	1,478	2,274	0.01	0.01
Badan Pengkajian dan Penetapan Teknologi ("BPPT")	68	2,058	0.00	0.01
Bintek keuangan	2,079	1,958	0.01	0.01
PT Aneka Tambang	1,445	1,591	0.01	0.01
PT Merpati Nusantara Airlines	3,401	1,538	0.02	0.01
PT Krakatau Steel	505	1,057	0.00	0.01
LKBN Antara	987	946	0.01	0.01
MOCIT	1,857	247	0.01	0.00
StarHub *	36,748	—	0.19	—
Private banks	28,161	—	0.15	—
SingTel *	17,304	—	0.09	—
Others	130,371	122,892	0.69	0.65
Total	**1,790,115**	**1,474,208**	**9.45**	**7.91**

	Amount		Percentage to Respective Income or Expenses (%)	
	2008	2009	2008	2009
Operating expenses				
Cost of services				
MOCIT	1,318,855	1,633,596	9.27	10.59
Telkom	941,224	711,784	6.62	4.62
PLN	390,965	617,953	2.75	4.01
Telkomsel	584,470	566,334	4.11	3.67
PT Personel Alih Daya	68,948	57,714	0.48	0.37
Comnet	37,649	36,741	0.26	0.24
Kopindosat	2,615	5,661	0.02	0.04
INTI	7,015	3,367	0.05	0.02
Perusahaan Gas Negara ("PGN")	8,388	3,213	0.06	0.02
PSN	2,206	1,692	0.02	0.01
SingTel *	12,637	—	0.09	—
Starhub *	3,321	—	0.02	—
Others	3,570	—	0.02	—
Total	**3,381,863**	**3,638,055**	**23.77**	**23.59**

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 19)

	Amount		Percentage to Respective Income or Expenses (%)	
	2008	2009	2008	2009
Personnel				
Senior management	134,613	145,510	0.95	0.94
PT Personel Alih Daya	—	56,613	—	0.37
Jiwasraya	36,796	32,336	0.26	—
Kopindosat	114,368	—	0.80	0.21
Total	**285,777**	**234,459**	**2.01**	**1.52**
Administration and general				
PLN	42,436	75,967	0.30	0.50
PT Personel Alih Daya	—	35,912	—	0.23
Kopindosat	45,124	24,465	0.32	0.16
State-owned banks	505	1,971	0.00	0.01
Usaha Gedung Bank Dagang Negara ("UGBDN")	4,806	887	0.03	0.00
Others	6,891	4,122	0.05	0.03
Total	**99,762**	**143,324**	**0.70**	**0.93**
Other income (expenses)				
Interest income				
State-owned banks	222,727	101,693	10.25	14.93
Private banks *	36,458	—	1.68	—
Others	879	306	0.04	0.04
	260,064	**101,999**	**11.97**	**14.97**
Financing cost				
State-owned banks	(196,667)	(225,216)	(9.05)	(33.05)
Private banks *	(16,302)	—	(0.75)	—
Others	(6,715)	(5,624)	(0.31)	(0.83)
	(219,684)	**(230,840)**	**(10.11)**	**(33.88)**
Net	**40,380**	**(128,841)**	**1.86**	**(18.91)**

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 19)

The relationship and nature of account balances/transactions with related parties are as follows:

No.	Related Parties	Relationship	Nature of Account Balances/Transactions
1.	State-owned banks	Affiliates	Cash and cash equivalents, loans payable and operating revenues—MIDI
2.	Telkom (Notes 30g)	Affiliate	Operating revenues—cellular, fixed telecommunication and MIDI; operating expenses—cost of services
3.	TVRI	Affiliate	Operating revenues—MIDI
4.	CSM	Affiliate	Operating revenues—MIDI
5.	PT Pos Indonesia (Persero)	Affiliate	Operating revenues—MIDI
6.	Telkomsel	Affiliate	Operating revenues—cellular and fixed telecommunication
7.	Qtel **	Ultimate Stockholder	Operating revenues—fixed telecommunication
8.	PSN	Affiliate	Operating revenues—MIDI
9.	Pertamina	Affiliate	Operating revenues—MIDI
10.	PT Angkasa Pura (Persero)	Affiliate	Operating revenues—MIDI
11.	LKBN ANTARA	Affiliate	Operating revenues—MIDI
12.	StarHub *	Affiliate	Operating revenues—international calls
13.	SingTel *	Affiliate	Operating revenues—international calls
14.	MOCIT	Government Agency	Operating revenues—MIDI; operating expenses—cost of services
15.	Jiwasraya	Affiliate	Long-term prepaid pension
16.	Kopindosat	Affiliate	Operating expenses—personnel expenses, administration and general expenses
17.	INTI	Affiliate	Procurement payable
18.	Tax Office	Government Agency	Other current assets and other current liabilities
19.	Senior management	Key management personnel	Operating expenses—personnel expenses, and prepaid expense—unamortized portions of housing and transformation advances, and transformation incentives
20.	Directorate General of Customs and Excise	Government Agency	Other current liabilities
21.	PT Nexwave	Affiliate	Procurement payable

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 19)
** become a related party starting June 6, 2008 (Note 19)

No.	Related Parties	Relationship	Nature of Account Balances/Transactions
22.	PT SCS Astra Graphia Technologies *	Affiliate	Long-term advance and procurement payable
23.	Comnet	Affiliate	Operating expenses—cost of services
24.	Optus	Affiliate	Operating revenues—fixed telecommunication
25.	PLN	Affiliate	Operating expenses—cost of services
26.	PT Personel Alih Daya	Affiliate	Operating expenses—personnel expenses and cost of services
27.	BMG	Affiliate	Operating revenues—MIDI
28.	LIPI	Affiliate	Operating revenues—MIDI
29.	PT Infomedia Nusantara	Affiliate	Operating revenues—MIDI
30.	BPPT	Affiliate	Operating revenues—MIDI
31.	Bintek Keuangan	Affiliate	Operating revenues—MIDI
32.	PT Aneka Tambang	Affiliate	Operating revenues—MIDI
33.	PT Merpati Nusantara Airlines	Affiliate	Operating revenues—MIDI
34.	PT Krakatau Steel	Affiliate	Operating revenues—MIDI
35.	PGN	Affiliate	Operating expenses—cost of services
36.	UGBDN	Affiliate	Operating expenses—cost of services
37.	Private banks *	Affiliates	Cash and cash equivalents, loans payable and operating revenues—MIDI

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 19)

27. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share:

	2008	2009
Numerator for basic and diluted earnings per share—profit for the year attributable to the Owners of the Company	2,037,753	1,690,804
Denominator for basic and diluted earnings per share—Weighted-average number of shares outstanding during the year	5,433,933,500	5,433,933,500
Basic and diluted earnings per share	375.01	311.16
Basic and diluted earnings per ADS (50 B shares per ADS)	18,750.26	15,557.83

There are no potential dilutive outstanding shares as of December 31, 2008 and 2009.

28. DISTRIBUTION OF INCOME AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

At the Company's Stockholders' Annual General Meetings ("AGM"), the stockholders approved, among others, the appropriation of annual net income attributable to the Owners of the Company for reserve fund and cash dividend distribution, and the utilization of the remaining amount for reinvestment and working capital.

AGM Date	Reserve Fund (Rp)	Dividend per Share (Rp)	Dividend Payment Date
2007 Net Income			
June 5, 2008	20,420	187.90	July 15, 2008
2008 Net Income			
June 11, 2009	18,786	172.85	July 22, 2009

Dividend for the Government was paid in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

29. DERIVATIVES

The Company entered into several swap and currency forward contracts. Listed below is the information related to the contracts and their fair values (net of credit risk adjustment) as of January 1 and December 31, 2008 and 2009:

		Fair Value (Rp)		
			December 31,	
	Notional Amount (US$)	January 1, 2008	2008	2009
		Receivable (Payable)	Receivable (Payable)	Receivable (Payable)
Cross Currency Swap Contracts:				
a. Standard Chartered Bank, Jakarta Branch ("StandChart") [6]	25,000	8,973	—	—
b. GSI	100,000	66,489	223,306	88,523
c. GSI	25,000	(20,678)	36,569	(10,033)
d. GSI	75,000	21,255	22,604	70,588
e. Merrill Lynch Capital Market Bank Limited ("MLCMB") [5]	25,000	(952)	—	—
f. MLCMB [3]	25,000	(28,634)	—	—
g. StandChart	25,000	(8,288)	59,003	(431)
h. MLCMB [4]	25,000	(5,758)	—	—
i. StandChart	25,000	6,853	73,690	11,885
j. StandChart	25,000	17,126	83,663	22,768
k. HSBC, Jakarta Branch	25,000	6,666	69,427	14,428
l. Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch ("MLIB")	50,000	—	(31,106)	3,272
m.MLIB	25,000	—	(4,418)	(6,646)
n. MLIB	25,000	—	(1,345)	5,425
o. DBS	25,000	—	(20,991)	1,497
p. GSI	84,000	—	87,600	5,618
Sub-total		**63,052**	**598,002**	**206,894**

	Notional Amount (US$)	Fair Value (Rp)		
			December 31,	
		January 1, 2008	2008	2009
		Receivable (Payable)	Receivable (Payable)	Receivable (Payable)
Currency Forward Contracts:				
q. StandChart [1]	2,000	98	—	—
r. JPMorgan Close Bank, Singapore Branch ("JPMorgan") [2]	3,000 or 6,000	257	—	—
s. DBS [7]	5,000	—	—	—
t. DBS [7]	5,000	—	—	—
u. DBS [8]	5,000	—	—	—
Sub-total		**355**	**—**	**—**
Interest Rate Swap Contracts:				
v. HSBC, Jakarta Branch	27,037 with decreasing amount	—	(28,549)	(9,184)
w. HSBC, Jakarta Branch	44,200 with decreasing amount	—	(67,402)	(19,935)
x. GSCM	100,000	—	(111,690)	(73,226)
y. DBS	25,000 with decreasing amount	—	(16,941)	(10,680)
z. DBS	25,000 with decreasing amount	—	(13,856)	(9,927)
aa. Bank of Tokyo MUFJ ("BTMUFJ")	25,000 with decreasing amount	—	(7,094)	(5,134)
ab. BTMUFJ	25,000 with decreasing amount	—	(5,271)	(3,920)
ac. BTMUFJ	25,000 with decreasing amount	—	(3,882)	(3,116)
ad. StandChart	40,000 with decreasing amount	—	732	(1,311)
ae. DBS	26,000 with decreasing amount	—	(3,321)	(3,414)
af. DBS	26,000 with decreasing amount	—	—	(2,307)
ag. BTMUFJ	36,500 with decreasing amount	—	—	(6,485)
ah. ING Bank N.V.	25,000 with decreasing amount	—	—	(4,340)
ai. ING Bank N.V.	33,500	—	—	(4,451)
Sub-total		**—**	**(257,274)**	**(157,430)**
Total		**63,407**	**340,728**	**49,464**

(1) contract entered into in February 2007 and settled in February 2008

(2) contract entered into in April 2007 and settled in April 2008
(3) contract entered into in November 2005 and restructured into a new contract in August 2008
(4) contract entered into in March 2006 and restructured into a new contract in August 2008
(5) contract entered into in September 2005 and restructured into a new contract in September 2008
(6) contract entered into in April 2004 and settled in November 2008
(7) contracts entered into in May 2009 and settled in August 2009
(8) contract entered into in May 2009 and settled in November 2009

The net changes in fair value of the swap and currency forward contracts and embedded derivative (Note 14k), totalling Rp136,603 and (Rp486,916) in 2008 and 2009, respectively, were charged to "Gain (Loss) on Change in Fair Value of Derivatives—Net", which is presented under Other Income (Expenses) in the consolidated statements of comprehensive income.

The following are the details of the contracts:

Cross Currency Swap Contracts

No.	Counter-parties	Contract Period and Swap Amount	Annual Swap Premium Rate	Swap Premium Payment Date	Amount of Swap Premium Paid/Amortized (Rp)	
					2008	2009
a.	StandChart (i)	April 23, 2004 -November 5, 2008 Swap Rp214,625 for US$25,000	6-month U.S. dollar LIBOR plus 2.60%	Every May 5 and November 5	16,263	—
b.	GSI	May 13, 2005 - November 5, 2010 Swap Rp832,250 for US$100,000	(i) Fixed rate of 6.96% per annum for US$50,000 and (ii) 6-month U.S. dollar LIBOR plus 2.62% per annum for US$50,000, netted with (a) 6-month U.S. dollar LIBOR per annum multiplied by US$11,750 during the period May 13, 2005 through May 13, 2008 and (b) the amount of US$11,750 on May 13, 2008. On May 14, 2008, the Company received from GSI the fixed amount of US$11,750 (equivalent to Rp109,099) related to the cross currency swap contract.	Every May 5 and November 5	64,009	54,116
c.	GSI	May 13, 2005 - November 5, 2010 Swap Rp245,000 for US$25,000	4.30% of US$25,000	Every May 5 and November 5	11,005	10,906
d.	GSI	August 22, 2005 - June 22, 2012 Swap a certain rupiah amount equivalent to US$75,000 multiplied by certain predetermined exchange rate for US$75,000	3.28% of US$75,000	Every June 22 and December 22	25,665	24,357

No.	Counter-parties	Contract Period and Swap Amount	Annual Swap Premium Rate	Swap Premium Payment Date	Amount of Swap Premium Paid/Amortized (Rp)	
					2008	2009
e.	MLCMB [ii]	September 20, 2005 - June 22, 2012 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than Rp9,500 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$25,000 multiplied by (1 - Rp9,500 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp9,500 but is less than or equal to Rp14,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$25,000 multiplied by (Rp14,000 - Rp9,500) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp14,000 to US$1 (in full amounts)	2.99% of US$25,000	Every June 22 and December 22	3,482	—
f.	MLCMB [iii]	November 16, 2005 - June 22, 2012 Swap Rp245,000 for US$25,000	5.50% of US$25,000	Every June 22 and December 22	6,406	—
g.	StandChart	January 11, 2006 - June 22, 2012 Swap Rp236,250 for US$25,000	4.78% of US$25,000	Every June 22 and December 22	12,474	11,791
h.	MLCMB [iii]	March 1, 2006 - June 22, 2012 Swap Rp229,975 for US$25,000	4.15% of US$25,000	Every June 22 and December 22	4,887	—
i.	StandChart	March 15, 2006 - June 22, 2012 Swap Rp228,550 for US$25,000	3.75% of US$25,000	Every June 22 and December 22	9,786	9,250

[i] On November 5, 2008, this contract expired and the Company received settlement gain on the cross currency swap amounting to Rp58,375.

[ii] On September 8, 2008, the Company restructured this contract into a new contract.

[iii] On August 8, 2008, the Company restructured these contracts into a new contract.

No.	Counter-parties	Contract Period and Swap Amount	Annual Swap Premium Rate	Swap Premium Payment Date	Amount of Swap Premium Paid/ Amortized (Rp)	
					2008	2009
j.	StandChart	May 12, 2006 - June 22, 2012 Swap Rp217,500 for US$25,000	3.45% of US$25,000	Every June 22 and December 22	9,004	8,510
k.	HSBC	August 8, 2006 - November 5, 2010 Swap Rp225,000 for US$25,000	4.00% of US$25,000	Every May 5 and November 5	10,184	10,145
l.	MLIB[iii]	August 8, 2008 - June 22, 2012 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to Rp8,950 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$50,000 multiplied by (1 - Rp8,950 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp8,950 but is less than or equal to Rp11,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$50,000 multiplied by (Rp11,000 - Rp8,950) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp11,000 to US$1 (in full amounts)	4.22% of US$50,000	Every June 22 and December 22	3,203	11,230
m.	MLIB	September 2, 2008 - June 12, 2013 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to Rp8,800 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount as arranged in the contract multiplied by (IDR/USD spot rate - Rp8,800) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp8,800 but is less than or equal to Rp12,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount as arranged in the contract multiplied by (Rp3,200 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp12,000 to US$1 (in full amounts)	4.10% of US$25,000 up to June 12, 2011 , and 4.10% of decreasing U.S. dollar amount as arranged in the contract up to June 12, 2013	Every June 12 and December 12	11,988	22,778

[iii] On August 8, 2008, the Company restructured these contracts into a new contract.

No.	Counter-parties	Contract Period and Swap Amount	Annual Swap Premium Rate	Swap Premium Payment Date	Amount of Swap Premium Paid/ Amortized (Rp)	
					2008	2009
n.	MLIB [ii]	September 8, 2008 - June 22, 2012 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to Rp9,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$25,000 multiplied by (1 - Rp9,000 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp9,000 but is less than or equal to Rp11,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$25,000 multiplied by (Rp11,000 - Rp9,000) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp11,000 to US$1 (in full amounts)	2.52% of US$25,000	Every June 22 and December 22	3,579	6,801
o.	DBS	September 10, 2008 - June 12, 2013 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at the scheduled settlement date is at or less than Rp8,800 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to U.S. dollar amount at scheduled settlement date multiplied by (IDR/USD spot rate - Rp8,800) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at settlement date is greater than Rp8,800 and is at or less than Rp12,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to U.S. dollar amount at scheduled settlement date multiplied by (Rp12,000 - Rp8,800) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at settlement date is greater than Rp12,000 to US$1 (in full amounts)	3.945% of US$25,000 up to June 12, 2011, and 3.945% of decreasing U.S. dollar amount as arranged in the contract up to June 12, 2013	Every June 12 and December 12	2,833	9,980

(ii) On September 8, 2008, the Company restructured this contract into a new contract.

No.	Counter-parties	Contract Period and Swap Amount	Annual Swap Premium Rate	Swap Premium Payment Date	Amount of Swap Premium Paid/ Amortized (Rp)	
					2008	2009
p.	GSI	December 16, 2008 - November 5, 2010 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to Rp11,500 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$84,000 multiplied by (IDR/USD spot rate - Rp11,500 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp11,500 but is less than or equal to Rp15,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$84,000 multiplied by (Rp3,500 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp15,000 to US$1 (in full amounts)	Upfront premium of US$9,500 (equivalent to Rp105,212) which was fully paid on December 19, 2008. The premium is amortized over the contract period.	—	1,991	55,899

All cross currency swap contracts with GSI (contracts No. b, c and d) are structured to include credit-linkage with the Company as the reference entity and with the Company's (i) bankruptcy, (ii) failure to pay on certain debt obligations or (iii) restructuring of certain debt obligations as the relevant credit events. Upon the occurrence of any of these credit events, the Company's obligations and those of GSI under these swap contracts will be terminated without any further payments or settlements being made by or owed to either party, including a payment by either party of any marked-to-market value of the swap contracts.

Currency Forward Contracts

No.	Counter-parties	Contract Period	IDR/USD Fixing Rate (in full amounts)	Settlement Dates
q.	StandChart [(iv)]	February 15, 2007 - February 20, 2008	Rp8,950 to US$1	Every month starting March 20, 2007 to February 20, 2008
r.	JPMorgan [(iv)]	April 24, 2007 - April 28, 2008	Spot rate on the settlement date	Every month starting May 25, 2007 to April 28, 2008
s.	DBS [(v)]	May 8, 2009 - August 12, 2009	Rp10,610 to US$1	August 12, 2009
t.	DBS [(v)]	May 8, 2009 - August 12, 2009	Rp10,610 to US$1	August 12, 2009
u.	DBS [(v)]	May 11,2009 - November 3, 2009	Rp10,750 to US$1	November 13, 2009

(iv) These contracts (q and r) expired on February 20, 2008 and April 28, 2008, respectively.
(v) Contracts s and t expired on August 12 and contract w, on November 13, 2009.

Interest Rate Swap Contracts

No.	Counter-parties	Contract Period	Annual Interest Swap Rate	Swap Income (Expense) Receipt Date	Amount of Swap Income (Expense) Received (Paid) (Rp)	
					2008	2009
v.	HSBC	April 23, 2008 - November 27, 2016	5.42% of US$27,037, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.45% per annum	Every April 1 and October 1 up to October 2009, and every May 27 and November 27 up to termination date	(1,784)	(4,320)
w.	HSBC	April 23, 2008 - September 29, 2019	4.82% of US$44,200, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for U.S. dollar LIBOR plus 0.35% per annum	Every January 28 and July 28 up to July 2009, and every March 29 and September 29 up to termination date	(648)	(7,309)
x.	GSI	September 2, 2008 - June 12, 2013	(8.10% - underlyer return) of US$100,000 per annum, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every June 10 and December 10 up to June 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(24,052)
y.	DBS	September 5, 2008 - June 12, 2013	5.625% of US$25,000 per annum, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every June 10 and December 10 up to December 2010, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(4,539)
z. .	DBS	October 23, 2008 - June 12, 2013	5.28% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(2,106)
aa.	BTMUFJ	December 1, 2008 - June 12, 2013	4.46% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(1,107)
ab.	BTMUFJ	December 4, 2008 - June 12, 2013	4.25% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(935)

No.	Counter-parties	Contract Period	Annual Interest Swap Rate	Swap Income (Expense) Receipt Date	Amount of Swap Income (Expense) Received (Paid) (Rp)	
					2008	2009
ac.	BTMUFJ	December 12, 2008 - June 12, 2013	4.09% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(835)
ad.	StandChart	December 19, 2008 - June 12, 2013	3.85% of US$40,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(504)
ae.	DBS	December 22, 2008 - December 12, 2012	4.02% of US$26,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(558)
af.	DBS	January 21, 2009 - December 12, 2012	3.83% of US$26,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(302)
ag.	BTMUFJ	March 2, 2009 - June 12, 2012	4.10% of US$36,500, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(627)
ah.	ING Bank N.V.	March 3, 2009 - December 12, 2011	4.0094% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	—	(521)
ai.	ING Bank N.V.	April 14, 2009 - June 12, 2011	3.75% of US$33,500, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and on June 12, 2011	—	—

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. As of December 31, 2009, commitments on capital expenditures which are contractual agreements not yet realized relate to the procurement and installation of property and equipment amounting to US$96,550 (Note 34p) and Rp1,161,738.

The significant commitments on capital expenditures are as follows:

Contract Date	Contract Description	Vendor	Amount of Contract/ Purchase Orders ("POs") Already Issued	Amount of Contract/ POs Not Yet Served
May 16, 2007	Supply of GSM Cellular Infrastructure	PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy and Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG.	US$241,875 and Rp870,336	US$14,540 and Rp108,341
May 2, 2007	Supply and Installation of Telecommunication Infrastructure	PT Huawei Tech Investment and Huawei Technologies Co. Ltd.	US$33,280 and Rp223,321	US$244 and Rp18,221
April 20, 2007	Telecommunication Equipment Supply and Service	PT Alcatel Lucent Indonesia and Alcatel Shanghai Bell Co. Ltd.	US$45,510 and Rp561,077	US$2,325 and Rp53,605
April 3, 2007	Supply of GSM Infrastructure	PT Ericsson Indonesia and Ericsson AB	US$300,534 and Rp836,754	US$835 and Rp23,869

b. On May 25, 2007, the Company and six other telecommunication operators signed a memorandum of understanding on the construction of national optical fiber network Palapa Ring for the eastern part of Indonesia ("Palapa Ring Project Phase I") wherein the Company will share 10% of the total project cost of Rp3,000,000. In addition, they also agreed to equally bear the cost of preparation and implementation ("preparation cost") of Palapa Ring Project Phase I up to the amount of Rp2,000. If the preparation cost exceeds Rp2,000, there will be further discussion among them. However, one of the telecommunication operators subsequently decided not to join the project.

On November 10, 2007, the Company and the other five telecommunication operators (including Telkom, a related party) signed the agreement on the consortium for the construction and maintenance of Palapa Ring wherein the Company agreed to bear 13.36% of the total project cost of US$225,037. This agreement replaced the previous memorandum of understanding.

Furthermore, three of the telecommunication operators also no longer joined the project. Consequently, as of December 31, 2009, the remaining telecommunication operators which still committed to this project are the Company, Telkom and Bakrie Telecom. Hence, the project's commitment is being evaluated to accommodate the change in the number of participating telecommunication operators.

As of December 31, 2009, the Company has paid the amount of US$1,503.

c. On April 27, 2007, the Company joined Asia-America Gateway Consortium ("AAG") by signing a Construction & Maintenance Agreement. AAG is a sea cable consortium which consists of 19 member companies. The Company has committed to invest US$5,000 (as of December 31, 2009, the Company has paid US$4,728) for voting interest of 0.9031%, as a member of the consortium. The capital cost incurred in connection with the engineering, provision, construction and installation of AAG shall be borne by the members proportionate to their voting interests.

d. The Company and IMM have committed to pay annual radio frequency fee over the 3G and BWA license periods, provided the Company and IMM hold the 3G and BWA licenses. The amount of annual payment is based on the payment scheme set out in Regulations No. 7/PER/M.KOMINFO/ 2/2006, No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 and No. 237/KEP/ M.KOMINFO/7/2009 dated February 8, 2006, September 1, 2009 and July 27,2009, respectively, of the MOCIT.

e. On July 20, 2005, the Company obtained facilities from HSBC to fund the Company's short-term working capital needs. These facilities were amended on May 14, 2007 to extend the expiration date to February 28, 2008. Subsequently, on December 4, 2009, these facilities were further amended to extend the expiration date to April 30, 2010.The facilities consist of the following:

- Overdraft facility amounting to US$2,000 (including overdraft facility denominated in rupiah amounting to Rp17,000). Interest is charged on daily balances at 3.75% per annum and 6% per annum below the HSBC Best Lending Rate for the loan portions denominated in rupiah and U.S. dollar, respectively.
- Revolving loan facility amounting to US$30,000 (including revolving loan denominated in rupiah amounting to Rp255,000). The loan matures within a maximum period of six months and can be drawn in tranches with minimum amounts of US$500 and Rp500 for loans denominated in U.S. dollar and rupiah, respectively. Interest is charged on daily balances at 3% per annum above the HSBC Cost of Fund Rate for the loans denominated either in rupiah or U.S. dollar.

f. In 1994, the Company was appointed as a Financial Administrator ("FA") by a consortium which was established to build and sell/lease Asia Pacific Cable Network ("APCN") submarine cable in countries in the Asia-Pacific Region. As an FA, the Company collected and distributed funds from the sale of APCN's Indefeasible Right of Use ("IRU") and Defined Underwritten Capacity ("DUC") and Occasional Commercial Use ("OCU") service.

The funds received from the sale of IRU and DUC and OCU services and for upgrading the APCN cable did not belong to the Company and, therefore, were not recorded in the Company's books. However, the Company managed these funds in separate accounts.

As of December 31, 2009, the balance of the funds (including interest earned) which are under the Company's custody amounted to US$6,567. Besides receiving their share of the funds from the sale of IRU and DUC and OCU, the members of the consortium also received their share of the interest earned by the above funds.

g. Other agreements made with Telkom are as follows:

- Under a cooperation agreement, the compensation to Telkom relating to leased circuit/channel services, such as world link and bit link, is calculated at 15% of the Company's collected revenues from such services.

The Company and Satelindo also lease circuits from Telkom to link Jakarta, Medan and Surabaya.

- In 1994, Satelindo entered into a land transfer agreement for the transfer of Telkom's rights to use a 134,925-square meter land property located at Daan Mogot, West Jakarta, where Satelindo's earth control station is currently situated. The land transfer agreement enables Satelindo to use the land for a period of 30 years from the date of the agreement, for a price equivalent to US$40,000 less Rp43,220. The term of the agreement may be extended based on mutual agreement.

  This agreement was subsequently superseded by a land rental agreement dated December 6, 2001, generally under the same terms as those of the land transfer agreement.

- In 1999, Lintasarta entered into an agreement with Telkom, whereby Telkom agreed to lease transponder to Lintasarta. This agreement has been amended several times, the latest amendment of which is based on the eighth amendment agreement dated November 5, 2008. Transponder lease expense charged to operations amounting to Rp21,806 and Rp30,255 in 2008 and 2009, respectively, is presented as part of "Operating Expenses—Cost of Services" in the consolidated statements of income.

31. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Companies manage and evaluate their operations in three major reportable segments: cellular, fixed telecommunication and MIDI. The operating segments are managed separately because each offers different services/products and serves different markets. The Companies operate in one geographical area only, so no geographical information on segments is presented.

The cellular segment currently provides the network coverage in all major cities and population centers across Indonesia by using GSM 900 and GSM 1800 technology. Its primary service is the provision of voice and data transfer which is sold through post-paid and prepaid plans.

The fixed telecommunication segment is the provider of international long-distance services, fixed wireless services, DLD services and local fixed telephony services.

The MIDI segment offers products and services which include internet, high-speed point-to-point international and domestic digital leased line broadband and narrowband services, a high-performance packet-switching service and satellite transponder leasing and broadcasting services.

Refer to Notes 2g5 and 20 for the description of type of products and services under each reporting segment.

No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.

Segment results and assets include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Expenditures for segment assets represent the total costs incurred during the period to acquire segment assets that are expected to be used for more than one year.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss which in certain respects, as explained in the table below, is measured differently from

operating profit or loss in the consolidated financial statements. The Companies' financing (including finance costs and finance income) and income taxes are managed on a group basis and are not allocated to operating segments.

Consolidated information by industry segment is as follows:

	Major Segments						
	Cellular	Fixed Telecommunication	MIDI	Inter-Segment Eliminations (1)	Total	Adjustments (2)	Consolidated
January 1, 2008							
Segment assets	35,594,557	1,667,532	4,923,560	(6,596,513)	35,589,136	(85,163)	35,503,973
Unallocated assets							9,715,950
							45,219,923
Segment liabilities	27,859,412	989,627	981,244	(5,188,499)	24,641,784	35,375	24,677,159
Unallocated liabilities							3,821,202
							28,498,361
December 31, 2008							
Operating revenues							
Revenues from external customers	14,178,922	1,744,716	2,735,495	—	18,659,133	289,296	18,948,429
Inter-segment revenues	(363,347)	363,347	472,460	(472,460)	—	—	—
Total operating revenues	13,815,575	2,108,063	3,207,955	(472,460)	18,659,133	289,296	18,948,429
Income							
Operating income	3,148,860	793,706	790,713	—	4,733,279	(11,277)	4,722,002
Interest income				—	460,089	—	460,089
Gain on change in fair value of derivatives— net				—	136,603	—	136,603
Financing cost				—	(1,858,294)	—	(1,858,294)
Loss on foreign exchange				—	(885,729)	—	(885,729)
Income tax expense—net				—	(419,830)	(65,493)	(485,323)
Amortization of goodwill				—	(227,317)	227,317	—
Others—net					(33,516)	7,919	(25,597)
Profit for the year				—	1,905,285	158,466	2,063,751
Segment assets	39,472,716	2,570,142	7,115,939	(5,375,381)	43,783,416	126,889	43,910,305
Unallocated assets							7,909,907
							51,820,212
Segment liabilities	29,574,729	1,197,315	3,795,130	(4,099,410)	30,467,764	88,960	30,556,724
Unallocated liabilities							3,527,000
							34,083,724

	Major Segments						
	Cellular	Fixed Telecommunication	MIDI	Inter-Segment Eliminations [1]	Total	Adjustments [2]	Consolidated
Other disclosures							
Capital expenditures	10,042,807	682,907	1,616,189	—	12,341,903	(56,683)	12,285,220
Depreciation and amortization	3,730,620	290,842	566,429	—	4,587,891	(32,000)	4,555,891
December 31, 2009							
Operating revenues							
Revenues from external customers	13,928,602	1,743,430	2,720,984	—	18,393,016	236,469	18,629,485
Inter-segment revenues	(133,952)	133,952	515,961	(515,961)	—	—	—
Total operating revenues	**13,794,650**	**1,877,382**	**3,236,945**	**(515,961)**	**18,393,016**	**236,469**	**18,629,485**
Income							
Operating income	1,960,490	491,595	760,930	—	3,213,015	(3,151)	3,209,864
Gain on foreign exchange—net				—	1,656,407	—	1,656,407
Interest income				—	138,951	—	138,951
Financing cost				—	(1,872,967)	—	(1,872,967)
Income tax expense—net				—	(677,265)	(104,254)	(781,519)
Loss on change in fair value of derivatives—net				—	(517,655)	30,739	(486,916)
Amortization of goodwill				—	(235,420)	235,420	—
Others—net					(150,338)	33,516	(116,822)
Profit for the year				—	1,554,728	192,270	1,746,998
Segment assets	43,858,177	2,596,665	7,799,610	(4,953,666)	49,300,786	335,589	49,636,375
Unallocated assets							5,740,700
							55,377,075
Segment liabilities	31,671,181	1,023,376	3,761,136	(3,542,963)	32,912,730	105,391	33,018,121
Unallocated liabilities							3,840,473
							36,858,594
Other disclosures							
Capital expenditures	9,658,205	577,686	1,348,658	—	11,584,549	(17,119)	11,567,430
Depreciation and amortization	4,583,550	334,214	643,626	—	5,561,390	—	5,561,390

(1) These include inter-segment assets, liabilities and revenues eliminated upon consolidation.

(2) These are adjustments to reconcile segment financial information to consolidated IFRS financial statements. Segment financial information, as reported to the chief operation decision maker, is still managed and maintained by the Companies under Indonesian GAAP. Refer to reconciliation table as set out in Note 2d for further details on the reconciling adjustments.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

a. Risk Management

The main risks arising from the Companies' financial instruments are interest rate risk, foreign exchange rate risk, equity risk, credit risk and liquidity risk. The importance of managing these risks has significantly increased in light of the considerable change and volatility in both Indonesian and international financial markets. The Company's Board of Directors reviews and approves the policies for managing these risks which are summarized below.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Companies' exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to their loans and bonds payable with floating interest rates.

The Company's policies are:

(i) *managing interest cost through a mix of fixed and variable rate debts.* The Company evaluates the fixed to floating ratio of its loans and bonds payable in line with movements of relevant interest rates in the financial markets. Based on management's assessment and market condition, new financing will be priced either on a fixed or floating rate basis, and

(ii) *managing interest rate fluctuations coming from its loans and bonds payables by entering into interest rate swap contracts.* As of December 31, 2008 and 2009, more than 70% and 50%, respectively, of the Company's debts are fixed-rated. Several interest rate swap contracts are entered to hedge floating rate U.S. dollar debts. These contracts are accounted for as transactions not designated as hedges, wherein the changes in the fair value are credited or charged directly to profit or loss for the year.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates, with all other variables held constant, of the Company's profit for the year (through the impact on floating rate borrowings which is based on LIBOR for U.S. dollar borrowings and JIBOR or Certificates of Bank Indonesia (CBI) for rupiah borrowings).

	2008	2009
Increase or (decrease) in basis points:		
U.S. dollar	(2)	2
Rupiah	(280)	(10)
Effect on profit for the year		
U.S. dollar	USD18	USD(106)
Rupiah	Rp86,757	Rp3,857

Management conducted a survey among the Company's banks to determine the outlook of the LIBOR and JIBOR or CBI interest rates until the Company's next reporting dates of March 31, 2009 and 2010. The outlook is that the LIBOR and JIBOR or CBI interest rates may move 2 and 280 basis points lower and 2 and 10 basis points higher and lower, respectively, as compared to the year-end interest rates in 2008 and 2009, respectively.

If LIBOR interest rates were 2 basis points lower and higher as compared to market levels the year ended December 31, 2008 and 2009, respectively, with all other variables held constant, the Companies' profit for the years then ended and the consolidated stockholders' equity would be Rp2,037,948 and Rp1,689,811 and Rp17,451,086 and Rp18,190,525, which are higher and lower than the actual results as of December 31, 2008 and 2009, respectively, mainly due to lower and higher interest expense on floating rate borrowings.

If JIBOR or CBI interest rates were 280 and 10 basis points lower as compared to market levels for the years ended December 31, 2008 and 2009, respectively, with all other variables held constant, the

Companies' profit for the years then ended and the consolidated stockholders' equity would be Rp2,124,510 and Rp1,694,661 and Rp17,537,648 and Rp18,195,375, which are higher than the actual results for the years ended December 31, 2008 and 2009, mainly due to lower interest expense on floating rate borrowings.

Foreign exchange rate risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Companies' exposure to exchange rate fluctuations results primarily from U.S. dollar-denominated loans and bonds payable, accounts receivable, accounts payable and procurement payable.

To manage the Companies' foreign exchange rate risks, several cross currency swap contracts and other permitted instruments, if considered necessary, are entered. These contracts are accounted for as transactions not designated as hedges, wherein the changes in the fair value are charged or credited directly to profit or loss for the year.

The Companies' accounts payable are primarily foreign currency net settlement payments to foreign telecommunications operators, while most of the Companies' accounts receivable are Indonesian rupiah-denominated collections from domestic operators.

To the extent the Indonesian rupiah depreciated further from exchange rates in effect at December 31, 2008 and 2009, the Companies' obligations under such loans and bonds payable, accounts payable and procurement payable would increase in Indonesian rupiah terms. However, the increases in these obligations would be offset in part by increases in the values of foreign currency-denominated time deposits and accounts receivable. As of December 31, 2008 and 2009, 51.42% and 43.31%, respectively, of the Company's U.S. dollar-denominated debts were insured from exchange rate risk by entering into several cross currency swap contracts.

The following table shows the Companies' consolidated U.S. dollar-denominated assets and liabilities as of December 31, 2008 and 2009:

	2008		2009	
	U.S. Dollar	Rupiah *	U.S. Dollar	Rupiah *
Assets:				
Cash and cash equivalents	370,247	4,054,207	37,114	348,875
Accounts receivable				
Trade	112,100	1,227,495	119,730	1,125,462
Others	467	5,114	58,086	546,008
Derivative assets	59,963	656,594	23,830	224,004
Other current assets	36	397	—	—
Other current financial assets	2,223	24,339	1,686	15,850
Due from related parties	756	8,278	70	658
Other non-current financial assets	1,131	12,388	1,392	13,083
Total assets	**546,923**	**5,988,812**	**241,908**	**2,273,940**
Liabilities:				
Accounts payable—trade	31,044	339,932	4,927	46,316
Procurement payable	412,301	4,514,696	310,151	2,915,419
Accrued expenses	32,903	360,284	32,345	304,047
Deposits from customers	1,010	11,059	841	7,907
Derivative liabilities	28,846	315,866	18,568	174,540
Other current liabilities	6,145	67,292	6,189	58,172
Other current financial liabilities	23	252	40	373
Due to related parties	1	11	—	—
Loans payable (including current maturities)	645,698	7,070,388	830,536	7,807,038
Bonds payable (including current maturities)	344,157	3,768,519	344,157	3,235,076
Other non-current liabilities	8,495	93,024	8,365	78,637
Other non-current financial liabilities	4,765	52,178	—	—
Total liabilities	1,515,388	16,593,501	1,556,119	14,627,525
Net liabilities position	**968,465**	**10,604,689**	**1,314,211**	**12,353,585**

* *The exchange rates (in full amounts) used to translate the U.S. dollar amounts into rupiah was Rp10,950 to US$1.00 and Rp9,400 to US$1.00 , the rupiah-dollar rates as quoted through the Indonesian Central Bank as at December 31, 2008 and 2009, respectively.*

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the U.S. dollar exchange rate, with all other variables held constant, of the Company's profit for the year.

	2008	2009
Change in U.S. dollar	6%	-3%
Effect on profit for the year	(445,397)	266,837

Management conducted a survey among the Company's banks to determine the outlook of the U.S. dollar exchange rate until the Company's next reporting dates of March 31, 2009 and 2010. The outlook is that the U.S. dollar exchange rate may strengthen and weaken by 6% and 3% as compared to the year-end exchange rate in 2008 and 2009, respectively.

If the U.S. dollar exchange rate strengthened and weakened by 6% and 3% as compared to the exchange rate as of December 31, 2008 and 2009, respectively, with all other variables held constant, the Companies' profit for the years then ended and the consolidated stockholders' equity would be Rp1,592,356 and Rp1,957,641 and Rp17,005,494 and Rp18,458,355, respectively, which are lower and higher than the actual results as of December 31, 2008 and 2009, respectively, mainly due to the consolidated foreign exchange loss and gain on the translation of U.S. dollar-denominated net liabilities.

Equity price risk

The Companies' long-term investments consist primarily of minority investment in the equity of private Indonesian companies and equity of foreign companies. With respect to the Indonesian companies in which the Companies have investments, the financial performance of such companies may be adversely affected by the economic conditions in Indonesia.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Companies will incur a loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. There are no significant concentrations of credit risk. The Companies manage and control this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept for individual customers and by monitoring exposures in relation to such limits.

The Companies trade only with recognized and creditworthy third parties. It is the Companies' policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an on-going basis to reduce the exposure to bad debts.

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the components of the consolidated statements of financial position.

	Gross Maximum Exposure [1]		Net Maximum Exposure [2]	
	2008	2009	2008	2009
Loans and receivables:				
Cash and cash equivalents	5,737,866	2,835,999	5,737,866	2,835,999
Accounts receivable				
Trade	1,340,706	1,356,697	1,328,003	1,356,697
Others	16,914	593,287	16,914	593,287
Other current financial assets	44,777	35,173	44,777	35,173
Due from related parties	42,496	7,215	42,496	7,215
Other non-current financial assets	58,357	84,160	58,357	84,160
Held-for-trading:				
Cross currency swaps	655,862	224,004	655,862	224,004
Interest rate swaps	732	—	732	—
Available-for-sale investments:				
Other long-term investments	2,730	2,730	2,730	2,730
Total	**7,900,440**	**5,139,265**	**7,887,737**	**5,139,265**

(1) *gross financial assets before taking into account any collateral held or other credit enhancements or offsetting arrangements*
(2) *gross financial assets after taking into account any collateral held or other credit enhancements or offsetting arrangements*

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the companies are unable to finance or fund their obligations that have fallen due for payment.

The Companies' liquidity requirements have historically arisen from the need to finance investments and capital expenditures related to the expansion of their telecommunications business. The Companies' telecommunications business requires substantial capital to construct and expand mobile and data network infrastructure and to fund operations, particularly during the network development stage. Although the Companies have substantial existing network infrastructure, the Companies expect to incur additional capital expenditures primarily in order to focus cellular network development in areas they anticipate will be high-growth areas, as well as to enhance the quality and coverage of their existing network.

In the management of liquidity risk, the Companies monitor and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Companies' operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. The Companies also regularly evaluate the projected and actual cash flows, including their loan maturity profiles, and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiatives. These activities may include bank loans, debt capital and equity market issues.

The table below summarizes the maturity profile of the Companies' financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

	Expected maturity as of January 1, 2008							
	Below 1 year	1-2 years	2-3 years	3-5 years	Over 5 years	Total	Unamortized/ Debt issuance cost, consent solicitation fees and discount	Carrying value as of January 1, 2008
Financial Liabilities:								
Accounts payable—trade	446,450	—	—	—	—	446,450	—	446,450
Procurement payables	6,206,649	—	—	—	—	6,206,649	—	6,206,649
Accrued expenses	1,282,939	—	—	—	—	1,282,939	—	1,282,939
Deposits from customers	40,947	—	—	—	—	40,947	—	40,947
Derivative liabilities	64,310	—	—	—	—	64,310	—	64,310
Other current financial liabilities	51,560	—	—	—	—	51,560	—	51,560
Due to related parties	—	64,850	—	—	—	64,850	—	64,850
Other non-current financial liabilities	—	279,658	—	—	—	279,658	—	279,658
Loans payable								
In rupiah	423,000	408,909	600,000	600,000	2,434,300	4,466,209	(47,373)	4,418,836
In U.S. dollar	71,387	71,387	71,387	35,693	76,767	326,621	(2,037)	324,584
Total loans payable	494,387	480,296	671,387	635,693	2,511,067	4,792,830	(49,410)	4,743,420
Bonds payable								
In rupiah	1,860,000	56,442	640,000	1,100,000	3,200,000	6,856,442	(25,343)	6,831,099
In U.S. dollar	—	—	2,817,900	—	2,348,250	5,166,150	(48,508)	5,117,642
Total bonds payable	1,860,000	56,442	3,457,900	1,100,000	5,548,250	12,022,592	(73,851)	11,948,741
Total financial liabilities	**10,447,242**	**881,246**	**4,129,287**	**1,735,693**	**8,059,317**	**25,252,785**	**(123,261)**	**25,129,524**

	Expected maturity as of December 31, 2008							
	Below and up to 1 year	> 1-2 years	> 2-3 years	> 3-5 years	Over 5 years	Total	Unamortized/ Debt issuance cost, consent solicitation fees and discount	Carrying value as of December 31, 2008
Financial Liabilities:								
Accounts payable—trade	608,754	—	—	—	—	608,754	—	608,754
Procurement payables	6,446,357	—	—	—	—	6,446,357	—	6,446,357
Accrued expenses	1,445,238	—	—	—	—	1,445,238	—	1,445,238
Deposits from customers	32,121	—	—	—	—	32,121	—	32,121
Derivative liabilities	315,866	—	—	—	—	315,866	—	315,866
Other current financial liabilities	31,022	—	—	—	—	31,022	—	31,022
Due to related parties	—	14,699	—	—	—	14,699	—	14,699
Other non-current financial liabilities	—	52,178	—	—	—	52,178	—	52,178

	Expected maturity as of December 31, 2008							
	Below and up to 1 year	> 1-2 years	> 2-3 years	> 3-5 years	Over 5 years	Total	Unamortized/ Debt issuance cost, consent solicitation fees and discount	Carrying value as of December 31, 2008
Loans payable								
In rupiah	474,446	670,000	679,933	2,075,000	684,300	4,583,679	(40,329)	4,543,350
In U.S. dollar	98,023	258,127	1,448,392	1,766,509	3,499,337	7,070,388	(229,109)	6,841,279
Total loans payable	572,469	928,127	2,128,325	3,841,509	4,183,637	11,654,067	(269,438)	11,384,629
Bonds payable								
In rupiah	56,442	640,000	1,100,000	—	4,850,000	6,646,442	(23,148)	6,623,294
In U.S. dollar	—	2,570,480	—	1,198,039	—	3,768,519	(19,755)	3,748,764
Total bonds payable	56,442	3,210,480	1,100,000	1,198,039	4,850,000	10,414,961	(42,903)	10,372,058
Total financial liabilities	**9,508,269**	**4,205,484**	**3,228,325**	**5,039,548**	**9,033,637**	**31,015,263**	**(312,341)**	**30,702,922**

	Expected maturity as of December 31, 2009							
	Below and up to 1 year	> 1-2 years	> 2-3 years	> 3-5 years	Over 5 years	Total	Unamortized/ Debt issuance cost, consent solicitation fees and discount	Carrying value as of December 31, 2009
Financial Liabilities:								
Accounts payable—trade	537,476	—	—	—	—	537,476	—	537,476
Procurement payables	5,289,782	—	—	—	—	5,289,782	—	5,289,782
Accrued expenses	1,525,561	—	—	—	—	1,525,561	—	1,525,561
Deposits from customers	22,463	—	—	—	—	22,463	—	22,463
Derivative liabilities	174,540	—	—	—	—	174,540	—	174,540
Other current financial liabilities	43,721	—	—	—	—	43,721	—	43,721
Due to related parties	—	13,764	—	—	—	13,764	—	13,764
Other non-current financial liabilities	—	6,546	—	—	—	6,546	—	6,546
Loans payable								
In rupiah	993,772	1,029,933	2,625,000	984,300	1,000,000	6,633,005	(41,642)	6,591,363
In U.S. dollar	446,487	2,509,510	1,090,597	1,992,239	1,768,204	7,807,037	(242,649)	7,564,388
Total loans payable	1,440,259	3,539,443	3,715,597	2,976,539	2,768,204	14,440,042	(284,291)	14,155,751
Bonds payable								
In rupiah	640,000	1,100,000	41,989	1,330,000	5,020,000	8,131,989	(40,712)	8,091,277
In U.S. dollar	2,206,622	—	1,028,454	—	—	3,235,076	(13,516)	3,221,560
Total bonds payable	2,846,622	1,100,000	1,070,443	1,330,000	5,020,000	11,367,065	(54,228)	11,312,837
Total financial liabilities	**11,880,424**	**4,659,753**	**4,786,040**	**4,306,539**	**7,788,204**	**33,420,960**	**(338,519)**	**33,082,441**

b. Capital Management

The Companies aim to achieve an optimal capital structure in pursuit of their business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and strong credit ratings, and maximizing stockholder value.

Some of the Companies' debt instruments contain covenants that impose maximum leverage ratios. In addition, the Company's credit ratings from the international credit ratings agencies are based on its ability to remain within certain leverage ratios. The Companies have complied with all externally imposed capital requirements.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt-to-equity ratio. The Company's objective is to maintain its debt-to-equity ratio at a maximum of 1.75 and 2.50 as of December 31, 2008 and 2009, respectively.

The Companies continue to manage their debt covenants and capital structure based on financial information determined under Indonesian GAAP. As of December 31, 2008 and 2009, the Companies' debt-to-equity ratio accounts are as follows:

	2008	2009
Long-term debts, including current maturities—gross	22,069,028	25,807,107
Interest-bearing procurement payable, which are overdue 6-month after the date of invoice	—	—
Total Debts	**22,069,028**	**25,807,107**
Equity attributable to owners of the Company	17,450,891	18,191,518
Debt-to-equity ratio	**1.26**	**1.42**

Under IFRS, the debt-to-equity ratios of the Companies are 1.26 and 1.42 for the years ended December 31, 2008 and 2009, respectively, due to reconciliation difference in the equity attributable to owners of the Company. Detailed information on this reconciliation difference is presented in the reconciliation tables in Note 2d.

c. Collateral

The loans of a subsidiary—Lintasarta, which were obtained from CIMB Niaga, are collateralized by all equipment (Note 7) purchased from the proceeds of the credit facilities and receivables (Note 5) from frame relay operations. There are no other significant terms and conditions associated with the use of collateral.

The Company itself did not hold any collateral as of December 31, 2008 and 2009.

33. ECONOMIC CONDITIONS

The operations of the Companies have been affected and may continue to be affected for the foreseeable future by the market events and economic conditions in Indonesia that are mainly characterized by volatility in currency values and interest rates, which could negatively impact economic growth. Economic improvements and recovery are dependent upon several factors, such as fiscal and monetary actions being undertaken by the Government and others, actions that are beyond the control of the Companies. The financial statements include the effects of the economic conditions to the extent they can be estimated.

34. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. On January 4 and 19, 2010, the Company collected the Palapa D-Satellite insurance claim amounting to US$58,008 (equivalent to Rp537,657) as a loss compensation for the decrease in the Satellite's useful life from 15 years to 10.77 years due to under-performance of the launch vehicle in its orbital process.

b. On January 28, 2010, the Company held an Extraordinary General Meeting of Stockholders approving the changes in the composition of the Company's Boards of Commissioners (until the closing of Annual General Meeting in 2012) and Directors (until the closing of Annual General Meeting in 2010), and amending the Articles of Association to comply with BAPEPAM—LK Rules No.IX.J.1 and IX.E.1.

c. On January 29, 2010, the Board of Commissioners replaced Michael Francis Latimer as a member of the Company's Audit Committee with Chris Kanter effective on the same date.

d. On February 1, 2010, the Company paid the first annual installment of its five-year unsecured credit facility from DBS amounting to Rp50,000 (Note 14j).

e. On March 10, 2010, based on its latest rating report, the Company's Guaranteed Notes Due 2010 and 2012 has a Ba1 (negative outlook) rating from Moody's (Notes 15b and 15e).

f. On March 15, 2010, the Company paid the first annual installment on its credit facility 2 from BCA amounting to Rp100,000 (Note 14e).

g. On March 29, 2010, the Company paid the first semi-annual installments on its COFACE Facility and SINOSURE Facility amounting to US$7,859 and US$2,210 (Notes 14g and 14h), respectively.

h. On April 13, 2010, the Company received the rating of B1 (negative outlook) from Moodys' for its Guaranteed Notes 2010 and 2012 (Note 15).

i. On April 13, 2010, the Company received the tax refund from the Tax Office amounting to Rp41,753 for the remaining tax overpayment of corporate income tax for fiscal year 2004 (Note 6).

j. On April 28, 2010, the Company made a capital injection of 18,000 Euro (in full amount) to its newly established subsidiary, Indosat Palapa Company B.V., Netherlands ("IPBV").

k. On April 28, 2010, IPBV, a new subsidiary of the Company, made a capital injection of 18,000 Euro (in full amount) to its newly established subsidiary, Indosat Mentari Company B.V., Netherlands.

l. On May 12, 2010, the Company announced that its wholly-owned subsidiary, IPBV, has mandated Citigroup Global Market Limited, Singapore Branch ("Citi") as the Sole Global Coordinator, and Citi, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and The Royal Bank of Scotland as Joint Book-runners for the offering of Guaranteed Senior Notes in the United States of America ("U.S.") pursuant to Rule 144A and in accordance with Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 for those issued outside the U.S.

m. On May 12, 2010, the Company, together with IFB and IIFB, announced the commencement by IFB and IIFB of cash tender offers to purchase for cash any or all of IFB's outstanding Guaranteed Notes due 2010 (the "2010 Notes") and IIFB's outstanding Guaranteed Notes due 2012. In addition to its offer to purchase the 2010 Notes, IFB is also soliciting, as one proposal, consents to certain proposed

INFORMASI BAGI PEMEGANG SAHAM

MODAL SAHAM (PER TANGGAL 31 DESEMBER 2009)
Modal Dasar: Rp2,000,000,000,000 terdiri dari 20,000,000,000 saham yang terdiri dari 1 saham seri A dan 19,999,999,999 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham.

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH (PER TANGGAL 31 DESEMBER 2009) 5,433,933,500 SAHAM TERDIRI DARI 1 SAHAM SERI A 5,433,933,499 SAHAM SERI B DENGAN NILAI NOMINAL Rp543,393,350,000; YAITU :
a. Pemerintah Indonesia (1 saham seri A dan 776,624,999 saham seri B)
b. Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. (3,532,056,600 saham seri B).
d. Masyarakat (1,125,251,900 saham seri B).

KEPEMILIKAN SAHAM DI ATAS 5% PER 31 DESEMBER 2009
1. Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. (65,00%)
2. Pemerintah Indonesia (14,29%)
3. Masyarakat (20,71%)

LAPORAN TAHUNAN 2009 DALAM FORMAT 20-F
Laporan ini memuat sebagian besar informasi keuangan Perusahaan yang disajikan dalam Laporan Tahunan dalam format 20-F yang akan dilaporkan ke U.S. Securities and Exchange Commission.

INFORMASI UNTUK PEMEGANG SAHAM
Pertanyaan Pemegang Saham dan publik dapat dialamatkan kepada (termasuk permintaan Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan dalam format 20-F) :

INVESTOR RELATIONS GROUP
Gedung Indosat, Lantai 2 Podium Depan
Jl. Medan Merdeka Barat No.21,
Jakarta 10110, Indonesia
Tel : (62-21) 3000 3001, 3869 615
Fax : (62-21) 3000 3757
E-mail : investor@indosat.com

SITUS INTERNET
Arsip data keuangan, informasi untuk pemegang saham, berita terbaru dan informasi umum tentang Indosat dapat diakses melalui situs http://www.indosat.com

NAMA BURSA EFEK DIMANA SAHAM INDOSAT DICATATKAN
Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bursa Efek New York/New York Stock Exchange (NYSE)

NAMA DAN ALAMAT PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

BANK KUSTODIAN UNTUK ADRS
The Bank of New York Mellon
Depository Receipt Division
101 Barclay Street
New York, New York 10286, USA
Tel. + 1 212-815-2293 (International Caller)
Fax. + 1 212-571-3050/1/2
1-888-BNY-ADRs (Toll free within USA)
E-mail: shareowners@bankofny.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT EDI Indonesia
Wisma SMR, 10th Floor
Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14350, Indonesia
Tel. (62-21) 651 5130
Fax. (62-21) 651 5131

AUDITOR INDEPENDEN
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Anggota Ernst & Young
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, 13th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5289 5000
Fax. (62-21) 5289 5555

WALI AMANAT/TRUSTEE
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Desk Investment Banking - Divisi Treasury
Gedung BRI II, 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. (62-21) 570 9060 ext. 2371-2335
Fax. (62-21) 251 1647

The Bank of New York Mellon
Global Trust Administration
Floor 21 West
101 Barclay Street
New York, New York 10286, USA
Fax. +1 212 815 5802/5803

The Bank Of New York Mellon
Global Trust Services
One Temasek Avenue
#02-01 Milenia Tower
Singapore 039192
Fax. +65 6883 0338

NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PEMERINGKAT
PT Pemeringkat Efek Indonesia
Setiabudi Atrium, 8th Floor, Suite 809-810
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 - Kuningan, Jakarta 12920
Tel. (62-21) 521 0077
Fax. (62-21) 521 0078

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010 akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2010 di Gedung Indosat

PT INDOSAT Tbk

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21
Jakarta 10110
Indonesia
Tel. (62-21) 3000 3001. 3869 615
Fax. (62-21) 3000 3757

www.indosat.com

© OPTIMA